



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025
DI
PULAU PUNJUNG**



Nomor : 28.A/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137
Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025**

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran

estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.B/T/LHP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Padang, 22 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.

Register CSFA Nomor R.00103

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang memiliki 37 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca per 31 Desember 2025;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;

- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 65 hari kalender, mulai tanggal 11 Februari s.d. 14 Maret 2026 dan 30 Maret s.d. 01 Mei 2026, berdasarkan Surat Tugas Nomor 56/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/02/2026 tanggal 09 Februari 2026 dan Surat Tugas Nomor 144/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/03/2026 tanggal 26 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	5
NERACA.....	6
LAPORAN OPERASIONAL.....	9
LAPORAN ARUS KAS.....	12
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	15
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Informasi Umum.....	16
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	20

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

A. Kerangka Ekonomi Makro.....	22
B. Kebijakan Keuangan Daerah.....	38
C. Asumsi–Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD.....	45
D. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	51

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan.....	54
B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan.....	57

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.....	68
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	73
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	73
D. Kebijakan Akuntansi.....	73

BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	
	A. Laporan Realisasi Anggaran.....	127
	B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	187
	C. Neraca.....	188
	D. Laporan Operasional.....	275
	E. Laporan Arus Kas.....	312
	F. Laporan Perubahan Ekuitas.....	319
	G. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca.....	320
BAB VI	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya.....	321
	B. Susunan Perangkat Daerah.....	324
	C. Pelaksanaan KPBU.....	328
BAB VII	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Dharma- sraya Tahun 2023-2024.....	22
Tabel 2.2	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	32
Tabel 2.3	Pengeluaran Rata-rata Kapita Per Bulan di Kabupaten Dharma- sraya Tahun 2020-2024.....	38
Tabel 2.4	Kondisi Ekonomi Makro Kab. Dharma- sraya Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	49
Tabel 2.5	Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharma- sraya Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	50
Tabel 2.6	Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025.....	53
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025.....	54
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD TA 2025.....	54
Tabel 3.3	Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharma- sraya Per SKPD Tahun Anggaran 2025.....	55
Tabel 3.4	Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharma- sraya TA 2025.....	57
Tabel 3.5	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2025.....	59
Tabel 5.1.1	Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025.....	127
Tabel 5.1.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	130
Tabel 5.1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	131
Tabel 5.1.4	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	132
Tabel 5.1.5	Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	136
Tabel 5.1.6	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024.....	140
Tabel 5.1.7	Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	143
Tabel 5.1.8	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024.....	144
Tabel 5.1.9	Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024.....	145
Tabel 5.1.10	Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	146
Tabel 5.1.11	Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	147
Tabel 5.1.12	Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024.....	148
Tabel 5.1.13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024.....	148
Tabel 5.1.14	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024.....	149
Tabel 5.1.15	Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan 2024.....	150
Tabel 5.1.16	Sumber Pendapatan Dana Treasury Defosit (TDF) Tahun 2024.....	150

Tabel 5.1.17	Rincian DAU Tahun 2025.....	151
Tabel 5.1.18	Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dan 2024.....	151
Tabel 5.1.19	Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024.....	152
Tabel 5.1.20	Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2025 dan 2024.....	152
Tabel 5.1.21	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	153
Tabel 5.1.22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dan 2024.....	154
Tabel 5.1.23	Penerimaan Lain-Lain Pendapatam yang Sah Tahun 2025 Dan 2024.....	155
Tabel 5.1.24	Penerimaan Kapitasi Puskesmas Tahun 2025 dan 2024.....	155
Tabel 5.1.25	Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	156
Tabel 5.1.26	Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	157
Tabel 5.1.27	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	157
Tabel 5.1.28	Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023.....	158
Tabel 5.1.29	Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 dan 2024.....	159
Tabel 5.1.30	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024.....	159
Tabel 5.1.31	Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan 2024.....	160
Tabel 5.1.32	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	161
Tabel 5.1.33	Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024.....	162
Tabel 5.1.34	Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024.....	164
Tabel 5.1.35	Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024.....	166
Tabel 5.1.36	Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024.....	168
Tabel 5.1.37	Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....	168
Tabel 5.1.38	Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....	170
Tabel 5.1.39	Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	170
Tabel 5.1.40	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan 2024.....	170
Tabel 5.1.41	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan 2024.....	171
Tabel 5.1.42	Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Tahun 2025 dan 2024.....	171
Tabel 5.1.43	Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 dan 2024.....	172
Tabel 5.1.44	Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2025 dan 2024.....	172
Tabel 5.1.45	Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....	172
Tabel 5.1.46	Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....	174
Tabel 5.1.47	Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024...	174
Tabel 5.1.48	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024.....	175
Tabel 5.1.49	Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 dan 2024.....	175
Tabel 5.1.50	Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP Tahun 2025 dan 2024..	175
Tabel 5.1.51	Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dan 2024.....	176

Tabel 5.1.52	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024.....	177
Tabel 5.1.53	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dan 2024.....	178
Tabel 5.1.54	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	178
Tabel 5.1.55	Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	179
Tabel 5.1.56	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024.....	180
Tabel 5.1.57	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024.....	181
Tabel 5.1.58	Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024.	181
Tabel 5.1.59	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2025...	181
Tabel 5.1.60	Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024...	182
Tabel 5.1.61	Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025.....	183
Tabel 5.1.62	Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024.....	183
Tabel 5.2.1	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	188
Tabel 5.2.2	Rincian Sisa Dana Transfer Earmark Tahun 2025.....	190
Tabel 5.2.3	Saldo Kas BLUD Tahun 2025 dan 2024	192
Tabel 5.2.4	Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 dan 2024.....	194
Tabel 5.2.5	Piutang PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024.....	195
Tabel 5.2.6	Piutang Pajak Reklame Tahun 2025.....	195
Tabel 5.2.7	Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025.....	197
Tabel 5.2.8	Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025.....	198
Tabel 5.2.9	Piutang BLUD RSUD Sungai Rumbai dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024.....	200
Tabel 5.2.10	Piutang Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	201
Tabel 5.2.11	Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 dan 2024.....	201
Tabel 5.2.12	Piutang Retribusi Sampah Tahun 2025.....	202
Tabel 5.2.13	Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2025.....	203
Tabel 5.2.14	Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025.....	204
Tabel 5.2.15	Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2025.....	207
Tabel 5.2.16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024.....	209
Tabel 5.2.17	Piutang Denda Rusunawa Tahun 2025 dan 2024.....	209
Tabel 5.2.18	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024.	207
Tabel 5.2.19	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2025.....	210
Tabel 5.2.20	Penyisihan Piutang TGR Tahun 2025.....	210
Tabel 5.2.21	Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025...	211
Tabel 5.2.22	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025.....	211
Tabel 5.2.23	Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025.....	212

Tabel 5.2.24	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	213
Tabel 5.2.25	Piutang Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 dan 2024.....	213
Tabel 5.2.26	Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025.....	214
Tabel 5.2.27	Persediaan Tahun 2025 dan 2024.....	215
Tabel 5.2.28	Persediaan per SKPD Tahun 2025 dan 2024.....	217
Tabel 5.2.29	Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	221
Tabel 5.2.30	Komponen Penambahan Nilai Aset Tetap.....	222
Tabel 5.2.31	Komponen Pengurangan Nilai Aset Tetap.....	222
Tabel 5.2.32	Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025.....	223
Tabel 5.2.33	Perhitungan Mutasi Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2025.....	224
Tabel 5.2.34	Daftar Penerimaan Digitalisasi Pembelajaran.....	229
Tabel 5.2.35	Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025.....	235
Tabel 5.2.36	Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025.....	239
Tabel 5.2.37	Perhitungan Mutasi Aset Tetap lainnya Per 31 Desember 2025.....	240
Tabel 5.2.38	Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025.....	241
Tabel 5.2.39	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025.....	243
Tabel 5.2.40	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Dharma Raya Per 31 Desember 2025.....	244
Tabel 5.2.41	Daftar Aset Tetap yang berpotensi menjadi properti investasi.....	247
Tabel 5.2.42	Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025.....	248
Tabel 5.2.43	Komponen Penambahan Nilai Aset Lainnya.....	248
Tabel 5.2.44	Komponen Pengurangan Nilai Aset Lainnya.....	249
Tabel 5.2.45	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	250
Tabel 5.2.46	Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025.....	251
Tabel 5.2.47	Rincian Aset tidak Berwujud Per 31 Desember 2025.....	251
Tabel 5.2.48	Daftar Mutasi Amortisasi Per 31 Desember 2025.....	252
Tabel 5.2.49	Perhitungan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2025.....	253
Tabel 5.2.50	Barang Yang Digunakan Pihak Lain.....	255
Tabel 5.2.51	Perhitungan Barang Yang Digunakan Pihak Lain Per 31 Desember 2025.....	255
Tabel 5.2.52	Daftar Aset Pinjam Pakai.....	256
Tabel 5.2.53	Perhitungan Aset Yang Akan Diserahkan Ke Masyarakat Per 31 Desember 2025....	257
Tabel 5.2.54	Daftar Aset Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.....	258
Tabel 5.2.55	Perhitungan Penyusutan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025.....	259
Tabel 5.2.56	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024.....	264
Tabel 5.2.57	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025.....	265
Tabel 5.2.58	Utang Belanja Tahun 2025.....	267
Tabel 5.2.59	Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024.....	268
Tabel 5.2.60	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh.....	269
Tabel 5.2.61	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Rumbai.....	270
Tabel 5.2.62	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas.....	271

Tabel 5.3.1	Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024.....	275
Tabel 5.3.2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	275
Tabel 5.3.3	Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	276
Tabel 5.3.4	Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025.....	277
Tabel 5.3.5	Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	278
Tabel 5.3.6	Perbedaan Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	278
Tabel 5.3.7	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2025.....	280
Tabel 5.3.8	Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	281
Tabel 5.3.9	Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	282
Tabel 5.3.10	Perbedaan Pendapatan Transfer Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	283
Tabel 5.3.11	Penjelasan Perbedaan Pendapatan Transfer Antara LRA dan LO Tahun 2025.....	284
Tabel 5.3.12	Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2025.....	285
Tabel 5.3.13	Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024.....	287
Tabel 5.3.14	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024.....	288
Tabel 5.3.15	Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025.....	288
Tabel 5.3.16	Penjelasan Selisih Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) antara LRA dan LO Tahun 2025.....	289
Tabel 5.3.17	Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025.....	289
Tabel 5.3.18	Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2025.....	291
Tabel 5.3.19	Selisih Belanja Persediaan LRA dan LO Tahun 2025.....	294
Tabel 5.3.20	Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2025.....	294
Tabel 5.3.21	Penyesuaian Belanja Persediaan Berasal Dari Belanja Modal Tahun 2025.....	295
Tabel 5.3.22	Penambahan Persediaan Non APBD Tahun 2025.....	296
Tabel 5.3.23	Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025.....	297
Tabel 5.3.24	Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025.....	299
Tabel 5.3.25	Penyesuaian Utang Belanja Jasa Tahun 2025.....	299
Tabel. 5.3.26	Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2025.....	300
Tabel. 5.3.27	Penyesuaian Beban Jasa BLUD Tahun 2025	301
Tabel. 5.3.28	Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2025.....	301
Tabel. 5.3.29	Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2025.....	302
Tabel 5.3.30	Penjelasan Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan Tahun 2025.....	304
Tabel. 5.3.31	Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2025.....	305
Tabel. 5.3.32	Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	306
Tabel. 5.3.33	Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2025.....	306
Tabel. 5.3.34	Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024.....	308

Tabel 5.3.35	Saldo Beban Transfer Tahun 2025 dan 2025.....	308
Tabel 5.3.36	Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025.....	309
Tabel 5.5.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....	312
Tabel 5.5.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....	313
Tabel 5.5.3	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....	314
Tabel 5.5.4	Penerimaan PFK Tahun 2025 dan 2024.....	316
Tabel 5.5.5	Penyetoran PFK Tahun 2025 dan 2024.....	316
Tabel 5.5.6	Kenaikan / Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024.....	317
Tabel 5.5.7	Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024.....	317
Tabel 6.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	322
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.....	323
Tabel 6.3	Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.....	323
Tabel 6.4	SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang.....	326
Tabel 6.5	Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih.....	328
Tabel 6.6	Timeline KPBU Prakarsa Badan Usaha (<i>Unsolicited</i>) Dharmasraya.....	328

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2.2	Grafik Tingkat Kemiskinan (Persen)	26
Gambar 2.3	Grafik Gini Rasio (Indeks).....	28
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 2.5	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya.....	31
Gambar 2.6	Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	33
Gambar 2.7	Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	35
Gambar 2.8	Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun Anggaran 2025
Lampiran 2	Pendapatan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2025
Lampiran 3	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025
Lampiran 4a	Rekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
Lampiran 4b	Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
Lampiran 4c	Rekapitulasi Pengembalian Dana BOSP PAUD Swasta BOP Reguler Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja BLUD RSUD, Puskesmas Dan Labkesda
Lampiran 6	Rekapitulasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 7	Realisasi Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025
Lampiran 8	Transfer Bagi hasil Pajak Daerah DBH Pajak ke Nagari Tahun 2025
Lampiran 9	Transfer bagi hasil retribusi DBH, Retribusi ke Nagari Tahun 2025
Lampiran 10	Laporan Realisasi Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari Tahun 2025
Lampiran 11a	Laporan DAK Fisik Tahun 2025
Lampiran 11b	Laporan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2025
Lampiran 12a	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2025
Lampiran 12b	Rekapitulasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Daftar Piutang TGR Tahun 2025
Lampiran 14	Rekap Sisa Persediaan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 15	Daftar Rincian Kapitalisasi Menjadi Aset 2025
Lampiran 16	Daftar Rincian Hibah 2025
Lampiran 17	Daftar Rincian Penambahan Reklasifikasi Aset Tetap 2025
Lampiran 18	Daftar Rincian Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap 2025
Lampiran 19	Daftar Rincian Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan 2025
Lampiran 20	Rekapitulasi Penatausahaan Aset 2025
Lampiran 21	Saldo Aset Tetap 2024 (Audited)
Lampiran 22	Penambahan Aset 2025

Lampiran 23	Pengurangan Aset 2025
Lampiran 24	Saldo Aset 2025
Lampiran 25	Daftar Tanah Yang Bersertifikat 2025
Lampiran 26	Akumulasi Penyusutan 2024 (Audited)
Lampiran 27	Akumulasi Penyusutan 2025
Lampiran 28	Nilai Buku 2025
Lampiran 29	Daftar Rincian Penghapusan Aset Lainnya 2025
Lampiran 30	Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2025
Lampiran 31	Prosedur Analitis LKPD Tahun 2025 Unaudited



BUPATI DHARMASRAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900.1.15.5/ **CGA** / BKD-2026

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pulau Punjung, **22** Mei 2026



BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Uraian	Ref	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	V.A.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.A.1.a				
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1	63.158.000.000,00	54.317.593.473,00	102,18	25.082.743.485,78
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2	73.182.745.351,00	73.178.734.847,00	99,99	65.941.537.340,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	100,00	5.347.929.006,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.a.4	5.077.200.000,00	4.436.214.917,65	87,38	11.988.036.841,01
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	108.370.246.672,79
PENDAPATAN TRANSFER	V.A.1.b.				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.A.1.b.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1.a	19.517.202.000,00	16.769.613.800,00	85,92	14.676.153.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1.b	26.633.537.500,00	26.270.721.000,00	98,64	22.402.073.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.b.1.c	499.375.747.100,00	496.572.481.339,00	99,44	512.944.707.932,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.b.1.d	157.785.892.000,00	147.718.602.081,00	93,62	166.360.138.484,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		703.312.378.600,00	687.331.418.220,00	97,73	716.383.072.416,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	V.A.1.b.2				
Dana Penyesuaian	V.A.1.b.2.a	63.389.987.000,00	63.387.406.000,0000	100,00	76.065.729.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		63.389.987.000,00	63.387.406.000,0000	100,00	76.065.729.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.A.1.b.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.3.a	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.A.1.b.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00

Uraian	Ref	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
Total Pendapatan Transfer		811.958.696.072,36	795.934.821.722,00	98,03	850.689.858.617,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	V.A.1.c				
Pendapatan Hibah	V.A.1.c.1	100.000.000,00	82.698.940,00	82,70	71.350.441,00
Pendapatan Dana Darurat	V.A.1.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	V.A.1.c.3	17.733.367.041,11	18.557.392.495,60	104,65	11.690.998.858,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	11.762.349.299,00
JUMLAH PENDAPATAN		966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48	970.822.454.588,79
BELANJA	V.A.2				
BELANJA OPERASI	V.A.2.a				
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	97,47	454.911.665.442,94
Belanja Barang	V.A.2.a.2	280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	92,29	304.013.952.063,19
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	V.A.2.a.3	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	81,27	34.253.926.757,00
Bantuan Sosial	V.A.2.a.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	793.179.544.263,13
BELANJA MODAL	V.A.2.b.				
Belanja Tanah	V.A.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.2	14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	88,53	24.237.257.450,00
Belanja Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.3	24.722.171.276,50	17.140.691.453,30	69,33	28.954.072.575,16
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.A.2.b.4	14.138.190.500,00	11.025.674.732,00	77,99	45.054.989.838,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.5	4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	99,64	3.810.397.200,00
Belanja Aset Lainnya	V.A.2.b.6	260.051.000,00	251.304.000,00	96,64	131.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	102.187.717.063,16
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	2.485.520.287,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	2.485.520.287,00
JUMLAH BELANJA		852.145.600.782,01	801.408.441.374,48	94,05	897.852.781.613,29

Uraian	Rof	Anggaran 2025 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
TRANSFER	V.A.3				
TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA					
Bagi Hasil Pajak		4.870.101.600,00	2.690.944.672,00	53,20	1.762.449.469,00
Bagi Hasil Retribusi		264.210.000,00	209.924.400,00	79,45	221.920.365,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		112.044.485.640,00	111.402.682.136,00	99,43	113.330.772.640,00
JUMLAH TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA		117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	115.315.142.464,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46	1.013.167.924.077,29
SURPLUS/(DEFISIT)	V.A.4	(2.585.069.988,55)	36.424.903.271,77	(1.409,05)	(42.345.469.488,50)
PEMBIAYAAN	V.A.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.5.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	V.A.5.a	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	100,00	46.430.539.477,05
Pencaliran Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan		4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	100,00	46.430.539.477,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.5.b				
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	V.A.5.b	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	100,00	46.430.539.477,05

Uraian	Ref	Anggaran 2026 Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2025	%	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SEBELUM KOREKSI	V.A.6.	0,00	39.009.973.260,32	0,00	4.085.069.988,55
KOREKSI SILPA	V.A.6.a	0,00	(689.849.690,00)	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	V.A.6.b	0,00	38.420.123.670,32		4.085.069.988,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Ref	2025	2024
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Subtotal		0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		38.420.123.670,32	4.085.069.988,55
Subtotal		38.420.123.670,32	4.085.069.988,55
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-Lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		38.420.123.670,32	4.085.069.988,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2024
1	2	3	4	5
1	ASET	V.C.1		
2	ASET LANCAR	V.C.1.a		
3	Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.1	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.a.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penorifmaan	V.C.1.a.3	0,00	6.925.010,00
6	Kas di BLUD	V.C.1.a.4	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
7	Kas di BOS	V.C.1.a.5	52.396.305,00	36.378.712,00
8	Kas Lainnya	V.C.1.a.6	224.425.194,00	1.054.932.769,00
9	Piutang Pajak	V.C.1.a.7	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00
10	Penyisihan Piutang Pajak		(17.317.662.827,76)	(15.864.849.434,96)
11	Piutang Pajak Netto		10.516.512.245,24	9.609.780.681,04
12	Piutang Retribusi	V.C.1.a.8	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00
13	Penyisihan Piutang Retribusi		(1.984.631.072,37)	(1.305.862.079,55)
14	Piutang Retribusi Netto		6.708.102.804,63	5.468.316.619,45
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a.9	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00
16	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	(27.646.597,30)
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		5.058.604.307,00	5.501.672.861,70
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a.10	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(3.725.797.213,34)	(3.041.699.022,11)
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto		3.410.504.222,47	3.776.793.312,42
21	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a.11	8.594.652.000,00	15.091.731.000,00
22	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.a.12	13.784.261.132,00	21.749.014.918,00
23	Piutang Pendapatan Lainnya	V.C.1.a.13	1.126.650,00	459.480,00
24	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		(5.633,25)	(2.297,40)
25	Piutang Pendapatan Lainnya Netto		1.121.016,75	457.182,60
26	Piutang Lainnya	V.C.1.a.14	0,00	0,00
27	Belanja Dibayar Dimuka	V.C.1.a.15	308.333.610,02	274.605.153,94
28	Persediaan	V.C.1.a.16	24.626.599.975,67	46.962.340.588,12
29	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 28)		111.428.814.984,10	112.519.782.305,82

No	URAIAN	Ref	BALDO 31 DES 2025	BALDO 31 DES 2024
1	2	3	4	5
30	INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.b		
31	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
32	Jumlah Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
33	Jumlah Investasi Non Permanen (31 s.d. 32)			
34	Ponyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.b.1	30.452.000.000,00	28.952.000.000,00
35	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Permanen (34 s.d. 35)		30.452.000.000,00	28.952.000.000,00
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang (33 + 36)		30.452.000.000,00	28.952.000.000,00
38				
39	ASET TETAP	V.C.1.c.		
40	Tanah	V.C.1.c.1	648.670.324.008,00	643.176.924.008,00
41	Peralatan dan Mesin	V.C.1.c.2	455.931.402.582,41	457.431.418.474,76
42	Gedung dan Bangunan	V.C.1.c.3	1.169.212.381.936,29	1.129.495.528.240,53
43	Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.1.c.4	1.651.302.675.579,92	1.511.485.488.792,33
44	Aset Tetap Lainnya	V.C.1.c.5	53.540.025.003,00	48.963.924.243,00
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.c.6	6.026.092.182,00	2.970.751.677,00
46	Akumulasi Penyusutan	V.C.1.c.7	(1.745.043.585.833,68)	(1.527.992.628.347,13)
47	Jumlah Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan (40 s.d. 46)		2.239.639.315.457,94	2.265.531.407.088,49
48				
49	DANA CADANGAN			
50	Dana Cadangan	V.C.1.d	0,00	0,00
51	Jumlah Dana Cadangan (50)		0,00	0,00
52	ASET LAINNYA	V.C.1.e		
53	Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.e.1	877.757.319,00	287.907.729,00
54	Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.2	4.808.780.277,00	4.557.476.277,00
55	Amortisasi Aset Tak Berwujud	V.C.1.e.3	(3.168.970.434,00)	(2.873.514.683,00)
56	Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	V.C.1.e.4	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00
57	Aset Lain-Lain	V.C.1.e.5	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27
58	Penyusutan Aset Lain-Lain	V.C.1.e.6	(78.264.584.980,81)	(182.859.988.190,62)
59	Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan	V.C.1.e.7	34.965.545.699,46	42.766.435.726,65
60	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	V.C.1.e.8	0,00	1.156.963.000,00
61	Jumlah Aset Lainnya (53 s.d. 60)		37.483.112.861,46	45.895.268.049,65
62				
63	JUMLAH ASET (29+37+47+61)		2.419.003.243.303,50	2.452.898.457.443,96
64				
65	KEWAJIBAN			
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.a.1	0,00	140.789.551,00
68	Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.a.2	114.887.628,67	3.032.855.895,36
69	Utang Belanja	V.C.2.a.3	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.a.4	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00
71	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s.d 70)		30.691.796.791,88	31.732.265.978,39

No	URAIAN	Ref	SALDO 31 DES 2025	SALDO 31 DES 2024
1	2	3	4	5
72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
73	Utang Jangka Panjang Lainnya	V.C.2.b	0,00	0,00
74	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (73)		0,00	0,00
75				
76	JUMLAH KEWAJIBAN (71 + 74)		30.691.796.791,88	31.732.265.078,39
77				
78	EKUITAS			
79	EKUITAS	V.C.3	2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57
80	JUMLAH EKUITAS (79)		2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57
81	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76 + 80)		2.419.003.243.303,50	2.452.898.457.443,96

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	URAIAN	Ref	2025	2024	Kenalkan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1	56.677.138.430,00	27.218.922.689,78	29.458.215.840,22	108,23
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2	77.511.074.989,89	70.063.061.076,91	7.448.013.912,78	10,63
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3	5.058.604.307,00	10.863.659.575,00	(5.805.055.268,00)	(53,44)
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	V.D.1.a.4	4.521.435.494,93	11.939.130.310,51	(7.417.694.815,58)	(62,13)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42	19,72
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1.a	15.939.581.800,00	13.843.113.000,00	2.096.468.800,00	15,14
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1.b	19.446.711.000,00	32.094.396.000,00	(12.647.685.000,00)	(39,41)
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	V.D.1.b.1.c	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00	(16.372.226.593,00)	(3,19)
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.D.1.b.1.d	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00	(18.641.536.403,00)	(11,21)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)		679.677.376.220,00	725.242.355.416,00	(45.564.979.196,00)	(6,28)
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
18	Dana Penyesuaian	V.D.1.b.2.a	63.387.406.000,00	76.065.729.000,00	(12.678.323.000,00)	(16,67)
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18)		63.387.406.000,00	76.065.729.000,00	(12.678.323.000,00)	(16,67)
20						
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.3.a	37.251.243.716,00	62.031.100.836,00	(24.779.857.120,00)	(39,95)
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	V.D.1.b.3.b	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 s.d. 22)		37.251.243.716,00	62.031.100.836,00	(24.779.857.120,00)	(39,95)
25						
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+24)		780.316.025.936,00	863.339.185.252,00	(83.023.159.316,00)	(9,62)

No	URAIAN	Ref	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6	7
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
28	Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1	41.815.422.049,70	27.250.662.781,79	14.564.759.867,9700	53,45
29	Pendapatan Dana Darurat	V.D.1.c.2	0,00	0,00		0,00
30	Pendapatan Lainnya	V.D.1.c.3	18.824.698.352,60	11.691.354.470,00	7.133.343.882,6000	0,00
31	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (28 s.d. 30)		60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,5700	55,72
32						
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+31)		984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,0100)	(3,68)
34						
35	BEBAN					
36	BEBAN OPERASIONAL					
37	Beban Pegawai	V.D.2.a	484.254.267.653,56	459.854.845.158,04	24.399.622.495,52	5,31
38	Beban Persediaan	V.D.2.b	96.092.973.602,81	100.041.870.605,60	(3.948.697.002,69)	(3,95)
39	Beban Jasa	V.D.2.c	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21	24,18
40	Beban Sewa	V.D.2.d	2.647.796.083,00	5.782.869.796,00	(3.135.073.713,00)	(54,21)
41	Beban Pemeliharaan	V.D.2.e	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)	(27,18)
42	Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.f	30.617.608.799,00	62.205.866.889,00	(31.588.258.090,00)	(50,78)
43	Beban Hibah	V.D.2.g	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)	(68,50)
44	Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Penyusutan/Amortisasi	V.D.2.i	112.915.339.350,95	183.081.156.800,42	(70.165.817.449,47)	(38,32)
46	Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.j	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16	6,44
47	Beban Transfer	V.D.2.k	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)	(0,87)
48	Beban Lain-Lain	V.D.2.l	0,00	0,00	0,00	0,00
49	JUMLAH BEBAN OPERASI (37 s.d. 48)		1.015.989.467.964,08	1.098.972.178.944,35	(82.982.710.980,27)	(7,55)
50						
51	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-49)	V.D.3	(31.265.067.804,10)	(76.606.202.888,36)	45.341.135.084,26	(59,19)
52						
53	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
54	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)	(37,31)
55	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (54 s.d. 57)		238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)	(37,31)
59						
60	Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (51+56)	V.D.5	(31.026.384.280,10)	(76.225.458.888,36)	45.199.074.608,26	(59,30)

No	URAIAN	Ref	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6	7
61	POS LUAR BIASA	V.D.6				
62	Pendapatan Luar Biasa	V.D.G.1	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Beban Luar Biasa	V.D.G.2	196.489.050,00	2.486.620.287,00	(2.289.031.237,00)	(92,09)
64	Jumlah Pos Luar Biasa (62-63)		(196.489.050,00)	(2.486.620.287,00)	2.289.031.237,00	(92,09)
65						
66	SURPLUS/DEFISIT LO (60+64)	V.D.7	(31.222.873.330,10)	(78.710.979.175,36)	47.488.105.845,26	(60,33)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
2	Arus Masuk Kas	V.E.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah		54.317.593.473,00	25.092.743.485,78
4	Penerimaan Retribusi Daerah		73.178.734.847,00	65.941.537.340,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.529.319.459,00	5.347.929.006,00
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		4.145.420.917,65	11.607.295.741,01
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		16.769.613.800,00	14.676.153.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		26.270.721.000,00	22.402.073.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		496.572.481.339,00	512.944.707.932,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		147.718.602.081,00	166.360.138.484,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		63.387.406.000,00	76.065.729.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		45.215.997.502,00	58.241.057.201,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah		82.698.940,00	71.350.441,00
15	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
16	Penerimaan Lainnya		18.557.392.495,60	11.690.998.858,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		951.745.981.854,25	970.441.713.488,79
18				
19	Arus Keluar Kas	V.E.1.b		
20	Pembayaran Pegawai		485.726.445.153,08	454.911.665.442,94
21	Pembayaran Barang		258.738.701.220,10	304.013.952.063,19
22	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
23	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
24	Pembayaran Hibah		11.090.591.943,00	34.253.926.757,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
26	Pembayaran Tak Terduga		196.489.050,00	2.485.520.287,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		2.590.944.672,00	1.762.449.469,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		209.924.400,00	221.920.355,00

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2026	TAHUN 2024
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		111.402.562.130,00	113.330.772.640,00
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s.d.29)		869.955.658.574,18	910.980.207.014,13
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-30)		81.790.323.280,07	59.461.506.474,66
32				
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
34	Arus Masuk Kas	V.E.2.a		
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		277.644.000,00	339.947.100,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		13.150.000,00	40.794.000,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d. 39)		290.794.000,00	380.741.100,00
41				
42	Arus Keluar Kas	V.E.2.b		
43	Perolehan Tanah		0,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin		12.620.746.293,00	24.237.257.450,00
45	Perolehan Gedung dan Bangunan		17.140.691.453,30	28.954.072.575,16
46	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		11.025.674.732,00	45.054.989.838,00
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.617.797.530,00	3.810.397.200,00
48	Perolehan Aset Lainnya		251.304.000,00	131.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 48)		45.656.214.008,30	102.187.717.063,16
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40-49)		(45.365.420.008,30)	(101.806.975.963,16)
51				
52	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.E.3		
53	Arus Masuk Kas	V.E.3.a		
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 62)		0,00	0,00
64				
65	Arus Keluar Kas	V.E.3.b		
66	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
67	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	0,00

No	URAIAN	Ref	TAHUN 2025	TAHUN 2024
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
74	Pembelian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
75	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
77	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s.d.76)		1.500.000.000,00	0,00
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (63-77)		(1.500.000.000,00)	0,00
79				
80	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.E.4		
81	Arus Masuk Kas	V.E.4.a		
82	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.487.435.652,00	56.445.682.997,00
83	Jumlah Arus Masuk Kas (82)		54.487.435.652,00	56.445.682.997,00
84				
85	Arus Keluar Kas	V.E.4.b		
86	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.487.435.652,00	56.453.142.290,00
87	Jumlah Arus Keluar Kas (86)		54.487.435.652,00	56.453.142.290,00
88	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83-87)		0,00	(7.459.293,00)
89				
90	Kenaikan/Penurunan Kas (31+50+78+88)		34.924.903.271,77	(42.352.928.781,50)
91	Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas		1.721.216.622,49	38.616.835.495,09
92	Saldo Awal Kas di BLUD		1.272.641.885,06	4.558.804.440,96
93	Saldo Awal Kas di Dana BOS		36.378.712,00	21.743.185,00
94	Saldo Awal Kas Lainnya		1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
95	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
96	Saldo Akhir Kas di BLUD		2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	6.925.010,00
99	Saldo Akhir Kas di Dana BOS		52.396.305,00	36.378.712,00
100	Saldo Akhir Kas Lainnya		224.425.194,00	1.054.932.769,00
101	Saldo Akhir Kas		38.420.123.670,32	4.085.069.988,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA
ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

URAIAN	Ref	2025	2024
1	2	3	4
Ekuitas Awal	V.F	2.421.166.191.465,57	2.505.772.587.186,13
Surplus/Defisit-LO		(31.222.873.330,10)	(78.710.979.175,36)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar			
a. Koreksi Persediaan		0,00	0,00
b. Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
c. Lain-lain		(1.631.871.623,85)	(5.895.416.545,20)
Ekuitas Akhir		2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan


BUPATI DHARMASRAYA
ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pembahasan rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; dan
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
30. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
31. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya;
32. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
34. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
35. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
36. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
39. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
40. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
41. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
42. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
44. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
45. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan multitafsir bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan :

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab I Pendahuluan

- A. Informasi Umum
- B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan Daerah
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Penjelasan Atas Kinerja dan Posisi Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- C. Neraca
- D. Laporan Operasional
- E. Laporan Arus Kas
- F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

- A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
- B. Susunan Perangkat Daerah
- C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Bab VII Penutup





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merumuskan arah kebijakan ekonomi yang menjadi landasan pencapaian sasaran indikator makro. Bagian ini menyajikan proyeksi kondisi ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional, nasional, maupun global. Indikator utama yang menjadi fokus meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, serta PDRB per kapita.

Adapun indikator ekonomi makro dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output atau nilai tambah dalam periode tertentu. Secara sektoral, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas produksi. Dalam penyusunan kebijakan anggaran Tahun 2025, analisis perkembangan nilai PDRB difokuskan pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB (Juta Rupiah) Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023-2024

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi		Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,466,880.92	3,935,770.00	25.98	29.49	6.52	13.52
B	Pertambangan dan Penggalian	864,192.41	799,220.00	6.48	5.99	8.80	(7.52)
C	Industri Pengolahan	686,641.94	719,790.00	5.15	5.39	6.95	4.83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,555.35	2,700.00	0.02	0.02	5.98	5.66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,389.11	1,480.00	0.01	0.01	-	6.54
F	Konstruksi	1,996,138.51	2,115,790.00	14.96	15.85	11.55	5.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,051,995.93	2,204,410.00	15.38	16.52	11.35	7.43
H	Transportasi dan Pergudangan	841,347.61	871,580.00	6.30	6.53	12.85	3.59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	136,485.21	146,660.00	1.02	1.10	9.78	7.45
J	Informasi dan Komunikasi	936,127.00	992,050.00	7.01	7.43	10.66	5.97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	299,495.91	321,740.00	2.24	2.41	5.88	7.43
L	Real Estat	300,120.44	321,880.00	2.25	2.41	12.46	7.25
M,N	Jasa Perusahaan	2,613.46	2,730.00	0.02	0.02	12.89	4.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	964,577.96	1,046,300.00	7.23	7.84	6.19	8.47





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi		Pertumbuhan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	410,772.31	431,300.00	3.08	3.23	6.51	5.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	267,540.61	287,060.00	2.00	2.15	11.69	7.30
R, S, T, U	Jasa lainnya	116,849.30	127,160.00	0.88	0.95	11.53	8.82
TOTAL		13,345,769.26	14,327,620.00	100	100	9.09	7.36

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Dharmasraya menunjukkan performa yang dinamis dengan pertumbuhan nilai nominal yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya, total nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp13.345.769,26 juta pada tahun 2023 menjadi Rp14.327.620,00 juta pada tahun 2024. Secara agregat, ekonomi daerah ini tumbuh sebesar 7,36% pada tahun 2024, meskipun angka ini menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 9,09%.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi motor penggerak utama sekaligus pilar penyokong ekonomi terbesar di Dharmasraya. Kontribusi sektor ini meningkat tajam dari 25,98% di tahun 2023 menjadi 29,49% di tahun 2024. Ketangguhan sektor ini juga terlihat dari laju pertumbuhannya yang melesat dari 6,52% menjadi 13,52% dalam setahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas yang masif atau kenaikan harga komoditas unggulan daerah di pasar. Selain pertanian, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi menempati posisi kedua dan ketiga dalam struktur ekonomi daerah. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 16,52% dengan pertumbuhan stabil di angka 7,43%. Sementara itu, sektor konstruksi menyumbang 15,85% terhadap total PDRB, meskipun laju pertumbuhannya melambat dari double digit (11,55%) di tahun 2023 menjadi 5,99% di tahun 2024.

Di tengah tren positif sebagian besar lapangan usaha, sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -7,52% pada tahun 2024. Penurunan ini cukup drastis mengingat pada tahun sebelumnya sektor ini tumbuh positif sebesar 8,80%. Hal ini berdampak pada penurunan kontribusi sektor tambang dari 6,48% menjadi 5,99%.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, struktur ekonomi Dharmasraya masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor-sektor pendukung lainnya seperti Informasi dan Komunikasi (kontribusi 7,43%) serta Administrasi Pemerintahan (kontribusi 7,84%) terus menunjukkan pertumbuhan positif yang menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dominasi sektor pertanian yang semakin menguat menegaskan posisi Dharmasraya sebagai daerah agraris, namun penurunan di sektor pertambangan memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan lapangan kerja dan pendapatan daerah.





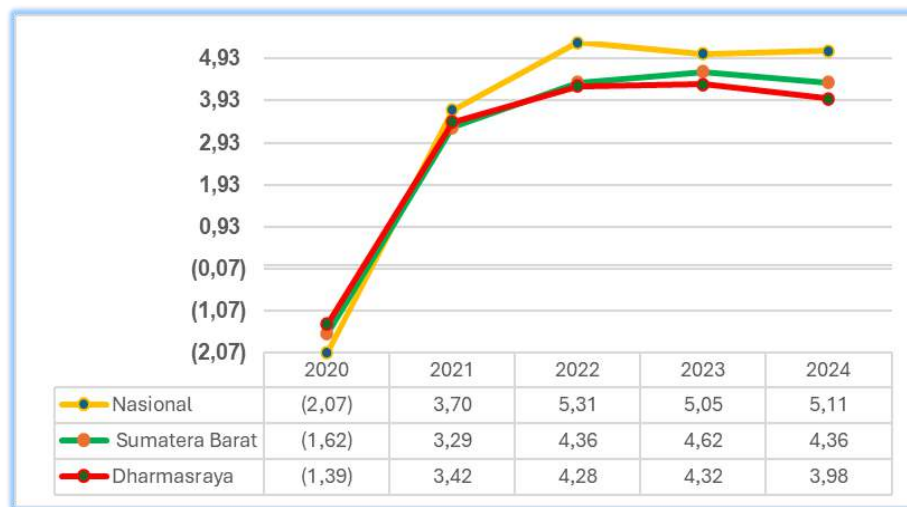
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Perbandingan Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Dharmasraya terus menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi, meskipun mengalami sedikit perlambatan laju pertumbuhan di tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi Dharmasraya pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,98%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4,32%, sementara dilihat berdasarkan posisi terhadap wilayah lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya di tahun 2024 (3,98%) berada di bawah angka pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat (4,36%) dan Nasional (5,11%). Sejak titik terendah pada tahun 2020 (-1,39%), Dharmasraya sempat melesat ke angka 4,28% di tahun 2022, namun kini menunjukkan tren yang cenderung melandai.

Dilihat berdasarkan dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya sangat dipengaruhi oleh pergerakan di lapangan usaha tertentu:

1. Sektor Penopang (*High Growth*)

- Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Sektor ini merupakan penyelamat ekonomi daerah dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan dari 6,52% (2023) menjadi 13,52% (2024).
- Sektor Administrasi Pemerintahan: Menunjukkan peningkatan aktivitas dengan pertumbuhan sebesar 8,47%, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 6,19%.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Sektor Jasa Lainnya: Tumbuh stabil di angka 8,82%, menunjukkan geliat aktivitas masyarakat yang terus meningkat.
- 2. Sektor yang Melambat/Kontraksi
 - Sektor Pertambangan dan Penggalian: Menjadi titik lemah utama dengan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar -7,52% di tahun 2024, padahal tahun sebelumnya tumbuh positif 8,80%.
 - Sektor Konstruksi: Mengalami perlambatan laju yang cukup dalam, dari 11,55% (2023) turun menjadi 5,99% (2024).
 - Sektor Transportasi dan Pergudangan: Mengalami penurunan laju pertumbuhan paling drastis, dari double digit 12,85% menjadi hanya 3,59%.
- 3. Struktur Ekonomi dan Kontribusi

Meskipun terjadi fluktuasi pada laju pertumbuhan, struktur ekonomi Dharmasraya semakin mengukuhkan diri sebagai daerah berbasis agraris:

 - Kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB meningkat dari 25,98% menjadi 29,49%. Artinya, hampir sepertiga ekonomi Dharmasraya bergantung pada sektor ini.
 - Sektor Perdagangan dan Konstruksi tetap menjadi pilar kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 16,52% dan 15,85%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 didorong kuat oleh sektor Pertanian yang tumbuh dua kali lipat lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan total daerah tertahan oleh anjloknya sektor Pertambangan dan melambatnya sektor infrastruktur (Konstruksi) serta transportasi.

Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Dharmasraya saat ini sangat bergantung pada komoditas alam. Untuk mencapai angka pertumbuhan yang setara dengan Nasional, diperlukan upaya untuk membangkitkan kembali sektor pertambangan atau mempercepat hilirisasi pada industri pengolahan yang saat ini pertumbuhannya masih melambat di angka 4,83%.

A.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikategorikan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dikatakan membaik apabila tingkat kemiskinan semakin lama semakin menurun atau mendekati nol.



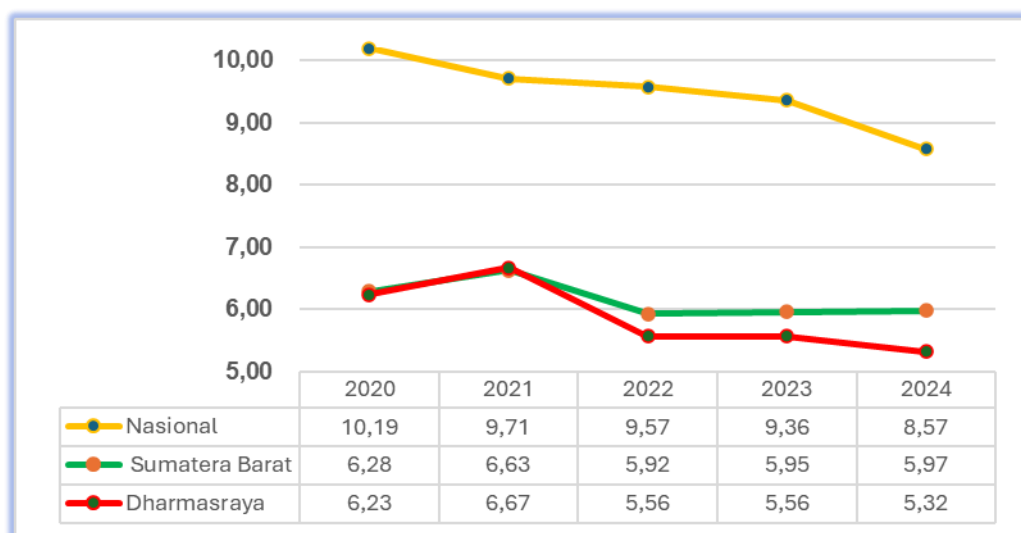


PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan (GK) pada Maret 2023 sebesar Rp. 477.580 per kapita per bulan. Artinya jika rata-rata satu orang memiliki pendapatan perkapita di bawah garis kemiskinan maka tergolong pada kelompok miskin. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Kemiskinan (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Tingkat kemiskinan Dharmasraya sedikit berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, dan cukup rendah dibandingkan capaian nasional. Meskipun begitu tingkat kemiskinan ini dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya pada periode 2020-2024 sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data di atas artinya Kabupaten Dharmasraya berhasil mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan stabil. Meskipun sempat terdampak pandemi di tahun 2021, resiliensi ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor Pertanian (sebagaimana terlihat pada data PDRB) mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 5,32% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di Dharmasraya berjalan lebih efektif dibandingkan banyak daerah lain di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Tantangan ke depan adalah menjaga tren penurunan ini tetap berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global.

A.4. Indeks Gini (Gini Rasio)/ Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.

Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang.
3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.

Tren Indeks Gini di Kabupaten Dharmasraya cukup fluktuatif namun berakhir dengan pencapaian luar biasa di tahun terakhir. Tahun 2020–2023, angka ketimpangan bergerak dinamis di kisaran 0,268 hingga 0,291. Puncak ketimpangan tertinggi dalam periode ini terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,291. Dan tahun 2024 terjadi penurunan tajam yang sangat signifikan menjadi 0,233. Ini merupakan angka ketimpangan terendah dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran di masyarakat Dharmasraya semakin merata.

Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi, Kabupaten Dharmasraya berhasil mempertahankan posisi sebagai daerah dengan tingkat ketimpangan yang sangat rendah jika dibandingkan dengan skala yang lebih luas. Terhadap Nasional, Angka Gini Dharmasraya (0,233) terpaut sangat jauh dari angka nasional yang berada di level 0,381 pada tahun 2024 dan erhadap Provinsi: Dharmasraya juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283.

Untuk lebih jelasnya gini rasio Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

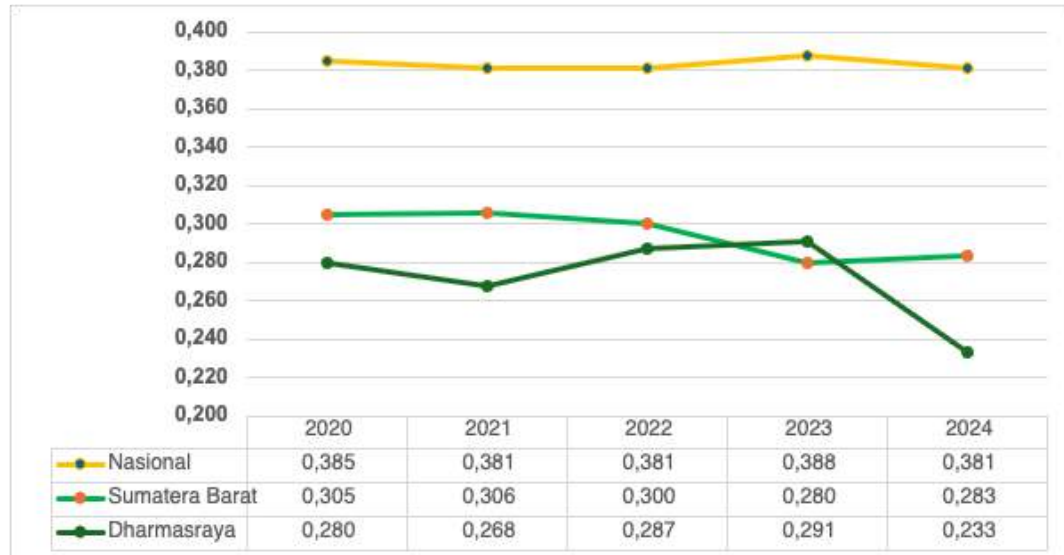




PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.3
Grafik Gini Rasio (Indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Rasio Gini Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat tergolong pada ketimpangan rendah sehingga disini dipandang bahwa pemerataan pendapatan di masyarakatnya Berbeda dengan capaian nasional yang tergolong pada ketimpangan sedang.

Artinya Kabupaten Dharmasraya tidak hanya berhasil menekan angka kemiskinan, tetapi juga sukses mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan menurunkan Indeks Gini hingga ke angka 0,233 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya kesenjangan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin.

Penurunan ketimpangan ini kemungkinan besar dipicu oleh dominasi sektor Pertanian yang tumbuh pesat sebesar 13,52% di tahun 2024. Karena sektor pertanian umumnya melibatkan banyak masyarakat di tingkat akar rumput, peningkatan di sektor ini berdampak langsung pada pemerataan pendapatan dan pengeluaran di daerah.

A.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang





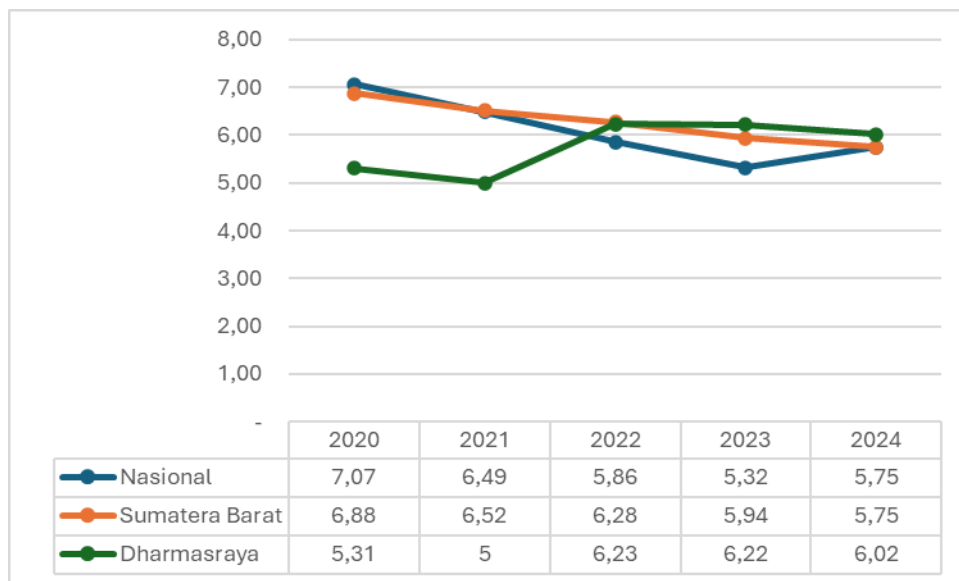
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Untuk lebih jelasnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2026

Capaian TPT di Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif terkendali dibandingkan wilayah lain pada awal periode: Tahun 2020–2021: Dharmasraya mencatatkan angka pengangguran yang rendah, bahkan sempat turun dari 5,31% menjadi 5,00%, tahun 2022–2023 terjadi lonjakan angka pengangguran yang cukup signifikan menjadi 6,23% dan bertahan di level 6,22%. Peningkatan ini berlawanan dengan tren Nasional dan Provinsi yang justru mengalami penurunan pada periode yang sama. Sedangkan tahun 2024, capaian tingkat pengangguran mulai menunjukkan tren pemulihan dengan turun ke angka 6,02%.

Meskipun sempat memiliki angka TPT terendah pada tahun 2020 dan 2021, posisi Dharmasraya di tahun 2024 memerlukan perhatian khusus. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka TPT Dharmasraya (6,02%) kini berada di atas rata-rata Nasional yang sebesar 5,75%. Sementara dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat: Senada dengan posisi nasional, TPT Dharmasraya juga sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di level 5,75%.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.

A.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- b. Pengetahuan (knowledge)
- c. Standar hidup layak (decent standard of living)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$;
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$;
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$.

Berdasarkan data, indeks pembangunan manusia di Dharmasraya terus mengalami peningkatan tanpa adanya penurunan dalam lima tahun terakhir: Awal Periode (2021), IPM Dharmasraya berada pada angka 72,65. Pertumbuhan Menengah (2022-2023) meningkat menjadi 73,19 pada 2022 dan naik kembali menjadi 73,87 pada 2023. Pencapaian tahun 2024-2025, pada tahun 2024, IPM menyentuh angka 74,82 dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 75,7 pada tahun 2025.

Dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi tahun 2024, IPM Kabupaten Dharmasraya (74,82) telah berhasil melampaui angka IPM Nasional yang berada di





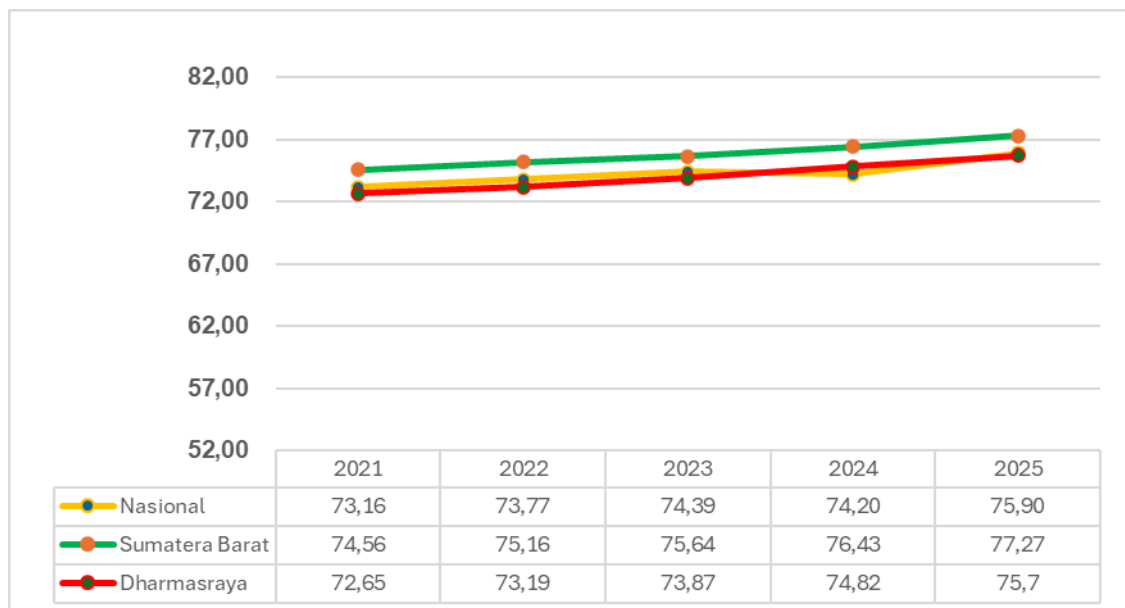
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

level 74,20. Hal ini berlanjut pada proyeksi 2025 di mana Dharmasraya (75,7) tetap kompetitif terhadap Nasional (75,90), meskipun masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (yang mencapai 77,27 pada 2025), laju peningkatan IPM Dharmasraya terlihat konsisten mengejar ketertinggalan tersebut. Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat dari Gambar 2.5.

Gambar 2.5

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2024 (indeks) di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2026

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mempertahankan tren positif dalam pembangunan kualitas manusia. Dengan status IPM yang berada di kategori 'Tinggi' (di atas 70), Dharmasraya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor pertanian berjalan selaras dengan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Dharmasraya melampaui angka IPM Nasional pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan daerah efektif dalam meningkatkan standar hidup warganya. Jika tren ini berlanjut, Dharmasraya berpotensi besar untuk segera mendekati rata-rata pencapaian IPM tingkat provinsi dalam beberapa tahun ke depan.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui Tabel 2.2 berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.2
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM	
		Urutan	Indeks
1	Kab. Kepulauan Mentawai	20	67,62
2	Kab. Pesisir Selatan	15	73,72
3	Kab. Solok	18	73,26
4	Kab. Sijunjung	14	73,73
5	Kab. Tanah Datar	9	77,04
6	Kab. Padang Pariaman	11	75,71
7	Kab. Agam	10	76,04
8	Kab. Lima Puluh Kota	17	73,43
9	Kab. Pasaman	19	71,6
10	Kab. Solok Selatan	13	74,01
11	Kab. Dharmasraya	12	75,7
12	Kab. Pasaman Barat	16	73,69
13	Kota Padang	1	84,93
14	Kota Solok	6	80,9
15	Kota Sawahlunto	8	77,05
16	Kota Padang Panjang	4	81,32
17	Kota Bukittinggi	2	83,05
18	Kota Payakumbuh	3	81,62
19	Kota Pariaman	5	81,27
20	SUMATERA BARAT		77,27

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Capaian IPM Dharmasraya naik dari 74,82 pada tahun 2024 menjadi 75,7 pada tahun 2025 dan Dharmasraya menempati urutan ke-12 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Secara indeks capaian Dharmasraya pada tahun 2025 (75,7) masih di bawah rata-rata provinsi (77,27), dan nasional (75,90).

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

- a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

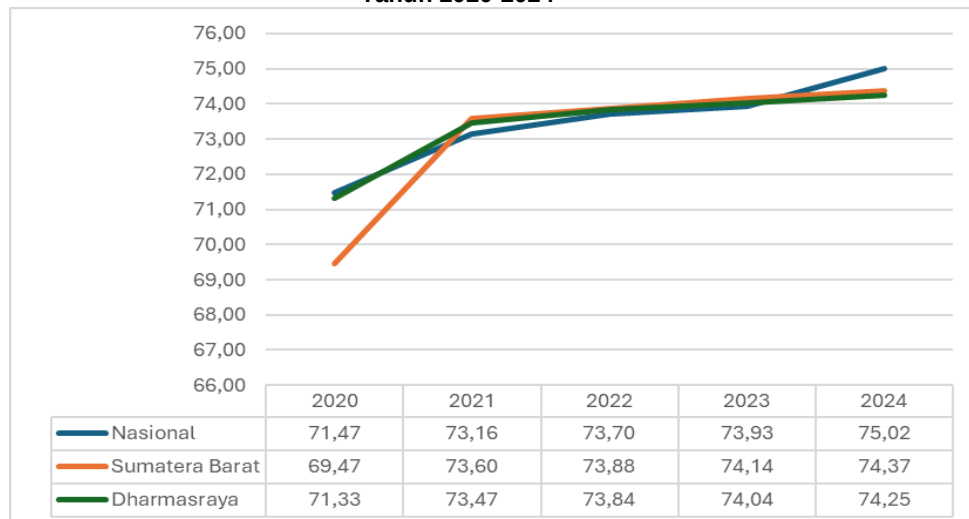
dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang sangat positif dan stabil dalam lima tahun terakhir. Angka Usia Harapan Hidup di wilayah ini terus merangkak naik setiap tahunnya. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya yaitu 71,33 tahun dan tahun 2024 yaitu 74,25 tahun. Secara akumulatif, selama periode 2020–2024, penduduk Dharmasraya mendapatkan tambahan harapan hidup sebesar 2,92 tahun.

Dilihat berdasarkan capaian terhadap Provinsi Sumatera Barat: Angka UHH Dharmasraya (74,25) hampir menyamai rata-rata provinsi yang berada di level 74,37 tahun. Selisih tipis ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di Dharmasraya sudah sejalan dengan standar provinsi. Sedangkan terhadap capaian Nasional: Meskipun masih berada di bawah angka Nasional (75,02), tren pertumbuhan UHH di Dharmasraya tergolong stabil dan terus mengejar ketertinggalan.

Perbandingan data usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 74,25 tahun, hal ini merupakan cerminan dari keberhasilan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama periode 2020-2024, walaupun relatif lambat, AHH meningkat 2,92 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peningkatan konsisten ini menjadi salah satu indikator utama yang mendorong naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya hingga mencapai level 74,82. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menjamin standar hidup sehat dan kualitas pelayanan medis bagi masyarakatnya, sehingga Dharmasraya kini memiliki pondasi sumber daya manusia yang lebih tangguh dan berumur panjang untuk mendukung pembangunan di masa depan.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya dibawah capaian nasional, tetapi tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Berdasarkan data, RLS Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 adalah 8,47 tahun, dan tahun 2023 yaitu 8,98 tahun. Dalam lima tahun terakhir, penduduk Dharmasraya mengalami peningkatan durasi mengenyam pendidikan formal sebesar 0,51 tahun. Angka 8,98 tahun pada 2023 mengindikasikan bahwa secara rata-rata masyarakat Dharmasraya telah menempuh pendidikan hampir setingkat dengan lulusan SMP/Sederajat (9 tahun).

Capaian RLS Kabupaten Dharmasraya menunjukkan performa yang sangat kompetitif jika dibandingkan capaian Nasional, dimana pada tahun 2024, RLS Dharmasraya (8,98) berhasil melampaui rata-rata RLS Nasional yang berada di angka 8,85. Lompatan signifikan terjadi antara tahun 2023 ke 2024, di mana Dharmasraya berhasil menyalip kurva nasional. Sedangkan capaian terhadap Provinsi Sumatera Barat: Meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,44 pada tahun 2024, percepatan pertumbuhan RLS di Dharmasraya menunjukkan tren yang positif untuk mengejar ketertinggalan tersebut.



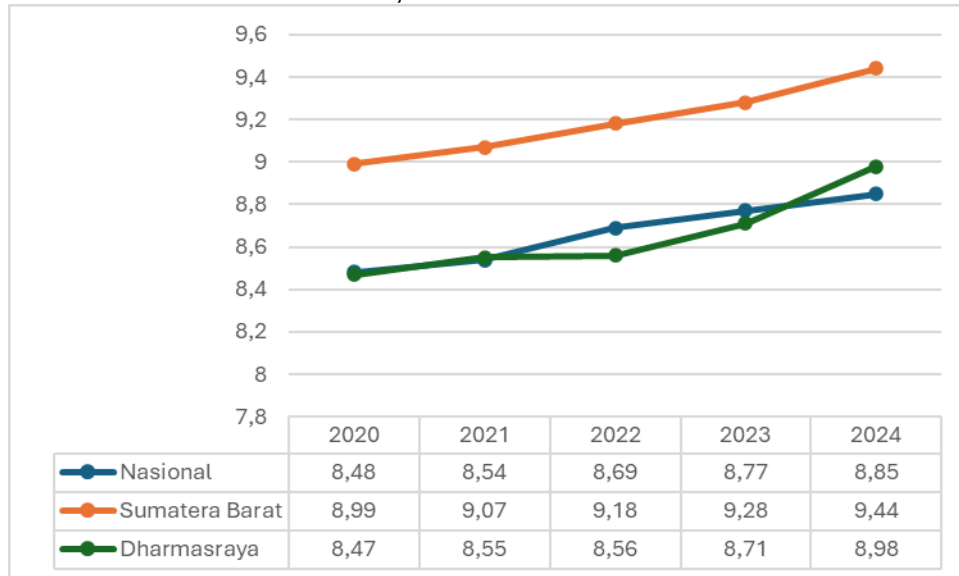


PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Dharmasraya yang mencapai 8,98 tahun pada 2024 merupakan prestasi strategis, mengingat capaian ini telah berada di atas rata-rata nasional. Keberhasilan menyentuh angka psikologis 9 tahun (setingkat lulusan SMP) menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Dharmasraya berjalan efektif. Peningkatan dimensi pengetahuan ini menjadi penggerak utama naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya yang menyentuh angka 74,82 pada 2024. Dengan masyarakat yang semakin terdidik, Kabupaten Dharmasraya memiliki modal sosial yang kuat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah di masa depan.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,71 tahun menjadi 8,98 tahun. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

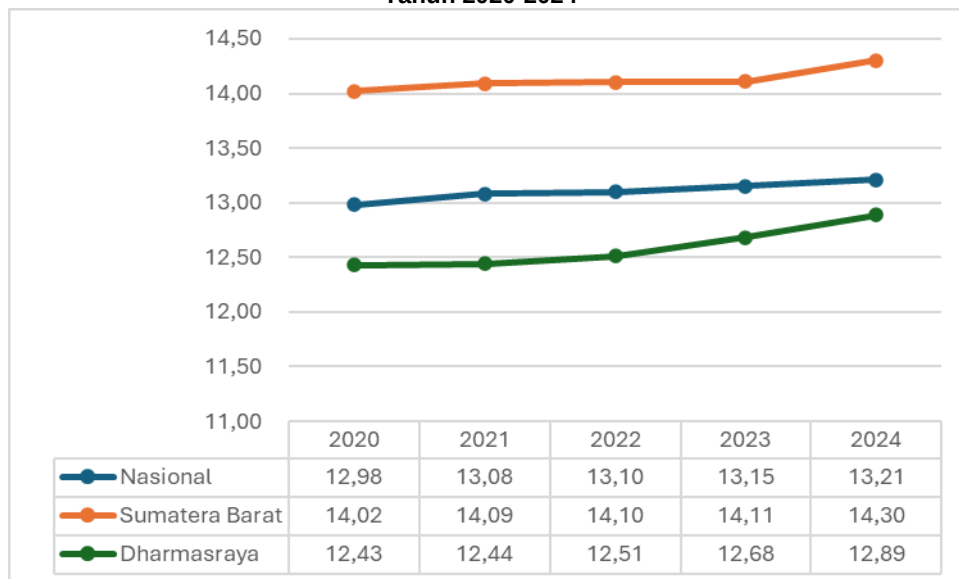
pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Indikator ini mencerminkan peluang anak-anak di Dharmasraya untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi di masa depan. Tahun 2020 HLS Dharmasraya adalah 12,43 tahun dan tahun 2025 yaitu 12,89 tahun.

Jika dibandingkan dengan Capaian Nasional dan Capaian Provinsi Sumatera Barat, Meskipun terus mengalami kenaikan, posisi HLS Dharmasraya masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang lebih luas. Capaian HLS Dharmasraya (12,89 tahun) masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,21 tahun pada tahun 2024. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, terdapat selisih yang cukup lebar dibandingkan rata-rata provinsi yang telah mencapai 14,30 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong program transisi pendidikan dari tingkat menengah atas ke perguruan tinggi.

Perbandingan data harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2026





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Dharmasraya yang menyentuh angka 12,89 tahun pada tahun 2024 atau setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2024, hal ini menandai fase transisi penting bagi kualitas pendidikan daerah. Kenaikan yang stabil ini merupakan kontributor krusial bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya yang mencapai 74,82 di tahun 2024.

Peningkatan HLS menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah pada infrastruktur sekolah dan program bantuan pendidikan telah meningkatkan motivasi belajar masyarakat. Jika tren ini dijaga dan target partisipasi di tahun 2025 dapat dioptimalkan kembali, Dharmasraya berpotensi besar untuk memperkecil gap pendidikan dengan rata-rata provinsi dan menciptakan generasi yang lebih kompetitif di tingkat perguruan tinggi

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paling rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidikan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan diadakannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Perbulan

Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan adalah jumlah rata-rata pengeluaran yang dibelanjakan oleh satu orang (per kapita) dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Berdasarkan Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya mengalami tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2020, pengeluaran tercatat sebesar Rp939.416,67, kemudian meningkat menjadi Rp943.666,67 pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut pada 2022 sebesar Rp970.833,33, dan pada 2023 menjadi Rp991.750,00. Di tahun 2024, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan mencapai angka tertinggi dalam periode lima tahun, yaitu Rp1.021.166,67.

Perbandingan data pengeluaran rata-rata per kapita perbulan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.3
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertahun	(Ribu Rupiah/Orang/ Tahun)	11.273.000	11.324.000	11.650.000	11.901.000	12.254.000
Perbulan	(Ribu Rupiah/Orang/ Bulan)	939.416.67	943.666.67	970.833.33	991.750.00	1.021.166.67

Sumber : <https://www.bps.go.id/> dan Hasil Analisis. Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan tren positif selama 2020–2024. Hal ini bisa menjadi indikator pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. meskipun perlu dilihat dalam konteks inflasi dan distribusi pendapatan.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

B.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

B.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

A. Kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

1. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah terutama pajak dan retribusi daerah. Diantaranya dengan penerbitan perda Nomor 1 tahun 2024 serta kerjasama dengan pihak pemerintah nagari sekaligus pemberian reward bagi pemerintah daerah capaian pajak tertinggi.
2. Melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui pembayaran online/aplikasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan. Dengan inovasi ini wajib pajak dapat membayar pajak kapanpun dan dimanapun. Hal ini terus dioptimalkan melalui sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak.
3. Dimulainya sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat taat pajak agar taat pajak yang dimulai dari ASN, sehingga ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar taat pajak dan tertib dalam pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pendataan potensi pajak dan wajib pajak sebagai dasar dalam penetapan besaran target pajak dan menghindari duplikasi database pajak daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Penyediaan mall pelayanan publik (MPP) terkait pelayanan pendapatan daerah dan layanan keuangan daerah lainnya.
 6. Pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB.
 7. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang akan digunakan oleh masyarakat yang disejalankan dengan optimalisasi pendapatan dari retribusi daerah.
- B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Dalam rangka optimalisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan melalui:
- 1) Penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk peningkatan deviden/ bagi hasil yang diperoleh setiap tahunnya.
 - 2) Pengelolaan aset milik daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan melalui sewa aset milik daerah kepada masyarakat/ pihak swasta, baik aset yang berupa gedung, tanah dan aset tetap lainnya.
 - 3) Kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kerja sama atau investasi untuk mengelola sumber daya alam atau aset daerah. Hal ini dapat mengoptimalkan pengelolaan serta memperluas basis pendapatan asli daerah.
- C. Lain-lain PAD Yang Sah yang dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, meliputi :
- Diantara kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2025 terkait PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yaitu:
1. Penjualan aset yang sudah tidak efisien digunakan oleh pemda, diantaranya kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan secara optimal oleh daerah.
 2. Sedangkan sumber lainnya seperti pendapatan denda, jasa giro atau lainnya berjalan seperti ketentuan yang berlaku.

B.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan transfer dari pemerintah lainnya, meskipun sebagian besar pendapatan ini sudah *given* berdasarkan data teknis dan besaran pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat/ provinsi ke kabupaten Dharmasraya. Namun terdapat upaya/ kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya:

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik dan beberapa jenis DAK Non Fisik, maka pemerintah pusat melalui Bappenas mengkoordinasikan kegiatan yang dapat diusulkan ke pemerintah pusat yang mendukung prioritas nasional sekaligus juga sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pemerintah daerah. Usulan kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Krisna berdasarkan lokasi





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

prioritas (Lokpri) yang ditetapkan. Adapun bidang yang dapat diusulkan yaitu pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang air minum, dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

2. Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit:
 - Dilakukan melalui pendataan sawit yang telah dimulai tahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025 agar alokasi sesuai dengan potensi dan produksi nyata.
 - Sebagai informasi, alokasi DBH Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar Rp 10.982.777.000,- dan turun menjadi Rp 9.701.540.000,- pada tahun 2024 (turun sekitar Rp 1.281.237.000,-).
3. Peluang Dana Insentif Daerah (DID): Dusahakan berdasarkan penilaian indikator kinerja makro maupun hasil penilaian tertentu yang dilakukan setiap tahunnya, termasuk optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Pada Perubahan APBD tahun 2025, terdapat perubahan target pendapatan pada yaitu penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp.45.536.176.082,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Adanya penurunan Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat sebesar Rp67.285.191.000,0
- Adanya kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp21.749.014.918,00

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- C. Salah satu peluang untuk mendapatkan pendanaan pembangunan dari provinsi adalah adanya bantuan keuangan dari provinsi, dimana bantuan keuangan ini dalam bentuk kegiatan yang pendanaannya sesuai prioritas provinsi dan sesuai dengan prioritas kabupaten dan kewenangan kabupaten.

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah diperoleh dari hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Adapun hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah lainnya, masyarakat, bagan/lembaga dan pihak ketiga, namun besaran yang akan diperoleh belum dapat ditentukan besarannya, karena ini sangat dipengaruhi oleh iklim perekonomian dan perkembangan dunia usaha yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah saat ini untuk mengetahui apakah target yang ditetapkan sebelumnya masih realistis atau perlu disesuaikan. Ini bisa melibatkan analisis tren pendapatan, potensi pendapatan baru, dan perubahan dalam kondisi ekonomi.
- b. Menyesuaikan anggaran belanja dan rencana keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan yang baru. Jika pendapatan diproyeksikan lebih rendah dari yang sebelumnya, maka anggaran belanja mungkin perlu dikurangi.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi baru untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan, seperti peningkatan efisiensi dalam administrasi pajak, pengenalan pajak baru, atau revisi tarif pajak dan retribusi.
- d. Memanfaatkan data dan analisis untuk membuat proyeksi pendapatan yang lebih akurat. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen data yang lebih baik.
- e. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perubahan perencanaan untuk mendapatkan masukan dan dukungan, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- f. Menetapkan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan perubahan perencanaan pendapatan dan membuat penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.
- g. Menjaga agar kebijakan fiskal tetap bertanggung jawab, termasuk menghindari defisit yang berlebihan dan memastikan bahwa perubahan tidak merugikan stabilitas keuangan daerah.

B.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Penggunaan Belanja Daerah dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

B.2.1. Belanja Operasi, terdiri dari:

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang ditentukan. Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya.

B.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B.2.4. Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol
3. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan, sehingga terdapat beberapa perubahan pada belanja.

Perubahan belanja diarahkan salah satunya dalam bentuk penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program Bupati Dan Wakil Bupati sebagai tahun awal dalam pelaksanaan program unggulan lima tahun ke depan. Beberapa program unggulan Pemerintah Daerah pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor pertanian yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan produksi jagung, pengembangan desa mandiri benih, dan bantuan bibit untuk tanaman unggulan seperti sawit dan karet.
2. Mendorong setiap nagari di Dharmasraya untuk memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal, baik dalam bentuk hasil pertanian, olahan hutan, kerajinan, hingga pangan khas daerah atau disebut *One Village One Product* (OVOP).
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Peningkatan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Pengelolaan pembiayaan tahun 2025 dialokasikan untuk:

1. Pembiayaan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penerangan jalan Umum;
2. Penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. Asumsi - Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

C.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025.

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan, antara lain pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2% dari pertumbuhan 3,5% di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2% Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income per kapita (Atlas Method)* menjadi US\$5.500-5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3-5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

C.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21-14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10,70-11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50-3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

2. Belanja Negara

Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66- 17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61-12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05-4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja NonKementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (spending better) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)-(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan blended finance).





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

C.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Barat tumbuh kuat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,32% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang lebih baik pasca pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di akhir tahun 2022. Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didorong oleh komponen PMTB dan Konsumsi Pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 terjadi pada lapangan usaha Konstruksi dan Industri Pengolahan. Tekanan inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan. Inflasi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,94% (yoy).

Peningkatan inflasi didorong oleh akselerasi konsumsi dan mobilitas masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru sehingga menyebabkan gejolak harga utamanya komoditas pangan dan transportasi. Meningkatnya transmisi penyesuaian komponen harga yang diatur pemerintah, terutama cukai hasil tembakau, juga berpengaruh pada realisasi inflasi yang lebih tinggi di akhir tahun. Lebih lanjut, berbagai faktor lain seperti curah hujan yang relatif tinggi, harga emas dunia yang fluktuatif, serta ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menjadi pendorong inflasi gabungan Sumatera Barat. Meskipun mengalami peningkatan, inflasi gabungan Sumatera Barat pada triwulan IV 2023 mencatatkan capaian lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Nasional sebesar 2,61% (yoy) serta berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy).





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Dharmasraya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

C.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

Sejalan dengan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, maka perkembangan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Selanjutnya adanya peningkatan pendapatan perkapita yang sudah mencapai 55,62 juta rupiah di tahun 2023. Namun perkembangan tersebut belum dapat menekan





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan masyarakat. Namun pada tingkat pengangguran terbuka sudah menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, atau turun dari 6,23 persen menjadi 6,22 persen.

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya Tahun 2021- 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Sasaran 2025 (RPJMD)	Sasaran 2025 (RKPD)
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	4,5	4,7	4,7
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	55,95	46,74	56
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,4	5,92	5,3
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,284	0,25	0,27
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5	6,23	6,22	5,3	5,1	5,1
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,8	72,29	75

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021- 2023 maka target pertumbuhan ekopnomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 masih dapat mengikuti target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 4,7 persen.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2023 selalu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atau sudah melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dimana target RPJMD di tahun 2025 semula ditetapkan sebesar 46,74 juta ditingkatkan menjadi 56 juta rupiah.
3. Tingkat kemiskinan, proyeksi tingkat kemiskinan juga diproyeksikan lebih baik dari target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini didasari oleh perkembangan hingga tahun 2023 yang masih memperlihatkan kecenderungan turun.
4. Gini rasio, sedangkan untuk indeks gini yang memperlihatkan ketimpangan pedapatan penduduk berbanding negatif dari indikator lainnya. Karena





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dilihat dari perkembangan hingga tahun 2023 masih belum memperlihatkan penurunan.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya terlihat cenderung meningkat. Namun dilihat dari perkembangan perkenomian beberapa tahun belakangan. Serta optimisnya tingkat penerimaan tenaga kerja baik oleh pemerintah sendiri maupun sektor swasta di Dharmasraya masih.

Sementara pada perubahan APBD Tahun 2025, terdapat perubahan beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi*				Target 2025			
		2021	2022	2023	2024	RPJMD 2025	Sasaran	Outlook	Ket.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,32	3,86	4,7	4,7	4,8	↑
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	55,62	58,71	46,74	56	60	↑
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	5,56	5,32	5,92	5,3	5,3	=
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,291	0,233	0,259	0,27	0,23	↑
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5	6,23	6,22	6,02	5,1	5,1	6	↑
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,3	73,04	74,82	72,29	75,02	75,02	=
	Usia Harapan Hidup (Tahun)*	73,47	73,84	74,04	74,25	72,24	74,55	74,55	=
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,44	12,51	12,68	12,89	12,46	13,00	13,00	=
	Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	8,55	8,56	8,71	8,98	12,46	9,10	9,10	=
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.324	11.650	11.901	12.254	12.000	12.500	12.500	=
7	Inflasi (persen)				0,49			0,45	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2025, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Keterangan : * menggunakan Usia Harapan Hidup hasil sensus 2020

Dari 7 (tujuh) indikator makro yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada perkembangan hingga tahun 2024, maka target pembangunan tahun 2025 untuk 5 (lima) indikator makro masih relevan dijadikan sebagai target pembangunan tahun 2024, sedangkan untuk IPM mengalami perubahan dibandingkan target awal, dimana target kinerja IPM awal masih didasarkan pada realisasi 2022, dengan telah keluarnya IPM tahun 2023 oleh BPS, dimana target IPM 2024 dimaksud sudah berada di atas target IPM pada RKPD 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan target 2024 yang didasarkan pada perhitungan dimensi dan dimensi pembentuk nilai IPM.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. APBD Awal Tahun 2025

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;

2. Pergeseran I APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 24 Januari 2025.

Perubahan dilakukan didasari karena adanya kekurangan anggaran belanja pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. sehingga berdampak tidak dapat terealisasinya pembayaran gaji aparatur sipil Negara di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pergeseran II APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 9 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

4. Pergeseran III APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 28 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. maka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. perlu diubah untuk ketiga kalinya.

5. Pergeseran IV APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 22 Mei 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.64/2025/KEUDA tanggal 16 Mei 2025 tentang Percepatan Realisasi APBD TA.2025 guna untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan pembangunan. peningkatan pelayanan publik. dan kesejahteraan masyarakat maka perlu didukung peningkatan konsumsi Pemerintah Daerah melalui percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah. dalam hal untuk percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025. perlu diubah untuk keempat kalinya.

6. APBD Perubahan Tahun 2025

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.

7. Pergeseran APBD setelah APBD Perubahan Tahun 2025

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
dengan penetapan tanggal 29 Desember 2025.

Perubahan dilakukan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. sebagai penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sesuai dengan instruksi Keputusan Menteri Keuangan dimaksud. perlu dilakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. pelaksanaan pembangunan. peningkatan pelayanan publik. dan kesejahteraan guru. sehingga perlu dilakukan pergeseran terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025

Uraian	JUMLAH (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD-P 2025	Pergeseran Setelah APBD-P		
	PERDA No. 7 Tahun 2024	PERBUP No. 1 Tahun 2025	PERBUP No. 3 Tahun 2025	PERBUP No. 4 Tahun 2025	PERBUP No. 6 Tahun 2025	PERDA No. 6 Tahun 2025	PERBUP No. 15 Tahun 2025	(Rp)	%
	30/12/2024	24/01/2025	09/04/2025	28/04/2025	22/05/2025	17/10/2025	29/12/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-2	10
PENDAPATAN	1.030.307.107.411.00	1.030.307.107.411.00	1.030.307.107.411.00	963.021.916.411.00	963.021.916.411.00	966.466.057.933.35	966.739.327.933.46	(63.567.779.477.54)	(6.17)
BELANJA	1.101.791.542.379.00	1.101.791.542.379.00	1.102.344.950.428.00	1.016.797.915.300.65	1.016.797.915.300.65	969.051.127.921.90	969.324.397.922.01	(132.467.144.456.99)	(12.02)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(71.484.434.968.00)	(71.484.434.968.00)	(72.037.843.017.00)	(53.775.998.889.65)	(53.775.998.889.65)	(2.585.069.988.55)	(2.585.069.988.55)	68.899.364.979.45	(96.38)
PEMBIAYAAN	71.484.434.968.00	71.484.434.968.00	72.037.843.017.00	53.775.998.889.65	53.775.998.889.65	2.585.069.988.55	2.585.069.988.55	(68.899.364.979.45)	(96.38)
SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp966.739.327.933,46 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp136.947.264.820,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp811.958.696.072,35 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp17.833.367.041,11.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp969.324.397.922,01 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp 792.360.152.082,51
- Belanja Modal Rp 58.010.448.699,50
- Belanja Tidak Terduga Rp 852.145.600.782,01
- Belanja Transfer Rp 117.178.797.140,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah selama Tahun 2025 sebesar Rp(2.585.069.988,55) akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp4.085.069.988,55 dan digunakan untuk Penyertaan Modal di Bank Nagari sebesar Rp1.500.000.000,00.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	REALISASI	%
Pendapatan	966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48
Belanja	969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46
Surplus/Defisit	(2.585.069.988,55)	36.424.903.271,77	(1.409,05)

Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp952.036.775.854,25 atau sebesar 98,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp966.739.327.933,46. Adapun rincian realisasi Pendapatan Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD TA 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	85.100.000,00	112.527.480,00	132,23
2	Dinas Kesehatan	69.633.915.351,00	69.727.472.057,00	100,13
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.192.700.000,00	2.083.941.452,00	95,04





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	296.500.000,00	312.980.700,00	105,56
5	Dinas Pangan Perikanan	75.000.000,00	49.590.000,00	66,12
6	Dinas Lingkungan Hidup	318.600.000,00	372.080.000,00	116,79
7	Dinas Perhubungan	110.000.000,00	103.225.000,00	93,84
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67
9	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	87.200.000,00	101.460.000,00	116,35
10	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. pemuda dan Olahraga	5.500.000,00	4.850.000,00	88,18
11	Dinas Pertanian	227.000.000,00	241.696.000,00	106,47
12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	12.681.000,00	90,71
13	Badan Keuangan Daerah	893.551.682.582,46	878.736.554.165,25	98,34
14	Sekretariat Daerah	110.000.000,00	146.600.000,00	133,27
15	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
16	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
17	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	2.250.000,00	112,50
18	Kecamatan Sungai Rumbai	3.900.000,00	7.768.000,00	199,18
19	Kecamatan IX Koto	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50
20	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	850.000,00	34,00
21	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50
	Jumlah	966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48

Selanjutnya realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp915.611.872.582,48. atau 94,46% dari nilai anggaran sebesar Rp 969.324.397.922,01. Adapun rincian realisasi Belanja Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	327.075.279.465,39	315.934.199.800,64	96,59
2	Dinas Kesehatan	254.546.703.649,57	248.326.530.196,29	97,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	31.147.690.854,00	22.326.624.992,00	71,68
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.956.178.851,65	5.796.541.675,00	97,32
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.120.513.672,00	7.706.704.947,00	94,90
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.178.809.725,00	3.085.634.178,72	97,07



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2025 (Rp)	%
7	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	11.041.220.153,00	9.473.386.706,24	85,80
8	Dinas Pangan Perikanan	5.042.434.221,00	4.859.511.927,59	96,37
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.544.139.251,00	6.204.667.759,00	94,81
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.353.714.299,00	3.241.755.417,00	96,66
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.284.356.312,00	4.112.944.807,00	96,00
12	Dinas Perhubungan	23.162.429.698,00	14.085.949.737,00	60,81
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.937.696.892,40	4.815.349.182,00	97,52
14	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.871.157.189,00	3.566.730.527,00	92,14
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.836.141.038,00	2.783.126.819,00	98,13
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	9.784.701.365,00	8.361.860.758,00	85,46
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.376.598.080,00	3.281.377.280,00	97,18
18	Dinas Pertanian	16.155.034.064,00	15.052.299.542,00	93,17
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.019.247.301,00	4.917.401.891,00	97,97
20	Inspektorat Kabupaten	6.486.094.838,00	5.958.367.966,00	91,86
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.321.239.481,00	4.189.438.810,00	96,95
22	Badan Keuangan Daerah	132.703.784.865,00	127.421.457.245,00	96,02
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.287.451.420,00	5.132.744.814,00	97,07
24	Sekretariat Daerah	31.470.228.597,00	27.032.725.740,00	85,90
25	Sekretariat DPRD	38.828.290.546,00	37.907.823.708,00	97,63
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.116.292.429,00	2.054.792.411,00	97,09
27	Kecamatan Sitiung	1.898.247.255,00	1.853.476.012,00	97,64
28	Kecamatan Koto Baru	1.928.089.411,00	1.873.883.513,00	97,19
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1.616.082.047,00	1.570.479.407,00	97,18
30	Kecamatan IX Koto	1.245.340.431,00	1.202.069.515,00	96,53
31	Kecamatan Timpeh	1.282.898.250,00	1.150.382.108,00	89,67
32	Kecamatan Koto Salak	1.198.909.454,00	1.161.300.501,00	96,86
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	95,11
34	Kecamatan Koto Besar	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	97,39
35	Kecamatan Padang Laweh	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	96,30
36	Kecamatan Tiumang	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	97,21
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.880.758.603,00	3.732.793.386,00	96,19
	Jumlah	969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas, maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN	966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48	(14.702.552.079,21)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	514.597.876,65
PENDAPATAN TRANSFER	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	98,03	(16.023.874.350,35)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	806.724.394,49
BELANJA	969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46	(53.712.525.339,53)
BELANJA OPERASI	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	(36.804.413.766,33)
BELANJA MODAL	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	(12.354.234.691,20)
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	(1.578.510.950,00)
TRANSFER	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	(2.975.365.932,00)
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.585.069.988,55)	36.424.903.271,77	(1.409,05)	39.009.973.260,32
PEMBIAYAAN				-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.085.069.988,55	4.085.069.988,55	100	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100	-
PEMBIAYAAN NETTO	2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	100	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	39.009.973.260,32	0.00	39.009.973.260,32

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah antara lain:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan.
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, akan dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, pengusaha maupun masyarakat.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas masih kurang besar dibandingkan kebutuhan belanja yang disediakan;
2. Belum optimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam upaya efisiensi penggunaan belanja atas dana yang disediakan dalam anggaran;
3. Masih kurang pahamiannya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia melalui skala prioritas anggaran;
2. Peningkatan penyerapan dana masing-masing SKPD melalui mekanisme pencairan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2025 masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2025

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
1	1 01 01	DINAS PENDIDIKAN				
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	123.200.000.00	73.431.950.00	59.60	Karena keterlambatan pemakaian Kendaraan Dinas dalam mengajukan SPJ dan diajukan di akhir tahun dan GU tidak mencukupi untuk membayarkan SPJ tersebut.
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.793.800.00	4.520.000.00	66.53	Ketersediaan waktu yang tidak mencukupi sehingga tidak terlaksananya kegiatan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.024.000.00	1.970.000.00	28.05	Dikarenakan kegiatan ini dianggarkan pada anggaran perubahan. sehingga Perjalanan Dinas yang direncanakan untuk Koordinasi ke Propinsi tidak terlaksana di Akhir tahun.
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	564.573.100.00	272.829.900.00	48.32	Belanja Penghargaan guru Berprestasi berupa Umroh belum bisa dibayarkan di tahun 2025. yang realisasi akan dibayarkan tahun 2026.
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	13.497.900.00	8.766.900.00	64.95	Efisiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	6.900.000.00	1.900.000.00	27.54	Efisiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.870.000.00	2.420.000.00	35.23	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan monitoring ke lapangan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	22.044.450.00	16.443.300.00	74.59	keterlambatan dalam pelaksanaan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	4.810.000.00	3.310.000.00	68.81	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan Koordinasi ke Provinsi
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis. Pelatihan. dan/Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.458.800.00	966.000.00	27.93	Keterbatasan waktu untuk melaksanakan Koordinasi ke Provinsi
2	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG				
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.250.000.00	96.426.080.00	43.39	Belum optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh belum dilaksanakannya pembayaran pajak beberapa kendaraan dinas pada UPT ALKAl karena adanya kewajiban denda pajak kendaraan dari tahun sebelumnya yang masih dalam proses penyelesaian.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	62.200.000.00	22.113.400.00	35.55	Realisasi anggaran belum optimal karena pembayaran KIR kendaraan dinas pada UPT ALKAl dan kendaraan operasional lainnya masih dalam proses penyelesaian.
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar	249.650.800.00	171.379.050.00	68.65	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Perizinan Alat Besar merupakan kegiatan operasional UPT ALKAl. Belanja pemeliharaan alat berat tidak direalisasikan seluruhnya karena pelaksanaan pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan riil alat besar. sehingga tidak seluruh alokasi anggaran digunakan.
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300.000.000.00	199.816.000.00	66.61	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi. dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdapat tiga pekerjaan.yaitu: 1. Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kelembagaan UPT SPAM; 2. Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Koto Baru. WTP Sitiung. dan WTP Sungai Duo dengan anggaran sebesar Rp100.000.000; 3. Penyusunan Perencanaan Peningkatan SPAM WTP Pulau Sawah dan WTP Batang Mimpi. Dari ketiga pekerjaan tersebut. terdapat satu pekerjaan yang belum terlaksana. yaitu Penyusunan Studi Kelayakan Peningkatan Kelembagaan UPT SPAM. karena laporan akhir masih dalam proses penyempurnaan dan finalisasi oleh penyedia jasa sesuai dengan masukan hasil pembahasan.
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	2.750.000.00	1.238.800.00	45.05	Pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pekerjaan Jaringan Perpipaan (Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Koto Baru) tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran Tahun 2025. Meskipun pekerjaan fisik tidak terlaksana. belanja pendukung kegiatan tetap direalisasikan dan digunakan untuk menunjang sub kegiatan lainnya. meskipun pengembangan jaringan perpipaan SPAM Koto Baru tertunda pada tahun 2025. pemanfaatan anggaran belanja pendukung tetap produktif dan mendukung kelanjutan program strategis di bidang penyediaan air bersih.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.903.144.045.00	980.228.700.00	16.61	Sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi, dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran total sebesar Rp5.903.144.045.00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran yang tercatat sebesar Rp980.228.700.00, yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan ubahsui bangunan gedung, dan kegiatan ini telah terlaksana seluruhnya sesuai rencana. Sementara itu, terdapat belanja untuk Retensi Masjid Agung sebesar Rp4.891.202.700.00 yang tidak terealisasi pada tahun anggaran ini. Dengan demikian, meskipun sebagian besar anggaran tidak direalisasikan, kegiatan utama rehabilitasi, renovasi, dan ubahsui bangunan strategis tetap terlaksana secara penuh sesuai target yang direncanakan.
3	1.04.02	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.297.875.00	1.618.400.00	70.43	Untuk Mengidentifikasi lokasi bencana memerlukan akurasi tinggi, namun sering terbentur realitas di lapangan. Bencana juga terjadinya bersifat dinamis.
4	1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.310.700.00	67.674.337.00	56.72	Belum terealisasinya penambahan daya listrik.
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	6.940.000.00	2.775.000.00	39.99	Karena tidak ada perbaikan barang inventperalatan dan mesin yang rusak dan dapat ditingkatkan kelayakan pakainya sehingga terjadi efisiensi dan Penghematan anggaran
5	1.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.800.016.00	10.917.000.00	47.88	Karena diakhir tahun tidak ada bencana sehingga terjadinya efisiensi Anggaran
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	2.962.500.00	2.200.000.00	74.26	Efisiensi Anggaran pada Biaya perjalanan dinas dan BBM



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
6	1.06.02	DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000.00	4.277.500.00	20.37	Pengembalian belanja biaya pemeliharaan pada hasil pemeriksaan BPK bulan Desember 2025 sebesar Rp.13.010.000.-
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja	200.000.000.00	108.243.000.00	54.12	1 Kali kegiatan tidak terlaksana karena bertepatan dengan ulang tahun Dharmasraya. sehingga beberapa unsur TPPS menyesuaikan jadwal
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	416.000.000.00	288.500.000.00	69.35	Kegiatan terlaksana sesuai dengan DPA. namun Pembayaran Transportasi Peserta tidak maksimal dengan sistem SIPD yang non tunai
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya	24.300.000.00	16.640.000.00	68.48	1 kali Kegiatan tidak terlaksana karena terkendala waktu pelaksanaan (Minggu ke-2 Desember 2025)
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	105.600.000.00	990.000.00	0.94	Tidak Adanya Pihak Penyedia atau Vendor Melalui e-Katalog sehingga Kegiatan tidak dapat dilaksanakan
7	2.15.01	DINAS PERHUBUNGAN				
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.500.000.00	0.00	0.00	Tidak terealisasi Kegiatan Penyediaan bahan Logistik terkendala karena Pihak penyedia Makanan dan Minuman belum menggunakan E purchasing sehingga menghambat dalam proses pengadaan Barang pada sub kegiatan tersebut
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	16.911.901.370.00	8.303.490.549.00	49.10	Realisasi sub kegiatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan khususnya Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sampai dengan akhir periode pelaporan belum terealisasi secara optimal Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses review dan pendampingan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana Proyek KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya. sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan. skema pembiayaan. serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
8	2.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.995.000.00	10.935.000.00	64.34	Karena perpindahan kadis pada pertengahan juli. dan dagantikan oleh Asisten I sebagai Plt Kadis . sehingga Kendaraan Dinas jarang digunakan karena PLt.sebagai asisten I punya kendaraan Operasional sehingga terjadi Efisiensi anggaran
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.212.500.00	19.430.600.00	49.55	Terjadinya Efisiensi anggaran Karena 1 Kendaraan Dinas Pindah ke Sekretariat Daerah maka biaya pemeliharaannya tidak terpakai
9	2.17.01	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL. MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.965.000.00	8.237.000.00	58.98	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10.830.000.00	0.00	0.00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Koperasi	157.984.750.00	0.00	0.00	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	11.965.400.00	8.637.388.00	72.19	
10	2.19.01	DINAS KEBUDAYAAN. PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Yang Berprestasi Dan/Atau Berjasa Dalam Memajukan Potensi Pemuda	416.469.100.00	303.142.264.00	72.79	Adanya Efisiensi Anggaran Pada APBD perubahan sehingga kegiatan pemilihan uda uni duta wisata dan putri otonomi belum dapat dilaksanakan
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan. Pengadaan. Pemanfaatan. Pemeliharaan. Dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat Kabupaten/Kota	764.903.632.00	504.382.196.00	65.94	Adanya Efisiensi anggaran karena kegiatan Sport Talent sebahagian anggarannya ada pada Sekretariat Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	63.575.000.00	37.810.800.00	59.47	Kegiatan atletik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Efisiensi Anggaran
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	529.360.700.00	358.972.980.00	67.81	Kegiatan jalan santai dan sepeda santai tidak dilaksanakan karena sepenuhnya karena Efisiensi Anggaran
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.745.805.382.00	1.173.678.339.00	67.23	Anggaran dana hibah tidak termasuk dalam Renstra dan renja SKPD. Selain itu, juga perlu adanya pengkajian ulang Regulasi atau Aturan tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok masyarakat atau kelompok Hukum adat
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	93.711.750.00	67.790.900.00	72.34	Efisiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
11	2.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.000.000.00	3.300.000.00	66.00	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
12	3.27.02	DINAS PERTANIAN				
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman	361.399.000.00	139.011.019.00	38.46	Untuk pengadaan bibit belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya bibit siap salur sesuai berita acara survei tanggal 13 November 2025
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	456.641.400.00	1.010.000.00	0.22	Pendampingan sertifikasi ISPO kelompok tani tidak jadi dilaksanakan, karena telah dilaksanakan oleh provinsi menggunakan pendanaan DBH provinsi
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	101.243.500.00	3.696.000.00	3.65	Pembukaan jalan Usaha Tani tidak Jadi terlaksana karena efisiensi anggaran pemerintah daerah Kab. Dharmasraya



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
13	2.07.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.500.000.00	4.538.400.00	69.82	Kendaraan dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2025. Yakni Roda empat ada 2 unit dan Roda dua ada 2 Unit. maka pencapaiannya hanya 70%. sedangkan untuk pagu penganggarnya mempedoman anggaran tahun sebelumnya.
14	4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	179.630.000.00	107.445.224.00	59.81	Efisiensi anggaran dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.675.000.00	58.432.802.00	69.83	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	31.000.000.00	22.157.399.00	71.48	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	835.049.000.00	408.725.287.00	48.95	Adanya efisiensi anggaran sehingga untuk cetak plakat dan penggandaan tidak bisa dilaksanakan.
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	366.575.000.00	212.659.265.00	58.01	Keterbatasan waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa verifikasi data dan cek langsung ke lapangan karena dana hibah baru ada di anggaran perubahan
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.569.242.850.00	4.517.732.711.00	68.77	
15	4.02.01	SEKRETARIAT DPRD				
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	15.000.000.00	10.682.700.00	71.22	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	81.930.000.00	58.627.200.00	71.56	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
16	5.02.01	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	91.850.000.00	46.081.673.00	50.17	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	1.775.000.000.00	196.489.050.00	11.07	Pengajuan BTT berdasarkan adanya kejadian bencana terkait tanggap darurat. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social. pada tahun 2025 tidak banyak terealisasi.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
17	6.01.01	INSPEKTORAT KABUPATEN				
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	306.150.000.00	193.783.278.00	63.30	Adanya Edaran Efisiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga Diklat dan Bimtek Dilaksanakan Secara Daring
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.039.000.00	9.119.000.00	37.93	keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan sub kegiatan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ditambahkan pada saat perubahan APBD 2025
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	71.600.000.00	0.00	0.00	Adanya Edaran Efisiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga Sebagian Besar Belanja Modal yang tidak Mendesak tidak jadi dilaksanakan
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	64.500.000.00	34.351.202.00	53.26	Pada saat perencanaan awal kendaraan operasional atau lapangan inspektorat berjumlah 5 (lima) unit. namun pada pertengahan kendaraan operasional atau lapangan tinggal 3 (tiga) unit dengan keterangan 1 (satu) unit kendaraan bermerek Mitshubishi L300 di serahkan ke bagian aset dan 1 (satu) unit kendaraan bermerek HRV mengalami kecelakaan. dengan kondisi tersebut jumlah anggaran pemeliharaan tidak terserap optimal
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.200.000.00	19.194.600.00	70.57	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai target namun ada beberapa peralatan yang sudah mengalami rusak berat tidak bisa diperbaiki lagi dan sudah diusulkan untuk dihapuskan
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi. Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	63.835.150.00	39.018.600.00	61.12	Adanya Edaran Efisiensi Belanja Tahun 2025 Sehingga kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dikurangi
18	7 01 01	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.525.000.00	11.454.000.00	73.78	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
19	7 01 05	KECAMATAN SEMBILAN KOTO				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.700.000.00	1.565.00.00	42.30	Pembayaran lisrik rumah dinas dibayar oleh orang yang menempati (PPK Kec). sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan aggaran.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE REKENING	OPD / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
20	7 01 06	KECAMATAN TIMPEH				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.983.800.00	87.630.100.00	63.51	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	2.500.000.00	1.695.000.00	67.80	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
21	'8.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0004	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	41.590.750.00	31.157.400.00	74.91	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	18.878.400.00	13.584.700.00	71.96	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	197.672.300.00	142.688.800.00	72.18	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. Serta Penanganan Konflik Di Daerah	14.559.000.00	10.458.500.00	71.84	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. Serta Penanganan Konflik Di Daerah	14.559.000.00	10.458.500.00	71.84	Efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebanyak 37 SKPD yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 6) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk. dan Keluarga Berencana
- 7) Dinas Pangan dan Perikanan
- 8) Dinas Lingkungan Hidup
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 11) Dinas Perhubungan
- 12) Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 13) Dinas Koperasi. Usaha Kecil. Menengah. dan Perdagangan
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 15) Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Pemuda. dan Olahraga
- 16) Dinas Perpustakaan Kearsipan
- 17) Dinas Pertanian
- 18) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
- 19) Inspektorat Kabupaten
- 20) Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 21) Badan Keuangan Daerah
- 22) Kecamatan Pulau Punjung
- 23) Kecamatan Sitiung



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 24) Kecamatan Koto Baru
- 25) Kecamatan Sungai Rumbai
- 26) Kecamatan IX Koto
- 27) Kecamatan Timpeh
- 28) Kecamatan Koto Salak
- 29) Kecamatan Asam Jujuhan
- 30) Kecamatan Koto Besar
- 31) Kecamatan Padang Laweh
- 32) Kecamatan Tiumang
- 33) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 34) Sekretariat Daerah
- 35) Sekretariat DPRD
- 36) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 37) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai entitas pelaporan, menyusun Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD, terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana BOSP Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SKB, tidak melalui Rekening Kas Daerah.

Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 17, yaitu:

1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
3. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
4. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
5. BLUD Puskesmas Sitiung II.
6. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
7. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
8. BLUD Puskesmas Silago.
9. BLUD Puskesmas Gunung Medan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. BLUD Puskesmas Sitiung I.
11. BLUD Puskesmas Koto Baru.
12. BLUD Puskesmas Timpeh.
13. BLUD Puskesmas Sialang.
14. BLUD Puskesmas Tiumang.
15. BLUD Puskesmas Koto Besar
16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti
17. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana *pengguna* anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 17 BLUD dan Dana BOSP Satuan Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SLB, yang tidak melalui rekening Kas Daerah.
- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

b. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

- Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- **basis kas** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

D.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Umum

Definisi Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
 - a) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
 - b) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*), Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

 - a) Pendapatan Transfer berdasarkan jenis pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - b) Pendapatan Transfer dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik. DHB dan DAU merupakan kategori dari Dana transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori Dana Transfer Khusus.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) Insentif Fiskal (DIF) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
 - f) Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - h) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- a) Pendapatan hibah berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, badan/lembaga/organisasi dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - b) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) Kelompok dana darurat yang berasal dari pemerintah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:

- 1) kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 2) kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: pendapatan dana BLUD, pendapatan dana BOSP, dan pendapatan BOK Puskesmas.
- 4) Kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pihak Lainnya.
- 5) Kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

a. Umum

1. Definisi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Perbedaan mendasar antara pendapatan-LO dan pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.

2. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
- 2) Pendapatan Transfer-LO;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
- 4) Surplus Non Operasional-LO;
- 5) Pendapatan Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPKD dan SKPD.

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT.
3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD atau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dokumen yang dipersamakan mengacu pada Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Dharmasraya.

4. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.
5. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
7. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain adalah:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
5. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
7. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
8. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Umum

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah daerah, belanja kantor dan lembaga teknis daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;
- 2) khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan SKPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
- 3) dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

e. Penyajian

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi Bagan Akun Standar (BAS).

f. Pengungkapan

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Umum

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2. Klasifikasi

Beban dapat diklasifikasikan menurut ekonomi. Klasifikasi beban menurut ekonomi diklasifikasikan berdasarkan jenis terdiri dari:

- a. Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer, terdiri dari : Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. **Terjadinya konsumsi aset**

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. **Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa**

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
2. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Umum

1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan BLUD.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD, kas Dana BOS, kas Dana Kapitasi pada FKTP, kas lainnya, dan Setara Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:

1. penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:

1. uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. pembayaran tagihan pihak ketiga;
3. pembayaran belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bunga, belanja subsidi;
4. transfer belanja daerah terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
5. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
6. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Jika kas memenuhi definisi aset lancar, yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan memenuhi definisi kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lancar. Uang pada aset lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

D.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Umum

1. Definisi

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a) Piutang Pendapatan daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari Piutang Pendapatan Asli Daerah (piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah) dan Piutang Pendapatan Transfer (piutang transfer pemerintah pusat dan piutang transfer antar daerah).

b) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
 - a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Umum

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan sebagainya, Persediaan Bahan/Material seperti Persediaan Bahan Baku Bangunan;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah;
- c) akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset artinya mengakui beban persediaan ketika persediaan tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan untuk persediaan yang akan digunakan selama satu periode akuntansi atau untuk berjaga-jaga.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
4. Persediaan akhir periode dinilai dengan menggunakan metode periodik dengan harga menggunakan metode FIFO (*First In First Out*), kecuali persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

d. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan sebagainya. dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan pengukuran menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem pencatatan dengan metode perpetual, yaitu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar yang berlaku untuk semua SKPD

e. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/daluwarsa.

D.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualkan secara bebas/dicairkan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas untuk meningkatkan produktivitas aset. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 1) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 2) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
- 4) Reksa dana.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Investasi Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau melepas investasi.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- 1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi non permanen lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga. Penyertaan modal berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (*assurance*) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi dalam bentuk surat berharga.
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi non permanen
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan.
 - 5) Investasi dalam bentuk tagihan dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
 - c) Nilai investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Akuntansi Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya.

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.

2. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividen*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
3. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pada neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah daerah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah daerah akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

g. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kondisi	% Penyisihan
1	Lancar	Tidak Terjadi tunggakan	0,5%
2	Kurang Lancar	Tunggakan 1 tahun	10%
3	Diragukan	Tunggakan 1 - 3 tahun	50%
4	Macet	Lebih dari 3 tahun	100%

h. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

i. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
7. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
8. Perubahan pos investasi.
9. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh yang signifikan yang mengakibatkan perubahan metode ekuitas.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Umum

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

c. Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

2. Peralatan dan Mesin;

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, rambu-rambu, peralatan olahraga dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok bangunan gedung adalah bangunan gedung kantor, bangunan kesehatan, bangunan gedung tempat ibadah, rumah negara dan taman. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

d. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
- 2) Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
- 3) Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
- 4) Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan,



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim, biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari *sumbangan (donasi)* dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan untuk buku perpustakaan sebesar Rp0,00 keatas.

Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan disusutkan secara garis lurus sedangkan untuk hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

f. Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharaan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut) dan penggantian utama (memperbarui bagian aset tetap).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi berpedoman pada Peraturan Bupati.

2. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi Aset Tetap dari neraca dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. Dihilahkan; atau
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

4. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan objeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Renovasi aset tetap milik sendiri, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

5. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode ini menetapkan beban penyusutan untuk masing-masing periode waktu tertentu adalah konstan berdasarkan umur ekonomi dan atau umur penggunaan aset tetap, dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

D.11. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Umum

1 Definisi

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga, dan lainnya.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

D.12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Amortisasi

a. Umum

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Tujuan

- a) Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya. Masalah utama akuntansi untuk aset lainnya adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tak berwujud.
- b) Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset lainnya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Akun	Uraian
1.5.	ASET LAINNYA
1.5.01.	Tagihan Jangka Panjang
1.5.01.01.	Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.01.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.02.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.02.01.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud
1.5.3.01.	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.5.04.	Aset Lain-lain
1.5.4.01.	Aset Lain-lain
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- Tagihan Jangka Panjang;
- Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah/dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat terbit SJTM atau Surat Keputusan pejabat berwenang. SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. *Hak Paten atau Hak Cipta*

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. *Royalti*

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. *Lisensi*

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. *Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang*

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. *Aset Tak Berwujud Lainnya*

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Budaya/Sejarah Tak Berwujud (*Intangible Heritage Asset*)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a. Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

b. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut, serta besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Untuk ATB dengan masa manfaat terbatas, umur ekonomis diatur sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Software	5
2.	Hak paten atau hak cipta	5
3.	Lisensi dan franchise	5
4.	Hasil kajian/penelitian	5

c. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan masa manfaat yang tak terbatas, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas.

6. Aset Lain-lain

Yang termasuk dalam kategori aset lain-lain antara lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan atau aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat (nilai perolehan aset tetap yang direklasifikasi beserta akumulasi penyusutannya) atau nilai bukunya. Tidak ada lagi pembebanan penyusutan untuk aset lain-lain tersebut.

7. Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapan pun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan di dalam CaLK.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Dokumen penting/pendukung;
- d. informasi lainnya yang penting.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan..

2. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Utang kepada Masyarakat

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Utang pajak adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan.

5. Pengukuran Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

6. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pajak SKPD/pemerintah berdasarkan rincian utang pajak dan tanggal jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
6. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
7. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
8. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Informasi Penting Lainnya

D.14. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
- b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
- i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

- 1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- 2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- 3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
- 4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
- 5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
 - Pendapatan direalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- 7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- 8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD.
- 4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya.
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
- 8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
- 9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA juga berguna untuk menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, namun adanya penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun 2025, selanjutnya dilakukan pergeseran setelah APBD Perubahan melalui penetapan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 beberapa kali dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2025

Uraian	JUMLAH (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2025	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	Pergeseran IV	APBD-P 2025	Pergeseran Setelah APBD-P		
	PERDA No. 7 Tahun 2024	PERBUP No. 1 Tahun 2025	PERBUP No. 3 Tahun 2025	PERBUP No. 4 Tahun 2025	PERBUP No. 6 Tahun 2025	PERDA No. 6 Tahun 2025	PERBUP No. 15 Tahun 2025	(Rp)	%
	30/12/2024	24/01/2025	09/04/2025	28/04/2025	22/05/2025	17/10/2025	29/12/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-2	10
PENDAPATAN	1.030.307.107.411,00	1.030.307.107.411,00	1.030.307.107.411,00	963.021.916.411,00	963.021.916.411,00	966.466.057.933,35	966.739.327.933,46	(63.567.779.477,54)	(6,17)
BELANJA	1.101.791.542.379,00	1.101.791.542.379,00	1.102.344.950.428,00	1.016.797.915.300,65	1.016.797.915.300,65	969.051.127.921,90	969.324.397.922,01	(132.467.144.456,99)	(12,02)
SURPLUS/ (DEFISIT)	(71.484.434.968,00)	(71.484.434.968,00)	(72.037.843.017,00)	(53.775.998.889,65)	(53.775.998.889,65)	(2.585.069.988,55)	(2.585.069.988,55)	68.899.364.979,45	(96,38)
PEMBIAYAAN	71.484.434.968,00	71.484.434.968,00	72.037.843.017,00	53.775.998.889,65	53.775.998.889,65	2.585.069.988,55	2.585.069.988,55	(68.899.364.979,45)	(96,38)
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. APBD Awal Tahun 2025

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 30 Desember 2024;

2. Pergeseran I APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 24 Januari 2025.

Perubahan dilakukan didasari karena adanya kekurangan anggaran belanja pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sehingga berdampak tidak dapat terealisasinya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pergeseran II APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 9 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

4. Pergeseran III APBD Tahun 2025

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 28 April 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk ketiga kalinya.

5. Pergeseran IV APBD Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 22 Mei 2025.

Perubahan dilakukan bahwa adanya Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.64/2025/KEUDA tanggal 16 Mei 2025 tentang Percepatan Realisasi APBD TA. 2025 guna untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat maka perlu didukung peningkatan konsumsi Pemerintah Daerah melalui percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah, dalam hal untuk percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, perlu diubah untuk keempat kalinya.

6. APBD Perubahan Tahun 2025

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 17 Oktober 2025.

7. Pergeseran APBD setelah APBD Perubahan Tahun 2025

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan penetapan tanggal 29 Desember 2025.

Perubahan dilakukan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, sebagai penyesuaian atas perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sesuai dengan instruksi Keputusan Menteri Keuangan dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan guru, sehingga perlu dilakukan pergeseran terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 (Rp)

Tahun 2024 (Rp)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.1. Pendapatan Daerah

952.036.775.854,25

970.822.454.588,79

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp966.739.327.933,46 dengan realisasi sebesar Rp952.036.775.854,25 atau 98,48% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp970.822.454.588,79 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp18.785.678.734,54 atau -1,94%.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/309/KPTS-BUP/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/29/KPTS-BUP/2025 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	108.370.246.672,79
2	Pendapatan Transfer	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	98,03	850.689.858.617,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	11.762.349.299,00
	JUMLAH	966.739.327.933,46	952.036.775.854,25	98,48	970.822.454.588,79

Rincian Pendapatan Daerah pada masing-masing OPD berdasarkan jenis Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1** di Laporan Keuangan ini.

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	137.461.862.696,65	108.370.246.672,79

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp136.947.264.820,00 dan realisasinya sebesar Rp137.461.862.696,65 atau sebesar 100,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.370.246.672,79 maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp29.091.616.023,86 atau 26,84%.

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2025 dan 2024 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.3





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Daerah	53.158.000.000,00	54.317.593.473,00	102,18	25.092.743.485,78
2	Retribusi Daerah	73.182.745.351,00	73.178.734.847,00	99,99	65.941.537.340,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	100,00	5.347.929.006,00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	5.077.200.000,00	4.436.214.917,65	87,38	11.988.036.841,01
	JUMLAH	136.947.264.820,00	137.461.862.696,65	100,38	108.370.246.672,79

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah	54.317.593.473,00	25.092.743.485,78

Pendapatan Pajak Daerah dipungut berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 3 ayat 1 Penetapan Pajak terdiri atas :

- a. Ditetapkan oleh Bupati yaitu :
 1. PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Pajak Reklame;
 3. Pajak Air Tanah;
 4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
 5. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak, yaitu :
 1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - a. Makanan dan /atau minuman;
 - b. Tenaga listrik;
 - c. Jasa perhotelan;
 - d. Jasa parkir;
 - e. Jasa kesenian dan hiburan;
 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
 4. Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan penetapan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp53.158.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp54.317.593.473,00 atau sebesar 102,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.092.743.485,78, maka terdapat





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kenaikan pendapatan sebesar Rp29.224.849.987,22 atau 116,47%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Reklame	350.000.000,00	351.380.547,00	100,39	341.020.598,00
2	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	126.709.052,00	115,19	69.875.770,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	5.200.000,00	52,00	3.900.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.000.000,00	596.315.895,00	108,42	356.993.896,00
5	PBB Perdesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.314.830.211,00	103,59	2.665.512.855,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.643.000.000,00	4.682.680.455,00	100,85	5.091.948.132,00
7	Pajak Barang Jasa Tertentu-Makanan dan/ atau minuman	1.470.000.000,00	1.530.491.037,00	104,12	1.490.712.906,78
8	Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik	14.510.000.000,00	14.539.125.043,00	100,20	14.761.538.520,00
9	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan	370.000.000,00	382.299.133,00	103,32	288.281.956,00
10	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Parkir	20.000.000,00	21.825.900,00	109,13	12.228.152,00
11	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000,00	22.207.900,00	148,05	10.730.700,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.423.000.000,00	16.776.873.700,00	102,15	-
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.487.000.000,00	11.967.654.600,00	104,18	-
JUMLAH		53.158.000.000,00	54.317.593.473,00	102,18	25.092.743.485,78

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 karena adanya penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kedua Opsen ini berupa tambahan pungutan pajak oleh kabupaten/kota sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB, efektif mulai 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan mempercepat penerimaan daerah dan memperkuat sinergi pemungutan, tanpa meningkatkan beban total pajak kendaraan secara signifikan bagi pemilik. Dampak secara langsung adalah mengubah struktur penerimaan, di mana kabupaten/kota menerima bagian langsung, bukan lagi melalui mekanisme bagi hasil dari Provinsi, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, pada tahun 2025 ditetapkan target Rp350.000.000,00 dengan realisasi Rp351.380.547,00 atau 100,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp341.020.598,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp 10.359.949,00 atau 3,04%. Hal ini disebabkan karena adanya objek pajak baru papan reklame praktek dokter dan bidan di Dharmasraya.





b) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.709.052,00 atau 115,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.875.770,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp56.833.282,00 atau 81,33%. Hal ini disebabkan tahun 2025 adanya pendataan objek baru air tanah yaitu pabrik tahu.

c) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.200.000,00 atau 52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.900.000,00, maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp1.300.000,00 atau 33,33%.

d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp596.315.895,00 atau 108,42%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp356.993.896,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp239.321.999,00 atau 67,04%. Kenaikan ini karena adanya penambahan 2 wajib pajak baru yaitu CV. Mutiara Chaniago di Sitiung dan CV. Berkah Alam Dharmasraya di Timpeh.

e) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp3.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.314.830.211,00 atau 103,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.665.512.855,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp649.317.356,00 atau 24,36%. Meningkatnya penerimaan PBB P2 karena intensnya pelaksanaan penagihan PBB P2 melalui nagari, dan pembayaran PPB bagi PNS dikorelasikan dengan pembayaran TPP Pegawai.

f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp4.643.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.682.680.455,00 atau 100,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.091.948.132,00, maka terdapat **penurunan** pendapatan sebesar Rp409.267.677,00 atau -8,04%. Hal tersebut terjadi karena adanya Program Presiden yaitu 3 (tiga) juta Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Adapun potensi pendapatan BPHTB yang berasal dari Peralihan Hak Perumahan Subsidi yang masuk ke





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam kategori Perumahan Subsidi MBR yang mulai diberlakukan pada bulan Juli tahun 2025 adalah sebesar Rp485.900.000,00 sebanyak 113 unit rumah.

g) Pajak Barang Jasa Tertentu

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

1) PBJT-Makanan dan/ atau minuman

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Pada tahun 2025 ditetapkan target Rp1.470.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.530.491.037,00 atau 104,12%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.490.712.906,78 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp39.778.130,22 atau 2,67%. Hal ini disebabkan adanya 3 restoran yang telah memakai Tapping Box sehingga ada kenaikan pembayaran pajak.

2) PBJT-Tenaga Listrik

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp14.510.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.539.125.043,00 atau 100,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.761.538.520,00 maka terdapat **penurunan** pendapatan sebesar Rp222.413.477,00 atau -1,51%. hal ini disebabkan pada tahun 2025 bulan Januari sampai Februari PLN melakukan promo diskon besar-besaran sehingga berpengaruh kepada capaian realisasi.

3) PBJT-Jasa Perhotelan

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp370.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp382.299.133,00 atau 103,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp288.281.956,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp94.017.177,00 atau 32,61%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan pada Hotel Umega sebesar Rp74.525.790,00 dan hotel Sakato sebesar Rp15.225.400 selain itu adanya wajib pajak baru yaitu Penginapan Raudatul Jannah dan Teressra Hotel.

4) PBJT-Jasa Parkir

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2025 sebesar Rp20.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp21.825.900,00 atau 109,13%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.228.152,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp9.597.748,00 atau 78,49%. Hal ini karena adanya wajib pajak baru yaitu PT. DSL .





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar Rp15.000.000,00 dengan capaian sebesar Rp22.207.900,00 atau 148,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.730.700,00 maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp11.477.200,00 atau 106,96%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan objek pajak yaitu tempat bilyard di Dharmasraya sebanyak 7 wajib pajak.

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target tahun 2025 sebesar Rp16.423.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp16.776.873.700,00 atau 102,15%. Opsen PKB baru ditetapkan tahun 2025, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan oleh provinsi sebesar Rp14.298.799.874,00 sehingga capaian dari target provinsi terealisasi sebesar 117,35%. Hal ini karena adanya sinergi antara pemerintah Daerah dengan Samsat Dharmasraya dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran baik dengan melakukan razia maupun berkerjasama dengan nagari dalam penyampaian tagihan pajak terutang *by name by address*.

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target tahun 2025 sebesar Rp11.487.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.967.654.600,00 atau 104,18%. Opsen BBNKB baru ditetapkan tahun 2025, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan oleh provinsi sebesar Rp7.844.403.254 sehingga capaian dari target provinsi terealisasi sebesar 152,56%. Hal ini karena adanya sinergi antara pemerintah Daerah dengan Samsat Dharmasraya.

			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.2.	Pendapatan Daerah	Retribusi	73.178.734.847,00	65.941.537.340,00

Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua jenis retribusi daerah yang diatur dengan peraturan daerah ini terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum ; dan
 - d. Pelayanan pasar
2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha; dan
 - h. pemanfaat aset daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :
- a. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing

Retribusi Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp73.182.745.351,00 dengan realisasi sebesar Rp73.178.734.847,00 atau 99,99%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp65.941.537.340,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.237.197.507,00 atau sebesar 10,98%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
A	Retribusi Jasa Umum	69.930.465.351,00	69.897.762.907,00	99,95	64.417.107.253,00
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.488.465.351,00	69.397.447.907,00	99,87	64.022.568.743,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	310.000.000,00	361.220.000,00	116,52	250.608.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	97.825.000,00	97,83	14.400.010,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000,00	1.770.000,00	88,50	96.780.000,00
5.	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	39.500.000,00	131,67	32.750.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.552.280.000,00	1.563.447.540,00	100,72	1.181.907.300,00
1.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	3.600.000,00	72,00	6.050.000,00
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.010.000,00	100,20	5.460.000,00
3.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	3.250.000,00	81,25	3.400.000,00
4.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	400.000.000,00	142.528.100,00	35,63	251.504.100,00
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.700.000,00	7.000.000,00	80,46	10.800.000,00
6.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	46.000.000,00	43.140.000,00	93,78	24.540.000,00
7.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.083.580.000,00	1.358.919.440,00	125,41	880.153.200,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	1.700.000.000,00	1.717.524.400,00	101,03	342.522.787,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.700.000.000,00	1.717.524.400,00	101,03	342.522.787,00
JUMLAH		73.182.745.351,00	73.178.734.847,00	99,99	65.941.537.340,00

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2025 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, RSUD Sungai Rumbai dan Labkesda

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya (*holding*) pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka diterbitkan Keputusan Bupati Tahun 2019 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumbang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya karena operasional Puskesmas Koto Besar digabungkan dengan Puskesmas Sitiung IV, maka kembali ditetapkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/374/KPTS-BUP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Gunung Medan sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan menjadi BLUD pada Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/443/KPTS-BUP/2022 tanggal 12 Desember 2022, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Pada Dinas Kesehatan masih terdapat 1 UPT Puskesmas yang belum ditetapkan menjadi BLUD yaitu Puskesmas Sitiung IV, yang mulai memberikan pelayanan ke masyarakat pada Tahun 2023, berdasarkan Surat dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI Nomor IR.01.02/2/50/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Pemutakhiran Data Puskesmas, yang menyebutkan Puskesmas Sitiung IV dengan Kategori Kemampuan Pelayanan Non rawat Inap dan Kategori Karakteristik Wilayah Kerja Pedesaan. Saat ini pelaporan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan belanja Puskesmas Sitiung IV tergabung dengan Puskesmas Koto Besar, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/374/KPTS-BUP/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang menyatakan bahwa pencatatan operasional keuangan BLUD Puskesmas Sitiung IV dikonsolidasi dengan Puskesmas Koto Besar. Sedangkan Belanja BOK Puskesmas Sitiung IV tergabung di Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp69.488.465.351,00 terealisasi sebesar Rp69.397.447.907,00 atau sebesar 99,88%. Retribusi Pelayanan kesehatan ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Pelayanan kesehatan ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp4.188.313.600,00, Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp64.839.085.207,00 dan Pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp370.049.100,00. Realiasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.472.157.351,00	4.188.313.600,00	120,63	3.364.903.484,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	324.328.239,00	438.167.500,00	135,10	359.518.900,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	145.614.485,00	183.713.900,00	126,16	165.134.000,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	125.780.839,00	140.087.400,00	111,37	116.643.000,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	209.163.051,00	239.305.600,00	114,41	209.567.120,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	154.560.239,00	160.231.700,00	103,67	95.968.400,00
6	BLUD Puskesmas Silago	249.582.784,00	304.314.000,00	121,93	295.072.500,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	122.328.239,00	153.003.500,00	125,08	121.940.980,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	480.000.000,00	672.147.200,00	140,03	547.385.300,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	650.000.000,00	909.478.500,00	139,92	627.787.200,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	290.945.239,00	322.035.400,00	110,69	243.846.700,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	57.328.239,00	61.202.100,00	106,76	39.188.200,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	117.328.239,00	154.152.000,00	131,39	136.068.500,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	205.869.519,00	133.186.200,00	64,69	134.353.984,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	339.328.239,00	317.288.600,00	93,50	272.428.700,00
II	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	65.716.308.000,00	64.839.085.207,00	98,67	60.496.355.259,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	60.000.000.000,00	58.940.158.021,00	98,23	54.303.752.973,00
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	5.716.308.000,00	5.898.927.186,00	103,19	6.192.602.286,00
III	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	300.000.000,00	370.049.100,00	123,35	161.310.000,00
1	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	300.000.000,00	370.049.100,00	123,35	161.310.000,00
	JUMLAH	69.488.465.351,00	69.397.447.907,00	99,87	64.022.568.743,00

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp310.000.000,00 terealisasi sebesar Rp361.220.000,00 atau sebesar 116,52%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp110.611.500,00 atau 44,14%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.825.000,00 atau 97,83%. Tingginya capaian atas retribusi ini adanya penetapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d) Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Los pada Dinas Pertanian di Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.770.000,00 atau 88,50%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 mengalami **penurunan** sebesar Rp95.010.000,00 atau -98,17% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp96.780.000,00 karena adanya reklasifikasi Retribusi Pelayanan Pasar ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas pemanfaatan sewa kios pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

e) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan sub rincian objeknya adalah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Tahun 2025 ditargetkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.500.000,00 atau 131,67%. Mengalami **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp6.750.000,00 atau 20,61% disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Pendapatan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila baru merupakan sewa penginapan / mess Pemda yang berada di Kota Padang, dibawah pengelolaan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar 72%, mengalami **penurunan** sebesar Rp2.450.000,00 atau -40,50% disebabkan kurangnya fasilitas serta pemeliharaan penginapan sehingga pengunjung menjadi berkurang.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Tahun 2025 ditargetkan pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.010.000,00 atau sebesar 100,20%. Mengalami **penurunan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp450.000,00 atau -8,24%.

h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa sewa pemakaian GOR Olahraga di Kota Padang sebesar Rp4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.250.000,00 atau sebesar 81,25%. Mengalami **penurunan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp150.000,00 atau -4,41%. Kurangnya pencapaian realisasi pendapatan disebabkan tidak memadainya fasilitas gedung olah raga serta biaya sewa yang tidak sepadan dengan fasilitas yang ada.

i) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan pada Tahun 2025 sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp142.528.100,00 atau 35,63%. Penerimaan Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengalami **penurunan** sebesar Rp108.976.000,00 atau -43,33%, yang terdiri dari :





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Dinas Pertanian adalah Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah adalah berupa Bibit atau Benih Tanaman yang terdiri dari penjualan anak ayam, telur, dan kambing persediaan yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi 100%. Mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp10.500.000,00 dibandingkan Tahun 2024 atau 110,5%.
 - 2) Dinas Pangan dan Perikanan adalah Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan yang ditargetkan sebesar Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp49.590.000 atau 66,12%, mengalami **kenaikan** penerimaan sebesar Rp17.510.000,00 atau 54,58% dari penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp32.080.000,00.
 - 3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan ditargetkan sebesar Rp305.000.000,00 terealisasi sebesar Rp72.938.100,00 yang merupakan pendapatan pada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah berupa Pengelolaan Air Minum berada pada Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target Tahun 2025 sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp65.548.100,00 atau sebesar 21,85%. Mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp140.971.000,00 dibandingkan Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp206.519.100,00 atau -68,26%.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup berupa penjualan pupuk kompos ditargetkan Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.390.000,00 atau 147,80%.
- j) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2024 baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan penyewaan tempat usaha berupa bengkel pada IKM Logam sebanyak 3 unit gudang yang ditargetkan sebesar Rp8.700.000,00 terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau sebesar 80,45%. Mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp3.800.000,00 atau -35,19% disebabkan adanya penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp1.800.000,00 yang belum di setor ke Kas Daerah per tanggal pelaporan.
- k) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan**
- Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan ditargetkan sebesar Rp46.000.000,00 terealisasi sebesar Rp43.140.000,00 atau sebesar 93,78% terdapat pada:
- 1) Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.400.000,00 atau 54%. Mengalami penurunan sebesar Rp3.600.000,00 dibandingkan Tahun 2024 atau -40% disebabkan tidak terealisasinya pemungutan beberapa pasar yang telah di targetkan sebelumnya.
 - 2) Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.740.000,00 atau sebesar 104,83%. Pendapatan ini bersumber dari penyediaan tempat parkir pada BLUD RSUD Sungai Dareh.
- l) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut berupa Pemakaian Rumah Dinas, Pemakaian Gedung Auditorium dan Gedung Pertemuan di Kecamatan, Sewa ATM, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Sewa Alat Berat. Retribusi ini ditargetkan sebesar Rp1.083.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.358.919.440,00 atau 125,41%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terdapat pada 18 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan	85.000.000,00	112.396.200,00	132,23	68.569.200,00
2	Dinas Kesehatan	109.450.000,00	139.305.000,00	127,28	63.213.000,00
a	Puskesmas Sialang	0,00	0,00	0,00	20.875.000,00
b	RSUD Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	160.000.000,00	258.620.000,00	161,64	94.570.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	290.000.000,00	305.745.000,00	105,43	289.300.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.000.000,00	3.420.000,00	114,00	1.530.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	13.000.000,00	86,67	4.300.000,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	80.000.000,00	96.060.000,00	120,08	0,00
8	Dinas Pertanian	200.000.000,00	214.916.000,00	107,46	78.000.000,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	12.681.000,00	90,71	11.237.500,00
10	Sekretariat Daerah	105.000.000,00	143.000.000,00	136,19	120.000.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	5.000.000,00	41.658.240,00	833,16	86.408.500,00
12	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.500.000,00
13	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	2.000.000,00
14	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	2.250.000,00	112,50	4.750.000,00
15	Kecamatan Sungai Rumbai	3.900.000,00	7.768.000,00	199,18	10.750.000,00
16	Kecamatan Sembilan Koto	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50	2.000.000,00
17	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	850.000,00	34,00	2.750.000,00
18	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	1.250.000,00	62,50	2.000.000,00
Jumlah		1.083.580.000,00	1.358.919.440,00	125,41	880.153.200,00

m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penerimaan Tahun 2025 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.717.524.400,00 atau sebesar 101,03%.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	5.347.929.006,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Deviden Bank Nagari Tahun 2024	5.514.346.639,00	5.514.346.629,00	100	5.334.340.116,00
2	Deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2024	14.972.830,00	14.972.830,00	100	13.588.890,00
	Jumlah	5.529.319.469,00	5.529.319.459,00	100	5.347.929.006,00

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp5.529.319.469,00 dengan realisasi 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00 dan penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp5.347.929.006,00 penerimaan untuk Tahun 2025 mengalami **kenaikan** sebesar Rp181.390.463,00 atau 3,39%.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.a.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.436.214.917,65	11.988.036.841,01

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.077.200.000,00 dengan realisasi Rp4.436.214.917,65 atau 87,38%. Terdapat penurunan pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp7.551.821.923,36 atau -62,99%. Signifikannya penurunan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, disebabkan adanya penurunan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp6.838.648.986,02 atau -75,66%, pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.200.602.481,19 sedangkan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp9.039.251.467,21.

Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	770.000.000,00	290.794.000,00	37,77	380.741.100
2	Jasa Giro	1.000.000.000,00	842.095.448,46	84,21	900.964.205,71
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.500.000.000,00	2.200.602.481,19	88,02	9.039.251.467,21
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	303.500.000,00	582.407.951,00	191,90	1.270.764.474,09
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.470.000,00	32.086.600,00	70,57	37.632.514
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	201.830.000,00	247.293.346,00	122,53	80.075.452
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.400.000,00	5.337.432,00	83,40	6.087.628
8	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	235.597.659,00	94,24	272.520.000
JUMLAH		5.077.200.000,00	4.436.214.917,65	87,38	11.988.036.841,01

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 terdiri dari delapan obyek penerimaan. Berdasarkan realisasi penerimaan dari **delapan** obyek penerimaan dibandingkan tahun 2024 secara keseluruhan mengalami **penurunan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sub rincian objeknya adalah pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang, target Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp770.000.000,00 terealisasi sebesar Rp290.794.000,00 atau 37,77%. Rendahnya realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD ini terjadi karena tidak terlaksananya proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), disebabkan belum lengkapnya proses administrasi dalam persyaratan lelang. Namun adanya realisasi sebesar Rp290.794.000,00 terdiri dari penjualan langsung kendaraan perorangan dinas kepada tiga orang mantan pejabat negara di Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp277.644.000,00 dan penjualan atas gedung dan bangunan berupa atap/seng atas revitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp13.150.000,00.

2. Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp842.095.448,46 atau 84,21%. Jasa Giro terdiri dari :

- Jasa Giro pada Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp875.000.000,00 terealisasi sebesar Rp729.488.090,00 atau 83,37%. Terjadi **penurunan** penerimaan sebesar Rp277.379.123,00 atau 58,62% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp21.068.281,00. Hal ini disebabkan kurangnya saldo kas yang mengendap di Kas Daerah.
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara dianggarkan sebesar Rp125.000.000,0 terealisasi sebesar Rp112.607.358,00 atau 90,08%. Terjadi **penurunan** penerimaan sebesar Rp37.800.476,25 atau -25,13% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp 150.407.834,71. Tidak banyaknya saldo kas yang mengendap di rekening Kas Bendahara memberikan dampak penurunan penerimaan jasa giro Tahun 2025.

3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dikembalikan ke Kas Daerah berupa temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya terdiri dari Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.200.602.481,19 atau 88,02%. Terdapat **penurunan** penerimaan sebesar Rp6.838.648.986,02 atau -75,66% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp9.039.251.467,21 disebabkan tidak banyak nya penetapan atas keputusan kerugian daerah yang berasal dari pemeriksaan BPK pada Tahun 2025.

4. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari penerimaan penutupan rekening yang tidak aktif, penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2024. Target Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp303.500.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp582.407.951,00 atau 191,90%. Terdapat **penurunan** pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp688.356.523,09 atau -54,17%.

5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp45.470.000,00 terealisasi sebesar Rp32.086.600,00 atau 70,56%. Mengalami **penurunan** sebesar Rp5.545.914,00 atau -14,74% dibandingkan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp37.632.514,00.

6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan pada Tahun 2025 dengan target sebesar Rp201.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp247.293.346,00 atau 122,53%, Terdapat **kenaikan** pendapatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp167.217.894,00 atau 208,83%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	320.061,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.537.324,00
3	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	49.800,00
4	Denda Pajak Reklame	250.000,00	315.405,00	126,16	1.456.531,00
5	Denda Pajak Air Tanah	230.000,00	236.151,00	102,67	413.162,00
6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000,00	331.063,00	94,59	858.085,00
7	Denda PBBP2	75.000.000,00	82.801.414,00	110,40	74.440.489,00
8	Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000,00	1.846.050,00	3692,10	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	2.850.000,00	2.717.236,00	95,34	0,00
10	Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.100.000,00	2.185.700,00	104,08	0,00
12	Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	100.000,00	74.227,00	74,23	0,00
13	Denda Opsen PKB	120.850.000,00	156.786.100,00	129,74	0,00
	Jumlah	201.830.000,00	247.293.346,00	122,53	80.075.452,00

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dianggarkan pada Tahun 2025 dengan target sebesar Rp6.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.337.432,00 atau 83,40%, apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp6.087.628,00 mengalami penurunan sebesar Rp750.196,00 atau -12,32%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	600.000,00	50.000,00	8,33	93.000,00
2	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.262.028,00
3	Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	3.100.000,00	2.538.480,00	81,89	5.000,00
4	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	2.700.000,00	2.748.952,00	101,81	1.727.600,00
	Jumlah	6.400.000,00	5.337.432,00	83,40	6.087.628,00

8. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah dan pengembalian pendapatan yang berasal dari keterlanjuran pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp235.597.659,00 atau 94,23%, dengan uraian sebagai berikut :

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Rp201.952.826,00.
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS Rp5.798.400,00.
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS Rp27.846.433,00.

Tahun 2025 (Rp)

Tahun 2024 (Rp)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.1.b. Pendapatan Transfer 795.934.821.722,00 850.689.858.617,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp811.958.696.072,35 dengan realisasi Rp795.934.821.722,00 atau sebesar 98,03%. Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp54.755.036.895,00 atau -6,44% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.12
Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.702.365.600,00	750.718.824.220,00	97,92	792.448.801.416,00
	a Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	703.312.378.600,00	687.331.418.220,00	97,73	716.383.072.416,00
	b Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	63.389.987.000,00	63.387.406.000,00	100,00	76.065.729.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.256.330.472,35	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00
	JUMLAH	811.958.696.072,35	795.934.821.722,00	98,03	850.689.858.617,00

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	687.331.418.220,00	716.383.072.416,00

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp703.312.378.600,00 dengan realisasi sebesar Rp687.331.418.220,00 atau 97,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp716.383.072.416,00, Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.051.654.196,00 atau -4,06%.

Tabel 5.1.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak	19.517.202.000,00	16.769.613.800,00	85,92	14.676.153.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	26.633.537.500,00	26.270.721.000,00	98,64	22.402.073.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	499.375.747.100,00	496.572.481.339,00	99,44	512.944.707.932,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	157.785.892.000,00	147.718.602.081,00	93,62	166.360.138.484,00
JUMLAH		703.312.378.600,00	687.331.418.220,00	97,73	716.383.072.416,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.a Bagi Hasil Pajak	16.769.613.800,00	14.676.153.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp19.517.202.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.769.613.800,00 atau sebesar 85,92%. Penerimaan Bagi Hasil Pajak mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.460.800,00 atau 14,26% dibandingkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp14.676.370.792,00. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	5.706.437.000,00	5.307.551.300,00	93,01	4.832.909.000,00
	DBH PPh Pasal 21	5.604.243.000,00	5.079.349.800,00	90,63	4.688.537.000,00
	DBH PPh Pasal 25/29 OP	102.194.000,00	228.201.500,00	223,30	144.372.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.763.005.000,00	11.414.302.500,00	82,93	9.802.804.000,00
	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/ Kota	13.763.005.000,00	11.414.302.500,00	82,93	9.802.804.000,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	47.760.000,00	47.760.000,00	100,00	40.440.000,00
	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	47.760.000,00	47.760.000,00	100,00	40.440.000,00
JUMLAH		19.517.202.000,00	16.769.613.800,00	85,92	14.676.153.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.b Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.270.721.000,00	22.402.073.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp26.633.537.500,00 dengan realisasi sebesar Rp26.270.721.000,00 atau 98,64%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.868.648.000,00 atau 17,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp22.402.073.000,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.15
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	22.553.130.500,00	22.190.314.000,00	98,39	12.700.533.000,00
a.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	3.851.186.000,00	2.118.985.000,00	55,02	10.414.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	16.621.702.000,00	17.991.031.200,00	108,24	10.331.892.000,00
d.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	914.039.000,00	910.533.800,00	99,62	1.261.072.000,00
e.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	332.398.500,00	335.959.000,00	101,07	-
f.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.097.155.000,00
2.	Bagi Hasil Lainnya	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	100,00	9.701.540.000,00
	DBH Sawit	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	100,00	9.701.540.000,00
JUMLAH		26.633.537.500,00	26.270.721.000,00	98,64	22.402.073.000,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil yang masuk ke Kas Daerah Tahun 2025 terdiri atas Penyaluran Transfer Tahun 2025 dan penerimaan Dana *Treasury Defosit Facilty* (TDF) Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Sumber Pendapatan Dana Treasury Defosit (TDF) Tahun 2024

No	Uraian	Transfer TDF 2024
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.156.963.000,00
a	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.153.400.000,00
b	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	2.000,00
c	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.561.000,00
	Jumlah	1.156.963.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.c. Dana Alokasi Umum	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp499.375.747.100,00 terealisasi sebesar Rp496.572.481.339,00 atau 99,44%. Penerimaan DAU Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.372.226.593,00 atau -3,19% dibandingkan penerimaan Tahun 2024 sebesar RpRp512.944.707.932,00. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan atas KMK Nomor 29 Tahun 2025 yang menyesuaikan rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2025. Kebijakan ini berfokus pada efisiensi anggaran, yang berimbas pada pengurangan dana untuk infrastruktur di daerah, sehingga alokasi DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum ditiadakan. Adapun rincian DAU Tahun 2025 terdiri dari :



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.17
Rincian DAU Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAU	426.784.884.100,00	426.784.884.100,00	100	422.691.705.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.476.300.000,00	8.673.034.239,00	75,57	13.679.463.932,00
3	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	34.559.893.000,00	34.559.893.000,00	100	33.343.800.000,00
4	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.554.670.000,00	26.554.670.000,00	100	16.365.536.000,00
5	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	26.864.203.000,00
	Jumlah	499.375.747.100,00	496.572.481.339,00	99,44	512.944.707.932,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.1.e Dana Alokasi Khusus	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp157.785.892.000,00 dan terealisasi Rp147.718.602.081,00 atau sebesar 93,62%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.641.536.403,00 atau -11,21% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp166.360.138.484,00. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada setiap daerah, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan khusus yang memiliki prioritas nasional tinggi dan memenuhi kriteria tertentu.

Tabel 5.1.18
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	10.058.006.000,00	8.778.269.954,00	87,28	34.621.165.717,00
2	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	147.727.886.000,00	138.940.332.127,00	94,05	131.738.972.767,00
	JUMLAH	157.785.892.000,00	147.718.602.081,00	93,62	166.360.138.484,00

1) Dana Aloksi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerimaan DAK Fisik Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi DAK Fisik Tahun 2025 dan 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	214.449.000,00	203.463.000,00	94,88	9.898.329.250,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.612.280.000,00	1.585.175.610,00	98,32	569.310.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	4.728.640.261,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.231.320.000,00	5.382.883.033,00	86,38	12.679.434.706,00
5	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	1.999.957.000,00	1.606.748.311,00	80,34	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	483.177.500,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	77.700.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	6.184.574.000,00
JUMLAH		10.058.006.000,00	8.778.269.954,00	87,28	34.621.165.717,00

2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Penerimaan DAK Nonfisik Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Nonfisik-TPG PNSD	79.625.672.000,00	73.866.849.506,00	92,77	59.707.154.000,00
2	DAK Nonfisik-TKG PNSD	3.474.485.000,00	2.392.156.671,00	68,85	3.550.290.000,00
3	DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD	743.000.000,00	487.532.500,00	65,62	2.750.575.000,00
4	DAK Nonfisik-BOKKB-BOK	7.917.298.000,00	7.407.081.918,00	93,56	10.684.376.220,00
6	DAK Nonfisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	287.749.000,00	287.749.000,00	100,00	332.678.500,00
7	DAK Nonfisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.954.587.000,00	10.022.258.231,00	91,49	9.863.223.644,00
8	DAK Nonfisik-BOKKB-BOKB	4.076.212.000,00	3.981.838.150,00	97,68	3.997.734.621,00
9	DAK Nonfisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	413.682.313,00	81,81	398.452.445,00
10	DAK Nonfisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	565.061.300,00
12	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.579.178.000,00	33.570.064.383,00	99,97	33.532.789.037,00
13	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.253.250.000,00	1.253.250.000,00	100,00	1.237.500.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
14	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.023.125.000,00	3.994.813.455,00	99,30	4.192.128.000,00
15	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
16	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	868.600.000,00	844.016.000,00	97,17	732.010.000,00
17	DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	135.000.000,00
18	DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	269.040.000,00	269.040.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		147.727.886.000,00	138.940.332.127,00	94,05	131.738.972.767,00

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.2.	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	63.387.406.000,00	76.065.729.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025 penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp63.389.987.000,00 terealisasi 100%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp76.065.729.000,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp12.678.323.000,00 atau -16,67%. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
A.	Dana Penyesuaian				
1	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	100	55.320.687.000,00
2	Dana Insentif Fiskal	7.204.202.000,00	7.201.621.000,00	100	20.745.042.000,00
JUMLAH		63.389.987.000,00	63.387.406.000,00	100	76.065.729.000,00

Untuk Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2025 sebesar Rp56.185.785.000,00 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah data dari SIKD Next Generation Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Insentif fiskal adalah dana dari APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan umum, dan layanan dasar. Ini adalah bentuk apresiasi untuk mendorong kinerja daerah, bukan berdasarkan permohonan. Contohnya meliputi insentif untuk pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp20.745.042.000,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp13.543.421.000,00 atau -65,29%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak .

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.b.3.a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.215.997.502,00	58.241.057.201,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp45.256.330.472,35 dengan realisasi sebesar Rp45.215.997.502,00 atau sebesar 99,91%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp58.241.057.201,00 terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp13.025.059.699,00 atau -22,36%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp45.215.997.502,00 berasal dari penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp23.466.982.584,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2024 sebesar Rp21.749.014.918,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2025				2024
			Penerimaan 2025	Piutang 2024	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.896.221.285,00	94.967.465,00	3.801.253.820,00	3.896.221.285,00	100	15.031.840.925,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.625.015.467,00	96.391.661,00	1.528.623.806,00	1.625.015.467,00	100	4.631.937.409,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	23.874.093.124,35	8.063.614.483,00	16.321.017.625,00	24.384.632.108,00	102,14	23.799.193.946,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	314.247.557,00	162.474.706,00	98.119.667,00	260.594.373,00	82,9	132.335.453,00
5	Pajak Rokok	15.546.753.039,00	15.049.534.269,00	0,00	15.049.534.269,00	96,80	14.645.749.468,00
	Jumlah	45.256.330.472,35	23.466.982.584,00	21.749.014.918,00	45.215.997.502,00	99,91	58.241.057.201,00

	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.1.c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	18.640.091.435,60	11.762.349.299,00

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.833.367.041,11 dengan realisasi sebesar Rp18.640.091.435,60 atau 104,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.762.349.299,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.877.742.137,00 atau 58,47%.

Kenaikan realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan adanya Pendapatan atas Pengembalian Sisa Hibah pada Pemerintah pada KPU dan Bawaslu atas Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebesar Rp5.970.912.967,60 terdiri dari Rp4.388.984.022,11 dari KPU dan sebesar Rp1.581.928.945,49 dari





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bawaslu. Pemberian Hibah pada KPU ditetapkan berdasarkan NPHD Tahun 2023 Nomor 200.1/04/Kesbangpol/XI/2023 dan Nomor 01/KU.07/1310/2023 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024, dan pemberian hibah pada Bawaslu ditetapkan berdasarkan NPHD Nomor 200.1/05/Kesbangpol/XI/2023 dan Nomor 086/KU.00.01/K.SB-02/11/2023 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.698.940,00 dengan persentase 82,69%. Pemberi hibah adalah perusahaan sektor perkebunan yang ada di Dharmasraya.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	100.000.000,00	82.698.940,00	82,70	71.350.441,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	5.969.213.826,11	5.970.912.967,60	100,03	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	12.586.479.528,00	106,99	11.690.998.858,00
JUMLAH		17.833.367.041,11	18.640.091.435,60	104,52	11.762.349.299,00

Pendapatan Kapitasi Puskesmas

Penganggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam RKA-SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP –Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan pada DPA Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.764.153.215,00 terealisasi sebesar Rp12.586.479.528,00 atau 106,99% mengalami **kenaikan** sebesar Rp895.480.670,00 atau 7,66% dibandingkan penerimaan Dana Kapitasi Tahun 2024. Uraian penerimaan kapitasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Penerimaan Kapitasi Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	1.166.000.000,00	1.202.471.312,00	103,13	1.118.225.326,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	281.500.000,00	301.078.805,00	106,96	294.345.870,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	769.569.623,00	862.368.448,00	112,06	815.086.603,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	395.000.000,00	414.414.085,00	104,91	389.504.483,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.878.955.200,00	1.970.759.443,00	104,89	1.803.082.181,00
6	BLUD Puskesmas Silago	647.220.611,00	657.522.842,00	101,59	679.659.028,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	665.000.000,00	708.970.515,00	106,61	651.977.466,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	1.237.343.004,00	1.302.891.873,00	105,30	1.223.924.003,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.391.476.057,00	1.683.188.926,00	120,96	1.520.596.410,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	690.000.000,00	707.351.030,00	102,51	646.462.121,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	747.580.000,00	762.479.381,00	101,99	747.478.187,00
12	BLUD Puskesmas Tiumbang	680.050.000,00	694.141.396,00	102,07	642.069.854,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	924.458.720,00	1.028.662.463,00	111,27	888.658.166,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	290.000.000,00	290.179.009,00	100,06	269.929.160,00
JUMLAH		11.764.153.215,00	12.586.479.528,00	106,99	11.690.998.858,00

V.A.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Belanja Tak Terduga dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak direncanakan dalam APBD tahun berjalan. Sedangkan Belanja Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Anggaran belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp969.324.397.922,01 dengan realisasi Rp915.611.872.582,48 atau sebesar 94,46%. Mengalami penurunan belanja sebesar Rp97.556.051.494,81 atau -9,63% dibandingkan belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.013.167.924.077,29.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024 terdiri dari :

Tabel 5.1.25
Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	793.179.544.263,13
2	Belanja Modal	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	102.187.717.063,16
3	Belanja Tak Terduga	1.775.000.000,00	196.489.050,00	11,07	2.485.520.287,00
4	Belanja Transfer	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	115.315.142.464,00
	JUMLAH	969.324.397.922,01	915.611.872.582,48	94,46	1.013.167.924.077,29

Adapun penjelasan anggaran dan realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a. Belanja Operasi	755.555.738.316,18	793.179.544.263,13





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Operasi TA 2025 direncanakan Rp792.360.152.082,51 dengan realisasi sebesar Rp755.555.738.316,18 atau sebesar 95,36%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp793.179.544.263,13 terjadi penurunan sebesar Rp37.623.805.946,95 atau -4,74%.

Tabel 5.1.26
Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	97,47	454.911.665.442,94
2	Belanja Barang dan Jasa	280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	92,29	304.013.952.063,19
3	Hibah	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	81,27	34.253.926.757,00
	JUMLAH	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	95,36	793.179.544.263,13

Realisasi Belanja Operasi masing-masing SKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a.1. Belanja Pegawai	485.726.445.153,08	454.911.665.442,94

Belanja Pegawai Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp498.350.557.499,30 dengan realisasi Rp485.726.445.153,08 atau 97,47%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp454.911.665.442,94 terjadi peningkatan sebesar Rp30.814.779.710,14 atau 6,77%.

Belanja Pegawai Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.27
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.824.702.268,28	322.938.491.156,00	98,51	306.466.231.954,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	144.169.223.511,11	136.753.726.750,00	94,86	43.669.061.704,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.042.538.710,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.976.079.908,00	12.931.133.232,00	99,65	11.159.937.860,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.059.922.404,00	902.766.614,00	85,17	430.965.781,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.596.000,00	100,00	474.756.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	11.719.029.407,91	11.598.731.401,08	98,97	23.668.173.433,94
	JUMLAH	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	97,47	454.911.665.442,94

Adapun rincian belanja pegawai Tahun 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp322.938.491.156,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.28

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	242.628.547.666,28	241.996.455.452,00	99,74	228.070.156.036,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	25.161.459.856,00	24.464.833.710,00	97,23	23.174.366.415,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.537.456.683,00	3.269.936.448,00	92,44	3.535.459.869,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.991.540.348,00	21.734.178.069,00	98,83	21.860.575.162,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.159.427.070,00	1.134.987.834,00	97,89	1.016.237.045,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.286.660.537,00	14.166.492.615,00	99,16	13.365.110.825,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	1.233.451.619,00	365.126.314,00	29,60	1.072.473.077,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.790.278,00	3.693.343,00	63,79	3.508.946,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.563.188.562,00	13.800.309.442,00	94,76	12.476.233.481,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	511.176.666,00	500.702.718,00	97,95	471.940.475,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.532.694.983,00	1.501.775.211,00	97,98	1.420.170.623,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.213.308.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		327.824.702.268,28	322.938.491.156,00	98,51	306.466.231.954,00

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai terealisasi sebesar Rp136.753.726.750,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.29

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	Belanja Tambahan Penghasilan	144.169.223.511,11	136.753.726.750,00	94,86	112.737.496.222,00
1)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.239.039.215,00	56.999.574.939,00	99,58	43.669.061.704,00
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.239.039.215,00	56.999.574.939,00	99,58	43.669.061.704,00
2)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.930.184.296,11	79.754.151.811,00	91,75	69.068.434.518,00
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.447.223.622,00	1.293.070.689,00	89,35	809.279.643,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	120.777.474,00	104.816.245,00	86,78	44.288.475,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	79.566.754.000,11	73.866.849.506,00	92,84	60.062.543.200,00
d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.258.679.200,00	3.276.932.871,00	76,95	2.619.546.200,00
e	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.521.250.000,00	1.202.032.500,00	79,02	2.049.250.000,00
f	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	2.998.327.000,00
g	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.500.000,00	10.450.000,00	67,42	485.200.000,00
JUMLAH		144.169.223.511,11	136.753.726.750,00	94,86	112.737.496.222,00

3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp14.435.495.846,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.976.079.908,00	12.931.133.232,00	99,65	11.159.937.860,00
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	667.695.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	64.856.400,00	64.856.400,00	100,00	66.828.300,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.130.320,00	72.130.320,00	100,00	75.823.740,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	100,00	57.172.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	968.157.750,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.282.900,00	96.282.900,00	100,00	86.949.975,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	43.914.000,00	0,00	0,00	22.883.183,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.780.000.000,00	100,00	2.261.700.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	945.000.000,00	100,00	365.400.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	228.788,00	196.104,00	85,71	180.264,00
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.992,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.186.800.008,00	2.186.800.008,00	100,00	2.142.812.148,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.082.400.000,00	4.082.400.000,00	100,00	4.170.600.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	273.735.000,00
II	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.059.922.404,00	902.766.614,00	85,17	430.965.781,00
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.270.000,00	76.200.000,00	98,62	29.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.437.000,00	948.000,00	11,24	4.116.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	108.486.000,00	91.800.000,00	84,62	52.920.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.000,00	2.462.280,00	29,62	4.055.520,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00	639.595,00	63,96	989.638,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00	832,00	0,08	556,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	50.431.000,00	4.869.120,00	9,66	2.963.520,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.000.000,00	103.680,00	10,37	60.480,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00	311.040,00	31,10	181.440,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	742.276.378,00	667.994.062,00	89,99	317.297.852,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	60.709.026,00	57.438.005,00	94,61	18.980.775,00
III	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.596.000,00	100,00	474.756.000,00
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	74.760.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	100,00	399.996.000,00
JUMLAH		14.637.602.312,00	14.435.495.846,00	98,62	12.065.659.641,00

- 4) Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp11.598.731.401,08,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.31

Belanja Pegawai BLUD Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	2.938.330.637,00	2.935.659.701,00	99,91	16.061.050.141,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	2.669.530.637,00	2.668.359.701,00	99,96	15.433.824.177,00
2	RSUD Sungai Rumbai	268.800.000,00	267.300.000,00	99,44	627.225.964,00
II	BLUD Puskesmas	8.780.698.770,91	8.663.071.700,08	98,66	7.607.123.292,94
1	BLUD Labkesda	155.327.877,00	155.316.328,00	99,99	117.157.378,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	206.919.745,70	206.183.377,00	99,64	207.026.255,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	969.697.812,00	969.672.228,00	100,00	942.913.032,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	485.140.611,00	477.503.483,00	98,43	401.948.073,00
5	BLUD Puskesmas Silago	650.926.320,00	650.734.360,00	99,97	490.033.996,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	575.478.239,00	561.562.684,00	97,58	491.167.572,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	403.342.367,00	403.342.367,00	100,00	382.962.425,00
8	BLUD Puskesmas Padang Laweh	295.600.000,21	288.421.040,00	97,57	261.602.609,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	14.300.000,00	4.150.000,00	29,02	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.664.526.840,00	3.921.502.990,00	84,07	5.115.334.210,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.435.588.780,00	1.388.230.028,00	96,70	213.206.400,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.389.785.000,00	1.344.978.070,00	96,77	3.451.341.900,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.663.726.590,00	28.063.674.623,00	97,90	58.997.228.512,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	162.022.344,00
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	634.060.000,00	352.550.500,00	55,60	1.031.960.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.642.705.651,00	23.595.753.442,00	99,80	22.826.610.780,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	577.362.216,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	160.700.000,00	160.700.000,00	100,00	136.200.000,00
23	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.255.825.880,00	12.967.920.285,00	97,82	1.658.588.477,00
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38	99,33	50.929.802.688,80
JUMLAH		280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	92,29	304.013.952.063,19

- a. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp29.277.714.860,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	91.360.000,00	87.453.675,00	95,72	120.675.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.172.000,00	8.795.640,00	86,46	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.295.866.601,40	2.823.249.911,00	85,66	4.650.807.276,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	221.060.000,00	21.060.000,00	9,52	510.865.000,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	6.560.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.864.000,00	6.473.000,00	94,30	20.672.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	301.000.000,00	299.750.000,00	99,58	416.447.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.131.000,00	13.131.000,00	100,00	19.725.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.733.558.730,00	3.722.113.749,00	99,69	2.728.985.175,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.900.000,00	20.081.400,00	96,08	14.083.240,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	286.560.000,00	246.002.369,00	85,84	146.666.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.500.000,00	4.000.000,00	88,88	1.690.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	284.766.500,00	279.176.517,00	98,03	489.514.815,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	677.985.500,00	638.948.531,00	94,24	1.084.985.900,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.709.627.500,00	1.595.299.294,00	93,31	2.673.013.564,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	206.680.000,00	198.945.188,00	96,25	268.102.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	618.651.550,00	606.630.154,00	98,05	797.430.860,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	51.013.000,00	26.147.153,00	51,25	50.929.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	343.769.950,00	306.283.752,00	89,09	471.013.420,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.320.000,00	16.825.000,00	91,83	28.005.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	86.790.000,00	72.405.800,00	83,42	136.383.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	65.350.000,00	33.369.036,00	51,06	94.675.716,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	522.748.000,00	467.999.024,00	89,52	905.750.706,00
24	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.322.457.470,00	2.276.533.552,00	98,02	4.767.980.455,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	248.300.933,00	226.161.390,00	91,08	33.449.282,00
26	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.424.544.628,00	5.077.027.939,00	93,59	13.187.485.614,39
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.907.397.938,15	3.799.482.560,00	97,23	22.359.239.323,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.562.089.000,00	1.403.508.674,00	89,84	1.228.699.600,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	779.818.000,00	708.713.270,00	90,88	118.929.500,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.466.877.416,00	1.309.649.665,00	89,28	196.163.554,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	779.785.000,00	720.630.541,00	92,41	900.370.556,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.694.064.401,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	946.759.700,00	752.003.453,00	79,42	2.686.591.900,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	284.500.000,00	245.801.335,00	86,39	198.252.782,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00	399.685.000,00	99,92	691.420.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	236.001.900,00	233.277.810,00	98,84	121.990.456,00
37	Belanja Pakaian Siaga	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00
38	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	16.770.000,00
39	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
40	Belanja Pakaian Adat Daerah	185.500.000,00	173.099.910,00	93,31	156.570.000,00
41	Belanja Pakaian Olahraga	280.095.000,00	254.009.804,00	90,68	52.100.000,00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	203.540.000,00	203.539.764,00	99,99	197.069.000,00
JUMLAH		31.598.791.316,55	29.277.714.860,00	92,65	65.246.876.095,39

- b. Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, merupakan belanja aset tetap peralatan dan mesin yang biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.233.726.136,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.400.000,00	3.250.000,00	95,58	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.800.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.250.000,00	3.110.000,00	95,69	3.700.000,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	100,00	4.875.000,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.199.330.000,00	1.181.881.896,00	98,54	1.386.753.500,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.340.000,00	3.570.000,00	66,85	3.070.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.039.832,00	8.564.440,00	94,74	37.876.700,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.150.000,00	2.719.500,00	86,33	0,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	55.500.000,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	8.850.000,00
19	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
21	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.610.000,00	5.610.000,00	100,00	5.630.000,00
22	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	2.125.000,00	1.865.300,00	87,77	0,00
23	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	13.962.000,00	13.755.000,00	98,51	0,00
JUMLAH		1.257.406.832,00	1.233.726.136,00	98,12	1.603.105.200,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, ketentuan mengenai nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap, dianggarkan dan dicatat pada kelompok belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.093.066.534,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	639.550.000,00	587.150.000,00	91,81	0,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	549.700.000,00	404.737.500,00	73,63	554.250.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	226.080.000,00	193.350.000,00	85,52	752.305.000,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	26.600.000,00	12.600.000,00	47,37	109.931.484,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000,00	54.000.000,00	75,00	32.500.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	2.700.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.500.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.200.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	741.300.000,00	731.600.000,00	98,69	667.180.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	161.600.000,00	157.800.000,00	97,65	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.354.690.000,00	1.207.125.000,00	89,11	3.476.671.573,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	93.918.000,00	91.875.379,00	97,83	231.442.083,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	31.920.000,00	23.940.000,00	75,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.756.480.000,00	2.582.856.800,00	93,70	3.077.160.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	868.590.000,00	868.590.000,00	100,00	990.400.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	497.008.200,00	493.935.000,00	99,38	405.340.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	84.810.000,00	67.090.000,00	79,11	100.330.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.865.760.000,00	1.572.090.000,00	84,26	1.762.995.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	437.970.000,00	435.060.000,00	99,34	127.400.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	163.350.000,00	143.510.000,00	87,85	147.915.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	720.464.000,00	709.864.000,00	98,53	774.949.669,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.544.870.428,00	7.044.500.000,00	93,37	10.912.325.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	53.240.000,00	53.240.000,00	100,00	84.285.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.065.500.000,00	935.300.000,00	87,78	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	426.120.192,00	414.820.000,00	97,35	380.640.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.422.992.328,00	4.248.345.000,00	96,05	3.955.800.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.915.578.800,00	2.820.240.000,00	96,73	2.793.360.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.248.808.772,00	2.008.325.000,00	89,31	1.963.080.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	602.400.000,00	547.930.000,00	90,96	393.210.000,00
30	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.540.000,00	15.140.000,00	64,32	7.980.000,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	131.900.000,00	103.120.000,00	78,18	163.500.000,00
32	Belanja Jasa Tata Rias	33.950.000,00	27.750.000,00	81,74	218.500.000,00
33	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	120.000.000,00
34	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.500.000,00	144.237.500,00	87,15	28.023.580,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	700.755.000,00	672.405.000,00	95,95	772.151.000,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.501.460.000,00	2.433.893.200,00	97,30	624.482.500,00
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.002.000,00	6.527.459,00	23,31	0,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	185.043.000,00	184.437.000,00	99,67	155.680.657,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	8.679.720,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	46.200.000,00	34.200.000,00	74,03	38.400.000,00
41	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.000.000,00	39.984.950,00	99,96	5.000.000,00
42	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.102.500.000,00	1.057.890.000,00	95,95	1.909.104.000,00
43	Belanja Tagihan Telepon	599.355.200,00	585.375.016,00	97,67	642.629.470,00
44	Belanja Tagihan Air	32.990.000,00	31.652.300,00	95,95	31.366.600,00
45	Belanja Tagihan Listrik	3.678.151.327,00	3.461.975.755,00	94,12	9.702.355.709,00
46	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
47	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1.785.197.217,00	1.714.542.086,00	96,04	1.541.451.014,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
48	Belanja Paket/Pengiriman	2.139.000,00	1.759.548,00	82,26	4.747.192,00
49	Belanja Penambahan Daya	237.340.000,00	186.056.800,00	78,39	24.874.600,00
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	583.601.000,00	380.608.300,00	65,22	271.178.605,00
51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	7.496.831.870,00	7.431.201.988,00	99,12	0,00
52	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Lembur	981.780.200,00	903.350.000,00	92,01	795.836.000,00
54	Belanja Medical Check Up	200.000.000,00	72.447.277,00	36,22	28.485.140,00
55	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.236.800.000,00	2.891.448.776,00	89,33	0,00
56	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	177.240.000,00	142.639.900,00	80,48	0,00
57	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.600.000,00	44.200.000,00	99,10	0,00
JUMLAH		54.706.676.534,00	51.093.066.534,00	93,39	50.806.975.596,00

d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp24.296.889.520,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.362.240.000,00	1.346.814.944,00	98,87	1.273.115.592,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	22.833.148.800,00	21.881.202.000,00	95,83	23.125.240.000,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	470.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	584.198.400,00	467.706.200,00	80,06	755.818.514,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	295.385.200,00	147.569.361,00	49,96	180.043.071,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	490.000.000,00	453.597.015,00	92,57	427.203.263,00
7	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		26.038.572.400,00	24.296.889.520,00	93,31	25.761.420.440,00

e. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 1.300.470.102,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.37





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Alat Pengangkat	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	6.000.000,00
2	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	20.300.000,00	19.700.000,00	97,04	6.250.000,00
3	Belanja Sewa Electric Generating Set	74.205.004,00	70.205.000,00	94,60	60.890.000,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	268.800.000,00	194.134.183,00	72,22	487.039.866,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.500.000,00	40.750.000,00	87,63	204.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	443.550.000,00	409.889.459,00	92,41	580.780.000,00
7	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
8	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	195.345.100,00	187.861.040,00	96,16	338.530.560,00
9	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	232.100.000,00	190.189.918,00	81,94	329.554.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	196.549.002,00	184.140.502,00	93,68	169.417.600,00
11	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	521.650.000,00
12	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	42.525.000,00
JUMLAH		1.484.549.106,00	1.300.470.102,00	87,60	2.751.137.026,00

f. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp918.515.446,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.38
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	968.780.200,00	874.186.446,00	90,23	1.943.894.070,00
4	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Sewa Mess/ Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan	42.379.000,00	42.379.000,00	100,00	74.879.000,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
7	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	219.750.000,00
8	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
JUMLAH		1.163.109.200,00	918.515.446,00	78,97	2.387.673.070,00

g. Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari:





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.39
Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	6.750.000,00

h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.726.718.473,72 terdiri dari:

Tabel 5.1.40
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	59.600.000,00	58.746.827,00	98,57	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	473.725.000,00	473.409.646,00	99,93	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	650.000.000,00	648.901.970,00	99,83	99.713.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	352.225.000,00	352.040.000,00	99,95	0,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	2.795.000.000,00	2.193.620.030,72	78,48	0,00
JUMLAH		4.330.550.000,00	3.726.718.473,72	86,06	99.713.000,00

i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp399.548.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	500.000.000,00	399.548.000,00	79,91	199.618.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	198.537.930,00
JUMLAH		500.000.000,00	399.548.000,00	79,91	548.155.930,00

j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Sebesar Rp788.141.861,00 terdiri dari:





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Ketenagalistrikan	9.300.000.000,00	788.141.861,00	8,47	0,00
JUMLAH		9.300.000.000,00	788.141.861,00	8,47	0,00

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) pada Dinas Perhubungan ditetapkan anggaran sebesar Rp9.300.000.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp788.141.861,00 atau 8,47%. Realisasi tersebut berupa Kegiatan Peningkatan Insfrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Dharmasraya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) Tahun 2023-2025. Sampai dengan akhir periode pelaporan pembayaran jasa belum terealisasi secara optimal, pembayaran baru satu kali tagihan pada bulan Januari 2025. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses review dan pendampingan BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana Proyek KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya. Sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan, skema pembiayaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp7.107.944.378,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.342.440.000,00	1.285.231.050,00	95,74	711.949.426,00
2	Belanja Sosialisasi	5.844.282.950,00	4.352.597.600,00	74,48	6.009.723.900,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	1.688.493.050,00	1.470.115.728,00	87,07	2.824.284.852,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	107.945.000,00
JUMLAH		8.875.216.000,00	7.107.944.378,00	80,09	9.653.903.178,00

- l. Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp4.150.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	14.300.000,00	4.150.000,00	29,02	0,00
JUMLAH		14.300.000,00	4.150.000,00	29,02	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

m. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.921.502.990,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	225.000.000,00	147.834.500,00	65,70	254.201.750,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	91.999.000,00	91.568.671,00	99,53	30.101.900,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	130.000.000,00	54.792.250,00	42,15	147.637.760,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	501.175.000,00	465.429.886,00	92,87	281.050.986,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.166.894.100,00	1.826.397.315,00	84,29	2.792.617.724,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	145.000.000,00	127.952.262,00	88,24	302.217.769,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	498.782.500,00	368.843.117,00	73,95	436.841.289,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	21.000.000,00	20.828.500,00	99,18	11.113.540,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	99.982.000,00	99,98	89.998.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	8.000.000,00	7.944.000,00	99,30	11.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	44.594.250,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.000.000,00	7.842.000,00	87,13	7.554.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.500.000,00	28.370.000,00	99,54	23.208.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	247.618.910,00	224.469.973,00	90,65	221.341.801,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.919.000,00	99,80	39.900.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	72.500.000,00	67.370.000,00	92,92	56.944.224,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00	11.500.000,00	38,33	59.850.600,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	207.901.830,00	192.359.016,00	92,52	200.230.117,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	57.655.500,00	55.610.500,00	96,45	57.730.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	13.200.000,00
JUMLAH		4.664.526.840,00	3.921.502.990,00	84,07	5.115.334.210,00

n. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.388.230.028,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.027.154.780,00	1.013.534.070,00	98,67	75.082.800,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	49.197.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	88.926.600,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	380.434.000,00	374.695.958,00	98,49	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.435.588.780,00	1.388.230.028,00	96,70	213.206.400,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- o. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.344.978.070,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.129.085.000,00	1.121.100.000,00	99,29	3.299.803.900,00
2	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	70.000.000,00	69.700.000,00	99,57	67.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	120.500.000,00	83.978.070,00	69,69	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.988.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00	74.550.000,00
JUMLAH		1.389.785.000,00	1.344.978.070,00	96,78	3.451.341.900,00

- p. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp28.063.674.623,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.48
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.669.917.090,00	24.423.028.073,00	99,00	47.621.865.817,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.993.809.500,00	3.640.646.550,00	91,16	10.826.229.850,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	535.932.845,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	162.022.344,00
JUMLAH		28.663.726.590,00	28.063.674.623,00	97,91	59.159.250.856,00

- q. Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp352.550.500,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun 2025 dan 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	166.200.000,00	125.990.500,00	75,81	966.960.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	467.860.000,00	226.560.000,00	48,42	65.000.000,00
JUMLAH		634.060.000,00	352.550.500,00	55,60	1.031.960.000,00

r. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp23.786.453.442,00.

Penerimaan Dana BOS Reguler dan Kinerja, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun 2025 yang ditransfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	99,80	23.540.172.996,00
JUMLAH		23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	99,80	23.588.757.996,00

Pendapatan dan Belanja Dana BOS, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	158.982.712,00	36.378.712,00	22,88	21.743.185,00
2	Pendapatan	39.874.153.000,00	39.812.143.838,00	99,84	39.889.427.037,00
	BOS Reguler	33.579.178.000,00	33.570.064.383,00	99,97	33.532.789.037,00
	BOS Kinerja	1.253.250.000,00	1.253.250.000,00	100,00	1.237.500.000,00
	BOP PAUD	4.083.125.000,00	4.054.813.455,00	99,31	4.252.128.000,00
	BOP Kesetaraan	958.600.000,00	934.016.000,00	97,44	867.010.000,00
3	Total Penerimaan (1+2)	40.033.135.712,00	39.848.522.550,00	99,54	39.911.170.222,00
4	Belanja Barang dan Jasa BOSP (Negeri)	23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	99,80	23.588.757.996,00
	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00
	Barang dan Jasa- BOS Reguler	22.746.884.876,00	22.719.962.567,00	99,88	22.242.751.480,00
	Barang dan Jasa- BOS Kinerja	895.820.775,00	875.790.875,00	97,76	583.859.300,00
	Barang dan Jasa BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	577.362.216,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	160.700.000,00	160.700.000,00	100,00	136.200.000,00
5	Belanja Modal BOSP (Negeri)	7.490.077.660,00	7.483.921.660,00	99,92	7.613.438.364,00
	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	100,00	3.993.991.164,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	99,85	3.619.447.200,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP (Swasta)	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	99,08	8.549.991.150,00
	Belanja Hibah BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	99,81	4.344.257.150,00
	Belanja Hibah BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	98,64	3.576.834.000,00
	Belanja Hibah BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	96,92	628.900.000,00
	Total Belanja	39.907.348.311,00	39.775.025.245,00	99,67	39.752.187.510,00
	Surplus / Defisit	125.787.401,00	73.497.305,00	58,43	158.982.712,00

Nilai Surplus Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp73.497.305,00 terdiri dari saldo Kas di BOS sebesar Rp52.396.305,00 dan pengembalian Dana BOSP PAUD yang tidak beroperasi pada Tahun 2025 ke Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.100.000,00, serta kekurangan setor pengembalian Dana BOSP-BOP PAUD Reguler ke Kasda sebesar Rp1.000,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 4a, 4b dan 4c** pada Laporan Keuangan ini.

- s. Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp12.967.920.285,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.52
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Dinas Kesehatan	2.815.424.675,00	2.614.410.503,00	92,86	750.000,00
1	Dinas Kesehatan	2.200.024.675,00	1.999.529.479,00	90,89	750.000,00
2	Puskesmas Sitiung IV	615.400.000,00	614.881.024,00	99,92	0,00
II	BLUD Puskesmas	10.440.401.205,00	10.353.509.782,00	99,17	1.657.358.477,00
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	101.349.000,00	94.524.000,00	93,27	0,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	739.506.105,00	730.221.000,00	98,74	0,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	846.435.000,00	839.476.024,00	99,18	0,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	844.100.000,00	842.587.139,00	99,82	159.724.439,00
5	BLUD Puskesmas Silago	678.405.000,00	677.492.961,00	99,87	530.711.147,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	645.572.000,00	644.741.401,00	99,87	12.822.000,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	639.485.400,00	624.926.938,00	97,72	395.942.000,00
8	Puskesmas Padang Laweh	629.636.000,00	628.700.257,00	99,85	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
9	Puskesmas Koto Besar	673.420.000,00	636.690.165,00	94,55	0,00
10	Puskesmas Koto Baru	871.985.800,00	871.754.939,00	99,97	0,00
11	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	858.721.950,00	858.229.642,00	99,94	474.872.000,00
12	BLUD Puskesmas Gunung Medan	667.348.000,00	666.848.000,00	99,93	750.000,00
13	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	840.036.950,00	837.390.250,00	99,68	750.000,00
14	BLUD Puskesmas Timpeh	797.700.000,00	795.193.886,00	99,69	0,00
15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	606.700.000,00	604.733.180,00	99,68	81.786.891,00
JUMLAH		13.255.825.880,00	12.967.920.285,00	97,83	1.658.108.477,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.766.505.971,38 terdiri dari:

Tabel 5.1.53
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	60.002.793.878,00	59.800.177.552,00	99,66	44.141.885.938,00
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	54.845.209.878,00	54.667.144.078,00	99,68	38.718.367.603,00
2	RSUD Sungai Rumbai	5.157.584.000,00	5.133.033.474,00	99,52	5.423.518.335,00
II	BLUD Puskesmas	7.213.880.290,66	6.966.328.419,38	96,57	6.787.916.750,80
1	BLUD Labkesda	155.327.877,00	149.524.095,00	96,26	107.069.116,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	264.714.484,00	263.828.974,00	99,67	261.523.972,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung I	719.979.198,62	719.910.313,00	99,99	777.463.991,00
4	BLUD Puskesmas Tiumang	363.550.000,00	320.525.175,00	88,17	334.976.142,00
5	BLUD Puskesmas Silago	308.635.897,00	306.083.732,00	99,17	391.452.600,00
6	BLUD Puskesmas Sialang	254.101.586,00	238.762.300,00	93,96	275.474.133,00
7	BLUD Puskesmas Sitiung II	405.557.733,09	405.537.077,00	99,99	474.935.262,00
8	BLUD Puskesmas Padang Laweh	300.815.184,00	299.602.097,00	99,60	353.578.373,00
9	BLUD Puskesmas Koto Besar	722.277.983,37	671.965.199,53	93,03	566.521.091,82
10	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.193.407.416,00	1.189.986.000,85	99,71	920.573.063,00
11	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	540.100.157,00	539.821.898,00	99,95	523.838.923,00
12	BLUD Puskesmas Gunung Medan	314.615.000,00	309.746.949,00	98,45	348.120.543,00
13	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	794.686.024,00	715.083.374,00	89,98	734.162.922,00
14	BLUD Puskesmas Timpeh	471.634.719,00	471.405.878,00	99,95	423.470.588,98
15	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	404.477.031,58	364.545.357,00	90,13	294.756.030,00
JUMLAH		67.216.674.168,66	66.766.505.971,38	99,33	50.929.802.688,80

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp67.216.674.168,66 terealisasi sebesar Rp66.766.505.971,38 atau 99,33%. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp15.836.703.282,58 atau 31,10 %.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2025 dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.a.3. Hibah	11.090.591.943,00	34.253.926.757,00

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp13.646.830.285,00 dengan realisasi Rp11.090.591.943,00 atau 81,27%. Belanja Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.163.334.814,00 atau -67,62% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp34.253.926.757,00.

Tabel 5.1.54
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00	180.980.000,00	99,99	21.706.113.000,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00	180.980.000,00	99,99	21.706.113.000,00
II	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.946.000.000,00	1.468.996.515,00	37,23	3.142.109.059,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.555.000.000,00	1.057.079.615,00	67,98	1.229.825.159,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.391.000.000,00	411.916.900,00	17,23	1.867.283.900,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
III	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	100,00	855.713.548,00
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	100,00	855.713.548,00
IV	Belanja Hibah Dana BOSP	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	99,08	8.549.991.150,00
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	99,81	4.344.257.150,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	98,64	3.576.834.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	96,92	628.900.000,00
JUMLAH		13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	81,27	34.253.926.757,00

Rincian Belanja Hibah Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b. Belanja Modal	45.656.214.008,30	102.187.717.063,16





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp58.010.448.699,50 dengan realisasi sebesar Rp45.656.214.008,30 atau 78,70%. Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.531.503.054,86 atau -55,32 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp102.187.717.063,16. Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini:

Tabel 5.1.55
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	88,53	24.237.257.450,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.722.171.276,50	16.965.018.966,71	68,62	28.954.072.575,16
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.138.190.500,00	11.201.347.218,59	79,23	45.054.989.838,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	99,64	3.810.397.200,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	260.051.000,00	251.304.000,00	96,64	131.000.000,00
JUMLAH		58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	78,70	102.187.717.063,16

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.1 Belanja Tanah	0,00	0,00

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.2 Belanja Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	24.237.257.450,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp14.255.474.863,00 dengan realisasi sebesar Rp12.620.746.293,00 atau 88,53%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp11.616.511.157,00 atau -47,93 %.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan berikut ini:

Tabel 5.1.56
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	1.215.000.000,00	1.110.500.000,00	91,40	12.642.100,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.834.000.000,00	1.649.902.995,00	89,96	8.424.966.950,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.500.000,00	5.328.000,00	96,87	11.700.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.538.871.250,00	2.006.252.290,00	79,02	3.292.100.882,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	269.146.100,00	192.543.880,00	71,54	118.350.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	939.615.000,00	929.150.000,00	98,89	1.683.388.467,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	497.078.000,00
9	Belanja Modal Komputer	1.336.184.000,00	1.217.437.662,00	91,11	2.680.330.000,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	387.500.000,00	324.500.003,00	83,74	0,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	64.737.328,00	63.306.140,00	97,79	34.380.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.619.600,00	35.400.000,00	99,38	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.993.991.164,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	100,00	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00	76,64	3.477.229.887,00
JUMLAH		14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	88,53	24.237.257.450,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.3 Belanja Gedung dan Bangunan	16.965.018.966,71	28.954.072.575,16

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.722.171.276,50 dengan realisasi sebesar Rp16.965.018.966,71 atau 68,62%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp11.989.053.608,45 atau -41,41%.

Tabel 5.1.57
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.015.783.276,50	15.375.518.773,71	66,80	26.466.910.850,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	901.888.000,00	876.074.723,00	97,14	2.015.207.578,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	804.500.000,00	713.425.470,00	88,68	471.954.147,16
JUMLAH		24.722.171.276,50	16.965.018.966,71	68,62	28.954.072.575,16

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.4 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.201.347.218,59	45.054.989.838,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp14.138.190.500,00 dengan realisasi sebesar Rp11.201.347.218,59 atau 79,23%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp33.853.642.619,41 atau -75,14%.

Tabel 5.1.58
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	77,23	40.096.496.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.285.430.000,00	2.262.996.593,80	99,02	4.414.328.838,00
3	Belanja Modal Instalasi	60.768.000,00	56.801.714,79	93,47	88.450.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	99.992.500,00	71.000.000,00	71,01	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	423.000.000,00	107.590.007,00	25,43	455.715.000,00
JUMLAH		14.138.190.500,00	11.201.347.218,59	79,23	45.054.989.838,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	4.617.797.530,00	3.810.397.200,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.634.561.060,00 dengan realisasi sebesar Rp4.617.797.530,00 atau 99,64%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp807.400.330,00 atau 21,19%.

Tabel 5.1.59

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	84.001.500,00	83.894.000,00	99,87	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	32.000.000,00	31.899.970,00	99,68	190.950.000,00
3	Belanja Modal Hewan	280.000.000,00	269.600.000,00	96,28	0,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	3.619.447.200,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	99,85	0,00
JUMLAH		4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	99,64	3.810.397.200,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.b.6 Belanja Aset Lainnya	251.304.000,00	131.000.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp260.051.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.304.000,00 atau 99,85%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp120.304.000,00 atau 91,84%.

Tabel 5.1.60

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	260.051.000,00	251.304.000,00	99,85	113.170.000,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	17.830.000,00
JUMLAH		260.051.000,00	251.304.000,00	99,85	131.000.000,00

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2025 terdapat pada **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.2.c.	Belanja Tak Terduga	196.489.050,00	2.485.520.287,00

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp1.775.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp196.489.050,00 atau sebesar 11,06%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025 yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1.61
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan korban kebakaran di Kabupaten Dharmasraya an. Debby Chintia Sari dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/388/KPTS-BUP/2024 Tanggal 14 Nopember Tahun 2024 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	103.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga atas banjir a.n Martin Efendi, HS.S.Hut,M.M dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/76/KPTS-BUP/2025 Tanggal 12 Maret Tahun 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	43.489.050,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Korban Bencana Kebakaran a.n Adamri dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/103/KPTS-BUP/2025 Tanggal 15 April Tahun 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Bencana Banjir Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.	5.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Korban Bencana Kebakaran a.n Andoni Rizal dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 100.3.3.2/206/KPTS-BUP/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Korban Kebakaran di Kabupaten Dharmasraya.	45.000.000,00
JUMLAH		196.489.050,00

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.3	Belanja Transfer	114.203.431.208,00	115.315.142.464,00

Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2025 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp117.178.797.140,00 dan terealisasi sebesar Rp114.203.431.208,00 atau 97,42% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Realisasi Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realiasi 2024
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Belanja Bagi Hasil	5.134.311.500,00	2.800.869.072,00	54,55	1.984.369.824,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.870.101.500,00	2.590.944.672,00	53,20	1.762.449.469,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	264.210.000,00	209.924.400,00	79,45	221.920.355,00
II	Belanja Bantuan Keuangan	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	99,43	113.330.772.640,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.044.485.640,00	111.402.562.136,00	99,43	113.330.772.640,00
	JUMLAH	117.178.797.140,00	114.203.431.208,00	97,46	115.315.142.464,00

Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp4.870.101.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.590.944.672,00 atau 53,20%. Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp264.210.000,00 terealisasi sebesar Rp209.924.400,00 atau 79,45%.

Uraian selengkapnya mengenai Transfer Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8** dan Transfer Bagi Hasil Retribusi pada **Lampiran 9** di Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp112.044.485.640,00 dan terealisasi sebesar Rp111.402.562.136,00 atau 99,42% yang diperuntukkan untuk 52 Nagari. Dana Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp56.185.785.000,00 dan terealisasi 100%. Dana Bantuan Keuangan ke Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp55.858.700.640,00 dan terealisasi sebesar Rp55.216.777.136,00 atau 98,85%.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan. Rincian Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) pada **Lampiran 10** di Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.4	Surplus/(Defisit)	36.424.903.271,77	(42.345.469.488,50)

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Surplus sebesar Rp36.424.903.271,77 sedangkan pada Tahun 2024 (Defisit) sebesar Rp(42.345.469.488,50).





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.5.a. Penerimaan Pembiayaan	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.085.069.988,55 terealisasi sebesar Rp4.085.069.988,55 atau 100%.

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2024. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah	Rp	1.714.291.612,49
- Fisik Kas di Kasda	Rp	1.803.954.033,49
- Pengembalian Dana BOP PAUD	Rp	(89.662.421,00)
b. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD	Rp	6.925.010,00
c. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh	Rp	37.538.774,51
d. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Rumbai	Rp	34.614,73
e. Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	1.234.968.495,82
f. Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas	Rp	932.328.769,00
g. Saldo Akhir Dana BOSP	Rp	36.378.712,00
h. Dana BOP PAUD Tahun 2024 atas sekolah yang tidak beroperasi dikembalikan ke Kas Daerah :		
1) Pengembalian sebelum tanggal 31 Desember 2024	Rp	89.662.421,00
2) Pengembalian setelah tanggal 31 Desember 2024	Rp	32.941.579,00
Jumlah	Rp	4.085.069.988,55

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.5.b. Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi 100% merupakan penyertaan modal pada Bank Nagari, sedangkan Tahun 2024 tidak ada Pengeluaran Pembiayaan.

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.A.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 39.009.973.260,32 4.085.069.988,55
Sebelum Koreksi

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebelum koreksi adalah sebesar Rp39.009.973.260,32 sedangkan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan SILPA sebesar Rp34.924.903.271,77 atau 854,94 %.

Secara rinci Nilai SILPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah	Rp	35.693.263.773,72
-	Fisik Kas di Kasda	Rp	35.853.079.773,72
-	Kas BLUD RSUD Sungai Rumbai setor ke Kas Daerah	Rp	(15.812.000,00)
-	Teller Bank Nagari transfer ganda Dana BOP PAUD Tahun 2025	Rp	(300.000,00)
-	atas sekolah yang tidak beroperasi setor ke Kasda	Rp	(122.604.000,00)
-	Dana BOP PAUD Tahun 2024		
-	atas sekolah yang tidak beroperasi setor ke Kasda	Rp	(21.100.000,00)
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	Rp	2.450.038.397,60
c.	Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas	Rp	80.720.194,00
d.	Saldo Akhir Kas di Dana BOSP	Rp	52.396.305,00
e.	Dana BOP PAUD Tahun 2024 dan 2025 atas sekolah yang tidak beroperasi setor ke Kasda per 31 Desember 2025	Rp	143.704.000,00
f.	Dana BOP PAUD atas sekolah yang tidak beroperasi Tahun 2025 belum setor ke Kasda per 31 Desember 2025	Rp	1.000,00
Jumlah			Rp 38.420.123.670,32

Penjelasan lebih rinci mengenai saldo Kas di Kas Daerah, Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas, Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas, dan Saldo Akhir Dana BOS, terdapat di penjelasan Neraca Aset Lancar.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.6.a Koreksi SILPA	(589.849.590,00)	0,00

Terdapatnya koreksi pada SILPA 2025 sebesar Rp589.849.590,00 disebabkan karena nilai kas di Kas Daerah berkurang sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.A.6.b Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Koreksi	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55

SILPA Tahun 2025 setelah koreksi adalah sebesar Rp38.420.123.670,32 sedangkan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2025 dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan SILPA sebesar Rp34.335.053.681,77 atau 854,94 %. Uraian Perhitungan SILPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	36.424.903.271,77
Pembiayaan Netto	Rp	2.585.069.988,55
SILPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	39.009.973.260,32
Koreksi SILPA	Rp	(589.849.590,00)
SILPA LRA Setelah Koreksi	Rp	38.420.123.670,32



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)**Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp4.085.069.988,55 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan SAL

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan penggunaan Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55 yang digunakan untuk menutup defisit Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2025.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Kurang/Pembiayaan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan	Rp	952.036.775.854,25
2. Realisasi Belanja	Rp	915.611.872.582,48
3. Surplus/Defisit (1 - 2)	Rp	36.424.903.271,77
4. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.085.069.988,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.500.000.000,00
5. Pembiayaan Netto (4.a - 4.b)	Rp	2.585.069.988,55
6. SILPA (3 + 5)	Rp	39.009.973.260,32
7. Koreksi SILPA	Rp	589.849.590,00
8. SILPA Setelah Koreksi (6 – 7)	Rp	38.420.123.670,32

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.420.123.670,32 merupakan kelebihan perhitungan antara realisasi pendapatan dan belanja setelah diperhitungkan dengan pembiayaan netto.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C. NERACA**V.C.1. ASET**

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang kedua puluh kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya menggambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2024.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 memiliki Aset sebesar Rp2.419.003.243.303,50, Kewajiban sebesar Rp30.691.796.791,88 dan Ekuitas sebesar Rp2.388.311.446.511,62.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.419.003.243.303,50 turun sebesar Rp33.895.214.140,46 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.452.898.457.443,96 atau -1,38%. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a. Aset Lancar	111.428.814.984,10	112.519.782.305,82

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Piutang Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp111.428.814.984,10 mengalami penurunan sebesar Rp1.090.967.321,72 atau -0,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.519.782.305,82. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Lancar		Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00
d.	Kas di BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06
e.	Kas di BOS	52.396.305,00	36.378.712,00
f.	Kas Lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00
g.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
h.	Piutang Pajak	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00
i.	Penyisihan Piutang Pajak	(17.317.662.827,76)	(15.864.849.434,96)
j.	Piutang Retribusi	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Lancar		Tahun 2025	Tahun 2024
k.	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.984.631.072,37)	(1.305.862.079,55)
l.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00
m.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	(27.646.597,30)
n.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53
o.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(3.725.797.213,34)	(3.041.699.022,11)
p.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.594.652.000,00	15.091.731.000,00
q.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.784.261.132,00	21.749.014.918,00
r.	Piutang Pendapatan Lainnya	1.126.650,00	459.480,00
s.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(5.633,25)	(2.297,40)
t.	Belanja Dibayar Dimuka	308.333.610,02	274.605.153,94
u.	Persediaan	24.626.599.975,67	46.962.340.588,12
Jumlah		111.428.814.984,10	112.519.782.305,82

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.1 Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/796/BKD-2021 dan Nomor PKS/03/PL/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Saldo di Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp35.853.079.773,72. Terdapat saldo sebesar Rp159.816.000,00 bukan merupakan bagian kas dikasda dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Dana BLUD atas temuan BPK RI pada belanja daerah Tahun 2025 disetor ke Kasda seharusnya ke Kas BLUD sebesar Rp15.812.000,00, telah dipindahbukukan ke rekening kas BLUD RSUD Sungai Rumbai pada tanggal 28 Januari 2026.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Transfer ganda oleh teller Bank Nagari atas virtual account TRF CR 9913111194102010901 ke kas daerah sebesar Rp300.000,00, dan telah disetor ke rekening teller Bank Nagari pada tanggal 30 April 2026 sebesar Rp300.000,00.
- c. Pengembalian Dana BOSP PAUD atas sekolah yang tidak beroperasi Tahun 2024 dan 2025 telah disetor ke Kasda sebesar Rp143.705.000,00, di reklas pencatatannya ke Kas Lainnya. Terdiri dari penyeteroran pada tahun 2024 sebesar Rp89.662421,00, tahun 2025 sebesar Rp64.041.579,00 dan tahun 2026 sebesar Rp1.000,00. Telah dilaksanakan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Nomor LAP-24/Reviu/Inspektorat-2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bersurat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 900.1.14.2/454/BKD-2026 tanggal 14 April 2026 hal Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kab. Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK Puskesmas, Dana BOK Tunjangan Khusus, atau Dana BOP MTB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk dilakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seharusnya nilai kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.283.113.363,72, namun telah terjadi kekurangan kas sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor: LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

Kas di Kas Daerah merupakan bagian dari SILPA Tahun 2025 termasuk di dalamnya sisa dana transfer pusat yang peruntukannya telah ditentukan penggunaannya, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.2

Rincian Sisa Dana Transfer Earmark Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	7.031.582.021,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jumlah
	Bidang Pendidikan	3.993.555.707,00
	Bidang Kesehatan	2.339.223.377,00
	Bidang PPPK	698.802.937,00
2.	DAK Fisik	584.977.419,56
	PAUD	6.070.890,00
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	578.879.531,00
	Fisik Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	26.998,56
3.	DAK Nonfisik	2.093.486.065,00
	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	621.946.536,00
	Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	152.174.182,00
	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	100.950,00
	BOK Dinas Kesehatan	266.561.299,00
	BOK BPOM	149.200,00
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	991.519.188,00
	BOP Pertanian	380.000,00
	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	60.654.710,00
4.	Insentif Fiskal	192.390.453,00
5.	DBH Sawit	2.574.395.140,00
	DBH Sawit 2025	474.385.160,00
	DBH Sawit 2024	2.100.009.980,00
	Total	12.476.831.098,56

Rincian mengenai Sisa DAK Fisik Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 11a** dan DAK Nonfisik pada **Lampiran 11b** di Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan Saldo Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.3 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp6.925.010,00 yang terdiri atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.525.010,00 dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.400.000 yang disetor ke RKUD pada tanggal 13 Januari 2025.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.4 Kas di Kas BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2025 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah.

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Saldo Kas di BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	197.775.907,51	37.538.774,51
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	211.068.129,73	34.614,73
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	152.728.980,00	84.467.918,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	66.300.098,70	51.519.744,70
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	107.244.042,09	13.789.638,09
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	57.970.681,21	14.252.133,21
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	207.509.604,00	80.366.231,00
8	BLUD Puskesmas Silago	73.453.572,00	77.758.822,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	84.432.212,00	7.747.969,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	258.536.284,62	52.334.006,62
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	561.787.081,67	325.978.568,00
12	BLUD Puskesmas Timpeh	80.548.402,25	60.730.996,25
13	BLUD Puskesmas Sialang	56.570.183,00	94.671.586,00
14	BLUD Puskesmas Tiumang	105.130.380,00	82.712.372,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	120.434.936,24	218.333.964,37
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	32.683.471,58	59.648.792,58
17	BLUD Labkesda	75.864.431,00	10.655.754,00
	JUMLAH	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06

Saldo di BLUD Tahun 2025 merupakan saldo kas dibank sebesar Rp2.450.038.397,60. Untuk fisik saldo kas di BLUD pada RSUD Sungai Rumbai, nilai sebesar Rp15.812.000,00 per 31 Desember 2025 berada di Kas Daerah, dipindahbukukan ke rekening kas BLUD RSUD Sungai Rumbai pada tanggal 28 Januari 2026. Kas di BLUD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.177.496.512,54 atau 92,53% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.272.541.885,06.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2025 dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.5 Kas di BOS	52.396.305,00	36.378.712,00

Kas di BOS adalah saldo Kas Dana BOS pada saat tanggal neraca merupakan sisa Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan atas sekolah-sekolah negeri pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2025, terdiri dari 147 Sekolah Dasar Negeri, 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 16 Taman Kanak-Kanak Negeri, dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.396.305,00 merupakan kas dibank. Nilai saldo kas di BOS Tahun 2024 sebesar Rp36.378.712,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2025 dapat dilihat di **Lampiran 4a, 4b dan 4c** pada Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.6 Kas Lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00

Kas Lainnya adalah berupa berupa pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah atau pihak terkait.

Kas Lainnya sebesar Rp224.425.194,00 terdiri dari:

1. Pengembalian dana DAK Nonfisik BOP PAUD yang tidak beroperasi pada Tahun 2024 dan 2025 telah disetor ke Kasda sebesar Rp143.705.000,00, terdiri dari penyetoran pada tahun 2024 sebesar Rp89.662.421,00, tahun 2025 sebesar Rp64.041.579,00 dan tahun 2026 sebesar Rp1.000,00. Rekap pengembalian dana DAK Nonfisik BOP PAUD berada pada Lampiran 4c pada Laporan Keuangan ini.

Telah dilaksanakan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Dharmasraya Nomor LAP-24/Reviu/Inspektorat-2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bersurat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 900.1.14.2/454/BKD-2026 tanggal 14 April 2026 hal Rekapitulasi Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kab. Dharmasraya sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOK Puskesmas, Dana BOK Tunjangan Khusus, atau Dana BOP MTB kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk dilakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau antar jenis DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sisa Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp80.720.194,00 diuraikan pada tabel berikut ini.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.4
Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Puskesmas	2025	2024
1	Beringin Sakti	1.966.820,00	111.162.109,00
2	Gunung Medan	524.000,00	39.529.945,00
3	Koto Baru	231.061,00	121.278.458,00
4	Koto Besar	36.809.835,00	102.854.414,00
5	Padang Laweh	936.743,00	26.714.057,00
6	Sialang	830.599,00	33.803.252,00
7	Silago	912.039,00	28.305.853,00
8	Sitiung I	6.958.976,00	147.187.256,00
9	Sitiung II	14.573.062,00	39.739.578,00
10	Sitiung IV	518.976,00	37.051.734,00
11	Sungai Dareh	2.659.750,00	33.998.041,00
12	Sungai Limau	9.279.000,00	121.964.474,00
13	Sungai Rumbai	500.358,00	12.104.937,00
14	Timpeh	2.506.114,00	11.256.600,00
15	Tiumang	1.512.861,00	65.378.061,00
	Jumlah	80.720.194,00	932.328.769,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.7 Piutang Pajak	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Reklame, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024
1	PBB-P2	26.317.162.155,00	24.014.340.394,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.313.490.012,00	1.250.349.347,00
3	Pajak Reklame	7.091.906,00	13.509.375,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	196.431.000,00
	Jumlah	27.834.175.073,00	25.474.630.116,00

1. Piutang PBB-P2

Dasar penetapan piutang PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) adalah sisa tunggakan pokok pajak beserta denda dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak, yang tercatat resmi dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Nilai Piutang PBB-P2 pada Tahun 2025 diberikan ketetapan piutang sebesar Rp5.317,967,018,00. Pada tahun berjalan terdapat koreksi piutang PBB P2 sebesar Rp299.684.954,00, disebabkan karena adanya perubahan data





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Pajak yang mengakibatkan perubahan data piutang tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Piutang PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2024	Ketetapan Tahun 2025	Koreksi Penambahan Piutang	Koreksi Pengurangan Piutang	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Des 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7
1	2025		5.317.967.018,00	0,00	6.696.562,00	2.925.070.760,00	2.386.199.696,00
2	2024	2.271.532.328,00	0,00	0,00	1.905.705,00	152.503.935,00	2.117.122.688,00
3	2023	2.099.666.847,00	0,00	12.111.805,00	0,00	65.495.694,00	2.046.282.958,00
4	2022	2.059.573.139,00	0,00	41.863.128,00	0,00	51.858.206,00	2.049.578.061,00
5	2021	1.981.623.505,00	0,00	34.238.210,00	0,00	38.607.994,00	1.977.253.721,00
6	2020	2.172.631.698,00	0,00	0,00	849.848,00	21.127.533,00	2.150.654.317,00
7	2019	1.994.473.506,00	0,00	125.931.109,00	0,00	15.462.910,00	2.104.941.705,00
8	2018	2.229.454.596,00	0,00	50.536.754,00	0,00	14.973.789,00	2.265.017.561,00
9	2017	1.955.210.022,00	0,00	6.519.721,00	0,00	13.893.014,00	1.947.836.729,00
10	2016	2.165.401.946,00	0,00	37.936.342,00	0,00	15.667.733,00	2.187.670.555,00
11	2015	2.297.578.736,00	0,00	0,00	0,00	141.443,00	2.297.437.293,00
12	2014	2.787.194.071,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	2.787.166.871,00
	Jumlah	24.014.340.394,00	5.317.967.018,00	309.137.069,00	9.452.115,00	3.314.830.211,00	26.317.162.155,00

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.313.490.012,00 berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN) yang telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 19 Januari 2026 dan Piutang PPJ PLN Tahun 2024 sebesar Rp1.250.349.347,00 telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2025.

3. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp7.091.906,00 yang berasal dari beberapa Wajib pajak yang sampai pada Laporan Keuangan ini disusun belum melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
1	Tahun 2025						
1	PT. KREASI GIRI KUSALO(000000753/REK/25)		0,00	0,00	6.233.906,00	6.233.906,00	Belum bayar
2	Tahun 2024						

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
1	CV. WULAN CAHAYA RIVSKI (000000042/REK/24)	321.750,00				321.750,00	Belum bayar
2	PT. KREASI GIRI KUSALO (000000045/REK/24)	10.560.000,00	10.560.000,00	18/06/2025	0,00	0,00	
3	CV. ARIZONA CENDIKA ABADI (000000052/REK/24)	321.750,00	0,00		0,00	321.750,00	Belum bayar
4	SUTAN RIKI (000000079/REK/24)	1.287.000,00	1.287.000,00	10/07/2025	0,00	0,00	
5	HERI (000000231/REK/24)	214.500,00	214.500,00	11/02/2025	0,00	0,00	
6	HERI (000000232/REK/24)	214.500,00	0,00		0,00	214.500,00	Belum bayar
7	MANDIRI TASPEN KCP DHARMASRAYA (000000265/REK/24)	536.250,00	536.250,00	22/08/2025	0,00	0,00	
8	MANDIRI TASPEN KCP DHARMASRAYA (000000266/REK/24)	53.625,00	53.625,00	22/08/2025	0,00	0,00	
	Jumlah	13.509.375,00	12.651.375,00		6.233.906,00	7.091.906,00	

4. Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2025 sebesar Rp196.431,000,00 merupakan piutang dari PT Nindya Karya atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung (*multy years*) Kabupaten Dharmasraya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp785.724,000,00 sesuai dengan tarif sebesar 25% yang disampaikan melalui SPTPD yang diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021 yang sampai pada Laporan Keuangan ini telah dilakukan pembayaran ke RKUD pada tanggal 30 Maret 2026.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(17.317.662.827,76)	(30.635.258.580,82)

Adanya perubahan Kebijakan Akuntansi No 30 Tahun 2024 untuk Penyisihan Piutang Pajak Daerah juga mengalami perubahan penilaian sehingga penyisihan piutang pajak daerah mengalami perbedaan penghitungan dari tahun sebelumnya.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.317.662.827,76 terdiri dari.

	2025	2024
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
a. Penyisihan Piutang PBB-P2	17.219.201.658,23	15.760.314.641,34
b. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	6.251.746,74
c. Penyisihan Piutang Reklame	245.669,53	67.546,88
d. Penyisihan Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.215.500,00	98.215.500,00
Jumlah	17.317.662.827,76	15.864.849.434,96





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2025 sebesar Rp17.219,201.658,23 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.7
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Piutang (Rp)	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Tahun Pajak 2025	2.386.199.696,00	< 1	Lancar	0,50	11.930.998,48
2	Tahun Pajak 2024	2.117.122.688,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	529.280.672,00
3	Tahun Pajak 2023	2.046.282.958,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	511.570.739,50
4	Tahun Pajak 2022	2.049.578.061,00	1 s.d 3	Kurang Lancar	25	512.394.515,25
5	Tahun Pajak 2021	1.977.253.721,00	3 s.d 5	Diragukan	50	988.626.860,50
6	Tahun Pajak 2020	2.150.654.317,00	3 s.d 5	Diragukan	50	1.075.327.158,50
7	Tahun Pajak 2019	2.104.941.705,00	> 5	Macet	100	2.104.941.705,00
8	Tahun Pajak 2018	2.265.017.561,00	> 5	Macet	100	2.265.017.561,00
9	Tahun Pajak 2017	1.947.836.729,00	> 5	Macet	100	1.947.836.729,00
10	Tahun Pajak 2016	2.187.670.555,00	> 5	Macet	100	2.187.670.555,00
11	Tahun Pajak 2015	2.297.437.293,00	> 5	Macet	100	2.297.437.293,00
12	Tahun Pajak 2014	2.787.166.871,00	> 5	Macet	100	2.787.166.871,00
	Jumlah	26.317.162.155,00				17.219.201.658,23

Merujuk data pada tabel diatas, penyisihan piutang PBB-P2 sampai keadaan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.219,201.658,23, terdapat penyisihan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa sebesar Rp13.590.070.714,00 yang berasal dari penyisihan piutang tahun 2014 s.d 2019 dengan kategori macet.

- b. Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 adalah sebesar Rp245.669,53 dari perhitungan ($0,5\% \times \text{Rp}6.233.906,00$) dan sisa piutang tahun 2024 sebesar Rp214.500,00 dari perhitungan ($25\% \times \text{Rp}858.000,00$).
- c. Penyisihan Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 adalah sebesar Rp98.215.500,00 dari perhitungan ($50\% \times \text{Rp}196.431.000,00$).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.8 Piutang Retribusi	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.692.733.877,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp6.774.178.699,00 terdiri dari:

No	Uraian Piutang	2025	2024
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,067,167,266,00	5.431.394.188,00
2.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	92.774.400,00	60.953.000,00
3.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	169.624.261,00	169.624.261,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian Piutang	2025	2024
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.842.000,00	8.618,000,00
5.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.180.000,00	6.380,000,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	1.294.145.950,00	1097209250
	Jumlah	8.692.733.877,00	6.774.178.699,00

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp7.067.167.266,00 adalah berasal dari piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sebesar Rp5.846.014.362,00, pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai, BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp1.221.152.904,00, diuraikan pada tabel dibawah ini.

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sungai Dareh.

Tabel 5.2.8
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
1	Tahun 2025						
	Klaim BPJTKerjaan bulan Desember 2025				39.582.832,00	39.582.832,00	02/03/2026
	Klaim JKN bulan Desember 2025				4.667.087.100,00	4.667.087.100,00	06/02/2026
	Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025				6.205.200,00	6.205.200,00	Belum dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025				23.624.145,00	23.624.145,00	09/01/2026
	Klaim JKN Kantong Darah bulan November 2025				4.320.000,00	4.320.000,00	26/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan November 2025				4.236.613,00	4.236.613,00	2/03/2026
	Klaim Jasaraharja bulan November 2025				60.764.126,00	60.764.126,00	09/01/2026
	Klaim Obat Kronis Nov 2025				263.942.221,00	263.942.221,00	28/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025				97.991.980,00	97.991.980,00	26/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Oktober 2025				27.701.913,00	27.701.913,00	06/03/2026

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025				14.501.814,00	14.501.814,00	Belum dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan September 2025				41.380.610,00	41.380.610,00	09/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025				81.687.316,00	81.687.316,00	23/01/2026
	Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025				6.951.717,00	6.951.717,00	23/01/2026
	Klaim JKN Pending bulan Agust 2025				439.887.700,00	439.887.700,00	26/01/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025				23.117.460,00	23.117.460,00	09/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Juli 2025				114.920,00	114.920,00	Belum dibayar
	Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025				8.096.700,00	8.096.700,00	23/01/2026
	Klaim BPJTKerjaan bulan Juni 2025				12.946.181,00	12.946.181,00	28/01/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025				4.329.032,00	4.329.032,00	14/04/2026
	Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025				11.116.882,00	11.116.882,00	14/04/2026
	Tahun 2024					-	
	Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024	52.719.648,00	52.719.648,00	02/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Pending obat kronis bulan September 2024	88.151.452,00	88.151.452,00	02/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim obat kronis bulan November 2024	182.261.788,00	182.261.788,00	06/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	13.415.687,00	12.965.387,00	19/09/2025	0,00	450.300,00	Belum dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	13.411.275,00	13.218.575,00	07/10/2025	0,00	192.700,00	Belum dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024	102.225,00	102.225,00	10/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024	445.900,00	445.900,00	19/09/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024	12.228.971,00	12.228.971,00	10/10/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024	65.437.328,00	65.437.328,00	07/10/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Pelayanan Ambulance Tk Lanjutan bulan November 2024	1.468.000,00	1.468.000,00	17/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024	6.151.175,00	6.151.175,00	20/01/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
	Klaim JKN bulan Desember 2024	4.153.066.300,0 0	4.153.066.300,0 0	06/02/2025	0,00	0,00	Sudah Dibayar
3	Tahun 2019	5.784.900,00	0,00	-	0,00	5.784.900,00	Belum dibayar
	Jumlah	4.594.644.649,0 0	4.588.216.749,00		5.839.586.462,00	5.846.014.362,00	

- b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Sungai Rumbai, BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.

Tabel 5.2.9**Piutang BLUD RSUD Sungai Rumbai dan BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024**

No	Nama BLUD	Piutang 2025	Piutang 2024
1	RSUD Sungai Rumbai	665.009.704,00	403.487.539,00
2	Puskesmas Sungai Rumbai	48.402.000,00	41.664.000,00
3	Puskesmas Koto Besar	27.348.200,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Limau	48.072.000,00	27.050.000,00
5	Puskesmas Koto Baru	71.105.000,00	95.910.000,00
6	Puskesmas Tiumang	13.419.000,00	2.860.000,00
7	Puskesmas Padang Laweh	28.796.000,00	41.511.000,00
8	Puskesmas Sitiung I	45.431.000,00	91.155.000,00
9	Puskesmas Timpeh	76.403.000,00	28.020.000,00
10	Puskesmas Gunung Medan	15.179.000,00	0,00
11	Puskesmas Sitiung II	9.847.000,00	2.800.000,00
12	Puskesmas Beringin Sakti	81.123.000,00	43.182.000,00
13	Puskesmas Silago	58.568.000,00	46.725.000,00
14	Puskesmas Sungai Dareh	12.493.000,00	5.808.000,00
15	Puskesmas Sialang	13.577.000,00	6.577.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama BLUD	Piutang 2025	Piutang 2024
16	Laboratorium Kesehatan Daerah	6.380.000,00	0,00
	Jumlah	1.221.152.904,00	836.749.539,00

Adapun rincian mengenai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sungai Rumbai, BLUD Puskesmas dan Labkesda Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5b** pada laporan keuangan ini.

2. Piutang Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Pemanfaatan Aset Daerah tahun 2025 sebesar Rp92.774.400,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.10
Piutang Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Piutang 2025	Piutang 2024
1	Dinas Pendidikan	75.405.000,00	47.841.000,00
	Rumah Dinas	75.405.000,00	47.841.000,00
2	Dinas Perkimtan	17.208.400,00	13.112.000,00
	Sewa Rusunawa	16.958.400,00	13.112.000,00
3	Dinas Kesehatan	411.000,00	0,00
	Rumah Dinas	411.000,00	0,00
	Jumlah	92.774.400,00	60.953.000,00

3. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 sama nilainya dengan piutang tahun 2024 sebesar Rp169.624.261,00. Adanya perubahan regulasi sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa sebagian objek retribusi tidak tercantum lagi dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik menjadi kewajiban pemerintah daerah, sehingga Retribusi Menara Telekomunikasi yang sebelumnya menjadi objek retribusi tidak lagi dilakukan pemungutan retribusinya. Sampai Tahun 2025 belum ada pembayaran piutang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkait. Piutang tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.11
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025 dan 2024.

No	Nama Perusahaan	Piutang 2025	Piutang 2024
A	Tahun 2023		
1	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
2	PT. Era Bangun Towerindo	4.950.000,00	4.950.000,00
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	2.750.000,00	2.750.000,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Perusahaan	Piutang 2025	Piutang 2024
B	Tahun 2022		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	32.725.000,00	32.725.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
C	Tahun 2021		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
3	PT. Era Bangun Towerindo	2.900,00	2.900,00
7	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
D	Tahun 2020		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	PT. Indosat	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
4	Era Bangun Towerindo	4.500.000,00	4.500.000,00
5	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
E	Tahun 2017		
1	PT. Telkomsel	5.500.000,00	5.500.000,00
2	PT. Tower Bersama	550.000,00	550.000,00
F	Tahun 2015		
1	PT. Tower Bersama	8.995.321,00	8.995.321,00
2	PT. Indosat	12.301.040,00	12.301.040,00
	Jumlah	169.624.261,00	169.624.261,00

4. Piutang Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Piutang Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Kumperdag tahun 2025 sebesar Rp8.180.000,00 yang terdiri dari piutang tahun 2023 sebesar Rp3.340.000,00 piutang Tahun 2024 sebesar Rp3.040.000,00 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.800.000,00.

Tabel 5.2.12
Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
I	Tahun 2025						
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Sentra IKM Logam)		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	06/02/2026

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
II	Tahun 2024						
	Piutang Pasar Koto Baru	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	Belum Bayar
	Jumlah	6.380.000,00				8.180.000,00	

5. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang retribusi sampah berasal dari pemungutan sampah yang belum dibayarkan selama tahun 2025 sebesar Rp60.842,000,00.

Adapun rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2025 terdapat di **Lampiran 12a** pada Laporan Keuangan ini.

6. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 merupakan Piutang Air Minum UPT SPAM pada Dinas PUPR sebesar Rp 1.294.145.950,00 berasal dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.097.209.250,00, penambahan piutang tahun 2025 Rp261.482.800,00 serta penerimaan piutang pada tahun 2025 sebesar Rp64.546.100,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.13
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2025

No	Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Des 2024	Piutang tertagih Tahun 2025	Piutang Tahun 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2025
1	2012	13.130.300,00	0,00	0,00	13.130.300,00
2	2013	2.667.800,00	0,00	0,00	2.667.800,00
3	2014	22.578.050,00	0,00	0,00	22.578.050,00
4	2015	10.933.900,00	0,00	0,00	10.933.900,00
5	2016	3.523.500,00	0,00	0,00	3.523.500,00
6	2017	32.487.600,00	0,00	0,00	32.487.600,00
7	2018	35.428.500,00	0,00	0,00	35.428.500,00
8	2019	78.859.900,00	0,00	0,00	78.859.900,00
9	2020	109.537.400,00	0,00	0,00	109.537.400,00
10	2021	124.926.600,00	0,00	0,00	124.926.600,00
11	2022	155.444.500,00	0,00	0,00	155.444.500,00
12	2023	240.546.900,00	2.213.900,00	0,00	238.333.000,00
13	2024	267.144.300,00	18.725.600,00	0,00	248.418.700,00
14	Jan - Agus 2025	0,00	43.606.600,00	179.459.800,00	135.853.200,00
15	Sept - Nov 2025	0,00	0,00	67.901.200,00	67.901.200,00
16	Desember 2025	0,00	0,00	14.121.800,00	14.121.800,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Des 2024	Piutang tertagih Tahun 2025	Piutang Tahun 2025	Nilai Piutang per 31 Des 2025
	Jumlah	1.097.209.250,00	64.546.100,00	261.482.800,00	1.294.145.950,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.984.631.072,37)	(1.305.862.079,55)

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.14
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
Klaim BPJTkerjaan bulan Desember 2025	39.582.832,00	Lancar	0,50%	197.914,16
Klaim JKN bulan Desember 2025	4.667.087.100,00	Lancar	0,50%	23.335.435,50
Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025	6.205.200,00	Lancar	0,50%	31.026,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025	23.624.145,00	Lancar	0,50%	118.120,73
Klaim JKN Kantong Darah bulan November 2025	4.320.000,00	Kurang Lancar	25%	1.080.000,00
Klaim BPJTkerjaan bulan November 2025	4.236.613,00	Kurang Lancar	25%	1.059.153,25
Klaim Jasaraharja bulan November 2025	60.764.126,00	Kurang Lancar	25%	15.191.031,50
Klaim Obat Kronis Nov 2025	263.942.221,00	Kurang Lancar	25%	65.985.555,25
Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025	97.991.980,00	Kurang Lancar	25%	24.497.995,00
Klaim BPJTkerjaan bulan Oktober 2025	27.701.913,00	Kurang Lancar	25%	6.925.478,25
Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025	14.501.814,00	Kurang Lancar	25%	3.625.453,50
Klaim Jasaraharja bulan September 2025	41.380.610,00	Kurang Lancar	25%	10.345.152,50
Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025	81.687.316,00	Kurang Lancar	25%	20.421.829,00
Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025	6.951.717,00	Diragukan	50%	3.475.858,50
Klaim JKN Pending bulan Agust 2025	439.887.700,00	Diragukan	50%	219.943.850,00
Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025	23.117.460,00	Diragukan	50%	11.558.730,00
Klaim BPJTkerjaan bulan Juli 2025	114.920,00	Diragukan	50%	57.460,00
Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025	8.096.700,00	Diragukan	50%	4.048.350,00
Klaim BPJTkerjaan bulan Juni 2025	12.946.181,00	Diragukan	50%	6.473.090,50
Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025	4.329.032,00	Diragukan	50%	2.164.516,00
Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025	11.116.882,00	Diragukan	50%	5.558.441,00
Piutang Klaim suku anak dalam bulan Des 2019	5.784.900,00	Macet	100%	5.784.900,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	450.300,00	Macet	100%	450.300,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	192.700,00	Macet	100%	192.700,00
Jumlah	5.846.014.362,00			432.522.340,64



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
2. Jasa Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda				
Tahun 2018	2.125.000,00	macet	100,00%	2.125.000,00
Tahun 2019	1.500.000,00	macet	100,00%	1.500.000,00
Januari - Agustus 2025	0,00	diragukan	50,00%	0,00
September - November 2025	340.579.200,00	kurang lancar	25,00%	85.144.800,00
Desember 2025	211.939.000,00	lancar	0,50%	1.059.695,00
Jumlah	556.143.200,00			89.829.495,00
3. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Rumbai				
Januari - Agustus 2025	2.367.324,00	diragukan	50,00%	1.183.662,00
September - November 2025	161.739.583,00	kurang lancar	25,00%	40.434.895,75
Desember 2025	500.902.797,00	lancar	0,50%	2.504.513,99
Jumlah	665.009.704,00			44.123.071,74
4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Piutang 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Piutang 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Piutang 2020	41.900.000,00	Macet	100%	41.900.000,00
Piutang 2021	37.402.900,00	Macet	100%	37.402.900,00
Piutang 2022	44.000.000,00	Macet	100%	44.000.000,00
Piutang 2023	18.975.000,00	Macet	100%	18.975.000,00
Jumlah	169.624.261,00			169.624.261,00
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
Dinas Pendidikan				
Tahun 2017	7.927.000,00	Macet	100%	7.927.000,00
Tahun 2018	26.131.000,00	Macet	100%	26.131.000,00
Tahun 2019	13.783.000,00	Macet	100%	13.783.000,00
Januari - Agustus 2025	13.725.000,00	Diragukan	50%	6.862.500,00
September - November 2025	8.937.000,00	Kurang Lancar	25%	2.234.250,00
Desember 2025	4.902.000,00	Lancar	0,50%	24.510,00
Jumlah	75.405.000,00			56.962.260,00
Dinas Perumahan dan Permukiman				
Tahun 2023	708.400,00	macet	100%	708.400,00
Tahun 2024	5.000.000,00	macet	100%	5.000.000,00
Januari - Agustus 2025	3.300.000,00	Diragukan	50%	1.650.000,00
September - November 2025	4.700.000,00	Kurang Lancar	25%	1.175.000,00
Desember 2025	3.250.000,00	Lancar	0,50%	16.250,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Jumlah	16.958.400,00			8.549.650,00
Dinas Kesehatan				
Desember 2025	411.000,00	Lancar	0,50%	2.055,00
Jumlah	411.000,00			2.055,00
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
Tahun 2022	900.000,00	macet	100%	900.000,00
Tahun 2023	1.600.000,00	macet	100%	1.600.000,00
Januari - Agustus 2025	19.210.000,00	Diragukan	50%	9.605.000,00
September - November 2025	11.396.000,00	Kurang Lancar	25%	2.849.000,00
Desember 2025	27.736.000,00	Lancar	0,50%	138.680,00
Jumlah	60.842.000,00			15.092.680,00
7. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya				
Tahun 2023	3.340.000,00	macet	100%	3.340.000,00
Tahun 2024	3.040.000,00	macet	100%	3.040.000,00
September - November 2025	1.200.000,00	Kurang Lancar	25%	300.000,00
Desember 2025	600.000,00	Lancar	0,50%	3.000,00
Jumlah	8.180.000,00			6.683.000,00
8. Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah				
Tahun 2012	13.130.300,00	macet	100%	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	macet	100%	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	macet	100%	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	macet	100%	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	macet	100%	3.523.500,00
Tahun 2017	32.487.600,00	macet	100%	32.487.600,00
Tahun 2018	35.428.500,00	macet	100%	35.428.500,00
Tahun 2019	78.859.900,00	macet	100%	78.859.900,00
Tahun 2020	109.537.400,00	macet	100%	109.537.400,00
Tahun 2021	124.926.600,00	macet	100%	124.926.600,00
Tahun 2022	155.444.500,00	macet	100%	155.444.500,00
Tahun 2023	238.333.000,00	macet	100%	238.333.000,00
Tahun 2024	248.418.700,00	macet	100%	248.418.700,00
Januari - Agustus 2025	135.853.200,00	diragukan	50%	67.926.600,00
September - November 2025	67.901.200,00	kurang lancar	25%	16.975.300,00
Desember 2025	14.121.800,00	lancar	0,50%	70.609,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Jumlah	1.294.145.950,00			1.161.242.259,00
Total	8.692.733.877,00			1.984.631.072,37

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.058.604.307,00	5.529.319.459,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang dividen yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT.BPR Pulau Punjung.

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp5.058.604.307 yang terdiri dari piutang dividen PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2025 sebesar Rp16.636.220,00 yang diterima pada RKUD tanggal 24 Februari 2026 dan dividen Bank Nagari Tahun 2025 sebesar Rp5.041.968.087,00 diterima di RKUD tanggal 12 Maret 2026. Sedangkan dividen PT. Balairung Citrajaya tidak ada penerimaannya pada tahun 2025 dan 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.136.301.435,81 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.15
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.576.447.465,81	6.257.847.164,53
3	Piutang Pengembalian Belanja	4.129.991,00	5.129.991,00
4	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	130.800,00	146.000,00
5	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	695.500,00	471.500,00
	Jumlah	7.136.301.435,81	6.818.492.334,53

a. Piutang Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Kabupaten Dharmasraya merupakan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2010 dengan Berita Acara Serah Terima





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Asset Tahap Kedua dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/898/B.A/2010 tanggal 27 Desember 2010 berupa Kredit Penguatan Modal/Dana Bergulir UMKM (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp834.993.485,00. Berdasarkan BAST tersebut, penyerahan kredit penguatan modal ke masyarakat direalisasikan pada Tahun 2002 dan 2004 oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung.

Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu. Hingga saat ini nilai Piutang Dana Bergulir Tahun 2025 adalah sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019.

Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2025 dan 2024 terdapat di **Lampiran 12b** pada Laporan Keuangan ini.

b. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang TGR tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.576.447.465,81 dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

Piutang TGR Tahun 2024	Rp	6.257.847.164,53
Penambahan Piutang 2025	Rp	1.070.090.816,66
Pengurangan Piutang tahun-tahun sebelumnya	Rp	(10.251.770,99)
Koreksi piutang tahun 2024	Rp	(6.095.000,00)
Penyetoran Tahun 2025	Rp	(735.143.744,39)
Nilai Piutang Per 31 Desember 2024	Rp	6.576.447.465,81

Untuk koreksi sebesar Rp 6.095.000,00 merupakan temuan Inspektorat Tahun 2022 dengan nilai temuan sebesar Rp18.567.900,00 yang sebelumnya diakui sebagai piutang namun saat diidentifikasi per temuan hanya sebesar Rp12.472.900,00 sehingga terdapat koreksi pengurangan nilai piutang pada tahun sebelumnya sebesar Rp6.095.000,00.

Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13** pada laporan keuangan ini.

c. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang pengembalian Belanja Tahun 2025 sebesar Rp4.129.991,00 merupakan Piutang yang timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp5.129.991,00,. Piutang ini telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 07 Oktober 2025 sebesar Rp1.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa Piutang Pengembalian Belanja sebesar Rp4.129.991,00 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.16
Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
			Pengurangan 2025		Penambah an (Piutang Baru 2025)		
			Pembayara n	Tgl Bayar			
	Tahun 2025						
1	Piutang Pengembalian Belanja Parpol (PPP)	5.129.991,00	1.000.000,00	07 Oktober 2025	0,00	4.129.991,00	Belum dibayar
	Jumlah	5.129.991,00	1.000.000,00		0,00	4.129.991,00	

d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain tahun 2025 sebesar Rp130.800,00 yang berasal dari pendapatan sewa air pada Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Adapun rincian mengenai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13b** pada laporan keuangan ini

e. Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah- penyewaan tanah dan bangunan Rusunawa Tahun 2025 sebesar Rp695.500,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.17
Piutang Denda Rusunawa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian Piutang	Piutang 2024	Penerimaan 2025	Piutang 2025	Piutang per 31 Des 2025
1	Tahun 2023	160.000,00	90.000,00	0,00	70.000,00
2	Tahun 2024	311.500,00	86.000,00	0,00	225.500,00
3	Januari - Agustus 2025	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
4	September - November 2025	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
5	Desember 2025	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	Jumlah	471.500,00	176.000,00	400.000,00	695.500,00





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang denda tersebut merupakan piutang atas keterlambatan iuran sewa kamar Rusunawa sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(3.725.797.213,34)	(3.041.699.022,11)

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.725.797.213,34, per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
a.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
b.	Penyisihan Piutang TGR	3.166.266.168,84	2.481.399.759,11
c.	Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja	4.129.991,00	5.129.991,00
d.	Penyisihan piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	52.962,00	13.288,00
e.	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	450.412,50	258.305,00
Jumlah		3.725.797.213,34	3.041.699.022,11

a) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2025 masih sama dengan penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp554.897.679,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00	Macet	100%	122.349.281,00
2	Kec. Sitiung	42.186.005,00	Macet	100%	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru	339.304.897,00	Macet	100%	339.304.897,00
4	Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00	Macet	100%	51.057.496,00
Jumlah		554.897.679,00			554.897.679,00

b) Penyisihan Piutang TGR tahun 2025 sebesar Rp 3.166.266.168,84 diperoleh dari perhitungan :

Tabel 5.2.20
Penyisihan Piutang TGR Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2024 keatas /Tagihan kedua belum lunas	6.088.617.209,54	diragukan	50%	3.044.308.604,77
2	Piutang TGR 2025 SKP2KS telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari)	487.830.256,27	kurang lancar	20%	121.957.564,07
	Jumlah	6.576.447.465,81			3.166.266.168,84

- c) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja tahun 2025 sebesar Rp4.129.991,00 dari perhitungan (100% $\times$ Rp4.129.991,00).
- d) Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp52.962,00 diperoleh dari perhitungan:

Tabel 5.2.21

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2025

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
I	Tahun 2024	31.200,00	Macet	100%	31.200,00
II	Tahun 2025	99.600,00			21.762,00
1	Januari	3.600,00	diragukan	50%	1.800,00
2	Februari	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
3	Maret	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
4	April	3.600,00	diragukan	50%	1.800,00
5	Mei	1.200,00	diragukan	50%	600,00
6	Juni	1.200,00	diragukan	50%	600,00
7	Juli	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
8	Agustus	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
9	September	2.400,00	Kurang Lancar	25%	600,00
10	Oktober	7.200,00	Kurang Lancar	25%	1.800,00
11	November	38.400,00	Kurang Lancar	25%	9.600,00
12	Desember	32.400,00	Lancar	0,50%	162,00
	Jumlah	130.800,00			52.962,00

- e) Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp450.412,50 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.22

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
I	Tahun 2023	70.000,00	Macet	100%	70.000,00
II	Tahun 2024	225.500,00	Macet	100%	225.500,00
III	Tahun 2025	400.000,00			154.912,50

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
a	Januari	33.000,00	diragukan	50%	16.500,00
b	Februari	30.000,00	diragukan	50%	15.000,00
c	Maret	27.000,00	diragukan	50%	13.500,00
d	April	54.000,00	diragukan	50%	27.000,00
e	Mei	21.000,00	diragukan	50%	10.500,00
f	Juni	32.000,00	diragukan	50%	16.000,00
g	Juli	30.000,00	diragukan	50%	15.000,00
h	Agustus	24.500,00	diragukan	50%	12.250,00
i	September	23.000,00	Kurang Lancar	25%	5.750,00
j	Oktober	42.000,00	Kurang Lancar	25%	10.500,00
k	November	51.000,00	Kurang Lancar	25%	12.750,00
	Desember	32.500,00	Lancar	0,50%	162,50
	Jumlah	695.500,00			450.412,50

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024(Rp)
V.C.1.a.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.594.652,000,00	15.091.731,000,00

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp8.594.652,000,00 bersumber dari Dana Transfer Pemerintah pusat atas ketetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2025. Nilai Piutang tersebut merupakan Sisa Kurang Bayar atas Piutang tahun 2024 sebesar Rp15.091.731,000,00 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 yang telah disalurkan pada Tahun 2025 sebesar Rp6.497.079.000,00 sehingga terdapat sisa kurang bayar sebesar piutang tersebut.

Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.23**Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025**

No	Uraian	Kurang Bayar 2024	Penyaluran 2025	Sisa Kurang Bayar s.d 2025
1	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	3.223.000,00	1.388.000,00	1.835.000,00
2	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	1.920.212.000,00	826.662.000,00	1.093.550.000,00
3	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	1.325.304.000,00	570.551.000,00	754.753.000,00
4	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	11.826.791.000,00	5.091.503.000,00	6.735.288.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	11.598.000,00	4.993.000,00	6.605.000,00
6	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.603.000,00	1.982.000,00	2.621.000,00
	Jumlah	15.091.731.000,00	6.497.079.000,00	8.594.652.000,00

Tahun 2025 (Rp)**Tahun 2024 (Rp)****V.C.1.a.12 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya****13.784.261.132,00****21.749.014.918,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Mei 2026. Berdasarkan Keputusan tersebut nilai piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp13.784.261.132,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.24**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 dan 2024**

No	Jenis Bagi Hasil	Definitif 2025	Penerimaan Tahun 2025		Penerimaan LRA 2025	Piutang DBH 2025
			Salur 2025	Piutang 2024		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	94.967.465,00	94.967.465,00	3.801.253.820,00	3.896.221.285,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	96.391.661,00	96.391.661,00	1.528.623.806,00	1.625.015.467,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	21.834.140.638,00	8.063.614.483,00	16.321.017.625,00	24.384.632.108,00	13.770.526.155,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	176.209.683,00	162.474.706,00	98.119.667,00	260.594.373,00	13.734.977,00
5	Pajak Rokok	15.049.534.269,00	15.049.534.269,00	0,00	15.049.534.269,00	0,00
	Jumlah	37.251.243.716,00	23.466.982.584,00	21.749.014.918,00	45.215.997.502,00	13.784.261.132,00

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp45.215.997.502,00 berasal dari salur tahun 2025 sebesar Rp23.466.982.584,00 dan penerimaan kurang salur atau Piutang Tahun 2024 sebesar Rp21.749.014.918,00.

Tahun 2025 (Rp)**Tahun 2024 (Rp)****V.C.1.a.13 Piutang Pendapatan Lainnya****1.126.650,00****459.480,00**

Piutang Pendapatan Lainnya merupakan piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP bulan Desember 2025 sebesar Rp1.126.650,00 dan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00 diuraikan pada tabel sebagai berikut.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.2.25
Piutang Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2025 dan 2024

No	Nama BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Sungai Rumbai	48.923,00	62.577,00
2	Puskesmas Koto Besar	103.907,00	44.012,00
3	Puskesmas Sungai Limau	6.912,00	13.802,00
4	Puskesmas Koto Baru	95.415,00	65.741,00
5	Puskesmas Tiumbang	19.251,00	21.333,00
6	Puskesmas Padang Laweh	36.548,00	72.450,00
7	Puskesmas Sitiung I	130.020,00	35.545,00
8	Puskesmas Timpeh	79.121,00	18.942,00
9	Puskesmas Gunung Medan	44.744,00	29.671,00
10	Puskesmas Sitiung II	68.079,00	39.138,00
11	Puskesmas Beringin Sakti	46.706,00	21.597,00
12	Puskesmas Silago	77.800,00	15.220,00
13	Puskesmas Sungai Dareh	281.766,00	5.704,00
14	Puskesmas Sialang	87.458,00	13.748,00
	Jumlah	1.126.650,00	459.480,00

Adapun rincian mengenai Piutang Pendapatan Lainnya-Kapitasi Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 13b** pada laporan keuangan ini

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.633,25	2.297,40

Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain pendapatan Daerah yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.126.650,00 dari perhitungan ($1.126.650,00 \times 0,50\% = 5.633,25$).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.14 Piutang Lainnya	0,00	0,00

Nilai Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.15 Belanja Dibayar Dimuka	308.333.610,01	274.605.153,94

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2025 sebesar Rp308.333.610,01 terdiri dari

1. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp156.873.977,64, dan
2. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp151.459.632,37





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun Belanja Dibayar Dimuka untuk pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.26
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2025			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dibyr dimuka	
I	Sekretariat Daerah				
1		6.236.550,00	31/01/2025 s.d. 31/01/2026	529.679,59	5.706.870,41
2		24.419.333,00	22/04/2025 s.d. 22/04/2026	7.493.055,61	16.926.277,39
3		30.069.000,00	15/02/2025 s.d. 15/02/2026	3.789.517,81	26.279.482,19
4		11.251.500,00	05/05/2025 s.d. 05/05/2026	3.853.253,42	7.398.246,58
5		8.969.000,00	19/06/2025 s.d. 19/06/2026	4.177.342,47	4.791.657,53
6		18.718.750,00	01/08/2025 s.d. 01/08/2026	10.923.544,52	7.795.205,48
7		10.940.680,00	26/08/2025 s.d. 26/08/2026	7.133.922,85	3.806.757,15
8		123.367.575,00	07/12/2025 s.d. 07/12/2026	118.973.661,37	4.393.913,63
	Jumlah	233.972.388,00		156.873.977,64	77.098.410,36
II	Sekretariat DPRD				
1		24.563.000,00	04/09/2025 sd 04/09/2026	16.554.789,04	8.008.210,96
2		48.591.627,00	08/04/2025 s.d 08/04/2026	12.913.391,28	35.678.235,72
		146.470.000,00	01/11/2025 s.d 01/11/2026	121.991.452,05	24.478.547,95
	Jumlah	219.624.627,00		151.459.632,37	68.164.994,63
	Total I + II	453.597.015,00		308.333.610,01	145.263.404,99

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.a.16 Persediaan	24.626.599.975,67	46.962.340.588,12

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau dijual /diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.2.27
Persediaan Tahun 2025 dan 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan Bahan habis pakai		24.599.024.975,67	46.962.340.588,12
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.790.083.532,50	4.855.089.172,50
2	Bahan-Bahan Kimia	128.788.061,87	256.328.045,73
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.200.000,00	5.561.684,21
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.050.000,00	1.050.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	36.080.000,00
6	Bahan-Isi Tabung Gas	14.715.000,00	13.422.200,00
7	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	46.150.000,00	134.675.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	155.286.781,54	1.059.063.680,64
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.255.953.671,67	3.460.175.098,58
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	560.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.045.000,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	161.993.262,50	65.460.357,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.494.600,00	13.983.900,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	94.515.521,00	102.366.351,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.640.000,00	7.500.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	93.183.054,00	89.809.000,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	49.417.500,00	11.046.500,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.619.500,00	5.125.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	196.000,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.900.500,00	1.305.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.894.556,00	19.585.694,00
22	Obat-Obatan-Obat	4.739.608.179,29	7.262.880.883,11
23	Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.205.650.982,38	1.946.756.661,50
24	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.005.721.940,00	9.894.383.230,93
25	Barang untuk Dijual/Diserahkan lainnya	3.266.731.582,92	17.678.634.503,92
26	Natura dan Pakan-Natura	318.198.000,00	5.557.875,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	72.552.000,00	0,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.242.000,00	0,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.439.000,00	0,00
30	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	52.604.750,00	3.440.750,00
31	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.150.000,00	0,00
32	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	32.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan lainnya		27.575.000,00	0,00
1	Belanja Komponen-komponen Peralatan	27.575.000,00	0,00
Jumlah		24.626.599.975,67	46.962.340.588,12

Adapun rincian persediaan per SKPD Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.2.28
Persediaan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai
1	Dinas Pendidikan	390.180.000,00
	Dinas Pendidikan BOS	416.360.011,00
2	Dinas Kesehatan	5.680.823.647,16
	BLUD Puskesmas	4.208.849.585,31
	BLUD RSUD Sungai Dareh	2.144.685.860,70
3	Dinas PUPR	7.370.573.167,50
4	Dinas Perkimtan	2.474.520.300,00
5	Dinas Satpol PP & Damkar	420.000,00
6	BPBD	120.000,00
7	DINSOSP3APPKB	840.937.565,00
8	Dinas Pangan dan Perikanan	422.740.510,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	427.280.775,00
10	Disdukcapil	98.277.054,00
11	Dinas PMD	0,00
12	Dinas Perhubungan	23.636.600,00
13	Dinas Kominfo	0,00
14	Diskumperdag	459.000,00
15	Dinas DPMPSTSP	0,00
16	Dinas BUDPARPORA	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	225.000,00
18	Dinas Pertanian	103.355.100,00
19	Dinas Transnaker	970.000,00
20	Sekretariat Daerah	13.190.800,00
21	Sekretariat DPRD	2.569.000,00
22	Bapperida	190.000,00
23	BKD	3.392.000,00
24	BKPSDM	264.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai
25	Inspektorat	148.000,00
26	Kecamatan Pulau Punjung	126.000,00
27	Kecamatan Sitiung	0,00
28	Kecamatan Koto Baru	180.000,00
29	Kecamatan Sungai Rumbai	20.000,00
30	Kecamatan Sembilan Koto	75.000,00
31	Kecamatan Timpeh	115.000,00
32	Kecamatan Koto Salak	284.000,00
33	Kecamatan Asam Jujuhan	160.000,00
34	Kecamatan Koto Besar	115.000,00
35	Kecamatan Padang Laweh	0,00
36	Kecamatan Tiumang	0,00
37	Badan Kesbangpol	1.357.000,00
	Jumlah	24.626.599.975,67

Penjelasan lebih terinci terkait Persediaan per SKPD Tahun 2025 dapat di lihat pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan ini.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.b.1. Investasi Jangka Panjang	30.452,000,000,00	28.952,000,000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.452,000,000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	27.352,000,000,00
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	1.500.000.000,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	28.852,000,000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

- Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000013 dengan nilai nominal Rp1,000,000,000,00;
- Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000033 dengan nilai nominal Rp322,000,000,00;





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000052 dengan nilai nominal Rp9.678,000,000,00;
- d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000088 dengan nilai nominal Rp3.200,000,000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A,000102 dengan nilai nominal Rp36,000,000,00;
- e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000118 dengan nilai nominal Rp5.369,000,000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A,000131 dengan nilai nominal Rp31,000,000,00.
- f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716,000,000,00.
- g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000232 dengan nilai nominal Rp2.500,000,000,00
- h) Tahun 2023 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A,000276 dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00
- i) Tahun 2025 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000297 dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00

Sampai dengan 31 Desember 2025 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp28.852,000,000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,51%, sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	1.500,000,000,00
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	1.500,000,000,00

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500,000,000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990,000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91%. Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak pada bidang usaha Hotel, Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500,000,000,00.

Jumlah lembar saham sebanyak 600.900 lembar terdiri dari :

- a. Saham seri A sebanyak : 900 lembar/ no.seri 55.296 s.d. 56.195
- b. Saham seri B sebanyak 600,000 lembar/ no.seri 36.864.299 s.d. 37.464.298





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	100,000,000,00
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	Rp	100,000,000,00

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100,000,000,00.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.	ASET TETAP	3.984.682.901.291,62	3.793.524.035.435,62

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Akun aset tetap menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran per satuan peralatan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pengeluaran gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dalam penatausahaan aset tetap, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerapkan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebelum dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.984.682.901.291,62 dan Rp3.793.524.035.435,62 dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.29
Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	2	3	4	5=2+3-4
Tanah	643.176.924.008,00	5.501.300.000,00	7.900.000,00	648.670.324.008,00
Peralatan dan Mesin	457.431.418.474,76	17.744.917.198,65	19.244.933.091,00	455.931.402.582,41
Gedung dan Bangunan	1.129.495.528.240,53	55.261.680.956,71	15.544.827.260,95	1.169.212.381.936,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.511.485.488.792,33	140.282.249.191,59	465.062.404,00	1.651.302.675.579,92
Aset Tetap Lainnya	48.963.924.243,00	4.633.867.530,00	57.766.770,00	53.540.025.003,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	2.970.751.677,00	3.215.805.593,00	160.465.088,00	6.026.092.182,00
Jumlah	3.793.524.035.435,62	226.639.820.469,95	35.480.954.613,95	3.984.682.901.291,62

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Terdapat komponen yang menambah nilai Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp226.639.820.469,95, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.2.30
Komponen Penambahan Nilai Aset Tetap

Uraian	Belanja Modal	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	Penambahan Aset Dari Hutang Tahun 2024	Hibah	Kapitalisasi Aset	Reklasifikasi Aset	Kurang Catat	Jumlah Penambahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4+5+6+7+8
Tanah	0,00	0,00	0,00	5.359.000.000,00	0,00	0,00	142.300.000,00	5.501.300.000,00
Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	2.095.380.827,00	0,00	1.268.278.900,00	2.309.000,00	1.495.732.178,65	262.470.000,00	17.744.917.198,65
Gedung dan Bangunan	16.965.018.966,71	8.252.746.095,00	0,00	29.902.764.807,00	0,00	141.151.088,00	0,00	55.261.680.956,71
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.201.347.218,59	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	129.077.601.973,00	0,00	140.282.249.191,59
Aset Tetap Lainnya	4.617.797.530,00	0,00	0,00	0,00	16.070.000,00	0,00	0,00	4.633.867.530,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.041.509,00	2.935.764.084,00	0,00	3.215.805.593,00
Jumlah	45.404.910.008,30	10.348.126.922,00	3.300.000,00	36.530.043.707,00	298.420.509,00	133.650.249.323,65	404.770.000,00	226.639.820.469,95

Terdapat komponen yang mengurangi nilai Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp35.480.954.613,95, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 5.2.31
Komponen Pengurang Nilai Aset Tetap

Uraian	Koreksi Pencatatan	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	Bayar Hutang Tahun 2024	Reklasifikasi Aset	Jumlah Pengurangan
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Tanah	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
Peralatan dan Mesin	456.756.308,00	2.095.380.827,00	77.354.838,00	16.615.441.118,00	19.244.933.091,00
Gedung dan Bangunan	163.350.515,30	8.252.746.095,00	219.302.200,00	6.909.428.450,65	15.544.827.260,95
Jalan, Irigasi dan Jaringan	269.121.822,00	0,00	0,00	195.940.582,00	465.062.404,00
Aset Tetap Lainnya	31.899.970,00	0,00	0,00	25.866.800,00	57.766.770,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	0,00	0,00	0,00	160.465.088,00	160.465.088,00
Jumlah	929.028.615,30	10.348.126.922,00	296.657.038,00	23.907.142.038,65	35.480.954.613,95

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.1. Tanah	648.670.324.008,00	643.176.924.008,00

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp648.670.324.008,00 dan Rp643.176.924.008,00 Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Mutasi penambahan dan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pengurangan aset tetap tanah tahun 2025 terdiri dari penambahan aset kurang catat dan koreksi pencatatan berdasarkan nilai perolehan.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi tanah, disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.32
Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	643.176.924.008,00
Mutasi Tambah	
Hibah	5.359.000.000,00
Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset	142.300.000,00
Total Penambahan	5.501.300.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	7.900.000,00
Jumlah Tanah per 31 Desember 2025	648.670.324.008,00

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap tanah tahun anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Tanah

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp5.501.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan hibah sebesar Rp5.359.000.000,00 dengan rincian :

- 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp39.600.000,00,00 berupa tanah UPT SPAM lokasi Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung
- 2) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.319.400.000,00 berupa prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) PT. Mutiara Bukik Limato dengan berita acara Nomor : 030/1141/PERKIMTAN-2024 seluas 8.757,43 M² dengan rincian sebagai berikut:
 - fasilitas umum seluas 1.488 M² dengan nilai Rp297.600.000,00
 - fasilitas sosial seluas 7.269 M² dengan nilai Rp1.453.800.000,00
 - b) PT. Sarana Rangkang Ventura dengan berita acara Nomor : 030/1143/PERKIMTAN-2024 seluas 16.294 M² dengan nilai Rp3.258.800.000,00
 - c) PT. Duo Berlian Nusantara dengan berita acara Nomor : 030/1142/PERKIMTAN-2024 seluas 1.546 M² dengan nilai Rp309.200.000,00

b. Penilaian Kurang Catat Menjadi Aset Rp142.300.000,00 dimana asetnya ada tetapi belum tercatat dengan rincian :

- 1) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp14.300.000,00 berupa 2 ruas jalan lingkungan yang berlokasi di Nagari Empat Koto Pulau Punjung, dengan rician 1 ruas di Jorong Pasar Lama dengan nilai Rp11.440.000,00 dan 1 ruas di Jorong Tabek dengan nilai Rp2.860.000,00;

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp128.000.000,00 berupa tanah Bangunan Pustu lokasi Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Koreksi Pencatatan sebesar Rp7.900.000,00 merupakan koreksi nilai perolehan tanah pada Dinas Perhubungan, karena ditemukan dokumen pengadaan awal.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.2. PERALATAN DAN MESIN	455.931.402.582,41	457.431.418.474,76

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp455.539.026.372,41 dan Rp457.431.418.474,76 Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.33
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	457.431.418.474,76
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	12.620.746.293,00
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	2.095.380.827,00
3 Hibah	1.268.278.900,00
4 Kapitalisasi Aset	2.309.000,00
5 Reklasifikasi Aset	1.495.732.178,65
6 Kurang Catat Menjadi Aset	262.470.000,00
Total Penambahan	17.744.917.198,65
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	456.756.308,00
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	2.095.380.827,00
3 Bayar Hutang Tahun 2024	77.354.838,00
4 Reklasifikasi Aset	16.615.441.118,00
Total Pengurangan	19.244.933.091,00
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	455.931.402.582,41

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
 - a. Belanja Modal
 - b. Mutasi Antar OPD
 - c. Hibah
 - d. Kapitalisasi Aset
 - e. Reklasifikasi Aset
2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
 - a. Mutasi Antar OPD
 - b. Kapitalisasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Reklasifikasi Aset

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

a. Belanja Modal

Belanja modal peralatan dan mesin Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp12.620.746.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Kabupaten Dharmasraya yang tersebar pada OPD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp7.534.320.970,00.
- 2) Belanja Modal BLUD pada Dinas Kesehatan Rp1.781.507.223,00
- 3) Belanja Modal BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.304.918.100,00

b. Mutasi Antar OPD sebesar Rp2.095.380.827,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mutasi Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp34.695.000,00 berupa 1 unit Laptop dengan merk apple mac book pro dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- 2) Mutasi ke Badan Keuangan Daerah sebesar Rp6.300.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda dua merk Honda Win BA 6702 VB dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- 3) Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.501.225,00 berupa 4 unit ac split seharga Rp21.541.225,00 dari Dinas Kesehatan dan 1 Unit Meja Kerja Pejabat Eselon II seharga Rp3.960.000,00 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 4) Mutasi ke Dinas Pendidikan sebesar Rp157.950.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios BA 57 V dari Badan Keuangan Daerah.
- 5) Mutasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp151.114.250,00 berupa 3 unit ac split seharga Rp 22.864.250,00 dari Dinas Kesehatan dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 2765 VG seharga Rp128.250.000,00 dari Inspektorat.
- 6) Mutasi Ke Sekretariat Daerah sebesar Rp1.719.820.352,00 5 unit kendaraan roda empat dan 1 unit *video conference* dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar BA 9 V seharga Rp607.000.000,00 dari Sekretariat DPRD
 - 1 kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar BA 8 V seharga Rp 607.000.000,00 dari Sekretariat DPRD
 - 1 kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1.5 M/T BA 1035 V seharga Rp203.116.552,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Nissan Xtrail BA 1957 VK seharga Rp296.150.000,00 dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 1 unit *video conference* dengan merk logitech webcam seharga Rp6.553.800,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Hibah

Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.268.278.900,00 dengan rician sebagai berikut :

- 1) Hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00 dari Kementerian Perhubungan berupa 1 unit Bus Sekolah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: BA-DRJD 617 Tahun 2025 dan Nomor: 500.11.2/87/DISHUB-2025 tanggal 28



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mei 2025 dan Perjanjian Hibah Antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 1 (satu) Unit Bus Sekolah Tahun Anggaran 2024 Nomor: HK.201/3/18//DRJD/2025 dan Nomor: 500.11.2/86/DISHUB/-2025.

2) Hibah pada Dinas Kesehatan dari Universitas Andalas sebesar Rp28.851.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 unit Lemari Besi/Metal seharga Rp 3.685.000,00
- 1 unit LCD Projector/Infocus seharga Rp5.345.000,00
- 1 unit Meja Rapat seharga Rp3.685.000,00
- 1 unit Tempat Tidur Besi seharga Rp3.200.000,00
- 2 unit ac spilt seharga Rp12.936.000,00

3) Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah program revitalisasi sebesar Rp641.427.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Alat pertanian sebesar Rp43.095.000,00
- Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp508.732.900,00
- Komputer sebesar Rp87.000.000,00
- Peralatan olahraga sebesar Rp2.600.000,00

d. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi belanja barang dan jasa/non belanja modal atau hibah barang dan jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dikarenakan barang yang dibeli/diterima dari belanja/hibah barang dan jasa sebesar Rp2.309.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada Dinas Pendidikan belanja jasa BOS menjadi aset sebesar Rp1.009.000,00 berupa alat kantor dan rumah tangga.
- 2) Pada Dinas Pendidikan belanja jasa BOS menjadi aset sebesar Rp1.300.000,00 berupa alat komputer.

e. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.495.732.178,65 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Reklas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp550.423.000,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit kendaraan roda empat pengembalian pinjam pakai dari Polres Dharmasraya sebesar Rp542.600.000,00 dan 1 unit kendaraan roda dua yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat sebesar Rp7.823.000,00.
- 2) Reklas pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp21.750.000,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit kendaraan roda dua yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat sebesar Rp6.750.000,00 dan 1 unit kendaraan roda dua pengembalian pinjam pakai dari Nagari sebesar Rp15.000.000,00
- 3) Reklas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp60.150.000,00 dari belanja aset lainnya berupa peralatan komputer yang telah diperbaiki dari kondisi rusak berat dan sebesar Rp49.500.000,00 dari gedung dan bangunan karena terjadi kesalahan penganggaran.
- 4) Reklas pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp399.088.100,00 dari belanja aset lainnya berupa 1 unit drump truck pengembalian dari pinjam pakai dari Nagari.
- 5) Reklas pada Dinas Pertanian sebesar Rp392.376.210,00 dari aset lainnya berupa kendaraan untuk penyuluh.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- 6) Reklas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp71.944.868,65 dari pengadaan gedung kantor UPT PPA berupa peralatan rumah tangga dan peralatan komputer.
2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- a. Koreksi Pencatatan
- Koreksi pencatatan peralatan dan mesin sebesar Rp456.756.308,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Koreksi pencatatan Dinas Perhubungan sebesar Rp19.838.808,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan
 - 2) Koreksi pencatatan Dinas Pendidikan sebesar Rp431.062.500,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan
 - 3) Koreksi pencatatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.855.000,00 dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi persediaan
- b. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna
- Penyerahan/pengalihan status pengguna sebesar Rp2.095.380.827,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Sekretariat DPRD sebesar Rp1.214.000.000,00 ke Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar BA 9 V sebesar Rp607.000.000,00
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar BA 8 V sebesar Rp607.000.000,00
 - 2) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kesehatan sebesar Rp44.405.475,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 4 unit ac split ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp21.541.225,00
 - 3 unit ac split ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp22.864.250,00
 - 3) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp330.845.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Nissan Xtrail BA 1957 VK sebesar Rp296.150.000,00 ke Sekretariat Daerah
 - 1 unit laptop dengan merk *apple mac book pro* sebesar Rp34.695.000,00 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa 1 unit Meja Kerja Pejabat Eselon II sebesar Rp3.960.000,00 ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Badan Keuangan Daerah berupa 1 unit kendaraan roda 4 dengan merk Daihatsu Terios BA 57 V sebesar Rp157.950.000,00 ke Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

-
- 6) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Inspektorat berupa 1 unit kendaraan bermotor dengan merk Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T BA 2765 VG sebesar Rp128.250.000,00 ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 7) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berupa 1 unit kendaraan roda dua dengan merk Honda win BA 6702 VB sebesar Rp6.300.000,00 ke Badan Keuangan Daerah
 - 8) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp209.670.352,00 ke Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 unit kendaraan roda empat dengan merk Toyota Avanza 1.5 M/T BA 1035 V sebesar Rp203.116.552,00
 - 1 unit Video Conference dengan merk Logitech Webcam sebesar Rp6.553.800,00
- c. Bayar Hutang Tahun 2024
- Bayar hutang tahun 2024 Dinas Kesehatan sebesar Rp77.354.838,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bayar hutang tahun 2024 berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp48.461.000,00
 - 2) Bayar hutang tahun 2024 berupa alat kedokteran dan kesehatan Rp22.714.456,00
 - 3) Bayar hutang tahun 2024 berupa komputer Rp6.179.382,00
- d. Reklasifikasi Pengurangan Aset
- Reklasifikasi aset sebesar Rp16.615.441.118,00 pada beberapa OPD dengan rician sebagai berikut :
- 1) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00
 - 2) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp4.331.738.999,00
 - 3) Pada Kecamatan Sembilan Koto sebesar Rp33.878.000,00
 - 4) Pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp12.550.000,00
 - 5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.831.348.082,00
 - 6) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp54.824.800,00
 - 7) Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp93.916.328,00
 - 8) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.621.891.255,00
 - 9) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp875.519.654,00
 - 10) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.840.000,00
 - 11) Pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp22.452.000,00
 - 12) Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp9.407.250,00
 - 13) Pada Inspektorat sebesar Rp381.985.000,00
 - 14) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp202.588.603,00
 - 15) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp222.011.298,00
 - 16) Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.935.000,00
-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 17) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp196.616.849,00
- 18) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp43.990.000,00
- 19) Pada Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp119.788.000,00

3. Aset Digitalisasi

Dalam rangka melakukan percepatan digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa sarana digitalisasi yang tersebar di 147 Sekolah Dasar Negeri, 22 Sekolah Dasar Swasta, 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 6 Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit *Smartboard* dalam bentuk IFP (*interactive flat panel*)
- b. 1 (satu) unit laptop

Tabel. 5.2.34
DAFTAR PENERIMAAN DIGITALISASI PEMBELAJARAN

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
1	SDN 01 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
2	SDN 02 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
3	SDN 03 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
4	SDN 04 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
5	SDN 05 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
6	SD YTKA 02 ASAM JUJUHAN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
7	SDS 03 YTKA Asam Jujuhan	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
8	SDS PT. INCASI RAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
9	SDS YTKA 04 ASAM JUJUHAN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
10	SMPN 1 ASAM JUJUHAN	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
11	SDN 01 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
12	SDN 02 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
13	SDN 03 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
14	SDN 04 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
15	SDN 05 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
16	SDN 06 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
17	SDN 07 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
18	SDN 08 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
19	SDN 09 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
20	SDN 10 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
21	SDN 11 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
22	SDN 12 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
23	SDN 13 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
24	SDN 14 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
25	SDN 15 IX Koto	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
26	SMPN 1 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
27	SMPN 2 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
28	SMPN 3 IX KOTO	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
29	SD IT AL FALAH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
30	SD It Al-Ihsan	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
31	SDN 01 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
32	SDN 02 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
33	SDN 03 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
34	SDN 04 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
35	SDN 05 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
36	SDN 06 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
37	SDN 07 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
38	SDN 08 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
39	SDN 09 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
40	SDN 10 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
41	SDN 11 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
42	SDN 12 Koto Baru	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
43	SDN 13 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
44	SDN 14 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
45	SDN 15 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
46	SDN 16 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
47	SDS IT Al-Bina Koto Baru	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
48	SMPIT AL-BINA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
49	SMPN 1 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
50	SMPN 2 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
51	SMPN 3 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
52	SMPN 4 KOTO BARU	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
53	SDN 01 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
54	SDN 02 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
55	SDN 03 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
56	SDN 04 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
57	SDN 05 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
58	SDN 06 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
59	SDN 07 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
60	SDN 08 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
61	SDN 09 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
62	SDN 10 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
63	SDN 11 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
64	SDN 12 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
65	SDN 13 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
66	SDN 14 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
67	SDN 15 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
68	SDS PT SMP	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
69	SMP TERPADU ASY-SYAHADATIN	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
70	SMPIT AL MUNAWWAROH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
71	SMPN 1 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
72	SMPN 2 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
73	SMPN 3 KOTO BESAR	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
74	SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
75	SDN 01 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
76	SDN 02 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
77	SDN 03 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
78	SDN 04 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
79	SDN 05 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
80	SDN 06 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
81	SDN 07 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
82	SDN 08 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
83	SDN 09 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
84	SDN 10 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
85	SDN 11 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
86	SDN 12 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
87	SMPN 1 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
88	SMPN 2 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
89	SMPN 3 KOTO SALAK	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
90	SD ISLAM MIFTAHUL ULUM	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
91	SDN 01 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
92	SDN 02 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
93	SDN 03 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
94	SDN 04 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
95	SDN 05 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
96	SMPN 1 PADANG LAWEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
97	SD IP AN NAFII SCHOOL PULAU PUNJUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
98	SD ISLAM TEKNOLOGI BMT DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
99	SD IT AL-BINA 02 PULAU PUNJUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
100	SD IT ANDALAS CENDEKIA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
101	SD RAUDHAH ISLAMIC SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
102	SDIT ASA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
103	SDN 01 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
104	SDN 02 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
105	SDN 03 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
106	SDN 04 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
107	SDN 05 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
108	SDN 06 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
109	SDN 07 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
110	SDN 08 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
111	SDN 09 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
112	SDN 10 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
113	SDN 11 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
114	SDN 12 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
115	SDN 13 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
116	SDN 14 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
117	SDN 15 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
118	SDN 16 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
119	SDN 17 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
120	SDN 18 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
121	SDN 19 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
122	SDN 20 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
123	SDN 21 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
124	SDN 22 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
125	SDN 23 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
126	SDN 24 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
127	SDN 25 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
128	SMP IT ANDALAS CENDEKIA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
129	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
130	SMPN 2 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
131	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
132	SMPN 4 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
133	SMPN 5 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
134	SMPN 6 PULAU PUNJUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
135	SMPN UNGGUL DHARMASRAYA	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
136	SD ABDI AL-MUGHNI	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
137	SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 03 SITIUNG	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
138	SD QUR AN AL-KAUTSAR DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
139	SDN 01 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
140	SDN 02 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
141	SDN 03 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
142	SDN 04 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
143	SDN 05 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
144	SDN 06 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
145	SDN 07 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
146	SDN 08 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
147	SDN 09 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
148	SDN 10 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
149	SDN 11 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
150	SDN 12 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
151	SDN 13 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
152	SDN 14 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
153	SDN 15 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
154	SDN 16 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
155	SDN 17 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
156	SDN 18 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
157	SDN 19 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
158	SDN 20 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
159	SMPN 1 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
160	SMPN 2 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
161	SMPN 3 SITIUNG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
162	SD IT GREAT SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
163	SD IT SAKINAH	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
164	SDN 01 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
165	SDN 02 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
166	SDN 03 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
167	SDN 04 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
168	SDN 05 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
169	SDN 06 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
170	SDN 07 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
171	SDN 08 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
172	SDN 09 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
173	SDN 10 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
174	SDN 11 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
175	SMP IT GREAT SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
176	SMPN 1 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
177	SMPN 2 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
178	SMPN 3 SUNGAI RUMBAI	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
179	SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
180	SDN 01 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
181	SDN 02 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
182	SDN 03 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
183	SDN 04 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
184	SDN 05 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
185	SDN 06 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
186	SDN 07 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
187	SDN 08 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
188	SDN 09 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
189	SDN 10 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
190	SDN 11 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
191	SMP MIFTAHUL ULUM BOARDING SCHOOL	Swasta	1 paket	-	1 paket	-
192	SMPN 1 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
193	SMPN 2 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
194	SMPN 3 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
195	SMPN 4 TIMPEH	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
196	SDN 01 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
197	SDN 02 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
198	SDN 03 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
199	SDN 04 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
200	SDN 05 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
201	SDN 06 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Sekolah	Status	Penerimaan Digitalisasi Tahun 2025			
			Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
			IFP		Laptop	
202	SDN 07 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
203	SDN 08 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
204	SDN 09 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
205	SDN 10 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
206	SDN 11 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
207	SDN 12 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
208	SMPN 1 TIUMANG	Negeri	1 paket	-	1 paket	-
TOTAL			208 paket		208 paket	

Aset digitalisasi diatas belum terdaftar sebagai barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karena proses hibah belum terlaksana dan masih tercatat pada Kementerian Pendidikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.3. GEDUNG DAN BANGUNAN	1.169.212.381.936,29	1.129.495.528.240,53

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp 1.169.212.381.936,29 dan Rp1.129.495.528.240,53Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.35
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	1.129.495.528.240,53
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	16.965.018.966,71
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.252.746.095,00
3 Hibah	29.902.764.807,00
4 Reklasifikasi Aset	141.151.088,00
Total Penambahan	55.261.680.956,71
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	163.350.515,30
2 Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.252.746.095,00
3 Bayar Hutang Tahun 2024	219.302.200,00
4 Reklasifikasi Aset	6.909.428.450,65
Total Pengurangan	15.544.827.260,95
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	1.169.212.381.936,29



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut uraian perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Belanja Modal

Belanja modal gedung dan bangunan Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp16.965.018.966,71 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja modal Kabupaten Dharmasraya yang tersebar pada OPD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp16.251.593.496,71 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp314.684.600,00
 - b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.623.018.986,83
 - c) Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.330.872.823,64
 - d) Pada Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp142.194.140,00
 - e) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp214.639.657,00
 - f) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.612.182.335,24
 - g) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00
- 2) Belanja Modal BLUD pada Dinas Kesehatan Rp713.425.470,00

b. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna

Mutasi antar OPD sebesar Rp8.252.746.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi ke Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp224.832.600,00 berupa rehabilitasi bangunan gedung IKM Logam dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Mutasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.052.000,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa lapangan voli dan sebesar Rp846.710.881,00 berupa 1 bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 3) Mutasi Ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp419.205.907,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 4) Mutasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.278.733.769,00 berupa 2 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 5) Mutasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.081.270.167,00 berupa 3 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 6) Mutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp596.041.145,00 berupa 2 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 7) Mutasi ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.758.304.471,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 8) Mutasi ke Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp620.436.564,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.
- 9) Mutasi ke Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp407.158.591,00 berupa 1 unit bangunan gedung dari Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Hibah

Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah program revitalisasi sebesar Rp29.902.764.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SMPN 01 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp2.004.407.000,00
- 2) SMPN 02 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp727.994.000,00
- 3) SMPN 02 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp2.816.660.914,00
- 4) SMPN 03 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp930.760.000,00
- 5) SMPN 01 Koto Besar dengan nilai sebesar Rp1.545.746.500,00
- 6) SMPN 01 Timpeh dengan nilai sebesar Rp779.668.000,00
- 7) SMPN 01 Padang Laweh dengan nilai sebesar Rp1.629.684.000,00
- 8) SMPN 06 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp1.835.209.000,00
- 9) SMPN 01 Sungai Rumbau dengan nilai sebesar Rp605.474.980,000
- 10) SMPN 01 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp2.838.346.500,00
- 11) SMPN 03 Sembilan Koto dengan nilai sebesar Rp721.703.100,00
- 12) SMPN 03 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp694.654.000,00
- 13) SMPN 03 Koto Baru dengan nilai sebesar sebesar Rp1.537.216.675,00
- 14) SDN 04 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp1.019.674.711,00
- 15) SDN 10 Koto Baru dengan nilai sebesar Rp1.225.212.672,00
- 16) SDN 02 Padang Laweh dengan nilai sebesar Rp1.482.979.894,00
- 17) SDN 09 Koto Besar dengan nilai sebesar Rp896.923.697,00
- 18) SDN 13 Pulau Punjung dengan nilai sebesar Rp902.712.238,00
- 19) SDN 06 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp1.357.137.525,00
- 20) SDN 05 Koto Salak dengan nilai sebesar Rp1.410.449.334,00
- 21) SDN 03 Timpeh dengan nilai sebesar Rp1.434.451.568,00
- 22) TKN Pembina Koto Besar dengan nilai sebesar Rp550.778.499,00
- 23) TKN 01 Sungai Rumbai dengan nilai sebesar Rp954.920.000,00

d. Reklasifikasi Aset

Penambahan reklasifikasi aset sebesar Rp141.151.088,00 terdiri dari :

- 1) Penambahan dari konstruksi dalam pengerjaan (KDP) reklasifikasi ke aset tetap bangunan dan gedung sebesar Rp60.544.088,00 merupakan perencanaan gedung UPT PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
- 2) Penambahan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa Bangunan lokasi Landing Paralayang Nagari Gunung Selasih sebesar Rp 80.607.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan

a. Koreksi Pencatatan

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp163.350.515,30 terdiri dari sbb:

- 1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pendidikan ke TK Swasta sebesar Rp149.349.061,30; dan
- 2) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00 menjadi Persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.252.746.095,00 terdiri dari :

- 1) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke beberapa OPD sebesar Rp244.884.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan berupa rehap work shop sebesar Rp224.832.600,00
 - b. Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berupa pembuatan lapangan voly di sport center sebesar Rp20.052.000,00
- 2) Penyerahan/pengalihan status pengguna dari Dinas Kesehatan ke beberapa OPD sebesar Rp8.007.861.495,00 terdiri dari ;
 - a. Dinas Perhubungan sebesar Rp1.758.304.471,00
 - b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp846.710.881,00
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp596.041.145,00
 - d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp407.158.591,00
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp419.205.907,00
 - f. Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp2.081.270.167,00
 - g. Dinas Perpustakaan sebesar Rp620.436.564,00
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.278.733.769,00

c. Bayar hutang 2024

Pengurangan bayar hutang 2024 pada Dinas Kesehatan berupa gedung dan bangunan sebesar Rp219.302.200,00

d. Reklasifikasi Aset

Pengurangan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp6.909.428.450,65 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.325.570.460,00
- 2) Pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.692.825.481,00 dan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.778.503.502,00
- 3) Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp10.820.000,00
- 4) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke pelatan dan mesin sebesar Rp71.944.868,65
- 5) Pada Dinas Pertanian terdapat reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya sebesar Rp1.029.764.139,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.651.302.675.579,92	1.511.485.488.792,33

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.651.302.675.579,92 dan Rp 1.511.485.488.792,33. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.36
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	1.511.485.488.792,33
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	11.201.347.218,59
2 Aset dari Hutang Tahun 2024	3.300.000,00
3 Reklasifikasi Aset	129.077.601.973,00
Total Penambahan	140.282.249.191,59
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	269.121.822,00
2 Reklasifikasi Aset	195.940.582,00
Total Pengurangan	465.062.404,00
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	1.651.302.675.579,92

Uraian perhitungan mutasi jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - a. Belanja Modal
Belanja modal gedung dan bangunan Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp11.201.347.218,59 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja modal bangunan gedung pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Tahun 2025 yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp11.093.757.211,59 yang tersebar di 3 OPD dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.843.084.725,00
 - b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.075.000.000,00
 - c) Pada Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp175.672.486,59
 - 2) Belanja BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp107.590.007,00
 - b. Aset dari Hutang Tahun 2025
Aset dari hutang tahun 2025 menjadi aset berupa instalasi air bersih pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.300.000,00
 - c. Reklasifikasi Aset
Reklasifikasi aset menjadi aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp129.077.601.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari aset lainnya (aset yang diserahkan ke masyarakat) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.167.614.526,00 berupa jalan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- lingkungan dan instalasi yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- 2) Reklasifikasi dari aset lainnya (aset yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Pertanian sebesar Rp11.746.487.447,00 berupa jalan, irigasi dan jaringan yang akan dikelola langsung oleh Dinas Pertanian;
 - 3) Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan sebesar Rp163.500.000,00 berupa instalasi jaringan pipa gas lain-lain.
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- a. Koreksi Pencatatan
Koreksi pencatatan jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp269.121.822,00 dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Koreksi pencatatan berupa *box culvert* merupakan barang persediaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp199.996.000,00
 - 2) Koreksi pencatatan berupa belanja operasional sebesar Rp69.125.822,00
 - b. Reklasifikasi Aset
Reklasifikasi jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp195.940.582,00 merupakan aset yang di reklasifikasi ke dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi aset berupa Perencanaan Rehab Jalan Paket I Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh Lama Perbaikan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu Rehab Jalan Penghubung Koto Baru - Silago sebesar Rp49.934.000,00
 - 2) Reklasifikasi aset berupa Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan Kecamatan Sembilan Koto 2025 sebesar Rp146.006.582,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.5. ASET TETAP LAINNYA	53.540.025.003,00	48.963.924.243,00

Nilai aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp53.540.025.003,00 dan Rp48.963.924.243,00. Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai atau sesuai yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset tetap lainnya, disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 5.2.37
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	48.963.924.243,00
Mutasi Tambah	
1 Belanja Modal	4.617.797.530,00
2 Kapitalisasi Aset	16.070.000,00
Total Penambahan	4.633.867.530,00
Mutasi Kurang	
1 Koreksi Pencatatan	31.899.970,00
2 Reklasifikasi Aset	25.866.800,00
Total Pengurangan	57.766.770,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	53.540.025.003,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya

a. Belanja Modal

Belanja modal aset tetap lainnya Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp4.617.797.530,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana APBD Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp438.793.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp106.793.970,00
- Pada Dinas Pertanian sebesar Rp269.600.000,00
- Pada Dinas Pangan dan Perikanan Rp53.400.000,00
- Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 9.000.000,00

2) Pada Dinas Kesehatan atas Dana BOS untuk aset tetap lainnya sebesar Rp4.179.003.560,00

b. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi barang dan jasa BOS yang diakui sebagai aset di Dinas Pendidikan berupa buku perpustakaan sebesar Rp16.070.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

a. Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa seragam yang merupakan barang persediaan sebesar Rp31.899.970,00

b. Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset tetap lainnya sebesar Rp25.866.800,00 terdiri dari:

1) Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya pada Dinas Pertanian berupa hewan sebesar Rp24.516.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Mati sebesar Rp7.004.800,00
- Dijual sebesar Rp17.512.000,00

2) Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya karena kondisi rusak berat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.350.000,00;

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6.026.092.182,00	2.970.751.677,00

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.026.092.182,00 dan Rp2.970.751.677,00. Perhitungan konstruksi dalam pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan Reklasifikasi ke asetnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.2.38
Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	2.970.751.677,00
MUTASI TAMBAH	
1 Kapitalisasi Aset	280.041.509,00
2 Reklasifikasi Aset	2.935.764.084,00
TOTAL PENAMBAHAN	3.215.805.593,00
MUTASI KURANG	
URAIAN	JUMLAH (Rp)
1 Reklasifikasi Aset	160.465.088,00
JUMLAH KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PER 31 DESEMBER 2025	6.026.092.182,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut uraian perhitungan mutasi konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2025:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Kapitalisasi Aset

Penambahan aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Dinas Kesehatan berupa kapitalisasi perencanaan gedung RI Paru dan ruang *Cathlab* pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp280.041.509,00

b. Reklasifikasi Aset

Penambahan reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp2.935.764.084,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi aset dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp195.940.582,00
- 2) Reklasifikasi aset dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.729.003.502,00
- 3) Reklasifikasi aset dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pekerjaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.820.000,00

2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Reklasifikasi Aset

Pengurangan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp160.465.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp99.921.000,00
- 2) Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana ke gedung dan bangunan sebesar Rp60.544.088,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.745.043.585.833,68)	(1.527.992.628.347,13)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.39
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
		Berkurang			Bertambah				
		Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-3-4+5+6+7+8+9
Peralatan dan Mesin	344.129.841.679,04	1.251.409.833,00	863.471.773,00	0,00	1.251.409.833,00	471.095.563,00	0,00	41.615.744.637,96	372.248.836.335,00
Gedung dan Bangunan	190.810.484.054,00	3.969.404.914,00	11.688.015,00	0,00	3.969.404.914,00	0,00	0,00	24.207.340.264,00	214.200.706.906,00
Jalan, Jembatan, Irigasi,& Jaringan	992.833.862.614,09	0,00	110.837.205.113,00	8.239.143.946,59	0,00	0,00	8.239.143.946,59	46.465.390.919,00	1.158.375.602.592,68
Aset Tetap Lainnya	218.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440.000,00
JUMLAH	1.527.992.628.347,13	5.220.814.747,00	111.712.364.901,00	8.239.143.946,59	5.220.814.747,00	471.095.563,00	8.239.143.946,59	112.288.475.820,96	1.745.043.585.833,68

Rincian nilai akumulasi penyusutan aset tetap per OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.40
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	21.619.245.977,00	375.761.906,00	416.883.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.801.495,00	22.445.401.758,00
2	Sekretariat Daerah	38.956.662.220,00	0,00	3.821.094.252,00	0,00	881.582.258,00	169.311.096,00	0,00	3.555.002.459,00	39.741.463.781,00
3	Kecamatan Pulau Punjung	801.398.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.493.786,00	831.892.229,00
4	Kecamatan Sitiung	578.903.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.205.218,00	649.108.948,00
5	Kecamatan Koto Baru	878.176.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.260.361,00	956.437.295,00
6	Kecamatan Sungai Rumbai	980.320.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.696.548,00	1.051.016.755,00
7	Kecamatan Sembilan Koto	426.783.648,00	0,00	33.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628.941,00	411.534.589,00
8	Kecamatan Timpeh	819.710.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.979.819,00	886.690.287,00
9	Kecamatan Padang Laweh	694.242.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940.550,00	739.182.684,00
10	Kecamatan Tiumang	794.016.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.962.734,00	850.979.393,00
11	Kecamatan Koto Besar	999.739.775,00	0,00	12.550.000,00	0,00	0,00	21.750.000,00	0,00	90.639.181,00	1.099.578.956,00
12	Kecamatan Koto Salak	821.644.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.018.374,00	908.662.959,00
13	Kecamatan Asam Jujuhan	1.016.894.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.304.136,00	1.081.199.021,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	997.950.749.088,09	0,00	5.990.333.762,00	0,00	0,00	101.388.266.916,00	8.239.143.946,59	46.662.793.933,00	1.148.250.620.121,68





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	25.736.603.975,00	0,00	54.013.550,00	0,00	0,00	11.688.015,00	0,00	2.373.409.092,00	28.067.687.532,00
16	Dinas Perhubungan	7.978.189.418,00	0,00	92.744.453,00	0,00	1.102.669.884,00	0,00	0,00	705.479.083,00	9.693.593.932,00
17	Dinas Kesehatan	183.875.793.545,14	4.008.077.489,00	3.644.189.999,00	0,00	0,00	10.650.000,00	0,00	28.023.253.119,00	204.257.429.176,14
18	Dinas Pendidikan	127.456.377.224,00	0,00	9.697.666,00	0,00	157.950.000,00	0,00	0,00	17.576.435.544,96	145.181.065.102,96
19	Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	21.274.806.056,00	0,00	0,00	0,00	472.729.666,00	0,00	0,00	2.166.399.166,00	23.913.934.888,00
20	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.608.876.193,00	330.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.201.668,00	2.399.232.861,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5.223.484.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.001.578,00	5.781.486.438,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.706.745.213,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.290.788,00	4.145.076.001,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.527.862.327,00	0,00	0,00	0,00	408.447.747,00	0,00	0,00	121.872.435,00	2.058.182.509,00
24	Dinas Pertanian	12.667.178.934,00	0,00	208.943.095,00	0,00	0,00	9.841.314.407,00	0,00	894.648.296,00	23.194.198.542,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	10.991.293.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.381.819,00	11.336.674.960,50
26	Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	22.089.300.441,40	0,00	22.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.696.463,00	25.407.544.904,40





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Badan Keuangan Daerah	6.045.842.189,00	157.950.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	457.158.323,00	6.351.350.512,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.787.222.939,00	0,00	0,00	0,00	145.981.350,00	0,00	0,00	108.600.795,00	2.041.805.084,00
29	Inspektorat	1.685.262.929,00	128.250.000,00	99.785.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.597.739,00	1.820.824.953,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.359.905.949,00	6.300.000,00	199.566.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.519.535,00	1.245.559.395,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	6.409.517.625,00	0,00	221.398.798,00	0,00	0,00	269.384.467,00	0,00	445.464.120,00	6.902.967.414,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	423.113.521,00	0,00	6.216.146,00	0,00	339.565.896,00	0,00	0,00	25.554.696,00	782.017.967,00
33	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.507.345.343,00	0,00	0,00	0,00	250.105.928,00	0,00	0,00	25.064.989,00	6.782.516.260,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.854.544.046,00	0,00	0,00	0,00	818.541.919,00	0,00	0,00	632.432.286,00	4.305.518.251,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.305.609.447,00	0,00	196.616.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.067.770,00	1.194.060.368,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.954.388.353,00	0,00	43.990.000,00	0,00	284.728.426,00	0,00	0,00	595.436.997,00	3.790.563.776,00
37	Dinas Komunikasi Dan Informasi	4.184.875.925,00	209.670.352,00	114.673.000,00	0,00	352.211.673,00	0,00	0,00	273.781.984,00	4.486.526.230,00
	JUMLAH	1.527.992.628.347,13	5.220.814.747,00	15.189.027.182,00	0,00	5.220.814.747,00	111.712.364.901,00	8.239.143.946,59	112.288.475.820,96	1.745.043.585.833,68



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.1.d PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa aset tetap yang berpotensi menjadi properti investasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.41
Daftar Aset Tetap yang berpotensi menjadi properti investasi

NO	SKPD	URAIAN	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Dinas Perkimtan	Properti Investasi Tanah	Jl. Jorong Pasir Putih Nagari Sungai Kambut, Kec Pulau Punjung	23.815,00	595.625.000,00	Kebun Karet
2	Dinas Pertanian	Properti Investasi Tanah	Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang	78.335,00	1.986.750.000,00	Kebun sawit
3	Sekretariat Daerah (Pengelola Aset)	PTanah Menara Telekomunikasi	Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar	3.700,00	37.000.000,00	Tower Menara Telkomsel
4	Sekretariat Daerah	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Jl. Padang Pasir ujung gurun Kec Padang barat padang	714	1.327.612.000,00	Mess Pemda di Padang
5	BLUD UPT Puskesmas Sialang	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	Jorong Sialang ,Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	43.850	200.000.000,00	Kebun Sawit
6	Dinas Kumperdag	Bangunan Tempat Kerja lain-lain	Nagari Gunung Medan , Kec. Sitiung	0,00	567.517.100,00	Ruko Gedung IKM
7	Dinas Kumperdag	Bangunan Los dan Kios	Kabupaten Dharmasraya	0,00	18.631.974.684,43	Kios pada 26 pasar
8	SDN 08 Koto Baru	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	16.466	254.100.000,00	Kebun sawit

Namun aset tersebut masih dalam proses pengkajian lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi properti investasi.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.c.8. ASET LAINNYA	37.483.112.861,46	45.895.268.049,66

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp37.483.112.861,46 dan Rp45.895.268.049,66 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.42
Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	877.757.319,00	287.907.729,00
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Aset Tidak Berwujud	4.808.780.277,00	4.557.476.277,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.168.970.434,00)	(2.873.514.683,00)
Aset Tidak Berwujud Netto	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00
Aset Lain-Lain	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27
Akumulasi Penyusutan	(78.264.584.980,81)	(182.859.988.190,61)
Aset Lain-lain Netto	34.965.545.699,46	42.766.435.726,66
Dana Transfer – TDF	0,00	1.156.963.000,00
Jumlah	37.483.112.861,46	45.895.268.049,66

Tabel. 5.2.43
Komponen Penambahan Nilai Aset Lainnya

Uraian	Belanja Modal	Reklasifikasi Aset	Jumlah Penambahan
Aset Tidak Berwujud	251.304.000,00	0,00	251.304.000,00
Aset Lain-lain	0,00	21.244.121.019,00	21.244.121.019,00
Jumlah	251.304.000,00	21.244.121.019,00	21.495.425.019,00

Rincian Penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp21.495.425.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan aset tak berwujud sebesar Rp251.304.000,00 dengan rincian :
 - a. Belanja modal aset tak berwujud pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.275.000,00
 - b. Belanja modal aset tak berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp193.029.000,00
2. Penambahan aset lain-lain sebesar Rp21.244.121.019,00 berupa reklasifikasi dari aset tetap dan sesama aset lainnya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00
 - b. Sekretariat Daerah sebesar Rp4.612.248.466,00
 - c. Kecamatan Sembilan Koto sebesar Rp33.878.000,00
 - d. Kecamatan Koto Besar Rp27.550.000,00
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.377.748.140,00
 - f. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp56.174.800,00
 - g. Dinas Perhubungan sebesar 121.411.328,00
 - h. Dinas Kesehatan sebesar Rp5.093.853.555,00
 - i. Dinas Pendidikan sebesar Rp9.697.666,00
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp3.360.000,00
 - k. Dinas Pertanian sebesar Rp2.121.737.314,00
 - l. Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp22.452.000,00
 - m. Inspektorat sebesar Rp381.000.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- n. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp202.588.603,00
- o. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp260.931.298,00
- p. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.935.000,00
- q. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp196.616.849,00
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp43.990.000,00
- s. Komunikasi dan Informasi sebesar Rp119.788.000,00

Tabel. 5.2.44
Komponen Pengurangan Nilai Aset Lainnya

URAIAN	PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI ASET	JUMLAH PENGURANGAN
Aset Lain-lain	1.649.062.000,00	131.991.352.256,00	133.640.414.256,00
Jumlah	1.649.062.000,00	131.991.352.256,00	133.640.414.256,00

Rincian pengurangan nilai aset lainnya sebesar Rp133.640.414.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengurangan aset lainnya karena adanya proses penghapusan dengan nilai Rp1.649.062.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.101.902.000,00 berupa penjualan 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan bupati periode 2020-2025) dan 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan pimpinan DPRD periode 2014-2019)
 - 2) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp547.160.000,00 berupa 1 unit kendaraan perorangan dinas (mantan pimpinan DPRD periode 2019-2024)
- b. Reklasifikasi aset dengan nilai Rp131.991.352.256,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp899.639.000,00
 - 2) Kecamatan Koto Besar sebesar Rp36.750.000,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp117.288.523.124,00
 - 4) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp80.607.000,00
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp27.495.000,00
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp10.650.000,00
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.360.000,00
 - 8) Dinas Pertanian sebesar Rp13.206.320.032,00
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp438.008.100,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.1 TAGIHAN TUNTUTAN	877.757.319,00	287.907.729,00
 GANTI KERUGIAN DAERAH		

Saldo tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 sebesar Rp877.757.319,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp287.907.729,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.45
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Nomor SKTJM	Nomor LHP	Nama/NIP/Unit Kerja	Uraian Temuan	Nilai (Rp)
1.	Surat Keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPC tentang pencatatan kerugian Negara tanggal 23 Januari 2017	LHP BPK RI No.212/S/XVIII.PDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si NIP.19691026200604 2001	Ketektoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada Akun Kas di Bendahara Pengeluaran	287.907.729,00
2.	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025	Budi Yono, S.E. NIP.197110301994031004 NIK.1310043010710002	Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025.	589.849.590,00
Jumlah					877.757.319,00

Aset lainnya berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp877.757.319,00 terdiri dari :

1. Reklas dari kas di bendahara pengeluaran pada SKPD Badan Lingkungan Hidup yang dahulunya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tahun 2008 yang sampai pada LKPD Tahun 2014 berada pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran dengan nilai sebesar Rp287.907.729,00. Reklas ini didasari Surat Keputusan Bupati Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. Kasus ini telah diajukan ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan cq. Kaditama Binbangkum BPK RI dengan surat Bupati Nomor 130/468/PEM-2016 tanggal 03 Maret 2016. BPK RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPC tanggal 23 Januari 2017 tentang Pencatatan Kerugian Negara. Hasil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudari Neneng Elis Herlina, S.Si., Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp287.907.729,00.
2. Berkurangnya nilai kas di Kas Daerah sebesar Rp589.849.590,00. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang Sama pada Sekretariat DPRD sebesar Rp132.570.540,00 dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan sebesar Rp457.279.050,00 ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN PdG, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pemotongan gaji Budi Yono pada tanggal 1 Mei 2026 sebesar Rp2.725.700,00, untuk selanjutnya akan dilakukan pemotongan gaji PNS sampai dengan keputusan pembayaran gaji Budi Yono dihentikan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.2 ASET TAK BERWUJUD	4.808.780.277,00	4.557.476.277,00

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.808.780.277,00 dan Rp4.557.476.277,00. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset tak berwujud, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.46
Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (RP)
Saldo Awal per 31 Desember 2025	4.557.476.277,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	251.304.000,00
Jumlah	4.808.780.277,00

Penambahan aset tidak berwujud terdapat pada belanja modal sebesar Rp251.304.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Dinas Perhubungan sebesar Rp58.275.000,00
- Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp193.029.000,00

Rincian aset tak berwujud pada masing-masing OPD diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.2.47
Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	JUMLAH (RP)
1	Sekretariat Daerah	145.750.000,00
2	Dinas Perhubungan	391.794.000,00
3	Dinas Kesehatan	367.984.000,00
4	Dinas Pendidikan	925.382.392,00
5	Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	117.746.541,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	142.679.569,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	52.675.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	JUMLAH (Rp)
8	Badan Keuangan Daerah	1.954.579.400,00
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.500.000,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	142.000.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.870.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	485.819.375,00
	Jumlah	4.808.780.277,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.3 AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	3.168.970.434,00	2.873.514.683,00

Saldo amortisasi aset tak berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.168.970.434,00 dan Rp2.873.514.683,00.

Masa manfaat atau umur ekonomisnya ditetapkan selama 10 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel. 5.2.48
Daftar Mutasi Amortisasi Per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	Saldo Awal 31 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
1	Sekretariat Daerah	88.664.583,00	14.575.000,00	103.239.583,00
2	Dinas Perhubungan	160.497.708,00	27.838.150,00	188.335.858,00
3	Dinas Kesehatan	319.288.508,00	22.333.400,00	341.621.908,00
4	Dinas Pendidikan	700.800.298,00	69.978.707,00	770.779.005,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.125.259,00	14.267.957,00	94.393.216,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	40.823.125,00	5.267.500,00	46.090.625,00
7	Badan Keuangan Daerah	1.227.432.984,00	102.129.600,00	1.329.562.584,00
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102.916.667,00	10.500.000,00	113.416.667,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.871.750,00	7.487.000,00	9.358.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama SKPD	Saldo Awal 31 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	149.093.801,00	20.328.437,00	169.422.238,00
	Jumlah	2.873.514.683,00	295.455.751,00	3.168.970.434,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.4 ASET TAK BERWUJUD SETELAH AMORTISASI	1.639.809.843,00	1.683.961.594,00

Nilai aset tidak berwujud Tahun 2025 sebesar Rp4.808.780.277,00 dan amortisasi aset tidak berwujud Rp3.168.970.434,00. Dengan demikian nilai aset tidak berwujud netto Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.639.809.843,00 (Rp4.808.780.277,00 - Rp3.168.970.434,00).

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.5 ASET LAIN - LAIN	113.230.130.680,27	225.626.423.917,27

Saldo aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113.230.130.680,27 dan Rp225.626.423.917,27. Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebesar Rp113.230.130.680,27 terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp102.346.377.352,27 Aset yang digunakan pihak lain sebesar Rp8.808.989.328,00 dan aset yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.074.764.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Aset Rusak Berat

Aset rusak berat sebesar Rp102.346.377,27 disajikan sebesar nilai buku pada saat aset tersebut dipindahkan dari aset tetap menjadi aset lainnya. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi aset rusak berat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.49
Perhitungan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2025	84.342.259.219,27
MUTASI TAMBAH	
Reklasifikasi Aset	19.678.403.133,00
TOTAL PENAMBAHAN	19.678.403.133,00
MUTASI KURANG	
Penghapusan	1.649.062.000,00
Reklasifikasi Aset	25.223.000,00
TOTAL PENGURANGAN	1.674.285.000,00
JUMLAH ASET RUSAK BERAT PER 31 DESEMBER 2025	102.346.377.352,27



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut uraian perhitungan mutasi aset rusak berat Tahun Anggaran 2025:

- a. Penambahan Aset Rusak Berat
Reklafikasi sebesar Rp19.678.403.133,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada Sekretariat DPRD dengan nilai sebesar Rp547.160.000,00
 - 2) Pada Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp3.046.530.580,00
 - 3) Pada Kecamatan Sembilan Koto dengan nilai sebesar Rp33.878.000,00
 - 4) Pada Kecamatan Koto Besar dengan nilai sebesar Rp27.550.000,00
 - 5) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai sebesar Rp7.377.748.140,00
 - 6) Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan nilai sebesar Rp56.174.800,00
 - 7) Pada Dinas Perhubungan dengan nilai sebesar 121.411.328,00
 - 8) Pada Dinas Kesehatan dengan nilai sebesar Rp5.093.853.555,00
 - 9) Pada Dinas Pendidikan dengan nilai sebesar Rp9.697.666,00
 - 10) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.360.000,00
 - 11) Pada Dinas Pertanian dengan nilai sebesar Rp2.121.737.314,00
 - 12) Pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan nilai sebesar Rp22.452.000,00
 - 13) Pada Inpektorast Kabupaten dengan nilai sebesar Rp381.000.000,00
 - 14) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan nilai sebesar Rp202.588.603,00
 - 15) Pada Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai sebesar Rp260.931.298,00
 - 16) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai sebesar Rp11.935.000,00
 - 17) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nilai sebesar Rp196.616.849,00
 - 18) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan nilai sebesar Rp43.990.000,00
 - 19) Pada Dinas Komunikasi dan Informasi dengan nilai sebesar Rp119.788.000,00
 - b. Pengurangan Aset Rusak Berat
Penghapusan sebesar Rp1.649.062.000,00 dilakukan dengan cara Penjualan dan Lelang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp1.101.902.000,00.
 - 2) Sekretariat DPRD berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp547.160.000,00.
2. Reklasifikasi Aset sebesar Rp25.223.000,00, terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp7.823.000,00
 - b. Reklasifikasi aset pada Kecamatan Koto Besar sebesar Rp6.750.000,00
 - c. Reklasifikasi aset pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.650.000,00
 3. Aset yang digunakan Pihak Lain sebesar Rp8.808.989.328,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.50
Barang Yang Digunakan Pihak Lain

No	Nama SKPD	31 Desember 2025
1.	Sekretariat Daerah	5.308.987.328,00
2.	Kecamatan Pulau Punjung	294.525.000,00
3.	Kecamatan Sitiung	201.870.000,00
4.	Kecamatan Koto Baru	216.973.000,00
5.	Kecamatan Sungai Rumbai	303.525.000,00
6.	Kecamatan Sembilan Koto	164.445.000,00
7.	Kecamatan Timpeh	114.435.000,00
No	Nama SKPD	31 Desember 2025
8.	Kecamatan Padang Laweh	168.585.000,00
9.	Kecamatan Tiumang	212.708.000,00
10.	Kecamatan Koto Besar	317.835.000,00
11.	Kecamatan Koto Salak	343.440.000,00
12.	Kecamatan Asam Jujuhan	292.395.000,00
13.	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
14.	Dinas Kesehatan	297.500.000,00
15.	Dinas Lingkungan Hidup	411.266.000,00
	JUMLAH	8.808.989.328,00

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi barang yang digunakan pihak lain disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.51
Perhitungan Barang Yang Digunakan Pihak Lain Per 31 Desember 2025

URAIAN	JUMLAH (RP)
Saldo Awal per 31 Desember 2024	8.603.095.542,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Aset	1.565.717.886,00
Total Penambahan	1.565.717.886,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	1.359.824.100,00
Total Pengurangan	1.359.824.100,00
Jumlah Barang yang Digunakan Pihak Lain 31 Desember 2025	8.808.989.328,00

Berikut penjelasan Mutasi Barang yang digunakan pihak lain tahun 2025:

1. Penambahan Barang Yang Digunakan oleh Pihak Lain
Reklasifikasi Aset Barang pada Sekretariat Daerah yang digunakan pihak lain tahun 2025 sebesar Rp1.565.717.886,00
2. Pengurangan Barang Yang Digunakan Pihak Lain
Pengurangan Reklas pada aset Yang Digunakan Pihak Lainnya sebesar Rp1.359.824.100,00 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp891.816.000,00 pada Sekretariat Daerah.
- Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.000.000,00 pada Kecamatan Koto Besar.
- Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp438.008.100,00 pada Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya oleh Instansi Vertikal dan Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.52
Daftar Aset Pinjam Pakai

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/TYPE	NO POLISI
I	Sekretariat Daerah				
1	Polres Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Nissan X-Trail	BA 1517 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport 2.4L/JEEP	BA 1183 V
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	Toyota / Avanza 1.5 M/T/	BA 1048 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1148 V
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Suzuki Thunder	BA 7930 V
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Avanza Vello	BA 1129 V
3	Komando Distrik Militer 0310/SS	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 3351 VG
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1149 V
4	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 5 V
5	LKAAM Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi Kuda	BA 1891 VL
6	Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sumbar	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Hilux	BA 8013 V
7	KORPRI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Honda Supra X	BA 6538 VB
8	MUI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 1854 VG
9	SAMSAT Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 50 V
10	Badan Pengawasan Pemilu	Meubelair	12 Unit		
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Honda Supra X	BA 6893 V
11	Kementerian Agama	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Kijang Innova	BA 1523 V



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/TYPE	NO POLISI
12	KAMPUS III UNAND Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Isuzu Panther	BA 1021 V
13	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Fortuner	BA1974 VG
14	Pengadilan Agama	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 5 V (BA 1011 V)
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova/ 2.0 G M/T	BA 12 V
II	Dinas Lingkungan Hidup				
1	Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Kaisar / Triseda RX	
2	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit		
3	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Dharmasraya	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Happy Motor Cycle Perkasa	
4	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit	Dongfeng	
5	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	ADK-1500	
6	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
7	Blok A Piruko Sitiung, Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
8	Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit		
III	Dinas Perhubungan				
1	Nagari Padang Laweh	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Mitsubishi L300	BA 8903 VN

3. Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat

Barang yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp132.681.069.156,00 merupakan aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diserahkan ke masyarakat melalui OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.53
Perhitungan Aset yang akan diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	132.681.069.156,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Aset	130.606.305.156,00
Total Pengurangan	130.606.305.156,00
Jumlah Aset Rusak Berat per 31 Desember 2025	2.074.764.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian pengurangan aset yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp130.606.305.156,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi sesama aset lainnya dari aset yang diserahkan ke masyarakat ke aset rusak berat sebesar Rp1.319.140.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Reklasifikasi dari aset yang diserahkan ke masyarakat ke aset tetap sebesar Rp129.287.164.183,00

Tabel. 5.2.54
Daftar Aset Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

No	OPD	31 Desember 2025
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.868.464.000,00
2	Dinas Perhubungan	206.300.000,00
	Jumlah	2.074.764.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.6 PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN	78.264.584.980,81	182.859.988.190,61

Saldo penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.264.584.980,81 dan Rp182.859.988.190,61.

Penjelasan mengenai perhitungan penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut :

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.2.55
Perhitungan Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
1	Sekretariat DPRD	533.431.421,00	416.883.808,00	0,00	12.802.232,00	0,00	416.883.808,00	0,00	0,00	520.629.189,00
2	Sekretariat Daerah	7.216.274.336,00	1.101.902.000,00	518.527.096,00	499.684.345,00	0,00	4.170.310.252,00	0,00	285.747.780,00	9.552.218.927,00
3	Kecamatan Pulau Punjung	518.779.000,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.734.000,00
4	Kecamatan Sitiung	293.699.520,00	0,00	0,00	6.972.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.726.833,00
5	Kecamatan Koto Baru	309.040.099,00	0,00	0,00	8.129.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.911.041,00
6	Kecamatan Sungai Rumbai	499.448.311,00	0,00	0,00	7.915.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.532.902,00
7	Kecamatan Sembilan Koto	257.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.878.000,00	0,00	0,00	291.128.000,00
8	Kecamatan Timpeh	213.055.000,00	0,00	0,00	614.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.440.417,00
9	Kecamatan Padang Laweh	224.956.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.956.750,00
10	Kecamatan Tiumang	390.316.000,00	0,00	0,00	1.236.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.079.332,00
11	Kecamatan Koto Besar	484.956.334,00	0,00	36.750.000,00	2.650.000,00	0,00	27.550.000,00	0,00	0,00	473.106.334,00
12	Kecamatan Koto Salak	583.131.475,00	0,00	0,00	59.123.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.008.437,00
13	Kecamatan Asam Jujuhan	390.090.067,00	0,00	0,00	2.416.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.673.400,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111.652.795.357,00	0,00	101.443.726.804,00	751.541.892,04	0,00	6.045.793.650,00	1.137.990.891,04	0,00	16.641.311.202,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51.688.652,00	0,00	11.688.015,00	17.753.481,00	0,00	54.013.550,00	0,00	0,00	76.260.706,00
16	Dinas Perhubungan	2.132.816.774,00	0,00	13.082.928,00	797.396.864,00	0,00	105.827.381,00	0,00	0,00	1.428.164.363,00
17	Dinas Kesehatan	20.328.625.177,05	0,00	10.650.000,00	2.695.797.259,80	0,00	3.644.189.999,00	0,00	42.500.000,00	21.308.867.916,25
18	Dinas Pendidikan	11.391.397.789,56	0,00	0,00	1.809.823.820,00	0,00	9.697.666,00	0,00	0,00	9.591.271.635,56
19	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan, dan Olahraga	272.353.520,00	0,00	0,00	6.104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.249.480,00
20	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	317.402.858,00	0,00	0,00	12.565.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.837.208,00
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	1.478.819.661,00	0,00	0,00	298.151.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.668.320,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	577.166.814,00	0,00	0,00	14.258.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.908.175,00
23	Dinas Pemberdayaan Masvarakat Desa	465.239.255,00	0,00	0,00	15.601.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.637.587,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
24	Dinas Pertanian	12.912.655.406,00	0,00	10.570.276.114,00	338.143.644,00	0,00	937.904.802,00	0,00	0,00	2.942.140.450,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	1.150.778.283,00	0,00	0,00	253.521.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.257.096,00
26	Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	151.415.915,00	0,00	0,00	4.295.353,00	0,00	22.452.000,00	0,00	0,00	169.572.562,00
27	Badan Keuangan Daerah	1.725.529.827,00	0,00	0,00	32.009.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.520.596,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	331.757.182,00	0,00	0,00	8.768.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.988.606,00
29	Inspektorat	170.777.000,00	0,00	0,00	516.668,00	0,00	99.785.715,00	0,00	0,00	270.046.047,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	706.772.252,00	0,00	0,00	34.595.278,00	0,00	199.566.089,00	0,00	0,00	871.743.063,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	2.670.283.862,00	0,00	305.061.133,00	222.092.296,00	0,00	257.075.464,00	0,00	3.159.999,00	2.403.365.896,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	154.349.000,00	0,00	0,00	458.333,00	0,00	6.216.146,00	0,00	0,00	160.106.813,00
33	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan	310.212.098,00	0,00	0,00	45.269.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.942.819,00



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Saldo Awal 31 Desember 2024	Mutasi Tahun 2025						Penyusutan Tahun Ini	31 Desember 2025
			Berkurang			Bertambah				
			Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Pengalihan Status Pengguna	Reklasifikasi	Koreksi		
	Pemadam Kebakaran									
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.160.286.349,00	0,00	0,00	54.345.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.941.075,00
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	395.575.808,00	0,00	0,00	3.322.083,00	0,00	196.616.849,00	0,00	0,00	588.870.574,00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	136.402.038,00	0,00	0,00	2.756.809,00	0,00	43.990.000,00	0,00	0,00	177.635.229,00
37	Dinas Komunikasi dan Informasi	300.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.673.000,00	0,00	0,00	415.132.000,00
	JUMLAH	182.859.988.190,61	1.518.785.808,00	112.909.762.090,00	8.022.678.352,84	0,00	16.386.424.371,00	1.137.990.891,04	331.407.779,00	78.264.584.980,81

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.7 ASET LAIN – LAIN SETELAH PENYUSUTAN	34.965.545.699,46	42.766.435.726,66

Saldo aset lain-lain netto per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.965.545.699 dan Rp42.766.435.726,66.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.1.e.8 <i>TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)</i>	0,00	1.156.963.000,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU) secara non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Nilai TDF per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.156.963.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.691.796.791,88 mengalami penurunan sebesar Rp1.040.469.186,51 atau -3,28 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.732.265.978,39. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	30.691.796.791,88	31.732.265.978,39

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga maupun utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

Tabel 5.2.56
Rincian Kewajiban Jangka pendek Per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	140.789.551,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	114.887.626,67	3.032.855.895,36
3	Utang Belanja	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00
	Jumlah	30.691.796.791,88	31.732.265.978,39

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	140.789.551,00

Utang PFK Tahun 2025

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025 sebesar Rp0,00

Utang PFK Tahun 2024

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar Rp140.789.551,00 adalah iuran 1% dan 4% atas Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan berdasar surat BPJS Kesehatan Nomor: 326/II-06/0225 tanggal 14 Februari 2025 dan telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp99.403.014,06 sisa sebesar Rp41.386.536,94 dikoreksi sebesar Rp6.856.958,00 sehingga terdapat sisa utang tahun 2024 yang belum dibayarkan sebesar Rp34.529.578,00 pada Puskesmas Koto Baru yang direklas ke utang belanja pegawai untuk iuran BPJS Kesehatan.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka	114.887.626,67	3.032.855.895,36

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp114.887.626,67 adalah merupakan pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, sewa tanah menara telekomunikasi, sewa Rusunawa dan lebih salur klaim BPJS Kesehatan pada BLUD Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.57
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2025
1.	Dinas Kesehatan				
a.	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/ Umum-Dinkes/XII/ 2021, 20 /6/2016 sd 20/6/2021	20/06/2021 s.d. 31/12/2025		13.596.059,12
		5 Tahun, 1827 hari	01/01/2026 s.d. 20/06/2026	1.403.940,88	
		Rp15.000.000,00			
b.	Pendapatan Diterima dimuka Rumah Dinas Sitiung II			18.000,00	
	Jumlah			1.421.940,88	13.596.059,12
2.	RSUD Sungai Rumbai				
	RSUD Sungai Rumbai			1.572.300,00	
	Jumlah			1.572.300,00	0,00
3.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
	Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa			7.882.258,06	
	Jumlah			7.882.258,06	0,00
4.	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu				
	Pendapatan Diterima dimuka IMB			18.300.000,00	
	Jumlah			18.300.000,00	0,00
5.	Sekretariat Daerah				
		PKS/129/PL/12-2022 01/12/2022 s.d 30/11/2027	01/12/2022 s.d. 31/12/2025		12.343.921,00
		5 Tahun, 1.826 Hari	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.997.809,42	
		Rp20.000.000,00	01/01/2027 s.d. 30/11/2027	3.658.269,44	
	Jumlah			7.656.078,86	12.343.921,14
6.	Badan Keuangan Daerah				
a.	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:0363/HK 810/J DMT-1063000/2024	17/06/2023 s.d. 31/12/2025		31.240.485,22
		5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	12.274.248,77	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2025	
b.		1.827 hari	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	12.274.248,77		
		Rp61.438.500,00	01/01/2028 s.d. 16/06/2028	5.649.517,24		
	Jumlah			30.198.014,78	31.240.485,22	
	ATM Bank Nagari pada MPP di DPMP TSP	Nomor:100.3.7/10/BKD/VIII/2024	13/05/2024 s.d. 31/12/2025		5.891.625,62	
		5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.596.059,11		
		1.827 hari	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	3.596.059,11		
		Rp18.000.000,00	01/01/2028 s.d. 31/12/2028	3.605.911,33		
			01/01/2029 s.d. 13/05/2029	1.310.344,83		
	Jumlah			12.108.374,38	5.891.625,62	
	c.	Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari pada RSUD Sungai Dareh	PKS/ 1013/PL/11-2025	07/11/2025 s.d. 31/12/2025		1.109.580,30
			5 Tahun	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	7.363.578,33	
				01/01/2027 s.d. 31/12/2027	7.363.578,33	
			1.827 hari	01/01/2028 s.d. 31/12/2028	7.383.752,51	
			Rp36.858.240,00	01/01/2029 s.d. 13/05/2029	7.363.578,33	
				01/01/2030 s.d. 07/11/2030	6.274.172,22	
		Jumlah			35.748.659,70	1.109.580,30
Total (1+2+3+4+5+6)			114.887.626,67	64.181.671,39		

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp114.887.626,67 terdapat pada beberapa SKPD, antara lain:

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.421.940,88 terdiri dari:

- Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp1.403.940,88 merupakan sewa ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru yang berlokasi di komplek Puskesmas Koto Baru, dengan Kontrak Nomor PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, jangka selama 5 tahun dari tanggal 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026 dengan nilai Kontrak sebesar Rp15.000.000,00.
- Pendapatan diterima dimuka atas sewa Rumah Dinas pada Puskesmas sitiung II sebesar Rp18.000,00.

2. BLUD RSUD Sungai Rumbai

Pendapatan diterima dimuka pada RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp1.572.300,00 merupakan lebih salur klaim BPJS Kesehatan bulan April s.d Juli 2023 yang akan dikompensasikan pada pembebanan November atau Desember 2023 sesuai dengan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berita acara nomor 444/1545/RSUD-SR/XI/2023 tetapi belum dilakukan pemotongan oleh BPJS Kesehatan sampai akhir tahun 2025.

3. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.882.258,06 merupakan sewa Rusunawa Sitiung.
4. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp18.300.000,00 merupakan Pendapatan dari IMB tahun 2021.
5. Sekretariat Daerah
Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp7.656.078,86 merupakan sewa ATM Bank Nagari yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati dengan kontrak Nomor : PKS/129/PL/12-2022 tanggal 01 Desember 2022, jangka waktu selama 5 tahun, dari tanggal 01 Desember 2022 s.d 30 November 2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00.
6. Badan Keuangan Daerah
Pendapatan Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp78.055.048,87 terdiri dari:
 - a. Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK sebesar Rp30.198.014,78 yang berlokasi di Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar, kontrak Nomor : 0363/HK810/JDMT-1063000/2024, jangka waktu selama 5 Tahun, dari tanggal 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2028 dengan nilai kontrak sebesar Rp61.438.500,00.
 - b. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Nagari yang terletak di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebesar Rp12.108.374,38 dengan kontrak PKS Nomor : 100.3.7/10.BKD/VIII/2024, jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029 sebesar Rp18.000.000,00.
 - c. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Nagari yang terletak pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp35.748.659,70 dengan Nomor : PKS/1013/PL/11-2025, jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal 07 November 2025 s.d 07 November 2030 sebesar Rp36.858.240,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	25.685.706.465,21	23.667.417.832,03

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.685.706.465,21 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.2.58
Utang Belanja Tahun 2025

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	Belanja Pegawai		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Honorarium Tenaga Teknis/P3K/ PHO	14.250.000,00
2	BLUD Puskesmas	Utang pegawai (Jaspel ASN)	807.340.915,64
		Jumlah I	821.590.915,64

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
b.	Belanja Barang Jasa		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Barang dan Jasa	22.821.800.303,12
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	Utang Barang dan Jasa	1.691.957.936,32
3	BLUD Puskesmas	Utang Barang dan Jasa	312.124.810,13
		Jumlah II	24.825.883.049,57
c.	Belanja Modal		
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	3.300.000,00
2	Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	34.932.500,00
		Jumlah III	38.232.500,00
		JUMLAH (I+II+III)	25.685.706.465,21

	Tahun 2025(Rp)	Tahun 2024(Rp)
a. Utang Belanja Pegawai	821.590.915,64	9.024.225.800,10

Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp821.590.915,64 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh
Utang Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025 sebesar Rp14.250.000,00 merupakan utang Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO.
2. BLUD Puskesmas
Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp807.340.915,64 merupakan utang jasa pelayanan sebesar Rp772.811.337,64 dan iuran BPJS Kesehatan pada Puskesmas Koto Baru sebesar Rp34.529.578,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.59
Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Tahun 2025 dan 2024

No	Puskesmas	Utang Pegawai 2025	Utang Pegawai 2024
1	RSUD Sungai Dareh	0,00	0,00
2	RSUD Sungai Rumbai	50.128.940,00	0,00
3	Sungai Rumbai	60.672.502,00	36.020.740,00
4	Koto Besar	45.961.760,56	70.757.528,84
5	Sungai Limau	20.193.143,04	11.366.797,00
6	Koto Baru	195.547.107,34	79.271.045,20
7	Tiumang	0,00	29.426.734,00
8	Padang Laweh	73.996.896,00	48.326.063,00
9	Sitiung I	95.304.943,00	38.865.601,00
10	Timpeh	0,00	0,00
11	Gunung Medan	44.155.725,00	2.887.638,00
12	Sitiung II	121.611.700,00	2.800.000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Puskesmas	Utang Pegawai 2025	Utang Pegawai 2024
13	Beringin Sakti	30.809.632,00	110.521.098,00
14	Silago	37.907.718,70	99.044.333,06
15	Sungai Dareh	17.908.848,00	3.488.222,00
16	Sialang	9.952.000,00	43.866.520,00
17	Labkesda	3.190.000,00	0,00
Jumlah		807.340.915,64	576.642.320,10

Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp9.024.225.800,10 terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan

Utang belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.503.526.200,00 adalah merupakan utang belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang akan *Carry Over* pada Tahun 2025, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan Nomor SP2D 13.10/04.0/000049/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2025 tanggal 28 Mei 2025 dan SP2D Nomor 13.10/04.0/000050/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/6/2025 tanggal 28 Mei 2025.

2. BLUD Puskesmas

Utang belanja BLUD Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp576.642.320,10,00 merupakan utang jasa pelayanan dan telah dibayarkan pada tahun 2025.

3. Utang Belanja RSUD Sungai Dareh

Utang pada BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2024 sebesar Rp6.944.057.280,00 telah dibayarkan pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	24.825.883.049,57	14.112.668.693,93

Utang belanja Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp24.825.883.049,57 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh

Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp22.821.800.303,12 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.60
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.392.441.646,00	1.260.972.499,00
2	Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	0,00	3.438.317.983,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
3	Belanja Bahan Obat	2.768.883.200,12	5.361.883.708,00
4	Belanja Bahan Laboratorium	1.119.606.972,00	1.212.919.896,00
5	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	2.898.849.970,00	0,00
6	Belanja Rujukan Parsial	22.025.000,00	60.900.000,00
7	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	285.604.956,00	347.014.454,00
8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00
9	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan	0,00	39.406.850,00
10	Belanja ATK	0,00	86.349.000,00
11	Belanja Cetak	0,00	293.400.714,00
12	Belanja Alat Listrik	332.000,00	36.257.300,00
13	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	230.000,00	0,00
14	Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	2.518.801,00	114.511.500,00
15	Belanja isi tabung gas - gas medis	226.488.500,00	201.789.800,00
16	Belanja Pemeliharaan AC	0,00	82.978.050,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	21.572.235,00	38.957.383,00
18	Belanja Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	881.000,00	58.498.100,00
19	Belanja Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	0,00	133.178.500,00
20	Belanja Pemeliharaan Lift	12.432.000,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Tower dan Jaringan	1.990.000,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alkes	8.093.232,00	0,00
23	Belanja Pemeliharaan rutin instalasi air	600.000,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer	378.000,00	0,00
25	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	10.483.000,00	0,00
26	Belanja Kertas dan Cover	21.367.500,00	0,00
27	Belanja Bahan Komputer	3.077.000,00	0,00
28	Belanja Konsultan Konstruksi	23.945.291,00	0,00
	Jumlah	22.821.800.303,12	12.773.335.737,00

2. BLUD RSUD Sungai Rumbai

Utang BLUD RSUD Sungai Rumbai Tahun 2025 sebesar Rp1.691.957.936,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.61**Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Rumbai**

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang Jasa Tenaga Kesehatan	881.582.360,00	481.489.765,00
2	BHP (Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran)	310.072.370,00	223.882.758,47

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
3	Utang obat- obatan	473.892.766,00	412.016.444,67
4	Utang operasional Ambulance	16.060.800,00	15.229.200,00
5	Utang izin Operasional Rontgen	0,00	3.330.000,00
6	Pemeliharaan Alat Kesehatan	10.349.640,00	0,00
	Jumlah	1.691.957.936,32	1.135.948.168,14

3. BLUD Puskesmas

Utang BLUD Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp312.124.810,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.62
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Puskesmas Sungai Rumbai	1.036.546,00	253.260,00
2	Puskesmas Koto Besar	10.772.882,26	41.203.270,56
3	Puskesmas Sungai Limau	8.654.204,16	4.871.484,00
4	Puskesmas Koto Baru	42.122.448,86	35.840.954,80
5	Puskesmas Tiumang	0,00	8.706.777,00
6	Puskesmas Padang Laweh	18.584.127,00	27.268.412,00
7	Puskesmas Sitiung I	20.588.907,00	18.927.556,00
8	Puskesmas Timpeh	109.880.821,00	41.680.860,00
9	Puskesmas Gunung Medan	3.049.969,00	525.522,00
10	Puskesmas Sitiung II	12.430.000,00	0,00
11	Puskesmas Beringin Sakti	73.615.000,00	0,00
12	Puskesmas Silago	8.199.904,85	16.163.212,43
13	Puskesmas Sungai Dareh	0,00	0,00
14	Puskesmas Sialang	0,00	7.943.480,00
15	Labkesda	3.190.000,00	0,00
	Jumlah	312.124.810,13	203.384.788,79

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.112.668.693,93 terdiri dari :

1. BLUD Puskesmas

Utang belanja Barang dan jasa pada BLUD Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp1.339.332.956,93 telah dibayarkan pada tahun 2025 sebesar Rp1.322.431.319,93 dan sisanya sebesar Rp16.901.637,00 merupakan utang belanja barang dan jasa pada RSUD Sungai Rumbai berupa belanja obat sebesar Rp12.582.507,00 dan Belanja Barang Habis Pakai (BHP) sebesar Rp4.319.130,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. BLUD RSUD Sungai Dareh

Utang belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp12.773.335.737,00 telah dibayar pada tahun 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	38.232.500,00	530.523.338,00

Utang Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp 38.232.500,00 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh

Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD Sungai Dareh tahun 2025 sebesar Rp3.300.000,00 merupakan utang belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi berupa pengadaan Sumur gali (Polongan dan jasa Pemasangan).

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 merupakan sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp19.970.000,00.
- Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant sebesar Rp14.962.500,00.

Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp530.523.338,00 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh

Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD tahun 2024 sebesar Rp296.657.038,00 yang telah dibayarkan pada tahun 2025.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 merupakan sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp19.970.000,00.
- Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant sebesar Rp14.962.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Sekretariat Daerah

Utang Belanja Modal tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp198.933.800,00 terdiri dari :

- a. Utang Belanja Modal sebesar Rp184.097.750,00 atas Pekerjaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Kontrak Adendum Nomor : 000.1.8.3/761/Add I/Umum/Setda/XII-2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.798.790.900,00, fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 baru selesai sebesar 94,49% sedangkan pembayaran per 31 Desember 2024 baru terealisasi sebesar 89,77%. Pekerjaan diselesaikan 100% setelah lewat tahun 2024, sehingga nilai utang yang timbul tercatat di Neraca menjadi sebesar Rp184.097.750,00 telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan SP2D Nomor 13.10/04.0/000168/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 18 November 2025
- b. Utang Perencanaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp14.836.050,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/02/SPK/SETDA- UMUM/V-2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp98.907.000,00 tanggal 6 Mei 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024 terealisasi pembayaran baru 85%, sisanya 15% tercatat sebagai utang tahun 2024 yang telah dibayarkan pada tahun 2025 dengan SP2D Nomor : 13.10/04.0/000167/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 18 November 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00

Utang jangka pendek lainnya Tahun 2025 berupa utang retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada PT Nindya Karya atas Pembangunan Masjid Agung yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.891.202.700,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum dibayarkan sampai saat ini .

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.C.3 EKUITAS **2.388.311.446.511,62** **2.421.166.191.465,57**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.388.311.446.511,62 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.421.166.191.465,57 ditambah surplus/defisit laporan operasional sebesar Rp(31.222.873.330,10) ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp (1.631.871.623,85)

Ekuitas Awal	2.421.166.191.465,57
Surplus/Defisit LO	(31.222.873.330,10)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(1.631.871.623,85)
Ekuitas Akhir	2.388.311.446.511,62

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D. LAPORAN OPERASIONAL**V.D.1. PENDAPATAN – LO**

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.	PENDAPATAN	984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,01)

Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2025 sebesar Rp984.724.400.159,98 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.022.365.976.055,99, terdapat penurunan sebesar Rp37.641.575.896,01 atau -3,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
7.	PENDAPATAN	984.724.400.159,98	1.022.365.976.055,99	(37.641.575.896,01)
7.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42
7.2.	Pendapatan Transfer	780.316.025.936,00	863.339.185.252,00	(83.023.159.316,00)
7.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,57

V.D.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	Pendapatan Asli Daerah	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp23.683.479.669,42 atau 19,72%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.768.253.221,62	120.084.773.552,20	23.683.479.669,42
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.677.138.430,00	27.218.922.589,78	29.458.215.840,22
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	77.511.074.989,69	70.063.061.076,91	7.448.013.912,78
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.058.604.307,00	10.863.659.575,00	(5.805.055.268,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	4.521.435.494,93	11.939.130.310,51	(7.417.694.815,58)

V.D.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.677.138.430,00	27.218.922.589,78	29.458.215.840,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp29.458.215.840,22 atau 108,23%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah	54.317.593.473,00	56.677.138.430,00	2.359.544.957,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	351.380.547,00	344.963.078,00	(6.417.469,00)
Pajak Air Tanah	126.709.052,00	126.709.052,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	596.315.895,00	596.315.895,00	0,00
PBBP2	3.314.830.211,00	5.617.651.972,00	2.302.821.761,00
BPHTB-Pemindahan Hak	4.089.558.785,00	4.089.558.785,00	0,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	593.121.670,00	593.121.670,00	0,00
PBJT-Restoran	1.530.491.037,00	1.530.491.037,00	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13.914.942.804,00	13.978.083.469,00	63.140.665,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	624.182.239,00	624.182.239,00	0,00
PBJT-Hotel	382.299.133,00	382.299.133,00	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	21.825.900,00	21.825.900,00	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	22.207.900,00	22.207.900,00	0,00
Opsen PKB	16.776.873.700,00	16.776.873.700,00	0,00
Opsen BBNKB	11.967.654.600,00	11.967.654.600,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp2.359.544.957,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.3.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Penambahan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	12.651.375,00	6.233.906,00	(6.417.469,00)
Penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.314.830.211,00	0,00	(3.314.830.211,00)
Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	5.317.967.018,00	5.317.967.018,00
Koreksi penambahan piutang PBB tahun 2025 disebabkan adanya perubahan Data Objek Pajak		309.137.069,00	309.137.069,00
Koreksi pengurangan piutang PBB tahun 2025 disebabkan lebih setor pajak PBB yang tidak terakomodir pada sistem PBB	9.452.115,00		(9.452.115,00)
Penerimaan piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.250.349.347,00	0,00	(1.250.349.347,00)
Penambahan piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	1.313.490.012,00	1.313.490.012,00
JUMLAH	4.587.283.048,00	6.946.828.005,00	2.359.544.957,00

Penjelasan selisih tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2024 sebesar Rp12.651.375,00 dan penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp6.233.906,00.
- Adanya penambahan Piutang PBB pada awal Tahun 2025 sesuai dengan SKP sebesar Rp5.317.967.018,00 dan penerimaan Piutang selama Tahun 2025 sebesar Rp3.314.830.211,00.
- Adanya koreksi penambahan piutang PBB Tahun 2025 disebabkan adanya perubahan Data Objek Pajak sebesar Rp309.137.069,00.
- Adanya koreksi pengurangan piutang PBB tahun 2025 disebabkan lebih setor pajak PBB yang tidak terakomodir pada sistem PBB sebesar Rp9.452.115,00
- Penerimaan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2024 yang diterima Tahun 2025 sebesar Rp1.250.349.347,00 dan penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar 1.313.490.012,00.

V.D.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	77.511.074.989,69	70.063.061.076,91	7.448.013.912,78

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp7.448.013.912,78 atau 10,63%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	73.178.734.847,00	77.511.074.989,69	4.332.340.142,69
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	4.188.313.600,00	4.237.601.300,00	49.287.700,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	64.839.085.207,00	68.855.238.831,00	4.016.153.624,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	370.049.100,00	376.445.000,00	6.395.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	361.220.000,00	405.236.000,00	44.016.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	97.825.000,00	97.825.000,00	0,00
Retribusi Los-LO	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	49.590.000,00	49.590.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	72.938.100,00	269.874.800,00	196.936.700,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	7.000.000,00	8.800.000,00	1.800.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	1.358.919.440,00	1.376.669.658,69	17.750.218,69
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.717.524.400,00	1.717.524.400,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp4.332.340.142,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.6
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :	497.764.000,00	547.051.700,00	49.287.700,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	497.764.000,00	546.138.200,00	48.374.200,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD Puskesmas Tahun 2025	0,00	913.500,00	913.500,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah :	5.201.544.518,00	9.217.698.142,00	4.016.153.624,00
Piutang RSUD Sungai Dareh	4.588.216.749,00	5.839.586.462,00	1.251.369.713,00
Piutang RSUD Sungai Rumbai	601.244.869,00	665.009.704,00	63.764.835,00
RSUD Sungai Dareh - Pengurangan pembayaran	12.082.900,00	0,00	(12.082.900,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
utang atas klaim BPJS tahun 2024 pada RSUD Sungai Dareh			
RSUD Sungai Rumbai - Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit	0,00	48.143.876,00	48.143.876,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2025	0,00	710.700,00	710.700,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai Rumbai Tahun 2025	0,00	174.000,00	174.000,00
RSUD Sungai Dareh -Pengurangan pendapatan diterima dimuka dan Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit sesuai dengan Berita Acara Hasil Audit Administrasi Klaim atas Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan Nomor 244/BA/II-06/1124, Nomor 800.1.13.1/01/RSUD SR-2025) yang telah dipotong pada klaim BPJS bulan Januari 2025	0,00	2.662.502.400,00	2.662.502.400,00
RSUD Sungai Rumbai - Pengurangan pendapatan diterima dimuka dan Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit sesuai dengan Berita Acara Hasil Audit Administrasi Klaim atas Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan Nomor 244/BA/II-06/1124, Nomor 800.1.13.1/01/RSUD SR-2025) yang telah dipotong pada klaim BPJS bulan Januari 2025	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis :	0,00	6.395.900,00	6.395.900,00
Penambahan Piutang Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025	0,00	15.900,00	15.900,00
Dinas Lingkungan Hidup - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.326.000,00	53.342.000,00	44.016.000,00
Dinas PUPR - Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	20.939.500,00	217.876.200,00	196.936.700,00
Dinas Kumperdag - Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah :	52.162.098,06	69.912.316,75	17.750.218,69
Dinas Kesehatan - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umm-Dinkes/XII/2021, jangka waktu 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026	0,00	2.996.715,93	2.996.715,93
Dinas Kesehatan - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka atas kelebihan bayar rumah dinas Puskesmas Sitiung II	18.000,00	0,00	(18.000,00)
Dinas Pendidikan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rumah dinas)	0,00	27.564.000,00	27.564.000,00
Dinas Kesehatan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rumah dinas)	0,00	411.000,00	411.000,00
Dinas Perkimtan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rusunawa)	7.403.600,00	11.250.000,00	3.846.400,00
Dinas Perkimtan - Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa	7.882.258,06	6.712.903,23	(1.169.354,83)
RSUD Sungai Dareh - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk Payment Poin pada RSUD Sungai Dareh kontrak nomor 445/29/RSUD-2021 jangka waktu 16 November 2021 s.d 16 November 2024	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Sekretariat Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa ATM Bank Nagari Pulau Punjung di kantor Bupati dgn kontrak nomor PKS/129/PL/12-2022 jangka waktu 1 Des 2022 s.d 30 November 2027	0,00	3.997.809,42	3.997.809,42
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan kontrak nomor 0363/HK 810/J DMT-1063000/2024 jangka waktu 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2028	0,00	12.274.248,77	12.274.248,77
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari' pada MPP di DPMPSTSP dengan kontrak nomor 100.3.7/10/BKD/VIII/2024 jangka waktu 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029	0,00	3.596.059,11	3.596.059,11
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari' pada RSUD Sungai Dareh dengan kontrak nomor 100.3.7/10/BKD/VIII/2024 jangka waktu 7 Nov 2025 s.d 7 Nov 2030	36.858.240,00	1.109.580,29	(35.748.659,71)
JUMLAH	5.781.736.116,06	10.114.076.258,75	4.332.340.142,69

V.D.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.058.604.307,00	10.863.659.575,00	(5.805.055.268,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp5.805.055.268,00 atau -53,44%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00	(470.715.152,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00	(470.715.152,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO jumlah sebesar Rp470.715.152,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Dividen PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2025 sebesar Rp16.636.220,00.
3. Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00.
4. Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.041.968.087,00.

V.D.1.a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	4.521.435.494,93	11.939.130.310,51	(7.417.694.815,58)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp7.417.694.815,58 atau -62,13%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.8
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4.436.214.917,65	4.521.435.494,93	85.220.577,28
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	290.794.000,00	52.110.476,00	(238.683.524,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	729.488.090,00	729.488.090,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	112.607.358,46	112.607.358,46	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.200.602.481,19	2.524.297.782,47	323.695.301,28
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	582.407.951,00	582.392.751,00	(15.200,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	32.086.600,00	32.086.600,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	315.405,00	315.405,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	236.151,00	236.151,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	331.063,00	331.063,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO	82.801.414,00	82.801.414,00	0,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.846.050,00	1.846.050,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2.717.236,00	2.717.236,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	2.185.700,00	2.185.700,00	0,00
Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	74.227,00	74.227,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	156.786.100,00	156.786.100,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO	50.000,00	50.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah-LO	2.538.480,00	2.762.480,00	224.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.748.952,00	2.748.952,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	201.952.826,00	201.952.826,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	5.798.400,00	5.798.400,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO	27.846.433,00	27.846.433,00	0,00

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp85.220.577,28 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.9
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang ke Surplus penjualan aset nonlancar	238.683.524,00	0,00	(238.683.524,00)
Penjualan kendaraan dinas operasional sebanyak 3 unit, dengan rincian sebagai berikut:			
Sedan merk/type Honda/Accord CR2 2.4 VTIL AT Tahun 2016, disetor ke kasda tanggal 23 April 2025 sebesar Rp60.216.400,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp60.216.400,00.	60.216.400,00	0,00	(60.216.400,00)
Mini Bus merk/type Toyota/Fortuner 2.5 G A/T4 X 4 Tahun 2014, disetor ke kasda tanggal 15 April 2025 sebesar Rp58.072.800,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp58.072.800,00.	58.072.800,00	0,00	(58.072.800,00)
Mini Bus merk/type Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar H, disetor ke kasda tanggal 22 April 2025 sebesar Rp159.354.800,00 dengan nilai buku Rp52.110.476,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp107.244.324,00.	107.244.324,00	0,00	(107.244.324,00)
Penjualan sisa bongkaran atap seng gedung SMP Negeri 1 Pulau Punjung disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)
Penjualan persediaan barang habis pakai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disetor ke kasda tanggal 27 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00.	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.700.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp3.000.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 3 November 2025 sebesar Rp2.000.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp950.000,00 melalui Nagari Virtual Account (NVA).	950.000,00	0,00	(950.000,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	746.395.515,38	1.070.090.816,66	323.695.301,28
Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR)	0,00	1.070.090.816,66	1.070.090.816,66
Penerimaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR) ditahun 2025, terdiri dari piutang tahun sebelumnya sebesar Rp163.134.954,99,- dan dari SKP2KS tahun 2025 sebesar Rp582.260.560,39	745.395.515,38	0,00	(745.395.515,38)
Pencatatan Pengurangan piutang lain-lain PAD disebabkan piutang telah dibayar per 7 Oktober 2025 atas piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 yang diangsur sebesar Rp1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Dinas Perkimtan - Piutang Lain-Lain PAD atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	114.800,00	99.600,00	(15.200,00)
Dinas Perkimtan - Piutang Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -Pemanfaatan Aset Daerah	176.000,00	400.000,00	224.000,00
JUMLAH	985.369.839,38	1.070.590.416,66	85.220.577,28

V.D.1.b. PENDAPATAN TRANSFER

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.2.	Pendapatan Transfer	780.316.025.936,00	863.339.185.252,00	(83.023.159.316,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp83.023.159.316,00 atau -9,62%.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.10
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER	795.934.821.722,00	780.316.025.936,00	(15.618.795.786,00)
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.331.418.220,00	679.677.376.220,00	(7.654.042.000,00)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	43.040.334.800,00	35.386.292.800,00	(7.654.042.000,00)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	496.572.481.339,00	496.572.481.339,00	0,00
	DAK Fisik	8.778.269.954,00	8.778.269.954,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
	DAK Non Fisik	138.940.332.127,00	138.940.332.127,00	0,00
7.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	63.387.406.000,00	63.387.406.000,00	0,00
	Dana Desa	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	0,00
	Insentif Fiskal-LO	7.201.621.000,00	7.201.621.000,00	0,00
7.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.215.997.502,00	37.251.243.716,00	(7.964.753.786,00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	45.215.997.502,00	37.251.243.716,00	(7.964.753.786,00)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp15.618.795.786,00 berasal dari:

Tabel. 5.3.11
Penjelasan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Badan Keuangan Daerah - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.654.042.000,00	0,00	(7.654.042.000,00)
Penerimaan Piutang Pendapatan Transfer :			
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	826.662.000,00	0,00	(826.662.000,00)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.388.000,00	0,00	(1.388.000,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.982.000,00	0,00	(1.982.000,00)
DBH SDA Minyak Bumi	570.551.000,00	0,00	(570.551.000,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5.091.503.000,00	0,00	(5.091.503.000,00)
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.993.000,00	0,00	(4.993.000,00)
Penerimaan Aset Lainnya - Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) :			
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.153.400.000,00	0,00	(1.153.400.000,00)
Pendapatan Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	3.561.000,00	0,00	(3.561.000,00)
Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak)	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	(7.964.753.786,00)
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.801.253.820,00	0,00	(3.801.253.820,00)
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.528.623.806,00	0,00	(1.528.623.806,00)
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	16.321.017.625,00	13.770.526.155,00	(2.550.491.470,00)
Pendaaptan Pajak Air Permukaan (PAP)	98.119.667,00	13.734.977,00	(84.384.690,00)
JUMLAH	29.403.056.918,00	13.784.261.132,00	(15.618.795.786,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D.1.b. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	60.640.121.002,36	38.942.017.251,79	21.698.103.750,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp21.698.103.750,57 atau 55,72%.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.12
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2025

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18.640.091.435,60	60.640.121.002,36	42.000.029.566,76
7.3.1	Pendapatan Hibah	82.698.940,00	41.815.422.649,76	41.732.723.709,76
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	41.703.872.709,76	41.703.872.709,76
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	82.698.940,00	111.549.940,00	28.851.000,00
7.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.557.392.495,60	18.824.698.352,60	267.305.857,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	5.970.912.967,60	5.970.912.967,60	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	12.586.479.528,00	12.853.785.385,00	267.305.857,00

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah - LO jumlah sebesar Rp42.000.029.566,76 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat berupa persediaan sebesar Rp5.242.280.002,76 terdiri dari:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp5.092.976.402,76.
 - Dinas Sosial sebesar Rp149.303.600,00.
2. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.319.400.000,00.
3. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.239.427.900,00 terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp641.427.900,00.
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp598.000.000,00.
4. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah program revitalisasi berupa Aset Tetap Gedung Dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp29.902.764.807,00.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Penambahan Pendapatan Hibah dari dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri (Universitas Andalas) berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.851.000,00.
6. Penerimaan piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00 dan penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp1.126.650,00.
7. Pengembalian Kelebihan Kapitasi tahun 2021 atas Hasil Audit BPKP dan BPK RI berdasarkan BA Kompensasi Kapitasi antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp264.543.050,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	16.150.000,00
2)	Puskesmas Sitiung I	18.848.100,00
3)	Puskesmas Tiumang	5.845.500,00
4)	Puskesmas Silago	26.967.600,00
5)	Puskesmas Sialang	11.531.850,00
6)	Puskesmas Sitiung II	29.082.900,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	4.051.000,00
8)	Puskesmas Koto Besar	32.140.800,00
9)	Puskesmas Koto Baru	38.245.200,00
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	15.469.800,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	21.103.200,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	31.271.700,00
13)	Puskesmas Timpeh	8.496.900,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	5.338.500,00
Jumlah		264.543.050,00

8. Rekon Kepesertaan BPJS Meninggal yang Terlanjur Dibayarkan BPJS Tahun 2024 Yang Dipotong pada Penerimaan Kapitasi bulan September 2025 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kapitasi Bulan September 2025 BPJS Kesehatan Cabang Solok dengan puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp1.608.437,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	26.222,00
2)	Puskesmas Sitiung I	237.926,00
3)	Puskesmas Tiumang	133.946,00
4)	Puskesmas Silago	41.868,00
5)	Puskesmas Sialang	133.783,00
6)	Puskesmas Sitiung II	67.436,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	32.237,00
8)	Puskesmas Koto Besar	207.129,00
9)	Puskesmas Koto Baru	135.705,00
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	181.015,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	133.286,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	220.929,00
13)	Puskesmas Timpeh	46.728,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	10.227,00
Jumlah		1.608.437,00

9. Adanya penambahan pendapatan atas biaya pemotongan administrasi bank dari transfer BPJS ke rekening BLUD atas pendapatan kapitasi sebesar Rp487.200,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D.2. BEBAN

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN	1.015.989.467.964,08	1.098.972.178.944,35	(82.982.710.980,26)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp82.982.710.980,26 atau -7,55%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN	1.015.989.467.964,08	1.098.972.178.944,35	(82.982.710.980,26)
8.1.01	Beban Pegawai	484.254.267.653,56	459.854.645.158,04	24.399.622.495,52
8.1.02	Beban Persediaan	96.092.973.602,81	100.041.670.605,50	(3.948.697.002,69)
8.1.02	Beban Jasa	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21
8.1.02	Beban Sewa	2.647.796.083,00	5.782.869.796,00	(3.135.073.713,00)
8.1.02	Beban Pemeliharaan	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)
8.1.02	Beban Perjalanan Dinas	30.617.608.799,00	62.205.866.889,00	(31.588.258.090,00)
8.1.05	Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16
8.1.08	Beban Penyusutan Aset tetap	112.288.475.820,96	175.434.790.213,81	(63.146.314.392,85)
8.1.08	Beban Penyusutan Aset lain-lain	331.407.778,99	7.339.656.186,61	(7.008.248.407,61)
8.1.08	Beban Amortisasi	295.455.751,00	306.710.400,00	(11.254.649,00)
8.3	Beban Transfer	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)

V.D.2.a Beban Pegawai

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	Beban Pegawai	484.254.267.653,56	459.854.645.158,04	24.399.622.495,52

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp24.399.622.495,52 atau 5,31%.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.3.14
Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.01	Beban Pegawai	484.254.267.653,56	459.854.645.158,04	24.399.622.495,52
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	322.938.491.156,00	306.255.760.974,00	16.682.730.182,00
9.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	56.999.574.939,00	43.669.061.704,00	13.330.513.235,00
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.250.625.611,00	70.519.809.554,00	7.730.816.057,00
8.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.931.133.232,00	11.159.937.860,00	1.771.195.372,00
8.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	902.766.614,00	425.853.947,00	476.912.667,00
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.596.000,00	474.756.000,00	126.840.000,00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	11.630.080.101,56	27.349.465.119,04	(15.719.385.017,48)

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikurangnya pengembalian Beban Pegawai selama Tahun 2025.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.15
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	485.726.445.153,08	484.254.267.653,56	1.472.177.499,52
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	322.938.491.156,00	322.938.491.156,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	56.999.574.939,00	56.999.574.939,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.754.151.811,00	78.250.625.611,00	1.503.526.200,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.931.133.232,00	12.931.133.232,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	902.766.614,00	902.766.614,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.596.000,00	601.596.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	11.598.731.401,08	11.630.080.101,56	(31.348.700,48)

Penjelasan perbedaan belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO jumlah sebesar Rp1.472.177.499,52 dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	99.403.014,06	99.403.014,06
Utang Belanja Pegawai	738.194.034,64	2.110.968.520,10	1.372.774.485,47
JUMLAH	738.194.034,64	2.210.371.534,16	1.472.177.499,52

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan Selisih:

- a) Penyesuaian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp99.403.014,06, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.16**Penjelasan Selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara LRA dan LO Tahun 2025**

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atas Jasa Pelayanan Puskesmas	0,00	99.403.014,06	99.403.014,06
Jumlah	0,00	99.403.014,06	99.403.014,06

Penjelasan tabel terkait selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

- Pembayaran Utang Kepada Fihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp99.403.014,06, merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4% kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Iuran Jasa Pelayanan PNS antara BPJS Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebesar Rp99.403.014,06.
- b) Penyesuaian atas Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.372.774.485,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.17**Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2025**

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.503.526.200,00	1.503.526.200,00
Dinas Pendidikan - Utang Belanja TKG PNSD	0,00	884.776.200,00	884.776.200,00
Dinas Pendidikan - Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	618.750.000,00	618.750.000,00
Beban Pegawai BLUD	738.194.034,64	607.442.320,10	(130.751.714,53)
Utang Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh	14.250.000,00	30.800.000,00	16.550.000,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Limau	20.193.143,04	11.366.797,00	(8.826.346,04)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung I	95.906.580,00	38.865.601,00	(57.040.979,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Tiumang	0,00	29.426.734,00	29.426.734,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Silago	37.907.718,70	99.044.333,06	61.136.614,37
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sialang	9.952.000,00	43.866.520,00	33.914.520,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung II	121.611.700,00	2.800.000,00	(118.811.700,00)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Padang Laweh	73.996.896,00	48.326.063,00	(25.670.833,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Besar	45.961.760,56	70.757.528,84	24.795.768,28
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Baru	161.017.529,34	79.271.045,20	(81.746.484,14)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	61.332.502,00	36.020.740,00	(25.311.762,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Gunung Medan	44.155.725,00	2.887.638,00	(41.268.087,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Dareh	17.908.848,00	3.488.222,00	(14.420.626,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Beringin Sakti	30.809.632,00	110.521.098,00	79.711.466,00
Jumlah	738.194.034,64	2.110.968.520,10	1.372.774.485,47

Penjelasan selisih utang belanja pegawai sebagai berikut:

- Pembayaran Utang Belanja TKG PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan utang belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 Triwulan IV Tahun 2024 Carry over pada Tahun 2024, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun 2024.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp14.250.000,00.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD atas Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp30.800.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp3.190.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp719.492.397,64, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	20.193.143,04
2)	Puskesmas Sitiung I	95.906.580,00
3)	Puskesmas Silago	37.907.718,70
4)	Puskesmas Sialang	9.952.000,00
5)	Puskesmas Sitiung II	121.611.700,00
6)	Puskesmas Padang Laweh	73.996.896,00
7)	Puskesmas Koto Besar	45.961.760,56
8)	Puskesmas Koto Baru	161.017.529,34
9)	Puskesmas Sungai Rumbai	61.332.502,00
10)	Puskesmas Gunung Medan	44.155.725,00
11)	Puskesmas Sungai Dareh	17.908.848,00
12)	Puskesmas Beringin Sakti	30.809.632,00
Jumlah		720.754.034,64

- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp576.642.320,10, dengan rincian sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Puskesmas	Jumlah
1)	Puskesmas Sungai Limau	11.366.797,00
2)	Puskesmas Sitiung I	38.865.601,00
3)	Puskesmas Tiumang	29.426.734,00
4)	Puskesmas Silago	99.044.333,06
5)	Puskesmas Sialang	43.866.520,00
6)	Puskesmas Sitiung II	2.800.000,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	48.326.063,00
8)	Puskesmas Koto Besar	70.757.528,84
9)	Puskesmas Koto Baru	79.271.045,20
10)	Puskesmas Sungai Rumbai	36.020.740,00
11)	Puskesmas Gunung Medan	2.887.638,00
12)	Puskesmas Sungai Dareh	3.488.222,00
13)	Puskesmas Beringin Sakti	110.521.098,00
Jumlah		576.642.320,10

V.D.2.b. Beban Persediaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.2.b	Beban Persediaan	96.092.973.602,81	100.041.670.605,50	(3.948.697.002,69)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.948.697.002,69 atau - 3,95%.

Beban Persediaan ini terdiri dari Beban Pakai Habis, Beban Bahan Material, Beban Cetak dan Penggandaan serta Beban Persediaan BLUD dan Beban Persediaan BOS, yaitu:

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.18
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	70.884.680.082,00	96.092.973.602,81	(25.208.293.520,81)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.795.640,00	276.823.280,00	(268.027.640,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	87.453.675,00	36.181.500,00	51.272.175,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.823.249.911,00	2.891.253.787,21	(68.003.876,21)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	21.060.000,00	57.140.000,00	(36.080.000,00)
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	6.473.000,00	6.473.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	299.750.000,00	388.275.000,00	(88.525.000,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.131.000,00	23.206.000,00	(10.075.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.722.113.749,00	883.535.610,53	2.838.578.138,47

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	20.081.400,00	20.081.400,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	246.002.369,00	237.957.369,00	8.045.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	279.176.517,00	282.902.347,00	(3.725.830,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	638.948.531,00	642.097.831,00	(3.149.300,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.595.299.294,00	1.645.734.294,00	(50.435.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	198.945.188,00	201.965.188,00	(3.020.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	606.630.154,00	612.411.100,00	(5.780.946,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.147.153,00	28.987.153,00	(2.840.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	306.283.752,00	327.397.560,00	(21.113.808,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.825.000,00	16.825.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	72.405.800,00	104.305.770,00	(31.899.970,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	33.369.036,00	33.369.036,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	467.999.024,00	471.702.524,00	(3.703.500,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	2.276.533.552,00	743.587.298,23	1.532.946.253,77
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	226.161.390,00	494.669.084,16	(268.507.694,16)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.077.027.939,00	11.114.992.829,93	(6.037.964.890,93)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.799.482.560,00	18.791.797.042,30	(14.992.314.482,30)
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.403.508.674,00	1.283.868.549,00	119.640.125,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan	708.713.270,00	636.161.270,00	72.552.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.309.649.665,00	1.311.539.665,00	(1.890.000,00)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	720.630.541,00	720.630.541,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	752.003.453,00	752.003.453,00	0,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	245.801.335,00	245.801.335,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	399.685.000,00	399.685.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	233.277.810,00	233.277.810,00	0,00
Beban Pakaian Siaga	450.000,00	450.000,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	173.099.910,00	205.599.910,00	(32.500.000,00)
Beban Pakaian Olahraga	254.009.804,00	254.009.804,00	0,00
Beban Pakaian Paskibraka	203.539.764,00	203.539.764,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.181.881.896,00	1.192.274.146,00	(10.392.250,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.564.440,00	77.334.973,00	(68.770.533,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	1.776.000,00	(1.776.000,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.865.300,00	1.865.300,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	13.755.000,00	13.755.000,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00
Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	28.655.446.486,00	36.870.862.468,45	(8.215.415.982,45)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	11.717.792.600,00	11.323.208.110,00	394.584.490,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO sebesar Rp25.208.293.520,81 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.19
Selisih Belanja Persediaan LRA dan LO Tahun 2025

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBIT (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Saldo persediaan awal tahun	46.962.340.588,12	0,00	(46.962.340.588,12)
Saldo persediaan akhir tahun	0,00	24.626.599.975,67	24.626.599.975,67
Utang belanja persediaan tahun 2024	0,00	11.411.867.662,14	11.411.867.662,14
utang belanja persediaan tahun 2025	7.822.090.442,44	0,00	(7.822.090.442,44)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari belanja modal	1.045.429.125,30	0,00	(1.045.429.125,30)
Penyesuaian belanja Persediaan berasal dari hibah	5.242.280.002,76	0,00	(5.242.280.002,76)
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin	0,00	2.309.000,00	2.309.000,00
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap lainnya	0,00	16.070.000,00	16.070.000,00
Koreksi kurang catat Persediaan	193.000.000,00	0,00	(193.000.000,00)
JUMLAH	61.265.140.158,62	36.056.846.637,81	(25.208.293.520,81)

Penjelasan selisih:

- 1) Penyesuaian Persediaan yang terpakai pada Tahun 2024 sebesar Rp46.962.340.588,12 dan yang masih menjadi Persediaan (*stock*) pada Tahun 2025 sebesar Rp24.626.599.975,67 berdasarkan *stock opname* Persediaan per 31 Desember 2025.
- 2) Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2024 yang mengurangi Beban Persediaan sebesar Rp11.411.867.662,14 dan penambahan Utang Belanja Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp7.822.090.442,44, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 5.3.20
Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2025

SKPD/ Uraian	JUMLAH (Rp)
Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2024 :	11.411.867.662,14
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.470.235.744,00
Utang Belanja Bahan Obat	5.377.226.154,00
Utang Belanja Bahan Laboratorium	1.213.099.884,00
Utang Belanja Cetak	293.400.714,00
Utang Belanja ATK	86.349.000,00
Utang Belanja Alat Listrik	36.257.300,00
Utang Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	114.511.500,00
Utang Belanja isi tabung gas - gas medis	201.789.800,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI:	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	220.370.600,76
Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	398.626.965,38



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD/ Uraian	JUMLAH (Rp)
Penambahan Utang Persediaan Tahun 2025 :	7.822.090.442,44
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Obat	2.768.883.200,12
Utang Belanja Bahan Laboratorium	1.119.606.972,00
Utang Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	2.898.849.970,00
Utang Belanja Alat Listrik	332.000,00
Utang Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	230.000,00
Utang Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	2.518.801,00
Utang Belanja isi tabung gas - gas medis	226.488.500,00
Utang Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	10.483.000,00
Utang Belanja Kertas dan Cover	21.367.500,00
Utang Belanja Bahan Komputer	3.077.000,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	308.943.240,33
Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	461.310.258,99

- 3) Penambahan Persediaan Berasal Dari Belanja Modal sebesar Rp1.045.429.125,30, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.21
Penyesuaian Belanja Persediaan berasal dari Belanja Modal Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas dari aset peralatan dan mesin :			
Dinas Pendidikan - Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	431.062.500,00	0,00	(431.062.500,00)
RSUD Sungai Rumbai - Persediaan BLUD	6.205.500,00	0,00	(6.205.500,00)
Puskesmas Sialang - Persediaan BLUD	15.695.400,00	0,00	(15.695.400,00)
Puskesmas Koto Baru - Persediaan BLUD	16.203.500,00	0,00	(16.203.500,00)
Dinas Sosial - persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.855.000,00	0,00	(5.855.000,00)
Dinas Sosial - Persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use),	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)
Dinas Perhubungan - persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.838.808,00	0,00	(19.838.808,00)
Sekretariat Daerah - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J,Home Use),	66.930.533,00	0,00	(66.930.533,00)
Sekretariat Daerah - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.776.000,00	0,00	(1.776.000,00)
BKD - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.407.250,00	0,00	(9.407.250,00)
Inspektorat - persediaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	985.000,00	0,00	(985.000,00)
Reklas dari aset gedung dan bangunan :			
Dinas Pendidikan - persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	149.349.061,30	0,00	(149.349.061,30)

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Puskesmas Sitiung I - Persediaan BLUD	19.258.781,00	0,00	(19.258.781,00)
Reklas dari aset jalan, jrigasi dan jaringan :			
Dinas PUPR - Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	199.996.000,00	0,00	(199.996.000,00)
Dinas PUPR - Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.442.192,00	0,00	(62.442.192,00)
Dinas PUPR - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.593.630,00	0,00	(3.593.630,00)
Dinas PUPR - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
Dinas PUPR - Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)
Reklas dari aset tetap lainnya:			
Dinas Pendidikan - Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	31.899.970,00	0,00	(31.899.970,00)
Jumlah	1.045.429.125,30	0,00	(1.045.429.125,30)

- 4) Penambahan Persediaan non APBD sebesar Rp5.242.280.002,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.22
Penambahan Persediaan non APBD Tahun 2025

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan	5.092.976.402,76	0,00	(5.092.976.402,76)
Dinas Sosial	149.303.600,00	0,00	(149.303.600,00)
Jumlah	5.242.280.002,76	0,00	(5.242.280.002,76)

- 5) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.309.000,00.
- 6) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.070.000,00.
- 7) Adanya koreksi penambahan nilai Persediaan pada Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp193.000.000,00, karena kurang catat stock beras bulog pada tahun 2024

V.D.2.c Beban Jasa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.b	Beban Jasa	152.582.828.721,36	122.893.828.449,15	29.689.000.272,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp29.689.000.272,21 atau 24,16%.

Beban Jasa ini terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Jasa Konsultasi dan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Beban Jasa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.3.23
Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	145.349.774.697,10	152.582.828.721,36	(7.233.054.024,26)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	587.150.000,00	587.150.000,00	0,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	404.737.500,00	404.737.500,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	193.350.000,00	193.350.000,00	0,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.207.125.000,00	1.207.125.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	91.875.379,00	91.875.379,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,	2.582.856.800,00	2.582.856.800,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan	868.590.000,00	868.590.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	493.935.000,00	493.935.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	67.090.000,00	67.090.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.572.090.000,00	1.572.090.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	435.060.000,00	435.060.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	143.510.000,00	143.510.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	709.864.000,00	709.864.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.044.500.000,00	7.044.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	53.240.000,00	53.240.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	935.300.000,00	935.300.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	414.820.000,00	414.820.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.248.345.000,00	4.248.345.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.820.240.000,00	2.820.240.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	2.008.325.000,00	2.008.325.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	547.930.000,00	547.930.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	103.120.000,00	103.120.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	144.237.500,00	144.237.500,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	672.405.000,00	672.405.000,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.433.893.200,00	2.433.893.200,00	0,00
Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	6.527.459,00	6.527.459,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	184.437.000,00	184.437.000,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	39.984.950,00	39.984.950,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.057.890.000,00	1.057.890.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	585.375.016,00	585.375.016,00	0,00
Beban Tagihan Air	31.652.300,00	31.652.300,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	3.461.975.755,00	3.461.975.755,00	0,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.714.542.086,00	1.714.542.086,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	1.759.548,00	1.759.548,00	0,00
Beban Penambahan Daya	186.056.800,00	186.056.800,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	380.608.300,00	380.608.300,00	0,00
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	7.431.201.988,00	7.431.201.988,00	0,00
Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	0,00	0,00	0,00
Beban Lembur	903.350.000,00	903.350.000,00	0,00
Beban Medical Check Up	72.447.277,00	72.447.277,00	0,00
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	2.891.448.776,00	2.891.448.776,00	0,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.639.900,00	142.639.900,00	0,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.346.814.944,00	1.346.814.944,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJU dan BP Kelas 3	21.881.202.000,00	21.881.202.000,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	467.706.200,00	467.706.200,00	-
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	147.569.361,00	113.840.904,92	33.728.456,08
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	453.597.015,00	453.597.015,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	58.746.827,00	58.746.827,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	473.409.646,00	473.409.646,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	648.901.970,00	648.901.970,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	352.040.000,00	352.040.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	2.193.620.030,72	2.193.620.030,72	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	399.548.000,00	399.548.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	788.141.861,00	788.141.861,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.285.231.050,00	1.285.231.050,00	0,00
Beban Sosialisasi	4.352.597.600,00	4.352.597.600,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Bimbingan Teknis	1.470.115.728,00	1.470.115.728,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	125.990.500,00	125.990.500,00	0,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	226.560.000,00	226.560.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	35.218.166.617,38	42.484.949.097,72	(7.266.782.480,34)
Beban Barang dan Jasa BOSP	9.398.828.528,00	9.398.828.528,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.967.920.285,00	12.967.920.285,00	0,00

Penjelasan perbedaan Belanja Jasa-LRA dengan Jasa-LO sebesar Rp7.233.054.024,26 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.24
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2025

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang belanja jasa	16.979.462.166,13	9.434.939.476,79	(7.544.522.689,34)
Premi asuransi barang milik daerah	274.605.153,94	308.333.610,02	33.728.456,08
Penyesuaian belanja Persediaan menambah nilai aset tetap KDP	0,00	280.041.509,00	280.041.509,00
Penyesuaian Beban Jasa BLUD biaya transfer klaim BPJS dan Kapitasi	2.301.300,00	0,00	(2.301.300,00)
JUMLAH	17.256.368.620,07	10.023.314.595,81	(7.233.054.024,26)

Penjelasan selisih:

a.) Selisih penyesuaian Utang Belanja Jasa sebesar Rp7.544.522.689,34, yaitu:

Tabel. 5.3.25
Penyesuaian Utang Belanja Jasa Tahun 2025

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	15.724.016.893,00	8.731.505.723,00	(6.992.511.170,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	7.017.211.920,00	7.017.211.920,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.392.441.646,00	1.260.972.499,00	(14.131.469.147,00)
Belanja Rujukan Parsial	22.025.000,00	60.900.000,00	38.875.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	285.604.956,00	347.014.454,00	61.409.498,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan	0,00	39.406.850,00	39.406.850,00
Belanja Konsultan Konstruksi	23.945.291,00	0,00	(23.945.291,00)
RSUD SUNGAI RUMBAI	946.510.463,00	500.048.965,00	(446.461.498,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	930.449.663,00	481.489.765,00	(448.959.898,00)
Belanja Operasional Ambulan	16.060.800,00	15.229.200,00	(831.600,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
BLUD PUSKESMAS	308.934.810,13	203.384.788,79	(105.550.021,34)
Pembayaran Utang 2024 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	0,00	203.060.788,79	203.060.788,79
Sungai Limau	0,00	4.871.484,00	4.871.484,00
Sitiung I	0,00	18.927.556,00	18.927.556,00
Tiumang	0,00	8.382.777,00	8.382.777,00
Silago	0,00	16.163.212,43	16.163.212,43
Sialang	0,00	7.943.480,00	7.943.480,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Padang Laweh	0,00	27.268.412,00	27.268.412,00
Koto Besar	0,00	41.203.270,56	41.203.270,56
Koto Baru	0,00	35.840.954,80	35.840.954,80
Sungai Rumbai	0,00	253.260,00	253.260,00
Gunung Medan	0,00	525.522,00	525.522,00
Timpeh	0,00	41.680.860,00	41.680.860,00
Penambahan Utang 2025 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	308.934.810,13	0,00	(308.934.810,13)
Sungai Limau	8.654.204,16	0,00	(8.654.204,16)
Sitiung I	20.588.907,00	0,00	(20.588.907,00)
Silago	8.199.904,85	0,00	(8.199.904,85)
Sitiung II	12.430.000,00	0,00	(12.430.000,00)
Padang Laweh	18.584.127,00	0,00	(18.584.127,00)
Koto Besar	10.772.882,26	0,00	(10.772.882,26)
Koto Baru	42.122.448,86	0,00	(42.122.448,86)
Sungai Rumbai	1.036.546,00	0,00	(1.036.546,00)
Gunung Medan	3.049.969,00	0,00	(3.049.969,00)
Timpeh	109.880.821,00	0,00	(109.880.821,00)
Beringin Sakti	73.615.000,00	0,00	(73.615.000,00)
Pembayaran Utang 2024 operasional ambulan pada Puskesmas Tiumbang	0,00	324.000,00	324.000,00
JUMLAH	16.979.462.166,13	9.434.939.476,79	(7.544.522.689,34)

b.) Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp33.728.456,08, sebagai berikut:

Tabel. 5.3.26
Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2025

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO (Rp)
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah	140.232.331,75	156.873.977,64	16.641.645,89
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat DPRD	12.323.068,77	29.468.180,33	17.145.111,56
Premi Asuransi Gedung pada Sekretariat DPRD	122.049.753,42	121.991.452,05	(58.301,37)
JUMLAH	274.605.153,94	308.333.610,02	33.728.456,08

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp140.232.331,75 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp12.323.068,77.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp122.049.753,42.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp156.873.977,64 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp29.468.180,33.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp121.991.452,05.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c.) Penyesuaian Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur menambah nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp280.041.509,00
- d.) Penyesuaian Beban Jasa BLUD atas Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS dan Kapitasi yang terpotong biaya transfer pada BLUD sebesar Rp2.301.300,00, terdiri dari:

Tabel. 5.3.27
Penyesuaian Beban Jasa BLUD Tahun 2025

No	BLUD	Klaim BPJS	Kapitasi	Jumlah
1)	RSUD Sungai Dareh	710.700,00	0,00	710.700,00
2)	Labkesda	15.900,00	0,00	15.900,00
3)	RSUD Sungai Rumbai	174.000,00	0,00	174.000,00
4)	Puskesmas Sungai Rumbai	101.500,00	34.800,00	136.300,00
5)	Puskesmas Koto Besar	63.800,00	34.800,00	98.600,00
6)	Puskesmas Sungai Limau	40.600,00	34.800,00	75.400,00
7)	Puskesmas Koto Baru	72.500,00	34.800,00	107.300,00
8)	Puskesmas Tiumbang	72.500,00	34.800,00	107.300,00
9)	Puskesmas Padang Laweh	49.300,00	34.800,00	84.100,00
10)	Puskesmas Sitiung I	92.800,00	34.800,00	127.600,00
11)	Puskesmas Timpeh	69.600,00	34.800,00	104.400,00
12)	Puskesmas Gunung Medan	52.200,00	34.800,00	87.000,00
13)	Puskesmas Sitiung II	69.600,00	34.800,00	104.400,00
14)	Puskesmas Beringin Sakti	75.400,00	34.800,00	110.200,00
15)	Puskesmas Silago	43.500,00	34.800,00	78.300,00
15)	Puskesmas Sungai Dareh	49.300,00	34.800,00	84.100,00
15)	Puskesmas Sialang	60.900,00	34.800,00	95.700,00
	JUMLAH	1.814.100,00	487.200,00	2.301.300,00

V.D.2.d Beban Sewa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.c	Beban Sewa	2.647.796.083,00	5.782.869.796,00	(3.135.073.713,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.135.073.713,00 atau - 54,21%.

Beban Sewa ini terdiri dari Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat dan Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Serta Beban Sewa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.28
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	2.647.796.083,00	2.647.796.083,00	0,00
Beban Sewa Alat Pengangkat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	70.205.000,00	70.205.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	194.134.183,00	194.134.183,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	409.889.459,00	409.889.459,00	0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.861.040,00	187.861.040,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	190.189.918,00	190.189.918,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	184.140.502,00	184.140.502,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	874.186.446,00	874.186.446,00	0,00
Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	42.379.000,00	42.379.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa dana BLUD - LO	7.967.800,00	7.967.800,00	0,00
Beban Sewa dana BOS - LO	420.842.735,00	420.842.735,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO

V.D.2.e Beban Pemeliharaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.d	Beban Pemeliharaan	8.796.593.287,00	12.080.586.952,00	(3.283.993.665,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp3.283.993.665,00 atau - 27,18%.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan serta Beban Pemeliharaan BLUD dan Beban Pemeliharaan BOS.

Perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Pemeliharaan	9.238.841.559,00	8.796.593.287,00	442.248.272,00
Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	147.834.500,00	147.834.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	91.568.671,00	91.568.671,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	54.792.250,00	54.792.250,00	0,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	465.429.886,00	465.429.886,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.826.397.315,00	1.826.397.315,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	127.952.262,00	127.952.262,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	368.843.117,00	368.843.117,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.828.500,00	20.828.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	99.982.000,00	99.982.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	7.944.000,00	7.944.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.842.000,00	7.842.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.370.000,00	28.370.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	224.469.973,00	224.469.973,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.919.000,00	39.919.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	67.370.000,00	67.370.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	192.359.016,00	192.359.016,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	55.610.500,00	55.610.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.013.534.070,00	828.601.724,00	184.932.346,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	374.695.958,00	374.695.958,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.121.100.000,00	1.121.100.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	69.700.000,00	69.700.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	83.978.070,00	83.978.070,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dana BLUD - LO	1.750.839.604,00	1.493.523.678,00	257.315.926,00
Beban Pemeliharaan dana BOS - LO	829.140.867,00	829.140.867,00	0,00

Penjelasan perbedaan belanja pemeliharaan-LRA dengan beban pemeliharaan-LO sebesar Rp442.248.272,00, yaitu:

Tabel 5.3.30
Penjelasan Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan Tahun 2025

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD Sungai Dareh	45.946.467,00	313.612.033,00	267.665.566,00
Utang Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD Sungai Rumbai	10.349.640,00	0,00	(10.349.640,00)
Utang Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat Daerah	0,00	198.933.800,00	198.933.800,00
Reklas aset gedung dan bangunan ke aset ekstrakomptabel (perbaikan pintu gedung kantor) pada Bapperida	14.001.454,00	0,00	(14.001.454,00)
JUMLAH	70.297.561,00	512.545.833,00	442.248.272,00

Penjelasan selisih:

- Penambahan utang pemeliharaan sebesar Rp45.946.467,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	21.572.235,00
2)	Utang Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	881.000,00
3)	Utang Pemeliharaan LIFT	12.432.000,00
4)	Utang Pemeliharaan Tower dan Jaringan	1.990.000,00
5)	Utang Pemeliharaan Alkes	8.093.232,00
6)	Utang Pemeliharaan rutin instalasi air	600.000,00
7)	Utang Pemeliharaan Komputer	378.000,00
	Jumlah	45.946.467,00

- Pembayaran utang pemeliharaan sebesar Rp313.612.033,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	38.957.383,00
2)	Utang Pemeliharaan Alat Pendingin	82.978.050,00
3)	Utang Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	58.498.100,00
4)	Utang Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	133.178.500,00
	Jumlah	313.612.033,00

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Penambahan utang pemeliharaan Alat Kesehatan sebesar Rp10.349.640,00 pada BLUD RSUD Sungai Rumbai
- Pembayaran utang pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp198.933.800,00 pada Sekretariat Daerah
- Adanya reklas belanja modal aset gedung dan bangunan ke aset ekstrakomptabel (perbaikan pintu gedung kantor) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp14.001.454,00.

V.D.2.f Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	30.617.608.799,00	62.205.866.889,00	(31.588.258.090,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp31.588.258.090,00 atau - 50,78%.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Beban Perjalanan Dinas BLUD, dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.31
Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjanan Dinas	30.617.608.799,00	30.617.608.799,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.423.028.073,00	24.423.028.073,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.640.646.550,00	3.640.646.550,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO	1.134.085.464,00	1.134.085.464,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO	1.419.848.712,00	1.419.848.712,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO.

V.D.2.g Beban Hibah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.5	Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp24.121.654.814,00 atau - 68,50%.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban hibah ini terdiri dari :

Tabel 5.3.32**Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/Penurunan
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	11.090.591.943,00	35.212.246.757,00	(24.121.654.814,00)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	180.980.000,00	21.706.113.000,00	(21.525.133.000,00)
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	958.320.000,00	(958.320.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.057.079.615,00	1.229.825.159,00	(172.745.544,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	411.916.900,00	1.867.283.900,00	(1.455.367.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	935.965.285,00	855.713.548,00	80.251.737,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.351.332.000,00	4.344.257.150,00	7.074.850,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.380.002.143,00	3.576.834.000,00	(196.831.857,00)
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	773.316.000,00	628.900.000,00	144.416.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp24.121.654.814,00 atau 68,50%, hal ini karena di tahun 2024 adanya hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.33**Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2025**

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah	11.090.591.943,00	11.090.591.943,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	180.980.000,00	180.980.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.057.079.615,00	1.057.079.615,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	411.916.900,00	411.916.900,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.351.332.000,00	4.351.332.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.380.002.143,00	3.380.002.143,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	773.316.000,00	773.316.000,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D.2.h Beban Bantuan Sosial

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.6.	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo beban bantuan sosial Tahun 2025.

V.D.2.i Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	112.915.339.350,95	183.081.156.800,42	(70.165.817.449,47)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar Rp70.165.817.449,47 atau -38,32%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	112.915.339.350,95	183.081.156.800,42	(70.165.817.449,47)
Beban Penyusutan Aset Tetap	112.288.475.820,96	175.434.790.213,81	(63.146.314.392,85)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	331.407.778,99	7.339.656.186,61	(7.008.248.407,62)
Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	295.455.751,00	306.710.400,00	(11.254.649,00)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

V.D.2.j Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.8	Beban Penyisihan Piutang	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat kenaikan sebesar Rp168.737.622,16 atau 6,44%.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi, Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Saldo Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel. 5.3.34**Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	2.788.037.315,40	2.619.299.693,24	168.737.622,16
Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.452.813.392,80	2.097.119.145,14	(644.305.752,34)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	678.768.992,82	349.295.518,92	329.473.473,90
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	(27.646.597,30)	27.578.652,85	(55.225.250,15)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	684.098.191,23	145.307.034,27	538.791.156,96
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	3.335,85	(657,94)	3.993,79

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 30 pada laporan keuangan ini.

V.D.2.k Beban Transfer

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	Beban Transfer	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar Rp996.576.636,00 atau -0,87%.

Beban Transfer terdiri dari:

Tabel. 5.3.35**Saldo Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024**

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.3.	Beban Transfer	114.203.431.208,00	115.200.007.844,00	(996.576.636,00)
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.590.944.672,00	1.661.138.621,00	929.806.051,00
8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	209.924.400,00	208.096.583,00	1.827.817,00
8.3.02.05.01.0003	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	111.402.562.136,00	0,00	111.402.562.136,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025	TAHUN 2024	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	
8.3.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	113.330.772.640,00	(113.330.772.640,00)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.36
Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2025

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Transfer	114.203.431.208,00	114.203.431.208,00	0,00
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.590.944.672,00	2.590.944.672,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	209.924.400,00	209.924.400,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	111.402.562.136,00	111.402.562.136,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO.

V.D.2.1 Beban Lain-lain

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat saldo beban lain-lain tahun 2025.

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penuruna Rp
Surplus/Defisit dari Operasi	(31.265.067.804,10)	(76.606.202.888,36)	45.341.135.084,26

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 sebesar Rp31.265.067.804,10 mengalami penurunan sebesar Rp45.341.135.084,26 atau -59,19% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp76.606.202.888,36.

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2025 sebesar Rp31.265.067.804,10 merupakan selisih dari Pendapatan sebesar Rp984.724.400.159,98 dengan Beban Operasi sebesar Rp1.015.989.467.964,08.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	238.683.524,00	380.744.000,00	(142.060.476,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp238.683.524,00 mengalami penurunan sebesar Rp142.060.476,00 atau -37,31% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp380.744.000,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp238.683.524,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang atas penjualan Aset Lain-lain pada Tahun 2025 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Terdiri dari penerimaan atas penjualan aset lain-lain (rusak berat), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan kendaraan dinas operasional sebanyak 3 unit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sedan merk/type Honda/Accord CR2 2.4 VTIL AT Tahun 2016, disetor ke kasda tanggal 23 April 2025 sebesar Rp60.216.400,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp60.216.400,00.
 - b) Mini Bus merk/type Toyota/Fortuner 2.5 G A/T4 X 4 Tahun 2014, disetor ke kasda tanggal 15 April 2025 sebesar Rp58.072.800,00 dengan nilai buku Rp0,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp58.072.800,00.
 - c) Mini Bus merk/type Mitsubishi/Pajero Sport 2.4L Dakar H, disetor ke kasda tanggal 22 April 2025 sebesar Rp159.354.800,00 dengan nilai buku Rp52.110.476,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp107.244.324,00.
2. Penjualan sisa bongkaran atap seng gedung SMP Negeri 1 Pulau Punjung disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.500.000,00
3. Penjualan persediaan barang habis pakai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disetor ke kasda tanggal 27 Mei 2025 sebesar Rp1.000.000,00.
4. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp1.700.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
5. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp3.000.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
6. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 3 November 2025 sebesar Rp2.000.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).
7. Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp950.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA).

V.D.5. Pos Luar Biasa

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Pos Luar Biasa	196.489.050,00	2.485.520.287,00	(2.289.031.237,00)

Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp196.489.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.289.031.237,00 atau -92,09% bila dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.485.520.287,00.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar Rp196.489.050,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2025, belanja tidak terduga yang terealisasi untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam korban kebakaran dan korban bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/ Defisit LO

URAIAN	TAHUN 2025 Rp	TAHUN 2024 Rp	Kenaikan/Penuruna Rp
Surplus/ Defisit LO	(31.222.873.330,10)	(78.710.979.175,36)	47.488.105.845,26

Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp31.222.873.330,10 mengalami penurunan sebesar Rp47.488.105.845,26 atau -60,33% bila dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp78.710.979.175,36.

Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.222.873.330,10 merupakan penjumlahan dari Defisit dari Operasi sebesar Rp31.265.067.804,10 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp238.683.524,00 setelah Pengurangan Beban Transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp196.489.050,00.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan arus kas keluar (*Cash Out Flow*) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.1.a Arus Masuk Kas	951.745.981.854,25	970.441.713.488,79

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.317.593.473,00	25.092.743.485,78
2	Penerimaan Retribusi Daerah	73.178.734.847,00	65.941.537.340,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	5.347.929.006,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	4.145.420.917,65	11.607.295.741,01
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.769.613.800,00	14.676.153.000,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	26.270.721.000,00	22.402.073.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	496.572.481.339,00	512.944.707.932,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	147.718.602.081,00	166.360.138.484,00
9	Dana Insentif Daerah	7.201.621.000,00	20.745.042.000,00
10	Dana Desa	56.185.785.000,00	55.320.687.000,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.215.997.502,00	58.241.057.201,00
12	Penerimaan Hibah	82.698.940,00	71.350.441,00
13	Penerimaan Lainnya	18.557.392.495,60	11.690.998.858,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	951.745.981.854,25	970.441.713.488,79





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.1.b Arus Keluar Kas	869.955.658.574,18	910.980.207.014,13

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2025 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	485.726.445.153,08	454.911.665.442,94
2	Pembayaran Barang	258.738.701.220,10	304.013.952.063,19
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	11.090.591.943,00	34.253.926.757,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Pembayaran Tak Terduga	196.489.050,00	2.485.520.287,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.590.944.672,00	1.762.449.469,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	209.924.400,00	221.920.355,00
10	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	111.402.562.136,00	113.330.772.640,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	869.955.658.574,18	910.980.207.014,13

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	81.790.323.280,07	59.461.506.474,66

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2025 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp81.790.323.280,07

Arus Masuk Kas	Rp951.745.981.854,25
Arus Keluar Kas	<u>(Rp869.955.658.574,18)</u>
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 81.790.323.280,07

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.2.a Arus Masuk Kas	290.794.000,00	380.741.100,00

Pada Tahun 2025 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp290.794.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penjualan BMD secara langsung mobil dinas Pejabat	277.644.000,00
2.	Penjualan atas gedung dan bangunan	13.150.000,00
	Jumlah	290.794.000,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.2.b Arus Keluar Kas	45.656.214.008,30	102.187.717.063,16

Pada Tahun 2025 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp102.187.717.063,16. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	12.620.746.293,00	24.237.257.450,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	17.140.691.453,30	28.954.072.575,16
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.025.674.732,00	45.054.989.838,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.617.797.530,00	3.810.397.200,00
6	Perolehan Aset Tak berwujud	251.304.000,00	131.000.000,00
	Jumlah	45.656.214.008,30	102.187.717.063,16

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(45.365.420.008,30)	(101.806.975.963,16)

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2025 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(45.365.420.008,30).

Arus Masuk Kas	Rp	290.794.000,00
Arus Keluar Kas	Rp	<u>45.656.214.008,30</u>
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	(45.365.420.008,30)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2024 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	1.500.000.000,00	0,00

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2025 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.500.000.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.500.000.000,00)	0,00

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.500.000.000,00).

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	54.487.435.652,00	56.445.682.997,00

Arus masuk kas selama Tahun 2025 sebesar Rp54.487.435.652,00 yang berasal dari penerimaan PFK dapat diuraikan sebagai berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.5.4**Penerimaan PFK Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penerimaan IWP	3.191.521.036,00	2.590.096.479,00
2	Penerimaan TASPEN	14.929.303.726,00	14.584.219.458,00
3	Penerimaan BPJS 4%	13.857.785.463,00	10.382.099.348,00
4	Penerimaan JKK	502.473.969,00	471.900.283,00
5	Penerimaan JKM	1.501.736.251,00	1.415.695.004,00
6	Penerimaan PPN	9.897.375.276,00	15.877.958.425,00
7	Penerimaan PPh PsI 21	8.864.166.566,00	8.300.617.325,00
8	Penerimaan PPh PsI 22	867.309.795,00	856.008.682,00
9	Penerimaan PPh PsI 23	184.721.771,00	270.969.525,00
10	Penerimaan PPh PsI 4	691.041.799,00	1.696.118.468,00
	Jumlah	54.487.435.652,00	56.445.682.997,00

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

Tahun 2025 (Rp)**2024 Tahun (Rp)****V.E.4.b Arus Keluar Kas****54.487.435.652,00****56.453.142.290,00**

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.487.435.652,00 yang berasal dari penyetoran PFK, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.5**Penyetoran PFK Tahun 2025 dan 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyetoran IWP	3.191.521.036,00	2.590.096.479,00
2	Penyetoran TASPEN	14.929.303.726,00	14.584.219.458,00
3	Penyetoran BPJS 4%	13.857.785.463,00	10.382.099.348,00
4	Penyetoran JKK	502.473.969,00	471.900.283,00
5	Penyetoran JKM	1.501.736.251,00	1.415.695.004,00
6	Penyetoran PPN	9.897.375.276,00	15.882.067.685,00
7	Penyetoran PPh PsI 21	8.864.166.566,00	8.300.617.325,00
8	Penyetoran PPh PsI 22	867.309.795,00	856.546.715,00
9	Penyetoran PPh PsI 23	184.721.771,00	270.969.525,00
10	Penyetoran PPh PsI 26	0,00	0,00
11	Penyetoran PPh PsI 4	691.041.799,00	1.698.930.468,00
	Jumlah	54.487.435.652,00	56.453.142.290,00



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(7.459.293,00)

Pada Tahun 2025 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	34.924.903.271,77	(42.352.928.781,50)

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2025 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp34.924.903.271,77. Namun karena adanya pengurangan saldo Kas Daerah sebesar Rp589.849.590,00 sehingga nilai kenaikan kas menjadi sebesar Rp34.335.053.681,77.

Tabel 5.5.6**Kenaikan / Penurunan Kas Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	34.335.053.681,77	(42.352.928.781,50)	76.687.982.463,27
Saldo Awal Kas	4.085.069.988,55	46.437.998.770,05	(42.352.928.781,50)
Saldo Akhir Kas	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55	34.335.053.681,77

Saldo akhir Kas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.420.123.670,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.7**Saldo Akhir Kas Tahun 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	35.693.263.773,72	1.714.291.612,49	33.978.972.161,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.925.010,00	(6.925.010,00)
Saldo Akhir Kas di BLUD	2.450.038.397,60	1.272.541.885,06	1.177.496.512,54
Saldo Akhir pada Dana BOS	52.396.305,00	36.378.712,00	16.017.593,00
Saldo Akhir Kas lainnya	224.425.194,00	1.054.932.769,00	(830.507.575,00)
Jumlah	38.420.123.670,32	4.085.069.988,55	34.335.053.681,77





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 seharusnya adalah sebesar Rp36.283.113.363,72, namun telah terjadi kekurangan kas sebesar Rp589.849.590,00, nilai saldo Kas di Kas Daerah menjadi sebesar Rp35.693.263.773,72. Hal ini terjadi berkaitan dengan Kasus an. Budi Yono yang merupakan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Nomor : LAP/05/ATT/Inspektorat-2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pencairan SP2D Ganda dengan Kegiatan yang sama pada Sekretariat DPRD dan Pencairan SP2D pada Dinas Pendidikan ke Rekening Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a.n. Budi Yono Tahun Anggaran 2025. Telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 900.1.11.4/01/SKTJM-2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Budi Yono. Kasus ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya, dan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pdg, tanggal surat 15 Desember 2025 dan Nomor Surat Pelimpahan B-3202/L.3.24/Ft.1/12/2025. Saat ini status perkara adalah permohonan banding dari pihak penuntut umum/jaksa. Sehingga pada saat laporan ini disusun masih menunggu keputusan *inkracht* sidang di Pengadilan Negeri Padang.

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
V.F. Ekuitas	2.388.311.446.511,62	2.421.166.191.465,57

Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.388.311.446.511,62 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.421.166.191.465,57

Uraian dan rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut.

Saldo awal ekuitas	Rp	2.421.166.191.465,57
Surplus/Defisit LO	Rp	(31.222.873.330,10)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		
a. Koreksi Persediaan	Rp	0,00
b. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
c. Lain-Lain	Rp	(1.631.871.623,85)
Saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas	Rp	2.388.311.446.511,62





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

V.G. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 atas penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2025, ditetapkan sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Nagari Tahun Buku 2025 sebesar Rp5.041.968.087,00 pada tanggal 11 Maret 2026.
2. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 atas penerimaan deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2025, ditetapkan sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPR Pulau Punjung Tahun Buku 2025 sebesar Rp16.636.200,00 pada tanggal 13 Februari 2026.
3. Pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Mei 2026. Berdasarkan Keputusan tersebut nilai piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 pada Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar Rp13.784.261.132,00.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mempunyai visi yaitu.

“Dharmasraya Sejahtera Merata”

Definisi kalimat Visi RPJMD:

Sejahtera:

Menggambarkan kondisi masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang mengalami kondisi kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik serta mampu bersaing secara regional dan nasional.

Merata:

Kabupaten Dharmasraya diharapkan adanya pemerataan pembangunan yang merata yang diukur dari indikator kinerja pembangunan kewilayahan berdasarkan kecamatan ataupun tingkat nagari.

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam Misi, yaitu.

1. Membangun infrastruktur untuk Dharmasraya Sejahtera Merata.
2. Pemerintahan Yang Transparan, Profesional, Efektif Dan Efisien.
3. Mengembangkan Sistem, Kebijakan Dan Implementasi Pelestarian Lingkungan.
4. Membangun SDM untuk Menunjang Dharmasraya Sejahtera Merata.
5. Transformasi ekonomi.
6. Transformasi sosial dan budaya berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah $\pm$ 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi 0° 47'07" Lintang Selatan dan 1° 41' 56" Lintang Selatan dan, 101° 09' 21", BT-- 101° 54' 27" Bujur Timur.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan, luas wilayah menurut per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	47,63
2	Koto Besar	Koto Besar	488,19
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	257,72
4	Koto Baru	Koto Baru	251,35
5	Koto Salak	Koto Salak	464,39
6	Tiumang	Tiumang	129,18
7	Padang Laweh	Padang Laweh	59,76
8	Sitiung	Sitiung	87,68
9	Timpeh	Tabek	237,93
10	Pulau Punjung	Sungai Dareh	482,50
11	Sembilan Koto	Sembilan Koto	454,80
	Luas Dharmasraya		2.961,13

Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2025

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Dharmasraya, penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2025 berjumlah 244.110 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 83,79 jiwa/km². Jumlah Penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 50.040 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada Kecamatan Padang Laweh dengan jumlah penduduk 7.020 jiwa, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
1.	Sungai Rumbai	24,90	11,30	10,04	522,74	102,95
2.	Koto Besar	29,89	11,55	12,05	61,23	100,14
3.	Asam Jujuhan	9,47	0 ,20	3,82	36,75	110,79
4.	Koto Baru	34,27	5,96	13,81	136,36	98,98
5.	Koto Salak	18,85	7,67	7,60	40,58	101,34
6.	Tiumang	14,18	8,45	5,71	109,76	100,89
7.	Padang Laweh	7,02	9,27	2,83	117,54	98,31
8.	Sitiung	30,55	8,42	12,31	348,39	104,11
9.	Timpeh	18,76	11,52	7,56	78,86	104,76
10.	Pulau Punjung	50,04	10,94	20,17	103,70	103,88
11.	Sembilan Koto	10,18	9,23	4,10	22037	104,71
Jumlah		248,11	9,11	100	83,79	102,50

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025.

Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.326 orang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari:

Tabel 6.3

Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	882	2094	2976
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	401	1633	2034
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	678	638	1316
	Total	1.961	4.365	6.326

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Jumlah entitas akuntansi pada tahun 2024 berkurang 1 dari jumlah 38 entitas pada tahun 2023, menjadi 37 entitas pada tahun 2024. RSUD Sungai Dareh pada Tahun 2024 bukan merupakan SKPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah. Ketentuan pasal 3 ayat (3) menjabarkan bahwa UPTD RSUD Sungai Dareh dipimpin oleh Direktur RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga terhitung Tahun 2024, secara teknis RSUD Sungai Dareh merupakan UPTD dibawah Dinas Kesehatan dan bukan merupakan SKPD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe, yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Inspektorat
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4) Badan Keuangan Daerah
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 7) Dinas Pertanian





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 8) Kecamatan Asam Jujuhan
- 9) Kecamatan Koto Baru
- 10) Kecamatan Koto Besar
- 11) Kecamatan Koto Salak
- 12) Kecamatan Pulau Punjung
- 13) Kecamatan Sembilan Koto
- 14) Kecamatan Sitiung
- 15) Kecamatan Sungai Rumbai
- 16) Kecamatan Timpeh
- 17) Kecamatan Tiumang

2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 8) Dinas Lingkungan Hidup
- 9) Kecamatan Padang Laweh
- 10) Dinas Pangan dan Perikanan

3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- 5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan
- 7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 1 SKPD yang tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 1 SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 6.4
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		-
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
36	Penelitian dan Pengembangan		
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definitif dilantik pada tanggal 27 Desember 2024.

Tahun 2024 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, yaitu.

- 1) Bupati : Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M
- 2) Ketua DPRD : Jemi Hendra, S.T.
- 3) Sekretaris Daerah : Adlisman, S.Sos., M.Si (2021 s.d. 14 Mei 2025)
- 4) Pj. Sekretaris Daerah : Drs. Jasman, M.M. (18 Mei 2025 s.d. 6 Mei 2026)





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya resmi memiliki Sekretaris Daerah definitif setelah Bupati Dharmasraya melantik Medison, S.Sos, M.Si pada tanggal 7 Mei 2026 yang lalu.

Berikut Nama Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih dari tahun 2005 s.d. sekarang.

Tabel 6.5
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE	Ir. Tugimin	2005-2010
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM	Drs. H. Syafruddin R (almarhum)	2010-2015
3	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos	2015-2020
4	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, M.AP	Drs. Dasril Panin Dt. Labuan (almarhum)	2020-2025
5	Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M	Leli Arni, S.Pd., M.Si.	2025-2030

VI.C Pelaksanaan KPBU

Kabupaten Dharmasraya melaksanakan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) Tahun 2023-2025. Sebagai Badan Usaha Pemrakarsa adalah PT. Maradon Berlian Sakti dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT Dharmasraya Kilau Abadi.

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan sebuah pembagian risiko antara para pihak. Kegiatan dimulai sejak Badan Usaha menyampaikan proposal sebagai berikut :

Tabel 6.6
Timeline KPBU Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) Dharmasraya

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
1.	Penyampaian proposal oleh Badan Usaha	5 April 2021	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
2.	Pra Studi Kelayakan	29 September 2021	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
3.	Studi Kelayakan	Tanpa tanggal	Disampaikan oleh PT Maradon Berlian Sakti
4.	Evaluasi FS	5 Januari 2022	PJKP dibantu oleh Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan Universitas Andalas
5.	Penetapan Badan Usaha Pemrakarsa	31 Maret 2022	SK Bupati Nomor 600/132/DPUPR/III/2022





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Tanggal	Keterangan
6.	Reviu kelengkapan dokumen FS Pertama (persentase kelengkapan 34%)	4 Juli 2022	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor 08563/PP.01.04/Dt.8.6/T/06/2022
7.	Reviu kelengkapan dokumen FS Kedua (persentase kelengkapan 76%)	2 Maret 2023	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor B-03512/Dt.8.5/PP.08.01/03/2023. Syarat minimal kelengkapan 70 %
8.	Market Sounding	13 Maret 2023	Melalui daring bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Pemilihan Badan Usaha Pelaksana (BUP)	14 April 2023 s.d 25 Agustus 2023	Oleh Tim Pengadaan
10.	Reviu kelengkapan dokumen FS Ketiga (persentase kelengkapan 96,9%)	11 Juli 2023	Surat Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor B-12997/Dt.8.5/PP.08.01/07 /2023. Syarat minimal kelengkapan 70 %
11.	Penetapan BUP	25 Agustus 2023	Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung Nomor 000.3.3/08/KPBU-PJU/VIII-2023
12.	Perjanjian Kerja Sama (PKS) KPBU	19 September 2023	Antara PJPK dengan PT Dharmasraya Kilau Abadi selaku BUP dengan masa konstruksi proyek selama 12 bulan sejak tanggal 18 September 2023 s.d 21 September 2024
13.	Amandemen I	28 Februari 2024	Perubahan pasal - pasal dalam PKS KPBU (tidak didukung justifikasi teknis)
14.	Amandemen II	25 Maret 2024	Perubahan lingkup pekerjaan yakni mengurangi item pekerjaan lama dan menambah item pekerjaan baru (tidak didukung justifikasi teknis)
15.	Amandemen III	25 November 2024	Mengubah waktu masa konstruksi menjadi 10 bulan sejak tanggal 3 Februari 2024 s.d 6 Desember 2024 dan penambahan item biaya komisioning (tidak didukung justifikasi teknis)

Pada Tahun 2025 pembayaran jasa berupa Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) pada Dinas Perhubungan belum terealisasi secara optimal. Dianggarkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.300.000.000,00, dengan satu kali realisasi pembayaran tagihan pada bulan Januari 2025 sebesar Rp778.141.861,00. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan masih menunggu selesainya proses reviu dan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya. Sehingga Pemerintah Daerah menunda realisasi belanja sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian perencanaan, skema pembiayaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit dengan Nomor PE.04.03/LHP-337/PW03/5/2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Jasa Layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atas Prakarsa Badan Usaha (*Unsolicited*) Tahun 2023-2025.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pendampingan dari BPKP untuk dapat mengukur nilai aset dan kewajiban yang muncul dari pelaksanaan perjanjian KPBU dan menyajikannya di Laporan Keuangan.





BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean government*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas, amanah, pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pulau Punjung, Mei 2026

 **BUPATI DHARMASRAYA**

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., LL.M.

KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

LAMPIRAN 1

No	RINCIAN	TARGET APBD 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4		5
1	DINAS PENDIDIKAN	85,100,000.00	112,527,480.00	132.23%	68,761,428.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	85,100,000.00	112,527,480.00	132.23%	68,761,428.00
	Retribusi Daerah	85,100,000.00	112,527,480.00	132.23%	68,761,428.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	85,000,000.00	112,396,200.00	132.23%	68,569,200.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100,000.00	131,280.00	131.28%	192,228.00
2	DINAS KESEHATAN	69,633,915,351.00	69,727,472,057.00	100.13%	9,802,903,770.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	69,633,915,351.00	69,727,472,057.00	100.13%	9,802,903,770.00
	Retribusi Daerah	69,633,915,351.00	69,727,472,057.00	100.13%	9,802,903,770.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3,472,157,351.00	4,188,313,600.00	120.63%	3,364,903,484.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	65,716,308,000.00	64,839,085,207.00	98.67%	6,192,602,286.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	300,000,000.00	370,049,100.00	123.35%	161,310,000.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	36,000,000.00	37,740,000.00	104.83%	-
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	109,450,000.00	139,305,000.00	127.28%	84,088,000.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	152,979,150.00	0.00%	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	-	-		54,333,692,973.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		54,333,692,973.00
	Retribusi Daerah	-	-		54,333,692,973.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	-	-		54,303,752,973.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	-	-		15,540,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	-		14,400,000.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-		-
	Pendapatan BLUD RSUD	-	-		-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,192,700,000.00	2,083,941,452.00	95.04%	678,089,487.00
	Retribusi Daerah	2,192,700,000.00	2,083,941,452.00	95.04%	678,089,487.00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30,000,000.00	39,500,000.00	131.67%	32,750,000.00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	300,000,000.00	65,548,100.00	21.85%	206,519,100.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	160,000,000.00	258,620,000.00	161.64%	94,570,000.00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1,700,000,000.00	1,717,524,400.00	101.03%	342,522,787.00
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	2,700,000.00	2,748,952.00	101.81%	1,727,600.00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	296,500,000.00	312,980,700.00	105.56%	298,940,400.00
	Retribusi Daerah	296,500,000.00	312,980,700.00	105.56%	298,940,400.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	290,000,000.00	305,745,000.00	105.43%	289,300,000.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,500,000.00	7,235,700.00	111.32%	9,640,400.00
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3,500,000.00	4,803,500.00	137.24%	5,570,600.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	3,000,000.00	2,432,200.00	81.07%	4,069,800.00
6	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75,000,000.00	49,590,000.00	66.12%	32,080,000.00
	Retribusi Daerah	75,000,000.00	49,590,000.00	66.12%	32,080,000.00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75,000,000.00	49,590,000.00	66.12%	32,080,000.00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	318,600,000.00	372,080,000.00	116.79%	255,636,500.00
	Retribusi Daerah	318,600,000.00	372,080,000.00	116.79%	255,636,500.00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	310,000,000.00	361,220,000.00	116.52%	250,608,500.00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	5,000,000.00	7,390,000.00	147.80%	3,405,000.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	600,000.00	50,000.00	8.33%	1,530,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3,000,000.00	3,420,000.00	114.00%	93,000.00

No	RINCIAN	TARGET APBD 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4		5
8	DINAS PERHUBUNGAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110,000,000.00	103,225,000.00	93.84%	16,475,000.00
	Retribusi Daerah	110,000,000.00	103,225,000.00	93.84%	16,475,000.00
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100,000,000.00	97,825,000.00	97.83%	8,875,000.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	10,000,000.00	5,400,000.00	54.00%	7,600,000.00
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15,000,000.00	13,000,000.00	86.67%	4,300,000.00
	Retribusi Daerah	15,000,000.00	13,000,000.00	86.67%	4,300,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15,000,000.00	13,000,000.00	86.67%	4,300,000.00
10	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	87,200,000.00	101,460,000.00	116.35%	105,560,000.00
	Retribusi Daerah	87,200,000.00	101,460,000.00	116.35%	105,560,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	80,000,000.00	96,060,000.00	120.08%	94,760,000.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	7,200,000.00	5,400,000.00	75.00%	10,800,000.00
11	DINAS PERTANIAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	227,000,000.00	241,696,000.00	106.47%	94,980,000.00
	Retribusi Daerah	227,000,000.00	241,696,000.00	106.47%	94,980,000.00
	Retribusi Los	2,000,000.00	1,770,000.00	88.50%	2,020,000.00
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5,000,000.00	5,010,000.00	100.20%	5,460,000.00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	9,500,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	200,000,000.00	214,916,000.00	107.46%	78,000,000.00
12	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,980,000.00	12,681,000.00	90.71%	11,237,500.00
	Retribusi Daerah	13,980,000.00	12,681,000.00	90.71%	11,237,500.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	13,980,000.00	12,681,000.00	90.71%	11,237,500.00
13	SEKRETARIAT DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110,000,000.00	146,600,000.00	133.27%	126,050,000.00
	Retribusi Daerah	110,000,000.00	146,600,000.00	133.27%	126,050,000.00
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5,000,000.00	3,600,000.00	72.00%	120,000,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	105,000,000.00	143,000,000.00	136.19%	6,050,000.00
14	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Retribusi Daerah	5,500,000.00	4,850,000.00	88.18%	3,400,000.00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4,000,000.00	3,250,000.00	81.25%	3,400,000.00
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1,500,000.00	1,600,000.00	106.67%	-
15	BADAN KEUANGAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	893,551,682,582.46	878,736,554,165.25	98.34%	904,969,704,050.79
	Pajak Daerah	53,158,000,000.00	54,319,122,273.00	102.18%	25,084,543,485.78
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350,000,000.00	351,380,547.00	100.39%	341,020,598.00
	Pajak Air Tanah	110,000,000.00	126,709,052.00	115.19%	69,875,770.00
	Pajak Sarang Burung Walet	10,000,000.00	5,200,000.00	52.00%	3,900,000.00
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550,000,000.00	596,315,895.00	108.42%	356,993,896.00
	PBBP2	3,200,000,000.00	3,314,830,211.00	103.59%	2,661,156,855.00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8,000,000,000.00	4,684,209,255.00	58.55%	5,087,204,132.00
	BPHTB-Pemindahan Hak	4,000,000,000.00	4,091,087,585.00	102.28%	4,586,132,382.00
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4,000,000,000.00	593,121,670.00	14.83%	501,071,750.00
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	15,770,000,000.00	16,495,949,013.00	104.60%	16,564,392,234.78
	PBJT-Restoran	1,200,000,000.00	1,530,491,037.00	127.54%	1,491,612,906.78
	PBJT-Tenaga Listrik	14,250,000,000.00	14,539,125,043.00	102.03%	14,761,538,520.00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	13,650,000,000.00	13,914,942,804.00	101.94%	14,214,737,472.00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	600,000,000.00	624,182,239.00	104.03%	546,801,048.00
	PBJT-Hotel	270,000,000.00	382,299,133.00	141.59%	288,281,956.00
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	35,000,000.00	21,825,900.00	62.36%	12,228,152.00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	15,000,000.00	22,207,900.00	148.05%	10,730,700.00
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	15,800,000,000.00	16,776,873,700.00	106.18%	-
	Opsen PKB	15,800,000,000.00	16,776,873,700.00	106.18%	-
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9,368,000,000.00	11,967,654,600.00	127.75%	-
	Opsen BBNKB	9,368,000,000.00	11,967,654,600.00	127.75%	-

No	RINCIAN	TARGET APBD 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4		5
	Retribusi Daerah	5,000,000.00	41,658,240.00	833.16%	86,408,500.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5,000,000.00	41,658,240.00	833.16%	86,408,500.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,529,319,469.00	5,529,319,459.00	100.00%	5,347,929,006.00
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5,529,319,469.00	5,529,319,459.00	100.00%	5,347,929,006.00
	Lain-lain PAD yang Sah	5,067,300,000.00	4,256,631,043.65	84.00%	11,998,615,143.01
	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	770,000,000.00	290,794,000.00	37.77%	380,741,100.00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	875,000,000.00	729,488,090.00	83.37%	750,556,371.00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	125,000,000.00	112,607,358.46	90.09%	150,407,834.71
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2,500,000,000.00	2,200,602,481.19	88.02%	9,039,251,467.21
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	300,000,000.00	562,669,459.00	187.56%	1,265,193,874.09
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45,470,000.00	32,086,600.00	70.57%	37,632,514.00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videootron/Megatron	250,000.00	315,405.00	126.16%	1,456,531.00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	230,000.00	236,151.00	102.67%	413,162.00
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	350,000.00	331,063.00	94.59%	858,085.00
	Pendapatan Denda PBBP2	75,000,000.00	82,801,414.00	110.40%	74,440,489.00
	Pendapatan Denda BPHTB Pemindehan Hak	50,000.00	317,250.00	634.50%	
	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2,850,000.00	2,717,236.00	95.34%	2,537,324.00
	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	50,000.00	74,227.00	148.45%	
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	2,100,000.00	2,185,700.00	104.08%	320,061.00
	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100,000.00	-	0.00%	49,800.00
	Pendapatan Denda Opsen PKB	120,850,000.00	156,786,100.00	129.74%	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100,000,000.00	48,973,676.00	48.97%	265,503,414.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50,000,000.00	5,798,400.00	11.60%	29,253,116.00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	100,000,000.00	27,846,433.00	27.85%	
	PENDAPATAN TRANSFER	811,958,696,072.35	795,949,731,714.00	98.03%	850,689,858,617.00
	Dana Desa	56,185,785,000.00	56,185,785,000.00	100.00%	55,320,687,000.00
	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7,204,202,000.00	7,201,621,000.00	99.96%	20,745,042,000.00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	46,150,739,500.00	43,055,244,792.00	93.29%	37,078,226,000.00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	499,375,747,100.00	496,572,481,339.00	99.44%	512,944,707,932.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10,058,006,000.00	8,778,269,954.00	87.28%	34,621,165,717.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147,727,886,000	138,940,332,127.00	94.05%	131,738,972,767.00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,256,330,472.35	45,215,997,502.00	99.91%	58,241,057,201.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,833,367,041	18,640,091,436	104.52%	11,762,349,299.00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	100,000,000	82,698,940.00	82.70%	71,350,441.00
	Pendapatan Atas Pengembalian Hibah Pada Pemerintah	5,969,213,826	5,970,912,967.60	100.03%	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	11,764,153,215.00	12,586,479,528.00	106.99%	11,690,998,858.00
16	KECAMATAN PULAU PUNJUNG				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,500,000.00
	Retribusi Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,500,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,500,000.00
17	KECAMATAN SITIUNG				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	2,000,000.00
	Retribusi Daerah	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	2,000,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	2,000,000.00
18	KECAMATAN KOTO BARU				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000.00	2,250,000.00	112.50%	4,750,000.00
	Retribusi Daerah	2,000,000.00	2,250,000.00	112.50%	4,750,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2,000,000.00	2,250,000.00	112.50%	4,750,000.00
19	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,900,000.00	7,768,000.00	199.18%	10,750,000.00
	Retribusi Daerah	3,900,000.00	7,768,000.00	199.18%	10,750,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3,900,000.00	7,768,000.00	199.18%	10,750,000.00

No	RINCIAN	TARGET APBD 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4		5
20	KECAMATAN SEMBILAN KOTO				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,000,000.00
	Retribusi Daerah	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,000,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,000,000.00
21	KECAMATAN TIMPEH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,500,000.00	850,000.00	34.00%	2,750,000.00
	Retribusi Daerah	2,500,000.00	850,000.00	34.00%	2,750,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2,500,000.00	850,000.00	34.00%	2,750,000.00
22	KECAMATAN KOTO BESAR				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,005,000.00
	Retribusi Daerah	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,005,000.00
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2,000,000.00	1,250,000.00	62.50%	2,000,000.00
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-		5,000.00
	JUMLAH	966,739,327,933.46	952,036,775,854.25	98.48%	970,829,566,108.79

PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2025

NO	URAIAN	BRUTO	POTONGAN	NETTO	PENERIMAAN TAHUN 2025	SISA
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Dana Bagi Hasil	41.883.371.800,00	-	41.883.371.800,00	41.883.371.800,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.079.349.800,00		5.079.349.800,00	5.079.349.800,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	228.201.500,00		228.201.500,00	228.201.500,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	11.414.302.500,00		11.414.302.500,00	11.414.302.500,00	-
	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	2.118.985.000,00		2.118.985.000,00	2.118.985.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	18.802.000,00	-	18.802.000,00	18.802.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	16.602.900.000,00		16.602.900.000,00	16.602.900.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	46.815.000,00	-	46.815.000,00	46.815.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	1.079.646.000,00	-	1.079.646.000,00	1.079.646.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	332.398.000,00	-	332.398.000,00	332.398.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	833.805.000,00	-	833.805.000,00	833.805.000,00	-
	Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	4.080.407.000,00	-	4.080.407.000,00	4.080.407.000,00	-
	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	47.760.000,00	-	47.760.000,00	47.760.000,00	-
2	Dana Alokasi Umum	496.575.149.239,00	2.667.900,00	496.572.481.339,00	496.572.481.339,00	-
	Belanja Dana Alokasi Umum	426.787.552.000,00	2.667.900,00	426.784.884.100,00	426.784.884.100,00	-
	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	8.673.034.239,00	-	8.673.034.239,00	8.673.034.239,00	-
	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	34.559.893.000,00	-	34.559.893.000,00	34.559.893.000,00	-
	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	26.554.670.000,00	-	26.554.670.000,00	26.554.670.000,00	-
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	8.778.269.954,00	-	8.778.269.954,00	8.778.269.954,00	-
	Dana Alokasi Khusus Penugasan	8.778.269.954,00	-	8.778.269.954,00	8.778.269.954,00	-
4	Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	7.201.621.000,00	-	7.201.621.000,00	7.201.621.000,00	-
	Dana Insentif Daerah	7.201.621.000,00	-	7.201.621.000,00	7.201.621.000,00	-
5	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	147.878.745.738,00	8.938.413.611,00	138.940.332.127,00	138.940.332.127,00	-
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	80.151.036.500,00	6.284.186.994,00	73.866.849.506,00	73.866.849.506,00	-
	Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	3.390.239.400,00	998.082.729,00	2.392.156.671,00	2.392.156.671,00	-
	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	514.750.000,00	27.217.500,00	487.532.500,00	487.532.500,00	-
	Dana Bantuan Operasional Sekolah	34.823.314.383,00		34.823.314.383,00	34.823.314.383,00	-
	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	19.159.634.000,00	1.442.544.851,00	17.717.089.149,00	17.717.089.149,00	-
	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.076.212.000,00	94.373.850,00	3.981.838.150,00	3.981.838.150,00	-
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	4.054.813.455,00	-	4.054.813.455,00	4.054.813.455,00	-
	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	934.016.000,00		934.016.000,00	934.016.000,00	-
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00	92.007.687,00	413.682.313,00	413.682.313,00	-
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	269.040.000,00		269.040.000,00	269.040.000,00	-
6	Dana Desa	56.185.785.000,00	-	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-
	Dana Desa	56.185.785.000,00	-	56.185.785.000,00	56.185.785.000,00	-
7	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.171.872.992,00	-	1.171.872.992,00	1.171.872.992,00	-
	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH	14.909.992,00		14.909.992,00	14.909.992,00	-
	Pengeluaran Non Anggaran Pokok TDF-DBH	1.156.963.000,00		1.156.963.000,00	1.156.963.000,00	-
	Jumlah	759.674.815.723,00	8.941.081.511,00	750.733.734.212,00	750.733.734.212,00	-

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	KABUPATEN		DINAS PENDIDIKAN		DINAS KESEHATAN		RSUD dan BLUD Puskesmas	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	BELANJA OPERASI	792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	308.779.376.624,89	298.373.409.359,00	149.790.222.129,00	146.916.801.833,00	90.823.823.364,57	90.134.705.926,46
5.1.01	Belanja Pegawai	498.350.557.499,30	485.726.445.153,08	265.678.067.294,39	256.439.912.709,00	113.337.611.677,00	112.219.174.476,00	11.719.029.407,91	11.598.731.401,08
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.824.702.268,28	322.938.491.156,00	172.927.056.898,28	170.765.346.133,00	90.121.884.554,00	89.065.253.134,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	144.169.223.511,11	136.753.726.750,00	92.751.010.396,11	85.674.566.576,00	23.215.727.123,00	23.153.921.342,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.976.079.908,00	12.931.133.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.059.922.404,00	902.766.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.719.029.407,91	11.598.731.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719.029.407,91	11.598.731.401,08
								0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.362.764.298,21	258.738.701.220,10	34.517.444.330,50	33.428.846.507,00	36.452.610.452,00	34.697.627.357,00	79.104.793.956,66	78.535.974.525,38
5.1.02.01	Belanja Barang	32.856.198.148,55	30.511.440.996,00	3.633.689.654,50	3.391.482.208,00	6.019.955.250,00	5.947.458.220,00	571.567.933,00	571.295.863,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.598.791.316,55	29.277.714.860,00	2.462.627.654,50	2.235.529.200,00	5.989.955.250,00	5.917.458.220,00	571.567.933,00	571.295.863,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.257.406.832,00	1.233.726.136,00	1.171.062.000,00	1.155.953.008,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	106.398.673.240,00	89.631.294.314,72	5.953.589.025,00	5.503.315.685,00	26.829.333.527,00	25.359.694.002,00	859.880.650,00	828.448.909,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	54.706.676.534,00	51.093.066.534,00	4.243.533.325,00	4.101.626.085,00	2.793.665.627,00	2.769.906.052,00	859.880.650,00	828.448.909,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.038.572.400,00	24.296.889.520,00	215.265.600,00	11.583.000,00	23.338.119.600,00	21.914.005.650,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.484.549.106,00	1.300.470.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.163.109.200,00	918.515.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.330.550.000,00	3.726.718.473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	500.000.000,00	399.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	9.300.000.000,00	788.141.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.875.216.000,00	7.107.944.378,00	1.494.790.100,00	1.390.106.600,00	697.548.300,00	675.782.300,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.504.200.620,00	6.658.861.088,00	122.540.000,00	83.976.150,00	98.150.000,00	98.150.000,00	16.270.000,00	16.214.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	14.300.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.664.526.840,00	3.921.502.990,00	122.540.000,00	83.976.150,00	98.150.000,00	98.150.000,00	16.270.000,00	16.214.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.435.588.780,00	1.388.230.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.389.785.000,00	1.344.978.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.663.726.590,00	28.063.674.623,00	591.440.000,00	522.539.022,00	689.747.000,00	677.914.632,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.663.726.590,00	28.063.674.623,00	591.440.000,00	522.539.022,00	689.747.000,00	677.914.632,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	634.060.000,00	352.550.500,00	382.780.000,00	141.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	634.060.000,00	352.550.500,00	382.780.000,00	141.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	23.833.405.651,00	23.786.453.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	23.642.705.651,00	23.595.753.442,00	23.642.705.651,00	23.595.753.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	KABUPATEN		DINAS PENDIDIKAN		DINAS KESEHATAN		RSUD dan BLUD Puskesmas	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3		4		5		6	
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	160.700.000,00	160.700.000,00	160.700.000,00	160.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.255.825.880,00	12.967.920.285,00	0,00	0,00	2.815.424.675,00	2.614.410.503,00	10.440.401.205,00	10.353.509.782,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.255.825.880,00	12.967.920.285,00	0,00	0,00	2.815.424.675,00	2.614.410.503,00	10.440.401.205,00	10.353.509.782,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67.216.674.168,66	66.766.505.971,38
5.1.05	Belanja Hibah	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00	180.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	181.000.000,00	180.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.946.000.000,00	1.468.996.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.555.000.000,00	1.057.079.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.391.000.000,00	411.916.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	935.965.285,00	935.965.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	797.900.000,00	773.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		792.360.152.082,51	755.555.738.316,18	308.779.376.624,89	298.373.409.359,00	149.790.222.129,00	146.916.801.833,00	90.823.823.364,57	90.134.705.926,46

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7		8		9		10		11	
13.828.339.659,00	12.599.355.779,00	5.956.178.851,65	5.796.541.675,00	7.567.013.672,00	7.264.229.948,00	3.153.309.725,00	3.060.306.178,72	9.035.565.183,00	7.861.204.371,00
4.508.220.229,00	4.414.942.495,00	1.781.324.964,00	1.744.477.996,00	3.403.585.422,00	3.350.269.715,00	1.299.129.957,00	1.259.270.514,00	2.666.396.225,00	2.623.763.754,00
3.148.985.853,00	3.078.846.095,00	1.167.811.933,00	1.132.085.965,00	2.740.269.422,00	2.688.209.715,00	993.489.957,00	954.185.514,00	1.790.459.225,00	1.749.329.754,00
1.359.234.376,00	1.336.096.400,00	613.513.031,00	612.392.031,00	663.316.000,00	662.060.000,00	305.640.000,00	305.085.000,00	875.937.000,00	874.434.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.320.119.430,00	8.184.413.284,00	4.174.853.887,65	4.052.063.679,00	4.163.428.250,00	3.913.960.233,00	1.854.179.768,00	1.801.035.664,72	6.369.168.958,00	5.237.440.617,00
946.289.525,00	906.748.412,00	2.681.446.347,65	2.617.675.550,00	151.639.750,00	145.884.384,00	364.271.741,00	343.884.000,00	725.647.050,00	634.083.437,00
946.289.525,00	906.748.412,00	2.681.446.347,65	2.617.675.550,00	150.639.750,00	145.884.384,00	364.271.741,00	343.884.000,00	725.647.050,00	634.083.437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.018.648.905,00	5.264.269.421,00	1.001.934.920,00	946.988.748,00	3.786.660.500,00	3.555.246.599,00	1.200.807.827,00	1.174.987.364,72	4.896.108.908,00	3.917.222.110,00
2.840.465.505,00	2.457.493.711,00	644.542.120,00	591.458.998,00	3.748.525.700,00	3.522.621.137,00	691.326.227,00	671.801.950,00	3.071.729.908,00	2.741.496.660,00
24.413.400,00	19.720.800,00	5.167.800,00	3.489.750,00	38.134.800,00	32.625.462,00	6.771.600,00	4.930.200,00	14.783.000,00	9.756.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.079.000,00	50.079.000,00
2.600.000.000,00	2.345.316.910,00	352.225.000,00	352.040.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00	417.605.214,72	0,00	0,00
500.000.000,00	399.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.770.000,00	42.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.710.000,00	80.650.000,00	1.754.267.000,00	1.110.640.000,00
1.944.775.000,00	1.617.632.564,00	259.661.620,00	259.392.468,00	182.940.000,00	170.721.250,00	190.894.100,00	185.092.100,00	193.380.000,00	180.015.729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625.190.000,00	342.854.494,00	59.660.000,00	59.492.468,00	182.940.000,00	170.721.250,00	90.894.100,00	85.790.800,00	193.380.000,00	180.015.729,00
0,00	0,00	200.001.620,00	199.900.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	99.301.300,00	0,00	0,00
1.319.585.000,00	1.274.778.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.406.000,00	395.762.887,00	231.811.000,00	228.006.913,00	42.188.000,00	42.108.000,00	98.206.100,00	97.072.200,00	543.433.000,00	495.519.341,00
410.406.000,00	395.762.887,00	231.811.000,00	228.006.913,00	42.188.000,00	42.108.000,00	98.206.100,00	97.072.200,00	543.433.000,00	495.519.341,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dinas Pangan dan Perikanan		Dinas Lingkungan Hidup		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Dinas Perhubungan	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
12		13		14		15		16	
4.742.666.221,00	4.566.039.441,00	5.772.139.251,00	5.434.835.264,00	3.351.914.299,00	3.239.981.017,00	4.279.356.312,00	4.108.005.307,00	22.992.772.370,00	13.919.871.597,00
2.420.601.281,00	2.387.612.804,00	2.364.760.104,00	2.315.774.322,00	2.376.829.037,00	2.294.239.787,00	2.382.720.362,00	2.336.804.379,00	3.122.507.880,00	3.061.746.680,00
1.623.998.281,00	1.592.031.804,00	1.603.846.104,00	1.563.341.322,00	1.756.767.517,00	1.675.235.267,00	1.583.833.447,00	1.542.105.464,00	2.081.723.658,00	2.022.934.330,00
796.603.000,00	795.581.000,00	760.914.000,00	752.433.000,00	620.061.520,00	619.004.520,00	798.886.915,00	794.698.915,00	1.040.784.222,00	1.038.812.350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.322.064.940,00	2.178.426.637,00	3.407.379.147,00	3.119.060.942,00	975.085.262,00	945.741.230,00	1.896.635.950,00	1.771.200.928,00	19.870.264.490,00	10.858.124.917,00
1.344.995.100,00	1.259.814.158,00	692.656.175,00	687.651.418,00	325.426.062,00	324.592.207,00	685.323.850,00	588.732.087,00	171.232.750,00	140.025.322,00
1.340.295.100,00	1.255.404.158,00	687.796.175,00	682.791.418,00	319.704.230,00	319.481.767,00	684.823.850,00	588.232.087,00	169.607.750,00	138.660.022,00
4.700.000,00	4.410.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	5.721.832,00	5.110.440,00	500.000,00	500.000,00	1.625.000,00	1.365.300,00
708.422.840,00	651.347.524,00	2.325.350.562,00	2.047.200.300,00	411.448.920,00	383.501.342,00	606.011.100,00	592.729.163,00	19.247.832.740,00	10.310.747.594,00
690.091.040,00	636.251.924,00	2.009.427.162,00	1.961.531.400,00	383.949.920,00	360.496.792,00	306.071.250,00	293.185.763,00	9.919.498.940,00	9.500.924.733,00
8.731.800,00	5.583.600,00	14.612.400,00	13.572.900,00	3.564.000,00	3.014.550,00	2.044.350,00	1.989.900,00	28.333.800,00	21.681.000,00
0,00	0,00	15.000.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	6.043.500,00	6.043.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00
9.600.000,00	9.512.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000.000,00	788.141.861,00
0,00	0,00	61.311.000,00	61.296.000,00	23.935.000,00	19.990.000,00	257.352.000,00	257.010.000,00	0,00	0,00
65.550.000,00	65.535.000,00	243.570.410,00	239.682.360,00	109.877.330,00	109.740.781,00	155.754.000,00	155.580.258,00	285.160.000,00	250.167.577,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.550.000,00	65.535.000,00	237.570.410,00	233.682.360,00	109.877.330,00	109.740.781,00	105.990.000,00	105.840.258,00	185.160.000,00	150.467.577,00
0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	49.764.000,00	49.740.000,00	100.000.000,00	99.700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.097.000,00	201.729.955,00	138.302.000,00	137.026.864,00	128.332.950,00	127.906.900,00	441.647.000,00	426.259.420,00	166.039.000,00	157.184.424,00
203.097.000,00	201.729.955,00	138.302.000,00	137.026.864,00	128.332.950,00	127.906.900,00	441.647.000,00	426.259.420,00	166.039.000,00	157.184.424,00
0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dinas Komunikasi dan Informatika		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
17		18		19		20		21	
4.903.396.892,40	4.781.399.182,00	3.838.257.189,00	3.535.759.687,00	2.823.141.038,00	2.770.126.819,00	9.556.878.955,00	8.134.832.619,00	3.362.490.580,00	3.269.077.280,00
2.036.501.056,00	1.988.757.630,00	2.246.352.329,00	2.196.435.255,00	1.958.223.258,00	1.917.218.463,00	1.952.572.795,00	1.898.525.731,00	2.584.548.135,00	2.547.899.732,00
1.403.196.086,00	1.358.588.660,00	1.543.714.809,00	1.502.073.711,00	1.283.536.963,00	1.243.697.034,00	1.395.698.559,00	1.344.418.643,00	1.911.251.149,00	1.877.582.352,00
633.304.970,00	630.168.970,00	702.637.520,00	694.361.544,00	674.686.295,00	673.521.429,00	556.874.236,00	554.107.088,00	673.296.986,00	670.317.380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.866.895.836,40	2.792.641.552,00	1.591.904.860,00	1.339.324.432,00	864.917.780,00	852.908.356,00	6.600.306.160,00	5.841.389.988,00	777.942.445,00	721.177.548,00
289.964.396,40	279.629.650,00	194.152.300,00	155.009.751,00	152.170.950,00	151.975.950,00	2.538.863.164,00	2.251.821.730,00	94.855.050,00	92.131.280,00
286.464.396,40	276.129.650,00	190.032.300,00	151.209.751,00	150.670.950,00	150.475.950,00	2.536.533.164,00	2.251.201.730,00	94.855.050,00	92.131.280,00
3.500.000,00	3.500.000,00	4.120.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.330.000,00	620.000,00	0,00	0,00
2.143.639.080,00	2.099.114.700,00	1.075.264.560,00	879.539.357,00	475.323.830,00	463.931.440,00	3.355.572.996,00	2.949.064.968,00	451.813.395,00	414.243.356,00
2.134.184.080,00	2.092.907.100,00	869.930.060,00	832.139.607,00	466.378.230,00	456.041.341,00	2.032.840.390,00	1.882.525.340,00	429.198.845,00	392.247.606,00
4.455.000,00	3.207.600,00	7.128.000,00	6.459.750,00	4.989.600,00	3.950.099,00	7.128.000,00	5.895.450,00	2.747.250,00	2.628.450,00
5.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	478.133.306,00	410.487.702,00	16.617.300,00	16.617.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.030.200,00	473.830.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	79.599.876,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180.206.500,00	23.440.000,00	3.956.000,00	3.940.000,00	110.441.100,00	96.726.000,00	3.250.000,00	2.750.000,00
196.170.660,00	181.383.500,00	87.990.000,00	84.831.800,00	85.660.000,00	85.436.869,00	71.850.000,00	61.243.750,00	123.220.000,00	110.362.512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
67.147.500,00	52.433.500,00	87.990.000,00	84.831.800,00	85.660.000,00	85.436.869,00	57.550.000,00	57.093.750,00	112.100.000,00	99.314.512,00
58.823.160,00	58.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120.000,00	11.048.000,00
70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237.121.700,00	232.513.702,00	234.498.000,00	219.943.524,00	151.763.000,00	151.564.097,00	532.240.000,00	517.289.040,00	94.454.000,00	90.840.400,00
237.121.700,00	232.513.702,00	234.498.000,00	219.943.524,00	151.763.000,00	151.564.097,00	532.240.000,00	517.289.040,00	94.454.000,00	90.840.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780.000,00	61.970.500,00	13.600.000,00	13.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.780.000,00	61.970.500,00	13.600.000,00	13.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinas Komunikasi dan Informatika		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
17		18		19		20		21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000.000,00	394.916.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000.000,00	394.916.900,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.903.396.892,40	4.781.399.182,00	3.838.257.189,00	3.535.759.687,00	2.823.141.038,00	2.770.126.819,00	9.556.878.955,00	8.134.832.619,00	3.362.490.580,00	3.269.077.280,00

Dinas Pertanian		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Sekretariat Daerah		Sekretariat DPRD		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
22		23		24		25		26	
15.875.034.064,00	14.782.699.542,00	4.804.163.141,00	4.702.762.234,00	29.834.391.247,00	25.939.989.688,00	37.146.290.546,00	36.407.923.739,00	4.304.109.691,00	4.172.317.356,00
10.769.337.569,00	10.665.821.698,00	3.464.944.441,00	3.394.283.744,00	8.053.595.447,00	7.891.983.510,00	15.424.048.866,00	15.334.150.799,00	2.636.886.116,00	2.571.022.128,00
7.991.014.769,00	7.892.500.898,00	2.585.567.171,00	2.514.975.522,00	5.048.041.865,00	4.966.155.255,00	1.572.542.138,00	1.537.838.747,00	1.846.956.780,00	1.783.675.792,00
2.778.322.800,00	2.773.320.800,00	879.377.270,00	879.308.222,00	2.348.616.582,00	2.348.497.708,00	673.826.820,00	663.578.820,00	789.929.336,00	787.346.336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976.079.908,00	12.931.133.232,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	256.937.000,00	177.334.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	399.996.000,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.800.696.495,00	3.831.877.844,00	1.339.218.700,00	1.308.478.490,00	19.143.795.800,00	17.258.926.563,00	21.722.241.680,00	21.073.772.940,00	1.667.223.575,00	1.601.295.228,00
1.903.512.050,00	1.526.254.210,00	243.322.550,00	241.127.670,00	4.621.128.000,00	4.085.563.944,00	1.836.914.300,00	1.733.244.657,00	365.656.300,00	353.916.500,00
1.903.512.050,00	1.526.254.210,00	241.530.550,00	239.351.670,00	4.612.122.000,00	4.077.728.444,00	1.833.844.300,00	1.731.294.657,00	364.686.300,00	352.946.500,00
0,00	0,00	1.792.000,00	1.776.000,00	9.006.000,00	7.835.500,00	3.070.000,00	1.950.000,00	970.000,00	970.000,00
2.229.170.445,00	1.733.712.754,00	902.131.150,00	875.849.100,00	8.512.651.800,00	7.450.848.038,00	4.580.027.540,00	4.136.432.238,00	717.219.275,00	665.966.294,00
1.690.163.845,00	1.632.130.454,00	446.924.950,00	424.396.650,00	5.340.356.400,00	4.651.770.026,00	2.793.209.540,00	2.487.318.166,00	684.056.075,00	633.775.644,00
15.325.200,00	13.632.300,00	354.634.200,00	353.930.400,00	296.680.400,00	260.865.738,00	251.583.000,00	229.989.927,00	2.316.600,00	2.093.850,00
2.150.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	362.400.000,00	294.460.101,00	516.205.000,00	483.011.499,00	1.250.000,00	1.250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	551.500.000,00	360.105.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	448.932.827,00	73.725.000,00	73.711.646,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.531.400,00	85.850.000,00	100.572.000,00	97.522.050,00	1.511.715.000,00	1.434.713.500,00	945.305.000,00	862.401.000,00	29.596.600,00	28.846.800,00
327.380.000,00	251.110.000,00	41.880.000,00	40.257.000,00	1.490.883.000,00	1.334.176.504,00	411.680.000,00	395.949.000,00	61.340.000,00	59.902.704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.380.000,00	251.110.000,00	41.880.000,00	40.257.000,00	835.009.000,00	686.476.746,00	386.680.000,00	370.949.000,00	61.340.000,00	59.902.704,00
28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	655.874.000,00	647.699.758,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333.134.000,00	313.300.880,00	151.885.000,00	151.244.720,00	4.419.133.000,00	4.288.338.077,00	14.893.619.840,00	14.808.147.045,00	520.608.000,00	519.109.730,00
333.134.000,00	313.300.880,00	151.885.000,00	151.244.720,00	4.419.133.000,00	4.288.338.077,00	14.893.619.840,00	14.808.147.045,00	520.608.000,00	519.109.730,00
7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dinas Pertanian		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Sekretariat Daerah		Sekretariat DPRD		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
22		23		24		25		26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	2.637.000.000,00	789.079.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	2.637.000.000,00	789.079.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	772.079.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.875.034.064,00	14.782.699.542,00	4.804.163.141,00	4.702.762.234,00	29.834.391.247,00	25.939.989.688,00	37.146.290.546,00	36.407.923.739,00	4.304.109.691,00	4.172.317.356,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kecamatan Asam Jujuhan		Kecamatan Koto Besar		Kecamatan Padang Laweh		Kecamatan Tiumang		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
37		38		39		40		41	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.965.285,00	1.116.945.285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00	180.980.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00	180.980.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.965.285,00	935.965.285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.965.285,00	935.965.285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.179.195.026,00	1.121.488.984,00	1.844.464.792,00	1.796.343.963,00	1.161.290.702,00	1.118.301.214,00	1.441.693.694,00	1.401.405.143,00	3.862.758.603,00	3.714.863.886,00

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOSP TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

LAMPIRAN 4a

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SiIPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	BOS REGULER			BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
										TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER		
1	SDN 01 KOTO BARU	10303267	1400.0101.00198-3	457	0	411.300.000	22.500.000	433.800.000	0	205.650.000	205.650.000	411.300.000	22.500.000	433.800.000
2	SDN 02 KOTO BARU	10303201	1400.0101.00199-4	244	0	219.600.000		219.600.000	0	109.800.000	109.800.000	219.600.000	0	219.600.000
3	SDN 03 KOTO BARU	10303176	1400.0101.00197-2	128	0	115.200.000		115.200.000	0	57.600.000	57.600.000	115.200.000	0	115.200.000
4	SDN 04 KOTO BARU	10303246	1400.0101.00200-5	105	0	94.500.000		94.500.000	0	47.250.000	47.250.000	94.500.000	0	94.500.000
5	SDN 05 KOTO BARU	10303329	1400.0101.00201-6	116	0	104.400.000		104.400.000	0	52.200.000	52.200.000	104.400.000	0	104.400.000
6	SDN 06 KOTO BARU	10303259	1400.0101.00202-0	198	0	178.200.000	0	178.200.000	0	89.100.000	89.100.000	178.200.000	0	178.200.000
7	SDN 07 KOTO BARU	10303343	1400.0101.00203-1	227	0	204.300.000		204.300.000	0	102.150.000	102.150.000	204.300.000	0	204.300.000
8	SDN 08 KOTO BARU	10303280	1400.0101.00204-2	107	0	96.300.000		96.300.000	0	48.150.000	48.150.000	96.300.000	0	96.300.000
9	SDN 09 KOTO BARU	10303241	1400.0101.00205-3	107	0	96.300.000		96.300.000	0	48.150.000	48.150.000	96.300.000	0	96.300.000
10	SDN 10 KOTO BARU	10303191	1400.0101.00206-4	100	0	90.000.000		90.000.000	0	45.000.000	45.000.000	90.000.000	0	90.000.000
11	SDN 11 KOTO BARU	10303189	1400.0101.00207-5	200	0	180.000.000		180.000.000	0	90.000.000	90.000.000	180.000.000	0	180.000.000
12	SDN 12 KOTO BARU	10303194	1400.0101.00208-6	114	0	102.600.000		102.600.000	0	51.300.000	51.300.000	102.600.000	0	102.600.000
13	SDN 13 KOTO BARU	10303204	1400.0101.00209-0	350	0	315.000.000		315.517.786	517.786	157.500.000	157.500.000	315.000.000	0	315.517.786
14	SDN 14 KOTO BARU	10303173	1400.0101.00210-1	200	0	180.000.000		180.000.000	0	90.000.000	90.000.000	180.000.000	0	180.000.000
15	SDN 15 KOTO BARU	10303277	1400.0101.00294-1	80	0	72.000.000		72.000.000	0	36.000.000	36.000.000	72.000.000	0	72.000.000
16	SDN 16 KOTO BARU	10303183	1400.0101.00295-2	317	23.370	285.300.000		285.300.000	23.370	142.650.000	142.626.630	285.276.630	0	285.300.000
17	SDN 01 PULAU PUNJUNG	10303265	1403.0101.00350-5	199	0	179.100.000	22.500.000	201.600.000	0	89.550.000	89.550.000	179.100.000	22.500.000	201.600.000
18	SDN 02 PULAU PUNJUNG	10303237	1403.0101.00349-4	51	0	45.900.000		45.900.000	0	22.950.000	22.950.000	45.900.000	0	45.900.000
19	SDN 03 PULAU PUNJUNG	10303315	1403.0101.00348-3	247	0	222.300.000	22.500.000	244.800.000	0	111.150.000	111.150.000	222.300.000	22.500.000	244.800.000
20	SDN 04 PULAU PUNJUNG	10303186	1403.0101.00347-2	232	0	208.800.000	22.500.000	231.300.000	0	104.400.000	104.400.000	208.800.000	22.500.000	231.300.000
21	SDN 05 PULAU PUNJUNG	10303255	1403.0101.00371-5	130	686	117.000.000	22.500.000	139.500.000	686	58.500.000	58.499.314	116.999.314	22.500.000	139.500.000
22	SDN 06 PULAU PUNJUNG	10303233	1403.0101.00372-6	348	0	313.200.000		313.200.000	0	156.600.000	156.600.000	313.200.000	0	313.200.000
23	SDN 07 PULAU PUNJUNG	10303260	1403.0101.00370-4	128	0	115.200.000		115.200.000	0	57.600.000	57.600.000	115.200.000	0	115.200.000
24	SDN 08 PULAU PUNJUNG	10303273	1403.0101.00369-3	577	0	519.300.000		519.300.000	0	259.650.000	259.650.000	519.300.000	0	519.300.000
25	SDN 09 PULAU PUNJUNG	10303350	1403.0101.00367-1	306	0	275.400.000		275.400.028	28	137.700.000	137.700.000	275.400.000	0	275.400.028
26	SDN 10 PULAU PUNJUNG	10303341	1403.0101.00368-2	176	0	158.400.000	22.500.000	180.900.000	0	79.200.000	79.200.000	158.400.000	22.500.000	180.900.000
27	SDN 11 PULAU PUNJUNG	10303347	1403.0101.00366-0	170	0	153.000.000		153.000.000	0	76.500.000	76.500.000	153.000.000	0	153.000.000
28	SDN 12 PULAU PUNJUNG	10303276	1403.0101.00365-6	24	0	21.600.000		21.600.000	0	10.800.000	10.800.000	21.600.000	0	21.600.000
29	SDN 13 PULAU PUNJUNG	10303362	1403.0101.00364-5	107	0	96.300.000	50.750.000	147.050.000	0	48.150.000	48.150.000	96.300.000	50.750.000	147.050.000
30	SDN 14 PULAU PUNJUNG	10303353	1403.0101.00363-4	154	0	138.600.000		138.600.033	33	69.300.000	69.300.000	138.600.000	0	138.600.033
31	SDN 15 PULAU PUNJUNG	10303313	1403.0101.00362-3	84	0	75.600.000	22.500.000	98.100.000	0	37.800.000	37.800.000	75.600.000	22.500.000	98.100.000
32	SDN 16 PULAU PUNJUNG	10303318	1403.0101.00361-2	193	0	173.700.000		173.700.000	0	86.850.000	86.850.000	173.700.000	0	173.700.000
33	SDN 17 PULAU PUNJUNG	10303319	1403.0101.00360-1	93	0	83.700.000	22.500.000	106.200.000	0	41.850.000	41.850.000	83.700.000	22.500.000	106.200.000
34	SDN 18 PULAU PUNJUNG	10303188	1403.0101.00359-0	70	0	63.000.000		63.000.000	0	31.500.000	31.500.000	63.000.000	0	63.000.000
35	SDN 19 PULAU PUNJUNG	10303195	1403.0101.00358-6	339	0	305.100.000		305.100.000	0	152.550.000	152.550.000	305.100.000	0	305.100.000

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SIIPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER	BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
36	SDN 20 PULAU PUNJUNG	10303167	1403.0101.00357-5	76	0	68.400.000		68.400.000	0	34.200.000	34.200.000	68.400.000	0	68.400.000
37	SDN 21 PULAU PUNJUNG	10303205	1403.0101.00356-4	324	0	291.600.000		291.600.000	0	145.800.000	145.800.000	291.600.000	0	291.600.000
38	SDN 22 PULAU PUNJUNG	10303184	1403.0101.00374-1	160	0	144.000.000		144.000.000	0	72.000.000	72.000.000	144.000.000	0	144.000.000
39	SDN 23 PULAU PUNJUNG	10307903	1403.0101.00355-3	31	28.800	27.900.000		27.906.820	35.620	13.950.000	13.921.200	27.871.200	0	27.906.820
40	SDN 24 PULAU PUNJUNG	69873592	1403.0101.00354-2	140	0	126.000.000		126.000.000	0	63.000.000	63.000.000	126.000.000	0	126.000.000
41	SDN 25 PULAU PUNJUNG	69980341	1403.0101.00325-1	100	0	90.000.000		90.000.000	0	45.000.000	45.000.000	90.000.000	0	90.000.000
42	SDN 01 SUNGAI RUMBAI	10303245	1400.0101.00329-1	179	0	161.100.000		161.100.000	0	80.550.000	80.550.000	161.100.000	0	161.100.000
43	SDN 02 SUNGAI RUMBAI	10303247	1400.0101.00330-2	248	6.697	223.200.000		223.200.000	6.697	111.600.000	111.593.303	223.193.303	0	223.200.000
44	SDN 03 SUNGAI RUMBAI	10303253	1400.0101.00331-3	221	0	198.900.000		198.900.000	0	99.450.000	99.450.000	198.900.000	0	198.900.000
45	SDN 04 SUNGAI RUMBAI	10303262	1400.0101.00332-4	194	0	174.600.000		174.600.000	0	87.300.000	87.300.000	174.600.000	0	174.600.000
46	SDN 05 SUNGAI RUMBAI	10303349	1400.0101.00333-5	452	0	406.800.000		406.800.000	0	203.400.000	203.400.000	406.800.000	0	406.800.000
47	SDN 06 SUNGAI RUMBAI	10303307	1400.0101.00334-6	125	0	112.500.000	22.500.000	135.000.000	0	56.250.000	56.250.000	112.500.000	22.500.000	135.000.000
48	SDN 07 SUNGAI RUMBAI	10303323	1400.0101.00335-0	164	3.303	147.600.000	22.500.000	170.100.000	3.303	73.800.000	73.796.697	147.596.697	22.500.000	170.100.000
49	SDN 08 SUNGAI RUMBAI	10303202	1400.0101.00336-1	374	0	336.600.000		336.600.000	0	168.300.000	168.300.000	336.600.000	0	336.600.000
50	SDN 09 SUNGAI RUMBAI	10303171	1400.0101.00337-2	307	0	276.300.000	22.500.000	298.800.000	0	138.150.000	138.150.000	276.300.000	22.500.000	298.800.000
51	SDN 10 SUNGAI RUMBAI	69945879	1400.0101.00338-3	73	0	65.700.000		65.700.000	0	32.850.000	32.850.000	65.700.000	0	65.700.000
52	SDN 11 SUNGAI RUMBAI	70001922	1400.0101.00427-1	152	0	136.800.000		136.800.000	0	68.400.000	68.400.000	136.800.000	0	136.800.000
53	SDN 01 SITIUNG	10303264	1405.0101.00004-0	99	0	89.100.000		89.100.000	0	44.550.000	44.550.000	89.100.000	0	89.100.000
54	SDN 02 SITIUNG	10303328	1405.0101.00005-1	113	0	101.700.000	22.500.000	124.200.000	0	50.850.000	50.850.000	101.700.000	22.500.000	124.200.000
55	SDN 03 SITIUNG	10303175	1405.0101.00006-2	110	0	99.000.000		99.007.421	7.421.00	49.500.000	49.500.000	99.000.000	0	99.007.421
56	SDN 04 SITIUNG	10303200	1405.0101.00007-3	273	0	245.700.000		245.700.000	0	122.850.000	122.850.000	245.700.000	0	245.700.000
57	SDN 05 SITIUNG	10303236	1405.0101.00008-4	88	0	79.200.000		79.200.000	0	39.600.000	39.600.000	79.200.000	0	79.200.000
58	SDN 06 SITIUNG	10303256	1405.0101.00009-5	151	0	135.900.000		135.900.000	0	67.950.000	67.950.000	135.900.000	0	135.900.000
59	SDN 07 SITIUNG	10303250	1405.0101.00010-6	71	0	63.900.000		63.900.000	0	31.950.000	31.950.000	63.900.000	0	63.900.000
60	SDN 08 SITIUNG	10303249	1405.0101.00011-0	103	0	92.700.000		92.700.000	0	46.350.000	46.350.000	92.700.000	0	92.700.000
61	SDN 09 SITIUNG	10303239	1405.0101.00012-1	49	0	44.100.000		44.100.000	0	22.050.000	22.050.000	44.100.000	0	44.100.000
62	SDN 10 SITIUNG	10303271	1405.0101.00013-2	100	0	90.000.000	36.250.000	126.250.000	0	45.000.000	45.000.000	90.000.000	36.250.000	126.250.000
63	SDN 11 SITIUNG	10303279	1405.0101.00014-3	85	0	76.500.000		76.500.000	0	38.250.000	38.250.000	76.500.000	0	76.500.000
64	SDN 12 SITIUNG	10303261	1405.0101.00015-4	66	0	59.400.000		59.400.000	0	29.700.000	29.700.000	59.400.000	0	59.400.000
65	SDN 13 SITIUNG	10303305	1405.0101.00016-5	198	0	178.200.000	22.500.000	200.700.000	0	89.100.000	89.100.000	178.200.000	22.500.000	200.700.000
66	SDN 14 SITIUNG	10303344	1405.0101.00017-6	188	0	169.200.000		169.200.000	0	84.600.000	84.600.000	169.200.000	0	169.200.000
67	SDN 15 SITIUNG	10303340	1405.0101.00018-0	193	0	173.700.000		173.700.000	0	86.850.000	86.850.000	173.700.000	0	173.700.000
68	SDN 16 SITIUNG	10303352	1405.0101.00019-1	72	0	64.800.000		64.800.000	0	32.400.000	32.400.000	64.800.000	0	64.800.000
69	SDN 17 SITIUNG	10303354	1405.0101.00020-2	87	0	78.300.000		78.300.000	0	39.150.000	39.150.000	78.300.000	0	78.300.000
70	SDN 18 SITIUNG	10303312	1405.0101.00021-3	193	0	173.700.000		173.700.000	0	86.850.000	86.850.000	173.700.000	0	173.700.000
71	SDN 19 SITIUNG	10303258	1405.0101.00022-4	143	0	128.700.000		128.700.000	0	64.350.000	64.350.000	128.700.000	0	128.700.000
72	SDN 20 SITIUNG	10303325	1405.0101.00023-5	299	0	269.100.000	36.250.000	305.350.000	0	134.550.000	134.550.000	269.100.000	36.250.000	305.350.000
73	SDN 01 IX KOTO	10303252	1403.0101.00342-4	92,34	15.000	83.106.000		83.106.000	15.000	41.553.000	41.538.000	83.091.000	0	83.106.000
74	SDN 02 IX KOTO	10303178	1403.0101.00341-3	68,4	0	61.560.000		61.561.900	1.900,00	30.780.000	30.780.000	61.560.000	0	61.561.900
75	SDN 03 IX KOTO	10303240	1403.0101.00340-2	58	0	52.200.000	22.500.000	74.764.898	64.898	26.100.000	26.100.000	52.200.000	22.500.000	74.764.898
76	SDN 04 IX KOTO	10303269	1403.0101.00339-1	124	0	111.600.000		111.600.000	0	55.800.000	55.800.000	111.600.000	0	111.600.000

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SilPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER	BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
77	SDN 05 IX KOTO	10303164	1403.0101.00338-0	87	0	78.300.000		78.300.000	0	39.150.000	39.150.000	78.300.000	0	78.300.000
78	SDN 06 IX KOTO	10303357	1403.0101.00337-6	91	0	81.900.000		81.900.000	0	40.950.000	40.950.000	81.900.000	0	81.900.000
79	SDN 07 IX KOTO	10303309	1403.0101.00336-5	68,4	0	61.560.000	22.500.000	84.060.000	0	30.780.000	30.780.000	61.560.000	22.500.000	84.060.000
80	SDN 08 IX KOTO	10303322	1403.0101.00335-4	120,84	0	108.756.000		108.756.000	0	54.378.000	54.378.000	108.756.000	0	108.756.000
81	SDN 09 IX KOTO	10303193	1403.0101.00334-3	76	0	68.400.000		68.400.000	0	34.200.000	34.200.000	68.400.000	0	68.400.000
82	SDN 10 IX KOTO	10303198	1403.0101.00333-2	68,4	0	61.560.000		61.560.000	0	30.780.000	30.780.000	61.560.000	0	61.560.000
83	SDN 11 IX KOTO	10303166	1403.0101.00332-1	72	0	64.800.000		64.800.000	0	32.400.000	32.400.000	64.800.000	0	64.800.000
84	SDN 12 IX KOTO	10303174	1403.0101.00331-0	68,4	0	61.560.000		61.560.000	0	30.780.000	30.780.000	61.560.000	0	61.560.000
85	SDN 13 IX KOTO	10303185	1403.0101.00326-2	109	0	98.100.000		98.100.000	0	49.050.000	49.050.000	98.100.000	0	98.100.000
86	SDN 14 IX KOTO	69758238	1403.0101.00330-6	68,4	0	61.560.000		61.560.000	0	30.780.000	30.780.000	61.560.000	0	61.560.000
87	SDN 15 IX KOTO	69980149	1403.0101.00373-0	68,4	0	61.560.000		61.560.000	0	30.780.000	30.780.000	61.560.000	0	61.560.000
88	SDN 01 TIMPEH	10303274	1405.0101.00055-2	268	0	241.200.000		241.200.000	0	120.600.000	120.600.000	241.200.000	0	241.200.000
89	SDN 02 TIMPEH	10303316	1405.0101.00026-1	255	0	229.500.000		229.500.000	0	114.750.000	114.750.000	229.500.000	0	229.500.000
90	SDN 03 TIMPEH	10303358	1405.0101.00025-0	156	0	140.400.000		140.400.000	0	70.200.000	70.200.000	140.400.000	0	140.400.000
91	SDN 04 TIMPEH	10303190	1405.0101.00027-2	122	0	109.800.000		109.956.831	156.831	54.900.000	54.900.000	109.800.000	0	109.956.831
92	SDN 05 TIMPEH	10303317	1400.0101.00372-2	124	0	111.600.000		111.600.000	0	55.800.000	55.800.000	111.600.000	0	111.600.000
93	SDN 06 TIMPEH	10303320	1405.0101.00029-4	206	0	185.400.000		185.400.000	0	92.700.000	92.700.000	185.400.000	0	185.400.000
94	SDN 07 TIMPEH	10303169	1405.0101.00030-5	166	0	149.400.000		149.400.000	0	74.700.000	74.700.000	149.400.000	0	149.400.000
95	SDN 08 TIMPEH	10303203	1405.0101.00031-6	140	0	126.000.000		126.000.000	0	63.000.000	63.000.000	126.000.000	0	126.000.000
96	SDN 09 TIMPEH	10303197	1405.0101.00032-0	128	0	115.200.000	22.500.000	137.700.000	0	57.600.000	57.600.000	115.200.000	22.500.000	137.700.000
97	SDN 10 TIMPEH	10303196	1405.0101.00033-1	76	0	68.400.000		68.400.000	0	34.200.000	34.200.000	68.400.000	0	68.400.000
98	SDN 11 TIMPEH	10303170	1405.0101.00034-2	104	0	93.600.000		93.600.000	0	46.800.000	46.800.000	93.600.000	0	93.600.000
99	SDN 01 KOTO SALAK	10303235	1400.0101.00300-0	129	0	116.100.000	22.500.000	138.600.000	0	58.050.000	58.050.000	116.100.000	22.500.000	138.600.000
100	SDN 02 KOTO SALAK	10303348	1400.0101.00301-1	329	0	296.100.000	22.500.000	318.600.000	0	148.050.000	148.050.000	296.100.000	22.500.000	318.600.000
101	SDN 03 KOTO SALAK	10303359	1400.0101.00302-2	159	0	143.100.000		143.100.000	0	71.550.000	71.550.000	143.100.000	0	143.100.000
102	SDN 04 KOTO SALAK	10303311	1400.0101.00303-3	84	0	75.600.000		75.600.000	0	37.800.000	37.800.000	75.600.000	0	75.600.000
103	SDN 05 KOTO SALAK	10303308	1400.0101.00304-4	166	0	149.400.000	22.500.000	171.900.000	0	74.700.000	74.700.000	149.400.000	22.500.000	171.900.000
104	SDN 06 KOTO SALAK	10303327	1400.0101.00305-5	75	0	67.500.000		67.500.000	0	33.750.000	33.750.000	67.500.000	0	67.500.000
105	SDN 07 KOTO SALAK	10303180	1400.0101.00306-6	115	0	103.500.000		103.500.000	0	51.750.000	51.750.000	103.500.000	0	103.500.000
106	SDN 08 KOTO SALAK	10303324	1400.0101.00307-0	131	0	117.900.000	22.500.000	140.400.000	0	58.950.000	58.950.000	117.900.000	22.500.000	140.400.000
107	SDN 09 KOTO SALAK	10303172	1400.0101.00308-1	67	0	60.300.000		60.300.000	0	30.150.000	30.150.000	60.300.000	0	60.300.000
108	SDN 10 KOTO SALAK	10303263	1400.0101.00309-2	61	0	54.900.000	22.500.000	77.400.000	0	27.450.000	27.450.000	54.900.000	22.500.000	77.400.000
109	SDN 11 KOTO SALAK	10303168	1400.0101.00310-3	82	0	73.800.000		73.800.000	0	36.900.000	36.900.000	73.800.000	0	73.800.000
110	SDN 12 KOTO SALAK	10303179	1400.0101.00311-4	37	0	33.300.000		33.300.000	0	16.650.000	16.650.000	33.300.000	0	33.300.000
111	SDN 01 TIUMANG	10303272	1400.0101.00315-1	148	0	133.200.000		133.200.000	0	66.600.000	66.600.000	133.200.000	0	133.200.000
112	SDN 02 TIUMANG	10303361	1400.0101.00316-2	114	0	102.600.000	72.500.000	175.100.000	0	51.300.000	51.300.000	102.600.000	72.500.000	175.100.000
113	SDN 03 TIUMANG	10303306	1400.0101.00319-5	233	0	209.700.000		209.700.000	0	104.850.000	104.850.000	209.700.000	0	209.700.000
114	SDN 04 TIUMANG	10303206	1400.0101.00320-6	75	0	67.500.000	22.500.000	90.000.000	0	33.750.000	33.750.000	67.500.000	22.500.000	90.000.000
115	SDN 05 TIUMANG	10303165	1400.0101.00321-0	50	0	45.000.000		45.000.000	0	22.500.000	22.500.000	45.000.000	0	45.000.000
116	SDN 06 TIUMANG	10303182	1400.0101.00322-1	61	0	54.900.000		54.900.000	0	27.450.000	27.450.000	54.900.000	0	54.900.000
117	SDN 07 TIUMANG	10303163	1400.0101.00323-2	115	0	103.500.000		103.500.000	0	51.750.000	51.750.000	103.500.000	0	103.500.000

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SIIPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	BOS REGULER			BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
										TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER		
118	SDN 08 TIUMANG	10303254	1400.0101.00325-4	46	0	41.400.000	22.500.000	63.900.000	0	20.700.000	20.700.000	41.400.000	22.500.000	63.900.000
119	SDN 09 TIUMANG	10303209	1400.0101.00327-6	127	0	114.300.000		114.300.000	0	57.150.000	57.150.000	114.300.000	0	114.300.000
120	SDN 10 TIUMANG	10303244	1400.0101.00375-5	140	0	126.000.000		126.000.000	0	63.000.000	63.000.000	126.000.000	0	126.000.000
121	SDN 11 TIUMANG	10303257	1400.0101.00389-5	73	0	65.700.000		65.700.000	0	32.850.000	32.850.000	65.700.000	0	65.700.000
122	SDN 12 TIUMANG	10303243	1400.0101.00391-0	81	0	72.900.000		72.900.000	0	36.450.000	36.450.000	72.900.000	0	72.900.000
123	SDN 01 PADANG LAWEH	10303355	1405.0101.00035-3	101	0	90.900.000		90.900.000	0	45.450.000	45.450.000	90.900.000	0	90.900.000
124	SDN 02 PADANG LAWEH	10303251	1405.0101.00036-4	93	0	83.700.000		83.700.000	0	41.850.000	41.850.000	83.700.000	0	83.700.000
125	SDN 03 PADANG LAWEH	10303181	1405.0101.00037-5	48	0	43.200.000		43.200.000	0	21.600.000	21.600.000	43.200.000	0	43.200.000
126	SDN 04 PADANG LAWEH	10303242	1400.0101.00401-3	339	0	305.100.000	22.500.000	327.600.000	0	152.550.000	152.550.000	305.100.000	22.500.000	327.600.000
127	SDN 05 PADANG LAWEH	69945861	1405.0101.00039-0	139	0	125.100.000		125.100.000	0	62.550.000	62.550.000	125.100.000	0	125.100.000
128	SDN 01 ASAM JUJUHAN	10303314	1400.0101.00404-6	178	0	160.200.000	22.500.000	182.700.000	0	80.100.000	80.100.000	160.200.000	22.500.000	182.700.000
129	SDN 02 ASAM JUJUHAN	10303346	1400.0101.00405-0	90	785.000	81.000.000		82.121.000	1.906.000	40.500.000	39.715.000	80.215.000	0	82.121.000
130	SDN 03 ASAM JUJUHAN	10303238	1400.0101.00407-2	247	0	222.300.000	22.500.000	244.800.000	0	111.150.000	111.150.000	222.300.000	22.500.000	244.800.000
131	SDN 04 ASAM JUJUHAN	10303187	1400.0101.00406-1	91	0	81.900.000		81.900.000	0	40.950.000	40.950.000	81.900.000	0	81.900.000
132	SDN 05 ASAM JUJUHAN	10303207	1400.0101.00408-3	64	0	57.600.000	22.500.000	80.100.000	0	28.800.000	28.800.000	57.600.000	22.500.000	80.100.000
133	SDN 01 KOTO BESAR	10303266	1400.0101.00410-5	265	0	238.500.000		238.500.000	0	119.250.000	119.250.000	238.500.000	0	238.500.000
134	SDN 02 KOTO BESAR	10303199	1400.0101.00411-6	121	0	108.900.000	22.500.000	131.400.000	0	54.450.000	54.450.000	108.900.000	22.500.000	131.400.000
135	SDN 03 KOTO BESAR	10303177	1400.0101.00412-0	156	0	140.400.000		140.400.000	0	70.200.000	70.200.000	140.400.000	0	140.400.000
136	SDN 04 KOTO BESAR	10303248	1400.0101.00414-2	113	0	101.700.000		101.700.000	0	50.850.000	50.850.000	101.700.000	0	101.700.000
137	SDN 05 KOTO BESAR	10303270	1400.0101.00416-4	232	0	208.800.000		208.800.000	0	104.400.000	104.400.000	208.800.000	0	208.800.000
138	SDN 06 KOTO BESAR	10303278	1400.0101.00417-5	187	0	168.300.000	22.500.000	190.800.000	0	84.150.000	84.150.000	168.300.000	22.500.000	190.800.000
139	SDN 07 KOTO BESAR	69787577	1400.0101.00383-6	182	0	163.800.000		163.800.000	0	81.900.000	81.900.000	163.800.000	0	163.800.000
140	SDN 08 KOTO BESAR	10303351	1400.0101.00384-0	92	0	82.800.000		82.800.000	0	41.400.000	41.400.000	82.800.000	0	82.800.000
141	SDN 09 KOTO BESAR	10303360	1400.0101.00385-1	203	0	182.700.000		182.700.000	0	91.350.000	91.350.000	182.700.000	0	182.700.000
142	SDN 10 KOTO BESAR	10303326	1400.0101.00386-2	139	0	125.100.000	22.500.000	152.600.000	5.000.000	62.550.000	62.550.000	125.100.000	22.500.000	152.600.000
143	SDN 11 KOTO BESAR	10303321	1400.0101.00387-3	173	0	155.700.000	22.500.000	178.200.000	0	77.850.000	77.850.000	155.700.000	22.500.000	178.200.000
144	SDN 12 KOTO BESAR	10303208	1400.0101.00388-4	122	0	109.800.000		109.800.000	0	54.900.000	54.900.000	109.800.000	0	109.800.000
145	SDN 13 KOTO BESAR	10303192	1400.0101.00390-6	226	0	203.400.000		203.400.000	0	101.700.000	101.700.000	203.400.000	0	203.400.000
146	SDN 14 KOTO BESAR	69859770	1400.0101.00392-1	36	0	32.400.000		32.400.000	0	16.200.000	16.200.000	32.400.000	0	32.400.000
147	SDN 15 KOTO BESAR	69945862	1400.0101.00393-2	158	0	142.200.000		142.200.000	0	71.100.000	71.100.000	142.200.000	0	142.200.000
TOTAL				22.158	862.856	19.941.822.000	893.250.000	20.841.948.717	7.739.573	9.970.911.000	9.970.048.144	19.940.959.144	893.250.000	20.841.948.717

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL BOS 2021 dan BOS	BOS REGULER			BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
										TAHAP 1	TAHAP 2	REGULER		
SMP NEGERI														
1	SMPN 1 KOTO BARU	10303229	1400.0101.00296-3	434		477.400.000		477.400.000	0	238.700.000	238.700.000	477.400.000		477.400.000
2	SMPN 2 KOTO BARU	10303228	1400.0101.00297-4	602	81.869	662.200.000	35.000.000	723.437.900	26.319.769	331.100.000	331.018.131	662.118.131	35.000.000	723.437.900
3	SMPN 3 KOTO BARU	10303220	1400.0101.00298-5	109		119.900.000		119.900.000	0	59.950.000	59.950.000	119.900.000		119.900.000
4	SMPN 4 KOTO BARU	10308160	1400.0101.00299-6	254		279.400.000		279.400.000	0	139.700.000	139.700.000	279.400.000		279.400.000

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SIIPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	BOS REGULER			BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
										TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER		
5	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	10303213	1403.0101.00353-1	628		690.800.000	35.000.000	725.800.000	0	345.400.000	345.400.000	690.800.000	35.000.000	725.800.000
6	SMPN 2 PULAU PUNJUNG	10303224	1403.0101.00352-0	510		561.000.000		561.000.000	0	280.500.000	280.500.000	561.000.000		561.000.000
7	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	10303223	1403.0101.00351-6	311		342.100.000		342.100.000	0	171.050.000	171.050.000	342.100.000		342.100.000
8	SMPN 4 PULAU PUNJUNG	10307763	1403.0101.00346-1	83		91.300.000	35.000.000	126.300.000	0	45.650.000	45.650.000	91.300.000	35.000.000	126.300.000
9	SMPN 5 PULAU PUNJUNG	10308168	1403.0101.00345-0	40		44.000.000		44.000.000	0	22.000.000	22.000.000	44.000.000		44.000.000
10	SMPN 6 PULAU PUNJUNG	10308169	1403.0101.00344-6	96		105.600.000		105.600.000	0	52.800.000	52.800.000	105.600.000		105.600.000
11	SMPN UNGGUL DHARMASRAY	10308167	1403.0101.00343-5	333		366.300.000		366.300.000	0	183.150.000	183.150.000	366.300.000		366.300.000
12	SMPN 1 SUNGAI RUMBAI	10303226	1400.0101.00339-4	646	92	710.600.000		710.600.000	92	355.300.000	355.299.908	710.599.908		710.600.000
13	SMPN 2 SUNGAI RUMBAI	10307761	1400.0101.00340-5	259		284.900.000		284.900.000	0	142.450.000	142.450.000	284.900.000		284.900.000
14	SMPN 3 SUNGAI RUMBAI	69964423	1400.0101.00341-6	196		215.600.000		215.600.000	0	107.800.000	107.800.000	215.600.000		215.600.000
15	SMPN 1 SITIUNG	10303230	1405.0101.00040-1	728		800.800.000	35.000.000	835.800.000	0	400.400.000	400.400.000	800.800.000	35.000.000	835.800.000
0	SMPN 2 SITIUNG	10304871	1405.0101.00046-0	177		194.700.000	35.000.000	229.700.000	0	97.350.000	97.350.000	194.700.000	35.000.000	229.700.000
17	SMPN 3 SITIUNG	10308170	1403.0101.00323-6	155		170.500.000		170.500.000	0	85.250.000	85.250.000	170.500.000		170.500.000
18	SMPN 1 IX KOTO	10303211	1403.0101.00329-5	115		126.500.000		126.500.000	0	63.250.000	63.250.000	126.500.000		126.500.000
19	SMPN 2 IX KOTO	10307762	1403.0101.00328-4	70	800,00	80.256.000		80.256.000	800	40.128.000	40.127.200	80.255.200		80.256.000
20	SMPN 3 IX KOTO	10308166	1403.0101.00327-3	68		74.800.000		74.800.000	0	37.400.000	37.400.000	74.800.000		74.800.000
21	SMPN 1 TIMPEH	10303210	1405.0101.00044-5	212		233.200.000		233.200.000	0	116.600.000	116.600.000	233.200.000		233.200.000
22	SMPN 2 TIMPEH	10303231	1405.0101.00042-3	207		227.700.000		227.700.000	0	113.850.000	113.850.000	227.700.000		227.700.000
23	SMPN 3 TIMPEH	10307764	1400.0101.00423-4	119		130.900.000	35.000.000	165.900.000	0	65.450.000	65.450.000	130.900.000	35.000.000	165.900.000
24	SMPN 4 TIMPEH	10307794	1405.0101.00045-6	153		168.300.000		168.300.000	0	84.150.000	84.150.000	168.300.000		168.300.000
25	SMPN 1 KOTO SALAK	10303227	1400.0101.00312-5	468		514.800.000		514.800.000	0	257.400.000	257.400.000	514.800.000		514.800.000
26	SMPN 2 KOTO SALAK	10308171	1400.0101.00313-6	44		48.400.000		48.400.000	0	24.200.000	24.200.000	48.400.000		48.400.000
27	SMPN 3 KOTO SALAK	69853603	1400.0101.00314-0	137		150.700.000		150.700.000	0	75.350.000	75.350.000	150.700.000		150.700.000
28	SMPN 1 TIUMANG	10303221	1400.0101.00395-4	223		245.300.000		245.300.000	0	122.650.000	122.650.000	245.300.000		245.300.000
29	SMPN 1 PADANG LAWEH	10308172	1405.0101.00041-2	173		190.300.000	35.000.000	225.300.000	0	95.150.000	95.150.000	190.300.000	35.000.000	225.300.000
30	SMPN 1 ASAM JUJUHAN	10303232	1400.0101.00409-4	62		68.200.000		68.200.000	0	34.100.000	34.100.000	68.200.000		68.200.000
31	SMPN 1 KOTO BESAR	10303225	1400.0101.00394-3	239		262.900.000		262.980.694	80.694	131.450.000	131.450.000	262.900.000		262.980.694
32	SMPN 2 KOTO BESAR	10303212	1400.0101.00396-5	550		605.000.000		605.000.000	0	302.500.000	302.500.000	605.000.000		605.000.000
33	SMPN 3 KOTO BESAR	10308090	1400.0101.00398-0	135		148.500.000		148.500.000	0	74.250.000	74.250.000	148.500.000		148.500.000
TOTAL				8.536	82.761	9.392.856.000	245.000.000	9.664.174.594	26.401.355	4.696.428.000	4.696.345.239	9.392.773.239	245.000.000	9.664.174.594

PAUD														
1	TK NEGERI PEMBINA PULAU P	10310159	1403.0210.19951-9	109		65.304.096		65.304.096	0	32.700.000	32.604.096	65.304.096		65.304.096
2	TK NEGERI PEMBINA IX KOTO	69967657	1403.0210.20273-7	20		30.060.000	15.000.000	45.060.000	0	15.130.000	14.930.000	30.060.000	15.000.000	45.060.000
3	TK NEGERI 01 TIUMANG	69890543	1400.0210.14305-1	80		48.000.000		48.000.000	0	24.000.000	24.000.000	48.000.000		48.000.000
4	TK NEGERI 01 PULAU PUNJUN	69878705	1403.0210.17998-3	54	1.800.000	32.400.000	15.000.000	47.400.000	1.800.000	16.200.000	16.200.000	32.400.000	15.000.000	47.400.000
5	TK NEGERI 02 PULAU PUNJUN	69969652	1403.0210.20266-1	46	237.784	27.600.000		27.600.000	237.784	13.800.000	13.800.000	27.600.000		27.600.000
6	TK NEGERI PEMBINA ASAM JU	69890540	1401.0210.12136-6	12		7.200.000		7.200.000	0	3.600.000	3.600.000	7.200.000		7.200.000

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NOMOR REKENING	ANGGARAN PENDAPATAN					REALISASI PENDAPATAN					
				JUMLAH SISWA	SILPA BOS 2024	BOS REGULER 2025	BOS KINERJA 2025	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN	SALDO AWAL (SilPA dari SILPA BOS 2021 dan BOS KINERJA 2024)	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH BOS REGULER	BOS KINERJA	TOTAL REALISASI PENDAPATAN
7	TK NEGERI 01 SUNGAI RUMBA	69890539	1401.0210.09223-8	61		36.600.000		36.600.000	0	18.300.000	18.300.000	36.600.000		36.600.000
8	TK NEGERI PEMBINA TIMPEH	69966606	1405.0210.02176-2	54		32.400.000		32.400.000	0	16.200.000	16.200.000	32.400.000		32.400.000
9	TKN PEMBINA KOTO AGUNG	10310166	1403.0210.15010-5	80		48.000.000		48.000.000	0	24.000.000	24.000.000	48.000.000		48.000.000
10	TK NEGERI 02 TIUMANG	69890542	1400.0210.14345-1	80		48.000.000		48.000.000	0	24.000.000	24.000.000	48.000.000		48.000.000
11	TK NEGERI 02 SUNGAI RUMBA	69890538	1401.0210.05992-2	49	200.000	29.400.000		29.400.000	200.000	14.700.000	14.700.000	29.400.000		29.400.000
12	TK N PEMBINA KOTO BARU	69958546	1400.0210.19256-6	44		23.784.000		23.784.000	0	13.200.000	10.584.000	23.784.000		23.784.000
13	TK NEGERI PEMBINA KOTO BE	69966601	1401.0210.13245-5	53		31.800.000		31.800.000	0	15.900.000	15.900.000	31.800.000		31.800.000
14	TK NEGERI 01 SITIUNG	69878704	1403.0210.17934-1	45		27.000.000		27.000.000	0	13.500.000	13.500.000	27.000.000		27.000.000
15	TK NEGERI 01 KOTO BARU	69890541	1405.0210.01119-7	93		55.762.216		55.762.216	0	27.900.000	27.862.216	55.762.216		55.762.216
16	TK PEMBINA SUNGAI RUMBAI	10310160	1401.0210.09238-1	134		80.400.000		80.400.000	0	40.200.000	40.200.000	80.400.000		80.400.000
17	SPNF SKB DHARMASRAYA	P9959710	14030.1010.0500-1	98		160.700.000	-	160.700.000	0	80.350.000	80.350.000	160.700.000	0	160.700.000
TOTAL				1.112	2.237.784	784.410.312	30.000.000	814.410.312	2.237.784	393.680.000	390.730.312	784.410.312	30.000.000	814.410.312
TOTAL					3.183.401	30.119.088.312	1.168.250.000	31.320.533.623	36.378.712	15.061.019.000	15.057.123.695	30.118.142.695	1.168.250.000	31.320.533.623

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOSP TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ANGGARAN BELANJA							REALISASI BELANJA							SELISIH TOTAL REALISASI BELANJA DENGAN TOTAL ANGGARAN	SILPA 2025
		BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL ANGGARAN BELANJA	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI BELANJA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL			
1	SDN 01 KOTO BARU	322.573.000	20.895.000	343.468.000	88.727.000	1.605.000,00	90.332.000	433.800.000	322.573.000	20.895.000	343.468.000	88.727.000	1605000	90.332.000	433.800.000	0	0
2	SDN 02 KOTO BARU	163.725.000		163.725.000	55.875.000	0	55.875.000	219.600.000	163.725.000		163.725.000	55.875.000	0	55.875.000	219.600.000	0	0
3	SDN 03 KOTO BARU	95.175.000		95.175.000	20.025.000	0	20.025.000	115.200.000	95.175.000		95.175.000	20.025.000	0	20.025.000	115.200.000	0	0
4	SDN 04 KOTO BARU	63.185.000		63.185.000	31.315.000	0	31.315.000	94.500.000	63.185.000		63.185.000	31.315.000	0	31.315.000	94.500.000	0	0
5	SDN 05 KOTO BARU	89.327.500		89.327.500	15.072.500	0	15.072.500	104.400.000	89.327.500		89.327.500	15.072.500	0	15.072.500	104.400.000	0	0
6	SDN 06 KOTO BARU	148.318.000		148.318.000	29.882.000	0	29.882.000	178.200.000	148.318.000		148.318.000	29.882.000	0	29.882.000	178.200.000	0	0
7	SDN 07 KOTO BARU	177.818.000		177.818.000	26.482.000	0	26.482.000	204.300.000	177.818.000		177.818.000	26.482.000	0	26.482.000	204.300.000	0	0
8	SDN 08 KOTO BARU	80.226.000		80.226.000	16.074.000	0	16.074.000	96.300.000	80.226.000		80.226.000	16.074.000	0	16.074.000	96.300.000	0	0
9	SDN 09 KOTO BARU	82.830.600		82.830.600	13.469.400	0	13.469.400	96.300.000	82.830.600		82.830.600	13.469.400	0	13.469.400	96.300.000	0	0
10	SDN 10 KOTO BARU	71.642.000		71.642.000	18.358.000	0	18.358.000	90.000.000	71.642.000		71.642.000	18.358.000	0	18.358.000	90.000.000	0	0
11	SDN 11 KOTO BARU	124.780.100		124.780.100	55.219.900	0	55.219.900	180.000.000	124.624.982		124.624.982	55.219.900	0	55.219.900	179.844.882	155.118	155.118
12	SDN 12 KOTO BARU	78.433.200		78.433.200	24.166.800	0	24.166.800	102.600.000	78.433.200		78.433.200	24.166.800	0	24.166.800	102.600.000	0	0
13	SDN 13 KOTO BARU	227.279.686		227.279.686	88.238.100	0	88.238.100	315.517.786	227.279.686		227.279.686	88.238.100	0	88.238.100	315.517.786	0	0
14	SDN 14 KOTO BARU	123.542.000		123.542.000	56.458.000	0	56.458.000	180.000.000	123.542.000		123.542.000	56.458.000	0	56.458.000	180.000.000	0	0
15	SDN 15 KOTO BARU	53.571.700		53.571.700	18.428.300	0	18.428.300	72.000.000	53.571.700		53.571.700	18.428.300	0	18.428.300	72.000.000	0	0
16	SDN 16 KOTO BARU	194.750.500		194.750.500	90.549.500	0	90.549.500	285.300.000	194.619.240		194.619.240	90.549.500	0	90.549.500	285.168.740	131.260	131.260
17	SDN 01 PULAU PUNJUNG	145.993.300	15.996.000	161.989.300	33.106.700	6.504.000	39.610.700	201.600.000	145.993.300	15.996.000	161.989.300	33.106.700	6.504.000	39.610.700	201.600.000	0	0
18	SDN 02 PULAU PUNJUNG	41.310.000		41.310.000	4.590.000	0	4.590.000	45.900.000	41.310.000	0	41.310.000	4.590.000	0	4.590.000	45.900.000	0	0
19	SDN 03 PULAU PUNJUNG	163.856.600	16.857.500	180.714.100	58.443.400	5.642.500	64.085.900	244.800.000	163.856.600	16.857.500	180.714.100	58.443.400	5.642.500	64.085.900	244.800.000	0	0
20	SDN 04 PULAU PUNJUNG	154.033.000	15.710.000	169.743.000	54.767.000	6.790.000	61.557.000	231.300.000	154.033.000	15710000	169.743.000	54.767.000	6790000	61.557.000	231.300.000	0	0
21	SDN 05 PULAU PUNJUNG	100.842.000	19.726.000	120.568.000	16.158.000	2.774.000	18.932.000	139.500.000	100.841.938	19.726.000	120.567.938	16.158.000	2.774.000	18.932.000	139.499.938	62	62
22	SDN 06 PULAU PUNJUNG	230.050.000		230.050.000	83.150.000	0	83.150.000	313.200.000	230.050.000	0	230.050.000	83.150.000	0	83.150.000	313.200.000	0	0
23	SDN 07 PULAU PUNJUNG	88.279.200		88.279.200	26.920.800	0	26.920.800	115.200.000	88.279.200	0	88.279.200	26.920.800	0	26.920.800	115.200.000	0	0
24	SDN 08 PULAU PUNJUNG	428.078.500		428.078.500	91.221.500	0	91.221.500	519.300.000	428.073.118	0	428.073.118	91.221.500	0	91.221.500	519.294.618	5.382	5.382
25	SDN 09 PULAU PUNJUNG	201.326.128		201.326.128	74.073.900	0	74.073.900	275.400.028	201.326.128	0	201.326.128	74.073.900	0	74.073.900	275.400.028	0	0
26	SDN 10 PULAU PUNJUNG	119.163.000	16.510.000	135.673.000	39.237.000	5.990.000	45.227.000	180.900.000	119.159.857	16510000	135.669.857	39.237.000	5990000	45.227.000	180.896.857	3.143	3.143
27	SDN 11 PULAU PUNJUNG	123.448.900		123.448.900	29.551.100	0	29.551.100	153.000.000	123.448.900	0	123.448.900	29.551.100	0	29.551.100	153.000.000	0	0
28	SDN 12 PULAU PUNJUNG	19.243.000		19.243.000	2.357.000	0	2.357.000	21.600.000	19.243.000	0	19.243.000	2.357.000	0	2.357.000	21.600.000	0	0
29	SDN 13 PULAU PUNJUNG	80.476.000	31.065.000	111.541.000	15.824.000	19.685.000	35.509.000	147.050.000	80.476.000	31.065.000	111.541.000	15.824.000	19.685.000	35.509.000	147.050.000	0	0
30	SDN 14 PULAU PUNJUNG	106.840.033		106.840.033	31.760.000	0	31.760.000	138.600.033	106.840.000	0	106.840.000	31.760.000	0	31.760.000	138.600.000	33	33
31	SDN 15 PULAU PUNJUNG	67.990.600	15.538.600	83.529.200	7.609.400	6.961.400	14.570.800	98.100.000	67.990.600	15538600	83.529.200	7.609.400	6961400	14.570.800	98.100.000	0	0
32	SDN 16 PULAU PUNJUNG	129.943.000		129.943.000	43.757.000	0	43.757.000	173.700.000	129.943.000	0	129.943.000	43.757.000	0	43.757.000	173.700.000	0	0
33	SDN 17 PULAU PUNJUNG	75.311.600	19.783.000	95.094.600	8.388.400	2.717.000	11.105.400	106.200.000	75.311.600	19.783.000	95.094.600	8.388.400	2.717.000	11.105.400	106.200.000	0	0
34	SDN 18 PULAU PUNJUNG	54.262.000		54.262.000	8.738.000	0	8.738.000	63.000.000	54.262.000	0	54.262.000	8.738.000	0	8.738.000	63.000.000	0	0
35	SDN 19 PULAU PUNJUNG	256.404.000		256.404.000	48.696.000	0	48.696.000	305.100.000	256.404.000	0	256.404.000	48.696.000	0	48.696.000	305.100.000	0	0
36	SDN 20 PULAU PUNJUNG	43.555.400		43.555.400	24.844.600	0	24.844.600	68.400.000	43.555.400	0	43.555.400	24.844.600	0	24.844.600	68.400.000	0	0
37	SDN 21 PULAU PUNJUNG	241.629.100		241.629.100	49.970.900	0	49.970.900	291.600.000	241.629.100	0	241.629.100	49.970.900	0	49.970.900	291.600.000	0	0
38	SDN 22 PULAU PUNJUNG	118.287.000		118.287.000	25.713.000	0	25.713.000	144.000.000	118.287.000		118.287.000	25.713.000	0	25.713.000	144.000.000	0	0
39	SDN 23 PULAU PUNJUNG	24.753.245	1.175	24.754.420	3.152.400	0	3.152.400	27.906.820	24.753.245	1175	24.754.420	3.152.400	0	3.152.400	27.906.820	0	0
40	SDN 24 PULAU PUNJUNG	88.354.000		88.354.000	37.646.000	0	37.646.000	126.000.000	88.354.000		88.354.000	37.646.000	0	37.646.000	126.000.000	0	0
41	SDN 25 PULAU PUNJUNG	62.902.000		62.902.000	27.098.000	0	27.098.000	90.000.000	62.902.000		62.902.000	27.098.000	0	27.098.000	90.000.000	0	0
42	SDN 01 SUNGAI RUMBAI	120.110.000		120.110.000	40.990.000	0	40.990.000	161.100.000	120.110.000		120.110.000	40.990.000	0	40.990.000	161.100.000	0	0

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ANGGARAN BELANJA							REALISASI BELANJA							SELISIH TOTAL REALISASI BELANJA DENGAN TOTAL ANGGARAN	SILPA 2025
		BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL ANGGARAN BELANJA	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI BELANJA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL			
43	SDN 02 SUNGAI RUMBAI	179.825.500		179.825.500	43.374.500	0	43.374.500	223.200.000	179.825.500		179.825.500	43.374.500	0	43.374.500	223.200.000	0	0
44	SDN 03 SUNGAI RUMBAI	132.979.700		132.979.700	65.920.300	0	65.920.300	198.900.000	132.979.700		132.979.700	65.920.300	0	65.920.300	198.900.000	0	0
45	SDN 04 SUNGAI RUMBAI	139.025.000		139.025.000	35.575.000	0	35.575.000	174.600.000	139.025.000		139.025.000	35.575.000	0	35.575.000	174.600.000	0	0
46	SDN 05 SUNGAI RUMBAI	280.637.000		280.637.000	126.163.000	0	126.163.000	406.800.000	280.637.000		280.637.000	126.163.000	0	126.163.000	406.800.000	0	0
47	SDN 06 SUNGAI RUMBAI	100.210.940	15.850.000	116.060.940	12.289.060	6.650.000	18.939.060	135.000.000	100.210.940	15850000	116.060.940	12.289.060	6650000	18.939.060	135.000.000	0	0
48	SDN 07 SUNGAI RUMBAI	118.014.000	17.570.000	135.584.000	29.586.000	4.930.000	34.516.000	170.100.000	118.014.000	17570000	135.584.000	29.586.000	4930000	34.516.000	170.100.000	0	0
49	SDN 08 SUNGAI RUMBAI	277.890.000		277.890.000	58.710.000	0	58.710.000	336.600.000	277.890.000		277.890.000	58.710.000	0	58.710.000	336.600.000	0	0
50	SDN 09 SUNGAI RUMBAI	194.287.000	16.425.000	210.712.000	82.013.000	6.075.000	88.088.000	298.800.000	194.287.000	16.425.000	210.712.000	82.013.000	6.075.000	88.088.000	298.800.000	0	0
51	SDN 10 SUNGAI RUMBAI	53.747.900		53.747.900	11.952.100	0	11.952.100	65.700.000	53.747.900		53.747.900	11.952.100	0	11.952.100	65.700.000	0	0
52	SDN 11 SUNGAI RUMBAI	103.101.000		103.101.000	33.699.000	0	33.699.000	136.800.000	103.101.000		103.101.000	33.699.000	0	33.699.000	136.800.000	0	0
53	SDN 01 SITIUNG	64.822.000		64.822.000	24.278.000	0	24.278.000	89.100.000	64.822.000		64.822.000	24.278.000	0	24.278.000	89.100.000	0	0
54	SDN 02 SITIUNG	74.486.000	19.826.000	94.312.000	27.214.000	2.674.000	29.888.000	124.200.000	74.486.000	19826000	94.312.000	27.214.000	2674000	29.888.000	124.200.000	0	0
55	SDN 03 SITIUNG	75.129.421		75.129.421	23.878.000	0	23.878.000	99.007.421	Rp75.122.000	0	75.122.000	23.878.000	0	23.878.000	99.000.000	7.421	7.421
56	SDN 04 SITIUNG	197.927.300		197.927.300	47.772.700	0	47.772.700	245.700.000	197.927.300	0	197.927.300	47.772.700	0	47.772.700	245.700.000	0	0
57	SDN 05 SITIUNG	71.194.000		71.194.000	8.006.000	0	8.006.000	79.200.000	71.194.000	0	71.194.000	8.006.000	0	8.006.000	79.200.000	0	0
58	SDN 06 SITIUNG	89.478.400		89.478.400	46.421.600	0	46.421.600	135.900.000	89.478.400	0	89.478.400	46.421.600	0	46.421.600	135.900.000	0	0
59	SDN 07 SITIUNG	53.060.000		53.060.000	10.840.000	0	10.840.000	63.900.000	52.952.000	0	52.952.000	10.840.000	0	10.840.000	63.792.000	108.000	108.000
60	SDN 08 SITIUNG	65.065.000		65.065.000	27.635.000	0	27.635.000	92.700.000	65.065.000	0	65.065.000	27.635.000	0	27.635.000	92.700.000	0	0
61	SDN 09 SITIUNG	24.688.400		24.688.400	19.411.600	0	19.411.600	44.100.000	24.688.400	0	24.688.400	19.411.600	0	19.411.600	44.100.000	0	0
62	SDN 10 SITIUNG	77.700.000	32.815.000	110.515.000	12.300.000	3.435.000	15.735.000	126.250.000	77.700.000	32.815.000	110.515.000	12.300.000	3.435.000	15.735.000	126.250.000	0	0
63	SDN 11 SITIUNG	59.650.000		59.650.000	16.850.000	0	16.850.000	76.500.000	59.650.000		59.650.000	16.850.000	0	16.850.000	76.500.000	0	0
64	SDN 12 SITIUNG	43.420.000		43.420.000	15.980.000	0	15.980.000	59.400.000	43.420.000		43.420.000	15.980.000	0	15.980.000	59.400.000	0	0
65	SDN 13 SITIUNG	147.158.000	19.540.000	166.698.000	31.042.000	2.960.000	34.002.000	200.700.000	147.158.000	19.540.000	166.698.000	31.042.000	2.960.000	34.002.000	200.700.000	0	0
66	SDN 14 SITIUNG	125.035.000		125.035.000	44.165.000	0	44.165.000	169.200.000	125.035.000	0	125.035.000	44.165.000	0	44.165.000	169.200.000	0	0
67	SDN 15 SITIUNG	134.078.200		134.078.200	39.621.800	0	39.621.800	173.700.000	134.078.200	0	134.078.200	39.621.800	0	39.621.800	173.700.000	0	0
68	SDN 16 SITIUNG	41.746.000		41.746.000	23.054.000	0	23.054.000	64.800.000	41.746.000	0	41.746.000	23.054.000	0	23.054.000	64.800.000	0	0
69	SDN 17 SITIUNG	67.482.300		67.482.300	10.817.700	0	10.817.700	78.300.000	67.482.300	0	67.482.300	10.817.700	0	10.817.700	78.300.000	0	0
70	SDN 18 SITIUNG	137.253.000		137.253.000	36.447.000	0	36.447.000	173.700.000	137.253.000	0	137.253.000	36.447.000	0	36.447.000	173.700.000	0	0
71	SDN 19 SITIUNG	92.180.000		92.180.000	36.520.000	0	36.520.000	128.700.000	92.180.000	0	92.180.000	36.520.000	0	36.520.000	128.700.000	0	0
72	SDN 20 SITIUNG	218.438.000	26.613.000	245.051.000	50.662.000	9.637.000,00	60.299.000	305.350.000	218.438.000	26613000	245.051.000	50.662.000	9637000	60.299.000	305.350.000	0	0
73	SDN 01 IX KOTO	74.681.800		74.681.800	8.424.200	0	8.424.200	83.106.000	74.681.800	0	74.681.800	8.424.200	0	8.424.200	83.106.000	0	0
74	SDN 02 IX KOTO	52.353.300		52.353.300	9.208.600	0	9.208.600	61.561.900	52.353.300	0	52.353.300	9.208.600	0	9.208.600	61.561.900	0	0
75	SDN 03 IX KOTO	44.578.798	18.692.000	63.270.798	7.686.100	3.808.000	11.494.100	74.764.898	43.404.900	18660000	62.064.900	7.686.100	3808000	11.494.100	73.559.000	1.205.898	1.205.898
76	SDN 04 IX KOTO	79.576.600		79.576.600	32.023.400	0	32.023.400	111.600.000	79.576.600	0	79.576.600	32.023.400	0	32.023.400	111.600.000	0	0
77	SDN 05 IX KOTO	55.037.200		55.037.200	23.262.800	0	23.262.800	78.300.000	55.037.200	0	55.037.200	23.262.800	0	23.262.800	78.300.000	0	0
78	SDN 06 IX KOTO	73.670.800		73.670.800	8.229.200	0	8.229.200	81.900.000	60.511.800	0	60.511.800	8.229.200	0	8.229.200	68.741.000	13.159.000	13.159.000
79	SDN 07 IX KOTO	46.308.300	18.378.000	64.686.300	15.251.700	4.122.000,00	19.373.700	84.060.000	46.308.300	18378000	64.686.300	15.251.700	4122000	19.373.700	84.060.000	0	0
80	SDN 08 IX KOTO	86.347.700		86.347.700	22.408.300	0	22.408.300	108.756.000	86.347.700	0	86.347.700	22.408.300	0	22.408.300	108.756.000	0	0
81	SDN 09 IX KOTO	45.026.900		45.026.900	23.373.100	0	23.373.100	68.400.000	45.026.900	0	45.026.900	23.373.100	0	23.373.100	68.400.000	0	0
82	SDN 10 IX KOTO	44.895.100		44.895.100	16.664.900	0	16.664.900	61.560.000	44.895.100	0	44.895.100	16.664.900	0	16.664.900	61.560.000	0	0
83	SDN 11 IX KOTO	43.540.000		43.540.000	21.260.000	0	21.260.000	64.800.000	43.540.000	0	43.540.000	21.260.000	0	21.260.000	64.800.000	0	0
84	SDN 12 IX KOTO	52.451.400		52.451.400	9.108.600	0	9.108.600	61.560.000	52.451.400	0	52.451.400	9.108.600	0	9.108.600	61.560.000	0	0
85	SDN 13 IX KOTO	72.452.800		72.452.800	25.647.200	0	25.647.200	98.100.000	72.452.800	0	72.452.800	25.647.200	0	25.647.200	98.100.000	0	0
86	SDN 14 IX KOTO	32.966.800		32.966.800	28.593.200	0	28.593.200	61.560.000	32.966.800	0	32.966.800	28.593.200	0	28.593.200	61.560.000	0	0
87	SDN 15 IX KOTO	42.404.000		42.404.000	19.156.000	0	19.156.000	61.560.000	31.326.000	0	31.326.000	13.000.000	0	13.000.000	44.326.000	17.234.000	17.234.000
88	SDN 01 TIMPEH	160.316.900		160.316.900	80.883.100	0	80.883.100	241.200.000	160.316.900	0	160.316.900	80.883.100	0	80.883.100	241.200.000	0	0
89	SDN 02 TIMPEH	170.924.000		170.924.000	58.576.000	0	58.576.000	229.500.000	170.924.000	0	170.924.000	58.576.000	0	58.576.000	229.500.000	0	0

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ANGGARAN BELANJA							REALISASI BELANJA							SELISIH TOTAL REALISASI BELANJA DENGAN TOTAL ANGGARAN	SILPA 2025
		BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL ANGGARAN BELANJA	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI BELANJA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL			
90	SDN 03 TIMPEH	110.902.200		110.902.200	29.497.800	0	29.497.800	140.400.000	110.902.200	0	110.902.200	29.497.800	0	29.497.800	140.400.000	0	0
91	SDN 04 TIMPEH	98.898.831		98.898.831	11.058.000	0	11.058.000	109.956.831	98.898.831	0	98.898.831	11.058.000	0	11.058.000	109.956.831	0	0
92	SDN 05 TIMPEH	92.432.900		92.432.900	19.167.100	0	19.167.100	111.600.000	92.432.900	0	92.432.900	19.167.100	0	19.167.100	111.600.000	0	0
93	SDN 06 TIMPEH	117.166.000		117.166.000	68.234.000	0	68.234.000	185.400.000	Rp117.166.000	0	117.166.000	68.234.000	0	68.234.000	185.400.000	0	0
94	SDN 07 TIMPEH	111.668.000		111.668.000	37.732.000	0	37.732.000	149.400.000	111.668.000	0	111.668.000	37.732.000	0	37.732.000	149.400.000	0	0
95	SDN 08 TIMPEH	98.031.000		98.031.000	27.969.000	0	27.969.000	126.000.000	98.031.000	0	98.031.000	27.969.000	0	27.969.000	126.000.000	0	0
96	SDN 09 TIMPEH	97.305.000	16.116.000	113.421.000	17.895.000	6.384.000	24.279.000	137.700.000	97.305.000	16.116.000	113.421.000	17.895.000	6.384.000	24.279.000	137.700.000	0	0
97	SDN 10 TIMPEH	48.525.500		48.525.500	19.874.500	0	19.874.500	68.400.000	48.525.500	0	48.525.500	19.874.500	0	19.874.500	68.400.000	0	0
98	SDN 11 TIMPEH	69.691.600		69.691.600	23.908.400	0	23.908.400	93.600.000	69.691.294		69.691.294	23.908.400	0	23.908.400	93.599.694	306	306
99	SDN 01 KOTO SALAK	83.696.700	13.089.000	96.785.700	32.403.300	9.411.000	41.814.300	138.600.000	83.696.700	13.089.000	96.785.700	32.403.300	9.411.000	41.814.300	138.600.000	0	0
100	SDN 02 KOTO SALAK	181.590.000	17.473.000	199.063.000	114.510.000	5027000	119.537.000	318.600.000	181.590.000	17473000	199.063.000	114.510.000	5027000	119.537.000	318.600.000	0	0
101	SDN 03 KOTO SALAK	94.846.000		94.846.000	48.254.000	0	48.254.000	143.100.000	94.846.000		94.846.000	48.254.000	0	48.254.000	143.100.000	0	0
102	SDN 04 KOTO SALAK	63.580.000		63.580.000	12.020.000	0	12.020.000	75.600.000	63.580.000		63.580.000	12.020.000	0	12.020.000	75.600.000	0	0
103	SDN 05 KOTO SALAK	122.660.000	16.361.000	139.021.000	26.740.000	6139000	32.879.000	171.900.000	122.660.000	16361000	139.021.000	26.740.000	6139000	32.879.000	171.900.000	0	0
104	SDN 06 KOTO SALAK	55.712.000		55.712.000	11.788.000	0	11.788.000	67.500.000	55.712.000		55.712.000	11.788.000	0	11.788.000	67.500.000	0	0
105	SDN 07 KOTO SALAK	80.848.600		80.848.600	22.651.400	0	22.651.400	103.500.000	80.848.600		80.848.600	22.651.400	0	22.651.400	103.500.000	0	0
106	SDN 08 KOTO SALAK	96.770.800	21.355.000	118.125.800	21.129.200	1.145.000	22.274.200	140.400.000	96.770.800	21.355.000	118.125.800	21.129.200	1.145.000	22.274.200	140.400.000	0	0
107	SDN 09 KOTO SALAK	54.204.000		54.204.000	6.096.000	0	6.096.000	60.300.000	54.204.000		54.204.000	6.096.000	0	6.096.000	60.300.000	0	0
108	SDN 10 KOTO SALAK	39.689.000	20.204.000	59.893.000	15.211.000	2.296.000	17.507.000	77.400.000	39.689.000	20204000	59.893.000	15.211.000	2296000	17.507.000	77.400.000	0	0
109	SDN 11 KOTO SALAK	60.594.000		60.594.000	13.206.000	0	13.206.000	73.800.000	60.594.000		60.594.000	13.206.000	0	13.206.000	73.800.000	0	0
110	SDN 12 KOTO SALAK	29.942.000		29.942.000	3.358.000	0	3.358.000	33.300.000	29.942.000		29.942.000	3.358.000	0	3.358.000	33.300.000	0	0
111	SDN 01 TIUMANG	88.298.400		88.298.400	44.901.600	0	44.901.600	133.200.000	88.298.400		88.298.400	44.901.600	0	44.901.600	133.200.000	0	0
112	SDN 02 TIUMANG	72.474.600	49.395.600	121.870.200	30.125.400	23.104.400	53.229.800	175.100.000	72.474.600	49.395.600	121.870.200	30.125.400	23.104.400	53.229.800	175.100.000	0	0
113	SDN 03 TIUMANG	148.888.000		148.888.000	60.812.000	0	60.812.000	209.700.000	148.888.000		148.888.000	60.812.000	0	60.812.000	209.700.000	0	0
114	SDN 04 TIUMANG	45.737.000	22.500.000	68.237.000	21.763.000	0	21.763.000	90.000.000	45.737.000	22.500.000	68.237.000	21.763.000	0	21.763.000	90.000.000	0	0
115	SDN 05 TIUMANG	39.836.000		39.836.000	5.164.000	0	5.164.000	45.000.000	39.836.000		39.836.000	5.164.000	0	5.164.000	45.000.000	0	0
116	SDN 06 TIUMANG	34.452.000		34.452.000	20.448.000	0	20.448.000	54.900.000	34.452.000		34.452.000	20.448.000	0	20.448.000	54.900.000	0	0
117	SDN 07 TIUMANG	71.884.500		71.884.500	31.615.500	0	31.615.500	103.500.000	71.884.500		71.884.500	31.615.500	0	31.615.500	103.500.000	0	0
118	SDN 08 TIUMANG	25.632.300	19.075.000	44.707.300	15.767.700	3.425.000	19.192.700	63.900.000	25.632.300	19075000	44.707.300	15.767.700	3425000	19.192.700	63.900.000	0	0
119	SDN 09 TIUMANG	92.865.500		92.865.500	21.434.500	0	21.434.500	114.300.000	92.865.500		92.865.500	21.434.500	0	21.434.500	114.300.000	0	0
120	SDN 10 TIUMANG	101.999.200		101.999.200	24.000.800	0	24.000.800	126.000.000	101.999.200		101.999.200	24.000.800	0	24.000.800	126.000.000	0	0
121	SDN 11 TIUMANG	52.124.300		52.124.300	13.575.700	0	13.575.700	65.700.000	52.124.300		52.124.300	13.575.700	0	13.575.700	65.700.000	0	0
122	SDN 12 TIUMANG	52.419.000		52.419.000	20.481.000	0	20.481.000	72.900.000	52.419.000		52.419.000	20.481.000	0	20.481.000	72.900.000	0	0
123	SDN 01 PADANG LAWEH	62.126.000		62.126.000	28.774.000	0	28.774.000	90.900.000	62.126.000	0	62.126.000	28.774.000	Rp0	28.774.000	90.900.000	0	0
124	SDN 02 PADANG LAWEH	56.347.000		56.347.000	27.353.000	0	27.353.000	83.700.000	56.347.000	0	56.347.000	27.353.000	0	27.353.000	83.700.000	0	0
125	SDN 03 PADANG LAWEH	34.880.000		34.880.000	8.320.000	0	8.320.000	43.200.000	34.880.000	0	34.880.000	8.320.000	0	8.320.000	43.200.000	0	0
126	SDN 04 PADANG LAWEH	197.921.000	15.160.000	213.081.000	107.179.000	7.340.000	114.519.000	327.600.000	197.921.000	15160000	213.081.000	107.179.000	7340000	114.519.000	327.600.000	0	0
127	SDN 05 PADANG LAWEH	97.852.000		97.852.000	27.248.000	0	27.248.000	125.100.000	97.851.420	0	97.851.420	27.248.000	0	27.248.000	125.099.420	580	580
128	SDN 01 ASAM JUJUHAN	130.516.000	19.460.000	149.976.000	29.684.000	3040000	32.724.000	182.700.000	130.516.000	19.460.000	149.976.000	29.684.000	3040000	32.724.000	182.700.000	0	0
129	SDN 02 ASAM JUJUHAN	67.274.000	1.121.000	68.395.000	13.726.000	0	13.726.000	82.121.000	67.274.000	1.121.000	68.395.000	13.726.000	0	13.726.000	82.121.000	0	0
130	SDN 03 ASAM JUJUHAN	170.982.000	19.460.000	190.442.000	51.318.000	3.040.000	54.358.000	244.800.000	170.982.000	19.460.000	190.442.000	51.318.000	3.040.000	54.358.000	244.800.000	0	0
131	SDN 04 ASAM JUJUHAN	73.389.000		73.389.000	8.511.000	0	8.511.000	81.900.000	73.389.000		73.389.000	8.511.000	0	8.511.000	81.900.000	0	0
132	SDN 05 ASAM JUJUHAN	45.640.000	20.836.000	66.476.000	11.960.000	1.664.000	13.624.000	80.100.000	45.640.000	20.836.000	66.476.000	11.960.000	1.664.000	13.624.000	80.100.000	0	0
133	SDN 01 KOTO BESAR	184.193.000		184.193.000	54.307.000	0	54.307.000	238.500.000	184.193.000		184.193.000	54.307.000	0	54.307.000	238.500.000	0	0
134	SDN 02 KOTO BESAR	74.796.600	15.509.000	90.305.600	34.103.400	6.991.000	41.094.400	131.400.000	74.796.600	15.509.000.000	90.305.600	34.103.400	6.991.000	41.094.400	131.400.000	0	0
135	SDN 03 KOTO BESAR	110.705.000		110.705.000	29.695.000	0	29.695.000	140.400.000	110.705.000		110.705.000	29.695.000	0	29.695.000	140.400.000	0	0
136	SDN 04 KOTO BESAR	86.850.400		86.850.400	14.849.600	0	14.849.600	101.700.000	86.850.400		86.850.400	14.849.600	0	14.849.600	101.700.000	0	0

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ANGGARAN BELANJA							REALISASI BELANJA							SELISIH TOTAL REALISASI BELANJA DENGAN TOTAL ANGGARAN	SILPA 2025
		BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL ANGGARAN BELANJA	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI BELANJA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL			
137	SDN 05 KOTO BESAR	159.735.000		159.735.000	49.065.000	0	49.065.000	208.800.000	159.735.000		159.735.000	49.065.000	0	49.065.000	208.800.000	0	0
138	SDN 06 KOTO BESAR	119.326.100	15.306.000	134.632.100	48.973.900	7.194.000	56.167.900	190.800.000	119.326.100	15.306.000	134.632.100	48.973.900	7.194.000,00	56.167.900	190.800.000	0	0
139	SDN 07 KOTO BESAR	128.071.400		128.071.400	35.728.600	0	35.728.600	163.800.000	128.071.400		128.071.400	35.728.600	0	35.728.600	163.800.000	0	0
140	SDN 08 KOTO BESAR	69.517.600		69.517.600	13.282.400	0	13.282.400	82.800.000	69.517.600		69.517.600	13.282.400	0	13.282.400	82.800.000	0	0
141	SDN 09 KOTO BESAR	158.224.000		158.224.000	24.476.000	0	24.476.000	182.700.000	158.224.000		158.224.000	24.476.000	0	24.476.000	182.700.000	0	0
142	SDN 10 KOTO BESAR	110.433.900	23.222.000	133.655.900	14.666.100	4.278.000	18.944.100	152.600.000	110.433.900	23.222.000	133.655.900	14.666.100	4.278.000,00	18.944.100	152.600.000	0	0
143	SDN 11 KOTO BESAR	109.152.800	16.139.000	125.291.800	46.547.200	6.361.000	52.908.200	178.200.000	109.152.800	16.139.000	125.291.800	46.547.200	6.361.000	52.908.200	178.200.000	0	0
144	SDN 12 KOTO BESAR	87.312.000		87.312.000	22.488.000	0	22.488.000	109.800.000	87.312.000		87.312.000	22.488.000	0	22.488.000	109.800.000	0	0
145	SDN 13 KOTO BESAR	125.434.400		125.434.400	77.965.600	0	77.965.600	203.400.000	125.434.400		125.434.400	77.965.600	0	77.965.600	203.400.000	0	0
146	SDN 14 KOTO BESAR	29.160.000		29.160.000	3.240.000	0	3.240.000	32.400.000	29.160.000		29.160.000	3.240.000	0	3.240.000	32.400.000	0	0
147	SDN 15 KOTO BESAR	109.464.000		109.464.000	32.736.000	0	32.736.000	142.200.000	109.464.000		109.464.000	32.736.000	0	32.736.000	142.200.000	0	0
TOTAL		15.235.528.482	699.572.875	15.935.101.357	4.707.048.060	199.799.300	4.906.847.360	20.841.948.717	15.209.706.279	699.540.875	15.909.247.154	4.700.892.060	199.799.300	4.900.691.360	20.809.938.514	32.010.203	32.010.203

SMP NEGERI																	
1	SMPN 1 KOTO BARU	333.381.000		333.381.000	144.019.000	0	144.019.000	477.400.000	333.381.000	0	333.381.000	144.019.000	0	144.019.000	477.400.000	0	0
2	SMPN 2 KOTO BARU	496.030.800	43.989.900	540.020.700	166.169.200	17.248.000	183.417.200	723.437.900	496.010.800	24002000	520.012.800	166.169.200	17.248.000	183.417.200	703.430.000	20.007.900	20.007.900
3	SMPN 3 KOTO BARU	88.249.600		88.249.600	31.650.400	0	31.650.400	119.900.000	88.249.600	0	88.249.600	31.650.400	0	31.650.400	119.900.000	0	0
4	SMPN 4 KOTO BARU	176.124.000		176.124.000	103.276.000	0	103.276.000	279.400.000	176.124.000		176.124.000	103.276.000	0	103.276.000	279.400.000	0	0
5	SMPN 1 PULAU PUNJUNG	509.617.100	31.205.000	540.822.100	181.182.900	3.795.000	184.977.900	725.800.000	509.617.100	31.205.000	540.822.100	181.182.900	3.795.000	184.977.900	725.800.000	0	0
6	SMPN 2 PULAU PUNJUNG	432.665.000		432.665.000	128.335.000	0	128.335.000	561.000.000	432.665.000	0	432.665.000	128.335.000	0	128.335.000	561.000.000	0	0
7	SMPN 3 PULAU PUNJUNG	196.719.000		196.719.000	145.381.000	0	145.381.000	342.100.000	196.719.000	0	196.719.000	145.381.000	0	145.381.000	342.100.000	0	0
8	SMPN 4 PULAU PUNJUNG	72.237.200	29.494.000	101.731.200	19.062.800	5.506.000	24.568.800	126.300.000	72.237.200	29.494.000,00	101.731.200	19.062.800	5.506.000	24.568.800	126.300.000	0	0
9	SMPN 5 PULAU PUNJUNG	39.396.000		39.396.000	4.604.000	0	4.604.000	44.000.000	39.396.000	0	39.396.000	4.604.000	0	4.604.000	44.000.000	0	0
10	SMPN 6 PULAU PUNJUNG	67.715.500		67.715.500	37.884.500	0	37.884.500	105.600.000	67.715.500	0	67.715.500	37.884.500	0	37.884.500	105.600.000	0	0
11	SMPN UNGGUL DHARMASRAY	302.347.000		302.347.000	63.953.000	0	63.953.000	366.300.000	302.347.000	0	302.347.000	63.953.000	0	63.953.000	366.300.000	0	0
12	SMPN 1 SUNGAI RUMBAI	543.937.300		543.937.300	166.662.700	0	166.662.700	710.600.000	543.937.300	0	543.937.300	166.662.700	0	166.662.700	710.600.000	0	0
13	SMPN 2 SUNGAI RUMBAI	226.369.600		226.369.600	58.530.400	0	58.530.400	284.900.000	Rp226.369.600	0	226.369.600	58.530.400	0	58.530.400	284.900.000	0	0
14	SMPN 3 SUNGAI RUMBAI	180.510.000		180.510.000	35.090.000	0	35.090.000	215.600.000	180.510.000	0	180.510.000	35.090.000	0	35.090.000	215.600.000	0	0
15	SMPN 1 SITIUNG	629.507.700	21.684.000	651.191.700	171.292.300	13.316.000	184.608.300	835.800.000	Rp629.507.700	21.684.000	651.191.700	171.292.300	13.316.000	184.608.300	835.800.000	0	0
0	SMPN 2 SITIUNG	146.568.000	25.905.000	172.473.000	48.132.000	9.095.000	57.227.000	229.700.000	146.568.000	25.905.000,00	172.473.000	48.132.000	9.095.000	57.227.000	229.700.000	0	0
17	SMPN 3 SITIUNG	118.354.100		118.354.100	52.145.900	0	52.145.900	170.500.000	118.347.688	0	118.347.688	52.145.900	0	52.145.900	170.493.588	6.412	6.412
18	SMPN 1 IX KOTO	111.096.200		111.096.200	15.403.800	0	15.403.800	126.500.000	111.096.200	0	111.096.200	15.403.800	0	15.403.800	126.500.000	0	0
19	SMPN 2 IX KOTO	55.965.200		55.965.200	24.290.800	0	24.290.800	80.256.000	55.964.500	0	55.964.500	24.290.800	0	24.290.800	80.255.300	700	700
20	SMPN 3 IX KOTO	62.650.400		62.650.400	12.149.600	0	12.149.600	74.800.000	62.650.400	0	62.650.400	12.149.600	0	12.149.600	74.800.000	0	0
21	SMPN 1 TIMPEH	168.866.000		168.866.000	64.334.000	0	64.334.000	233.200.000	168.866.000	0	168.866.000	64.334.000	0	64.334.000	233.200.000	0	0
22	SMPN 2 TIMPEH	159.654.200		159.654.200	68.045.800	0	68.045.800	227.700.000	159.653.370	0	159.653.370	68.045.800	0	68.045.800	227.699.170	830	830
23	SMPN 3 TIMPEH	96.288.000	26.970.000	123.258.000	34.612.000	8.030.000	42.642.000	165.900.000	96.284.740	26.960.000	123.244.740	34.612.000	8.030.000	42.642.000	165.886.740	13.260	13.260
24	SMPN 4 TIMPEH	119.857.000		119.857.000	48.443.000	0	48.443.000	168.300.000	119.857.000	0	119.857.000	48.443.000	0	48.443.000	168.300.000	0	0
25	SMPN 1 KOTO SALAK	305.486.500		305.486.500	209.313.500	0	209.313.500	514.800.000	305.486.500	0	305.486.500	209.313.500	0	209.313.500	514.800.000	0	0
26	SMPN 2 KOTO SALAK	41.361.700		41.361.700	7.038.300	0	7.038.300	48.400.000	41.361.700	0	41.361.700	7.038.300	0	7.038.300	48.400.000	0	0
27	SMPN 3 KOTO SALAK	131.173.000		131.173.000	19.527.000	0	19.527.000	150.700.000	131.173.000	0	131.173.000	19.527.000	0	19.527.000	150.700.000	0	0

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ANGGARAN BELANJA							REALISASI BELANJA							SELISIH TOTAL REALISASI BELANJA DENGAN TOTAL ANGGARAN	SILPA 2025
		BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL ANGGARAN BELANJA	BELANJA BARANG & JASA			BELANJA MODAL			TOTAL REALISASI BELANJA		
		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL		BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA	BOS REGULER	BOS KINERJA	JUMLAH BELANJA MODAL			
28	SMPN 1 TIUMANG	179.320.000		179.320.000	65.980.000	0	65.980.000	245.300.000	179.320.000	0	179.320.000	65.980.000	0	65.980.000	245.300.000	0	0
29	SMPN 1 PADANG LAWEH	125.846.000	17.000.000	142.846.000	64.454.000	18.000.000	82.454.000	225.300.000	125.489.000	17.000.000,00	142.489.000	64.454.000	18.000.000	82.454.000	224.943.000	357.000	357.000
30	SMPN 1 ASAM JUJAHAN	61.368.100		61.368.100	6.831.900	0	6.831.900	68.200.000	61.368.100	0	61.368.100	6.831.900	0	6.831.900	68.200.000	0	0
31	SMPN 1 KOTO BESAR	211.646.994		211.646.994	51.333.700	0	51.333.700	262.980.694	211.646.994	0	211.646.994	51.333.700	0	51.333.700	262.980.694	0	0
32	SMPN 2 KOTO BESAR	513.447.800		513.447.800	91.552.200	0	91.552.200	605.000.000	513.447.800	0	513.447.800	91.552.200	0	91.552.200	605.000.000	0	0
33	SMPN 3 KOTO BESAR	125.493.400		125.493.400	23.006.600	0	23.006.600	148.500.000	125.493.400,00	0	125.493.400	23.006.600	0	23.006.600	148.500.000	0	0
TOTAL		7.029.249.394	196.247.900	7.225.497.294	2.363.687.300	74.990.000	2.438.677.300	9.664.174.594	7.028.861.192	176.250.000	7.205.111.192	2.363.687.300	74.990.000	2.438.677.300	9.643.788.492	20.386.102	20.386.102

PAUD																	
1	TK NEGERI PEMBINA PULAU P	54.864.096		54.864.096			10.440.000	65.304.096	54.864.096		54.864.096			10.440.000	65.304.096	0	0
2	TK NEGERI PEMBINA IX KOTO	30.060.000	15.000.000	45.060.000		0	0	45.060.000	26.097.000	15.000.000	41.097.000			4.163.000	45.260.000	-200.000	0
3	TK NEGERI 01 TIUMANG	48.000.000		48.000.000			0	48.000.000	34.200.000		34.200.000			13.800.000	48.000.000	0	0
4	TK NEGERI 01 PULAU PUNJUNG	29.160.000	15.000.000	44.160.000		0	0	44.160.000	29.160.000	15.000.000	44.160.000			3.240.000	47.400.000	-3.240.000	0
5	TK NEGERI 02 PULAU PUNJUNG	27.600.000		27.600.000			0	27.600.000	22.940.000		22.940.000			4.660.000	27.600.000	0	0
6	TK NEGERI PEMBINA ASAM JU	7.200.000		7.200.000			0	7.200.000	6.480.000		6.480.000			720.000	7.200.000	0	0
7	TK NEGERI 01 SUNGAI RUMBA	36.600.000		36.600.000			0	36.600.000	25.640.000		25.640.000			10.960.000	36.600.000	0	0
8	TK NEGERI PEMBINA TIMPEH	32.400.000		32.400.000			0	32.400.000	24.610.000		24.610.000			7.790.000	32.400.000	0	0
9	TKN PEMBINA KOTO AGUNG	48.000.000		48.000.000			0	48.000.000	30.000.000		30.000.000			18.000.000	48.000.000	0	0
10	TK NEGERI 02 TIUMANG	48.000.000		48.000.000			0	48.000.000	32.700.000		32.700.000			15.300.000	48.000.000	0	0
11	TK NEGERI 02 SUNGAI RUMBA	29.400.000		29.400.000			0	29.400.000	18.960.000		18.960.000			10.440.000	29.400.000	0	0
12	TK N PEMBINA KOTO BARU	23.784.000		23.784.000			0	23.784.000	13.944.000		13.944.000			11.640.000	25.584.000	-1.800.000	0
13	TK NEGERI PEMBINA KOTO BE	31.800.000		31.800.000			0	31.800.000	25.970.000		25.970.000			5.830.000	31.800.000	0	0
14	TK NEGERI 01 SITIUNG	27.000.000		27.000.000			0	27.000.000	22.350.000		22.350.000			4.650.000	27.000.000	0	0
15	TK NEGERI 01 KOTO BARU	55.762.216		55.762.216			0	55.762.216	48.920.000		48.920.000			7.080.000	56.000.000	-237.784	0
16	TK PEMBINA SUNGAI RUMBAI	80.400.000		80.400.000			0	80.400.000	64.560.000		64.560.000			15.840.000	80.400.000	0	0
17	SPNF SKB DHARMASRAYA	160.700.000	0	160.700.000	0	0	0	160.700.000	160.700.000		160.700.000			0	160.700.000	0	0
TOTAL		770.730.312	30.000.000	800.730.312	0	0	10.440.000	811.170.312	642.095.096	30.000.000	672.095.096	0	0	144.553.000	816.648.096	-5.477.784	0

TOTAL		23.035.508.188	925.820.775	23.961.328.963	7.070.735.360	274.789.300	7.355.964.660	31.317.293.623	22.880.662.567	905.790.875	23.786.453.442	7.064.579.360	274.789.300	7.483.921.660	31.270.375.102	46.918.521	52.396.305

REKAPITULASI PENGEMBALIAN DANA BOSP PAUD SWASTA BOP REGULER TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kecamatan	NPSN	Sekolah	Nomor Rekening Salur	Jumlah Siswa	Pagu 1 Tahun	Pendapatan		jumlah realisasi	Setor kasda Seharusnya	Setor Kasda 2025		Setor Kasda 2025	
							tahap 1	tahap 2			Jumlah	Tanggal Setor	Jumlah	Tanggal Setor
1	Kec. Sitiung	69876291	SPS DAUN PIRUKO	14030210111719	33	19.800.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	19.800.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	10 Desember 2025		
2	Kec. Koto Baru	69929817	KB KASIH IBU	14000210162444	16	9.600.000,00	4.800.000,00	4.700.000,00	9.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	09 Desember 2025		
3	Kec. Koto Baru	69876212	KB AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	14000210161441	11	6.600.000,00	3.300.000,00	3.201.000,00	6.501.000,00	3.201.000,00	3.200.000,00	08 Desember 2025	1.000,00	10 Februari 2026
4	Kec. Sungai Rumbai	69907126	PAUD BUKIT INDAH PERMAI	14010210132649	11	6.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	6.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	25 Desember2025		
					71	42.600.000,00	21.300.000,00	21.101.000,00	42.401.000,00	21.101.000,00	21.100.000,00		1.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BLUD RSUD, PUSKESMAS DAN LABKESDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

LAMPIRAN 5																			
Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2025	1. RSUD Sungai Darah	2. Labkesda	3. RSUD Sungai Rumbi	4. Sungai Limau	5. Silung I	6. Tumang	7. Siligo	8. Silang	9. Silung II	10. Padang Laweh	11. Kota Besar	12. Kota Baru	13. Sungai Rumbi	14. Gunung Medan	15. Sungai Darah	16. Timpa	17. Belangin Sakti
4	PENDAPATAN DAERAH	91.989.166.550,00	59.093.137.171,00	370.049.100,00	5.898.927.186,00	1.102.328.231,00	2.674.286.817,00	1.627.015.335,00	1.611.935.989,00	1.443.800.229,00	1.602.216.270,00	1.256.642.628,00	1.732.494.246,00	3.343.374.968,00	2.487.263.875,00	1.489.836.070,00	2.937.043.102,00	1.815.829.830,00	1.103.005.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.558.777.867,00	59.093.137.171,00	370.049.100,00	5.898.927.186,00	183.713.900,00	672.147.200,00	154.152.000,00	304.314.000,00	69.552.100,00	140.087.400,00	239.305.600,00	113.186.200,00	909.478.500,00	438.167.500,00	153.003.500,00	160.231.700,00	322.035.400,00	317.288.600,00
4.1.01	Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	69.405.797.907,00	58.940.158.021,00	370.049.100,00	5.898.927.186,00	183.713.900,00	672.147.200,00	154.152.000,00	304.314.000,00	69.552.100,00	140.087.400,00	239.305.600,00	113.186.200,00	909.478.500,00	438.167.500,00	153.003.500,00	160.231.700,00	322.035.400,00	317.288.600,00
4.1.03	Hati Pengabdian Masyarakat Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	152.879.150,00	152.879.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.443.909.965,00	-	-	-	617.535.526,00	699.247.744,00	778.721.939,00	650.099.147,00	611.768.748,00	599.760.422,00	602.922.943,00	570.645.598,00	750.707.542,00	846.626.063,00	627.842.055,00	806.051.959,00	786.443.400,00	495.537.891,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.443.909.965,00	-	-	-	617.535.526,00	699.247.744,00	778.721.939,00	650.099.147,00	611.768.748,00	599.760.422,00	602.922.943,00	570.645.598,00	750.707.542,00	846.626.063,00	627.842.055,00	806.051.959,00	786.443.400,00	495.537.891,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.586.479.528,00	-	-	-	301.078.805,00	1.302.891.873,00	694.141.396,00	657.522.842,00	762.479.381,00	862.368.448,00	414.414.085,00	1.028.662.463,00	1.683.188.926,00	1.202.471.312,00	798.970.515,00	1.970.759.443,00	707.361.030,00	290.179.009,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.586.479.528,00	-	-	-	301.078.805,00	1.302.891.873,00	694.141.396,00	657.522.842,00	762.479.381,00	862.368.448,00	414.414.085,00	1.028.662.463,00	1.683.188.926,00	1.202.471.312,00	798.970.515,00	1.970.759.443,00	707.361.030,00	290.179.009,00
	JUMLAH PENDAPATAN	91.989.166.550,00	59.093.137.171,00	370.049.100,00	5.898.927.186,00	1.102.328.231,00	2.674.286.817,00	1.627.015.335,00	1.611.935.989,00	1.443.800.229,00	1.602.216.270,00	1.256.642.628,00	1.732.494.246,00	3.343.374.968,00	2.487.263.875,00	1.489.836.070,00	2.937.043.102,00	1.815.829.830,00	1.103.005.500,00
5	BELANJA DAERAH	91.226.746.854,46	58.932.900.036,00	304.840.423,00	5.687.893.671,00	1.200.233.353,00	2.608.332.819,00	1.668.462.527,00	1.643.635.953,00	1.514.874.385,00	1.533.808.382,00	1.236.791.394,00	1.896.427.895,13	3.228.613.951,33	2.430.687.292,00	1.452.137.772,80	2.841.238.020,00	1.894.762.910,00	1.239.166.110,00
5.1	BELANJA OPERASI	88.624.223.154,46	57.335.503.779,00	304.840.423,00	5.400.333.474,00	1.200.233.353,00	2.529.058.565,00	1.640.615.797,00	1.634.311.953,00	1.445.066.395,00	1.433.806.382,00	1.216.723.394,00	1.864.628.981,13	3.157.727.661,33	2.353.275.394,00	1.425.092.085,00	2.727.101.520,00	1.744.844.000,00	1.211.060.910,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.598.731.401,08	2.668.359.701,00	155.316.328,00	267.300.000,00	206.183.377,00	969.672.238,00	477.503.483,00	650.734.303,00	561.562.684,00	403.342.367,00	288.421.040,00	555.973.616,00	1.095.986.721,48	953.223.854,00	448.487.136,00	1.174.627.896,00	478.244.236,00	241.782.373,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.025.491.753,38	54.667.144.078,00	149.524.095,00	5.133.033.474,00	994.049.974,00	1.559.386.337,00	1.163.112.314,00	983.576.683,00	883.503.701,00	1.030.464.015,00	928.302.354,00	1.308.656.364,53	2.061.740.939,85	1.398.051.540,00	976.594.949,00	1.552.473.624,00	1.268.599.764,00	969.278.537,00
5.1.05	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA OPERASI	88.624.223.154,46	57.335.503.779,00	304.840.423,00	5.400.333.474,00	1.200.233.353,00	2.529.058.565,00	1.640.615.797,00	1.634.311.953,00	1.445.066.395,00	1.433.806.382,00	1.216.723.394,00	1.864.628.981,13	3.157.727.661,33	2.353.275.394,00	1.425.092.085,00	2.727.101.520,00	1.744.844.000,00	1.211.060.910,00
5.2	BELANJA MODAL	2.602.522.700,00	1.597.396.259,00	-	287.560.197,00	-	79.254.254,00	27.846.730,00	9.324.000,00	69.807.900,00	100.122.000,00	21.978.000,00	31.808.875,00	70.886.190,00	77.331.998,00	27.046.687,00	114.136.500,00	59.918.910,00	28.105.200,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	1.761.507.223,00	970.579.570,00	-	179.970.190,00	-	59.695.473,00	27.846.730,00	9.324.000,00	69.807.900,00	100.122.000,00	21.978.000,00	31.808.875,00	70.886.190,00	77.331.998,00	27.046.687,00	46.796.500,00	59.918.910,00	28.105.200,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	713.425.470,00	626.816.689,00	-	-	-	19.258.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.350.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2025	1. RSUD Sungai Darah	2. Labkesda	3. RSUD Sungai Rumbai	4. Sungai Limau	5. Situng I	6. Tumbang	7. Silago	8. Sielang	9. Situng II	10. Padang Laweh	11. Koto Besar	12. Koto Baru	13. Sungai Rumbai	14. Gunung Medan	15. Sungai Darah	16. Timpeh	17. Beringin Sakli
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangun	107.590.007,00	-	-	107.590.007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.602.522.760,00	1.597.396.259,00	-	287.560.197,00	-	79.254.254,00	27.846.730,00	9.324.000,00	69.807.900,00	100.122.000,00	21.978.000,00	31.808.875,00	70.886.190,00	77.331.998,00	27.046.687,00	114.136.500,00	58.918.910,00	28.105.200,00
	JUMLAH BELANJA	91.226.746.854,46	58.932.900.038,00	304.840.423,00	5.687.893.671,00	1.200.233.351,00	2.608.312.819,00	1.668.462.527,00	1.643.635.853,00	1.514.874.285,00	1.533.928.382,00	1.238.701.994,00	1.896.437.856,13	3.228.613.851,33	2.430.607.382,00	1.482.137.772,00	2.841.238.020,00	1.894.762.910,00	1.239.166.110,00
	SURPLUS/DEFISIT	362.420.695,54	180.237.133,00	65.209.677,00	211.033.515,00	(97.905.120,00)	65.973.998,00	(41.447.132,00)	(31.699.064,00)	(71.074.056,00)	68.287.888,00	17.941.234,00	(163.943.607,13)	114.761.116,67	56.656.483,00	37.678.298,00	95.805.082,00	11.066.920,00	(136.160.610,00)
6	PEMBAYARAN DAERAH	2.167.818.820,00	37.538.774,51	10.656.754,00	34.614,73	173.484.218,70	199.521.262,62	148.090.433,00	106.064.675,00	128.474.838,00	53.529.216,09	40.966.190,21	321.188.378,37	447.257.026,00	96.572.855,00	47.277.814,00	114.364.272,00	71.987.596,25	170.810.901,58
6.1	PENEMBAHAN PEMBAYARAN	2.167.818.820,00	37.538.774,51	10.656.754,00	34.614,73	173.484.218,70	199.521.262,62	148.090.433,00	106.064.675,00	128.474.838,00	53.529.216,09	40.966.190,21	321.188.378,37	447.257.026,00	96.572.855,00	47.277.814,00	114.364.272,00	71.987.596,25	170.810.901,58
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.167.818.820,00	37.538.774,51	10.656.754,00	34.614,73	173.484.218,70	199.521.262,62	148.090.433,00	106.064.675,00	128.474.838,00	53.529.216,09	40.966.190,21	321.188.378,37	447.257.026,00	96.572.855,00	47.277.814,00	114.364.272,00	71.987.596,25	170.810.901,58
	JUMLAH PENEMBAHAN PEMBAYARAN	2.167.818.820,00	37.538.774,51	10.656.754,00	34.614,73	173.484.218,70	199.521.262,62	148.090.433,00	106.064.675,00	128.474.838,00	53.529.216,09	40.966.190,21	321.188.378,37	447.257.026,00	96.572.855,00	47.277.814,00	114.364.272,00	71.987.596,25	170.810.901,58
6.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jukuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBAYARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBAYARAN NETTO	2.167.818.820,00	37.538.774,51	10.656.754,00	34.614,73	173.484.218,70	199.521.262,62	148.090.433,00	106.064.675,00	128.474.838,00	53.529.216,09	40.966.190,21	321.188.378,37	447.257.026,00	96.572.855,00	47.277.814,00	114.364.272,00	71.987.596,25	170.810.901,58
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	2.530.239.615,60	197.775.907,51	75.864.431,00	211.068.129,73	75.579.098,70	265.495.260,62	106.643.241,00	74.365.611,00	57.400.782,00	121.817.104,09	58.907.424,21	157.244.771,24	562.018.142,67	153.229.338,00	84.956.212,00	210.169.354,00	83.054.516,25	34.650.291,58
URAIAN		Realisasi	RSUD Sungai Darah	Labkesda	RSUD Sungai Rumbai	Sungai Limau	Situng I	Tumbang	Silago	Sielang	Situng II	Padang Laweh	Koto Besar	Koto Baru	Sungai Rumbai	Gunung Medan	Sungai Darah	Timpeh	Beringin Sakli
Saldo di Bank BLUD		2.434.226.397,60	197.775.907,51	75.864.431,00	195.256.129,73	66.300.098,70	258.536.284,62	105.130.380,00	73.453.572,00	56.570.183,00	107.244.042,09	57.970.681,21	120.434.936,24	561.787.081,67	152.738.980,00	84.432.212,00	207.508.604,00	80.548.402,25	32.083.471,58
Saldo BLUD di Kasda		15.812.000,00	-	-	15.812.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo di Bank BICN		80.201.218,00	-	-	-	9.279.000,00	6.958.876,00	1.512.861,00	912.039,00	830.999,00	14.573.062,00	936.743,00	36.809.816,00	231.061,00	600.358,00	524.000,00	2.659.760,00	2.506.114,00	1.966.820,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SILPA BLUD		2.530.239.615,60	197.775.907,51	75.864.431,00	211.068.129,73	75.579.098,70	265.495.260,62	106.643.241,00	74.365.611,00	57.400.782,00	121.817.104,09	58.907.424,21	157.244.771,24	562.018.142,67	153.229.338,00	84.956.212,00	210.169.354,00	83.054.516,25	34.650.291,58

Piutang Retribusi Layanan Kesehatan
Pada RSUD Sungai Rumbai, Labkesda dan Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Koreksi Kurang Catat Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang Audited 2025	Ket	Penyisihan Piutang 2025			Penyisihan Piutang 2024
				Pengurangan 2025		Penambahan Piutang 2025			Kualitas Piutang 2025	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang 2025	
				Pembayaran	Tgl Bayar							
1.	RSUD SUNGAI RUMBAI	403.487.539,00	197.757.330,00	601.244.869,00		665.009.704,00	665.009.704,00				44.123.071,74	15.394.147,94
	TAHUN 2025											
1	Klaim Ambulance BPJS Desember 2025					22.944.000,00	22.944.000,00	02 Februari 2026	Lancar	0,50%	114.720,00	
2	Klaim obat BPJS Desember 2025					49.911.616,00	49.911.616,00	02 Februari 2026	Lancar	0,50%	249.558,08	
3	Klaim pasien BPJS Ketenagakerjaan pending November 2025					1.105.258,00	1.105.258,00	22 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	276.314,50	
4	Klaim pasien BPJS Ketenagakerjaan Desember 2025					4.860.281,00	4.860.281,00	Rp4.193.712 tgl 22 Januari 2026	Lancar	0,50%	24.301,41	
5	Klaim pasien jasa raharja bulan Agustus 2025					2.367.324,00	2.367.324,00	Belum dibayar	Diragukan	50,00%	1.183.662,00	
6	Klaim pasien jasa raharja bulan November 2025					1.629.639,00	1.629.639,00	Belum dibayar	Kurang Lancar	25,00%	407.409,75	
7	Klaim radiologi parsial Desember 2025					260.000,00	260.000,00	16 Maret 2026	Lancar	0,50%	1.300,00	
8	Pelkes BPJS pending 2 September 2025					17.438.800,00	17.438.800,00	26 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	4.359.700,00	
9	Pelkes BPJS pending Oktober 2025					39.798.600,00	39.798.600,00	26 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	9.949.650,00	
10	Pelkes BPJS Desember 2025					380.369.100,00	380.369.100,00	30 Januari 2026	Lancar	0,50%	1.901.845,50	
11	Pelkes BPJS pending November 2025					4.038.700,00	4.038.700,00	09 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	1.009.675,00	
12	Pelkes BPJS pending 2 Oktober 2025					471.800,00	471.800,00	23 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	117.950,00	
13	Pelkes BPJS pending Desember 2025					29.860.100,00	29.860.100,00	16 Maret 2026	Lancar	0,50%	149.300,50	
14	Pelkes BPJS pending November 2025					72.133.200,00	72.133.200,00	01 April 2026	Kurang Lancar	25,00%	18.033.300,00	
15	Pelkes BPJS pending Desember 2 2025					12.697.700,00	12.697.700,00		Lancar	0,50%	63.488,50	
16	Obat BPJS pending November 2025					25.123.586,00	25.123.586,00		Kurang Lancar	25,00%	6.280.896,50	
	TAHUN 2024						-					
1	Piutang Pelkes BPJS pending Agustus II 2024	9.002.300,00		9.002.300,00	06 Januari 2025		-					4.501.150,00
2	Piutang Pelkes BPJS pending September 2024	3.605.800,00		3.605.800,00	06 Januari 2025		-					360.580,00
3	Piutang Pelkes BPJS pending Juli III 2024	2.688.500,00		2.688.500,00	17 Januari 2025		-					1.344.250,00
4	Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2024	14.379.628,00		14.379.628,00	Rp7.546.360 tgl 13 Januari 2025 Rp1.645.740 tgl 23 Januari 2025 Rp1.619.890 tgl 7 Februari 2025 Rp1.562.640 tgl 12 Februari 2025 Rp2.005.040 tgl 10 Juni 2025		-					1.261.853,34
9	Klaim Jasa Raharja 2024	1.414.311,00		1.414.311,00	15 Januari 2025		-					141.431,10
10	Piutang Pelkes BPJS Desember 2024	288.294.700,00		288.294.700,00	30 Januari 2025		-					1.441.473,50
11	Pelkes Ambulance BPJS Desember 2024	21.756.000,00		21.756.000,00	14 Februari 2025		-					108.780,00
12	Piutang Pelkes BPJS pending II Oktober	24.362.700,00		24.362.700,00	07 Februari 2025		-					2.436.270,00
13	Piutang Pelkes BPJS pending November	37.983.600,00		37.983.600,00	07 Februari 2025		-					3.798.360,00
14	Klaim obat BPJS Oktober 2024		41.643.801,00	41.643.801,00	24 Februari 2025		-					
15	Klaim obat BPJS November 2024		38.665.903,00	38.665.903,00	24 Februari 2025		-					
16	Klaim obat BPJS Desember 2024		41.594.626,00	41.594.626,00	24 Februari 2025		-					
17	Pelkes BPJS pending Desember 2024		68.071.900,00	68.071.900,00	07 Maret 2025		-					
18	Pelkes BPJS pending November II 2024		7.781.100,00	7.781.100,00	14 Maret 2025		-					
2.	PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	41.664.000,00	4.635.000,00	46.299.000,00	-	48.402.000,00	48.402.000,00				4.511.870,00	3.250.885,00
	TAHUN 2025											
1	Non Kapitasi Klaim Desember					11.666.000,00	11.666.000,00	28 Januari 2026	Lancar	0,50%	58.330,00	
2	Non Kapitasi Klaim Pending Okt					960.000,00	960.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	240.000,00	
3	Non Kapitasi Klaim Pending Nov					160.000,00	160.000,00	02 Maret 2026	Kurang Lancar	25,00%	40.000,00	
4	Non Kapitasi Klaim Pending Des					1.100.000,00	1.100.000,00	02 Maret 2026	Lancar	0,50%	5.500,00	
5	Non Kapitasi Prolanis Nov					16.008.000,00	16.008.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	4.002.000,00	
6	Promotif Nov					300.000,00	300.000,00	19 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	75.000,00	
7	Non Kapitasi Prolanis Des					17.908.000,00	17.908.000,00	06 Maret 2026	Lancar	0,50%	89.540,00	
8	Promotif Des					300.000,00	300.000,00	27 Februari 2026	Lancar	0,50%	1.500,00	
	TAHUN 2024						-					
1	Non Kapitasi Klaim Pending Okt	560.000,00		560.000,00	21 Februari 2025		-					56.000,00
2	Non Kapitasi Klaim November	12.075.000,00		12.075.000,00	20 Januari 2025		-					1.207.500,00
3	Non Kapitasi Klaim Desember		4.075.000,00	4.075.000,00	21 Februari 2025		-					

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Koreksi Kurang Catat Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang Audited 2025	Ket	Penyisihan Piutang 2025			Penyisihan Piutang 2024
				Pengurangan 2025		Penambahan Piutang 2025			Kualitas Piutang 2025	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang 2025	
				Pembayaran	Tgl Bayar							
4	Non Kapitasi Klaim Pending Desember		560.000,00	560.000,00	14 April 2025		-					
5	Non Kapitasi Prolanis Oktober	10.636.000,00		10.636.000,00	10 Januari 2025		-					1.063.600,00
6	Non Kapitasi Prolanis Nov	8.756.000,00		8.756.000,00	21 Februari 2025		-					875.600,00
7	Non Kapitasi Prolanis Des	9.637.000,00		9.637.000,00	21 Februari 2025		-					48.185,00
3.	PUSKESMAS KOTO BESAR	-	-	-		27.348.200,00	27.348.200,00				5.225.685,00	-
	TAHUN 2025											
1	Non Kapitasi Prolanis September 2025					408.000,00	408.000,00	11 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	102.000,00	
2	Non Kapitasi Prolanis Oktober 2025					908.000,00	908.000,00	11 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	227.000,00	
3	Klaim Non Kapitasi Oktober					11.558.200,00	11.558.200,00	02 Maret 2026	Kurang Lancar	25,00%	2.889.550,00	
4	Klaim Non Kapitasi November					7.897.000,00	7.897.000,00	02 MAret 2026	Kurang Lancar	25,00%	1.974.250,00	
5	Klaim Non Kapitasi Desember					6.577.000,00	6.577.000,00	02 Maret 2026	Lancar	0,50%	32.885,00	
4.	PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	27.050.000,00	9.462.000,00	36.512.000,00		48.072.000,00	48.072.000,00				7.815.515,00	2.705.000,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim Non Kapitasi Oktober 2025					16.127.000,00	16.127.000,00	21 Januari 2026	Kurang lancar	25,00%	4.031.750,00	
2	Klaim Non Kapitasi November 2025					14.792.000,00	14.792.000,00	02 Maret 2026	Kurang lancar	25,00%	3.698.000,00	
3	Klaim Non Kapitasi Desember 2025					17.153.000,00	17.153.000,00	02 Maret 2026	Lancar	0,50%	85.765,00	
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim Non Kapitasi September 2024	9.984.000,00		9.984.000,00	02 Januari 2025		-					998.400,00
2	Klaim Non Kapitasi Oktober 2024	7.302.000,00		7.302.000,00	02 Januari 2025		-					730.200,00
3	Klaim Non Kapitasi November 2024	9.764.000,00		9.764.000,00	30 Januari 2025		-					976.400,00
4	Klaim Non Kapitasi Desember 2024		9.462.000,00	9.462.000,00	17 Maret 2025		-					
5	PUSKESMAS KOTO BARU	95.910.000,00	45.975.000,00	141.885.000,00		71.105.000,00	71.105.000,00				17.776.250,00	9.591.000,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim Non Kapitasi November 2025					71.105.000,00	71.105.000,00	04 FEBRUARI 2026	Kurang Lancar	25,00%	17.776.250,00	
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim Non Kapitasi November 2024	59.025.000,00		59.025.000,00	20 JANUARI 2025		-					5.902.500,00
2	Klaim Non Kapitasi Oktober 2024	36.885.000,00		36.885.000,00	24 JANUARI 2025		-					3.688.500,00
3	Klaim Non Kapitasi Desember 2024		45.975.000,00	45.975.000,00	21 FEBRUARI 2025		-					
6.	PUSKESMAS TIUMANG	2.860.000,00	-	2.860.000,00		13.419.000,00	13.419.000,00				3.354.750,00	286.000,00
	TAHUN 2025											
1	Klem prolanis bulan oktober 2025					9.883.000,00	9.883.000,00	07 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	2.470.750,00	
2	Klem Non Kapitasi bulan november 2025					3.536.000,00	3.536.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	884.000,00	
	TAHUN 2024						-					
1.	Piutang Prolanis bulan oktober 2024	2.860.000,00		2.860.000,00	08 Januari 2025		-					286.000,00
7.	PUSKESMAS PADANG LAWEH	41.511.000,00	-	41.511.000,00		28.796.000,00	28.796.000,00				3.948.095,00	2.919.235,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim Non Kapitasi November 2025					10.673.100,00	10.673.100,00	02 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	2.668.275,00	
2	Klaim BPJS Ketenagakerjaan November 2025					4.853.900,00	4.853.900,00	22 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	1.213.475,00	
3	Klaim Non Kapitasi Desember 2025					10.250.000,00	10.250.000,00	04 Februari 2026	Lancar	0,50%	51.250,00	
4	Klaim BPJS Ketenagakerjaan Desember 2025					1.019.000,00	1.019.000,00	05 Februari 2026	Lancar	0,50%	5.095,00	
5	Kalim Non Kapitasi Pending Desember 2025					2.000.000,00	2.000.000,00	02 Maret 2026	Lancar	0,50%	10.000,00	
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim Non Kapitasi Oktober 2024	9.625.000,00		9.625.000,00	21 Februari 2025		-					962.500,00
2	Klaim Non Kapitasi Pending Oktober 2024	600.000,00		600.000,00	07 Maret 2025		-					60.000,00
3	Klaim BPJS Ketenagakerjaan Oktober 2024	952.000,00		952.000,00	24 Januari 2025		-					95.200,00
4	Klaim Non Kapitasi November 2024	11.060.000,00		11.060.000,00	30 Januari 2025		-					1.106.000,00
5	Klaim Non Kapitasi Pending November 2024	5.120.000,00		5.120.000,00	21 Februari 2025		-					512.000,00
6	Klaim BPJS Ketenagakerjaan November 2024	1.187.000,00		1.187.000,00	24 Januari 2025		-					118.700,00

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Koreksi Kurang Catat Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang Audited 2025	Ket	Penyisihan Piutang 2025			Penyisihan Piutang 2024
				Pengurangan 2025		Penambahan Piutang 2025			Kualitas Piutang 2025	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang 2025	
				Pembayaran	Tgl Bayar							
7	Klaim Non Kapitasi Desember 2024	12.385.000,00		12.385.000,00	30 Januari 2025		-					61.925,00
8	Klaim Non Kapitasi Pending Desember 2024	300.000,00		300.000,00	21 Februari 2025		-					1.500,00
9	Klaim BPJS Ketenagakerjaan Desember 2024	282.000,00		282.000,00	24 Januari 2025		-					1.410,00
8.	PUSKESMAS SITIUNG I	91.155.000,00	-	91.155.000,00		45.431.000,00	45.431.000,00				1.584.700,00	5.512.150,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim Ranap Ugd September 2025					1.440.000,00	1.440.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	360.000,00	
2	Klaim Ranap Ugd Oktober 2025					480.000,00	480.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	120.000,00	
3	Klaim Ranap Ugd November 2025					1.440.000,00	1.440.000,00	06 Maret 2026	Kurang Lancar	25,00%	360.000,00	
4	Klaim Ranap Ugd Desember 2025					38.830.000,00	38.830.000,00	06 Maret 2026	Lancar	0,50%	194.150,00	
5	Klaim Rujukan Ugd Pending Desember 2025					260.000,00	260.000,00	06 Maret 2026	Lancar	0,50%	1.300,00	
6	Klaim Prolanis November 2025					2.181.000,00	2.181.000,00	02 Februan 2026	Kurang Lancar	25,00%	545.250,00	
7	Klaim Prolanis Desember 2025					800.000,00	800.000,00	04 Maret 2026	Lancar	0,50%	4.000,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim Ranap Ugd Oktober 2024	24.180.000,00		24.180.000,00	02 Januari 2025		-					2.418.000,00
2	Klaim Ranap Ugd Oktober 2024	1.960.000,00		1.960.000,00	21 Februari 2025		-					196.000,00
3	Klaim Ranap Ugd November 2024	27.085.000,00		27.085.000,00	21 Februari 2025		-					2.708.500,00
4	Klaim Ranap Ugd Desember 2024	33.230.000,00		33.230.000,00	21 Februari 2025		-					166.150,00
5	Klaim Ranap Ugd Desember 2024	4.340.000,00		4.340.000,00	17 Maret 2025		-					21.700,00
6	Klaim Tenaga Kerja Desember 2024	90.000,00		90.000,00	23 Januari 2025		-					450,00
7	Klaim Tenaga Kerja Desember 2024	270.000,00		270.000,00	06 Februari 2025		-					1.350,00
9.	PUSKESMAS TIMPEH	28.020.000,00	-	28.020.000,00		76.403.000,00	76.403.000,00				10.752.375,00	1.255.400,00
	TAHUN 2025											
1	KLAIM DESEMBER 2025					23.455.000,00	23.455.000,00	28 Januari 2026	Lancar	0,50%	117.275,00	
2	PROLANIS SEPTEMBER 2025					13.280.000,00	13.280.000,00	07 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	3.320.000,00	
3	PROLANIS OKTOBER 2025					13.398.000,00	13.398.000,00	11 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	3.349.500,00	
4	PROLANIS NOVEMBER 2025					15.650.000,00	15.650.000,00	11 Maret 2026	Kurang Lancar	25,00%	3.912.500,00	
5	PROLANIS DESEMBER 2025					10.620.000,00	10.620.000,00	13 Maret 2026	Lancar	0,50%	53.100,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	KLAIM NOVEMBER 2024	7.020.000,00		7.020.000,00	21 Januari 2025		-					702.000,00
2	KLAIM DESEMBER 2024	13.920.000,00		13.920.000,00	24 Januari 2025		-					69.600,00
3	PROLANIS OKTOBER 2024	2.360.000,00		2.360.000,00	20 Januari 2025		-					236.000,00
4	PROLANIS NOVEMBER 2024	2.360.000,00		2.360.000,00	20 Januari 2025		-					236.000,00
5	PROLANIS DESEMBER 2024	2.360.000,00		2.360.000,00	20 Januari 2025		-					11.800,00
10.	PUSKESMAS GUNUNG MEDAN	-	8.055.000,00	8.055.000,00		15.179.000,00	15.179.000,00				1.982.730,00	-
	TAHUN 2025											
1	Klem Oktober 2025					6.129.000,00	6.129.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	1.532.250,00	
2	Klem November 2025					1.654.000,00	1.654.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	413.500,00	
3	Klem Desember 2025					7.396.000,00	7.396.000,00	28 Januari 2026	Lancar	0,50%	36.980,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	Klem Oktober 2024		4.050.000,00	4.050.000,00	21 Februari 2025		-					
2	Klem November 2024		350.000,00	350.000,00	21 Februari 2025		-					
3	Klem November 2024		1.000.000,00	1.000.000,00	17 Maret 2025		-					
4	Klem Desember 2024		1.295.000,00	1.295.000,00	21 Februari 2025		-					
5	Klem Desember 2024		1.360.000,00	1.360.000,00	17 Maret 2025		-					
11.	PUSKESMAS SITIUNG II	2.800.000,00	-	2.800.000,00		9.847.000,00	9.847.000,00				1.285.995,00	280.000,00
	TAHUN 2025											
1	Non Kapitasi nov 25					2.098.000,00	2.098.000,00	02 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	524.500,00	
2	Prolanis nov 25					2.950.000,00	2.950.000,00	30 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	737.500,00	
3	Non Kapitasi des 25					850.000,00	850.000,00	04 Februari 2026	Lancar	0,50%	4.250,00	
4	Prolanis des 25					3.949.000,00	3.949.000,00	13 Maret 2026	Lancar	0,50%	19.745,00	

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)	Nilai Piutang 2024	Koreksi Kurang Catat Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang Audited 2025	Ket	Penyisihan Piutang 2025			Penyisihan Piutang 2024
				Pengurangan 2025		Penambahan Piutang 2025			Kualitas Piutang 2025	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang 2025	
				Pembayaran	Tgl Bayar							
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	Klem prolanis november	2.800.000,00		2.800.000,00	13 Januari 2025		-					280.000,00
12.	PUSKESMAS BERINGIN SAKTI	43.182.000,00	-	43.182.000,00		81.123.000,00	81.123.000,00				13.786.780,00	2.279.785,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim Non Kapitasi (Prolanis) Bulan Oktober 2025					26.468.000,00	26.468.000,00	19 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	6.617.000,00	
2	Klaim Non Kapitasi November 2025					3.897.000,00	3.897.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	974.250,00	
3	Klaim Non Kapitasi (Prolanis) Bulan November 2025					24.252.000,00	24.252.000,00	13 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	6.063.000,00	
4	Klaim Non Kapitasi Bulan Desember 2025					1.026.000,00	1.026.000,00	9 Februari 2026	Lancar	0,50%	5.130,00	
5	Klaim Non Kapitasi (Prolanis) Bulan Desember 2025					25.480.000,00	25.480.000,00	20 Februari 2026	Lancar	0,50%	127.400,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim nion Kapitasi (Prolanis) Bulan November 2024	20.410.000,00		20.410.000,00	15 Januari 2025		-					2.041.000,00
2	Klaim non Kapitasi Bulan November 2024	1.315.000,00		1.315.000,00	24 Januari 2025		-					131.500,00
3	Klaim non Kapitasi (prolanis) Bulan Desember 2024	20.345.000,00		20.345.000,00	10 Februari 2025		-					101.725,00
4	Klaim non Kapitasi Bulan Desember 2024	1.112.000,00		1.112.000,00	21 Februari 2025		-					5.560,00
13.	PUSKESMAS SILAGO	46.725.000,00	-	46.725.000,00		58.568.000,00	58.568.000,00				7.331.200,00	2.512.770,00
	TAHUN 2025											
1	klaim non kapitasi bln november					28.728.000,00	28.728.000,00	21 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	7.182.000,00	
2	klaim non kapitasi bln desember					29.840.000,00	29.840.000,00	04 Februari 2026	Lancar	0,50%	149.200,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	klaim non kapitasi bln november	23.991.000,00		23.991.000,00	30 Januari 2025		-					2.399.100,00
2	klaim non kapitasi bln desember	22.734.000,00		22.734.000,00	22 Maret 2025		-					113.670,00
14.	PUSKESMAS SUNGAI DAREH	5.808.000,00	-	5.808.000,00		12.493.000,00	12.493.000,00				3.123.250,00	378.640,00
	TAHUN 2025											
1	Prolanis Okt 25					2.768.000,00	2.768.000,00	28 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	692.000,00	
2	Klaim Nov 2025					9.725.000,00	9.725.000,00	28 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	2.431.250,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	Klaim Okt 2024	800.000,00		800.000,00	10 Januari 2025		-					80.000,00
2	Klaim Nov 2024	2.880.000,00		2.880.000,00	10 Januari 2025		-					288.000,00
3	Klaim Des 2024	2.128.000,00		2.128.000,00	24 Februari 2025		-					10.640,00
15.	PUSKESMAS SIALANG	6.577.000,00	-	2.952.000,00		9.952.000,00	13.577.000,00				5.755.300,00	3.920.200,00
	TAHUN 2025											
1	Klaim November ASN					2.590.000,00	2.590.000,00	04 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	647.500,00	
2	Klaim Desember ASN					1.460.000,00	1.460.000,00	09 Februari 2026	Lancar	0,50%	7.300,00	
3	Prolanis Oktober ASN					3.122.000,00	3.122.000,00	28 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	780.500,00	
4	Prolanis November ASN					2.780.000,00	2.780.000,00	11 Februari 2026	Kurang Lancar	25,00%	695.000,00	
							-					
	TAHUN 2024						-					
1	PIUTANG BPJS 2018	2.125.000,00		0,00			2.125.000,00	Belum dibayar	Macet	100,00%	2.125.000,00	2.125.000,00
2	PIUTANG BPJS 2019	1.500.000,00		0,00			1.500.000,00	Belum dibayar	Macet	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Prolanis Oktober 2024	1.489.000,00		1.489.000,00	15 Januari 2025		-					148.900,00
4	Prolanis November 2024	1.463.000,00		1.463.000,00	15 Januari 2025		-					146.300,00
17.	LABKESDA	-	-	-		6.380.000,00	6.380.000,00				1.595.000,00	
	TAHUN 2025											-
1	Klaim Prolanis BPJS Kesehatan Promotif November 2025					6.380.000,00	6.380.000,00	02 Januari 2026	Kurang Lancar	25,00%	1.595.000,00	
	Jumlah	836.749.539,00	265.884.330,00	1.099.008.869,00	-	1.217.527.904,00	1.221.152.904,00	-	-	-	133.952.566,74	50.285.212,94

**BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]

NO	SKPD	URAIAN	HIBAH UANG		NOMOR SP2D	TGL SP2D
			ANGGARAN	REALISASI		
		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela				
		- Pembayaran Final 100% = Rp. 17.000.000 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Niralaba, suka Rela	1.387.000.000,00	17.000.000,00	13.10/04.0/000210/LS/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/PR/12/2025	29/12/2025
		Jumlah	2.637.000.000,00	789.079.615,00		
		Jumlah II	3.946.000.000,00	1.468.996.515,00		
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik						
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sbb :				
		1 Partai Amanat Nasional	118.560.555,00	118.560.555,00	13.10/04.0/000046/LS/8.01.0.0 0.0.00.01.0000/P4/8/2025(14/A gt/2025)/2025	19 /08/2025
		2 Partai Golongan Karya	175.268.170,00	175.268.170,00		
		3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	173.400.860,00	173.400.860,00		
		4 Partai Gerakan Indonesia Raya	108.610.655,00	108.610.655,00		
		5 Partai Kebangkitan Bangsa	104.085.495,00	104.085.495,00		
		6 Partai Demokrat	65.533.040,00	65.533.040,00		
		7 Partai Nasional Demokrat	56.932.510,00	56.932.510,00		
		8 Partai Keadilan Sejahtera	53.422.785,00	53.422.785,00		
		9 Partai Persatuan Pembangunan	41.728.245,00	41.728.245,00		
		10 Partai Hati Nurajani Rakyat	38.422.970,00	38.422.970,00		
		Jumlah III	935.965.285,00	935.965.285,00		
Belanja Hibah Dana BOSP						
1	Dinas Pendidikan	1 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.359.500.000,00	4.351.332.000,00	SP3B Nomor : 900/36/DISDIK-2026	1/8/2026
					SP3B Nomor :900/37/DISDIK-2026	1/8/2026
		2 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.426.465.000,00	3.380.002.143,00	SP3B Nomor : 900/46/Disdik/2025	12/31/2026
		3 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	797.900.000,00	773.316.000,00	SP3B Nomor 900/48/Disdik/2025	12/31/2026
		Jumlah	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00		
		Jumlah IV	8.583.865.000,00	8.504.650.143,00		
		Jumlah I+II+III+IV+V+VI	13.646.830.285,00	11.090.591.943,00		

LAMPIRAN 7

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2025

KODE REKENING	URAIAN	KABUPATEN		DINAS PENDIDIKAN		DINAS KESEHATAN		RSUD dan BLUD Puskesmas	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3		4		5		6	
5.2	BELANJA MODAL	58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	5.346.059.671,00	5.053.196.234,83	8.586.598.485,00	6.221.826.202,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.255.474.863,00	12.620.746.293,00	4.969.437.700,00	4.944.120.588,00	86.400.000,00	84.180.750,00	3.223.998.485,00	2.671.807.223,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.215.000.000,00	1.110.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	650.000.000,00	545.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.834.000.000,00	1.649.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.834.000.000,00	1.649.902.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.500.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.500.000,00	5.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.538.871.250,00	2.006.252.290,00	866.000.000,00	865.821.988,00	22.000.000,00	21.894.750,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	154.750.000,00	141.238.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.372.121.250,00	1.853.022.990,00	866.000.000,00	865.821.988,00	22.000.000,00	21.894.750,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	11.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	269.146.100,00	192.543.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	247.646.100,00	173.377.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	21.500.000,00	19.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	939.615.000,00	929.150.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.850.000,00	899.615.000,00	890.300.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	939.615.000,00	929.150.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	38.850.000,00	899.615.000,00	890.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.336.184.000,00	1.217.437.662,00	762.900.000,00	737.980.500,00	24.400.000,00	23.436.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.203.059.000,00	1.126.558.722,00	747.900.000,00	724.327.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	133.125.000,00	90.878.940,00	15.000.000,00	13.653.000,00	9.400.000,00	8.436.000,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	387.500.000,00	324.500.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	387.500.000,00	324.500.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	64.737.328,00	63.306.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	64.737.328,00	63.306.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.619.600,00	35.400.000,00	35.619.600,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.619.600,00	35.400.000,00	35.619.600,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	3.304.918.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.223.031.100,00	3.223.031.100,00	3.223.031.100,00	3.223.031.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	81.887.000,00	81.887.000,00	81.887.000,00	81.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.383.485,00	1.781.507.223,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.722.171.276,50	16.965.018.966,71	9.034.411.580,50	8.330.872.323,64	3.163.439.671,00	2.894.015.484,83	4.939.600.000,00	3.442.428.972,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	23.015.783.276,50	15.375.518.773,71	8.562.523.580,50	7.883.337.200,64	2.733.439.671,00	2.465.475.884,83	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00

KODE REKENING	URAIAN	KABUPATEN		DINAS PENDIDIKAN		DINAS KESEHATAN		RSUD dan BLUD Puskesmas	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3		4		5		6	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.556.212.017,50	15.215.869.547,89	8.102.952.321,50	7.723.687.974,82	2.733.439.671,00	2.465.475.884,83	4.135.100.000,00	2.729.003.502,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	459.571.259,00	159.649.225,82	459.571.259,00	159.649.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	901.888.000,00	876.074.723,00	471.888.000,00	447.535.123,00	430.000.000,00	428.539.600,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	901.888.000,00	876.074.723,00	471.888.000,00	447.535.123,00	430.000.000,00	428.539.600,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	804.500.000,00	713.425.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.500.000,00	713.425.470,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	804.500.000,00	713.425.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.500.000,00	713.425.470,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.138.190.500,00	11.201.347.218,59	0,00	0,00	2.096.220.000,00	2.075.000.000,00	423.000.000,00	107.590.007,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	10.970.000.000,00	8.502.962.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	299.000.000,00	199.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.285.430.000,00	2.262.996.593,80	0,00	0,00	2.096.220.000,00	2.075.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	69.210.000,00	69.125.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	120.000.000,00	118.870.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	597.000.000,00	591.000.000,00	0,00	0,00	597.000.000,00	591.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.499.220.000,00	1.484.000.000,00	0,00	0,00	1.499.220.000,00	1.484.000.000,00	0,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	60.768.000,00	56.801.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	60.768.000,00	56.801.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	99.992.500,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	99.992.500,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	423.000.000,00	107.590.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000.000,00	107.590.007,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	423.000.000,00	107.590.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000.000,00	107.590.007,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.634.561.060,00	4.617.797.530,00	4.292.053.560,00	4.285.797.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	84.001.500,00	83.894.000,00	74.894.000,00	74.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	84.001.500,00	83.894.000,00	74.894.000,00	74.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah	32.000.000,00	31.899.970,00	32.000.000,00	31.899.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	32.000.000,00	31.899.970,00	32.000.000,00	31.899.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	280.000.000,00	269.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	4.185.159.560,00	4.179.003.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.122.493.560,00	4.116.337.560,00	4.122.493.560,00	4.116.337.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	62.666.000,00	62.666.000,00	62.666.000,00	62.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	260.051.000,00	251.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	260.051.000,00	251.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	260.051.000,00	251.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		58.010.448.699,50	45.656.214.008,30	18.295.902.840,50	17.560.790.441,64	5.346.059.671,00	5.053.196.234,83	8.586.598.485,00	6.221.826.202,00

[illegible]

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan		Dinas Pangan dan Perikanan	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7		8		9		10		11		12	
5.207.148.695,00	314.684.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.438.202.500,00	8.843.084.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.768.000,00	175.672.486,59
11.269.000.000,00	8.702.958.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.970.000.000,00	8.502.962.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299.000.000,00	199.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.210.000,00	69.125.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	118.870.771,80
69.210.000,00	69.125.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	118.870.771,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768.000,00	56.801.714,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.768.000,00	56.801.714,79
99.992.500,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.992.500,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.319.351.195,00	9.727.269.213,00	0,00	0,00	553.500.000,00	442.474.999,00	25.500.000,00	25.328.000,00	2.005.654.970,00	1.612.182.335,24	299.768.000,00	293.472.486,59

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DBH PAJAK KE NAGARI TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN & NAGARI	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	234.583.500	34.094.250	140.564.900	27.975.550	437.218.200
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	46.926.750			27.975.550	74.902.300
	2 Nagari Gunung Selasih	34.311.750		22.874.250		57.186.000
	3 Nagari Sungai Dareh	51.179.250		31.585.650		82.764.900
	4 Nagari Tebing Tinggi		34.094.250	23.273.200		57.367.450
	5 Nagari Sikabau	49.401.750		34.014.150		83.415.900
	6 Nagari Sungai Kambut	52.764.000		28.817.650		81.581.650
II	KECAMATAN SITIUNG	77.894.250	36.482.250	101.228.700	-	215.605.200
	1 Nagari Siguntur		36.482.250	24.939.300		61.421.550
	2 Nagari Sitiung			24.484.400		24.484.400
	3 Nagari Gunung Medan	43.467.750		28.692.100		72.159.850
	4 Nagari Sungai Duo	34.426.500		23.112.900		57.539.400
III	KECAMATAN KOTO BARU	-	183.993.450	110.957.500	-	294.950.950
	1 Nagari Koto Baru		66.100.950	31.273.000		97.373.950
	2 Nagari Ampang Kuranji		36.013.500	23.715.500		59.729.000
	3 Nagari Sialang gaung		41.777.250	29.613.300		71.390.550
	4 Nagari Koto padang		40.101.750	26.355.700		66.457.450
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	36.881.250	61.306.500	67.111.600	20.155.100	185.454.450
	1 Nagari Sungai Rumbai			21.943.450		21.943.450
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur		30.456.000	20.784.400		51.240.400
	3 Nagari Kurnia Koto Salak		30.850.500		20.155.100	51.005.600
	4 Nagari Kurnia Selatan	36.881.250		24.383.750		61.265.000
V	KECAMATAN IX KOTO	34.926.000	36.737.250	111.390.400	-	183.053.650
	1 Nagari Silago	34.926.000		24.860.950		59.786.950
	2 Nagari Lubuk Karak			21.993.600		21.993.600
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawuah		36.737.250	29.510.100		66.247.350
	4 Nagari Banai			35.025.750		35.025.750
VI	KECAMATAN TIMPEH	-	143.463.000	113.892.000	-	257.355.000
	1 Nagari Timpeh		36.700.500	22.896.050		59.596.550
	2 Nagari Taratak Tinggi		35.428.500	23.294.250		58.722.750
	3 Nagari Tabek		35.371.500	24.308.100		59.679.600
	4 Nagari Panyubarangan		35.962.500	24.935.450		60.897.950
	5 Nagari Ranah Palabi			18.458.150		18.458.150
VII	KECAMATAN KOTO SALAK	57.165.750	64.825.500	105.434.850	-	227.426.100
	1 Nagari Koto Salak		30.867.750	21.159.700		52.027.450
	2 Nagari Padukuan		33.957.750	23.192.050		57.149.800
	3 Nagari Pulau Mainan	29.523.750		20.277.900		49.801.650
	4 Nagari Simalidu			21.384.650		21.384.650
	5 Nagari Ampalu	27.642.000		19.420.550		47.062.550
VIII	KECAMATAN ASAM JUJAHAN	24.180.750	36.627.000	128.473.600	-	189.281.350
	1 Nagari Sungai Limau			23.791.100		23.791.100
	2 Nagari Sinamar			29.658.650		29.658.650
	3 Nagari Lubuk Besar			32.960.050		32.960.050
	4 Nagari Tanjung Alam	24.180.750		16.020.350		40.201.100
	5 Nagari Alahan Nan Tigo		36.627.000	26.043.450		62.670.450
IX	KECAMATAN KOTO BESAR	68.906.250	50.616.750	176.519.750	-	296.042.750
	1 Nagari Koto Besar			26.304.550		26.304.550
	2 Nagari Abai Siat	35.885.250		24.360.300		60.245.550
	3 Nagari Bonjol		50.616.750	37.464.900		88.081.650
	4 Nagari Koto Gadang	33.021.000		22.128.750		55.149.750
	5 Nagari Koto Laweh			19.821.500		19.821.500
	6 Nagari Koto Tinggi			20.136.600		20.136.600
	7 Nagari Koto Ranah			26.303.150		26.303.150
X	KECAMATAN PADANG LAWEH	-	50.829.000	41.528.950	35.431.050	127.789.000
	1 Nagari Padang Laweh			22.295.350		22.295.350
	2 Nagari Batu Rijal		25.584.000	19.233.600		44.817.600
	3 Nagari Sopan Jaya				18.689.900	18.689.900
	4 Nagari Muaro Sopan		25.245.000		16.741.150	41.986.150
XI	KECAMATAN TIUMANG	-	94.347.000	82.421.022	-	176.768.022
	1 Nagari Tiumbang		35.723.250	23.744.400		59.467.650
	2 Nagari Koto Beringin		29.500.500	19.048.850		48.549.350
	3 Nagari Sipangkur		29.123.250	19.195.450		48.318.700
	4 Nagari Sungai Langkok			20.432.322		20.432.322
	TOTAL DBH	534.537.750	793.321.950	1.179.523.272	83.561.700	2.590.944.672

**TRANSFER BAGI HASIL RETRIBUSI
DBH RETRIBUSI KE NAGARI TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN & NAGARI	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	27.194.250	3.952.500	4.656.300	1.015.050	36.818.100
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	5.439.750			1.015.050	6.454.800
	2 Nagari Gunung Selasih	3.977.250	-	744.000		4.721.250
	3 Nagari Sungai Dareh	5.933.250		1.048.050		6.981.300
	4 Nagari Tebing Tinggi		3.952.500	745.350		4.697.850
	5 Nagari Sikabau	5.727.000		1.081.050		6.808.050
	6 Nagari Sungai Kambut	6.117.000		1.037.850		7.154.850
II	KECAMATAN SITIUNG	9.030.000	4.229.250	3.264.450	-	16.523.700
	1 Nagari Siguntur		4.229.250	787.050		5.016.300
	2 Nagari Sitiung			870.150		870.150
	3 Nagari Gunung Medan	5.039.250		872.100		5.911.350
	4 Nagari Sungai Duo	3.990.750		735.150		4.725.900
III	KECAMATAN KOTO BARU	-	21.923.250	3.578.550	-	25.501.800
	1 Nagari Koto Baru		8.256.750	1.081.500		9.338.250
	2 Nagari Ampang Kuranji		4.175.250	781.800		4.957.050
	3 Nagari Sialang gaung		4.842.750	924.750		5.767.500
	4 Nagari Koto padang		4.648.500	790.500		5.439.000
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	4.275.750	7.106.250	14.156.000	4.393.000	29.931.000
	1 Nagari Sungai Rumbai			4.625.000		4.625.000
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur		3.530.250	4.265.000		7.795.250
	3 Nagari Kurnia Koto Salak		3.576.000		4.393.000	7.969.000
	4 Nagari Kurnia Selatan	4.275.750		5.266.000		9.541.750
V	KECAMATAN IX KOTO	4.048.500	4.258.500	3.287.400	-	11.594.400
	1 Nagari Silago	4.048.500		775.200		4.823.700
	2 Nagari Lubuk Karak			617.550		617.550
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawuah		4.258.500	817.350		5.075.850
	4 Nagari Banai			1.077.300		1.077.300
VI	KECAMATAN TIMPEH	-	16.631.250	3.692.850	-	20.324.100
	1 Nagari Timpeh		4.254.750	782.850		5.037.600
	2 Nagari Taratak Tinggi		4.107.000	759.750		4.866.750
	3 Nagari Tabek		4.100.250	769.950		4.870.200
	4 Nagari Panyubarangan		4.169.250	788.250		4.957.500
	5 Nagari Ranah Palabi			592.050		592.050
VII	KECAMATAN KOTO SALAK	6.627.000	7.515.000	3.220.200	-	17.362.200
	1 Nagari Koto Salak		3.578.250	657.600		4.235.850
	2 Nagari Padukuan		3.936.750	742.350		4.679.100
	3 Nagari Pulau Mainan	3.422.250		633.450		4.055.700
	4 Nagari Simalidu			600.750		600.750
	5 Nagari Ampalu	3.204.750		586.050		3.790.800
VIII	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	2.803.500	4.245.750	3.716.100	-	10.765.350
	1 Nagari Sungai Limau			665.100		665.100
	2 Nagari Sinamar			791.250		791.250
	3 Nagari Lubuk Besar			926.550		926.550
	4 Nagari Tanjung Alam	2.803.500		513.450		3.316.950
	5 Nagari Alahan Nan Tigo		4.245.750	819.750		5.065.500
IX	KECAMATAN KOTO BESAR	7.988.250	5.868.000	5.497.050	-	19.353.300
	1 Nagari Koto Besar			807.000		807.000
	2 Nagari Abai Siat	4.160.250		787.650		4.947.900
	3 Nagari Bonjol		5.868.000	1.164.000		7.032.000
	4 Nagari Koto Gadang	3.828.000		703.950		4.531.950
	5 Nagari Koto Laweh			667.350		667.350
	6 Nagari Koto Tinggi			637.350		637.350
	7 Nagari Koto Ranah			729.750		729.750
X	KECAMATAN PADANG LAWEH	-	5.892.000	1.142.550	1.112.850	8.147.400
	1 Nagari Padang Laweh			594.450		594.450
	2 Nagari Batu Rijal		2.965.500	548.100		3.513.600
	3 Nagari Sopan Jaya				576.300	576.300
	4 Nagari Muaro Sopan		2.926.500		536.550	3.463.050
XI	KECAMATAN TIUMANG	-	10.937.250	2.665.800	-	13.603.050
	1 Nagari Tiumbang		4.141.500	768.600		4.910.100
	2 Nagari Koto Beringin		3.420.000	627.450		4.047.450
	3 Nagari Sipangkur		3.375.750	617.400		3.993.150
	4 Nagari Sungai Langkok			652.350		652.350
	TOTAL DBH	61.967.250	92.559.000	48.877.250	6.520.900	209.924.400

**LAPORAN REALISASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	KODE	NAMA NAGARI	EARMARK TAHAP 1	DANA DESA		ALOKASI DANA NAGARI		TOTAL PENERIMAAN
			ANGARAN	ANGARAN	REALISASI	ANGARAN	REALISASI	
1	2	3		4	5	6	7	8=5+7
1	01.2002	Nagari Koto Baru	582.260.000	1.509.300.000	1.509.300.000	1.698.842.520	1.695.149.190	3.204.449.190
2	01.2003	Nagari Sialang Gaung	618.963.700	1.174.210.000	1.174.210.000	1.580.762.040	1.575.272.190	2.749.482.190
3	01.2005	Nagari Ampang Kuranji	494.838.800	1.094.194.000	1.595.962.000	1.392.810.520	1.190.015.450	2.785.977.450
4	01.2008	Nagari Koto Padang	724.825.000	1.595.962.000	1.094.194.000	1.286.450.760	1.282.637.662	2.376.831.662
5	02.2001	Nagari Sungai Dareh	355.300.000	1.372.495.000	1.372.495.000	1.120.945.720	1.118.150.650	2.490.645.650
6	02.2002	Nagari Tebing Tinggi	322.464.900	1.194.068.000	1.194.068.000	975.698.120	973.352.180	2.167.420.180
7	02.2006	Nagari Empat Koto Pulau Punjung	846.269.000	1.557.567.000	1.557.567.000	1.358.034.840	1.354.940.350	2.912.507.350
8	02.2007	Nagari Sungai Kambut	1.304.026.980	1.360.234.000	1.360.234.000	1.468.320.840	1.465.076.640	2.825.310.640
9	02.2008	Nagari Gunung Selasih	370.890.000	1.034.873.000	1.034.873.000	1.139.934.520	1.137.438.870	2.172.311.870
10	02.2009	Nagari Sikabau	557.000.000	1.381.464.000	1.381.464.000	1.192.394.290	1.189.449.500	2.570.913.500
11	03.2003	Nagari Sungai Rumbai	550.191.730	1.279.309.000	1.279.309.000	1.101.849.240	1.099.353.590	2.378.662.590
12	03.2004	Nagari Kurnia Koto Salak	430.848.600	1.054.348.000	1.054.348.000	1.283.717.000	1.281.670.480	2.336.018.480
13	03.2007	Nagari Sungai Rumbai Timur	407.510.000	865.217.000	865.217.000	929.601.160	928.542.726	1.793.759.726
14	03.2008	Nagari Kurnia Selatan	595.173.000	1.203.199.000	1.203.199.000	1.275.012.520	1.271.079.654	2.474.278.654
15	04.2001	Nagari Sitiung	561.337.000	1.258.042.000	1.258.042.000	1.395.100.600	1.391.856.400	2.649.898.400
16	04.2002	Nagari Siguntur	478.800.000	1.467.970.000	1.467.970.000	1.733.529.000	1.729.805.728	3.197.775.728
17	04.2004	Pmerintah Gunung Medan	931.250.000	1.268.281.000	1.268.281.000	1.120.858.520	1.118.362.870	2.386.643.870
18	04.2005	Nagari Sungai Duo	668.853.700	1.393.510.000	1.393.510.000	1.380.766.300	1.377.432.274	2.770.942.274
19	05.2001	Nagari Silago	469.100.000	843.150.000	843.150.000	1.059.456.120	1.057.110.180	1.900.260.180
20	05.2002	Nagari Lubuak Karak	337.300.000	826.460.000	826.460.000	927.445.560	925.249.330	1.751.709.330
21	05.2003	Koto Nan Empat Dibawah	384.094.000	949.431.000	949.431.000	972.416.440	969.920.790	1.919.351.790
22	05.2004	Nagari Banai	505.607.140	1.340.162.000	1.340.162.000	1.194.390.040	1.193.092.070	2.533.254.070
23	06.2001	Nagari Timpeh	361.200.000	825.752.000	825.752.000	814.933.880	813.037.070	1.638.789.070
24	06.2002	Nagari Taratak Tinggi	663.600.000	1.112.389.000	1.112.389.000	1.247.136.840	1.244.940.610	2.357.329.610
25	06.2003	Nagari Tabek	448.052.000	970.766.000	970.766.000	1.128.628.760	1.126.133.110	2.096.899.110
26	06.2004	Nagari Panyubaringan	459.360.000	1.351.901.000	1.351.901.000	975.522.360	974.613.636	2.326.514.636
27	06.2005	Nagari Ranah Palabi	594.034.000	825.966.000	825.966.000	942.556.280	940.210.340	1.766.176.340
28	07.2001	Nagari Koto Salak	508.554.000	979.745.000	979.745.000	1.061.618.680	1.058.793.668	2.038.538.668
29	07.2002	Nagari Ampalu	467.916.000	844.388.000	844.388.000	943.373.800	940.878.150	1.785.266.150
30	07.2003	Nagari Padukuan	445.700.000	961.991.000	961.991.000	988.394.440	985.838.906	1.947.829.906
31	07.2004	Nagari Pulau Mainan	396.289.000	971.261.000	971.261.000	1.101.851.880	1.099.236.462	2.070.497.462
32	07.2005	Nagari Simalidu	460.627.100	913.430.000	913.430.000	989.698.040	987.651.520	1.901.081.520
33	08.2001	Nagari Tiumang	378.700.000	945.671.000	945.671.000	986.563.720	983.978.244	1.929.649.244
34	08.2002	Nagari Sungai Langkok	297.722.500	911.546.000	911.546.000	1.222.776.120	1.020.280.470	1.931.826.470
35	08.2003	Nagari Koto Beringin	298.028.200	918.226.440	803.043.000	918.226.440	915.880.500	1.718.923.500
36	08.2004	Nagari Sipangkur	287.800.000	886.808.000	886.808.000	949.618.760	947.272.820	1.834.080.820
37	09.2001	Nagari Padang Laweh	169.990.000	716.198.000	716.198.000	823.435.960	821.539.150	1.537.737.150
38	09.2002	Nagari Batu Rijal	354.423.000	782.103.000	782.103.000	869.242.680	867.196.160	1.649.299.160
39	09.2003	Nagari Muaro Sopian	292.224.400	684.980.000	684.980.000	724.800.840	722.904.030	1.407.884.030
40	09.2004	Nagari Sopian Jaya	296.487.450	876.585.000	876.585.000	792.418.360	790.671.260	1.667.256.260
41	10.2001	Nagari Sungai Limau	339.682.840	817.527.000	817.527.000	862.328.040	860.281.520	1.677.809.520
42	10.2002	Nagari Alahan Nan Tigo	466.187.600	1.010.438.000	1.010.438.000	821.757.960	819.771.324	1.830.209.324
43	10.2003	Nagari Lubuk Besar	413.245.900	1.103.670.000	1.103.670.000	805.054.280	804.115.614	1.907.785.614
44	10.2004	Nagari Tanjung Alam	313.171.400	714.719.000	714.719.000	776.723.000	775.425.030	1.490.144.030
45	10.2005	Nagari Sinamar	388.756.000	976.305.000	976.305.000	847.193.640	845.446.540	1.821.751.540
46	11.2001	Nagari Koto Besar	437.800.000	1.154.280.000	1.154.280.000	902.707.800	900.960.700	2.055.240.700
47	11.2002	Nagari Koto Tinggi	330.004.030	942.503.000	942.503.000	915.116.580	913.129.944	1.855.632.944
48	11.2003	Nagari Koto Gadang	414.068.800	1.325.344.000	1.325.344.000	931.044.840	928.998.320	2.254.342.320
49	11.2004	Nagari Bonjol	279.606.000	1.290.906.000	1.290.906.000	779.656.760	777.161.110	2.068.067.110
50	11.2005	Nagari Abai Siat	402.886.400	1.253.932.000	1.253.932.000	1.184.550.040	1.181.554.970	2.435.486.970
51	11.2006	Nagari Koto Laweh	378.800.000	902.303.000	902.303.000	886.018.760	884.181.834	1.786.484.834
52	11.2007	Nagari Koto Ranah	578.213.000	1.305.889.000	1.305.889.000	962.231.000	959.735.350	2.265.624.350
		JUMLAH	24.420.033.170	56.300.968.440	56.185.785.000	55.743.517.200	55.216.777.136	111.402.562.136

LAPORAN DAK FISIK TAHUN 2025
SISA DI RKUD PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	JENIS KONTRAK	NILAI KONTRAK	Transfer	NILAI SP2D	SISA KONTRAK
1	PAUD	KONTRAK TAHAP	-	-	-	-
		KONTRAK SEKALIGUS	1.591.246.500,00	1.585.175.610,00	1.585.175.610,00	6.070.890,00
			1.591.246.500,00	1.585.175.610,00	1.585.175.610,00	
2	SD	KONTRAK TAHAP				-
		KONTRAK SEKALIGUS	203.463.000,00	203.463.000,00	203.463.000,00	-
			203.463.000,00	203.463.000,00	203.463.000,00	
6	Penguatan Sistem Kesehatan	KONTRAK TAHAP	3.307.883.033,00	3.307.883.033,00	2.729.003.502,00	578.879.531,00
		KONTRAK SEKALIGUS	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	-
			5.382.883.033,00	5.382.883.033,00	4.804.003.502,00	
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	KONTRAK TAHAP	1.606.748.311,00	1.606.748.311,00	1.606.721.312,44	26.998,56
		KONTRAK SEKALIGUS	-	-	-	
			1.606.748.311,00	1.606.748.311,00	1.606.721.312,44	
						584.977.419,56

LAMPIRAN 11b

LAPORAN REALISASI DAK NON FISIK TAHUN 2025

SISA DI RKUD PER 31 DESEMBER 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Sisa 2024	Transfer 2025	Realisasi 2025	Sisa 2025
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	BOP PAUD	-	-	-		
2	BOP PAUD KESETARAAN	-	-	-		
3	TUNJANGAN PROFESI GURU	79.625.672.000,00	621.946.536,00	73.866.849.506,00	73.866.849.506,00	621.946.536,00
4	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	743.000.000,00	714.600.950,00	487.532.500,00	1.202.032.500,00	100.950,00
5	TUNJANGAN KHUSUS GURU	3.474.485.000,00	1.036.950.382,00	2.392.156.671,00	3.276.932.871,00	152.174.182,00
6	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	8.205.047.000,00	510.216.082,00	7.694.830.918,00	7.938.336.501,00	266.710.499,00
	BOK KAB/KOTA	7.917.298.000,00	510.216.082,00	7.407.081.918,00	7.650.736.701,00	266.561.299,00
	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	287.749.000,00	-	287.749.000,00	287.599.800,00	149.200,00
7	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)	4.076.212.000,00	94.373.850,00	3.981.838.150,00	3.084.692.812,00	991.519.188,00
8	BOP PERTANIAN	269.040.000,00	-	269.040.000,00	268.660.000,00	380.000,00
9	PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	505.690.000,00	92.007.687,00	413.682.313,00	445.035.290,00	60.654.710,00
		96.899.146.000,00	3.070.095.487,00	89.105.930.058,00	90.082.539.480,00	2.093.486.065,00

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
	TAHUN 2025						
1	Retribusi sampah Perumahan Alam Sakinah Sikabau bulan November 2025				160.000,00	160.000	3/11/2026
2	Retribusi sampah Perumahan Alam Sakinah Sikabau bulan Desember 2025				160.000,00	160.000	Belum dibayar
3	Retribusi sampah Perumahan Sakinah bulan Desember 2025				640.000,00	640.000	Belum dibayar
4	Retribusi sampah Perumahan Villa Tama bulan Novmber 2025				400.000,00	400.000	1/22/2026
5	Retribusi sampah Perumahan Villa Tama bulan Desember 2025				400.000,00	400.000	Belum dibayar
6	Retribusi sampah Perumahan Ranah Tibarau bulan Desember 2025				720.000,00	720.000	1/14/2026
7	Retribusi sampah perumahan Taratak Garden bulan Desember 2025				544.000,00	544.000	2/2/2026
8	Retribusi sampah Perumahan Rangkiang Ventura Residen bulan November 2025				320.000,00	320.000	2/3/2026
9	Retribusi sampah Perumahan Rangkiang Ventura Residen bulan Desember 2025				320.000,00	320.000	Belum dibayar
10	Retribusi sampah Perumahan Bumi Griya Indah Sei Dareh bulan November 2025				240.000,00	240.000	1/22/2026
11	Retribusi sampah Perumahan Bumi Griya Indah Sei Dareh bulan Desember 2025				240.000,00	240.000	Belum dibayar
12	Retribusi sampah Perum Citra Alam Permai II bulan Desember 2025				80.000,00	80.000	2/7/2026
13	Retribusi sampah Perum Citra Alam Permai I bulan November 2025				280.000,00	280.000	Belum dibayar
14	Retribusi sampah Perum Citra Alam Permai I bulan Desember 2025				280.000,00	280.000	Belum dibayar
15	Retribusi sampah Perumahan Lawai bulan November 2025				1.400.000,00	1.400.000	1/20/2026

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
16	Retribusi sampah Perumahan Lawai bulan Desember 2025				1.400.000,00	1.400.000	2/24/2026
17	Retribusi sampah Perumahan Timbulun Asri bulan Oktober 2025				176.000,00	176.000	1/2/2026
18	Retribusi sampah Perumahan Timbulun Asri bulan November 2025				176.000,00	176.000	1/2/2026
19	Retribusi sampah Perumahan Timbulun Asri bulan Desember 2025				176.000,00	176.000	Belum dibayar
20	Retribusi sampah Perum Dharmasraya Regency bulan Desember 2025				360.000,00	360.000	Belum dibayar
21	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan April 2025				3.000.000,00	3.000.000	1/2/2026
22	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Mei 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
23	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Juni 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
24	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Juli 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
25	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Agustus 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
26	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan September 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
27	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Oktober 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
28	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan November 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
29	Retribusi sampah Pasar Pulau Punjung Bulan Desember 2025				3.000.000,00	3.000.000	Belum dibayar
30	Retribusi sampah Pasar Modern Sungai Rumbai bulan Desember 2025				3.680.000,00	3.680.000	1/12/2026
31	Retribusi sampah Toko Citra Warna bulan November 2025				40.000,00	40.000	3/30/2026
32	Retribusi sampah Toko Citra Warna bulan Desember 2025				40.000,00	40.000	3/30/2026
33	Retribusi sampah Toko biglend /swalayan bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
34	Retribusi sampah Nagari Mart Gunung Medan bulan November 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
35	Retribusi sampah Nagari Mart Gunung Medan bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
36	Retribusi sampah Toko JF Furniture bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	1/7/2026
37	Retribusi sampah JF Swalayan bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
38	Retribusi sampah Hotel Sakato Jaya bulan September 2025				250.000,00	250.000	1/9/2026
39	Retribusi sampah Hotel Sakato Jaya bulan Oktober 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
40	Retribusi sampah Hotel Sakato Jaya bulan November 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
41	Retribusi sampah Hotel Sakato Jaya bulan Desember 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
42	Retribusi sampah Hotel jakarta Indah bulan Oktober 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
43	Retribusi sampah Hotel jakarta Indah bulan November 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
44	Retribusi sampah Hotel jakarta Indah bulan Desember 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
45	Retribusi sampah Kantor pengadilan Agama bulan Oktober 2025				150.000,00	150.000	2/27/2026
46	Retribusi sampah Kantor pengadilan Agama bulan November 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
47	Retribusi sampah Kantor pengadilan Agama bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
48	Retribusi sampah SMA unggul bulan Juni 2025				150.000,00	150.000	4/4/2026
49	Retribusi sampah SMA unggul bulan Juli 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
50	Retribusi sampah SMA unggul bulan Agustus 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
51	Retribusi sampah SMA unggul bulan September 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
52	Retribusi sampah SMA unggul bulan Oktober 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
53	Retribusi sampah SMA unggul bulan November 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
54	Retribusi sampah SMA unggul bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
55	Retribusi sampah Pondok Pesantren bulan November 2025				150.000,00	150.000	1/19/2026
56	Retribusi sampah Pondok Pesantren bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
57	Retribusi sampah PT AWB bulan Januari 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
58	Retribusi sampah PT AWB bulan Februari 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
59	Retribusi sampah PT AWB bulan Maret 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
60	Retribusi sampah PT AWB bulan April 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
61	Retribusi sampah PT AWB bulan Mei 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
62	Retribusi sampah PT AWB bulan Juni 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
63	Retribusi sampah PT AWB bulan Juli 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
64	Retribusi sampah PT AWB bulan Agustus 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
65	Retribusi sampah PT AWB bulan September 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
66	Retribusi sampah PT AWB bulan Oktober 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
67	Retribusi sampah PT AWB bulan November 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
68	Retribusi sampah PT AWB bulan Desember 2025				250.000,00	250.000	Belum dibayar
69	Retribusi sampah Puskesmas Sungai Dareh bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
70	Retribusi sampah Puskesmas Gunung Medan bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	2/26/2026
71	Retribusi sampah Toko Ferestri bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	1/12/2026
72	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan April 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
73	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Mei 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
74	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Juni 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
75	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Juli 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
76	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Agustus 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
77	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan September 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
78	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Oktober 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
79	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan November 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
80	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Desember 2025				40.000,00	40.000	Belum dibayar
81	Retribusi sampah Ampera Rania bulan Desember 2025				40.000,00	40.000	1/15/2026
82	Retribusi sampah Shanghai Yummi bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
83	Retribusi sampah kantor PT Incasi Raya Pangian bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	1/6/2026
84	Retribusi sampah Pesantren Koto baru 2 kali angkutan bulan Desember 2025				200.000,00	200.000	Belum dibayar
85	Retribusi sampah Pasar Koto Baru bulan Desember 2025 3 kali angkutan				300.000,00	300.000	Belum dibayar
86	Retribusi sampah perumahan Gunung Sari bulan Desember 2025				100.000,00	100.000	Belum dibayar
87	Retribusi sampah Perumahan Umega bulan Desember 2025				200.000,00	200.000	Belum dibayar
88	Retribusi sampah Perumahan Blok B bulan Desember 2025 3 kali angkutan				450.000,00	450.000	Belum dibayar

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
89	Retribusi sampah Perumahan Sungai Rumbai bulan Desember 2025				100.000,00	100.000	Belum dibayar
90	Retribusi sampah PT SAK kantor bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
91	Retribusi sampah kantor PT Dharmasraya Lestarindo bulan Desember 2025				150.000,00	150.000	Belum dibayar
92	Retribusi sampah Nagari IV Koto Bulan Desember 2025				2.220.000,00	2.220.000	1/23/2026
93	Retribusi sampah Nagari Sungai Dareh Bulan Desember 2025				800.000,00	800.000	Belum dibayar
94	Retribusi sampah Nagari Sungai Kambut Bulan Desember 2025				990.000,00	990.000	Belum dibayar
	Tahun 2024						Belum dibayar
1	Retribusi sampah pondok ikan rawang bulan Juli - Desember 2022	900.000				900.000	Belum dibayar
2	Retribusi sampah Perumahan Sakinah Bulan Desember 2023	550.000				550.000	Belum dibayar
3	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Juni 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
4	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Juli 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
5	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Agustus 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
6	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan September 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
7	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Oktober 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
8	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan November 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
9	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Desember 2023	150.000				150.000	Belum dibayar
10	Retribusi sampah Perumahan Sakinah bulan Desember 2024	640.000	640.000	10 Januari 2025		0,00	Belum dibayar
11	Retribusi sampah Perumahan Ranah Tibarau bulan November 2024	704.000	704.000	28 Januari 2025		0,00	Belum dibayar
12	Retribusi sampah Perumahan Ranah Tibarau bulan Desember 2024	704.000	704.000	14 Februari 2025		0,00	Belum dibayar
13	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan Oktober 2024	640.000	640.000	10 Januari 2025		0,00	Belum dibayar
14	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan November 2024	640.000	640.000			0,00	Belum dibayar
15	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan Desember 2024	640.000	640.000	12 Maret 2025		0,00	Belum dibayar
16	Retribusi sampah Perumahan Taratak Garden bulan Desember 2024	520.000	520.000	28 Januari 2025		0,00	Belum dibayar
17	Retribusi sampah Perumahan Lawai bulan Desember 2024	1.400.000	1.400.000	13 Januari 2025		0,00	Belum dibayar

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
	(Piutang 2024 dan 2025)		Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
			Pembayaran	Tgl Bayar			
18	Retribusi sampah Nagari Mart Gunung Medan bulan Desember 2024	150.000	150.000	26 Juni 2025		0,00	Belum dibayar
19	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan November 2024	40.000	40.000	02 Mei 2025		0,00	Belum dibayar
20	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Desember 2024	40.000	40.000			0,00	Belum dibayar
21	Kekurangan Retribusi sampah Nagari IV Koto Pulau PunjungTahun 2024	1.008.000	1.008.000	1 Juli 2025		0,00	Belum dibayar
22	Retribusi sampah Nagari Sungai Dareh Tahu 2024	7.200.000	2.200.000	23 Juli 2025		5.000.000	Belum dibayar
	Jumlah	16.826.000	9.326.000		53.342.000	60.842.000	

Catatan:

- Kolom uraian diisi dengan uraian/informasi terkait piutang, bisa berupa tahun, nama perusahaan, nomor SK, nomor Berita Acara Verifikasi dll. Jika hanya hutang
- Kolom Ket diisi dengan informasi penagihan yg telah dilakukan atau informasi tgl bayar (jika piutang tersebut telah dibayar s.d. saat ini)

**REKAPITULASI DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2025**

No	Nama	Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
		Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	
A	Kecamatan : Pulau Punjung					
	Lancar	-	8.799.639	-	8.799.639	
1	Masrigi, B.Ac	-	8.799.639	-	8.799.639	Teguran II
	Kurang Lancar	-	11.844.500	-	11.844.500	
1	Yuharto	-	11.844.500	-	11.844.500	Teguran II
					-	
	Diragukan	-	25.969.285	-	25.969.285	
1	Choiri Abdullah	-	3.352.785	-	3.352.785	Teguran III
1	Syofian	-	22.616.500	-	22.616.500	Teguran III
	Macet	-	75.735.857	-	75.735.857	
1	Andi/pengecer	-	5.346.230	-	5.346.230	Teguran IV
2	Famil	-	4.798.400	-	4.798.400	Teguran IV
3	Sri Banun	-	1.556.625		#VALUE!	Teguran IV
4	Suparman Rais	-	2.483.077	-	2.483.077	Teguran IV
5	Zulfahmi	-	11.956.750	-	11.956.750	Alamat Tidak Ketemu
6	Zaida Prawira	-	2.721.300	-	2.721.300	Teguran III
7	Erijon	-	2.862.460	-	2.862.460	Teguran IV
8	Asri	-	5.729.750	-	5.729.750	Alamat Tidak Ketemu
9	Arifin	-	3.884.450	-	3.884.450	Alamat Tidak Ketemu
10	Hanizar	-	11.900.500	-	11.900.500	Alamat Tidak Ketemu
11	Junaidi	-	4.851.100	-	4.851.100	Alamat Tidak Ketemu
12	Titi	-	4.760.500	-	4.760.500	Alamat Tidak Ketemu
13	Zainal	-	2.720.000	-	2.720.000	Alamat Tidak Ketemu
14	Munaw	-	8.711.325	-	8.711.325	Alamat Tidak Ketemu
15	Satri	-	1.453.390	-	1.453.390	Alamat Tidak Ketemu
	Jumlah	-	122.349.281	-	122.349.281	
B	Kecamatan : Sitiung	-	-	-	-	
	Lancar	-	-	-	-	
					-	
	Kurang Lancar	-	-	-	-	
	Diragukan	-	-	-	-	
	Macet	-	42.186.005	-	42.186.005	
1	Elvi Nasri	-	15.425.625	-	15.425.625	Alamat Tidak Ketemu
2	Rusdi	-	400	-	400	Lunas
3	Andri Surya	-	500.565	-	500.565	Alamat Tidak Ketemu
4		-	445	-	445	Lunas
5	Indah	-	3.206.555	-	3.206.555	Alamat Tidak Ketemu
6	Junaida	-	4.332.560	-	4.332.560	Alamat Tidak Ketemu
7	KSU	-	17.682.375	-	17.682.375	Alamat Tidak Ketemu
8	UEM	-	1.039.170	-	1.039.170	Alamat Tidak Ketemu
	Jumlah	-	42.186.005	-	42.186.005	
C	Kecamatan : Koto Baru				-	
	Lancar	-	1.104.335	-	1.104.335	
1	Irawan Sugianto	-	1.104.335	-	1.104.335	Teguran II
	Kurang Lancar	-	38.398.010	-	38.398.010	
1	Partoma	-	9.585.850	-	9.585.850	Tegutan II
2	Khairul Amri	-	16.596.625	-	16.596.625	Tegutan II
3	Yanti Laura	-	2.915.785	-	2.915.785	Teguran II
4	Parjono	-	5.894.375	-	5.894.375	Tegutan II
5	Zaherma	-	3.405.375	-	3.405.375	Tegutan II
	Diragukan	-	38.011.068	-	38.011.068	
1	M. Yasir Malano	-	16.434.375	-	16.434.375	Teguran III
2	Saiful Amran	-	11.535.500	-	11.535.500	Teguran III
3	Wedianti Wenny	-	4.524.068	-	4.524.068	Teguran III
4	Aswan	-	2.038.825	-	2.038.825	Teguran III
5	Hanafi Ys	-	3.478.300	-	3.478.300	Teguran III
	Macet	-	261.191.484	-	261.191.484	
1	M. Yunus	-	4.851.100	-	4.851.100	Teguran IV
2	Bj. Nasution/Bujang	-	1.572.875	-	1.572.875	Alamat Tidak Ketemu
3	Sapar Gucci	-	1.459.950	-	1.459.950	Teguran IV
4	M. Yunus Maimunah	-	5.698.000	-	5.698.000	Teguran IV
5	H. Nurseha. M	-	350	-	350	Lunas

No	Nama	Tahun 2025		Tahun 2024		Keterangan
		Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	Angsuran (Rp)	Sisa (Rp)	
6	Erna Hastuti	-	4.897.000	-	4.897.000	Alamat Tidak Ketemu
7	Marzuki	-	2.289.700	-	2.289.700	Teguran V
8	Sunarni	-	7.421.980	-	7.421.980	Teguran V
9	H. Kaharudin	-	10.620.000	-	10.620.000	Teguran IV
10	Ridwan Syarif	-	5.602.380	-	5.602.380	Teguran IV
11	Yulisman Hendra	-	-	-	-	Teguran II
12	Wesmi Ademia	-	150	-	150	Lunas
13	Edi Candra	-	15.634.375	-	15.634.375	Teguran IV
14	H. Basrul	-	40	-	40	Lunas
15	Ujang Pelita	-	23.500.250	-	23.500.250	Teguran IV
16	Gunawan	-	4.160.500	-	4.160.500	Teguran II
17	Ilyas	-	4.874.000	-	4.874.000	Surat Tidak Mampu
18	Alfian Chun	-	4.627.600	-	4.627.600	Alamat Tidak Ketemu
19	Artis Abbas	-	12.291.750	-	12.291.750	Meninggal Dunia
20	Darwas	-	8.083.403	-	8.083.403	Alamat Tidak Ketemu
21	Hanafi/Bahan Bangunan	-	18.275.625	-	18.275.625	Meninggal Dunia
22	Janu Isnadi	-	2.448.568	-	2.448.568	Teguran IV
23	Chin Fajri	-	4.353.960	-	4.353.960	Alamat Tidak Ketemu
24	Kitna Luhtfi, S.Ag	-	1.856.755	-	1.856.755	Teguran IV
25	KSU Keluarga Sakato/Andisa	-	28.244.875	-	28.244.875	Alamat Tidak Ketemu
26	Mardalinda	-	4.828.300	-	4.828.300	Alamat Tidak Ketemu
27	Ambo	-	9.917.315	-	9.917.315	Pindah
28	Armayuti	-	11.371.710	-	11.371.710	Pindah
29	Refliadi	-	6.006.625	-	6.006.625	Pindah
30	Jhon Ardison	-	4.397.060	-	4.397.060	Meninggal Dunia
31	Keltan Dharma	-	29.891.125	-	29.891.125	Alamat Tidak Ketemu
32	LKMD Minjano	-	17.164.143	-	17.164.143	Alamat Tidak Ketemu
33	Mistar Ahmadi	-	4.851.100	-	4.851.100	Alamat Tidak Ketemu
Jumlah		-	338.704.897	-	338.704.897	
D	Kecamatan : Sungai Rumbai	-	-	-	-	
	Lancar	-	-	-	-	
	Kurang Lancar	-	-	-	-	
	Diragukan	-	11.925.408	-	11.925.408	
	Ramli	-	3.506.625	-	3.506.625	Teguran III
	Ir.Syahrul Effendi (Kanaya)	-	3.202.925	-	3.202.925	Teguran III
	Yenny Anwar (Kosmetik)	-	2.453.960	-	2.453.960	Teguran III
	Upik. Z	-	1.605.868	-	1.605.868	Teguran IV
	Syamsinar	-	1.156.030	-	1.156.030	Teguran IV
	Macet	-	39.132.088	-	39.132.088	
1	Eva Soeb	-	3.260.713	-	3.260.713	Pindah
2	Selamat Wahyudi	-	6.120.875	-	6.120.875	Alamat Tidak Ketemu
3	Z. DT. Mangkuto	-	29.750.500	-	29.750.500	Pindah
Jumlah		-	51.057.496	-	51.057.496	
Total		-	554.297.679	-	554.297.679	

DAFTAR PIUTANG TGR TAHUN 2025

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
1	Surat Keputusan Majelis Tuntutan	LHP BPK RI No.212/S/XVIII.PDG/11/2009	Neneng Elis Herlina, S.Si	Ketektoran Kas pada kas di bendahara pengeluaran SKPD Badan	287.907.729,00	-	287.907.729,00
2	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No. 06/R/Bawasda 2006 Tgl 28 Maret	Ir. Zulkarnaini	Biaya pendidikan Program S2 PNS tidak bisa dipertanggung	9.725.000,00	3.725.000,00	
3	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.23/R/Inspektorat 2008 Tgl. 26 Juni 2008	A.Gani, SH	Pembayaran biaya perjalanan dinas dan BBM yang tidak sesuai	4.445.000,00	3.830.000,00	
12	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.62/R/Inspektorat 2009 Tgl. 22 Desember 2009	Drs.Azrai Khatib		3.100.000,00	3.100.000,00	
15	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.63/R/Inspektorat 2009 Tgl. 22 Desember	Drs.Azrai Khatib	kekurangan fisik pekerjaan pembangunan / rehab gedung sekolah	13.960.969,00	13.960.969,00	
17	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.22/R/Inspektorat-2010 tgl 29 September 2010	Charles Nofrizal		3.125.000,00	3.125.000,00	
19	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.25/R/Inspektorat 2010 Tgl. 21 September 2010	Drs. Olkawendi	Pembayaran lembur yang tidak sesuai ketentuan	816.000,00	816.000,00	
20	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.24/R/Inspektorat 2010 Tgl. 21 September 2010	Drs. Olkawendi	Perjalanan dinas ganda	1.245.000,00	625.000,00	
22			Drs. Adrial	kekurangan fisik pekerjaan rehab sekolah	6.587.363,13	960.200,13	
34			Syahrial, A.Md		400.000,00	400.000,00	
38			Yulisafri, S.Pd		3.500.000,00	3.500.000,00	
46			Ermina U.		300.000,00	300.000,00	
48			Drs. Suhenri		300.000,00	300.000,00	
52	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.05/R/Inspektorat 2011	Ir.Erniwati (PA)	Kekurangan fisik pekerjaan	16.316.046,00	3.870.588,00	
54	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LHP No.25/R/Inspektorat 2011 Tgl. 22 Juli 2011	Harmaini,A.md	Kekurangan fisik pekerjaan rehabilitasi balai penyuluh pertanian	1.470.938,46	236.470,63	
55		LHP No.26/R/Inspektorat 2011 Tgl. 28 Juli 2011	Harmaini,A.md	kekurangan fisik pekerjaan pembangunan gudang dan lantai jemur	19.531.968,60	9.765.984,30	
56			Harmaini,A.md	Pembangunan 2 unit BPP tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak	34.112.006,60	26.431.928,30	
57	189.1/222/KPTS-BUP/2019		Hasan Basri.SY	Kekurangan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru	2.755.713,00	2.755.713,00	
59		LAP/27/R/Inspektorat-2012 tgl 31 Mei 2012	Rustian		79.420.000,00	79.420.000,00	
62	189.1/222/KPTS-BUP/2019		Ali Umar, SH	Kelebihan pembayaran honorarium panitia penilai harga tanah	3.145.000,00	3.145.000,00	
64			Drs. Irsyad, MM		150.000,00	100.000,00	
67			Hasan Basri,S.Sos	kelebihan biaya perjalanan dinas	1.950.000,00	125.000,00	
68			Hasan Basri,S.Sos		592.500,00	592.500,00	
69			Drs.RS. Eddy Alperi		592.500,00	592.500,00	
70			Amar Salahudin		592.500,00	592.500,00	
71			Donal Weria		592.500,00	592.500,00	
72			Hasan Basri S.Sos dkk	Pembayaran perjalanan dinas ganda	4.750.000,00	100.000,00	
73			Rustian		500.000,00	500.000,00	
74	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP/28/R/Inspektorat-2012 tgl 31 Mei 2012	Ir. Zulkarnaini	Pembayaran perjalanan dinas ganda	350.000,00	125.000,00	
79	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP/4/R/Inspektorat-2013 tgl 12 Februari 2013	Agusri Yusuf		725.000,00	725.000,00	
80	189.1/222/KPTS-BUP/2019	15/R/Inspektorat-2013	Beni idilla		475.000,00	475.000,00	
82	189.1/222/KPTS-BUP/2019		Sarbaini	Kelebihan pembayaran pengadaan webserver Dharmasraya	7.723.636,00	6.223.636,00	
87	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP/19/R/Inspektorat-2014	Azhari.SH.MM	Pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan	2.200.000,00	1.400.000,00	
88	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP/75/R/Inspektorat-2014	Drs.H.Zubrizal	Kekurangan fisik Kegiatan Peningkatan pasar nagari dan serikat	5.163.594,00	4.227.181,00	
90	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP/98/R/Inspektorat-2016	Amilus Dt. Penghulu Sati	Perjalanan dinas ganda	1.250.000,00	1.250.000,00	
91		LAP-68/R/Inspektorat-2016	Yesi Delni	Pekerjaan plafond pembangunan kios pasar sungai rumbai belum	5.268.375,70	5.268.375,70	
92	189.1/222/KPTS-BUP/2019	LAP-22/R/Inspektorat-2017 tanggal 31 Juli 2017	Sarbaini, SAP	Pengeluaran Anggaran atas Pembayaran Perjalanan Dinas Luar	2.101.500,00	2.101.500,00	
94		LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Ernawati		475.000,00	475.000,00	
103			Drs. H. St. Darman Tuanaku Kerajaan	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	36.870.000,00	35.870.000,00	
104	188.45/350/KPTS-BUP/2019		M. Sunir Patopang, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	16.100.000,00	15.100.000,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
105	188.45/351/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Drs. Azwar Hamid	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	22.270.000,00	20.770.000,00	
106	188.45/352/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Suhaili Alex, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	18.950.000,00	16.950.000,00	
107	188.45/353/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Andisa Putra, A.Md	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	35.170.000,00	32.070.000,00	
108	188.45/354/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	H. Yuskal Ahmad	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	14.320.000,00	9.320.000,00	
109	188.45/355/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010	Alizar Chan	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	24.400.000,00	19.220.000,00	
110	188.45/356/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Sukarman, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	30.350.000,00	-	
111	188.45/357/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Santoso, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	18.950.000,00	17.950.000,00	
112	188.45/358/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Pahmil Yandri	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	23.470.000,00	22.470.000,00	
113	188.45/359/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Sukardi N. Dt. Sinaro Mudo	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	17.320.000,00	17.320.000,00	
114	188.45/360/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Edwar, S.Ag	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	25.640.500,00	23.640.500,00	
115	188.45/361/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010	Arham Chan Malin Pandekar	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	7.750.000,00	6.750.000,00	
116	188.45/362/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Widayatmo, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	17.880.650,00	1.485.150,00	
117	188.45/363/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Berlian, B.Sc	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	8.300.000,00	-	
118	188.45/364/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Ir. Zulfahmi Hosen	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	7.175.000,00	5.175.000,00	
119	188.45/365/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010	Afriedal, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	2.500.000,00	-	
120	188.45/366/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 dan Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010	Drs. Bambang Hermanto, MM	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	6.050.000,00	4.050.000,00	
121	188.45/367/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Erman Dt. Mangkudum	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	11.181.482,00	9.181.482,00	
122	188.45/368/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Kapidis Rasyid	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	9.663.823,00	6.663.823,00	
123	188.45/369/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Masrigi Rajo Lelo	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	12.575.552,00	9.325.552,00	
124	188.45/370/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Mawardi	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	7.599.600,00	5.349.600,00	
125	188.45/371/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Purwanto, S.Ag	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	9.094.442,00	9.094.442,00	
126	188.45/372/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	M. Salahuddin Dt. Tumanggung, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	7.462.699,00	-	
127	188.45/373/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Mulyadi, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	6.467.751,00	1.467.751,00	
128	188.45/374/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Taufik Syukur	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	8.175.160,00	5.175.160,00	
129	188.45/375/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Yosrizal	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	8.660.600,00	5.660.600,00	
130	188.45/376/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Ahmad Fadillah	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	518.448,00	518.448,00	
131	188.45/377/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Asrul	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	356.400,00	356.400,00	
132	188.45/378/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Epi Lusiana	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	255.200,00	255.200,00	
133	188.45/379/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Hardafit	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	947.715,00	947.715,00	
134		LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Hendri Pratama	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	133.100,00	133.100,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
135	188.45/380/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Herpadison	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	5.112.287,00	4.612.287,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
136		LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Roni Aprianto	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	532.400,00	532.400,00	
137	188.45/381/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Syafrizal Yasin	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	518.448,00	518.448,00	
138	188.45/382/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No. 14.C/S/XVIII.PDG/05/2013	Zulherman	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas DPRD	837.000,00	-	
139	188.45/277/KPTS-BUP/2019	LHP BPK NO. 28C/LHP/XVIII.PDG/05/2019	AMRIZAL	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD	28.480.000	28.480.000,00	
140	188.45/278/KPTS-BUP/2019	LHP BPK NO. 28 C/LHP/XVIII.PDG/05/2019	FITRIA NINGSIS Z, SE	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD	21.990.400,00	-	
141	188.45/276/KPTS-BUP/2019	LHP BPK NO. 28C/LHP/XVIII.PDG/05/2019	Kartono, S.Sos	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD	32.943.600,00	17.943.600,00	
142	188.45/275/KPTS-BUP/2019	LHP BPK NO. 28C/LHP/XVIII.PDG/05/2019	MATRASADI	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD	6.068.000,00	6.068.000,00	
144	189.1/393/KPTS-BUP/2019	Belanja Daerah TA 2005 & 2006	PT. Satria Lestari Multi	Pembangunan Baru Kantor Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Belum Dapat Diselesaikan Sebesar Rp642.978.842,64, Kurang	17.978.740,24	17.978.740,24	
145			CV. Mutiara Hitam	Terdapat Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan	7.769.619,00	7.769.619,00	
147	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LHP BPK 2007 No.154/S/XVIII.PDG/12/2008 Tanggal. 23 Desember 2008 (Laporan Keuangan Daerah TA 2007)	PT. Adhiwira Ikaputra	Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Aspal Hotmix Pada Dinas 3) PT Adiwira sebesar Rp33.088.390,65	-	-	
150			CV Diga	Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum	33.088.390,65	33.088.390,65	
152			CV Hadi Pratama Putra	Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak Dan Jaminan	9.679.350,00	8.179.350,00	
153			CV Dharmasraya	Pelaksanaan Sebesar Rp1.552.362.015,00 Tidak Dicairkan	9.775.950,00	9.775.950,00	
154			CV. Trupun Parama Artha		8.021.550,00	8.021.550,00	
155			CV. Restu Mama Abadi Sarana		4.864.650,00	4.864.650,00	
156			PT. Utama Karya (persero)		19.692.150,00	19.692.150,00	
157			CV Telaga Kita		348.297.450,00	348.297.450,00	
158			PT Merangin Karya Sejati		29.292.200,00	29.292.200,00	
159	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LHP BPK 2007 No.154/S/XVIII.PDG/12/2008 Tanggal. 23 Desember 2008 (Laporan Keuangan Daerah TA 2007)	PT. Pulau Punjung Indah Abadi		318.668.500,00	318.668.500,00	
160			PT. Famili Group Utama		111.962.150,00	111.962.150,00	
161			PT. Adhiwira Ikaputra		246.186.950,00	246.186.950,00	
162			PT. Diplomat Surya Nugraha		249.327.150,00	249.327.150,00	
163			PT. Korana Karya		57.501.500,00	57.501.500,00	
164			CV. Angelly		38.792.050,00	38.792.050,00	
165			PT. Jaya Putra Mandiri		14.607.600,00	14.607.600,00	
166					85.692.815,00	85.692.815,00	
167	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LHP BPK Nomor B42 Tanggal 4 November 2009 (LKPD TA 2008)		Terdapat Beberapa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Senilai Rp40.923.189.000,00 Tidak Dapat Diselesaikan Sampai Dengan 31 Desember 2008 dengan Nilai Jaminan Pelaksanaan yang Harus Dicairkan Sebesar Rp1.939.571.335,00		-	
169			CV Hadi Pratama Putra	b. CV Hadi Pratama Putra sebesar Rp22.000.000,00	22.000.000,00	21.022.405,00	
171			CV Tiga Pilar Utama	d. CV Tiga Pilar Utama sebesar Rp32.700.000,00	32.700.000,00	23.540.990,00	
172			PT Arafah Anugrah Abadi	e. PT Arafah Anugrah Abadi sebesar Rp80.663.150,00	80.663.150,00	80.663.150,00	
173			PT Merangin Karya Sejati	f. PT Merangin Karya Sejati sebesar Rp978.478.450,00	978.478.450,00	684.934.915,00	
175			CV Dua Sahabat	h. CV Dua Sahabat sebesar Rp35.739.050,00	35.739.050,00	35.739.050,00	
176			CV Restu Mama Abadi	i. CV Restu Mama Abadi sebesar Rp22.368.600,00	22.368.600,00	22.368.600,00	
177	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.22/S/XVIII.PDG/01/2010 Tanggal. 27 Januari 2010 (Belanja Daerah TA 2008 & 2009)		Terdapat Kekurangan Pekerjaan Fisik Pekerjaan Pengkrekelan dan Rigit Beton Sebesar Rp477.873.708,80 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan		-	
178			CV Anda	a. CV Anda Rp38.419.480,78	38.419.480,78	21.919.480,78	
179			CV Trupun Parama Arta	b. CV Trupun Parama Arta Rp83.357.796,06	83.357.796,06	83.357.796,06	
180			CV Jaya Abadi	c. CV Jaya Abadi Rp130.062.094,42	130.062.094,42	130.062.094,42	
181			CV Ancang Nan Limo Sakato	d. CV Ancang Nan Limo Sakato Rp40.075.085,56	40.075.085,56	35.114.935,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
182	189.1/393/KPTS-BUP/2019	No. LHP BPK Nomor. 290/S/XVIII.PDG/11/2010 Tanggal 1 November 2010 (Belanja Daerah TA 2009 & 2010)		Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan		-	
183			CV. Elmen	a. CV. Elmen sebesar Rp17.367.814,43	17.367.814,43	12.367.814,43	
184			CV. Tiga Pilar Utama	b. CV tiga Pilar Utama sebesar Rp9.038.906,64	9.038.906,64	9.038.906,64	
185			CV. Arafah	c. CV Arafah sebesar Rp17.491.534,28	17.491.534,28	17.491.534,28	
186			CV. Merapi Jaya	d. CV Merapi Jaya sebesar Rp5.192.873,38	5.192.873,38	2.592.873,38	
187				Terdapat Kekurangan Fisik Pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada		-	
191	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LHP BPK No.21/LHP/XVIII.PDG/08/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 (LKPD TA 2010)		Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Fisik pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Dharmasraya Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp978,81 juta, Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp978.813.735,51 serta menyetorkannya ke Kas Daerah atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp142.610.424,64 dan sisanya sebesar Rp836.203.310,87 dikompensasi dengan penambahan volume pekerjaan		-	
192			PT Arafah Anugrah Abadi	PT Arafah Anugrah Abadi	142.610.424,64	142.610.424,64	
194			PT. Utama Karya (persero)	b. Asphalt Hotmix Paket II oleh PT Utama Karya sebesar	200.859.436,50	200.859.436,50	
197	189.1/393/KPTS-BUP/2019	LKPD 2012 14.C/LHP/XVIII.PDG/ 05/2013 Temuan Kepatuhan No.8		Kekurangan Volume atas Beberapa Pekerjaan pada Dinas		-	
199			CV Yunanda Karya	CV Yunanda Karya	6.349.538,70	4.349.538,70	
202	189.1/399/KPTS-BUP/2019	LHP No. 28.C/LHP/XVIII.PDG/05/2019	Drs. H. Zubrizal, Elsy Oktavia, ST, MT PT. Cahaya Batang Tarandam	Pembangunan Gedung Workshop	454.182.117,23	357.182.117,23	
204	SKTJM No. 961/106/SKTJM-2019 tanggal 31 Mei 2019	LHP NO 22/R/INSPEKTORAT 2017	Hendra Guswanto, SH 19760801 201410 1 001 Bendahara Pengeluaran BPML2NPPKB Tahun 2016	Pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	24.541.676,00	18.500.000,00	
206	188.45/320/KPTS-BUP/2020	LHP No. 33.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 (LKPD TA 2019)	Amrizal	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	5.625.000,00	5.625.000,00	
207			Kartono, S.Sos		5.440.000,00	5.440.000,00	
214			Suardi Ayub, S.Sos		5.440.000,00	5.440.000,00	
220	188.45/322/KPTS-BUP/2020	LHP No. 28.C/LHP/XVIII.PDG/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 (LKPD TA 2015)	Drs. Andrias, NS	Terdapat kelebihan perjalanan dinas sebesar yang harus disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.105.200,00.	863.000,00	863.000,00	
237	188.45/325/KPTS-BUP/2020	LHP BPK No. 184/S/XVIII.PDG/07/2010 Tanggal 28 Juli 2010 (LKPD TA 2009)	Prof Dr. Ir. Reni Mayerni, MS	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur dan Tenaga Analisis Untuk Operasional Pengelolaan Laboratorium Tanah dan Daun Pada Dinas Perkebunan yang Tidak Dilaksanakan TA 2009 Merugikan Keuangan Daerah, PPTK untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah honorarium tenaga ahli dan tenaga analisis laboratorium tanah dan daun yang telah dibayarkan sebesar Rp95.640.000,00 yang terdiri dari pembayaran bulan Desember 2009 Rp15.940.000,00 dan pembayaran dari bulan Januari s.d. Mei 2010 sebesar Rp79.700.000,00	95.640.000,00	59.340.000,00	
238			Zulyadaini			-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
239	188.45/326/KPTS-BUP/2020	LHP BPK No. 33.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020 Tanggal 18 Juni 2020 (LKPD TA 2019)	Ir. Junaidi Yunus 19630929 199203 1 003	Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan pada Item Lapisan Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) Sebesar Rp184.729.106,56		-	
240			Andar Atmaja, ST, MT 19840329 201101 1 011			-	
244			PT Merangin Karya Sejati		63.966.238,94	63.966.238,94	
245	188.45/327/KPTS-BUP/2020	LAP-04/R/Inspektorat-2020 tanggal 31 Maret 2020	Arnidawati Ahmad, SH	Pengeluaran anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan	18.266.000,00	7.612.500,00	
246			Aswin			-	
247			Afrialedi, SPd, MM		6.247.888,00	1.861.800,00	
248			Aswin			-	
279			Yosta Defina, S.Farm, Apt 196908101991022001	Dua Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung pada Dinas Kesehatan Belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp65.156.407,27		-	
280			Suhaimi Nurta, SKM 199101 2 002			-	
281			CV. Solindaraya Sarana Sukses		20.419.461,82	16.043.328,82	
309	961/018/SKTJM-2022		M. Hartani, ST CV Teknik Sepakat	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Puskesmas (Realokasi) dan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sitiung I	11.287.186,54	7.287.186,54	
318	961/025/SKTJM-2022 Tanggal 15 Juni 2022		Hendra Guswanto, SH 19760801 201410 1 001	Pembayaran Honorarium tidak sesuai standar harga satuan regional	4.200.000,00	4.200.000,00	
325	961/029/SKTJM-2022		Firman Riski, S.Pd 198507292010011021	Pembayaran Honorarium tidak sesuai standar harga satuan regional	6.080.000,00	4.580.000,00	
332	961/033/SKTJM-2022		Ridwan M.S.S 198102282005011006	Pembayaran Honorarium tidak sesuai standar harga satuan regional	8.360.000,00	1.360.000,00	
377	188.45/232/KPTS-BUP/2022 tanggal 20 Juni 2022		H. Benny Ridwan	Perhitungan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak Sesuai Ketentuan	42.000.000,00	42.000.000,00	
403	188.45/232/KPTS-BUP/2022 tanggal 20 Juni 2022		Boby Ade Saputra	Perhitungan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak Sesuai Ketentuan	27.500.000,00	27.500.000,00	
407	188.45/396/KPTS-BUP/2022	LHP No. 14/R/Inspektorat-2021 tanggal 31 Desember 2021	Husnul Afra, S.Pd 19750428200801 1002	Kekurangan pekerjaan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal pekerjaan pembangunan taman baca masyarakat	15.670.000,00	9.270.000,00	
409			Husnul Afra, S.Pd 19750428200801 1002	Selisih pembayaran honor yang tidak sesuai ketentuan pada kegiatan paket penyetaraan	10.200.000,00	10.200.000,00	
410			Husnul Afra, S.Pd 19750428200801 1002	Pembayaran berupa jasa, honorarium dan transportasi serta belanja lainnya yang belum berdasarkan ketentuan	600.000,00	-	
415	188.45/176/KPTS-BUP/2023	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 tanggal 14 April 2023 (LKPD TA 2022)	Bobby Perdana Riza, S.STP, M.Si NIP.198205212000121002	Kekurangan volume pada Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp70.038.405,92 pada Disdik.		-	
416			Dedet, S.Pd NIP.198809082014021002			-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
420	188.45/177/KPTS-BUP/2023	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 tanggal 14 April 2023 (LKPD TA 2022)	Mitra Kerja	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMPN 2 Sitiung	20.560.204,85	20.560.204,85	
423			Ir. Junaidi Yunus 19630929 199203 1 003	Kekurangan volume sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp396.579.490,00 dan Denda keterlambatan belum dikenakan terhadap satu paket pekerjaan sebesar Rp86.830.180,18 pada Dinas PUPR		-	
424			Andar Atmaja, ST. MT			-	
425			PT.INDOTHARA MULTI ARTHA	Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang Lintas Abai - Koto Salak	34.205.527,21	-	
426			PT.TRI JAYA PUTRA	Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Muaro Momong - Trans Sungai Kambut I	110.606.088,43	-	
427			PT.TRI JAYA PUTRA	Peningkatan Jalan Sinamar - Sungai Limau	40.077.744,76	40.077.744,76	
428			PT.INDOTHARA MULTI ARTHA	Pekerjaan Jalan Kabupaten Paket I (Kec. Pulau Punjung & Kec. Sitiung)	10.662.388,28	-	
429			PT CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	Pekerjaan Jalan Kabupaten Paket II	11.057.820,14	-	
430			PT CITRA MUDA NOER BERSAUDARA	Pekerjaan Jalan Kabupaten Paket III (Kec. Sitiung, Kec. Padang Laweh & Kec. Koto Baru)	22.670.442,08	-	
431			PT OMBILIN CIPTA NUSA	Pekerjaan Jalan Kabupaten Paket IV	23.955.800,73	13.955.800,73	
432	188.45/177/KPTS-BUP/2023	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 tanggal 14 April 2023 (LKPD TA 2022)	Ir. Junaidi Yunus 19630929 199203 1 003	Kekurangan Volume Satu Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp11.224.801,54		-	
433			Herd Mulya Wibowo, ST, MAP/ 19800405 200501 1 007			-	
434			CV. Malika Pratama		11.224.801,54	-	
435	188.45/178/KPTS-BUP/2023	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 tanggal 14 April 2023 (LKPD TA 2022)	Pariyanto, SH	Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Melebihi	15.937.500,00	-	
436			Ir. H. Adi Gunawan, MM	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	28.737.600,00	-	
437			Ade Sudarman	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	73.904.400,00	-	
438			Defrino Anwar, SH, M. Pd	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	36.475.800,00	-	
439			Rogi Aliyas Can, A. Md. Kom	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	28.175.400,00	-	
440			Sutan Alif	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	33.775.000,00	-	
441			Dalpewan Dt Rajo Lelo, SE	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	71.128.200,00	-	
442			Ari Prabowo, S. Pd	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	36.176.200,00	-	
443			Syafnirwan	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	56.627.800,00	-	
444			Sasmi Erii, S. Pd.I	Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Melebihi	23.375.000,00	-	
445			Amrizal, SH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	77.785.160,00	-	
446			Purwanto, S. AG	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	84.081.800,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
447			Ferryko Efendi, SP	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	73.329.800,00	-	
448			Yulindo Sari Muhtar, SE	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	76.829.800,00	-	
449			Raden Awaludin, SE	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	55.477.800,00	-	
450			Rosandi Sanjaya Putra	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	61.376.600,00	-	
451			Aandri Saputra, SH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	28.575.000,00	-	
452			Alisa Septiani	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	48.078.200,00	-	
453			Ampera Dt Labuan	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	85.129.800,00	-	
454			Cecep Nurzaman, S. Pd	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	26.975.000,00	-	
455			Saparman	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	60.827.400,00	-	
456			Iskandar	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	64.227.800,00	-	
457			Zulhendri	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	89.031.400,00	-	
458			Irmon, S.Hut	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	69.229.800,00	-	
459			Suparman, A. Ma. Pd	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	57.228.200,00	-	
460			Salman, S. Sos	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	28.125.400,00	-	
461			Drs. H. Mawarman Dt Panghulu Mudo	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	42.728.200,00	-	
462			Ardison	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	61.578.600,00	-	
463			Herman, SE	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	50.487.400,00	-	
464			Haryanto	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	44.126.200,00	-	
465			Syamsuardi	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	2.788.200,00	-	
466			Irvan Akso, SH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	13.752.800,00	-	
467			Desmayenti	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	9.485.000,00	-	
468			Hadi Supral	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	5.760.000,00	-	
469			Alva Nining Tressia	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	11.925.000,00	4.925.000,00	
470			Amir Rasid, SH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	455.000,00	-	
471			Andi Arvian Siska	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	9.045.000,00	-	
472			Dodi, SH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00 dan	1.365.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
473			Wita Indriani	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	11.480.000,00	-	
474			Yohan Sarori	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	1.820.000,00	-	
475			Syafrinal	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	20.415.000,00	-	
476			Lina Juwita	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	6.975.000,00	-	
477			Dadag Lega Prasetya	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	4.245.000,00	-	
478			Hendriyanto	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	1.110.000,00	-	
479			Nusirwan	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	910.000,00	-	
480			Riko Arianto	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	3.640.000,00	-	
481			Romi Wahyudi	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	910.000,00	-	
482			Sabrizal	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	455.000,00	-	
483			Suhendro	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya Sebesar Rp1.027.410.760,00	7.575.000,00	3.075.000,00	
488	188.45/274/KPTS-BUP/2023	LHP BPK RI atas Belanja Daerah TA 2008 dan 2009 Nomor 22/S/XVIII.PDG/01/2010 tanggal 27 Januari 2010	H. Febri Erizon, SH., M.M	Realisasi Pelaksanaan Pemberian Lumpsum Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD TA 2008 dan 2009 Tidak Tepat dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp12.375.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	
490			Drs. Agus Akhirul	Realisasi Pelaksanaan Pemberian Lumpsum Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD TA 2008 dan 2009 Tidak Tepat dan Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp12.375.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
496			Rudi Hartono	Realisasi Belanja Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp84,15 juta	28.050.000,00	28.050.000,00	
497			Ketua Pengadilan Negeri Muaro	Realisasi Belanja Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Membebani Keuangan Daerah sebesar Rp84,15 juta	28.050.000,00	28.050.000,00	
499		LHP No. 35/R/Inspektorat-2022 Tgl 31 Desember 2022	Meri Yuliana	Pertanggungjawaban realisasi anggaran sebesar Rp18.567.900,- dari perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.975.000,00	2.975.000,00	
500			Pon Saputra		595.000,00	-	
501			Dahlia Nonsi		3.167.000,00	2.167.000,00	
502			Zuherdi		3.905.900,00	3.905.900,00	
503			Soleh		120.000,00	120.000,00	
504			Oktavianus		695.000,00	65.000,00	
508			dr. WIWI YULIANA	Keterangan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp36.570.000,00 dan TPP sebesar Rp22.722.493,00 atas pegawai pelaksana tugas belajar	14.400.000,00	14.400.000,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
654	100.3.3.2/100/KPTS-BUP/2024 tanggal 18 Maret 2024	LHP No. 07/LHP/XVIII.PDG/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 (LHP Belanja Daerah Tahun 2023)	Bobby Perdana Riza, S.STP, M.Si NIP.198205212000121002	Kekurangan volume pada Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.355.509,53		-	
655			RiWAHONO, S.Pd NIP. 19700123 199702 1 001			-	
656			CV. SYAZWA Meichal Hendrix ZN	Pembangunan Pagar SDN 11 Pulau Punjung	4.909.471,63	1.909.471,63	
657			CV. DUA SAHABAT Syafriadi	Pembangunan Lapangan Olahraga SDN 11 Pulau Punjung	1.172.201,31	1.172.201,31	
658			CV. SURAI KONSTRUKSI ENGINEERING Arlisman	Pemasangan Paving Block SDN 02 Timpeh	3.695.824,00	-	
659			CV. DUA SAHABAT Arlis Putra	Pembangunan Pagar SDN 22 Pulau Punjung	5.578.747,50	3.578.747,50	
660			CV. SYAZWA Rajulan Dt. Rajo Pahlawan	Pemasangan Paving Block SDN 03 Pulau Punjung	3.994.404,69	1.994.404,69	
661			CV. VERTIKAMA KONTINU JAYA Ridho Akbar	Pembangunan Pentas Seni SMPN 3 Pulau Punjung	6.004.860,40	3.004.860,40	
672	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/383/SPKMKD-2024 tanggal 21 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	Mukhamad Syukri, S.Pd.SD, MM NIP. 19690910 199403 1 008			-	
673			Eri Sofiyanti, ST, MT NIP. 19970407 201410 2 002			-	
674			CV. Malika Pratama	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum sebesar Rp26.715.858,20	26.715.858,20	20.715.858,20	
675			Bobby Perdana Riza, S.STP, M.Si NIP.19820521 200012 1 002			-	
676			Riwahono, S.Pd NIP. 19700123 199702 1 001			-	
677	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/384/SPKMKD-2024 tanggal 21 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Aslam Family Konstruksi	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Koto Besar Rp16.176.039,75	16.176.039,75	16.176.039,75	
678	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/416/SPKMKD-2024 tanggal 22 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Najfas Consultant Een Tri	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp6.331.850,00 (Pengawasan pagar/gerbang SDN 01 Koto Salak, SDN 07 Koto Salak, SDN 14 Koto Baru sebesar Rp4.247.950,00 serta Pengawasan pembangunan pagar SMPN 2 Sungai Rumbai sebesar Rp2.083.900,00)	6.331.850,00	6.331.850,00	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
679	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/417/SPKMKD-2024 tanggal 22 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Ricky Indotama Consultan Iwel Konefi	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp11.012.741,39 (Pengawasan pembangunan ruang kelas baru SDN 04 Timpeh sebesar Rp4.929.225,00, Pengawasan pagar SDN 10 Sitiung sebesar Rp1.202.250,00, Pengawasan pembangunan pagar SDN 12 Pulau Punjung sebesar Rp1.362.550,00, Pengawasan pembangunan pagar SDN 04 Koto Baru sebesar Rp1.434.816,39, Pengawasan pembangunan ruang kelas SD Islam Miftahul Ulum sebesar Rp2.083.900,00)	11.012.741,39	7.012.741,39	
680	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/418/SPKMKD-2024 tanggal 22 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Tirta Planning Engineering Fauzi	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp8.394.523,29 (Pengawasan lanjutan pembangunan mushallah SMPN 3 Timpeh sebesar Rp1.041.950,00, Pengawasan lapangan basket SDN 08 Sitiung sebesar Rp1.111.413,33, Pengawasan lapangan basket SDN 11 Sitiung sebesar Rp1.207.477,17, Pengawasan pembangunan pentas seni SMPN 3 Pulau Punjung sebesar Rp785.732,79, Pengawasan pembuatan pentas seni SDN 01 Timpeh sebesar Rp1.041.950, Pengawasan paving blok SDN 16 Sitiung sebesar Rp3.206.000,00)	8.394.523,29	2.194.523,29	
681	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/419/SPKMKD-2024 tanggal 22 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Dharmas Mitra Consultant Rhoby	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp10.504.993,33 (Pengawasan rehabilitasi laboratorium IPA SMPN Unggul Dharmasraya sebesar Rp4.247.950,00, Pengawasan pagar/gerbang SDN 01 Sitiung, SDN 04 Tiumang, SDN 11 Pulau Punjung, SDN 22 Pulau Punjung sebesar Rp4.173.143,33, Pengawasan pembangunan rumah dinas SDN 15 Sembilan Koto sebesar Rp2.083.900,00)	10.504.993,33	8.504.993,33	
682	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/420/SPKMKD-2024 tanggal 22 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Tirta Planning Engineering Shyddiqi dan Rahman	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp9.658.647,20 (Pengawasan pembangunan ruang kelas baru SDN 25 Pulau Punjung sebesar Rp2.680.426,23, Pengawasan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMPN 1 Sitiung dan SMPN 1 IX Koto sebesar Rp2.730.270,79, Pengawasan rumah dinas SMPN 1 Asam Jujuhan sebesar Rp3.206.000,00, Pengawasan pagar sekolah SDN 04 Pulau Punjung sebesar Rp1.041.950,00)	9.658.647,20	4.808.647,20	
683	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/422/SPKMKD-2024 tanggal 28 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Jiwana Consultant Zuli Herta Yogi	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp22.693.136,67 (Pengawasan Paving Block Paket II SDN 02 Asam Jujuhan, SDN 15 Koto Baru, SDN 10 Sungai Rumbai, pembangunan Kelas Baru SDS Darul Thulab, pengawasan pembangunan Kelas Baru SDS Great School, pengawasan pembangunan pagar Paket 1 SMPN 2 Timpeh, pengawasan pembangunan Toilet SD IT Sakinah Sungai Rumbai, pengawasan tebing SDN SDN 09 Timpeh & SDN 09 Tiumang, pengawasan pembangunan Ruang Kelas Baru SMP IT Almunawwaroh, pengawasan Pembangunan Toilet (jamban) (SMPN 1 Sitiung, SMPN 1 Sungai Rumbai, SMPN Bonjol, SMPN Tabiang tinggi, SMPN Koto Besar)	22.693.136,67	18.693.136,67	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
684	SPKMKD Nomor 900.1.11.4/423/SPKMKD-2024 tanggal 28 Mei 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Kyfa Engineering Consultan Wandu	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp6.333.611,54 (Pengawasan III pembangunan toilet/jamban SDN 08 Pulau Punjung sebesar Rp3.206.000,00, Pengawasan rehabilitasi ruang kelas SDN 22 Pulau Punjung dan SDN 08 Tiumang sebesar Rp3.127.611,54)	6.333.611,54	6.333.611,54	
686	belum ada SKTJM	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV. Jiwana Edwar	Kelebihan Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan VI Pembangunan Ruang Kelas & Ruang Majelis Guru SDN 05 Koto Salak, SDN 17 Pulau Punjung, Majelis Guru SDN 02 Padang Laweh	2.707.484,62	2.707.484,62	
695	SKTJM No. 900.1.11.4/002/SKTJM-2024 tanggal 3 Juni 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	Ade Chandra, SE, MM 19790421 200501 1 007	Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Direalisasikan Tidak Senyatanya	2.292.139.344,00	1.482.139.344,00	
696	Tidak ada SKP2KS	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	PARIYANTO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	60.523.400,00	400,00	
697			ADI GUNAWAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	224.161.600,00	-	
698			HERMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	131.965.000,00	-	
699			CECEP NURZAMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	100.000.000,00	-	
700			ZULHENDRI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	22.000.000,00	-	
701			IMAM MAHFURI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	63.420.000,00	-	
702			SYAMSUARDI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	455.000,00	-	
703			DODI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	22.716.900,00	-	
704			AMIR RASYID	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	8.969.100,00	-	
705			YUNITA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.275.000,00	-	
706			DOFLI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	379.000,00	-	
707			SYAMSUARDI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	8.095.000,00	-	
708			YOHAN SARORI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	13.381.100,00	-	
709			IMAL NURDIN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.690.000,00	-	
710			ANGGI PRADANA PUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.621.000,00	-	
711			ACI SESRA JUNIKA PUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.000.000,00	-	
712			TRI PARYONO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	855.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
713			BARLIANTO ARIF WIBOWO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	10.924.200,00	-	
714			SLAMET SANTOSO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.390.000,00	-	
715			ZETRI AMELIA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	910.000,00	-	
716			HENDRO BUDIMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	780.000,00	-	
717			ATIKA DEISTA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.560.000,00	-	
718			ASTUTI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.730.000,00	-	
719			SYUKRANI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.730.000,00	-	
720			MAIHEL SORGET	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.365.000,00	-	
721			PUTRI HARYANTI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.730.000,00	-	
722			RAHADATUL AISY PRIHATINI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	2.275.000,00	-	
723			SABRIZAL	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.820.000,00	-	
724			DESMAYENTI, SE	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	22.465.000,00	-	
725	100.3.3.2/156/KPTS-BUP/2024 tanggal 3 Juni 2024	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	AANDRI SAPUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	167.029.000,00	-	
726			ADE SUDARMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	301.213.600,00	-	
727			ALISA SEPTIANI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	139.720.000,00	-	
728			AMPERA DT LABUAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	124.785.000,00	-	
729			AMRIZAL	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	127.265.000,00	-	
730			ARDISON	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	107.035.000,00	-	
731			ARI PRABOWO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	134.678.000,00	-	
732			CECEP NURZAMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	73.244.000,00	-	
733			DALPEWAN DT. RAJO LELO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	121.286.000,00	-	
734			DEFRINO ANWAR	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	140.195.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
735			FERRYKO EFENDI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	110.591.000,00	-	
736			HARYANTO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	133.530.000,00	-	
737			IRMON	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	112.111.000,00	-	
738			ISKANDAR	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	121.599.000,00	-	
739			MAWARMAN DT PANGULU MUDO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	168.735.000,00	-	
740			PURWANTO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	89.119.000,00	-	
741			RADEN AWALUDIN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	135.158.000,00	-	
742			ROGI ALIYAS CAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	143.510.000,00	-	
743			ROSANDI SANJAYA PUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	80.410.000,00	-	
744			SALMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	156.970.000,00	-	
745			SAPARMAN DT RAJO PANGULU	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	86.770.000,00	-	
746			SASMI ERLI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	114.455.000,00	-	
747			ST. ALIF	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	138.354.000,00	-	
748			SUPARMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	86.929.000,00	-	
749			SYAFNIRWAN DT RAJO ALAM	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	64.595.000,00	-	
750			YULINDO SARI MUHTAR	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	108.071.000,00	-	
751			ZULHENDRI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	171.455.000,00	-	
752			ACI SESRA JUNIKA PUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	15.880.000,00	-	
753			ALDO FERNANDO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	33.540.000,00	-	
754			ALVA NINING TRESSIA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	27.047.000,00	-	
755			AMIR RASID	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	10.000.000,00	-	
756			ANDI ARVIAN SISKI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	11.662.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
757			ANGGI PRADANA PUTRA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	9.829.000,00	-	
758			DADAG LEGA PRASETYA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	32.175.000,00	-	
759			DERAWITA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	4.186.800,00	-	
760			EDI PURNOMO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	3.185.000,00	-	
761			GUSTRIYANTI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	4.095.000,00	-	
762			HADI SUPRAL	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	9.267.800,00	-	
763			HENDRIYANTO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	4.170.000,00	-	
764			HENDRO BUDIMAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	1.365.000,00	-	
765			HORIAN FEBRINA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	5.005.000,00	-	
766			JAKA PERMANA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	910.000,00	-	
767			LILIK FELKOSARI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	3.640.000,00	-	
768			LINA JUWITA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	24.103.100,00	-	
769			LINA MELENIA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	3.900.000,00	-	
770			MIFTA RAHMA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	3.185.000,00	-	
771			OKTAVIANUS	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	10.335.000,00	-	
772			RICO ARIANTO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	21.516.800,00	-	
773			ROMI WAHYUDI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	14.361.200,00	-	
774			SEFNI WISKI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	5.915.000,00	-	
775			SRI DEWI NOVITA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	9.100.000,00	-	
776			SRI UTAMI NINGSIH	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	4.550.000,00	-	
777			SUHENDRO	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	16.471.800,00	-	
778			SYAFRINAL	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Riil	39.944.100,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
779			WIDYA DEVA LOLITA	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Rril	1.365.000,00	-	
780			WITA INDRIANI	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Rril	48.381.100,00	-	
781			YOGA GUSTIAWAN	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Rril	4.095.000,00	-	
782			YUSRIZAL	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai Pengeluaran Rril	55.485.600,00	-	
783	Belum ada SKP2KS	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	CV CITRA KARYA JAYA	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehab Sedang Gedung Baru RSUD Sungai Dareh sebesar Rp35.266.292,38 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp201.794.877,97	237.061.170,00	-	
784	Belum ada SKP2KS	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	Sekretariat Daerah	Pembayaran atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Sekretariat Daerah Melebihi Ketentuan	80.286.450,00	-	
785	Belum ada SKP2KS	LHP No. 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 (LKPD TA 2023)	Saisis	Kelebihan Pembayaran Honorarium Narasumber yang Berasal dari Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	510.000,00	-	
786			Budi Waluyo		680.000,00	-	
787			Rovanly Abdams		680.000,00	-	
788			Misbah Hulkhair		285.000,00	-	
789			Ana Setywati		285.000,00	-	
790			Krismiayati	Kesalahan Perhitungan atas Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas	510.000,00	-	
791			Refti Betriesva		380.000,00	-	
792			Yusradi		190.000,00	-	
793			Yogi Kaputra		95.000,00	-	
794			Molly Fransiski		95.000,00	-	
795			Prima Aulia		95.000,00	-	
796			Neneng Susanti		855.000,00	-	
797			Adlisman	Kelebihan Pembayaran Honorarium Keynote Speaker	170.000,00	-	
798			M. Yusuf		850.000,00	-	
799			Sutan Riska Tuanku Kerajaan		850.000,00	-	
800			M. Taufik		1.020.000,00	-	
801			Sutan Riska Tuanku Kerajaan	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Jenis Koodinasi Tim	3.825.000,00	-	
802			Adlisman		2.805.000,00	-	
803			Yefrinaldi		1.785.000,00	-	
804			Junaidi Yunus		1.275.000,00	-	
805			Supratman M		425.000,00	-	
806			Enzoztri		850.000,00	-	
807			Herdi Mulya Wibowo		425.000,00	-	
808			Rahmatsyah Rangkuti		875.000,00	-	
809			Sulastri		1.350.000,00	-	
810			Novandri Rismi		850.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
811			Pangkhi Gustavia		1.275.000,00	-	
812			Netty Susanti		425.000,00	-	
813			Deny Kurniawan		1.425.000,00	-	
814			Indry Setrisma		1.425.000,00	-	
815			Givan Okta Prayogo		1.425.000,00	-	
816			Putra Utama		1.425.000,00	-	
817			Budi Utomo		1.000.000,00	-	
818			Yesi Gusnawita		1.500.000,00	-	
819			Paryanto		1.785.000,00	-	
820			Andy Sumanto		1.275.000,00	-	
821			Asril		1.275.000,00	-	
822			Irwan		1.275.000,00	-	
823			Catur Ebyandri Mushendra		1.275.000,00	-	
824			Marco Andrias		1.275.000,00	-	
825			Alber Hendri Purwono		1.275.000,00	-	
826			Rasymi Nofriadi		1.275.000,00	-	
827			Lareaga Eka Putri		500.000,00	-	
828			Leni Mellana		1.000.000,00	-	
829			Afri Rika		1.000.000,00	-	
830			Paryanto		21.250.000,00	-	
831	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Risa Widodary, A.Md	Pertanggungjawaban Honorarium Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Badan Kesbangpol Tidak Sesuai Kondisi Serfatanya	720.000,00	-	
832	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Meldawati, A.Md.Kep	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	1.000.000,00	-	
833	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Refi Yanti Fauzi, S.Sos	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	558.026,00	-	
834	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	drg. Sri Wahyuni	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	750.000,00	-	
835	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr. Pelinggo Jaya	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	325.000,00	-	
836	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Linda Novitri Fahmi, A.Md.Keb.,S.KM	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	600.000,00	-	
837	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Sri Purwanti, A.Md.Keb	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	1.000.000,00	-	
838	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hj. Nurhayati, A.Md.Keb	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana tugas belajar tidak sesuai ketentuan	1.199.179,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
839	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr. Mahendra Candra Karim	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana cuti besar tidak sesuai ketentuan	212.393,00	-	
840	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Lusi Islamiati, SKM	Pembayaran TPP Pegawai tidak sesuai ketentuan	3.274.960,00	-	
841	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Selamat, SE.,MM	Pembayaran tunjangan atas pegawai pelaksana cuti besar tidak sesuai ketentuan	1.196.980,00	-	
842	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Okmi Mustika Bahrin, S.Pd	Pembayaran TPP Pegawai tidak sesuai ketentuan	236.237,00	236.237,00	
843	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Ade Chandra, SE, MM	Pembayaran gaji kepada pegawai yang diberhentikan sementara tidak sesuai ketentuan	1.880.050,00	-	
844	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Adisman, S.Sos.,M.Si.	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	255.000,00	-	
845	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hendra Guswanto, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.852.500,00	1.152.500,00	
846	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Ilvi Restia, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	-	
847	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Meilani Sari, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	-	
848	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Al Khalid, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	-	
849	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hendra Guswanto, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.235.000,00	1.235.000,00	
850	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Ilvi Restia, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
851	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Meilani Sari, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
852	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Al Khalid, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
853	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hendra Guswanto, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.235.000,00	1.235.000,00	
854	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Ilvi Restia, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
855	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Meilani Sari, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
856	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Al Khalid, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	-	
857	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Nahdah Satrin F.Z	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	100.000,00	-	
858	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hamdi Irza, ST,MT.	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	255.000,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
859	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Miftahurahmi	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	95.000,00	-	
860	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Winda Sakanah Fristy	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	100.000,00	-	
861	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Irwanto, S.Ag.	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	95.000,00	-	
862	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr Pom Harry Satria,Sp.OG(K)	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	3.442.500,00	-	
863	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr Asviandri, Sp.A, M.Biomed	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	3.442.500,00	-	
864	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr Pom Harry Satria,Sp.OG(K)	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	3.825.000,00	-	
865	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr Asviandri, Sp.A, M.Biomed	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber dan moderator	2.295.000,00	-	
866	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Endaryanto, S.Pt	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	95.000,00	-	
867	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Rahmatsyah Rangkuti, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.187.500,00	-	
868	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Nedi Wahyudi, ST.	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	-	
869	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Givan Okta Prayogo, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	-	
870	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Putra Utama, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	-	
871	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Rahmatsyah Rangkuti, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	-	
872	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Nedi Wahyudi, ST.	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	190.000,00	-	
873	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Givan Okta Prayogo, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	190.000,00	-	
874	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Putra Utama, ST	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	190.000,00	-	
875	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hadi Supral, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	4.275.000,00	
876	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Hadi Supral, S.H	Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	4.275.000,00	
877	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Nadia Dwi Anaya	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	100.000,00	-	
878	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	M.Tholini Salman	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	100.000,00	-	
879	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Nila Eza Eka Putri	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	427.500,00	-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
880	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Alfimauzhati Alda	Kelebihan Pembayaran pada untuk Peran yang Tidak Ditetapkan dalam Perpes 33 Tahun 2020	427.500,00	-	
881	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Bayu Irawan	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	4.600.000,00	-	
882	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Dedek Amarta	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	4.600.000,00	-	
883	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Irzal Rianto	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	4.600.000,00	-	
884	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Yulindo Sari Muhtar	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	5.100.000,00	-	
885	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Zulhendra Antoni	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	550.000,00	-	
886	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Defrino Anwar	Perjalanan Dinas yang Tidak Diyakini Keterjadiannya	5.072.000,00	-	
887	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Andi Arvian Siska	Perjalanan Dinas yang Terkonfirmasi Tidak Menginap	1.300.000,00	1.300.000,00	
888	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Andi Arvian Siska	Perjalanan Dinas yang Terkonfirmasi Tidak Menginap	1.300.000,00	1.300.000,00	
889	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Oktavianus	Perjalanan Dinas yang Terkonfirmasi Tidak Menginap	1.300.000,00	1.300.000,00	
890	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Suhendro	Pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya	600.000,00	600.000,00	
894	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Didik Antarikso	Perjalanan Dinas yang Terkonfirmasi Tidak Menginap	466.857,00	466.857,00	
896	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Yudhi Fernandes	Perjalanan Dinas yang Terkonfirmasi Tidak Menginap	466.887,00	466.887,00	
897	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	BOOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si 198205212000121002 1312032105820002	Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Seragam Sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp21.775.000,00		-	
898	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	RIWAHONO, S.Pd 19700123 199702 1 001			-	
899	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	DEDET, S.Pd 19880908 201402 1 002			-	
901	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Kaspul Asral, S.Ag,MM 19751107 200501 1 006	Kelebihan Pembayaran dan Denda Keterlambatan atas Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan dan Pengadaan Baju Kafilah MTQ Kabupaten pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp92.749.000,00		-	
902	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Muhardison, MPH 19761119 200604 1 001			-	
905	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	KASPUL ASRAL, S.Ag,MM 19751107 200501 1 006	Pengelolaan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Belanja Hibah Belum Tertib pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah sebesar Rp10.000.000,00		-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
906	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	MUHARDISON, MPH 19761119 200604 1 001			-	
907	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	BAZNAS Z Lubis	Kelebihan pembayaran atas komponen belanja hibah yang tidak sesuai perjanjian hibah sebesar Rp10.000.000,00		-	
909	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PARSIYATI, S.E., M.M. 19811125 201001 2 003	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah Sebesar Rp2.208.648,58 dan denda Keterlambatan sebesar Rp12.964.257,12		-	
910	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	EKI ANWAR, S.AP, M.M. 19770101 200501 1 020			-	
912	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	CV. Anak Buah Jao SYAFRIADI 1372012702770021	Denda Keterlambatan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah sebesar Rp12.964.257,12	12.964.257,12	12.964.257,12	
913	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	BOBBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si 198205212000121002 1312032105820002	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Rehab SDN 10 Sitiung Senilai Rp10.503.874,69 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Mebel Sekolah Dasar Sebesar Rp30.853.252,61		-	
914	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	DEDET, S.Pd 19880908 201402 1 002			-	
915	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	Pokmas Gunung Berseri TRISON SEPRIADI 1310040109760003	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Rehab SDN 10 Sitiung Senilai Rp10.503.874,69	10.503.874,69	7.003.874,69	
917	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	ANDAR ATMAJA, ST, MT. 19840329 201101 1 011	Kekurangan Volume 4 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR		-	
918	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	KASPENDRI, ST 19751111 201410 1 003	Kekurangan Volume 3 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR		-	
919	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	YOPI KHAIRUL SYAHID, ST 19740612 200501 1 006	Kekurangan Volume 3 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR		-	
921	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PT Ratu Agung Pitoelas DITTO ADITYA, ST 1371101703810004	Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Paket III DAU 2024 sebesar Rp286.478.468,00	286.478.468,00	131.478.468,00	
922	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PT Sinatria Inti Surya HERU SEPTION, ST (Direktur) 1304053009920005	Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan Paket II DAU 2024 Sebesar Rp182.030.724,8	182.030.724,84	144.030.724,84	
923	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PT Sinatria Inti Surya DANIEL MASWADI, ST (PPK) 19780807 201101 1 006	Kekurangan Volume 1 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR		-	
924	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PT Sinatria Inti Surya YOPI KHAIRUL SYAHID, ST (PPTK) 19740612 200501 1 006	Kekurangan Volume 1 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR		-	
926	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	dr. SUJITO, M.KM 19790821 200804 1 001	Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Video Bronchoscope EB-500 for HD-350 Sistem Minimal Sebesar Rp189.510.450,62		-	

NO	NOMOR SKTJM	NOMOR LHP	NAMA / NIP / UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	NILAI TEMUAN	Desember 2025	
						PIUTANG TGR	ASET LAIN
927	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	ZEPRI SANDI, S.Kep 19780911 200604 1 010			-	
928	900.1.11.4/95/KPTS-BKD/2025 tanggal 24 Juni 2025	LHP No. 31.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 (LKPD TA 2024)	PT Endo Indonesia WENNY ELVIRA CHOIRUNNISA 3578235011750003	Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Video Bronchoscope EB-500 for HD-350 Sistem Minimal Sebesar Rp189.510.450,62	189.510.450,62	174.510.450,62	
JUMLAH					24.583.830.584,46	6.576.447.465,81	287.907.729,00

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)		Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025		Nilai Piutang 2025	Ket
				Pengurangan 2025			
	Nama	Bulan		Pembayaran	Tgl Bayar		
I	Tahun 2025						
1	M.Lutfi	Januari			3.600,00	3.600,00	Belum Bayar
2	M.Lutfi	Februari			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
3	M.Lutfi	Maret			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
4	M.Lutfi	April			1.200,00	1.200,00	Belum Bayar
5	M.Lutfi	Mei			1.200,00	1.200,00	Belum Bayar
6	M.Lutfi	Juni			1.200,00	1.200,00	Belum Bayar
7	M.Lutfi	Juli			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
8	M.Lutfi	Agustus			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
9	M.Lutfi	September			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
10	M.Lutfi	Oktober			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
11	M.Lutfi	November			3.600,00	3.600,00	Belum Bayar
12	M.Lutfi	Desember			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
13	Sutan Okdini Surahmat	Oktober			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
14	Sutan Okdini Surahmat	November			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
15	Sutan Okdini Surahmat	Desember			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
16	Apri Melda	November			12.000,00	12.000,00	Belum Bayar
17	Apri Melda	Desember			9.600,00	9.600,00	Belum Bayar
18	Suib Adrian	November			9.600,00	9.600,00	Belum Bayar
19	Suib Adrian	Desember			8.400,00	8.400,00	Belum Bayar
20	Arlis	April			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
21	Dedet	November			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
22	Dedet	Desember			3.600,00	3.600,00	Belum Bayar
23	Waldi	November			4.800,00	4.800,00	Belum Bayar
24	Waldi	Desember			3.600,00	3.600,00	Belum Bayar
25	Abdul Hamdi	Oktober			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
26	Abdul Hamdi	November			3.600,00	3.600,00	Belum Bayar
27	Abdul Hamdi	Desember			2.400,00	2.400,00	Belum Bayar
II	Tahun 2024						
1	M.Lutfi	Januari	3.600,00			3.600,00	Belum dibayar
2	M.Lutfi	Februari	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
3	M.Lutfi	Maret	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
4	M.Lutfi	April	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
5	M.Lutfi	Mei	1.200,00			1.200,00	Belum dibayar
6	M.Lutfi	Juni	1.200,00			1.200,00	Belum dibayar
7	M.Lutfi	Juli	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
8	M.Lutfi	Agustus	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
9	M.Lutfi	September	1.200,00			1.200,00	Belum dibayar
10	M.Lutfi	Oktober	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
11	M.Lutfi	November	1.200,00			1.200,00	Belum dibayar
12	M.Lutfi	Desember	2.400,00			2.400,00	Belum dibayar
13	Sutan Okdini Surahmat	September	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025	0,00	Sudah dibayar

No	Uraian (Piutang 2024 dan 2025)		Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket
				Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)		
	Nama	Bulan		Pembayaran	Tgl Bayar			
14	Sutan Okdini Surahmat	Oktober	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
15	Sutan Okdini Surahmat	November	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
16	Sutan Okdini Surahmat	Desember	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
17	Yudi Fernandes	September	2.400,00				2.400,00	Belum dibayar
18	Yudi Fernandes	Oktober	1.200,00				1.200,00	Belum dibayar
19	Yudi Fernandes	November	1.200,00				1.200,00	Belum dibayar
20	Yudi Fernandes	Desember	1.200,00				1.200,00	Belum dibayar
21	Apri Melda	November	12.000,00	12.000,00	Sudah dilunasi		0,00	Sudah dibayar
22	Apri Melda	Desember	8.000,00	8.000,00	Sudah dilunasi		0,00	Sudah dibayar
23	Junaidi	Desember	1.200,00	1.200,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
24	Ade Anastasia	Desember	10.800,00	10.800,00	Sudah dilunasi		0,00	Sudah dibayar
25	Aziz Muslim	Desember	8.400,00	8.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
26	Fauzi	Desember	9.600,00	9.600,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
27	Dedet	Desember	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
28	Roni Friandi Putra	Desember	2.400,00	2.400,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
29	Rudi Novriananda	Desember	3.600,00	3.600,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
30	Ilham Ananda	Desember	3.600,00	3.600,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
31	Gustika Putri	Desember	4.800,00	4.800,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
32	Tata	Desember	6.000,00	6.000,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
33	Dwi Fuji Astuti	Desember	12.000,00	12.000,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
34	Widya Sari	Oktober	4.800,00	4.800,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
35	Widya Sari	November	4.800,00	4.800,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
36	Widya Sari	Desember	4.800,00	4.800,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
37	Adek Widodo	Desember	6.000,00	6.000,00	Sudah dilunasi di Januari 2025		0,00	Sudah dibayar
	Jumlah		146.000,00	114.800,00		99.600,00	130.800,00	

Piutang Kapitasi JKN pada FKTP
Pada RSUD, Labkesda dan Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai Piutang 2024	Mutasi 2025			Nilai Piutang 2025	Ket	Penyisihan Piutang 2025			Penyisihan Piutang 2024
			Pengurangan 2025		Penambahan (Piutang Baru 2025)			Kualitas Piutang 2025	% Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang 2025	
			Pembayaran	Tgl Bayar							
1	RSUD Sungai Dareh	0,00	0,00		0,00	0,00					
2	RSUD Sungai Rumbai	0,00	0,00		0,00	0,00					
3	Puskesmas Sungai Rumbai	62.577,00	62.577,00	15 Januari 2025	48.923,00	48.923,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	244,62	312,89
4	Puskesmas Koto Besar	44.012,00	44.012,00	15 Januari 2025	103.907,00	103.907,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	519,535	220,06
5	Puskesmas Sungai Limau	13.802,00	13.802,00	15 Januari 2025	6.912,00	6.912,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	34,56	69,01
6	Puskesmas Koto Baru	65.741,00	65.741,00	15 Januari 2025	95.415,00	95.415,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	477,075	328,705
7	Puskesmas Tiumang	21.333,00	21.333,00	15 Januari 2025	19.251,00	19.251,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	96,255	106,665
8	Puskesmas Padang Laweh	72.450,00	72.450,00	15 Januari 2025	36.548,00	36.548,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	182,74	362,25
9	Puskesmas Sitiung I	35.545,00	35.545,00	15 Januari 2025	130.020,00	130.020,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	650,1	177,725
10	Puskesmas Timpeh	18.942,00	18.942,00	15 Januari 2025	79.121,00	79.121,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	395,605	94,71
11	Puskesmas Gunung Medan	29.671,00	29.671,00	15 Januari 2025	44.744,00	44.744,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	223,72	148,355
12	Puskesmas Sitiung II	39.138,00	39.138,00	15 Januari 2025	68.079,00	68.079,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	340,395	195,69
13	Puskesmas Beringin Sakti	21.597,00	21.597,00	15 Januari 2025	46.706,00	46.706,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	233,53	107,985
14	Puskesmas Silago	15.220,00	15.220,00	15 Januari 2025	77.800,00	77.800,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	389	76,1
15	Puskesmas Sungai Dareh	5.704,00	5.704,00	15 Januari 2025	281.766,00	281.766,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	1408,83	28,52
16	Puskesmas Sialang	13.748,00	13.748,00	15 Januari 2025	87.458,00	87.458,00	15 januari 2026	Lancar	0,50%	437,29	68,74
17	Labkesda	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Jumlah	459.480,00	459.480,00		1.126.650,00	1.126.650,00				5.633,25	2.297,40

Catatan:

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAP SISA PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	OPD	'0001 Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	00002 Bahan-Bahan Kimia	'0004 Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0005 Belanja Bahan-Bahan Baku	'0010 Bahan-Isi Tabung Gas	'0011 Bahan- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0012 Belanja Bahan- Bahan Lainnya	'0015 Suku Cadang- Suku Cadang Alat Kedokteran	0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0024 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0025 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	'0026 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	'0027 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
1	2	5	6	7		8	9		10		12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090,000.00
2	DINAS PENDIDIKAN BOS	3,026,000.00	631,691.00	2,200,000.00	1,050,000.00	771,000.00	-	41,688,000.00	-	-	132,561,980.00	111,000.00	38,284,090.00	2,180,000.00
3	DINAS PENDIDIKAN BOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	2,015,503,796.47	-	100,000.00	-	-	-
5	BLUD PUSKESMAS	-	9,319,743.67	-	-	-	-	375,000.00	1,345,562,733.13	-	4,323,282.50	-	-	200,000.00
6	RSUD SUNGAI DAREH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BLUD RSUD SUNGAI DAREH	-	47,582,952.20	-	-	13,944,000.00	-	113,223,781.55	885,787,142.06	-	15,538,200.00	24,549,000.00	10,836,431.00	260,000.00
8	DINAS PUPR	4,787,057,532.50	71,253,675.00	0.00	-	-	-	-	-	-	4,800,000.00	-	-	-
9	DINAS PERKIMTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,000.00	-	-
10	DINAS SATPOL PP & DAMKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00	-	-
11	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-
12	DINSOSP3APPKB	-	-	-	-	-	-	-	9,100,000.00	-	-	-	-	-
13	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	22,150,000.00	-	-	8,045,000.00	-	-	-	-
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800,000.00	-
16	DINAS PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,600.00	23,475,000.00	-
18	DINAS KOMINFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DISKUMPERDAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435,000.00	-	-
20	DINAS DPMPSTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINAS BUDPARPORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,000.00	-	60,000.00
23	DINAS PERTANIAN	-	-	-	-	-	24,000,000.00	-	-	-	320,000.00	579,000.00	240,000.00	70,000.00
24	DINAS TRANSNAKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	-
25	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,549,800.00	5,250,000.00	800,000.00	300,000.00
26	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,000.00	1,365,000.00	-	-
27	BAPPERIDA	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	180,000.00	-	-
28	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664,000.00	294,000.00	-	-
29	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,000.00	230,000.00	-	-
30	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,000.00	-	-	-
31	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,000.00	-	-	50,000.00
32	KECAMATAN SITIUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN KOTO BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
34	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
35	KECAMATAN SEMBILAN KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN TIMPEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-
37	KECAMATAN KOTO SALAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	100,000.00
38	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	90,000.00
39	KECAMATAN KOTO BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,000.00	-	-
40	KECAMATAN PADANG LAWEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	KECAMATAN TIUMANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan BANGPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,000.00	-	220,000.00
JUMLAH KABUPATEN		4,790,083,532.50	128,788,061.87	2,200,000.00	1,050,000.00	14,715,000.00	46,150,000.00	155,286,781.55	4,255,953,671.67	8,045,000.00	161,993,262.50	35,494,600.00	94,515,521.00	6,640,000.00

Persediaan Habis Pakai														
'0029 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	'0030 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	'0031 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	'0037 Obat-Obatan-Obat	0038 Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0039 Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	'0040 Barang untuk Dijual/Diserahkan lainnya	'0043 Natura dan Pakan-Natura	0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	'0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0053Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0055 Belanja Makanan dan Minuman dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
17	18	19				20	21	22	23	24				
-	-	-	-	-	-	-	-	387,090,000.00	-	-	-	-	-	-
4,500,000.00	43,427,500.00	18,781,500.00	196,000.00	22,900,500.00	-	1,040,000.00	-	-	-	-	-	6,242,000.00	13,439,000.00	52,604,750.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525,000.00	5,990,000.00	-	-	-	752,000.00	1,998,979,669.13	1,010,917,258.63	-	648,055,922.92	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,779,330.00	1,691,998,689.26	1,155,290,806.75	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,655,000.00	-	-	-	-	23,484,226.00	989,023,320.90	15,801,807.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,762,731,600.00	744,730,360.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00	1,873,945,300.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	828,619,565.00	-	1,718,000.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,513,510.00	-	-	316,480,000.00	72,552,000.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	427,280,775.00	-	-	-	-	-	-
77,477,054.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604,000.00	-	40,000.00	-	-	308,000.00	57,066,500.00	20,127,600.00	-	-	-	-	-	-	-
420,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,900,000.00	-	798,000.00	-	-	1,593,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,111,000.00	-	-	-	-	323,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525,000.00	-	-	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,183,054.00	49,417,500.00	19,619,500.00	196,000.00	22,900,500.00	28,894,556.00	4,739,608,179.29	2,205,650,982.38	4,005,721,940.00	3,266,731,582.92	318,198,000.00	72,552,000.00	6,242,000.00	13,439,000.00	52,604,750.00

0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Total	belanja Komponen-komponen Peralatan	Total	Jumlah Total
	30	33	34	35
-	390,180,000.00	-	-	390,180,000.00
3,150,000.00	388,785,011.00	27,575,000.00	27,575,000.00	416,360,011.00
-	-	-	-	-
-	5,680,823,647.16	-	-	5,680,823,647.16
-	4,208,849,585.31	-	-	4,208,849,585.31
-	-	-	-	-
-	2,144,685,860.71	-	-	2,144,685,860.71
-	7,370,573,167.50	-	-	7,370,573,167.50
-	2,474,520,300.00	-	-	2,474,520,300.00
-	420,000.00	-	-	420,000.00
-	120,000.00	-	-	120,000.00
-	840,937,565.00	-	-	840,937,565.00
-	422,740,510.00	-	-	422,740,510.00
-	427,280,775.00	-	-	427,280,775.00
-	98,277,054.00	-	-	98,277,054.00
-	-	-	-	-
-	23,636,600.00	-	-	23,636,600.00
-	-	-	-	-
-	459,000.00	-	-	459,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	225,000.00	-	-	225,000.00
-	103,355,100.00	-	-	103,355,100.00
-	970,000.00	-	-	970,000.00
-	13,190,800.00	-	-	13,190,800.00
-	2,569,000.00	-	-	2,569,000.00
-	190,000.00	-	-	190,000.00
-	3,392,000.00	-	-	3,392,000.00
-	264,000.00	-	-	264,000.00
-	148,000.00	-	-	148,000.00
-	126,000.00	-	-	126,000.00
-	-	-	-	-
-	180,000.00	-	-	180,000.00
-	20,000.00	-	-	20,000.00
-	75,000.00	-	-	75,000.00
-	115,000.00	-	-	115,000.00
-	284,000.00	-	-	284,000.00
-	160,000.00	-	-	160,000.00
-	115,000.00	-	-	115,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,357,000.00	-	-	1,357,000.00
3,150,000.00	24,599,024,975.67	27,575,000.00	27,575,000.00	24,626,599,975.67

DAFTAR RINCIAN KAPITALISASI MENJADI ASET 2025

No	KodeBarang 1.3	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Jumlah Barang	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1. Dinas Kesehatan								280,041,509.00	-
1	03.03.03.06.01	Perencanaan dan pengawasan Gedung RI Paru dan Ruang Cathlab	1		Pembelian	2025	Baik	280,041,509.00	
2. Dinas Pendidikan								18,379,000.00	-
1	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket C Kelas XII	7		BOSP	2025	Baik	336,000.00	
2	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket C Kelas XI	6		BOSP	2025	Baik	336,000.00	
3	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket C Kelas XI	6		BOSP	2025	Baik	336,000.00	
4	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket B Kelas IX	6		BOSP	2025	Baik	276,000.00	
5	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket B Kelas VIII	6		BOSP	2025	Baik	288,000.00	
6	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket B Kelas VII	6		BOSP	2025	Baik	372,000.00	
7	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket A Kelas VI	9		BOSP	2025	Baik	432,000.00	
8	1.3.5.01.001.001.012	Buku Mulok Paket A Kelas V	11		BOSP	2025	Baik	528,000.00	
9	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 1	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
10	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 2	10		BOSP	2025	Baik	330,000.00	
11	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 3	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
12	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 4	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
13	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
14	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Paket A Kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
15	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 1	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
16	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 2	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
17	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 3	10		BOSP	2025	Baik	360,000.00	
18	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 4	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
19	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	

No	KodeBarang 1.3	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Jumlah Barang	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
20	1.3.5.01.001.001.012	Bahasa Indonesia Paket A kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
21	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 1	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
22	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 2	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
23	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 3	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
24	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 4	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
25	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
26	1.3.5.01.001.001.012	Matematika Paket A kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
27	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 1	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
28	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 2	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
29	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 3	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
30	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 4	5		BOSP	2025	Baik	205,000.00	
31	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 5	5		BOSP	2025	Baik	205,000.00	
32	1.3.5.01.001.001.012	Pendidikan Olahraga dan rekreasi Paket A Kelas 6	5		BOSP	2025	Baik	205,000.00	
33	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 1	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
34	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 2	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
35	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 3	5		BOSP	2025	Baik	180,000.00	
36	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 4	8		BOSP	2025	Baik	328,000.00	
37	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	410,000.00	
38	1.3.5.01.001.001.012	Seni Budaya dan Prakarya Paket A Kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	423,000.00	
39	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Alam Paket A Kelas 4	10		BOSP	2025	Baik	465,000.00	
40	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Alam Paket A Kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
41	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Alam Paket A Kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
42	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Sosial Paket A Kelas 4	10		BOSP	2025	Baik	440,000.00	
43	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Sosial Paket A Kelas 5	10		BOSP	2025	Baik	410,000.00	

No	KodeBarang 1.3	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Jumlah Barang	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
44	1.3.5.01.001.001.012	Ilmu Pengetahuan Sosial Paket A Kelas 6	10		BOSP	2025	Baik	410,000.00	
45	1.3.5.01.001.001.012	Kamus Bahasa Inggris Paket A	3		BOSP	2025	Baik	375,000.00	
46	1.3.2.10.002.003.017	Harddisk	1		BOSP	2025	Baik	1,300,000.00	
47	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Guru	1		BOSP	2025	Baik	1,009,000.00	
JUMLAH TOTAL								298,420,509.00	

DAFTAR RINCIAN HIBAH 2025

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1. Dinas Kesehatan								28,851,000.00	-
1	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	000023	Lion / 2 Pintu	Hibah	2017	Baik	3,685,000.00	
2	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	000003	Optoma	Hibah	2016	Baik	5,345,000.00	
3	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	000004	Lokal / Tempahan	Hibah	2006	Baik	3,685,000.00	
4	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	000269	Lokal / Bertingkat	Hibah	2021	Baik	1,600,000.00	
1	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	000270	Lokal / Bertingkat	Hibah	2021	Baik	1,600,000.00	
2	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000110	Daikin / 1 PK	Hibah	2019	Baik	6,468,000.00	
3	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000111	Daikin / 1 PK	Hibah	2019	Baik	6,468,000.00	
2. Dinas Pendidikan								30,544,192,707.00	-
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0026	lemari alat	Hibah	2025	Baik	3,885,000.00	
2	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001	lemari besi	Hibah	2025	Baik	2,240,000.00	
3	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	0004	filing kabinet	Hibah	2025	Baik	2,830,000.00	
4	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001	tempat tidur uks	Hibah	2025	Baik	1,316,000.00	
5	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	0001	lemari kaca geser	Hibah	2025	Baik	2,895,000.00	
6	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0027	lemari simpan	Hibah	2025	Baik	2,000,000.00	
7	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0002 s/d 0003	lemari loker	Hibah	2025	Baik	6,000,000.00	
8	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0009	papan pameran	Hibah	2025	Baik	1,450,000.00	
9	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0003	lemari obat	Hibah	2025	Baik	1,221,000.00	
10	1.3.2.05.002.001.025	Kasur/Spring Bed	0001	kasur matras	Hibah	2025	Baik	2,075,000.00	
11	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0416 s/d 0422	meja baca kelompok	Hibah	2025	Baik	8,330,000.00	
12	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0013	lemari administrasi	Hibah	2025	Baik	26,000,000.00	
13	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0014	lemari obat	Hibah	2025	Baik	2,000,000.00	
14	1.3.2.05.003.007.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	0001 s/d 0008	rak buku 1 muka	Hibah	2025	Baik	13,200,000.00	
15	1.3.2.05.003.007.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	0009 s/d 0016	rak buku 2 muka	Hibah	2025	Baik	14,400,000.00	
16	1.3.2.19.001.003.003	Matras	0001 s/d 0002	matras	Hibah	2025	Baik	2,600,000.00	
17	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0002	lemari KUNCI	Hibah	2025	Baik	1,775,000.00	
18	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	0001	LEMARI KACA GESER	Hibah	2025	Baik	2,895,000.00	
19	1.3.2.05.001.004.020	Lemari Display	0001	LEMARI SIMPAN	Hibah	2025	Baik	1,945,000.00	
20	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0003	LEMARI LOKER	Hibah	2025	Baik	1,825,000.00	
21	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0005 s/d 0006	PAPAN PAMERAN	Hibah	2025	Baik	2,900,000.00	
22	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0087 s/d 0092	meja alat	Hibah	2025	Baik	9,900,000.00	
23	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	0004 s/d 0005	LEMARI KACA GESER	Hibah	2025	Baik	5,790,000.00	
24	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0002	LEMARI besi	Hibah	2025	Baik	4,480,000.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
25	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0003 s/d 0004	LEMARI alat	Hibah	2025	Baik	7,400,000.00	
26	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0005	lemari obat	Hibah	2025	Baik	2,352,500.00	
27	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	0002 s/d 0003	filing kabinet	Hibah	2025	Baik	5,660,000.00	
28	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001 s/d 0002	dipan uks	Hibah	2025	Baik	3,400,000.00	
29	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0002 s/d 0004	Lemari Besi	Hibah	2025	Baik	6,720,000.00	
30	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0005 s/d 0007	Lemari Alat / Tools Cabinet	Hibah	2025	Baik	11,655,000.00	
31	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0008 s/d 0009	Lemari Obat	Hibah	2025	Baik	2,442,000.00	
32	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	0003	Filing Kabinet 4 Laci	Hibah	2025	Baik	2,830,000.00	
33	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001 s/d 0002	Tempat Tidur Periksa	Hibah	2025	Baik	2,632,000.00	
34	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0013	Lemari Arsip	Hibah	2025	Baik	1,200,000.00	
35	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0014	Lemari Kunci	Hibah	2025	Baik	1,750,000.00	
36	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	0002	Lemari Kaca Geser	Hibah	2025	Baik	2,895,000.00	
37	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0015	Lemari Simpan	Hibah	2025	Baik	1,945,000.00	
38	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0016	Lemari Locker	Hibah	2025	Baik	1,825,000.00	
39	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0004 s/d 0005	Papan Pameran	Hibah	2025	Baik	2,900,000.00	
40	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0004	Lemari besi	Hibah	2025	Baik	11,100,000.00	
41	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0005 s/d 0006	Lemari Obat	Hibah	2025	Baik	2,442,000.00	
42	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0007 s/d 0008	Lemari alat	Hibah	2025	Baik	7,770,000.00	
43	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	0001	Filing kabinet	Hibah	2025	Baik	2,945,000.00	
44	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0003	lemari kunci	Hibah	2025	Baik	1,775,000.00	
45	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	0001	lemari kaca geser	Hibah	2025	Baik	2,895,000.00	
46	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0004	lemari simpan	Hibah	2025	Baik	1,945,000.00	
47	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0005	lemari locker	Hibah	2025	Baik	1,825,000.00	
48	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0004 s/d 0005	papan pameran	Hibah	2025	Baik	2,900,000.00	
49	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0003	Tempat Tidur Matras Uk. 90x200cm	Hibah	2025	Baik	1,663,000.00	
50	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0002	Lemari Besi	Hibah	2025	Baik	2,442,000.00	
51	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0002 s/d 0018	Lemari Alat / Tools Cabinet	Hibah	2025	Baik	66,045,000.00	
52	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0003 s/d 0004	Lemari Besi	Hibah	2025	Baik	8,325,000.00	
53	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0022 s/d 0023	Lemari Obat	Hibah	2025	Baik	3,800,000.00	
54	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	0001 s/d 0003	Filing Kabinet 4 Laci	Hibah	2025	Baik	8,491,500.00	
55	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001 s/d 0002	Tempat tidur UKS	Hibah	2025	Baik	2,634,000.00	
56	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0002 s/d 0005	lemari buku	Hibah	2025	Baik	6,800,000.00	
57	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	0001 s/d 0002	rak buku satu muka	Hibah	2025	Baik	2,442,000.00	
58	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	0003 s/d 0006	rak buku dua muka	Hibah	2025	Baik	7,770,000.00	
59	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0002	lemari besi	Hibah	2025	Baik	2,378,900.00	
60	1.3.2.05.001.004.006	Filing Cabinet Kayu	0001 s/d 0002	filing kabinet	Hibah	2025	Baik	5,890,000.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
61	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0008	Lemari Arsip	Hibah	2025	Baik	1,200,000.00	
62	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0009	Lemari Kunci	Hibah	2025	Baik	1,750,000.00	
63	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0010	Lemari Kaca Geser	Hibah	2025	Baik	2,895,000.00	
64	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0011	Lemari Simpan	Hibah	2025	Baik	1,945,000.00	
65	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0012	Lemari Loker	Hibah	2025	Baik	1,825,000.00	
66	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0004	Papan Pameran	Hibah	2025	Baik	1,450,000.00	
67	1.3.2.05.002.001.010	Tempat Tidur Kayu	0001 s/d 0002	Ranjang	Hibah	2025	Baik	2,790,000.00	
68	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0001	Lemari	Hibah	2025	Baik	2,800,000.00	
69	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001 s/d 0002	Loker	Hibah	2025	Baik	3,300,000.00	
70	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	0002	Kursi Tamu/Sofa Set	Hibah	2025	Baik	7,547,500.00	
71	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	0015	Meja Kepsek	Hibah	2025	Baik	3,000,000.00	
72	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	0002	Kursi Kepsek	Hibah	2025	Baik	1,500,000.00	
73	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0007	Meja Administrasi	Hibah	2025	Baik	1,350,000.00	
74	1.3.2.05.002.001.010	Tempat Tidur Kayu	0001 s/d 0002	Tempat Tidur Periksa	Hibah	2025	Baik	4,243,250.00	
75	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0014	meja guru	Hibah	2025	Baik	2,406,000.00	
76	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	0002	KURSI GURU	Hibah	2025	Baik	1,765,000.00	
77	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0015	meja uks	Hibah	2025	Baik	2,128,500.00	
78	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001	Ranjang uks	Hibah	2025	Baik	3,430,000.00	
79	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	0003	lemari besar	Hibah	2025	Baik	3,500,000.00	
80	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	0005 s/d 0006	rak mainan	Hibah	2025	Baik	3,000,000.00	
81	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	0007 s/d 0010	rak buku anak	Hibah	2025	Baik	6,000,000.00	
82	1.3.2.05.002.001.043	Rak Sepatu (Almunium)	0003 s/d 0004	rak sepatu anak	Hibah	2025	Baik	3,000,000.00	
83	1.3.2.05.002.001.034	Bangku Sekolah	0017 s/d 0030	Kursi Anak	Hibah	2025	Baik	18,312,000.00	
84	1.3.2.05.002.001.034	Bangku Sekolah	0031 s/d 0044	Meja Anak	Hibah	2025	Baik	27,300,000.00	
85	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0005 s/d 0005	Meja Guru	Hibah	2025	Baik	4,812,000.00	
86	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	0001 s/d 0002	Rak buku	Hibah	2025	Baik	4,480,000.00	
87	1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	0002 s/d 0003	Papan Tulis	Hibah	2025	Baik	2,240,000.00	
88	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	0003 s/d 0004	Rak Mainan	Hibah	2025	Baik	4,927,000.00	
89	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0017	Meja	Hibah	2025	Baik	2,406,000.00	
90	1.3.2.05.002.001.010	Tempat Tidur Kayu	0001	Tempat tidur uks	Hibah	2025	Baik	2,014,500.00	
91	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0001	Lemari UKS	Hibah	2025	Baik	2,750,000.00	
92	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0006 s/d 0010	Meja Guru	Hibah	2025	Baik	9,624,000.00	
93	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	0001	Sofa	Hibah	2025	Baik	12,320,000.00	
94	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0002	Lemari Arsip	Hibah	2025	Baik	3,373,000.00	
95	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0004	Lemari/ Loker	Hibah	2025	Baik	1,350,000.00	
96	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	0003	Papan Statistik	Hibah	2025	Baik	1,680,500.00	
97	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	0022	Kursi Tamu/Sofa Set	Hibah	2025	Baik	7,750,000.00	
98	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0008	Meja Kepsek	Hibah	2025	Baik	3,412,500.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
99	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	0003	Kursi Kepsek	Hibah	2025	Baik	2,750,000.00	
100	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001 s/d 0002	Tempat Tidur	Hibah	2025	Baik	2,587,500.00	
101	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	0002	Kursi tamu	Hibah	2025	Baik	8,000,000.00	
102	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	0008 s/d 0015	Meja Biro	Hibah	2025	Baik	9,600,000.00	
103	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0001	Lemari	Hibah	2025	Baik	2,100,000.00	
104	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	0001	Loker	Hibah	2025	Baik	2,000,000.00	
105	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0001 s/d 0002	Tempat Tidur UKS	Hibah	2025	Baik	2,840,000.00	
106	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	0001 s/d 0002	Almari	Hibah	2025	Baik	2,700,000.00	
107	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	0002 s/d 0003	Tempat tidur	Hibah	2025	Baik	3,789,250.00	
108	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	0002	Kursi Tamu	Hibah	2025	Baik	6,147,500.00	
109	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	0072	Meja Kepsek	Hibah	2025	Baik	2,500,000.00	
110	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	0001	Kursi Kepsek	Hibah	2025	Baik	2,000,000.00	
111	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	0006 s/d 0020	Asus Chrome Book	Hibah	2025	Baik	87,000,000.00	
112	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0006	pembangunan ruang kantor guru	Hibah	2025	Baik	530,646,440.00	
113	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	pembangunan ruang labor komputer	Hibah	2025	Baik	393,967,800.00	
114	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	pembangunan ruang uks	Hibah	2025	Baik	205,200,400.00	
115	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	pembangunan wc 1	Hibah	2025	Baik	195,626,400.00	
116	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0006	pembangunan wc 2	Hibah	2025	Baik	217,238,340.00	
117	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0007	pembangunan wc 3	Hibah	2025	Baik	186,366,460.00	
118	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	rehab ruang kelas a	Hibah	2025	Baik	184,378,460.00	
119	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	rehab ruang kelas b	Hibah	2025	Baik	90,982,700.00	
120	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0007	pembangunan ruang uks	Hibah	2025	Baik	176,071,754.00	
121	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	rehab kelas a	Hibah	2025	Baik	316,327,275.00	
122	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	rehab ruang b	Hibah	2025	Baik	171,732,538.00	
123	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-Ilain	0001	rehab toilet	Hibah	2025	Baik	63,862,433.00	
124	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0007	pembangunan ruang uks	Hibah	2025	Baik	175,913,490.00	
125	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	pembangunan wc 1	Hibah	2025	Baik	189,674,300.00	
126	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	pembangunan wc 2	Hibah	2025	Baik	199,449,370.00	
127	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	pembangunan wc 3	Hibah	2025	Baik	185,475,689.00	
128	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	rehab kelas a	Hibah	2025	Baik	242,015,700.00	
129	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	rehab kelas b	Hibah	2025	Baik	254,773,581.00	
130	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	rehab kelas c	Hibah	2025	Baik	381,321,702.00	
131	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	rehab kelas d	Hibah	2025	Baik	172,259,133.00	
132	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	rehab kelas e	Hibah	2025	Baik	623,802,478.00	
133	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	rehab perpustakaan	Hibah	2025	Baik	188,764,480.00	
134	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0006	rehab lab tik	Hibah	2025	Baik	203,210,991.00	
135	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	rehab ruang adm	Hibah	2025	Baik	299,682,741.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
136	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	rehab kelas	Hibah	2025	Baik	468,614,155.00	
137	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	0001	rehab wc a	Hibah	2025	Baik	82,479,552.00	
138	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	0002	rehab wc b	Hibah	2025	Baik	79,983,552.00	
139	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain	0002	pembangunan ruang uks	Hibah	2025	Baik	224,222,250.00	
140	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	pembangunan wc 2	Hibah	2025	Baik	184,721,172.00	
141	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	pembangunan labor	Hibah	2025	Baik	382,787,323.00	
142	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	pembangunan wc 1	Hibah	2025	Baik	188,643,406.00	
143	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	rehab kelas	Hibah	2025	Baik	333,944,553.00	
144	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0001	rehab lab ipa	Hibah	2025	Baik	231,427,796.00	
145	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	pembangunan ruang labor	Hibah	2025	Baik	382,814,427.00	
146	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	pembangunan wc 1	Hibah	2025	Baik	198,684,998.00	
147	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0003	pembangunan wc 2	Hibah	2025	Baik	198,168,575.00	
148	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0002	RUANG ADM	Hibah	2025	Baik	519,050,000.00	
149	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	KELAS BARU	Hibah	2025	Baik	270,649,000.00	
150	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	REHAB LABOR	Hibah	2025	Baik	140,497,000.00	
151	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0001	REHAB PUSTAKA	Hibah	2025	Baik	128,080,000.00	
152	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	UKS	Hibah	2025	Baik	198,234,000.00	
153	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	REHAB KELAS	Hibah	2025	Baik	179,595,000.00	
154	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	TOILET	Hibah	2025	Baik	193,579,000.00	
155	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	UKS	Hibah	2025	Baik	240,805,510.00	
156	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0002	ADMINISTRASI	Hibah	2025	Baik	611,569,910.00	
157	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	LABOR TIK	Hibah	2025	Baik	458,136,750.00	
158	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehab Gedung A	Hibah	2025	Baik	149,358,160.00	
159	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	Rehab Gedung B	Hibah	2025	Baik	326,354,860.00	
160	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	0001	rehab toilet	Hibah	2025	Baik	48,983,810.00	
161	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0009	pembangunan kelas Baru	Hibah	2025	Baik	271,930,661.00	
162	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	Pembangunan Ruang UKS Baru	Hibah	2025	Baik	169,815,798.00	
163	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	0001	Rehap Toilet 1	Hibah	2025	Baik	80,630,825.00	
164	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	Rehap Toilet 2	Hibah	2025	Baik	83,097,696.00	
165	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	U K S	Hibah	2025	Baik	246,271,867.00	
166	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0003	WC / Toilet	Hibah	2025	Baik	197,482,825.00	
167	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0004	WC / Toilet	Hibah	2025	Baik	197,482,825.00	
168	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0005	WC / Toilet	Hibah	2025	Baik	194,792,266.00	
169	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0002	Labor IPA	Hibah	2025	Baik	412,675,710.00	
170	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	0003	Labor Computer	Hibah	2025	Baik	357,621,741.00	
171	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	Rehab Lokal A	Hibah	2025	Baik	388,663,737.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
172	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	Rehab Lokal B	Hibah	2025	Baik	239,752,889.00	
173	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	Rehab Lokal C	Hibah	2025	Baik	139,478,556.00	
174	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehab Lokal D	Hibah	2025	Baik	145,260,140.00	
175	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehab Perpustakaan	Hibah	2025	Baik	223,319,648.00	
176	1.3.3.01.001.030.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	0001	Rehab WC / Toilet	Hibah	2025	Baik	95,544,296.00	
177	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	RUANG KELAS	Hibah	2025	Baik	462,954,500.00	
178	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0002	RUANG PERPUSTAKAAN	Hibah	2025	Baik	167,709,200.00	
179	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	TOILET	Hibah	2025	Baik	91,039,400.00	
180	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0002	Gedung (Pembangunan Ruang ADM)	Hibah	2025	Baik	524,361,250.00	
181	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	Gedung (Rehab Ruang Kelas)	Hibah	2025	Baik	170,292,750.00	
182	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	wc baru	Hibah	2025	Baik	208,348,559.00	
183	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	RK 1	Hibah	2025	Baik	365,216,225.00	
184	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0006	RK 2	Hibah	2025	Baik	150,156,942.00	
185	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0007	RK 3	Hibah	2025	Baik	381,445,255.00	
186	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0008	R. ADM	Hibah	2025	Baik	432,049,694.00	
187	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	Gedung (Rehab Ruang Kelas)	Hibah	2025	Baik	385,040,064.16	
188	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Gedung (Rehab Ruang Kelas)	Hibah	2025	Baik	385,040,064.16	
189	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	Toilet	Hibah	2025	Baik	129,269,562.16	
190	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	UKS	Hibah	2025	Baik	120,325,020.51	
191	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	RKB Toilet	Hibah	2025	Baik	128,951,144.26	
192	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Ruang Kelas + uks	Hibah	2025	Baik	456,108,810.85	
193	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	384,091,630.14	
194	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0001	Perpustaka	Hibah	2025	Baik	128,030,543.38	
195	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0003	Ruang Admistrasi	Hibah	2025	Baik	128,030,543.38	
196	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	Toilet	Hibah	2025	Baik	128,511,554.00	
197	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0004	UKS	Hibah	2025	Baik	119,619,461.00	
198	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0004	Ruang ADM	Hibah	2025	Baik	212,656,819.00	
199	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	511,815,696.00	
200	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	382,782,273.00	
201	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0002	Perpustakaan	Hibah	2025	Baik	127,594,091.00	
202	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	RKB	Hibah	2025	Baik	229,273,135.00	
203	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	UKS	Hibah	2025	Baik	84,853,886.00	
204	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	TOILET	Hibah	2025	Baik	142,629,464.00	
205	1.3.3.01.001.025.001	Bangunan Lantai Jemur Permanen	0001	taman bermain	Hibah	2025	Baik	94,022,014.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
206	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	Rehap Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	127,811,157.00	
207	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehap Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	127,811,157.00	
208	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehap Ruang Kelas	Hibah	2025	Baik	255,622,314.00	
209	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0001	Rehap Ruang Perpustakaan	Hibah	2025	Baik	127,810,504.00	
210	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	Pembangunan Toilet	Hibah	2025	Baik	257,868,565.00	
211	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	Gedung Ruang Kelas Baru	Hibah	2025	Baik	441,157,139.00	
212	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0002	Gedung Toilet, UKS, ADM	Hibah	2025	Baik	427,052,880.00	
213	1.3.3.01.001.025.001	Bangunan Lantai Jemur Permanen	0001	Taman Bermain Area Bermain	Hibah	2025	Baik	86,709,981.00	
214	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0002	Rehap Ruang Kelas /Ruang Belajar II/ kls 4/ Register 0001	Hibah	2025	Baik	128,790,965.00	
215	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehap Ruang Kelas / Pembangunan RKB/ Rehap kls 5 /register 0003	Hibah	2025	Baik	128,790,965.00	
216	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehap Ruang Kelas /Ruang Belajar II /Kls 1,2 dan 3 /Regiter 0001	Hibah	2025	Baik	386,372,895.00	
217	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0002	Rehap Ruang Perpustakaan /Perpustakaan dan UKS/Register 0001	Hibah	2025	Baik	128,690,658.00	
218	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	Pembangunan Toilet/ Register 0001	Hibah	2025	Baik	130,066,755.00	
219	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Rehap Gedung Kelas	Hibah	2025	Baik	895,285,391.00	
220	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0003	Pembangunan Toilet	Hibah	2025	Baik	129,149,460.00	
221	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	Pembangunan UKS	Hibah	2025	Baik	120,010,207.00	
222	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	Pembangunan ADM	Hibah	2025	Baik	212,692,467.00	
223	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0001	Gedung (Rehab Ruang Kelas)	Hibah	2025	Baik	638,982,887.00	
224	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	0001	Gedung (Rehab Toilet)	Hibah	2025	Baik	53,140,523.00	
225	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0001	Rehab Perpustakaan	Hibah	2025	Baik	127,796,178.00	
226	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0008	Pembangunan toilet	Hibah	2025	Baik	257,344,607.00	
227	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0009	Pembangunan UKS	Hibah	2025	Baik	120,191,177.00	
228	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	Pembangunan ADM	Hibah	2025	Baik	212,993,962.00	
229	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	Ruang Administrasi	Hibah	2025	Baik	213,536,119.00	
230	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0004	Ruang UKS	Hibah	2025	Baik	120,638,217.00	
231	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0005	Toilet	Hibah	2025	Baik	253,176,320.00	
232	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0006	Ruang Kelas unit 1	Hibah	2025	Baik	256,003,782.00	

No	KodeBarang	JENIS BARANG / NAMA BARANG	Nomor Register	MERK / TYPE	Asal/Cara Perolehan Barang	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI BARANG	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
233	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0007	Ruang Kelas unit 2	Hibah	2025	Baik	383,506,273.00	
234	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0001	Perpustakaan	Hibah	2025	Baik	128,900,891.00	
235	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0008	Toilet	Hibah	2025	Baik	78,689,966.00	
3. Dinas Perhubungan								598,000,000.00	-
1	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000004	ISUZU / NLR85U-HEYIN1	Hibah	2024	Baik	598,000,000.00	
4. Dinas PUPR								39,600,000.00	-
1	1.3.1.01.003.009.001	Tanah untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Besih	000010	Tanah UPT SPAM Pulau Punjung (Pulau Sawah)	Hibah	2025	Baik	39,600,000.00	
5. Dinas PERKIMTAN								5,319,400,000.00	-
1	01.03.01.01.02.02.002	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan	000010	Fasilitas sosial Perumahan Mutia Garden	Hibah	2024	Baik	297,600,000.00	
1	01.03.01.01.02.02.002	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan	000010	Fasilitas Umum Perumahan Mutia Garden	Hibah	2024	Baik	1,453,800,000.00	
1	01.03.01.01.02.02.002	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan	000010	Fasilitas Umum Perumahan Pasir Putih	Hibah	2024	Baik	309,200,000.00	
1	01.03.01.01.02.02.002	Tanah Kosong yang sudah diperuntukkan	000010	Fasilitas Umum dan Fasilitas sosial Perumahan Rangkings Ventura Residence	Hibah	2024	Baik	3,258,800,000.00	
JUMLAH TOTAL								36,530,043,707.00	

DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN REKLASIFIKASI ASET TETAP 2025

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Jumlah	Satuan	Harga	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi				(ribuan Rp)			
1. Sekretariat Daerah												550,423,000.00	-		
1	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawa	000156	Mitsubishi Pajero Sport Exceed	2022	MK2KRWMDNNJ00034	4D56UBJ5448		Pembelian	1	Unit	542,600,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
1	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000055	HONDA CS ONE	2009	MHJBBAA1199K087579	JBAIE-1087225	BA 7939 VG	Pembelian	1	Unit	7,823,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
2. Kec. Koto Besar												21,750,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	000053	Honda Supra Fit	2006	MH1HB31196K623758	HB31E-1619175	BA 7660 V	Pembelian	1	Unit	6,750,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
3	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	000054	Suzuki Shogun Axelo	2012	MH8BF45SAGJ163238	F496ID434485	BA 2970 V	Pembelian	1	Unit	15,000,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
3. Dinas Kesehatan												2,952,653,502.00	-		
1	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	000105	LG	2020				Pembelian	1	Unit	5,350,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
2	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000096	Epson L 565	2020				Pembelian	1	Unit	5,300,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
3	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Sentral	2025				Pembelian	1	Unit	110,947,527.20	Dari KIB C	Ke Kib F	
4	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	1	Unit	27,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
5	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	1	Unit	25,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
6	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	1	Unit	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
7	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	1	Unit	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
8	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	1	Unit	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
9	1.3.4.1.1.3.1	JJJ		Instalasi Gas	2025				Pembelian	1	Unit	130,918,802.70	Dari KIB C	Ke Kib F	
10	1.3.4.1.1.3.1	JJJ		Instalasi Listrik	2025				Pembelian	1	Unit	289,529,958.97	Dari KIB C	Ke Kib F	
11	1.3.4.1.1.3.1	Bangunan		Bangunan Cathlab	2025				Pembelian	1	Unit	425,110,017.13	Dari KIB C	Ke Kib F	
12	1.3.4.1.1.3.1	Bangunan		Bangunan Ri Paru	2025				Pembelian	1	Unit	1,649,886,236.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
13	1.3.2.5.2.1.17	Backdn dan Meja			2025				Pembelian	1	Unit	49,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
14	04.03.08.02.003	Instalasi Jaringan Pipa gas Lain-lain		Oksigen sentral	2025				Pembelian	1	Unit	163,500,000.00	Dari KIB B	Ke Kib D	
4. Dinas Lingkungan Hidup												399,088,100.00	-		
1	1.3.2.1.1.5.3	Dump Truck	000032		2018	MHCNMR71HJJ089252	B089252	BA 8027 V	Pembelian	1	Unit	399,088,100.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib B	
5. Dinas PUPR												117,363,555,108.00	-		
1	04.01.01.03.001	Jalan Kabupaten Arteri	000436	Perencanaan Paket IX	2024				Pembelian	1	Unit	99,921,000.00	Dari KIB F	ke Kib D	
2	1.3.4.1.1.3.1	Jalan Kabupaten Arteri	000439	Perencanaan Rehab Jalan Paket I Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh Lama Perbaikan Jalan Padang Hialang - Lubuk Labu Rehab Jalan Penghubung Koto Baru - Silago	2025				Pembelian	1	Unit	49,934,000.00	Dari KIB D	Ke Kib F	
3	1.3.4.1.1.3.1	Jalan Kabupaten Lain-lain	000440	Bangunan Pelengkap Jalan Kecamatan Sembilan Koto 2025	2025				Pembelian	1	Unit	146,006,582.00	Dari KIB D	Ke Kib F	
4	1.3.4.03.02.01.004	INSTALASI AIR KOTOR LAIN-LAIN			2018				Pembelian	9	Unit	5,990,073,945.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
5	1.3.4.03.01.01.002	INSTALASI AIR PERMUKAAN KAPASITAS SEDANG			2013				Pembelian	2	Unit	550,000,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
6	1.3.4.01.01.05.001	JALAN DESA			2009-2018				Pembelian	1011	Unit	103,655,465,669.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
7	1.3.4.01.01.05.002	JALAN DESA LAIN-LAIN			2017				Pembelian	23	Unit	2,674,931,402.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
8	1.3.4.01.01.03.003	JALAN KABUPATEN LOKAL		PENATAAN LINGKUNGAN MAKAM BUPATI PERTAMA KAB. DHARMASRAYA DI KOTO PADANG.	2017				Pembelian	1	Unit	103,655,446.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Jumlah	Satuan	Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi							
9	1.3.4.01.01.09.008	JALAN KHUSUS LAINNYA			2017				Pembelian	1	Unit	129,042,817.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
10	1.3.4.04.01.04.004	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH LAIN-LAIN			2018				Pembelian	6	Unit	3,764,524,247.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
11	1.3.4.03.01.05.003	PENAMPUNGAN AIR HUJAN (PAH)			2013				Pembelian	1	Unit	200,000,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
6. DINSOSP3APPKB												132,488,956.65	-		
1	03.01.01.10.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000012	Perencanaan Gedung Kantor UPT PPA	2024				Pembelian	1	Unit	60,544,088.00	Dari KIB F	Ke Kib c	
2	02.01.03.16.001	alat bantu lainnya lainnya (dst)	1	GEA / FS SERIES	2025				Pembelian	1	Unit	3,400,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
3	02.05.01.04.004	Rak Kayu	15	Expo / Rak Buku	2025				Pembelian	1	Unit	2,650,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
4	02.05.01.04.015	Locker	1	Karsindo / Loker Besi	2025				Pembelian	1	Unit	3,250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
5	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	1	CCTV 1 Paket 8 Kamera	2025				Pembelian	1	Unit	11,577,868.65	Dari KIB C	Ke Kib B	
6	02.05.01.05.005	White Board	3	Universal / Putih	2025				Pembelian	1	Unit	1,820,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
7	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	7	Universal / Alas Karpet Biru	2025				Pembelian	1	Unit	1,260,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
8	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Serenity / King Size	2025				Pembelian	1	Unit	2,980,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
9	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	Serenity / Single Bed	2025				Pembelian	1	Unit	2,352,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
10	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Alat Permainan Anak / Mainan	2025				Pembelian	1	Unit	1,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
11	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	7	Matras Puzzle / Matras Karet Busa Puzzle	2025				Pembelian	1	Unit	1,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
12	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Expo / ED-200	2025				Pembelian	1	Unit	4,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
13	02.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	Gala / MK 808	2025				Pembelian	1	Unit	1,200,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
14	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Uno	2025				Pembelian	1	Unit	2,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
15	02.05.03.06.013	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat lainnya	1	Palawa / Single	2025				Pembelian	1	Unit	1,750,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
16	02.05.03.06.013	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat lainnya	2	Importa / IMP-G03	2025				Pembelian	1	Unit	2,100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
17	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	Importa / IMP -SC06	2025				Pembelian	1	Unit	1,950,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
18	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	Credenza / Arsip	2025				Pembelian	1	Unit	3,200,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
19	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Epson / L3210	2025				Pembelian	1	Unit	2,100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
20	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Brother / DS-940	2025				Pembelian	1	Unit	3,900,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
21	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	1	Infokus / 116AA	2025				Pembelian	1	Unit	8,460,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
22	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	2	Layar Projector / 84' Motorized	2025				Pembelian	1	Unit	1,800,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
23		Kompor Gas			2025				Pembelian	1	Unit	800,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
24		Tabung Gas 12Kg			2025				Pembelian	1	Unit	350,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
25		Dispenser			2025				Pembelian	1	Unit	250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
26		Kulkas 1 Pintu			2025				Pembelian	1	Unit	2,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Jumlah	Satuan	Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi							
27		Set Cangkir			2025				Pembelian	1	Unit	150,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
28		Piring Kaca			2025				Pembelian	1	Unit	120,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
29		Magicom			2025				Pembelian	1	Unit	250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
30		Wajan			2025				Pembelian	1	Unit	100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
31		Panci			2025				Pembelian	1	Unit	80,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
32		Sendok Teh			2025				Pembelian	1	Unit	50,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
33		Sendok Makan			2025				Pembelian	1	Unit	75,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
23		Garpu			2025				Pembelian	1	Unit	60,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
24		Rak Piring			2025				Pembelian	1	Unit	920,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
25		Baki/Nampan			2025				Pembelian	1	Unit	150,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
26		Meja Kerja 1/2 Biro Saemas			2025				Pembelian	1	Unit	470,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
27		Meja Tamu Graver			2025				Pembelian	1	Unit	420,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
28		Kursi Kerja Type Putar Race			2025				Pembelian	1	Unit	520,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
29		Kursi Kerja Fujima			2025				Pembelian	1	Unit	430,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
7. Dinas Pendidikan												10,820,000.00	-		
1	1.3.4.1.1.3.1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe C SDN 10 IX Koto	2025					1	Unit	10,820,000.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
8. Dinas PERKIMTAN												80,607,000.00	-		
1	1.3.3.01.01.11.008	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OR LAIN-LAIN (DST)		LANDING PARALAYANG NAGARI GUNUNG SELASIH	2017					1	Unit	80,607,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib c	
9. Dinas Pertanian												12,138,863,657.00	-		
1	1.3.2.2.1.9.1	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)			2014				Pembelian	1	Unit	44,000,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib b	
2	1.3.2.4.1.10.1	Alat Pengolahan lainnya			2014				Pembelian	1	Unit	57,790,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib b	
3	1.3.2.4.1.4.6	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya		Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	2014				Pembelian	3	Unit	290,586,210.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib b	
4	1.3.4.02.05.06.007	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN LAIN-LAIN		PEMBUATAN EMBUNG	2013				Pembelian	1	Unit	32,294,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
5	1.3.4.2.6.2.8	Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain		Bangunan Air Bersih / Baku	2009				Pembelian	1	Unit	33,280,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
6	1.3.4.02.02.02.002	BANGUNAN PENGAMBILAN BEBAS DENGAN POMPA (BANGUNAN		KINCIR AIR	2010				Pembelian	1	Unit	209,200,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
7	1.3.4.02.01.02.007	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI LAIN-LAIN			2009-2014				Pembelian	2	Unit	567,109,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
8	1.3.4.02.03.07.001	BANGUNAN SAWAH RAWA TEKNIS		CETAK SAWAH	2009				Pembelian	1	Unit	584,989,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
9	1.3.4.02.01.01.006	BANGUNAN WADUK A LAIN-LAIN			2014-2025				Pembelian	8	Unit	268,557,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
10	1.3.4.02.04.05.009	DAM KONSOLIDASI		KONSTRUKSI BANGUNAN DAM PENAHAN JALAN KOTO SALAK	2015				Pembelian	1	Unit	16,159,725.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Jumlah	Satuan	Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi							
11	1.3.4.01.01.05.001	JALAN DESA		DARI HUT BUN JALAN PRODUKSI SITIUNG	2015				Pembelian	1	Unit	343,636,842.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
12	1.3.4.01.01.05.002	JALAN DESA LAIN-LAIN			2010-2018				Pembelian	48	Unit	8,455,684,080.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
13	1.3.4.01.01.09.010	JALAN KHUSUS LAIN-LAIN			2010				Pembelian	1	Unit	4,150,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
14	1.3.4.02.01.03.003	SALURAN SEKUNDER (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)			2010-2011				Pembelian	2	Unit	649,600,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
15	1.3.4.02.01.03.004	SALURAN TERSIER (BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI)		JARINGAN IRIGASI TETES 10 HA	2009				Pembelian	1	Unit	451,225,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
16	1.3.4.02.01.02.006	SUMUR DENGAN POMPA (BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI)			2014				Pembelian	5	Unit	17,902,800.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
17	1.3.4.02.05.05.004	SUMUR PENGAMATAN			2017				Pembelian	5	Unit	20,000,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
18	1.3.4.02.02.01.001	WADUK PASANG SURUT		BANGUNAN AIR PASANG SURUT	2009				Pembelian	1	Unit	92,700,000.00	Dari Aset Lainnya	Ke Kib d	
Jumlah Total												133,650,249,323.65			

DAFTAR RINCIAN PENGURANGAN REKLASIFIKASI ASET TETAP 2025

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan	
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul					
1. SEKRETARIAT DPRD											547,160,000.00	-		
15	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000029	Mitsubishi Pajero Sport	2019	MK2KRWPNUKJ00614 2	4N15UDT4148	BA 1009 V	Pembelian	547,160,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
2. Sekretariat Daerah											4,331,738,999.00	-		
1	1.3.2.2.1.1.6	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	14	Mitsubishi Strada	2008	MMBJNKB708D067111	4M4OUAB1396	BA 8711 VG	Pembelian	234,765,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
2	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	23	MITSUBIHI	2006	MMBJNK7706F02	4M40AD1345	BA 8606 VG	Pembelian	165,477,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
3	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	44	KIJANG LGX	2004	MHYGDN41V6J145191	G15A1D148137	BA 2715 V	Pembelian	122,025,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
4	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	48	Toyota Kijang	2004			BA 2759 V	Pembelian	48,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
5	02.02.01.01.001	Sedan	2	Honda Accord	2016	MRHCR2640GP610428	K24W31601041	BA 1547 V	Pembelian	636,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
6	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	112	Toyota Fortuner	2014	MHFYR59G7E0100100	2KDU669749	BA 2 V	Pembelian	465,902,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
7	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	149	Mitsubishi Kuda Diamond	2004	MHMVA1WHR4K	4618-3Y9954	BA 2708 V	Pembelian	126,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
8	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	155	Nissan	2010				Pembelian	296,150,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
9	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	52	Kawasaki KLX 150 S	2014				Pembelian	25,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
10	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	53	Honda Kharisma	2008				Pembelian	13,050,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
11	1.3.2.5.2.1.10	Tempat Tidur Kayu	29		2019				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
12	1.3.2.5.2.1.10	Tempat Tidur Kayu	30		2019				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
13	1.3.2.5.2.1.33	Kursi Biasa	560	Chairman	2018				Pembelian	1,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
14	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	17		2017				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
15	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	12		2010				Pembelian	7,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
16	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	13		2010				Pembelian	7,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
17	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	14		2010				Pembelian	7,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
18	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	26		2009				Pembelian	38,337,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
19	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	27		2009				Pembelian	38,337,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
20	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	28		2011				Pembelian	34,812,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
21	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	29		2011				Pembelian	34,812,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
22	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	30		2011				Pembelian	34,812,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
23	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	31		2011				Pembelian	34,812,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
24	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	35		2012				Pembelian	34,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
25	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	100	AC Politron	2016				Pembelian	32,425,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
26	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	120	Panasonic	2019				Pembelian	7,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
27	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	121	Panasonic	2019				Pembelian	7,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
28	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	122	Panasonic	2019				Pembelian	5,717,250.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
29	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	123	Panasonic	2019				Pembelian	5,717,250.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
30	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	124	Panasonic	2019				Pembelian	5,717,250.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
31	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	125	Panasonic	2019				Pembelian	5,717,250.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
32	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	17	LG	2009				Pembelian	1,320,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
33	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	65	Polytron	2022				Pembelian	32,370,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
34	1.3.2.5.3.2.2	Meja Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1		2016				Pembelian	9,985,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
35	1.3.2.5.3.2.11	Meja Tamu Biasa	10		2019				Pembelian	6,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
36	1.3.2.5.3.3.4	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	10	Frontline	2018				Pembelian	5,400,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
37	1.3.2.5.3.3.9	Kursi Kerja Pejabat lainnya	12	Fantonia	2005				Pembelian	1,515,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
38	1.3.2.5.3.4.8	Kursi Rapat Pejabat lainnya	3	Winux	2010				Pembelian	1,430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
39	1.3.2.5.3.4.8	Kursi Rapat Pejabat lainnya	4	Winux	2010				Pembelian	1,430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
40	1.3.2.5.3.7.7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13		2006				Pembelian	1,530,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
41	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	10	Asus	2014				Pembelian	10,965,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		
42	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	53	Acer	2015				Pembelian	6,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya		

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
43	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	63	ACER	2016				Pembelian	12,150,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
44	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	73	Dell	2017				Pembelian	14,850,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
45	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	80	HP	2018				Pembelian	9,900,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
46	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	82	HP	2018				Pembelian	15,065,790.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
47	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	83	HP	2018				Pembelian	15,065,790.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
48	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	89	Asus	2019				Pembelian	7,985,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
49	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	97	Toshiba	2014				Pembelian	7,900,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
50	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	102	HP Envy	2021				Pembelian	16,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
51	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	114	Mc Book Pro MYD821D/A	2022				Pembelian	23,865,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
52	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	51	Toyota Kijang Krista	2004	MHF11LF824004	1 RZ7042955	BA 1937 VK	Pembelian	90,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
53	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	62	Toyota	2016	MHKM5A3JGK001548	2NRF32438	BA 1048 V	Pembelian	203,116,552.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
54	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	75	Kijang Innova	2016	MHFJW8EMOG231256	1TRA143557	BA 1538 V	Pembelian	290,050,667.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
55	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	77	Kijang Innova	2016	MHFJW8EM5G231232	1TRA141882	BA 1541 V	Pembelian	290,050,667.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
56	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	103	Mitsubishi Kuda Grandya	2004	MHMHVH1WPR4K	4618450652	BA 21.V	Pembelian	85,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
57	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	153	Mitsubishi	2022	MK2KRWPNUJ013458	4N15UJR5865	BA 9 V	Pembelian	607,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
58	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	0001 s/d 0100	Futura / Futura FTR 405	2025				Pembelian	62,715,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
59	02.05.02.06.057	Karpet	0043	-	2025				Pembelian	338,071.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
60	02.05.02.06.057	Karpet	0045	Turki	2025				Pembelian	788,832.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
61	02.05.02.06.074	Bracket Standing Peralatan	0001 s/d 0003	Bracket TV	2025				Pembelian	1,680,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
62	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6310	Tanaman Hias Dalam Ruangan	2025				Pembelian	845,178.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
63	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6311	Tanaman Hias Dalam Ruangan	2025				Pembelian	563,452.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
64	02.06.01.01.037	Microphone/Boom Stand	0001 s/d 0004	-	2025				Pembelian	1,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
3. Kec. Sembilan Koto										33,878,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	14	SUZUKI FW 110 SCD	2006	MH8BE4DUAJ151856	E470-ID-157664	BA 2804 V	Pembelian	15,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	19		2009	MH8EN125A9J613557	F4051D613363	BA 7962 VG	Pembelian	15,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	CANON PIXMA MP 237	2014				Pembelian	2,128,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4. Kec. Koto Besar										12,550,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	51	HONDA NF 100 SL	2006	MH1HB31156K623742	HB31E-1618712/B	BA 6825 VA	Pembelian	6,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	7	Acer A314	2019				Pembelian	5,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5. Dinas PUPR										7,452,780,124.00	-		
1	1.3.2.1.1.3.2	Wheel Excavator + Attachment	1	GRUNOFOS D3421000GPC0	2015				Pembelian	1,087,063,544.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.1.1.3.3	excavator lainnya (dst)	1	Komatsu pc 200-8	2008				Pembelian	1,249,600,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.1.1.8.3	Stone Chuser	1	Liugong	2008				Pembelian	1,341,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.1.1.8.5	Batching Plant	1	Silo	2008				Pembelian	1,828,838,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.1.1.8.13	Concrete Breaker	2	Concret Vafer	2015				Pembelian	81,235,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.1.1.8.13	Concrete Breaker	3	Paving Brekers BM	2019				Pembelian	25,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.2.1.3.1	Truck + Attachment	12	DYNA DAM TRUCK	2007	MHFC1JU44	W04DTNJ14467	BA 9612 VG	Pembelian	210,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	42	PC AIO ASUS V222UAK	2018				Pembelian	8,411,538.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	43	Kantor UPT ALKAL	2011				Pembelian	90,000,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.3.1.1.2.1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Gudang UPT ALKAL	2011				Pembelian	60,000,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.3.1.1.3.1	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	12	Workshop UPT ALKAL 2	2011				Pembelian	80,000,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.3.1.1.8.1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	9	Musholla UPT ALKAL	2016				Pembelian	48,000,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.3.1.1.11.4	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	2	Lanjutan Pembangunan Lapangan Tenis Polres	2017				Pembelian	299,216,460.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.3.1.1.30.5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	4	PEMBANGUNAN TAMAN EDUKASI MAPOLRES DHARMASRAYA	2015				Pembelian	165,994,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.3.1.1.30.5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Tembak Outdoor	2015				Pembelian	49,480,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.3.1.1.30.5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Tempat Cuci ALKAL	2018				Pembelian	74,600,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
17	1.3.3.4.1.4.1	Pagar Permanen	1	Pembangunan Workshop UPTD Peralatan	2011				Pembelian	258,280,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.3.4.1.4.1	Pagar Permanen	21	Pagar UPT ALKAL	2011				Pembelian	200,000,000.00	Dari KIB c	Ke Aset Lainnya	
19	04.01.01.03.001	Jalan Kabupaten Arteri	436	Perencanaan Paket IX	2024				Pembelian	99,921,000.00	Dari KIB F	Ke KIB d	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
20	1.3.4.1.1.3.1	Jalan Kabupaten Arteri	000439	Perencanaan Rehab Jalan Paket I Pelebaran Jalan Samping RSUD Sungai Dareh Lama Perbaikan Jalan Padang Hilalang - Lubuk Labu Rehab Jalan Penghubung Koto Baru - Silago	2025				Pembelian	49,934,000.00	Dari KIB D	Ke KIB f	
21	1.3.4.1.1.3.1	Jalan Kabupaten Lain-lain	000440	Bangunan Pelengkap Jalan Kecamatan Sembilan Koto 2025	2025				Pembelian	146,006,582.00	Dari KIB D	Ke KIB f	
6. Dinas Perkimtan										56,174,800.00			
1	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	1	LG	2008				Pembelian	2,979,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	2	LG	2008				Pembelian	2,979,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	3	LG	2009				Pembelian	3,718,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	4	LG	2009				Pembelian	8,349,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	1	ICHA 1400 V	2017				Pembelian	1,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	4		2018				Pembelian	1,629,800.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.6.2.1.10	Facsimile	1		2017				Pembelian	2,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.6.3.10.6	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	1	Matrik	2019				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	1	Sony Vaio	2014				Pembelian	16,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	epson l360	2018				Pembelian	4,606,667.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Epson L220	2018				Pembelian	4,606,667.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Epson L220	2018				Pembelian	4,606,666.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.5.1.1.1.6	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1	KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA	2017				Pembelian	395,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	1	UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN	2017				Pembelian	300,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	2	PERMENDAGRI	2017				Pembelian	100,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	3	PERATURAN AGRARIA	2017				Pembelian	185,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
17	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	4	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2017				Pembelian	125,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	5	UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN	2017				Pembelian	190,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
19	1.3.5.1.1.1.12	Buku Umum Lain-lain	6	BUKU PUSTAKA	2017				Pembelian	55,000.00	Dari KIB e	Ke Aset Lainnya	
7. Dinas Perhubungan										93,916,328.00			
1	1.3.2.5.2.1.32	Kursi Putar	4		2008				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.2.1.32	Kursi Putar	7		2009				Pembelian	1,045,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.2.1.32	Kursi Putar	10		2009				Pembelian	3,458,647.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.2.1.32	Kursi Putar	11		2009				Pembelian	3,458,647.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	2		2008				Pembelian	3,060,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	3	LG	2009				Pembelian	4,300,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	4	LG	2009				Pembelian	4,300,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	5		2011				Pembelian	5,900,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.5.2.4.3	A.C. Window	6	panasonic	2018				Pembelian	5,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.5.2.4.4	A.C. Split	1	LG	2008				Pembelian	3,938,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.6.2.1.4	Telephone Mobile	1	phone tablet	2019				Pembelian	6,600,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.6.2.1.4	Telephone Mobile	2	phone tablet	2019				Pembelian	6,600,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.2.6.2.1.6	Handy Talky (HT)	8	radio tangan	2018				Pembelian	1,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	19		2019				Pembelian	10,312,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	14	ASUS	2018				Pembelian	6,494,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	16	asus	2018				Pembelian	6,874,767.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
17	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	17	ASUS	2018				Pembelian	6,874,767.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	canon	2018				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
19	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	canon	2018				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
20	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	canon	2018				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
21	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	canon	2018				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
22	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	alat kiur	2019				Pembelian	2,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
23	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	EPSON L3210	2022				Pembelian	3,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8. DINSOSP3APPKB										134,328,956.65	-		
1	03.01.01.10.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	Perencanaan Gedung Kantor UPT PPA	2024				Pembelian	60,544,088.00	Dari KIB F	Ke KIB C	
2	02.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	0001	Saemas / 1/2 Biro	2025				Pembelian	470,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
3	02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	0005	Race / Putar	2025				Pembelian	520,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
4	02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	0006	Fujima / Biasa	2025				Pembelian	430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
5	02.05.03.06.004	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	0001	Graver / CT 278	2025				Pembelian	420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Ekstra	
6	02.01.03.16.001	alat bantu lainnya_ lainnya (dst)		GEA / FS SERIES	2025				Pembelian	3,400,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
7	02.05.01.04.004	Rak Kayu		Expo / Rak Buku	2025				Pembelian	2,650,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
8	02.05.01.04.015	Locker		Karsindo / Loker Besi	2025				Pembelian	3,250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
9	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System		CCTV 1 Paket 8 Kamera	2025				Pembelian	11,577,868.65	Dari KIB C	Ke Kib B	
10	02.05.01.05.005	White Board		Universal / Putih	2025				Pembelian	1,820,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
11	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman		Universal / Alas Karpet Biru	2025				Pembelian	1,260,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
12	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Serenity / King Size	2025				Pembelian	2,980,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
13	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Serenity / Single Bed	2025				Pembelian	2,352,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
14	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Alat Permainan Anak / Mainan	2025				Pembelian	1,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
15	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Matras Puzzle / Matras Karet Busa Puzzle	2025				Pembelian	1,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
16	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II		Expo / ED-200	2025				Pembelian	4,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
17	02.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain		Gaia / MK 808	2025				Pembelian	1,200,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
18	02.05.03.02.014	Meja Rapat Pejabat lainnya		Uno	2025				Pembelian	2,000,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
19	02.05.03.06.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya		Palawa / Single	2025				Pembelian	1,750,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
20	02.05.03.06.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya		Importa / IMP-G03	2025				Pembelian	2,100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
21	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya		Importa / IMP-SC06	2025				Pembelian	1,950,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
22	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya		Credenza / Arsip	2025				Pembelian	3,200,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
23	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Epson / L3210	2025				Pembelian	2,100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
24	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		Brother / DS-940	2025				Pembelian	3,900,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
25	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya		Infokus / 116AA	2025				Pembelian	8,460,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
26	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya		Layar Projector / 84' Motorized	2025				Pembelian	1,800,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
27		Kompas Gas			2025				Pembelian	800,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
28		Tabung Gas 12Kg			2025				Pembelian	350,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
29		Dispenser			2025				Pembelian	250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
30		Kulkas 1 Pintu			2025				Pembelian	2,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
31		Set Cangkir			2025				Pembelian	150,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
32		Piring Kaca			2025				Pembelian	120,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
33		Magicom			2025				Pembelian	250,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
34		Wajan			2025				Pembelian	100,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
35		Panci			2025				Pembelian	80,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
36		Sendok Teh			2025				Pembelian	50,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
37		Sendok Makan			2025				Pembelian	75,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
38		Garpu			2025				Pembelian	60,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
39		Rak Piring			2025				Pembelian	920,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
40		Baki/Nampan			2025				Pembelian	150,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
41		Meja Kerja 1/2 Biro Saemas			2025				Pembelian	470,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
42		Meja Tamu Graver			2025				Pembelian	420,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
43		Kursi Kerja Type Putar Race			2025				Pembelian	520,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
44		Kursi Kerja Fujima			2025				Pembelian	430,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
9. Dinas Pertanian										1,054,280,939.00	-		
1	1.3.3.1.1.13.10	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1	Kantor /Rumah Jaga Pembibitan Ternak di Muaro Muo	2014				Pembelian	80,563,875.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.3.1.1.23.2	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Semi Permanen	1	Tempat Pengolahan Limbah dan Sarana Pendukung	2014				Pembelian	70,983,875.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	2	Kandang Kambing PE	2012				Pembelian	88,909,650.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	3	Gudang Kandang Kambing	2012				Pembelian	88,909,650.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
5	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	4	Peddock / Ranch	2014				Pembelian	37,963,875.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	5	Pembangunan Kandang Sapi	2014				Pembelian	79,231,937.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	6	Pembangunan Kandang Sapi	2014				Pembelian	79,231,938.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	7	Pembangunan Kandang Kambing PE	2014				Pembelian	77,731,935.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	8	Pembangunan Kandang Kambing PE	2014				Pembelian	77,731,940.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	14	Pembangunan Kandang Sapi DAK keg. Pengembangan Pembibitan Ternak	2015				Pembelian	91,144,589.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.3.1.1.29.1	Bangunan Untuk Kandang	15	Bangunan Kandang Hewan (Pembangunan Tempat Turun Naik Ternak) Pladwiker, Timbangan, Tempat Makan	2016				Pembelian	100,397,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.3.4.1.4.1	Pagar Permanen	6	Pagar Pembibitan Ternak	2014				Pembelian	156,963,875.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
13	5.03.002.001.003	Kambing	19	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
14	5.03.002.001.003	Kambing	20	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
15	5.03.002.001.003	Kambing	21	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
16	5.03.002.001.003	Kambing	22	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
17	5.03.002.001.003	Kambing	23	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
18	5.03.002.001.003	Kambing	24	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
19	5.03.002.001.003	Kambing	25	Induk Kambing PE/UPT Kandang Kambing	2012				Pembelian	3,502,400.00	Dari KIB E	Ke Aset Lainnya	
10. Dinas KUMPERDAG										22,452,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	1	Honda Kharisma	2005	MH1JB221X5K432262	JB22E1434970	BA 6065 VE	Pembelian	10,602,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.1.1.1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	BROTHERTYPEWRITER M 2000 DELUXE	2015				Pembelian	2,453,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.1.5.5	White Board	1		2008				Pembelian	1,080,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.1.5.26	Panel Pameran	1	BENNER	2008				Pembelian	1,170,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	1	Faxemilie	2005				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.6.12	Wireless	2	MULTI/ AIWA	2012				Pembelian	4,460,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.5.3.3.4	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	DOROTILL	2005				Pembelian	1,337,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
11. Badan Keungan Daerah										9,407,250.00	-		
1	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	0001 s/d 0015	Futura / FTR 405	2025				Pembelian	9,407,250.00	Dari KIB b	Ke Aset Ekstra	
12. Inspektorat										381,985,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	HR-V 1.5 E CVT	2023	MHRRV3850NU202750	L15ZF1313209	BA 1153 V	Pembelian	381,000,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.2.5.75	Tangki Air	1	tedmond	2025				Pembelian	985,000.00	Dari KIB b	Ke Aset Ekstra	
13. BAPPPEDA										202,588,603.00	-		
1	1.3.2.3.3.1.72	Global Positioning System	1	MONTERA	2016				Pembelian	10,100,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.1.5.12	Mesin Absensi	1	FINGER PRINT SOLUTION X 105	2016				Pembelian	3,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.1.5.76	Papan Nama Instansi	1		2010				Pembelian	2,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.1.5.77	Papan Pengumuman	1	Stanles 3D	2022				Pembelian	6,908,603.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.2.1.8	Meja Rapat	1	Perabot Nagari	2008				Pembelian	5,310,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.1.8	Meja Rapat	3		2013				Pembelian	4,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.5.2.1.39	Meja Komputer	3	multiplek	2017				Pembelian	2,975,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.5.2.1.39	Meja Komputer	4	multiplek	2017				Pembelian	2,975,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.5.2.1.48	Sofa	3	perabot nagari	2013				Pembelian	5,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.5.2.1.50	Meubeleur lainnya	1	Fantoni	2009				Pembelian	1,389,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.5.2.1.50	Meubeleur lainnya	2	Fantoni	2009				Pembelian	1,389,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	15	UPS APC BX1400U-MS	2017				Pembelian	3,550,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	16	UPS APC BX1400U-MS	2017				Pembelian	3,550,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.2.5.2.6.21	Camera Video	3	DJI Phantom 4 S/N 07DJ9DOC10334	2016				Pembelian	24,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.2.5.3.1.5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Topix/Biro	2005				Pembelian	1,215,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.2.5.3.1.5	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Perabot nagari	2009				Pembelian	1,237,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
17	1.3.2.5.3.6.4	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Jepara	2007				Pembelian	3,136,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.2.5.3.6.4	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Jepara	2008				Pembelian	3,960,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
19	1.3.2.5.3.7.7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Perabot Nagari	2006				Pembelian	1,980,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
20	1.3.2.5.3.7.7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Perabot Nagari	2009				Pembelian	1,857,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
21	1.3.2.5.3.7.7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Perabot Nagari	2009				Pembelian	1,857,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
22	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	7	EPSON EB-X300	2016				Pembelian	8,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
23	1.3.2.6.1.5.13	Coordinatograph	1	GPS Garminmap 62SC	2013				Pembelian	7,475,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
24	1.3.2.6.2.1.10	Facsimile	1	Panasonic kx FP206cx	2013				Pembelian	1,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
25	1.3.2.6.2.1.10	Facsimile	2	PANASONIC FT 701 CX	2015				Pembelian	2,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
26	1.3.2.6.2.1.22	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	perekem suara	2019				Pembelian	3,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
27	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	41	Printer Epson L565	2017				Pembelian	4,450,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
28	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	Epson L300 (Printer A3)	2019				Pembelian	7,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
29	1.3.2.10.2.4.1	Server	1	Dell Power Edge R530	2017				Pembelian	74,575,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14. DLH										222,011,298.00	-		
1	1.3.2.2.1.9.1	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	25	Kaiser Triseda RX	2013	MGDT15MKTDJ002832	162MJD1176097	BA. 3737 V	Pembelian	34,837,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.4.1.4.6	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	4	Kontainer sampah	2015				Pembelian	46,050,657.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	2	Printer Brother MFC-J6250W	2013				Pembelian	2,209,909.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.2.3.3	Mesin Pemotong Rumput	3	Tanika	2018				Pembelian	1,760,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.2.3.3	Mesin Pemotong Rumput	4	TANIKA, TNK-328 FR	2019				Pembelian	1,760,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.3.3	Mesin Pemotong Rumput	5	STIHL FR-3001 BRUSHCUTTER	2021				Pembelian	1,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.5.2.3.7	Alat Pembersih lainnya	632	Container Sampah	2015				Pembelian	24,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.5.2.3.7	Alat Pembersih lainnya	633	Container Sampah	2015				Pembelian	24,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.5.2.6.8	Sound System	1	Roadmaster	2017				Pembelian	4,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.5.2.6.38	Dispenser	1	Politron PWC 777	2019				Pembelian	2,915,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.6.1.1.96	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Infokus LCD	2012				Pembelian	7,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.6.1.5.10	Contact Printer	4	Canon IP 2770	2018				Pembelian	1,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.2.6.2.1.1	Telephone (PABX)	1		2012				Pembelian	19,447,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.2.6.2.1.4	Telephone Mobile	1	Ipad Mini 2 16 GB Grey	2016				Pembelian	6,852,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.2.8.7.1.3	Salino Meter	1	Eutech EC-salt 6	2010				Pembelian	6,674,800.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.2.8.7.1.22	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)	1	Memmert	2010				Pembelian	7,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
17	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	6	Thosiba	2015				Pembelian	8,351,250.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	7	LENOVO	2015				Pembelian	7,920,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
19	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	10	ACER	2017				Pembelian	8,415,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
20	1.3.2.10.2.3.4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	LG	2013				Pembelian	1,418,182.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15. Badan Kesbang dan Politik										11,935,000.00	-		
1	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	6	ACER NITRO 5	2015				Pembelian	11,935,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
16. BKPSDM										196,616,849.00	-		
1	1.3.2.5.1.1.6	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1	MESIN TIK LISTRIK	2013				Pembelian	1,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	7	LEMARI ARSI	2010				Pembelian	2,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	30	ALMARI	2013				Pembelian	1,278,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.1.4.6	Filing Cabinet Kayu	1	FILLING KABINET	2012				Pembelian	7,952,727.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	1	LAYAR INFOKUS	2009				Pembelian	1,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.10.1.1.3	Local Area Network (LAN)	1	Local Area Network (LAN)	2008				Pembelian	28,746,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.10.1.1.3	Local Area Network (LAN)	2		2014				Pembelian	25,528,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.10.1.1.3	Local Area Network (LAN)	3	HP Proliant ML	2016				Pembelian	31,276,596.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.10.1.1.3	Local Area Network (LAN)	4	HP Proliant ML	2016				Pembelian	31,276,596.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.10.1.1.8	Komputer Jaringan lainnya	1	KELENGKAPAN KOMPUTER	2011				Pembelian	3,866,530.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.10.1.1.8	Komputer Jaringan lainnya	5	Komponen Komputer	2014				Pembelian	19,743,651.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	1	NOTEBOOK	2011				Pembelian	7,900,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.2.10.2.3.4	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Scanner & Toner	2014				Pembelian	10,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.2.10.2.3.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	SWITH + INSTALASI PC ROUTER	2011				Pembelian	3,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.2.10.2.3.18	Peralatan Personal Komputer lainnya	2		2004				Pembelian	15,663,749.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
16	1.3.2.10.2.4.33	Peralatan Jaringan lainnya	1	PERALATAN JARINGAN KOMPUTER	2011				Pembelian	3,885,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan										43,990,000.00	-		
1	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	5	HP Z220	2013				Pembelian	7,805,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	4	HP	2013				Pembelian	15,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	2	ASUS	2015				Pembelian	6,985,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.10.1.2.3	Note Book	1	Sony vaio	2009				Pembelian	14,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
18. Dinas Kominfo										119,788,000.00	-		
1	1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	ISUZU PANTHER	2013	MHCTBR54F6K28	E.2380087	BA 1024 VG	Pembelian	90,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	4	dell	2017				Pembelian	13,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.10.1.2.9	Tablet PC	4	IPAD	2022				Pembelian	16,368,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
19. Dinas Kesehatan										8,093,220,238.00	-		
1	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	54	Linen Trolley	2018				Pembelian	2,400,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
2	1.3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	55	Linen Trolley	2018				Pembelian	2,400,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
3	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	83	NT 001-B /Tempat Tidur Pasien Set	2012				Pembelian	15,632,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
4	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	84	NT 001-B /Tempat Tidur Pasien Set	2012				Pembelian	15,632,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
5	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	85	NT 001-B /Tempat Tidur Pasien Set	2012				Pembelian	15,632,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
6	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	86	NT 001-B /Tempat Tidur Pasien Set	2012				Pembelian	15,632,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
7	1.3.2.5.2.1.9	Tempat Tidur Besi	94	Tempat Tidur Donor	2012				Pembelian	20,406,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
8	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	19		2009				Pembelian	2,494,800.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
9	1.3.2.5.2.1.25	Kasur/Spring Bed	20		2009				Pembelian	2,494,800.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
10	1.3.2.5.2.4.1	Lemari Es	5	Kulkas Mini	2008				Pembelian	1,035,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
11	1.3.2.5.2.5.5	Rice Cooker (Alat Dapur)	6	Jumbo	2018				Pembelian	2,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
12	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	1	LED 32 LG LF 520 A	2016				Pembelian	5,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
13	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	2	LED 32 LG LF 520 A	2016				Pembelian	5,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
14	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	3	LED 32 LG LF 520 A	2016				Pembelian	5,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
15	1.3.2.5.2.6.20	Stabilisator	2		2013				Pembelian	2,952,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
16	1.3.2.6.1.4.3	Mesin Cetak Listrik Sheet	1	5250	2018				Pembelian	141,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
17	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	8	Sterilisator kering 2 Pintu	2014				Pembelian	1,650,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
18	1.3.2.7.1.1.1	Sterilisator	11		2016				Pembelian	1,925,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
19	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	81	Classic Adult	2020				Pembelian	1,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
20	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	83	Classic Adult	2020				Pembelian	1,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
21	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	84	Classic Adult	2020				Pembelian	1,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
22	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	86	Classic Adult	2020				Pembelian	1,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
23	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	87	Classic Adult	2020				Pembelian	1,870,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
24	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	90	Clasic III Adult	2020				Pembelian	2,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
25	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	91	Clasic III Adult	2020				Pembelian	2,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
26	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	96	Classic III	2020				Pembelian	1,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
27	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	97	Classic III	2020				Pembelian	1,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
28	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	98	Classic III	2020				Pembelian	1,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
29	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	100	Classik III	2020				Pembelian	1,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
30	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	101	classic III 3M	2020				Pembelian	1,880,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
31	1.3.2.7.1.1.4	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	102	3M	2020				Pembelian	4,840,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
32	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	2		2016				Pembelian	5,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
33	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	3		2016				Pembelian	5,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
34	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	5		2016				Pembelian	5,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
35	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	6		2016				Pembelian	5,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
36	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	45	Digital	2020				Pembelian	1,265,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
37	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	54	Model 1744 Digital	2020				Pembelian	4,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
38	1.3.2.7.1.1.5	Tensimeter	58	Regal Plus Mobile Clock Aneroid Sphygmomanometer	2022				Pembelian	3,836,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
39	1.3.2.7.1.1.25	Ambubag	13		2023				Pembelian	2,855,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
40	1.3.2.7.1.1.42	Brancard	3	POLI 060	2020				Pembelian	47,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
41	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	6	LID Lamps	2019				Pembelian	6,510,200.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
42	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	7	LID Lamps	2019				Pembelian	6,510,200.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
43	1.3.2.7.1.1.64	Examination Lamp	8	LID Lamps	2019				Pembelian	6,510,200.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
44	1.3.2.7.1.1.133	Suction Pump	10	Surgical Suction Unit	2016				Pembelian	43,366,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
45	1.3.2.7.1.1.133	Suction Pump	11	Vaculine Mini	2018				Pembelian	15,275,260.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
46	1.3.2.7.1.1.133	Suction Pump	27	Vario 18 AC/DC	2021				Pembelian	43,820,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
47	1.3.2.7.1.1.143	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	2		2006				Pembelian	21,087,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
48	1.3.2.7.1.1.143	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	6		2015				Pembelian	24,227,263.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
49	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	98	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
50	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	99	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
51	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	100	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
52	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	101	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
53	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	102	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
54	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	103	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
55	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	104	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
56	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	105	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
57	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	106	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
58	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	107	Daray-Uk /Flowmeter Humidifoer Pedial	2012				Pembelian	3,030,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
59	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	109	Plasma Ekstraktor	2012				Pembelian	13,935,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
60	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	133	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
61	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	134	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
62	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	135	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
63	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	136	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
64	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	137	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
65	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	138	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
66	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	139	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
67	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	140	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
68	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	141	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
69	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	142	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
70	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	143	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
71	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	144	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
72	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	145	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
73	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	146	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
74	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	147	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
75	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	148	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
76	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	152	PE-5200	2013				Pembelian	1,401,776.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
77	1.3.2.7.1.1.169	Alat Kedokteran umum lainnya	211	Alat CPAP	2014				Pembelian	39,605,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
78	1.3.2.7.1.7.97	alat kedokteran mata lainnya (dst)	7		2006				Pembelian	145,926,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
79	1.3.2.7.1.8.16	Elektrocardiograph (ECG) 1 Chanel	1	KHS80GL	2020				Pembelian	39,782,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
80	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	6	NE-C28	2016				Pembelian	1,479,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
81	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	8	Compresore	2020				Pembelian	1,566,400.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
82	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	12	Ultrasonic Nebulizer Ultra Mist	2021				Pembelian	3,304,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
83	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	13	Ultrasonic Nebulizer Ultra Mist	2021				Pembelian	3,304,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
84	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	15	Ultrasonic Nebulizer Ultra Mist	2021				Pembelian	3,304,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
85	1.3.2.7.1.8.24	Nebulizer	16	Ultrasonic Nebulizer Ultra Mist	2021				Pembelian	3,304,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
86	1.3.2.7.1.10.37	Weight Scale Capacity 120 Kg	1	USA COMBIMIC	2012				Pembelian	82,957,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
87	1.3.2.7.1.12.02	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	809 B	2020				Pembelian	1,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
88	1.3.2.7.1.13.5	Patient Monitor	15	Standart Heyer	2018				Pembelian	63,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
89	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	1	ECG 3	2016				Pembelian	27,035,603.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
90	1.3.2.7.1.14.22	ECG 3 Channel	3	ECG 3	2016				Pembelian	27,035,603.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
91	1.3.2.7.1.19.70	Blood Presure Meter/Tensimeter	2	Trolly + Power Adaptor	2021				Pembelian	11,584,480.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
92	1.3.2.7.1.21.49	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	10	31303	2018				Pembelian	2,778,100.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
93	1.3.2.7.1.21.49	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	11	31303	2018				Pembelian	2,778,100.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
94	1.3.2.7.1.21.49	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	13	31303	2019				Pembelian	2,921,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
95	1.3.2.7.1.21.49	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	14	31303	2019				Pembelian	2,921,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
96	1.3.2.7.1.21.49	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	15	31303	2019				Pembelian	2,921,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
97	1.3.2.8.1.16.16	alat laboratorium hematologi lainnya (dst)	2	500	2016				Pembelian	45,110,084.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
98	1.3.2.8.1.49.9	Digital Thermometer	5	Infrared	2020				Pembelian	2,359,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
99	1.3.2.8.1.49.9	Digital Thermometer	6	JXD-001	2020				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
100	1.3.2.8.1.55.4	Heamtology Analyzer	1		2017				Pembelian	364,522,100.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
101	1.3.2.8.1.55.41	laboratorium hematologi dan urinalisis lainnya (dst)	1	Urine Strip Reader / MX-2500	2015				Pembelian	37,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
102	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	L1110	2020				Pembelian	2,640,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
103	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	11	Acer	2013				Pembelian	3,900,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
104	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	16	Projector	2015				Pembelian	6,636,460.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
105	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2	FingerPrint	2016				Pembelian	2,915,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
106	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	1	Lokal	2004				Pembelian	1,796,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
107	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	3	riciwa	2015				Pembelian	1,567,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
108	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	4	riciwa	2015				Pembelian	1,567,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
109	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	1	TOP	2006				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
110	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2	TOP	2006				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
111	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	5	Panasonic	2007				Pembelian	3,150,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
112	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	1	Panasonic	2005				Pembelian	2,159,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
113	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	1	TOA	2006				Pembelian	4,168,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
114	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2	TOA	2007				Pembelian	3,600,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
115	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	3	TOA	2008				Pembelian	1,080,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
116	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	17	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
117	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	18	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
118	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	19	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
119	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	20	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
120	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	21	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
121	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	22	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
122	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	23	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
123	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	24	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
124	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	25	ICA	2016				Pembelian	1,485,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
125	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	27	ups	2018				Pembelian	2,365,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
126	1.3.2.06.003.047.002	Genset	3	Loncin 3000i	2020				Pembelian	15,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
127	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	7	Lenovo	2015				Pembelian	7,425,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
128	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	16	Lenovo	2016				Pembelian	8,511,510.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
129	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	5	Acer	2008				Pembelian	6,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
130	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	10	Lenovo	2013				Pembelian	4,100,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
131	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	21	Asus A455L	2015				Pembelian	7,920,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
132	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	27	ASUS	2015				Pembelian	4,683,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
133	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	28	ACER	2015				Pembelian	5,909,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
134	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	1	Dell	2016				Pembelian	24,860,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
135	1.3.2.10.002.003.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	SIM X-627	2008				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
136	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Brother	2015				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
137	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Brother	2015				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
138	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Brother	2015				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
139	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Brother	2015				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
140	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Brother	2015				Pembelian	2,420,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
141	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	canon	2016				Pembelian	1,430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
142	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	1	yamaha	2005	MH34ST2105K057984	4st1416838	BA 6299 VA	Pembelian	5,850,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
143	1.3.2.02.001.004.006	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1	Suzuki	2006	MH8FD125X6J784378	F4031D784546	BA 6391 VA	Pembelian	4,050,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
144	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	4	Acer	2014				Pembelian	5,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
145	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	5	Acer	2014				Pembelian	5,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
146	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	10	HP 24 G525L AIO PC	2017				Pembelian	11,904,692.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
147	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	11	HP 24 G252L AIO PC	2017				Pembelian	11,904,692.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
148	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	12	HP 24 G252L AIO PC	2017				Pembelian	11,904,692.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
149	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	3	Asus	2014				Pembelian	4,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
150	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	4	Asus	2014				Pembelian	4,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
151	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	5	Asus	2014				Pembelian	4,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
152	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	6	Asus	2014				Pembelian	4,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
153	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	7	Asus	2014				Pembelian	4,776,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
154	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	1	Asus	2014				Pembelian	4,730,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
155	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2	Asus	2014				Pembelian	4,730,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
156	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	cannon	2018				Pembelian	1,100,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
157	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	epson	2019				Pembelian	2,825,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
158	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Epson L3110	2019				Pembelian	2,805,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
159	1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	Beton	2018				Pembelian	639,887,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
160	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	5	ALKON	2019				Pembelian	13,529,117.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
161	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	1	siro/lili	2007				Pembelian	2,816,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
162	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2	siro/lili	2007				Pembelian	2,816,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
163	1.3.2.07.001.002.002	Dental Unit	1		2007				Pembelian	63,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
164	1.3.2.07.001.014.026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	1	GE	2020				Pembelian	64,851,447.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
165	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	5	lenovo	2015				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
166	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	6	lenovo	2015				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
167	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	8	lenovo	2016				Pembelian	6,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
168	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	12	lenovo	2016				Pembelian	5,352,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
169	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	13	lenovo	2016				Pembelian	5,352,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
170	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	14	lenovo	2016				Pembelian	5,352,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
171	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	19	HP 24 G 252L	2017				Pembelian	11,904,692.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
172	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	20	HP 24 G 252L	2017				Pembelian	11,904,692.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
173	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Brother	2014				Pembelian	2,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
174	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	brother	2015				Pembelian	2,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
175	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	epson	2016				Pembelian	1,925,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
176	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	brother	2016				Pembelian	2,230,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
177	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Epson	2016				Pembelian	3,806,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
178	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	EPSON	2019				Pembelian	2,035,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
179	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	EPSON	2019				Pembelian	2,035,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
180	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	epson L 120	2019				Pembelian	2,035,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
181	1.3.3.01.001.004.008	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	1	Beton	2018				Pembelian	632,507,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
182	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	3	Beton	2015				Pembelian	158,865,500.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
183	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	14	Beton	1995				Pembelian	24,000,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
184	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	15	Beton	1995				Pembelian	24,000,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
185	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	16	Beton	1995				Pembelian	24,000,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
186	1.3.3.01.001.006.019	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	19	Beton	1995				Pembelian	115,868,000.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	
187	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	38	olympus/japan	2011				Pembelian	16,066,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
188	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	1		2014				Pembelian	4,035,900.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
189	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2		2015				Pembelian	4,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
190	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	3		2015				Pembelian	4,950,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
191	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	4	sharp	2016				Pembelian	7,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
192	1.3.2.07.001.001.133	Suction Pump	2		2006				Pembelian	59,400,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
193	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2		2014				Pembelian	3,520,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
194	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	3		2014				Pembelian	4,492,400.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
195	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	4		2014				Pembelian	4,492,400.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
196	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	5		2015				Pembelian	5,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
197	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	6		2015				Pembelian	5,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
198	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	7	HP 24-G252L	2017				Pembelian	11,905,690.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
199	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	8	HP 24-G252L	2017				Pembelian	11,905,690.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
200	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2	ASUS	2015				Pembelian	4,510,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
201	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	3		2014				Pembelian	4,354,350.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
202	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	4		2014				Pembelian	4,354,350.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
203	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	5		2013				Pembelian	6,570,455.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
204	1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	1		2014				Pembelian	4,019,400.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
205	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	1		2014				Pembelian	1,760,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
206	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	BROTHER	2015				Pembelian	2,750,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
207	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	1	epson	2015				Pembelian	6,600,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
208	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	asus	2015				Pembelian	1,265,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
209	1.3.2.02.001.006.001	Mobil Ambulance	9	Mitsubishi/L300	2012	MHML0WY39K	4D560	B 1573 SHX	Hibah	319,699,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
210	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2	yamaha	2005	mh34d72038j160248	4d71160251	BA7995VG	Pembelian	7,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
211	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	11		2004				Pembelian	2,835,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
212	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	4		2016				Pembelian	7,805,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
213	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	7		2016				Pembelian	2,915,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
214	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	8		2016				Pembelian	2,915,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
215	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	5	Samsung	2020				Pembelian	2,438,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
216	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	1		2014				Pembelian	4,488,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
217	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2		2015				Pembelian	7,700,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
218	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	3		2016				Pembelian	6,132,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
219	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	4	catun carlota	2016				Pembelian	1,430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
220	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1		2011				Pembelian	1,430,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
221	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	HP OPPO	2017				Pembelian	2,899,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
222	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	175	tempat Sampah 4 ruang	2018				Pembelian	2,230,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
223	1.3.2.07.001.001.001	Sterilisator	30	smic/ china	2011				Pembelian	2,223,100.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
224	1.3.2.07.001.001.009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	12	Smic/ China	2011				Pembelian	1,414,600.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
225	1.3.2.07.001.001.064	Examination Lamp	4	DErungs/ Switzerland	2011				Pembelian	8,943,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
226	1.3.2.07.001.001.064	Examination Lamp	5	Derungs/ Switzerland	2011				Pembelian	8,943,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
227	1.3.2.07.001.001.065	Examination Table	4	Nuritek/ Indonesia	2011				Pembelian	3,536,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
228	1.3.2.07.001.001.101	Needle Holder	33		2007				Pembelian	1,215,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
229	1.3.2.07.001.001.101	Needle Holder	34		2007				Pembelian	1,215,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
230	1.3.2.07.001.001.101	Needle Holder	35		2007				Pembelian	1,215,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
231	1.3.2.07.001.001.107	Operating Lamp	1	dina	2015				Pembelian	1,215,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
232	1.3.2.07.001.001.122	Resusitasi Anak	2	Sohgen/Germany	2011				Pembelian	4,547,400.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
233	1.3.2.07.001.001.152	U S G	1		2003				Pembelian	70,200,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
234	1.3.2.07.001.001.152	U S G	2		2008				Pembelian	73,121,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
235	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	51		2008				Pembelian	5,378,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
236	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	93	bedfont scientific limited micro	2016				Pembelian	17,608,431.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
237	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	94	A&D Medical	2016				Pembelian	4,248,487.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
238	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	95	A&D Medical	2016				Pembelian	2,946,840.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
239	1.3.2.07.001.005.081	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	3	Summit Doppler/ USA	2011				Pembelian	10,408,200.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
240	1.3.2.07.001.005.081	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	4	Summit Doppler/ USA	2011				Pembelian	10,408,200.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
241	1.3.2.07.001.005.134	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	34	Mixed	2011				Pembelian	1,726,843.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
242	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	3	er by dimeda/germany	2011				Pembelian	1,868,900.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
243	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	18	AND	2018				Pembelian	3,834,958.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
244	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	19	AND	2018				Pembelian	3,834,958.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
245	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	20	AND	2018				Pembelian	2,518,728.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
246	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	21	AND	2018				Pembelian	2,518,728.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
247	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	22	Riester by dimeda/germany	2011				Pembelian	1,868,900.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
248	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	23	Riester by dimeda/germany	2011				Pembelian	1,868,900.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
249	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	24	Riester by dimeda/germany	2011				Pembelian	1,868,900.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
250	1.3.2.07.001.011.009	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	25	Riester /germany	2011				Pembelian	6,416,300.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
251	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	16	advan	2014				Pembelian	4,400,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
252	1.3.3.01.001.006.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	29	Beton	1983				Pembelian	54,439,200.00	Dari KIB C	Ke Aset Lainnya	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
253	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	8	Lion	2009				Pembelian	1,094,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
254	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	3	Sharp	2020				Pembelian	4,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
255	1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	2	Netya PG-1500-U	2018				Pembelian	2,887,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
256	1.3.2.06.003.047.002	Genset	1	honda	2016				Pembelian	49,940,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
257	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	2	Inscien Pro	2009				Pembelian	154,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
258	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	3	INScien Pro (FTC)	2009				Pembelian	96,800,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
259	1.3.2.07.001.001.169	Alat Kedokteran umum lainnya	4	Inscien Pro	2009				Pembelian	34,399,368.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
260	1.3.2.08.001.011.001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1	Hetich	2020				Pembelian	55,948,700.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
261	1.3.2.08.001.012.005	Santrifuge Biasa	1	Hettic	2010				Pembelian	71,970,800.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
262	1.3.2.08.001.014.004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	2	Modena	2020				Pembelian	4,840,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
263	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Canon	2017				Pembelian	2,475,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
264	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Canon	2017				Pembelian	2,475,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
265	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Brother	2020				Pembelian	3,685,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
266	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Epson	2020				Pembelian	2,255,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
267	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2	Alarm	2016				Pembelian	10,945,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
268	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	5	MADE IN JERMAN	2016				Pembelian	1,320,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
269	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	6	MADE IN JERMAN	2016				Pembelian	1,320,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
270	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	1	Lokal	2006				Pembelian	1,796,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
271	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	1	Lokal	2006				Pembelian	1,350,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
272	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	1	LG	2016				Pembelian	9,157,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
273	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2	LG	2016				Pembelian	9,157,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
274	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	3	LG	2016				Pembelian	9,157,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
275	1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	4	LG	2016				Pembelian	9,157,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
276	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	1	LG	2006				Pembelian	2,062,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
277	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2	LG	2006				Pembelian	2,062,500.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
278	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	3	LG	2013				Pembelian	6,458,300.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
279	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	4	LG	2013				Pembelian	6,458,300.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
280	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	2	Hardwell HF 12 B PRO	2021				Pembelian	3,500,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
281	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2		2016				Pembelian	3,960,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
282	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	10		2003				Pembelian	18,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
283	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	12		2006				Pembelian	18,000,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
284	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	1	PANASONIC	2016				Pembelian	3,520,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
285	1.3.2.06.003.047.002	Genset	1	Yamaha	2006				Pembelian	2,250,000.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
286	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	2	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
287	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	3	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
288	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	4	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
289	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	5	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
290	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	6	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
291	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	7	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
292	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	8	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
293	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	9	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
294	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	10	Dehaua / Camera CCTV+Duradus	2025				Pembelian	555,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
295	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	67	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
296	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	68	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
297	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	69	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
298	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	70	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
299	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	71	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
300	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	72	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
301	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	73	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
302	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	74	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
303	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	75	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
304	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	76	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
305	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	77	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
306	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	78	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
307	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	79	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
308	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	80	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
309	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	81	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
310	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	82	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
311	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	83	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
312	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	84	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
313	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	85	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
314	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	86	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
315	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	87	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
316	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	88	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
317	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	89	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
318	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	90	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
319	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	91	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
320	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	92	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
321	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	93	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
322	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	94	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
323	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	95	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
324	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	96	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
325	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	97	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
326	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	98	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
327	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	99	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
328	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	100	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
329	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	101	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
330	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	102	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
331	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	103	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
332	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	104	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
333	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	105	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
334	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	106	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
335	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	107	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
336	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	108	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
337	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	109	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
338	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	110	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
339	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	111	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
340	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	112	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
341	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	113	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
342	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	114	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
343	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	115	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
344	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	116	Napolly / Kursi Plastik	2025				Pembelian	135,420.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
345	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	27	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
346	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	28	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
347	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	29	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
348	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	30	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
349	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	31	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
350	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	32	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
351	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	33	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
352	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	34	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
353	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	35	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
354	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	36	Futura / KURSI KERJA/KANTORAN	2025				Pembelian	394,050.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
355	1.3.2.08.002.003.059	Infrared Lamp	1	Lampu Fisioterapi Infrared / Lampu Fis	2025				Pembelian	497,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
356	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	3	Lemari Psikotropika / Lemari Psikotrop	2025				Pembelian	888,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
357	1.3.2.05.001.004.015	Locker	1	Loker Tempat Helm / Loker Tempat He	2025				Pembelian	999,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
358	1.3.2.05.001.004.024	Laci Box	1	Olymplast / BOX	2025				Pembelian	155,400.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
359	1.3.2.05.001.004.024	Laci Box	2	Olymplast / BOX	2025				Pembelian	155,400.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
360	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	12	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
361	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	13	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
362	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	14	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
363	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	15	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
364	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	16	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
365	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	17	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
366	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	18	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
367	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	19	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
368	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	20	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
369	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	21	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
370	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	22	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
371	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	23	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
372	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	24	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
373	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	25	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
374	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	26	Futura / Kursi Susun	2025				Pembelian	699,300.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
375	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	1	Olymplast / Meja Oc	2025				Pembelian	210,900.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
376	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	57	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	888,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
377	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	58	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	888,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
378	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	59	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	888,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
379	1.3.2.05.002.001.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	61	Olymplast / Kursi	2025				Pembelian	133,200.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
380	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	3		2025				Pembelian	10,807,005.00	Dari KIB C	EkstraKompetebel	
381	1.3.3.04.001.004.004	Pagar Lain-lain (dst)	1		2025				Pembelian	8,451,776.00	Dari KIB C	EkstraKompetebel	
382	1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2	Hugo / Hugo Rak Dapur Dorong Besi S	2025				Pembelian	386,280.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
383	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	53	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	533,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
384	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	54	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	533,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
385	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	55	Meja 1/2 Biro / Meja 1/2 Biro	2025				Pembelian	533,000.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
386	1.3.2.07.001.001.007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	7	Heat Lamp / Infrared Heat Lamp	2025				Pembelian	335,220.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
387	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	5	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
388	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	6	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
389	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	7	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
390	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	8	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
391	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	9	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
392	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	10	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
393	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	11	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
394	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	12	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
395	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	13	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
396	1.3.2.07.001.019.070	Blood Presure Meter/Tensimeter	14	NIBP/MANSET TENSIMETER / MANS	2025				Pembelian	388,500.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
397	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Sentral	2025				Pembelian	110,947,527.20	Dari KIB C	Ke Kib F	
398	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	27,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
399	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	25,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
400	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
401	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
402	1.3.4.1.1.3.1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		AC Spilt	2025				Pembelian	23,322,192.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
403	1.3.4.1.1.3.1	JJU		Instalasi Gas	2025				Pembelian	130,918,802.70	Dari KIB C	Ke Kib F	
404	1.3.4.1.1.3.1	JJU		Instalasi Listrik	2025				Pembelian	289,529,958.97	Dari KIB C	Ke Kib F	
405	1.3.4.1.1.3.1	Bangunan		Bangunan Cathlab	2025				Pembelian	425,110,017.13	Dari KIB C	Ke Kib F	
406	1.3.4.1.1.3.1	Bangunan		Bangunan RI Paru	2025				Pembelian	1,649,886,236.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
407	1.3.2.5.2.1.17	Backdn dan Meja			2025				Pembelian	49,500,000.00	Dari KIB C	Ke Kib B	
408	04.03.08.02.003	Instalasi Jaringan Pipa gas Lain-lain		Oksigen sentral	2025				Pembelian	163,500,000.00	Dari KIB B	Ke Kib D	
20. Dinas Pendidikan										886,339,654.00			
1	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0127 s/d 0153	Evolu Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
2	1.3.2.05.002.001.003	Meja Kerja Besi/Metal	0021 s/d 0047	Evolu Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
3	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0065 s/d 0091	Evolu Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
4	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0021 s/d 0048	Evolu Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,672.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
5	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0117 s/d 0144	Evolu Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (ribuan Rp)	KIB Asal	KIB Tujuan	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	Asal usul				
6	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0021 s/d 0048	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
7	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0162 s/d 0189	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
8	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0018 s/d 0044	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
9	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0049 s/d 0102	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	53,991,414.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
10	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0015 s/d 0041	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
11	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0017 s/d 0070	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	53,991,414.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
12	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0144 s/d 0171	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
13	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0141 s/d 0168	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
14	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0037 s/d 0064	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
15	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0094 s/d 0121	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
16	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0029 s/d 0056	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
17	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0240 s/d 0267	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
18	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0001 s/d 0028	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
19	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0051 s/d 0078	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
20	1.3.2.05.002.001.003	Meja Sekolah	0017 s/d 0043	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	26,995,707.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
21	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0244 s/d 0271	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,588.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
22	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0031 s/d 0044	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	13,997,774.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
23	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0276 s/d 0303	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
24	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0179 s/d 0206	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
25	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0042 s/d 0087	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	45,992,686.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
26	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0240 s/d 0267	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
27	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0112 s/d 0139	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	27,995,548.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
28	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0036 s/d 0065	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	29,974,989.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
29	1.3.2.05.002.001.023	Meja Sekolah	0016 s/d 0045	Evolo Meja siswa EV-MS 019	2025				Pembelian	29,974,989.00	Dari KIB B	EkstraKompetebel	
30	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	24	LENOVO	2012				Pembelian	9,697,666.00	Dari KIB B	Ke Aset Lainnya	
31	1.3.4.1.1.3.1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe C SDN 10 IX Koto	2025				Pembelian	10,820,000.00	Dari KIB C	Ke Kib F	
Jumlah Total										23,907,142,038.65			

DAFTAR RINCIAN PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGUNAAN 2025

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type/ Alamat	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Harga (ribuan Rp)	KIB	OPD Asal	OPD Tujuan
						Rangka / Alamat	Mesin	Polisi					
1	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000153	Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar	2022	MK2KRWPNUJ013458	4N15UJR5865	BA 9 V	Pembelian	607,000,000.00	KIB B	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah
2	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000154	Mitsubishi Pajera Sport 2.4L Dakar	2022	MK2KRWPNUJ013448	4N15UJR3663	BA 8 V	Pembelian	607,000,000.00	KIB B	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah
3	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	000003	Rehap Workshop 2	2025	Koto Padang			Pembelian	224,832,600.00	KIB C	Dinas PUPR	Dinas Kumperdag
4	03.01.01.30.005	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	000003	Pembuatan Lapangan Volly di Area sport center 2025	2025	Sport center (Koto Padang)			Pembelian	20,052,000.00	KIB C	Dinas PUPR	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
5	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000003	Rawat Inap Interne	1990	Komplek RSUD Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	1,758,304,471.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan
6	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000001	Kamar Operasi	1990	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	846,710,881.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
7	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000001	Fisioterapi	1998	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	167,930,956.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000002	Rawat Inap Anak	1996	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	428,110,189.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000001	Rawat Inap Kebidanan	1990	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	407,158,591.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
10	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor permanen	000001	gedung kantor	1986	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	419,205,907.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000001	Unit Transfusi Darah	2008	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	76,814,991.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000002		2015	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	681,251,698.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	03.01.01.04.007	Bangunan Gedung instalasi Permanen	000001	Gedung Kelas III	2016	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	1,323,203,478.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000001	Rawat Inap VIP	1998	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	620,436,564.00	KIB C	Dinas Kesehatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15	03.01.01.04.006	Bangunan Gedung instalasi Lain-lain	000002	Poliklinik	1986	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	772,636,862.00	KIB C	Dinas Kesehatan	BPBD
16	03.01.01.04.009	Bangunan Gedung instalasi Darurat	000001	Instalasi Gawat Darurat	1986	Komplek Sungai Dareh KM. 2 Pulau Punjung			Pembelian	506,096,907.00	KIB C	Dinas Kesehatan	BPBD
17	02.05.02.04.004	A.C. Split	0003	Panasonic	2016				Pembelian	5,166,375.00	KIB B	Dinas Kesehatan	BPBD
18	02.05.02.04.004	A.C. Split	0004	Panasonic	2016				Pembelian	7,574,850.00	KIB B	Dinas Kesehatan	BPBD
19	02.05.02.04.004	A.C. Split	0005	Polytron	2018				Pembelian	4,300,000.00	KIB B	Dinas Kesehatan	BPBD
20	02.05.02.04.004	A.C. Split	0006	Sharp	2020				Pembelian	4,500,000.00	KIB B	Dinas Kesehatan	BPBD
21	02.05.02.04.004	A.C. Split	0003	Panasonic	2016				Pembelian	6,226,250.00	KIB B	Dinas Kesehatan	DPMPPTSP
22	02.05.02.04.004	A.C. Split	0004	Panasonic	2021				Pembelian	8,300,000.00	KIB B	Dinas Kesehatan	DPMPPTSP
23	02.05.02.04.004	A.C. Split	0005	Panasonik	2021				Pembelian	8,338,000.00	KIB B	Dinas Kesehatan	DPMPPTSP
24	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0005	Nissan Xtrail	2010	MHBF2CG3FAJ004111	MR20-008408R	BA 1957 VK	Pembelian	296,150,000.00	KIB B	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah
25	02.10.01.02.002	Lap Top	0015	apple mac book pro	2020				Pembelian	34,695,000.00	KIB B	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	0001	Perabot Nagari / -	2012				Pembelian	3,960,000.00	KIB B	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	BPBD
27	02.02.01.02.005	Kendaraan Bermotor Penumpang lainnya (dst)	0001	Daihatsu Terios	2009	MHKG2CJU9K009803	DBJ2607	BA 57 V	Pembelian	157,950,000.00	KIB B	Badan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan
28	02.02.01.02.005	Kendaraan Bermotor Penumpang lainnya (dst)	0003	Mitsubishi L300 BC (4x2) M/T	2008	MHML0WY398K001946	4D56CD25489	BA 2765 VG	Pembelian	128,250,000.00	KIB B	Inspektorat	DPMPPTSP

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type/ Alamat	Tahun Pembelian	Nomor			Asal usul	Harga (ribuan Rp)	KIB	OPD Asal	OPD Tujuan
						Rangka / Alamat	Mesin	Polisi					
29	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	0011	Honda win	2005	MH1HABD175K105445	HABDE1105449	BA 6702 VB	Pembelian	6,300,000.00	KIB B	BAPERIDA	Badan Keungan Daerah
30	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0152	Toyota Avanza 1.5 M/T	2016	MHKM5FA3JGK001482	2NRF531362	BA 1035 V	Pembelian	203,116,552.00	KIB B	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah
31	02.06.01.02.130	Video Conference	0002	Logitech Webcam	2020				Pembelian	6,553,800.00	KIB B	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah
	Jumlah									10,348,126,922.00			

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI PENATAUSAHAAN ASET 2025

Lampiran : 20

KODE	KIB	Saldo Aset Tetap 2024 (Audited)	PENAMBAHAN 2025							
			Penambahan Belanja Modal Menjadi Aset	Penambahan Belanja Modal Bos Menjadi Aset	Penambahan Belanja Barang dan Jasa BOS Menjadi Aset	Penambahan Belanja Modal BLUD Menjadi Aset	Penambahan Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	Penambahan Hibah Menjadi Aset	Penambahan Kurang Catat Menjadi Aset	Penambahan Aset dari Hutang Tahun 2024
01	Tanah	643,176,924,008.00	-	-	-	-	-	5,359,000,000.00	142,300,000.00	-
02	Peralatan dan Mesin	457,431,418,474.76	7,442,765,838.65	3,304,918,100.00	2,309,000.00	1,831,007,223.00	-	1,268,278,900.00	262,470,000.00	-
02.01	Alat Besar	25,815,213,080.00	845,467,568.00	15,621,000.00	-	12,008,314.00	-	-	-	-
02.02	Alat Angkutan	83,939,153,363.00	1,649,902,995.00	-	-	-	-	598,000,000.00	-	-
02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8,557,818,755.00	5,328,000.00	15,521,000.00	-	-	-	-	-	-
02.04	Alat Pertanian	2,631,622,537.00	-	23,447,000.00	-	-	-	43,095,000.00	-	-
02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	85,357,544,757.35	2,096,269,360.65	1,303,427,000.00	1,009,000.00	427,942,691.00	-	537,583,900.00	262,470,000.00	-
02.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	25,911,648,057.00	295,500,000.00	57,980,000.00	-	14,840,000.00	-	-	-	-
02.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	119,069,029,613.90	726,800,000.00	-	-	784,051,101.00	-	-	-	-
02.08	Alat Laboratorium	34,126,931,985.36	374,047,114.00	73,880,000.00	-	11,469,500.00	-	-	-	-
02.09	Alat Persenjataan	770,370,135.00	38,850,000.00	22,500,000.00	-	-	-	-	-	-
02.10	Komputer	67,987,607,427.15	1,220,044,662.00	1,714,262,100.00	1,300,000.00	580,695,617.00	-	87,000,000.00	-	-
02.11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	34,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.15	Alat Keselamatan Kerja	1,610,912,142.00	91,849,999.00	31,800,000.00	-	-	-	-	-	-
02.16	Alat Peraga	-	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-
02.17	Peralatan Proses/Produksi	121,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.18	Rambu - Rambu	933,005,980.00	63,306,140.00	-	-	-	-	-	-	-
02.19	Peralatan Olah Raga	564,180,642.00	35,400,000.00	42,980,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-	-
03	Gedung dan Bangunan	1,129,495,528,240.53	13,439,825,126.06	-	-	663,925,470.00	-	29,902,764,807.00	-	-
03.01	Bangunan Gedung	1,091,793,502,378.51	12,480,670,340.06	-	-	644,666,689.00	-	29,902,764,807.00	-	-
03.02	Monumen	6,442,214,368.00	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03	Bangunan Menara	2,895,065,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	28,364,745,779.02	959,154,786.00	-	-	19,258,781.00	-	-	-	-
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,511,485,488,792.33	11,061,316,629.59	-	-	107,590,007.00	-	-	-	3,300,000.00
04.01	Jalan Dan Jembatan	1,201,813,571,715.74	8,507,018,321.00	-	-	107,590,007.00	-	-	-	-
04.02	Bangunan Air	220,328,424,517.66	244,798,308.59	-	-	-	-	-	-	-
04.03	Instalasi	42,094,538,012.00	2,238,500,000.00	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
04.04	Jaringan	47,248,954,546.93	71,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
05	Aset Tetap Lainnya	48,963,924,243.00	438,793,970.00	4,179,003,560.00	16,070,000.00	-	-	-	-	-
05.1	Bahan Perpustakaan	45,372,830,565.00	115,793,970.00	4,179,003,560.00	16,070,000.00	-	-	-	-	-
05.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2,719,874,878.00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.3	Hewan	62,316,800.00	269,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-
05.4	Biota Perairan	42,000,000.00	53,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
05.5	Tanaman	65,552,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	701,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
06	KDP	2,970,751,677.00	2,935,764,084.00	-	-	-	280,041,509.00	-	-	-
Jumlah Aset Tetap		3,793,524,035,435.62	35,318,465,648.30	7,483,921,660.00	18,379,000.00	2,602,522,700.00	280,041,509.00	36,530,043,707.00	404,770,000.00	3,300,000.00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	84,342,259,219.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang dipinjam-pakaikan	8,603,095,542.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	132,681,069,156.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lain-Lain	225,626,423,917.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	4,557,476,277.00	251,304,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Lainnya		230,183,900,194.27	251,304,000.00	-	-	-	-	-	-	-

ASET TETAP TETAP /ASET LAINNYA										
Penambahan Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan	Penambahan Reklasifikasi	Jumlah Penambahan	Pengurangan Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan	PENGURANGAN 2025					Saldo Aset tetap 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Audited
				Pengurangan Bayar Hutang 2024	Pengurangan Koreksi	Penghapusan	Pengurangan Reklasifikasi	Jumlah Pengurangan		
		5,501,300,000.00			7,900,000.00			7,900,000.00	648,670,324,008.00	-
2,095,380,827.00	1,374,287,310.00	17,581,417,198.65	2,095,380,827.00	77,354,838.00	456,756,308.00	-	16,451,941,118.00	19,081,433,091.00	455,931,402,582.41	344,129,841,679.04
-	399,088,100.00	1,272,184,982.00	-	-	-		5,612,936,544.00	5,612,936,544.00	21,474,461,518.00	23,452,105,508.00
2,005,766,552.00	616,173,000.00	4,869,842,547.00	2,005,766,552.00	-	-		5,348,285,486.00	7,354,052,038.00	81,454,943,872.00	64,991,899,430.00
-	-	20,849,000.00	-	-	-		10,100,000.00	10,100,000.00	8,568,567,755.00	5,823,216,455.40
-	348,376,210.00	414,918,210.00	-	-	-		46,050,657.00	46,050,657.00	3,000,490,090.00	1,943,351,148.00
48,365,475.00	-	4,677,067,426.65	48,365,475.00	48,461,000.00	5,855,000.00		2,007,569,961.00	2,110,251,436.00	87,924,360,748.00	68,747,935,515.50
6,553,800.00	-	374,873,800.00	6,553,800.00	-	-		292,780,500.00	299,334,300.00	25,987,187,557.00	19,189,020,101.00
-	-	1,610,851,101.00	-	22,714,456.00	-		1,566,952,409.00	1,589,666,865.00	118,990,213,849.90	82,274,118,467.14
-	-	459,396,614.00	-	-	-		599,042,984.00	599,042,984.00	33,987,285,615.36	22,931,335,494.00
-	-	61,350,000.00	-	-	-		-	-	831,720,135.00	343,545,925.00
34,695,000.00	10,650,000.00	3,648,647,379.00	34,695,000.00	6,179,382.00	431,062,500.00		968,222,577.00	1,440,159,459.00	70,196,095,347.15	51,873,997,836.00
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-	-	34,900,000.00	13,669,167.00
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	123,649,999.00	-	-	-		-	-	1,734,562,141.00	1,234,950,675.00
-	-	3,500,000.00	-	-	-		-	-	3,500,000.00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	121,480,000.00	17,291,459.00
-	-	63,306,140.00	-	-	19,838,808.00		-	19,838,808.00	976,473,312.00	749,918,760.00
-	-	80,980,000.00	-	-	-		-	-	645,160,642.00	543,485,738.00
8,252,746,095.00	141,151,088.00	52,400,412,586.06	8,252,746,095.00	219,302,200.00	163,350,515.30	-	4,048,160,080.00	12,683,558,890.30	1,169,212,381,936.29	190,810,484,054.00
8,252,746,095.00	141,151,088.00	51,421,999,019.06	8,252,746,095.00	219,302,200.00	163,350,515.30		3,413,657,424.00	12,049,056,234.30	1,131,166,445,163.27	185,400,403,467.00
-	-	-	-	-	-		-	-	6,442,214,368.00	782,769,098.00
-	-	-	-	-	-		-	-	2,895,065,715.00	492,558,793.00
-	-	978,413,567.00	-	-	-		634,502,656.00	634,502,656.00	28,708,656,690.02	4,134,752,696.00
-	128,914,101,973.00	140,086,308,609.59	-	-	269,121,822.00	-	-	269,121,822.00	1,651,302,675,579.92	992,833,862,614.09
-	115,466,487,256.00	124,081,095,584.00	-	-	199,996,000.00		-	199,996,000.00	1,325,694,671,299.74	924,568,410,447.09
-	2,943,016,525.00	3,187,814,833.59	-	-	69,125,822.00		-	69,125,822.00	223,447,113,529.25	46,934,136,101.00
-	6,740,073,945.00	8,981,873,945.00	-	-	-		-	-	51,076,411,957.00	12,073,236,957.00
-	3,764,524,247.00	3,835,524,247.00	-	-	-		-	-	51,084,478,793.93	9,258,079,109.00
-	-	4,633,867,530.00	-	-	31,899,970.00	-	25,866,800.00	57,766,770.00	53,540,025,003.00	218,440,000.00
-	-	4,310,867,530.00	-	-	31,899,970.00		1,350,000.00	33,249,970.00	49,650,448,125.00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	2,719,874,878.00	117,090,000.00
-	-	269,600,000.00	-	-	-		24,516,800.00	24,516,800.00	307,400,000.00	-
-	-	53,400,000.00	-	-	-		-	-	95,400,000.00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	65,552,000.00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
-	-	-	-	-	-		-	-	701,350,000.00	101,350,000.00
-	-	3,215,805,593.00	-	-	-	-	160,465,088.00	160,465,088.00	6,026,092,182.00	-
10,348,126,922.00	130,429,540,371.00	223,419,111,517.30	10,348,126,922.00	296,657,038.00	929,028,615.30	-	20,686,433,086.00	32,260,245,661.30	3,984,682,901,291.62	1,527,992,628,347.13
	19,678,403,133.00	19,678,403,133.00	-	-	-	1,649,062,000.00	25,223,000.00	1,674,285,000.00	102,346,377,352.27	63,596,681,847.61
	1,565,717,886.00	1,565,717,886.00	-	-	-	-	1,359,824,100.00	1,359,824,100.00	8,808,989,328.00	7,009,227,168.00
	-	-	-	-	-	-	130,606,305,156.00	130,606,305,156.00	2,074,764,000.00	112,254,079,175.00
-	21,244,121,019.00	21,244,121,019.00	-	-	-	1,649,062,000.00	131,991,352,256.00	133,640,414,256.00	113,230,130,680.27	182,859,988,190.62
-	-	251,304,000.00	-	-	-	-	-	-	4,808,780,277.00	2,873,514,683.00
-	21,244,121,019.00	21,495,425,019.00	-	-	-	1,649,062,000.00	131,991,352,256.00	133,640,414,256.00	118,038,910,957.27	185,733,502,873.62

Penyusutan 2025										Nilai Buku 31 Desember 2025
Penambahan Penyusutan Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan	Penambahan Penyusutan Reklasifikasi	Penambahan Penyusutan Koreksi	Pengurangan Penyusutan Penyerahan / Pengalihan Status Penggunaan	Pengurangan Penyusutan Reklasifikasi	Pengurangan Penyusutan Penghapusan	Pengurangan Penyusutan Koreksi	Penyusutan Semester I	Penyusutan Semester II	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,670,324,008.00
1,251,409,833.00	863,471,773.00	-	1,251,409,833.00	14,360,221,755.00	-	-	21,575,671,149.00	20,040,073,488.96	372,248,836,335.00	83,682,566,247.41
-	269,384,467.00	-	-	5,493,452,510.00	-	-	332,311,392.00	336,711,089.00	18,897,059,946.00	2,577,401,572.00
1,167,528,458.00	235,061,096.00	-	1,167,528,458.00	4,517,675,962.00	-	-	2,559,290,508.00	2,586,102,203.00	65,854,677,275.00	15,600,266,597.00
-	-	-	-	10,100,000.00	-	-	370,335,151.00	343,557,556.00	6,527,009,162.40	2,041,558,592.60
-	348,376,210.00	-	-	46,050,657.00	-	-	141,028,582.00	135,223,123.00	2,521,928,406.00	478,561,684.00
42,632,575.00	-	-	42,632,575.00	1,008,725,288.00	-	-	3,798,028,975.00	3,568,143,380.85	75,105,382,583.35	12,818,978,164.65
6,553,800.00	-	-	6,553,800.00	273,536,083.00	-	-	1,098,054,143.00	1,079,048,587.00	21,092,586,748.00	4,894,600,809.00
-	-	-	-	1,512,013,458.00	-	-	7,668,608,667.00	6,637,847,651.00	95,068,561,317.14	23,921,652,532.76
-	-	-	-	549,759,491.00	-	-	1,354,924,060.00	1,348,035,372.00	25,084,535,435.00	8,902,750,180.36
-	-	-	-	-	-	-	86,356,680.00	71,387,934.00	501,290,539.00	330,429,596.00
34,695,000.00	10,650,000.00	-	34,695,000.00	948,908,306.00	-	-	3,968,033,222.00	3,836,498,137.11	58,740,270,889.11	11,455,824,458.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,745,000.00	1,745,000.00	17,159,167.00	17,740,833.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	159,016,085.00	58,497,131.00	1,452,463,891.00	282,098,250.00
-	-	-	-	-	-	-	-	116,667.00	116,667.00	3,383,333.00
-	-	-	-	-	-	-	7,592,500.00	32,476,459.00	89,003,541.00	89,003,541.00
-	-	-	-	-	-	-	24,132,307.00	19,597,019.00	793,648,086.00	182,825,226.00
-	-	-	-	-	-	-	6,213,887.00	9,970,139.00	559,669,764.00	85,490,878.00
3,969,404,914.00	11,688,015.00	-	3,969,404,914.00	828,805,427.00	-	-	11,976,649,691.00	12,230,690,573.00	214,200,706,906.00	955,011,675,030.29
3,969,404,914.00	11,688,015.00	-	3,969,404,914.00	677,234,442.00	-	-	11,596,831,825.00	11,849,274,120.00	208,180,962,985.00	922,985,482,178.27
-	-	-	-	-	-	-	64,422,145.00	64,422,145.00	911,613,388.00	5,530,600,980.00
-	-	-	-	-	-	-	36,188,321.00	36,188,321.00	564,935,435.00	2,330,130,280.00
-	-	-	-	151,570,985.00	-	-	279,207,400.00	280,805,987.00	4,543,195,098.00	24,165,461,592.02
-	110,837,205,113.00	8,239,143,946.59	-	-	-	-	21,251,703,457.00	25,213,687,462.00	1,158,375,602,592.68	492,927,072,987.24
-	107,597,066,841.00	8,239,143,946.59	-	-	-	-	16,539,008,894.00	20,520,437,518.00	1,077,464,067,646.68	248,230,603,653.06
-	985,039,194.00	-	-	-	-	-	3,081,184,965.00	3,055,242,565.00	54,055,602,825.00	169,391,510,704.25
-	1,491,737,216.00	-	-	-	-	-	812,548,564.00	818,849,117.00	15,196,371,854.00	35,880,040,103.00
-	763,361,862.00	-	-	-	-	-	818,961,034.00	819,158,262.00	11,659,560,267.00	39,424,918,526.93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,440,000.00	53,321,585,003.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,650,448,125.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,090,000.00	2,602,784,878.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,400,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,400,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,552,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,350,000.00	600,000,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,026,092,182.00
5,220,814,747.00	111,712,364,901.00	8,239,143,946.59	5,220,814,747.00	15,189,027,182.00	-	-	54,804,024,297.00	57,484,451,523.96	1,745,043,585,833.68	2,239,639,315,457.94
-	15,239,825,532.00	1,137,990,891.04	-	25,223,000.00	1,518,785,808.00	7,810,487,145.84	-	-	70,620,002,316.81	31,726,375,035.46
-	1,146,598,839.00	-	-	845,765,229.00	-	-	166,832,461.00	164,575,318.00	7,641,468,557.00	1,167,520,771.00
-	-	-	-	112,038,773,861.00	-	212,191,207.00	-	-	3,114,107.00	2,071,649,893.00
-	16,386,424,371.00	1,137,990,891.04	-	112,909,762,090.00	1,518,785,808.00	8,022,678,352.84	166,832,461.00	164,575,318.00	78,264,584,980.81	34,965,545,699.46
-	-	-	-	-	-	-	144,346,654.00	151,109,097.00	3,168,970,434.00	1,639,809,843.00
-	16,386,424,371.00	1,137,990,891.04	-	112,909,762,090.00	1,518,785,808.00	8,022,678,352.84	311,179,115.00	315,684,415.00	81,433,555,414.81	36,605,355,542.46

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Lampiran : 21

Saldo Aset Tetap 2024 (Audited)

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN									
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Laboratorium	Alat Persenjataan	Komputer
1	Sekretariat DPRD	4,134,014,572.00	291,619,800.00	3,410,127,091.00	-	-	6,791,980,789.00	2,092,731,123.00	-	-	-	394,907,474.00
2	Sekretariat Daerah	402,743,162,850.00	33,228,000.00	14,970,360,814.00	13,460,000.00	-	14,593,057,856.00	2,359,492,379.00	111,985,000.00	30,025,000.00	-	2,542,972,394.00
3	Kec. Pulau Punjung	987,500,000.00	-	252,599,552.00	-	-	137,579,273.00	6,650,000.00	-	-	-	77,409,000.00
4	Kec. Sitiung	1,000,000,000.00	-	290,046,365.00	-	-	114,248,400.00	32,590,000.00	-	-	-	92,850,000.00
5	Kec. Koto Baru	1,488,000,000.00	-	356,516,944.00	-	-	139,670,136.00	8,400,000.00	-	-	-	115,141,364.00
6	Kec. Sungai Rumbai	1,000,000,000.00	-	317,813,625.00	-	-	123,454,500.00	13,979,250.00	-	-	-	61,475,000.00
7	Kec. Sembilan Koto	17,875,000.00	-	259,095,660.00	-	-	93,907,618.00	9,636,000.00	-	2,480,875.00	-	73,445,650.00
8	Kec. Timpeh	374,152,543.00	-	194,478,125.00	-	-	81,207,000.00	13,236,850.00	-	-	-	62,705,625.00
9	Kec. Padang Laweh	20,020,000.00	-	268,219,960.00	-	-	74,460,000.00	16,000,000.00	-	-	-	62,300,000.00
10	Kec. Tiumang	75,000,000.00	-	222,562,425.00	-	-	105,670,000.00	18,100,000.00	-	-	-	49,850,000.00
11	Kec Koto Besar	461,087,771.00	-	338,008,865.00	-	-	96,957,666.00	6,950,000.00	-	-	-	69,500,000.00
12	Kec Koto Salak	25,000,000.00	-	338,562,875.00	-	-	150,410,750.00	25,363,500.00	-	1,200,000.00	-	89,700,000.00
13	Kec. Asam Jujuhan	71,500,000.00	5,000,000.00	222,702,750.00	-	-	89,639,975.00	12,950,000.00	-	-	-	39,145,000.00
14	Dinas PUPR	162,648,492,953.00	18,156,916,346.00	5,874,268,945.00	431,574,566.00	106,885,800.00	3,926,713,892.00	2,567,001,407.00	-	705,490,633.00	-	1,222,216,924.00
15	Dinas PERKIMTAN	1,174,185,160.00	-	775,392,836.00	-	34,210,000.00	3,086,755,070.00	41,113,500.00	-	-	-	290,332,500.00
16	Dinas Perhubungan	5,961,400,000.00	-	2,446,699,500.00	571,723,500.00	-	867,473,676.00	70,025,000.00	-	688,527,500.00	-	412,475,384.00
17	Dinas Kesehatan	14,530,694,960.00	712,884,573.00	21,620,940,987.00	11,715,000.00	-	20,615,785,636.00	9,073,510,063.00	118,689,860,749.90	15,850,125,967.16	174,100,000.00	6,617,029,044.00
18	Dinas Pendidikan	24,816,997,724.00	116,145,939.00	2,009,994,188.00	460,166,286.00	1,820,952,149.00	21,370,350,390.85	5,031,149,580.00	100,289,929.00	10,212,074,748.00	339,751,640.00	44,699,797,100.15
19	Dinas BUDPARPORA	1,115,335,010.00	1,500,000.00	572,123,338.00	3,230,000.00	-	439,825,500.00	73,701,956.00	-	16,800,000.00	-	341,640,520.00
20	Dinas TRANSNAKER	2,121,000,000.00	-	467,150,000.00	168,241,142.00	-	179,432,500.00	3,000,000.00	-	9,000,000.00	-	323,963,000.00
21	DINSOSP3APPKB	-	-	3,629,086,800.00	-	-	431,861,923.00	312,500,000.00	-	2,000,000.00	-	760,481,000.00
22	DISDUKCAPIL	200,000,000.00	-	1,629,681,812.00	8,745,000.00	-	427,873,300.00	328,024,000.00	-	4,450,000.00	-	1,257,081,416.00
23	Dinas PMD	-	-	1,419,426,500.00	1,260,000.00	-	220,933,500.00	15,800,000.00	-	-	-	208,552,000.00
24	Dinas Pertanian	11,539,094,583.00	-	2,884,913,200.00	600,701,936.00	291,758,275.00	2,068,520,885.00	398,922,000.00	111,189,750.00	385,924,025.00	7,000,000.00	1,186,456,070.00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	1,281,870,882.00	4,410,375,000.00	940,380,925.00	15,270,000.00	148,405,000.00	625,930,272.50	66,315,400.00	41,805,000.00	47,310,000.00	-	184,143,850.00
26	Dinas KUMPERDAG	1,301,340,000.00	1,599,413,057.00	1,377,508,269.00	6,010,332,825.00	-	286,283,583.00	1,148,596,883.00	2,649,185.00	4,380,536,272.20	-	212,243,415.00
27	BKD	-	-	1,427,302,904.00	40,885,000.00	-	1,660,006,166.00	514,087,735.00	-	5,000,000.00	-	2,307,914,030.00
28	DPMPTSP	-	-	715,114,363.00	14,465,000.00	-	359,664,416.00	219,858,000.00	1,750,000.00	1,600,000.00	-	423,586,400.00
29	Inspektorat Kabupaten	-	13,410,000.00	1,969,026,950.00	-	33,750,000.00	581,378,736.00	59,821,400.00	-	14,900,000.00	-	398,301,800.00
30	BAPPEDA	-	3,904,765.00	698,942,666.00	10,100,000.00	-	423,458,240.00	61,355,909.00	-	-	-	448,065,682.00
31	DLH	4,089,200,000.00	412,288,100.00	1,969,834,150.00	160,843,500.00	195,661,313.00	765,111,396.00	98,223,432.00	-	1,735,704,965.00	68,168,495.00	232,183,659.00
32	Badan KESBANGPOL	-	-	268,200,000.00	-	-	106,168,000.00	6,750,000.00	-	-	-	97,635,000.00
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	5,780,283,810.00	-	-	545,781,786.00	25,453,500.00	-	-	30,000,000.00	133,364,500.00
34	BPBD	-	58,527,500.00	1,971,288,950.00	25,250,000.00	-	122,394,000.00	70,636,000.00	-	-	150,000,000.00	133,266,000.00
35	BKPSDM	-	-	414,600,667.00	-	-	193,910,197.00	1,500,000.00	-	-	-	545,413,526.00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1,015,100,000.00	3,420,000.00	-	1,601,054,060.00	91,996,390.00	9,500,000.00	33,782,000.00	-	667,365,400.00
37	Dinas KOMINFO	-	-	620,796,552.00	6,435,000.00	-	1,858,633,669.00	1,016,226,800.00	-	-	-	1,152,697,700.00
	Jumlah	643,176,924,008.00	25,815,213,080.00	83,939,153,363.00	8,557,818,755.00	2,631,622,537.00	85,357,544,757.35	25,911,648,057.00	119,069,029,613.90	34,126,931,985.36	770,370,135.00	67,987,607,427.15

ASET TETAP											
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Alat Keselamatan Kerja	Peralatan Proses/Produksi	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN				GEDUNG DAN BANGUNAN	Jalan Dan Jembatan
						Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
-	-	-	-	-	12,981,366,277.00	41,297,291,530.00	-	-	-	41,297,291,530.00	-
34,900,000.00	-	-	-	-	34,689,481,443.00	43,867,651,398.06	39,867,000.00	-	3,302,665,126.00	47,210,183,524.06	-
-	-	-	-	-	474,237,825.00	971,999,720.00	-	-	-	971,999,720.00	-
-	-	-	-	-	529,734,765.00	506,918,100.00	-	-	-	506,918,100.00	-
-	-	-	-	-	619,728,444.00	1,315,329,250.00	-	-	52,958,692.00	1,368,287,942.00	-
-	9,900,000.00	-	-	-	526,622,375.00	1,369,411,178.00	-	-	21,969,000.00	1,391,380,178.00	-
-	5,000,000.00	-	-	-	443,565,803.00	-	-	-	189,586,000.00	189,586,000.00	-
-	-	-	-	-	351,627,600.00	2,686,810,796.00	-	-	49,800,000.00	2,736,610,796.00	-
-	-	-	-	-	420,979,960.00	1,205,320,668.00	-	-	216,651,805.00	1,421,972,473.00	-
-	-	-	-	-	396,182,425.00	2,373,453,709.00	-	-	44,451,150.00	2,417,904,859.00	-
-	6,400,000.00	-	-	-	517,816,531.00	2,187,494,750.00	-	-	-	2,187,494,750.00	-
-	-	-	-	-	605,237,125.00	1,972,819,099.00	-	-	-	1,972,819,099.00	-
-	-	-	-	-	369,437,725.00	2,840,508,500.00	-	-	-	2,840,508,500.00	-
-	-	-	-	-	32,991,068,513.00	115,147,182,922.00	158,115,970.00	2,895,065,715.00	1,216,260,811.00	119,416,625,418.00	1,170,031,360,672.32
-	-	-	-	-	4,227,803,906.00	45,248,150,490.00	-	-	160,694,750.00	45,408,845,240.00	21,886,389,946.00
-	-	-	933,005,980.00	-	5,989,930,540.00	3,505,815,491.00	-	-	-	3,505,815,491.00	-
-	-	87,500,000.00	-	-	193,453,452,020.06	282,644,462,256.75	62,720,970.00	-	2,614,347,046.90	285,321,530,273.65	1,852,681,622.37
-	485,331,142.00	33,980,000.00	-	564,180,642.00	87,244,163,734.00	331,454,440,920.23	6,156,510,428.00	-	13,369,044,155.19	350,979,995,503.42	267,442,800.00
-	-	-	-	-	1,448,821,314.00	101,899,315,306.85	-	-	886,789,250.00	102,786,104,556.85	-
-	-	-	-	-	1,150,786,642.00	3,359,217,439.00	-	-	-	3,359,217,439.00	439,891,500.00
-	776,950,000.00	-	-	-	5,912,879,723.00	3,590,943,702.19	-	-	310,958,191.00	3,901,901,893.19	-
-	-	-	-	-	3,655,855,528.00	1,397,942,702.00	-	-	-	1,397,942,702.00	-
-	-	-	-	-	1,865,972,000.00	-	-	-	-	-	-
-	69,350,000.00	-	-	-	8,004,736,141.00	15,598,550,040.30	-	-	2,257,370,741.00	17,855,920,781.30	321,348,915.05
-	-	-	-	-	6,479,935,447.50	8,783,327,647.00	-	-	175,349,000.00	8,958,676,647.00	242,137,400.00
-	-	-	-	-	15,017,563,489.20	47,811,763,059.74	-	-	2,850,291,475.93	50,662,054,535.67	6,772,318,860.00
-	-	-	-	-	5,955,195,835.00	5,644,091,500.00	-	-	-	5,644,091,500.00	-
-	-	-	-	-	1,736,038,179.00	966,626,000.00	-	-	-	966,626,000.00	-
-	-	-	-	-	3,070,588,886.00	1,711,857,139.00	-	-	-	1,711,857,139.00	-
-	-	-	-	-	1,645,827,262.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,638,019,010.00	7,330,997,161.39	25,000,000.00	-	425,901,714.00	7,781,898,875.39	-
-	-	-	-	-	480,103,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,514,883,596.00	-	-	-	-	-	-
-	244,351,000.00	-	-	-	2,775,713,450.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,155,424,390.00	718,020,134.00	-	-	219,656,871.00	937,677,005.00	-
-	13,630,000.00	-	-	-	3,435,847,850.00	12,385,789,769.00	-	-	-	12,385,789,769.00	-
-	-	-	-	-	4,654,789,721.00	-	-	-	-	-	-
34,900,000.00	1,610,912,142.00	121,480,000.00	933,005,980.00	564,180,642.00	457,431,418,474.76	1,091,793,502,378.51	6,442,214,368.00	2,895,065,715.00	28,364,745,779.02	1,129,495,528,240.53	1,201,813,571,715.74

JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN			JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA						ASET TETAP LAINNYA	KDP
Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Bahan Perpustakaan	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaa n/Olahraga	Hewan	Biota Perairan	Tanaman	Aset Tetap Dalam Renovasi		
-	3,626,789,516.00	2,349,450,550.00	5,976,240,066.00	43,091,000.00	-	-	-	-	-	43,091,000.00	-
43,700,000.00	219,637,540.00	4,388,117,400.00	4,651,454,940.00	-	-	-	42,000,000.00	-	59,800,000.00	101,800,000.00	-
-	7,700,000.00	-	7,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9,100,000.00	9,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,476,000.00	1,007,500.00	13,483,500.00	1,425,000.00	-	-	-	-	-	1,425,000.00	-
-	16,778,576.00	-	16,778,576.00	-	-	-	-	1,500,000.00	102,550,000.00	104,050,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	18,400,000.00	-	18,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199,481,175,705.66	24,961,089,449.00	31,188,036,332.00	1,425,661,662,158.98	684,493,000.00	48,840,000.00	-	-	-	-	733,333,000.00	2,632,024,000.00
283,343,012.00	-	91,927,800.00	22,261,660,758.00	1,350,000.00	-	-	-	-	-	1,350,000.00	199,620,000.00
225,256,519.00	5,587,463,154.00	2,503,071,362.00	8,315,791,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1,680,454,994.00	5,191,848,191.00	670,938,040.00	9,395,922,847.37	53,564,720.00	-	-	-	-	-	53,564,720.00	-
471,822,500.00	116,039,924.00	981,713,164.00	1,837,018,388.00	43,155,183,832.00	2,602,784,878.00	-	-	-	-	45,757,968,710.00	78,563,589.00
157,269,000.00	2,506,000.00	-	159,775,000.00	-	68,250,000.00	-	-	-	-	68,250,000.00	-
10,000,000.00	11,850,000.00	-	461,741,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,544,088.00
-	-	52,103,500.00	52,103,500.00	1,774,000.00	-	-	-	-	-	1,774,000.00	-
-	26,390,000.00	-	26,390,000.00	-	-	-	-	-	288,520,000.00	288,520,000.00	-
688,877,167.00	123,591,840.00	237,601,000.00	1,371,418,922.05	-	-	62,316,800.00	-	53,427,000.00	250,480,000.00	366,223,800.00	-
3,876,134,375.00	96,902,000.00	193,835,200.00	4,409,008,975.00	1,489,000.00	-	-	-	10,625,000.00	-	12,114,000.00	-
1,157,458,651.00	2,034,733,322.00	4,263,399,098.93	14,227,909,931.93	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,942,500.00	9,388,000.00	14,330,500.00	6,019,850.00	-	-	-	-	-	6,019,850.00	-
-	-	-	-	6,131,710.00	-	-	-	-	-	6,131,710.00	-
-	-	48,453,000.00	48,453,000.00	1,827,500.00	-	-	-	-	-	1,827,500.00	-
-	8,600,000.00	122,253,800.00	130,853,800.00	56,123,400.00	-	-	-	-	-	56,123,400.00	-
-	-	-	-	36,500.00	-	-	-	-	-	36,500.00	-
8,281,000.00	-	3,436,000.00	11,717,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12,240,156,594.00	-	-	12,240,156,594.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4,495,000.00	-	2,500,000.00	6,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,104,055,428.00	-	-	-	-	-	1,104,055,428.00	-
-	25,300,000.00	131,922,800.00	157,222,800.00	256,265,625.00	-	-	-	-	-	256,265,625.00	-
220,328,424,517.66	42,094,538,012.00	47,248,954,546.93	1,511,485,488,792.33	45,372,830,565.00	2,719,874,878.00	62,316,800.00	42,000,000.00	65,552,000.00	701,350,000.00	48,963,924,243.00	2,970,751,677.00

	ASET LAINNYA					
Jumlah	Aset Lain-Lain			JUMLAH ASET LAIN-LAIN	Aset Tidak Berwujud	ASET LAINNYA
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Aset yang dipinjampakaikan	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat			
64,432,003,445.00	589,268,421.00	-	-	589,268,421.00	-	589,268,421.00
489,396,082,757.06	3,865,176,302.00	4,635,085,442.00	-	8,500,261,744.00	145,750,000.00	8,646,011,744.00
2,441,437,545.00	224,254,000.00	294,525,000.00	-	518,779,000.00	-	518,779,000.00
2,045,752,865.00	91,829,520.00	201,870,000.00	-	293,699,520.00	-	293,699,520.00
3,476,016,386.00	113,503,800.00	216,973,000.00	-	330,476,800.00	-	330,476,800.00
2,932,911,053.00	196,823,000.00	303,525,000.00	-	500,348,000.00	-	500,348,000.00
771,855,379.00	95,155,000.00	164,445,000.00	-	259,600,000.00	-	259,600,000.00
3,462,390,939.00	102,451,950.00	114,435,000.00	-	216,886,950.00	-	216,886,950.00
1,862,972,433.00	57,354,750.00	168,585,000.00	-	225,939,750.00	-	225,939,750.00
2,889,787,284.00	177,608,000.00	212,708,000.00	-	390,316,000.00	-	390,316,000.00
3,184,799,052.00	137,853,334.00	347,835,000.00	-	485,688,334.00	-	485,688,334.00
2,604,556,224.00	460,147,000.00	343,440,000.00	-	803,587,000.00	-	803,587,000.00
3,281,446,225.00	97,965,900.00	292,395,000.00	-	390,360,900.00	-	390,360,900.00
1,744,083,206,042.98	19,188,820,182.83	-	119,156,987,124.00	138,345,807,306.83	-	138,345,807,306.83
73,273,465,064.00	65,778,050.00	-	80,607,000.00	146,385,050.00	-	146,385,050.00
23,772,937,066.00	1,961,523,846.00	160,500,000.00	233,795,000.00	2,355,818,846.00	333,519,000.00	2,689,337,846.00
502,755,164,821.08	21,831,854,185.60	297,500,000.00	-	22,129,354,185.60	367,984,000.00	22,497,338,185.60
510,714,707,648.42	19,016,079,786.84	-	-	19,016,079,786.84	925,382,392.00	19,941,462,178.84
105,578,285,880.85	796,277,121.00	-	-	796,277,121.00	117,746,541.00	914,023,662.00
7,092,745,581.00	393,266,858.00	-	-	393,266,858.00	-	393,266,858.00
9,875,325,704.19	1,500,128,232.00	-	-	1,500,128,232.00	-	1,500,128,232.00
5,307,675,730.00	578,291,814.00	-	3,360,000.00	581,651,814.00	142,679,569.00	724,331,383.00
2,180,882,000.00	471,509,255.00	-	-	471,509,255.00	52,675,000.00	524,184,255.00
39,137,394,227.35	3,127,119,172.00	-	13,206,320,032.00	16,333,439,204.00	-	16,333,439,204.00
21,141,605,951.50	1,253,062,800.00	-	-	1,253,062,800.00	-	1,253,062,800.00
81,208,867,956.80	534,627,933.00	-	-	534,627,933.00	-	534,627,933.00
11,599,287,335.00	1,726,450,327.00	-	-	1,726,450,327.00	1,761,550,400.00	3,488,000,727.00
2,723,014,529.00	337,976,650.00	-	-	337,976,650.00	-	337,976,650.00
4,788,577,735.00	179,134,490.00	-	-	179,134,490.00	-	179,134,490.00
1,696,107,762.00	739,014,025.00	-	-	739,014,025.00	-	739,014,025.00
17,696,095,085.39	1,957,116,728.00	849,274,100.00	-	2,806,390,828.00	-	2,806,390,828.00
480,139,500.00	156,131,700.00	-	-	156,131,700.00	-	156,131,700.00
6,526,600,596.00	310,769,098.00	-	-	310,769,098.00	7,500,000.00	318,269,098.00
15,015,870,044.00	1,164,587,600.00	-	-	1,164,587,600.00	-	1,164,587,600.00
2,100,096,395.00	395,575,808.00	-	-	395,575,808.00	142,000,000.00	537,575,808.00
16,925,693,047.00	147,313,580.00	-	-	147,313,580.00	74,870,000.00	222,183,580.00
5,068,278,146.00	300,459,000.00	-	-	300,459,000.00	485,819,375.00	786,278,375.00
3,793,524,035,435.62	84,342,259,219.27	8,603,095,542.00	132,681,069,156.00	225,626,423,917.27	4,557,476,277.00	230,183,900,194.27

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Lampiran : 22

Penambahan Aset 2025

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN									
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Laboratorium	Alat Persenjataan	Komputer
1	Sekretariat DPRD	-	-	1,460,000,000.00	-	-	262,470,000.00	-	-	-	-	39,899,969.00
2	Sekretariat Daerah	-	-	2,263,689,552.00	-	-	922,693,972.00	42,303,800.00	-	4,507,614.00	-	129,784,466.00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kec. Sembilan Koto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	21,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	39,600,000.00	499,500,000.00	-	-	-	-	12,600,000.00	-	33,400,000.00	-	23,999,888.00
15	Dinas PERKIMTAN	5,333,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	598,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	44,497,000.00
17	Dinas Kesehatan	128,000,000.00	12,008,314.00	-	-	-	478,688,441.00	14,840,000.00	1,510,851,101.00	11,469,500.00	38,850,000.00	614,781,617.00
18	Dinas Pendidikan	-	15,621,000.00	157,950,000.00	15,521,000.00	66,542,000.00	2,692,643,888.00	57,980,000.00	-	73,880,000.00	22,500,000.00	2,526,889,600.00
19	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-	-	54,834,000.00	-	-	-	-	29,999,999.00
20	Dinas TRANSSNAKER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	DINSOSP3APPKB	-	3,400,000.00	-	-	-	52,284,868.65	-	-	-	-	16,260,000.00
22	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	-	1,774,400.00	-	-	-	-	-
23	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,939,500.00
24	Dinas Pertanian	-	-	44,000,000.00	-	348,376,210.00	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pangan dan Perikanan	-	2,567,568.00	-	-	-	39,632,432.00	-	-	-	-	22,200,000.00
26	Dinas KUMPERDAG	-	-	-	-	-	8,500,000.00	-	-	-	-	22,470,840.00
27	BKD	-	-	6,300,000.00	-	-	56,659,950.00	-	-	-	-	97,200,000.00
28	DPMPTSP	-	-	128,250,000.00	-	-	35,864,250.00	-	-	-	-	-
29	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-	985,000.00	-	-	-	-	-
30	BAPPEDA	-	-	-	-	-	3,120,000.00	-	-	-	-	-
31	DLH	-	739,088,100.00	189,902,995.00	-	-	-	225,000,000.00	-	-	-	14,929,500.00
32	Badan KESBANGPOL	-	-	-	-	-	17,929,500.00	-	-	-	-	34,695,000.00
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	14,485,500.00	-	-	336,139,500.00	-	-
34	BPBD	-	-	-	5,328,000.00	-	25,501,225.00	-	-	-	-	20,000,000.00
35	BKPSDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00
37	Dinas KOMINFO	-	-	-	-	-	9,000,000.00	22,150,000.00	-	-	-	2,800,000.00
	Jumlah	5,501,300,000.00	1,272,184,982.00	4,869,842,547.00	20,849,000.00	414,918,210.00	4,677,067,426.65	374,873,800.00	1,510,851,101.00	459,396,614.00	61,350,000.00	3,648,647,379.00

ASET TETAP											
				PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN		GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
Alat Keselamatan Kerja	Alat Peraga	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga		Bangunan Gedung	Tugu Titik Kontrol/Pasti		Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan
-	-	-	-	1,762,369,969.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,362,979,404.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	21,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	569,499,888.00	314,684,600.00	-	314,684,600.00	115,170,034,655.00	69,125,822.00	6,740,073,945.00	3,835,524,247.00
-	-	-	-	-	80,607,000.00	-	80,607,000.00	-	-	-	-
-	-	63,306,140.00	-	705,803,140.00	1,758,304,471.00	-	1,758,304,471.00	-	-	-	-
-	-	-	-	2,681,488,973.00	3,110,142,573.83	447,798,381.00	3,557,940,954.83	107,590,007.00	-	2,241,800,000.00	-
31,800,000.00	3,500,000.00	-	80,980,000.00	5,745,807,488.00	37,692,201,944.64	530,615,186.00	38,222,817,130.64	-	-	-	-
-	-	-	-	84,833,999.00	1,008,957,021.00	-	1,008,957,021.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	214,639,657.00	-	214,639,657.00	-	-	-	-
-	-	-	-	71,944,868.65	1,600,781,554.59	-	1,600,781,554.59	-	-	-	-
-	-	-	-	1,774,400.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,939,500.00	596,041,145.00	-	596,041,145.00	-	-	-	-
-	-	-	-	392,376,210.00	-	-	-	8,803,470,922.00	2,943,016,525.00	-	-
-	-	-	-	64,400,000.00	-	-	-	-	175,672,486.59	-	-
-	-	-	-	30,970,840.00	224,832,600.00	-	224,832,600.00	-	-	-	-
-	-	-	-	160,159,950.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	164,114,250.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	985,000.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,120,000.00	14,001,454.00	-	14,001,454.00	-	-	-	-
-	-	-	-	1,168,920,595.00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	52,624,500.00	419,205,907.00	-	419,205,907.00	-	-	-	-
91,849,999.00	-	-	-	442,474,999.00	407,158,591.00	-	407,158,591.00	-	-	-	-
-	-	-	-	50,829,225.00	1,278,733,769.00	-	1,278,733,769.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,300,000.00	620,436,564.00	-	620,436,564.00	-	-	-	-
-	-	-	-	33,950,000.00	2,081,270,167.00	-	2,081,270,167.00	-	-	-	-
123,649,999.00	3,500,000.00	63,306,140.00	80,980,000.00	17,581,417,198.65	51,421,999,019.06	978,413,567.00	52,400,412,586.06	124,081,095,584.00	3,187,814,833.59	8,981,873,945.00	3,835,524,247.00

JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA			ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah	ASET LAINNYA			Aset Tidak Berwujud	ASET LAINNYA
	Bahan Perpustakaan	Hewan	Biota Perairan				Aset Lain-Lain				
							Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainn	Aset yang dipinjampakaikan	JUMLAH ASET LAIN-LAIN		
-	-	-	-	-	-	1,762,369,969.00	547,160,000.00	-	547,160,000.00	-	547,160,000.00
-	-	-	-	-	-	3,362,979,404.00	3,046,530,580.00	1,565,717,886.00	4,612,248,466.00	-	4,612,248,466.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	33,878,000.00	-	33,878,000.00	-	33,878,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,750,000.00	27,550,000.00	-	27,550,000.00	-	27,550,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125,814,758,669.00	-	-	-	-	195,940,582.00	126,934,483,739.00	7,377,748,140.00	-	7,377,748,140.00	-	7,377,748,140.00
-	-	-	-	-	-	5,414,307,000.00	56,174,800.00	-	56,174,800.00	-	56,174,800.00
-	-	-	-	-	-	2,464,107,611.00	121,411,328.00	-	121,411,328.00	58,275,000.00	179,686,328.00
2,349,390,007.00	-	-	-	-	3,009,045,011.00	11,725,864,945.83	5,093,853,555.00	-	5,093,853,555.00	-	5,093,853,555.00
-	4,301,867,530.00	-	-	4,301,867,530.00	10,820,000.00	48,281,312,148.64	9,697,666.00	-	9,697,666.00	-	9,697,666.00
-	-	-	-	-	-	1,093,791,020.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	214,639,657.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,672,726,423.24	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,774,400.00	3,360,000.00	-	3,360,000.00	-	3,360,000.00
-	-	-	-	-	-	600,980,645.00	-	-	-	-	-
11,746,487,447.00	-	269,600,000.00	-	269,600,000.00	-	12,408,463,657.00	2,121,737,314.00	-	2,121,737,314.00	-	2,121,737,314.00
175,672,486.59	-	-	53,400,000.00	53,400,000.00	-	293,472,486.59	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	255,803,440.00	22,452,000.00	-	22,452,000.00	-	22,452,000.00
-	-	-	-	-	-	160,159,950.00	-	-	-	193,029,000.00	193,029,000.00
-	-	-	-	-	-	164,114,250.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	985,000.00	381,000,000.00	-	381,000,000.00	-	381,000,000.00
-	-	-	-	-	-	17,121,454.00	202,588,603.00	-	202,588,603.00	-	202,588,603.00
-	-	-	-	-	-	1,168,920,595.00	260,931,298.00	-	260,931,298.00	-	260,931,298.00
-	-	-	-	-	-	471,830,407.00	11,935,000.00	-	11,935,000.00	-	11,935,000.00
-	-	-	-	-	-	849,633,590.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,329,562,994.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	196,616,849.00	-	196,616,849.00	-	196,616,849.00
-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	632,736,564.00	43,990,000.00	-	43,990,000.00	-	43,990,000.00
-	-	-	-	-	-	2,115,220,167.00	119,788,000.00	-	119,788,000.00	-	119,788,000.00
140,086,308,609.59	4,310,867,530.00	269,600,000.00	53,400,000.00	4,633,867,530.00	3,215,805,593.00	223,419,111,517.30	19,678,403,133.00	1,565,717,886.00	21,244,121,019.00	251,304,000.00	21,495,425,019.00

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pengurangan Aset 2025

Lampiran : 23

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN							
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Laboratorium
1	Sekretariat DPRD	-	-	1,761,160,000.00	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	-	3,699,586,886.00	-	-	489,729,533.00	1,776,000.00	-	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kec. Sembilan Koto	-	-	31,750,000.00	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Timpeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kec Tiumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	6,750,000.00	-	-	-	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	5,612,936,544.00	210,000,000.00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	-	-	-	21,354,800.00	3,650,000.00	-	-
16	Dinas Perhubungan	7,900,000.00	-	-	-	-	35,810,294.00	15,000,000.00	-	-
17	Dinas Kesehatan	-	-	336,599,600.00	-	-	502,643,332.00	211,710,000.00	1,589,666,865.00	584,668,184.00
18	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	865,821,988.00	-	-	-
19	Dinas BUDPARPORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas TRANSNAKER	-	-	296,150,000.00	-	-	-	-	-	-
21	DINSOSP3APPKB	-	-	-	-	-	7,695,000.00	-	-	-
22	DISDUKCAPIL	-	-	-	-	-	3,960,000.00	-	-	-
23	Dinas PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pangan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Dinas KUMPERDAG	-	-	10,602,000.00	-	-	11,850,000.00	-	-	-
27	BKD	-	-	157,950,000.00	-	-	9,407,250.00	-	-	-
28	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Inspektorat Kabupaten	-	-	509,250,000.00	-	-	985,000.00	-	-	-
30	BAPPPEDA	-	-	6,300,000.00	10,100,000.00	-	82,788,603.00	23,175,000.00	-	-
31	DLH	-	-	34,837,000.00	-	46,050,657.00	64,674,909.00	35,969,500.00	-	14,374,800.00
32	Badan KESBANGPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	BKPSDM	-	-	-	-	-	13,530,727.00	1,500,000.00	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dinas KOMINFO	-	-	293,116,552.00	-	-	-	6,553,800.00	-	-
	Jumlah	7,900,000.00	5,612,936,544.00	7,354,052,038.00	10,100,000.00	46,050,657.00	2,110,251,436.00	299,334,300.00	1,589,666,865.00	599,042,984.00

ASET TETAP										
Komputer	Rambu - Rambu	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN		GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	
			Bangunan Gedung	Tugu Titik Kontrol/Pasti		Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air		Bahan Perpustakaan	Hewan
-	-	1,761,160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
140,646,580.00	-	4,331,738,999.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,128,000.00	-	33,878,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,800,000.00	-	12,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,411,538.00	-	5,831,348,082.00	1,112,175,060.00	458,280,000.00	1,570,455,060.00	199,996,000.00	69,125,822.00	269,121,822.00	-	-
29,820,000.00	-	54,824,800.00	-	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-
43,106,034.00	19,838,808.00	113,755,136.00	-	-	-	-	-	-	-	-
354,863,587.00	-	3,580,151,568.00	9,900,730,395.00	19,258,781.00	9,919,989,176.00	-	-	-	-	-
440,760,166.00	-	1,306,582,154.00	149,349,061.30	-	149,349,061.30	-	-	-	31,899,970.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,695,000.00	-	330,845,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7,695,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	872,800,264.00	156,963,875.00	1,029,764,139.00	-	-	-	-	24,516,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22,452,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	167,357,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	510,235,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
86,525,000.00	-	208,888,603.00	14,001,454.00	-	14,001,454.00	-	-	-	-	-
26,104,432.00	-	222,011,298.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11,935,000.00	-	11,935,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181,586,122.00	-	196,616,849.00	-	-	-	-	-	-	-	-
43,990,000.00	-	43,990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
29,788,000.00	-	329,458,352.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1,440,159,459.00	19,838,808.00	19,081,433,091.00	12,049,056,234.30	634,502,656.00	12,683,558,890.30	199,996,000.00	69,125,822.00	269,121,822.00	33,249,970.00	24,516,800.00

			ASET LAINNYA					
ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah	Aset Lain-Lain			Jumlah Aset Lain-Lain	Aset Tidak Berwujud	ASET LAINNYA
			Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Aset yang dipinjampakaikan	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat			
-	-	1,761,160,000.00	547,160,000.00	-	-	547,160,000.00	-	547,160,000.00
-	-	4,331,738,999.00	1,109,725,000.00	891,816,000.00	-	2,001,541,000.00	-	2,001,541,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	33,878,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,550,000.00	6,750,000.00	30,000,000.00	-	36,750,000.00	-	36,750,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	99,921,000.00	7,770,845,964.00	-	-	117,288,523,124.00	117,288,523,124.00	-	117,288,523,124.00
1,350,000.00	-	56,174,800.00	-	-	80,607,000.00	80,607,000.00	-	80,607,000.00
-	-	121,655,136.00	-	-	27,495,000.00	27,495,000.00	-	27,495,000.00
-	-	13,500,140,744.00	10,650,000.00	-	-	10,650,000.00	-	10,650,000.00
31,899,970.00	-	1,487,831,185.30	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	330,845,000.00	-	-	-	-	-	-
-	60,544,088.00	68,239,088.00	-	-	-	-	-	-
-	-	3,960,000.00	-	-	3,360,000.00	3,360,000.00	-	3,360,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24,516,800.00	-	1,054,280,939.00	-	-	13,206,320,032.00	13,206,320,032.00	-	13,206,320,032.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	22,452,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	167,357,250.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	510,235,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	222,890,057.00	-	-	-	-	-	-
-	-	222,011,298.00	-	438,008,100.00	-	438,008,100.00	-	438,008,100.00
-	-	11,935,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	196,616,849.00	-	-	-	-	-	-
-	-	43,990,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	329,458,352.00	-	-	-	-	-	-
57,766,770.00	160,465,088.00	32,260,245,661.30	1,674,285,000.00	1,359,824,100.00	130,606,305,156.00	133,640,414,256.00	-	133,640,414,256.00

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Lampiran : 24

Saldo Aset 2025

NO.	OPD	TANAH							
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan
1	Sekretariat DPRD	4,134,014,572.00	291,619,800.00	3,108,967,091.00	-	-	7,054,450,789.00	2,092,731,123.00	-
2	Sekretariat Daerah	402,743,162,850.00	33,228,000.00	13,534,463,480.00	13,460,000.00	-	15,026,022,295.00	2,400,020,179.00	111,985,000.00
3	Kec. Pulau Punjung	987,500,000.00	-	252,599,552.00	-	-	137,579,273.00	6,650,000.00	-
4	Kec. Sitiung	1,000,000,000.00	-	290,046,365.00	-	-	114,248,400.00	32,590,000.00	-
5	Kec. Koto Baru	1,488,000,000.00	-	356,516,944.00	-	-	139,670,136.00	8,400,000.00	-
6	Kec. Sungai Rumbai	1,000,000,000.00	-	317,813,625.00	-	-	123,454,500.00	13,979,250.00	-
7	Kec. Sembilan Koto	17,875,000.00	-	227,345,660.00	-	-	93,907,618.00	9,636,000.00	-
8	Kec. Timpeh	374,152,543.00	-	194,478,125.00	-	-	81,207,000.00	13,236,850.00	-
9	Kec. Padang Laweh	20,020,000.00	-	268,219,960.00	-	-	74,460,000.00	16,000,000.00	-
10	Kec. Tiumang	75,000,000.00	-	222,562,425.00	-	-	105,670,000.00	18,100,000.00	-
11	Kec Koto Besar	461,087,771.00	-	353,008,865.00	-	-	96,957,666.00	6,950,000.00	-
12	Kec Koto Salak	25,000,000.00	-	338,562,875.00	-	-	150,410,750.00	25,363,500.00	-
13	Kec. Asam Jujuhan	71,500,000.00	5,000,000.00	222,702,750.00	-	-	89,639,975.00	12,950,000.00	-
14	Dinas PUPR	162,688,092,953.00	13,043,479,802.00	5,664,268,945.00	431,574,566.00	106,885,800.00	3,926,713,892.00	2,579,601,407.00	-
15	Dinas PERKIMTAN	6,507,885,160.00	-	775,392,836.00	-	34,210,000.00	3,065,400,270.00	37,463,500.00	-
16	Dinas Perhubungan	5,953,500,000.00	-	3,044,699,500.00	571,723,500.00	-	831,663,382.00	55,025,000.00	-
17	Dinas Kesehatan	14,658,694,960.00	724,892,887.00	21,284,341,387.00	11,715,000.00	-	20,591,830,745.00	8,876,640,063.00	118,611,044,985.90
18	Dinas Pendidikan	24,816,997,724.00	131,766,939.00	2,167,944,188.00	475,687,286.00	1,887,494,149.00	23,197,172,290.85	5,089,129,580.00	100,289,929.00
19	Dinas BUDPARPORA	1,115,335,010.00	1,500,000.00	572,123,338.00	3,230,000.00	-	494,659,500.00	73,701,956.00	-
20	Dinas TRANSSNAKER	2,121,000,000.00	-	171,000,000.00	168,241,142.00	-	179,432,500.00	3,000,000.00	-
21	DINSOSP3APPKB	-	3,400,000.00	3,629,086,800.00	-	-	476,451,791.65	312,500,000.00	-
22	DISDUKCAPIL	200,000,000.00	-	1,629,681,812.00	8,745,000.00	-	425,687,700.00	328,024,000.00	-
23	Dinas PMD	-	-	1,419,426,500.00	1,260,000.00	-	220,933,500.00	15,800,000.00	-
24	Dinas Pertanian	11,539,094,583.00	-	2,928,913,200.00	600,701,936.00	640,134,485.00	2,068,520,885.00	398,922,000.00	111,189,750.00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	1,281,870,882.00	4,412,942,568.00	940,380,925.00	15,270,000.00	148,405,000.00	665,562,704.50	66,315,400.00	41,805,000.00
26	Dinas KUMPERDAG	1,301,340,000.00	1,599,413,057.00	1,366,906,269.00	6,010,332,825.00	-	282,933,583.00	1,148,596,883.00	2,649,185.00
27	BKD	-	-	1,275,652,904.00	40,885,000.00	-	1,707,258,866.00	514,087,735.00	-
28	DPMPSTP	-	-	843,364,363.00	14,465,000.00	-	395,528,666.00	219,858,000.00	1,750,000.00
29	Inspektorat Kabupaten	-	13,410,000.00	1,459,776,950.00	-	33,750,000.00	581,378,736.00	59,821,400.00	-
30	BAPPEDA	-	3,904,765.00	692,642,666.00	-	-	343,789,637.00	38,180,909.00	-
31	DLH	4,089,200,000.00	1,151,376,200.00	2,124,900,145.00	160,843,500.00	149,610,656.00	700,436,487.00	287,253,932.00	-
32	Badan KESBANGPOL	-	-	268,200,000.00	-	-	124,097,500.00	6,750,000.00	-
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	5,780,283,810.00	-	-	560,267,286.00	25,453,500.00	-
34	BPBD	-	58,527,500.00	1,971,288,950.00	30,578,000.00	-	147,895,225.00	70,636,000.00	-
35	BKPSDM	-	-	414,600,667.00	-	-	180,379,470.00	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1,015,100,000.00	3,420,000.00	-	1,601,054,060.00	91,996,390.00	9,500,000.00
37	Dinas KOMINFO	-	-	327,680,000.00	6,435,000.00	-	1,867,633,669.00	1,031,823,000.00	-
	Jumlah	648,670,324,008.00	21,474,461,518.00	81,454,943,872.00	8,568,567,755.00	3,000,490,090.00	87,924,360,748.00	25,987,187,557.00	118,990,213,849.90

PERALATAN DAN MESIN									ASET TETAP	
Alat Laboratorium	Alat Persenjataan	Komputer	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Alat Keselamatan Kerja	Alat Peraga	Peralatan Proses/Produksi	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga	PERALATAN DAN MESIN	Bangunan Gedung
-	-	434,807,443.00	-	-	-	-	-	-	12,982,576,246.00	41,297,291,530.00
34,532,614.00	-	2,532,110,280.00	34,900,000.00	-	-	-	-	-	33,720,721,848.00	43,867,651,398.06
-	-	77,409,000.00	-	-	-	-	-	-	474,237,825.00	971,999,720.00
-	-	92,850,000.00	-	-	-	-	-	-	529,734,765.00	506,918,100.00
-	-	115,141,364.00	-	-	-	-	-	-	619,728,444.00	1,315,329,250.00
-	-	61,475,000.00	-	9,900,000.00	-	-	-	-	526,622,375.00	1,369,411,178.00
2,480,875.00	-	71,317,650.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	409,687,803.00	-
-	-	62,705,625.00	-	-	-	-	-	-	351,627,600.00	2,686,810,796.00
-	-	62,300,000.00	-	-	-	-	-	-	420,979,960.00	1,205,320,668.00
-	-	49,850,000.00	-	-	-	-	-	-	396,182,425.00	2,373,453,709.00
-	-	63,700,000.00	-	6,400,000.00	-	-	-	-	527,016,531.00	2,187,494,750.00
1,200,000.00	-	89,700,000.00	-	-	-	-	-	-	605,237,125.00	1,972,819,099.00
-	-	39,145,000.00	-	-	-	-	-	-	369,437,725.00	2,840,508,500.00
738,890,633.00	-	1,237,805,274.00	-	-	-	-	-	-	27,729,220,319.00	114,349,692,462.00
-	-	260,512,500.00	-	-	-	-	-	-	4,172,979,106.00	45,328,757,490.00
688,527,500.00	-	413,866,350.00	-	-	-	-	976,473,312.00	-	6,581,978,544.00	5,264,119,962.00
15,276,927,283.16	212,950,000.00	6,876,947,074.00	-	-	-	87,500,000.00	-	-	192,554,789,425.06	275,853,874,435.58
10,285,954,748.00	362,251,640.00	46,785,926,534.15	-	517,131,142.00	3,500,000.00	33,980,000.00	-	645,160,642.00	91,683,389,068.00	368,997,293,803.57
16,800,000.00	-	371,640,519.00	-	-	-	-	-	-	1,533,655,313.00	102,908,272,327.85
9,000,000.00	-	289,268,000.00	-	-	-	-	-	-	819,941,642.00	3,573,857,096.00
2,000,000.00	-	776,741,000.00	-	776,950,000.00	-	-	-	-	5,977,129,591.65	5,191,725,256.78
4,450,000.00	-	1,257,081,416.00	-	-	-	-	-	-	3,653,669,928.00	1,397,942,702.00
-	-	213,491,500.00	-	-	-	-	-	-	1,870,911,500.00	596,041,145.00
385,924,025.00	7,000,000.00	1,186,456,070.00	-	69,350,000.00	-	-	-	-	8,397,112,351.00	14,725,749,776.30
47,310,000.00	-	206,343,850.00	-	-	-	-	-	-	6,544,335,447.50	8,783,327,647.00
4,380,536,272.20	-	234,714,255.00	-	-	-	-	-	-	15,026,082,329.20	48,036,595,659.74
5,000,000.00	-	2,405,114,030.00	-	-	-	-	-	-	5,947,998,535.00	5,644,091,500.00
1,600,000.00	-	423,586,400.00	-	-	-	-	-	-	1,900,152,429.00	966,626,000.00
14,900,000.00	-	398,301,800.00	-	-	-	-	-	-	2,561,338,886.00	1,711,857,139.00
-	-	361,540,682.00	-	-	-	-	-	-	1,440,058,659.00	-
1,721,330,165.00	68,168,495.00	221,008,727.00	-	-	-	-	-	-	6,584,928,307.00	7,330,997,161.39
-	1,350,000.00	120,395,000.00	-	-	-	-	-	-	520,792,500.00	419,205,907.00
336,139,500.00	30,000,000.00	133,364,500.00	-	91,849,999.00	-	-	-	-	6,957,358,595.00	407,158,591.00
-	150,000,000.00	153,266,000.00	-	244,351,000.00	-	-	-	-	2,826,542,675.00	1,278,733,769.00
-	-	363,827,404.00	-	-	-	-	-	-	958,807,541.00	718,020,134.00
33,782,000.00	-	626,675,400.00	-	13,630,000.00	-	-	-	-	3,395,157,850.00	13,006,226,333.00
-	-	1,125,709,700.00	-	-	-	-	-	-	4,359,281,369.00	2,081,270,167.00
33,987,285,615.36	831,720,135.00	70,196,095,347.15	34,900,000.00	1,734,562,141.00	3,500,000.00	121,480,000.00	976,473,312.00	645,160,642.00	455,931,402,582.41	1,131,166,445,163.27

GEDUNG DAN BANGUNAN			GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	Bahan Perpustakaan
Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti		Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		
-	-	-	41,297,291,530.00	-	-	3,626,789,516.00	2,349,450,550.00	5,976,240,066.00	43,091,000.00
39,867,000.00	-	3,302,665,126.00	47,210,183,524.06	-	43,700,000.00	219,637,540.00	4,388,117,400.00	4,651,454,940.00	-
-	-	-	971,999,720.00	-	-	7,700,000.00	-	7,700,000.00	-
-	-	-	506,918,100.00	-	-	-	9,100,000.00	9,100,000.00	-
-	-	52,958,692.00	1,368,287,942.00	-	-	-	-	-	-
-	-	21,969,000.00	1,391,380,178.00	-	-	12,476,000.00	1,007,500.00	13,483,500.00	1,425,000.00
-	-	189,586,000.00	189,586,000.00	-	-	16,778,576.00	-	16,778,576.00	-
-	-	49,800,000.00	2,736,610,796.00	-	-	-	-	-	-
-	-	216,651,805.00	1,421,972,473.00	-	-	-	-	-	-
-	-	44,451,150.00	2,417,904,859.00	-	-	-	700,000.00	700,000.00	-
-	-	-	2,187,494,750.00	-	-	18,400,000.00	-	18,400,000.00	-
-	-	-	1,972,819,099.00	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
-	-	-	2,840,508,500.00	-	-	-	-	-	-
158,115,970.00	2,895,065,715.00	757,980,811.00	118,160,854,958.00	1,285,001,399,327.32	199,481,175,705.66	31,701,163,394.00	35,023,560,579.00	1,551,207,299,005.98	684,493,000.00
-	-	160,694,750.00	45,489,452,240.00	21,886,389,946.00	283,343,012.00	-	91,927,800.00	22,261,660,758.00	-
-	-	-	5,264,119,962.00	-	225,256,519.00	5,587,463,154.00	2,503,071,362.00	8,315,791,035.00	-
62,720,970.00	-	3,042,886,646.90	278,959,482,052.48	1,960,271,629.37	1,680,454,994.00	7,433,648,191.00	670,938,040.00	11,745,312,854.37	53,564,720.00
6,156,510,428.00	-	13,899,659,341.19	389,053,463,572.76	267,442,800.00	471,822,500.00	116,039,924.00	981,713,164.00	1,837,018,388.00	47,425,151,392.00
-	-	886,789,250.00	103,795,061,577.85	-	157,269,000.00	2,506,000.00	-	159,775,000.00	-
-	-	-	3,573,857,096.00	439,891,500.00	10,000,000.00	11,850,000.00	-	461,741,500.00	-
-	-	310,958,191.00	5,502,683,447.78	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,397,942,702.00	-	-	-	52,103,500.00	52,103,500.00	1,774,000.00
-	-	-	596,041,145.00	-	-	26,390,000.00	-	26,390,000.00	-
-	-	2,100,406,866.00	16,826,156,642.30	9,124,819,837.05	3,631,893,692.00	123,591,840.00	237,601,000.00	13,117,906,369.05	-
-	-	175,349,000.00	8,958,676,647.00	242,137,400.00	4,051,806,861.59	96,902,000.00	193,835,200.00	4,584,681,461.59	1,489,000.00
-	-	2,850,291,475.93	50,886,887,135.67	6,772,318,860.00	1,157,458,651.00	2,034,733,322.00	4,263,399,098.93	14,227,909,931.93	-
-	-	-	5,644,091,500.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	966,626,000.00	-	-	4,942,500.00	9,388,000.00	14,330,500.00	6,019,850.00
-	-	-	1,711,857,139.00	-	-	-	-	-	6,131,710.00
-	-	-	-	-	-	-	48,453,000.00	48,453,000.00	1,827,500.00
25,000,000.00	-	425,901,714.00	7,781,898,875.39	-	-	8,600,000.00	122,253,800.00	130,853,800.00	56,123,400.00
-	-	-	419,205,907.00	-	-	-	-	-	36,500.00
-	-	-	407,158,591.00	-	8,281,000.00	-	3,436,000.00	11,717,000.00	-
-	-	-	1,278,733,769.00	-	12,240,156,594.00	-	-	12,240,156,594.00	-
-	-	219,656,871.00	937,677,005.00	-	4,495,000.00	-	2,500,000.00	6,995,000.00	-
-	-	-	13,006,226,333.00	-	-	-	-	-	1,113,055,428.00
-	-	-	2,081,270,167.00	-	-	25,300,000.00	131,922,800.00	157,222,800.00	256,265,625.00
6,442,214,368.00	2,895,065,715.00	28,708,656,690.02	1,169,212,381,936.29	1,325,694,671,299.74	223,447,113,529.25	51,076,411,957.00	51,084,478,793.93	1,651,302,675,579.92	49,650,448,125.00

ASET TETAP LAINNYA								ASET LAINNYA		
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Hewan	Biota Perairan	Tanaman	Aset Tetap Dalam Renovasi	ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Aset yang dipinjam-pakai	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat
-	-	-	-	-	43,091,000.00	-	64,433,213,414.00	589,268,421.00	-	-
-	-	42,000,000.00	-	59,800,000.00	101,800,000.00	-	488,427,323,162.06	5,801,981,882.00	5,308,987,328.00	-
-	-	-	-	-	-	-	2,441,437,545.00	224,254,000.00	294,525,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	2,045,752,865.00	91,829,520.00	201,870,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	3,476,016,386.00	113,503,800.00	216,973,000.00	-
-	-	-	-	-	1,425,000.00	-	2,932,911,053.00	196,823,000.00	303,525,000.00	-
-	-	-	1,500,000.00	102,550,000.00	104,050,000.00	-	737,977,379.00	129,033,000.00		-
-	-	-	-	-	-	-	3,462,390,939.00	102,451,950.00	114,435,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	1,862,972,433.00	57,354,750.00	168,585,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	2,889,787,284.00	177,608,000.00	212,708,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	3,193,999,052.00	158,653,334.00	317,835,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	2,604,556,224.00	460,147,000.00	343,440,000.00	-
-	-	-	-	-	-	-	3,281,446,225.00	97,965,900.00	292,395,000.00	-
48,840,000.00	-	-	-	-	733,333,000.00	2,728,043,582.00	1,863,246,843,817.98	26,566,568,322.83	-	1,868,464,000.00
-	-	-	-	-	-	199,620,000.00	78,631,597,264.00	121,952,850.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	26,115,389,541.00	2,082,935,174.00	160,500,000.00	206,300,000.00
-	-	-	-	-	53,564,720.00	3,009,045,011.00	500,980,889,022.91	26,915,057,740.60	297,500,000.00	-
2,602,784,878.00	-	-	-	-	50,027,936,270.00	89,383,589.00	557,508,188,611.76	19,025,777,452.84	-	-
68,250,000.00	-	-	-	-	68,250,000.00	-	106,672,076,900.85	796,277,121.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6,976,540,238.00	393,266,858.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,479,813,039.43	1,500,128,232.00	-	-
-	-	-	-	-	1,774,000.00	-	5,305,490,130.00	581,651,814.00	-	-
-	-	-	-	288,520,000.00	288,520,000.00	-	2,781,862,645.00	471,509,255.00	-	-
-	307,400,000.00	-	53,427,000.00	250,480,000.00	611,307,000.00	-	50,491,576,945.35	5,248,856,486.00	-	-
-	-	53,400,000.00	10,625,000.00	-	65,514,000.00	-	21,435,078,438.09	1,253,062,800.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	81,442,219,396.80	557,079,933.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	11,592,090,035.00	1,726,450,327.00	-	-
-	-	-	-	-	6,019,850.00	-	2,887,128,779.00	337,976,650.00	-	-
-	-	-	-	-	6,131,710.00	-	4,279,327,735.00	560,134,490.00	-	-
-	-	-	-	-	1,827,500.00	-	1,490,339,159.00	941,602,628.00	-	-
-	-	-	-	-	56,123,400.00	-	18,643,004,382.39	2,218,048,026.00	411,266,000.00	-
-	-	-	-	-	36,500.00	-	940,034,907.00	168,066,700.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7,376,234,186.00	310,769,098.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	16,345,433,038.00	1,164,587,600.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,903,479,546.00	592,192,657.00	-	-
-	-	-	-	-	1,113,055,428.00	-	17,514,439,611.00	191,303,580.00	-	-
-	-	-	-	-	256,265,625.00	-	6,854,039,961.00	420,247,000.00	-	-
2,719,874,878.00	307,400,000.00	95,400,000.00	65,552,000.00	701,350,000.00	53,540,025,003.00	6,026,092,182.00	3,984,682,901,291.62	102,346,377,352.27	8,808,989,328.00	2,074,764,000.00

JUMLAH ASET LAIN-LAIN	Aset Tidak Berwujud	ASET LAINNYA
589,268,421.00	-	589,268,421.00
11,110,969,210.00	145,750,000.00	11,256,719,210.00
518,779,000.00	-	518,779,000.00
293,699,520.00	-	293,699,520.00
330,476,800.00	-	330,476,800.00
500,348,000.00	-	500,348,000.00
293,478,000.00	-	293,478,000.00
216,886,950.00	-	216,886,950.00
225,939,750.00	-	225,939,750.00
390,316,000.00	-	390,316,000.00
476,488,334.00	-	476,488,334.00
803,587,000.00	-	803,587,000.00
390,360,900.00	-	390,360,900.00
28,435,032,322.83	-	28,435,032,322.83
121,952,850.00	-	121,952,850.00
2,449,735,174.00	391,794,000.00	2,841,529,174.00
27,212,557,740.60	367,984,000.00	27,580,541,740.60
19,025,777,452.84	925,382,392.00	19,951,159,844.84
796,277,121.00	117,746,541.00	914,023,662.00
393,266,858.00	-	393,266,858.00
1,500,128,232.00	-	1,500,128,232.00
581,651,814.00	142,679,569.00	724,331,383.00
471,509,255.00	52,675,000.00	524,184,255.00
5,248,856,486.00	-	5,248,856,486.00
1,253,062,800.00	-	1,253,062,800.00
557,079,933.00	-	557,079,933.00
1,726,450,327.00	1,954,579,400.00	3,681,029,727.00
337,976,650.00	-	337,976,650.00
560,134,490.00	-	560,134,490.00
941,602,628.00	-	941,602,628.00
2,629,314,026.00	-	2,629,314,026.00
168,066,700.00	-	168,066,700.00
310,769,098.00	7,500,000.00	318,269,098.00
1,164,587,600.00	-	1,164,587,600.00
592,192,657.00	142,000,000.00	734,192,657.00
191,303,580.00	74,870,000.00	266,173,580.00
420,247,000.00	485,819,375.00	906,066,375.00
113,230,130,680.27	4,808,780,277.00	118,038,910,957.27

DAFTAR TANAH YANG BERSERTIFIKAT 2025

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
1	SD 04 Sitiung	Nagari Gunung Medan	4	8.124	13 Maret 2019
2	Fasilitas Umum	Nagari Sungai Duo	186	25.810	26 Desember 2018
3	Fasilitas Umum	Nagari Kurnia Koto Salak	2	15.880	26 Desember 2018
4	Fasilitas Umum	Nagari Kurnia Koto Salak	1	8.338	26 Desember 2018
5	TKN 01 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	4	989	26 Desember 2018
6	SDN 11 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	3	8.820	11 Desember 2018
7	Pembangunan Pasar Ternak Pulau Punjung	Nagari Gunung Medan	3	30.000	25 Februari 2018
8	Pembangunan Puskesmas Gunung Medan	Nagari Gunung Medan	2	3.800	25 Februari 2018
9	SDN 01 Pulau Punjung	Nagari IV Koto Pulau Punjung	5	2.144	25 Februari 2018
10	Pembangunan SMPN 08 Tebing Tinggi	Nagari Tebing Tinggi	2	8.357	25 Februari 2018
11	Pembangunan Fasilitas Umum	Nagari Sikabau	1	20.611	08 Oktober 2015
12	Pembangunan Rusunawa	Nagari Sungai Kambut	8	1.957	26 Desember 2018
13	SDN 07 Timpeh	Nagari Timpeh	6	6.290	22 April 2003
14	SDN 01 Koto Salak	Koto Salak	216	2.110	15 April 2004
15	SDN 01 Koto Baru	Koto Baru	1	2.670	15 April 2004
16	SDN 3 Koto Baru	Sialang Gaung	64	1.314	15 April 2004
17	Kantor Camat Koto Baru	Seberang Piruko	4	1.445	07 Juni 2001
18	Rumah Dinas Camat Koto Baru	Seberang Piruko	5	1.560	07 Juni 2001
19	SDN 07 Koto Baru	Koto Baru	2	4.430	15 April 2004
20	Gedung UDKP Koto Baru	Seberang Piruko	6	1.435	07 Juni 2001
21	Kantor Camat Koto Baru	Seberang Piruko	8	3.290	04 Agustus 2001
22	SDN 07 Sembilan Koto	Nagari Banai	1	2.942	11 September 2014
23	SDN 16 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	6	13.070	22 April 2016
24	Fasilitas Umum Taratak Tinggi (Tanah Mesjid Syuhada)	Nagari Taratak Tinggi	2	6.043	18 Januari 2017
25	Fasilitas Umum Taratak Tinggi (Tanah Lapangan Bola Kaki)	Nagari Taratak Tinggi	3	35.000	18 Januari 2017
26	SDN 01 Sitiung	Sitiung	128	2.045	08 Maret 2003
27	SDN 13 Sitiung	Sitiung	126	3.840	08 Maret 2003
28	SDN 04 Timpeh	Timpeh	1	5.420	08 Maret 2003
29	SDN 08 Timpeh	Timpeh	2	21.590	08 Maret 2003
30	SDN 08 Sitiung	Sitiung	123	4.420	08 Maret 2003-
31	SMPN 1 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	22.000	19 Januari 1994
32	SDN 09 Koto Besar	Mayang Taurai	5	4.550	08 Maret 2003
33	SDN 11 Koto Besar	Koto Besar	2	3.250	08 Maret 2003
34	SMPN 2 Koto Besar	Mayang Taurai	1	14.750	29 Maret 1999
35	SMPN 1 Timpeh	Pinang Makmur	1	20.960	29 Maret 1999
36	SMPN 1 Tiumang	Lagan Jaya	1	28.670	29 Maret 1999
37	Puskesmas Koto Baru	Seberang Piruko	9	4.300	04 Agustus 2001
38	SDN 1 Sungai Rumbai	Kurnia	2	8.350	08 Maret 2003

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
39	SDN 04 Koto Besar	Koto Besar	3	2.550	08 Maret 2003
40	SDN 13 Koto Besar	Mayang Taurai	4	5.250	08 Maret 2003
41	SDN 05 Koto Besar	Bukit Gading	1	2.740	08 Maret 2003
42	SDN 05 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	7	3.870	08 Maret 2003
43	SDN 02 Koto Besar	Koto Besar	1	2.570	08 Maret 2003
44	SDN 03 Sungai Rumbai	Cahaya Murni	2	1.850	11 Maret 2003
45	SDN 01 Koto Besar	Koto Besar	4	1.490	11 Maret 2003
46	SDN 01 Asam Jujuhan	Sungai Limau	1	3.120	08 Maret 2003
47	SDN 08 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	8	3.980	08 Maret 2003
48	SDN 07 Koto Besar	Lubuk Karya	2	12.650	08 Maret 2003
49	Gedung Kantor Arsip	Nagari Koto Padang	1	78.335	21 Agustus 2014
50	SDN 02 Sitiung	Siguntur	2	2.580	08 Maret 2003
51	SDN 11 Timpeh	Timpeh	3	7.180	08 Maret 2003
52	SDN 03 Timpeh	Timpeh	4	8.190	22 April 2003
53	SMPN 2 Sitiung	Nagari Sitiung	25	10.000	28 Februari 2017
54	Sport Center	Koto Padang	2	2.412.000	16 Januari 2015
55	Fasilitas Umum Nagari Taratak Tinggi	Taratak Tinggi	4	13.850	18 Januari 2017
56	SMPN 1 Sitiung	Koto Agung	8	17.175	16 Oktober 1995
57	SMPN 3 Koto Salak	Nagari Simalidu	28	7.765	20 Februari 2014
58	Puskesmas Sungai Dareh	Sungai Dareh	9	2.540	04 Agustus 2001
59	SDN 04 Sungai Rumbai	Kodrat	2	14.405	08 Maret 2003
60	SDN 12 Koto Besar	Bukit Gading	2	8.040	08 Maret 2003
61	Kantor Camat Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	4	5.105	17 Juli 2001
62	SMPN 2 Koto Baru	Seberang Piruko	2	21.871	12 Maret 1997
63	Kantor Camat Pulau Punjung	Sungai Dareh	14	4.015	17 Juli 2001
64	Rumah Dinas Camat Pulau Punjung	Sungai Dareh	15	5.345	17 Juli 2001
65	Kantor Dinas Kesehatan	Sungai Dareh	18	2.385	04 Agustus 2001
66	Fasilitas Umum Pasar Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	3	35.000	18 September 2015
67	SDN 18 Sitiung	Sitiung	124	3.070	8 Maret 2003
68	Gedung Pertemuan Umum	Sungai Dareh	16	2.170	17 Juli 2001
69	SMPN 1 Pulau Punjung	Sungai Kambut	2	5.540	28 Agustus 1995
70	SMPN 3 Koto Baru	Ampang Kuranji	1	12.000	16 Desember 1997
71	SMPN 1 Koto Besar	Abai Siat	1	18.160	24 Juni 1998
72	SMPN 1 Semnilan Koto	Silago	1	15.630	29 Maret 1999
73	SDN 03 Sitiung	Jorong Siluluk	3	1.100	11 Maret 2003
74	SMPN 2 Pulau Punjung	Sikabau	1	11.655	30 Desember 1987
75	Lahan Perkebunan (Simpang Blok A Sitiung)	Sitiung	1	15.350	04 Agustus 2001
76	SDN 06 Koto Baru	Ampang Kuranji	1	2.230	15 April 2004
77	SDN 10 Koto Baru	Sialang Gaung	65	2.190	15 April 2004
78	SDN 02 Koto Baru	Ampang Kuranji	2	2.520	15 April 2004
79	SDN 02 Tiumang	Tiumang	77	3.970	15 April 2004
80	Kantor Kepala Desa Pinang Makmur	Pinang Makmur	2	3.965	04 Agustus 2001
81	SDN 11 Sitiung	Sitiung	125	7.140	08 Maret 2003

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
82	SDN 04 Tiumang	Tiumang	76	12.250	15 April 2004
83	RTH	Sungai Kambut	4	12.810	16 Desember 2016
84	Sisa Broodstock Center	Sungai Dareh	10	22.943	07 Januari 2019
85	Kantor Wali Nagari Koto Ranah	Koto Ranah	5	11.627	25 April 2019
86	SMPN 3 Nagari Koto Besar	Nagari Koto Tinggi	20	5.931	25 April 2019
87	Lapangan Bola Kaki Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	4	21.966	25 April 2019
88	Embung Nagari Kurnia Selatan	Nagari Kurnia Selatan	2	15.000	25 April 2019
89	Embung Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	7	22.702	13 Mei 2019
90	Embung Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	6	12.587	13 Mei 2019
91	Kolam Ikan Nagari Koto Ranah	Nagari Koto Ranah	9	16.380	17 Juni 2019
92	Embung Nagari Kurnia Selatan	Kurnia Selatan	3	15.710	27 Mei 2019
93	Kolam Renang Nagari Koto Ranah	Koto Ranah	8	8.399	27 Mei 2019
94	Puskesmas Sitiung II	Nagari Padukuan	129	4.184	7 Agustus 2019
95	SDN 02 Pulau Punjung	Nagari Gunung Selasih	1	2.152	8 Agustus 2019
96	Bangunan Instansi Sarana Air Bersih	Nagari Koto Baru	4	2.000	30 Agustus 2019
97	Dinas Perhubungan	Nagari Gunung Medan	6	12.490	5 September 2019
98	RSUD Sungai Dareh (Lama)	Nagari IV Koto	6	36.500	3 Oktober 2019
99	SDN 09 Sitiung	Nagari Sungai Duo	187	4.294	16 Oktober 2019
100	SDN 04 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	10	1.821	16 Oktober 2019
101	SDN 10 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	11	2.617	16 Oktober 2019
102	SDN 03 Sitiung	Nagari Siguntur	4	1.929	16 Oktober 2019
103	Fasilitas Umum	Nagari Taratak Tinggi	5	4.749	17 Februari 2020
104	SD Inpres Pulau Punjung	Sungai Kambut	1	5.045	14 Oktober 1993
105	SDN 15 Pulau Punjung	Gunung Selasih	2	4.181	17 Februari 2020
106	SDN 17 Sitiung	Sitiung	26	3.754	17 Februari 2020
107	SDN 10 Sitiung	Gunung Medan	9	7.186	17 Februari 2020
108	SDN 06 Koto Salak	Nagari Koto Salak	207	3,933	8 April 2020
109	SDN 09 Koto Salak	Nagari Koto Salak	208	11,997	16 April 2020
110	SDN 04 Koto Salak	Nagari Padukuan	130	13080	30 April 2020
111	Kantor Camat Timpeh	Nagari Tabek	2	23.600	13 Agustus 2020
112	SDN 05 IX Koto	Nagari Silago	2	1.575	7 Agustus 2020
113	SMPN 2 Sungai Rumbai	Kurnia Koto Salak	1	16.660	16 November 2005
114	Departemen Pertanian RI Jakarta	Sungai Derah	8	4.431	18 November 1997
115	Pem Provinsi Daerah Tingkat I Sumbar	Sungai Dareh	7	11.257	12 Maret 1997
116	SMPN 06 Pulau Punjung	Sungai Kambut	14	8.484	17 November 2020
117	Fasum Bukit Tujuh Ranah Palabi	Ranah Palabi	21	33.040	7 Agustus 2020
118	SMPN 03 Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	5	13.550	6 Oktober 2020
119	SDN 08 Koto Salak	Nagari Ampalu	1	2.647	17 November 2020
120	SDN 07 Sitiung	Nagari Sitiung	28	7.995	19 November 2020
121	SDN 07 Sitiung	Nagari Sitiung	29	2.078	19 November 2020
122	SDN 12 Pulau Punjung	Nagari Gunung Selasih	3	2.205	17 November 2020
123	Pasar Nagari Sungai Duo	Nagari Sungai Duo	188	3.439	7 Agustus 2020

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
124	SMPN 3 Pulau Punjung	Nagari Sungai Dareh	12	19.250	17 November 2020
125	SDN 13 Pulau Punjung	Nagari IV Koto	7	3.657	19 November 2020
126	SDN 04 Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	2	9.867	25 Agustus 2020
127	SDN 06 Sitiung	Nagari Sitiung	27	3.921	17 November 2020
128	SMPN 4 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	6	6.806	17 November 2020
129	SDN 02 Padang Laweh	Nagari Padang Laweh	19	2.625	23 Desember 2020
130	SDN 06 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	7	4.267	23 Desember 2020
131	SDN 04 IX Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	2	1.905	23 Desember 2020
132	SDN 13 IX Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	3	4.348	23 Desember 2020
133	SDN 09 Tiumang	Nagari Koto Beringin	1	14.450	23 Desember 2020
134	SDN 11 Tiumang	Nagari Tiumang	2	7.801	23 Desember 2020
135	TK Pembina Koto Agung	Nagari Sungai Duo	189	2.555	23 Desember 2020
136	SDN 12 Tiumang	Nagari Sungai Langkok	6	11.280	13 Januari 2021
137	SDN 12 Koto Salak	Nagari Pulau Mainan	2	3.805	13 Januari 2021
138	SDN 14 Pulau Punjung	Nagari Tebing Tinggi	4	3.307	13 Januari 2021
139	SDN 05 Koto Salak	Nagari Koto Salak	209	4.974	13 Januari 2021
140	SDN 05 Pulau Punjung	Nagari Tebing Tinggi	3	2.249	13 Januari 2021
141	SDN 1 Tiumang	Nagari Tiumang	3	9.156	9 Februari 2021
142	RSUD Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai Timur	2	20.000	9 Februari 2021
143	SDN 02 Sitiung	Nagari Siguntur	5	2.620	9 Februari 2021
144	SDN 16 Sitiung	Nagari Sitiung	30	3.889	9 Februari 2021
145	SDN 14 Sitiung	Nagari Siguntur	6	3.661	9 Februari 2021
146	SDN 05 Sitiung	Nagari Siguntur	7	3.539	8 September 2021
147	SDN 09 Pulau Punjung	Sungai Dareh	18	3.361	15 Desember 2021
148	SDN 02 Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Selatan	4	8.828	31 Desember 2021
149	SDN 22 Pulau Punjung	Nagari Sungai Kambut	15	7.242	31 Desember 2021
150	SDN 02 Timpeh	Nagari Panyubarangan	14	22.810	7 Januari 2022
151	Fasilitas Umum Nagari Sipangkur	Nagari Sipangkur	3	1.608	31 Desember 2021
152	SDN 11 Koto Baru	Nagari Koto Baru	6	4.154	31 Desember 2021
153	SDN 03 Koto Salak	Nagari Simalidu	29	3.358	31 Desember 2021
154	TKN 01 Tiumang	Nagari Tiumang	5	964	7 Januari 2022
155	SDN 10 Tiumang	Nagari Sipangkur	5	7.068	7 Januari 2022
156	SDN 11 Sembilan Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	4	2.982	31 Desember 2021
157	SDN 14 Sembilan Koto	Nagari Banai	2	2.308	5 Januari 2022
158	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	35	603	31 Desember 2021
159	Lapangan Olahraga	Nagari Sitiung	36	24.130	31 Desember 2021
160	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	34	609	31 Desember 2021
161	Rumah Dinas SDN 08 Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	235	16.466	31 Desember 2021
162	TPU Piruko Selatan	Nagari Sitiung	39	10.795	31 Desember 2021
163	SDN 05 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	9	7.994	31 Desember 2021
164	Fasilitas Umum Piruko Selatan	Nagari Sitiung	33	10.067	31 Desember 2021
165	SDN 06 Tiumang	Nagari Tiumang	4	9.829	31 Desember 2021

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
166	SDN 01 Padang Laweh	Nagari Batu Rijal	64	7.033	31 Desember 2021
167	SMPN 03 Timpeh	Nagari Taratak Tinggi	10	9.696	31 Desember 2021
168	SDN 07 Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Selatan	5	6.468	5 Januari 2022
169	TK Negeri Pembina Timpeh	Nagari Ranah Palabi	22	5.308	31 Desember 2021
170	SDN 03 Asam Jujuhan	Nagari Alahan Nan Tigo	4	2.485	31 Desember 2021
171	Fasilitas Umum Piruko Selatan II	Nagari Sitiung	40	2.580	7 Januari 2022
172	Gedung Pemuda Piruko Selatan	Nagari Sitiung	38	1.459	31 Desember 2021
173	SDN 05 Padang Laweh	Nagari Muaro Sopan	3	6.852	31 Desember 2021
174	Rumah Dinas SDN 17 Sitiung	Nagari Sitiung	37	593	31 Desember 2021
175	SMPN 02 Timpeh	Nagari Ranah Palabi	23	23.200	31 Desember 2021
176	SDN 02 Koto Salak	Nagari Pulau Mainan	3	7.116	6 Januari 2022
177	SDN 15 Sembilan Koto	Nagari Binai	3	3.267	6 Januari 2022
178	Pustu Lagan Jaya I	Nagari Sipangkur	4	910	6 Januari 2022
179	SDN 09 Sembilan Koto	Nagari Koto Nan IV Dibawah	5	2.292	31 Desember 2021
180	SMPN 01 Padang Laweh	Nagari Sopan Jaya	3	8.528	31 Desember 2021
181	SDN 16 Koto Baru	Nagari Koto Padang	9	14.474	31 Desember 2021
182	TKN 01 Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Selatan	6	2.011	12 Januari 2022
183	SDN 10 Timpeh	Timpeh	2	3.978	12 Januari 2022
184	SDN 01 Timpeh	timpeh	3	8.115	12 Januari 2022
185	Kantor Camat Koto Salak	Koto Salak	210	9.576	12 Januari 2022
186	SDN 10 Koto Salak	Nagari Simalidu	30	2.946	12 Januari 2022
187	SDN 7 Koto Salak	Nagari Padukuan	131	3.706	12 Januari 2022
188	SMPN 1 Asam Jujuhan	Nagari asam jujuhan	4	6.473	12 Januari 2022
189	SDN 06 Koto Besar	Nagari Koto Ranah	10	14.539	21 Juli 2022
190	Poskesri Tanjung Paku Alam	Nagari Koto Ranah	12	830	21 Juli 2022
191	Poskesri Sungai Nabuan	Nagari Koto Ranah	11	402	21 Juli 2022
192	Puskesmas Timpeh	Nagari Tabek	4	5.324	21 Juli 2022
193	Rumah Dinas Puskesmas Timpeh	Nagari Tabek	5	2.112	21 Juli 2022
194	Poskesri Harapan Maju	Nagari Sungai Duo	191	1.222	24 Oktober 2022
195	Pustu Harapan Mulya II	Nagari Koto Beringin	2	1.186	24 Oktober 2022
196	Pustu Sungai Kalang II	Nagari Tiumang	6	933	24 Oktober 2022
197	Pustu Banjar Makmur	Nagari Sungai Langkok	8	5.077	24 Oktober 2022
198	SDN 12 Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	238	17.720	24 Oktober 2022
199	Polindes Pekan Senayan	Nagri Koto Salak	212	432	18 Oktober 2022
200	Pustu Koto Laweh	Nagari Koto Laweh	25	202	18 Oktober 2022
201	Pustu Koto Tinggi	Nagari Koto Tinggi	21	1.185	18 Oktober 2022
202	Poskesri Koto Gadang	Nagari Koto Gadang	18	235	18 Oktober 2022
203	Poskesri Koto Gadang	Nagari Koto Gadang		42.506	18 Oktober 2022
204	Puskesmas Sitiung I	Nagari Sungai Duo	194	8.438	15 November 2022
205	TKN 01 Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	239	1.038	15 November 2022
206	SDN 09 Koto Baru	Nagari Sialang Gaung	240	2.489	15 November 2022
207	Pustu Piruko Timur	Nagari Sitiung	44	2.118	15 November 2022
208	SDN 25 Pulau Punjung	Nagari Sikabau	13	2.018	29 November 2022
209	Puskesmas Tiumang	SungaiLangkok	9	5.621	29 November 2022

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
210	UPT Puskesmas Sitiung I	Nagari Sungai Duo	192	2.317	04 Oktober 2022
211	SDN 05 Tiumang	Nagari Sipangkur	6	3.088	29 November 2022
212	SDN 07 Pulau Punjung	Nagari Sungai Dareh	19	1.140	29 November 2022
213	Pustu Gunung Medan	Nagari Gunung Medan	11	1.399	29 November 2022
214	Poskesri Koto Daulat	Nagari Sungai Duo	193	155	13 November 2022
215	Pustu Koto Gadang	Nagari Koto Gadang	17	682	18 Oktober 2022
216	Kantor Jorong Piruko Utara	Nagari Sitiung	43	915	15 November 2022
217	Poskesri Bukit Makmur	Nagari Koto Laweh	23	310	04 Oktober 2022
218	Posyandu Piruko Utara	Nagari Sitiung	42	565	15 November 2022
219	Pustu Sungai Kambut II	Nagari Sungai Kambut	16	513	15 November 2022
220	Poskesri Pisang Rebus	Nagari Sitiung	41	257	04 Oktober 2022
221	Pustu Padang Bintungan I	Nagari Sialang Gaung	236	1.254	22 September /2022
222	SDN 04 Koto Baru	Nagari Koto Padang	11	2.062	18 Oktober 2022
223	UPT Puskesmas Beringin Sakti dan Rumdis	Nagari Taratak Tinggi	13	20.990	22 September /2022
224	Pustu Koto Hilalang I	Nagari Sungai Langkok	7	898	04 Oktober 2022
225	Poskesri Durian Gadang	Nagari Koto Laweh	24	445	18 Oktober 2022
226	SDN 19 Pulau Punjung	Nagari IV Koto PulauPunjung	8	2.709	5 Oktober 2022
227	Pustu Muaro Momong	Nagari Sungai Kambut	17	981	15 November 2022
228	Pustu Barat Mandawa	Nagari Sikabau	12	1.397	15 November 2022
229	Pustu Bukit Harapan	Nagari Tiumang	7	777	04 Oktober 2022
230	Lapangan Bola Kaki	Nagari Kurnia Selatan	8	13.903	2 November 2022
231	Pustu Cahaya Murni	Nagari Kurnia Selatan	7	1.243	02 Desember 2022
232	Poskesri Batu Rijal	Nagari Batu Rijal	66	222	02 Desember 2022
233	Pustu Sungai Atang	Nagari Batu Rijal	65	960	02 Desember 2022
234	Pemakaman Umum Cahaya Koto	Nagari Kurnia Selatan	9	19.106	02 Desember 2022
235	Fasilitas Umum Batas Baru	Nagari Kurnia Selatan	10	8.149	02 Desember 2022
236	Pustu Mulia Bakti	Nagari Kurnia Selatan	11	975	02 Desember 2022
237	Kantor Wali Nagari Kurnia Selatan	Nagari Kurnia Selatan	12	16.400	02 Desember 2022
238	Pustu Padang Tarok	Nagari Koto Salak	211	398	1 September 2022
239	Pustu Setia Budi	Nagari Simalidu	31	1.113	1 September 2022
240	Pustu Mekar Sari	Nagari Ampalu	2	739	22 September 2022
241	Pustu Aur Jaya	Nagari Koto Padang	10	880	22 September 2022
242	SDN 11 Koto Salak	Nagari Padukuan	134	4015	22 September 2022
243	Pustu Saiyo	Nagari Taratak Tinggi	12	1.120	22 September 2022
244	Pustu Sialang Gaung	Nagari Sialang Gaung	237	698	22 September 2022
245	Poskesri Marga Jaya	Nagari Taratak Tinggi	11	867	22 September 2022
246	Kantor Camat IX Koto	Nagari Silago	4	8.842	27 Januari 2023
247	Kantor Camat Asam Jujuhan	Nagari Alahan Nan Tigo	5	10.670	27 Januari 2023
248	SDN 03 Padang Laweh	Nagari Batu Rijal	67	6.459	27 Januari 2023
249	SMPN 02 IX Koto	Nagari Banai	4	4.252	31 Januari 2023
250	Poskesri Jorong Lubuk Karak	Nagari lubuk Karak	2	1.321	31 Januari 2023
251	Fasum Jorong Balai Tengah	Nagari Sungai Rumbai	7	6.646	31 Januari 2023
252	Poskesri Jorong Baru	Nagari Bonjol	2	187	31 Januari 2023

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
253	SDN 03 IX Koto	Nagari Silago	5	5.488	31 Januari 2023
254	UPT Puskesmas Sialang	Nagari sungai Selasih	4	43.850	31 Januari 2023
255	SDN 08 IX KOTO	NAGARI BANAI	5	1.702	31 Januari 2023
256	Poskesri Jor. Pasir Mayang	Nagari bonjol	3	117	14 Maret 2023
257	Poskesri Jor.Padang Bungur	Nagari Abai Siat	2	119	20 Januari 2023
258	Puskesmas Sungai Limau	Nagari Sungai Limau	5	10.085	13 April 2023
259	SDN 13 Koto Baru	Nagari Koto Baru	7	3.599	25 mei 2023
260	SDN 17 PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	21	1.391	24 November 2023
261	SDN 06 SEMBILAN KOTO	SILAGO	7	3.855	24 November 2023
262	SDN 07 Tiumbang	Nagari Sungai Langkok	11	6.363	29 Desember 2023
263	Rumah Dinas Dharmasraya	Nagari Sungai Kambut	19	18.770	29 Desember 2023
264	Rusunawa Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai	8	5.000	29 Desember 2023
265	Pasar Sungai Rumbai II	Nagari Sungai Rumbai	10	33000	05 Januari 2024
266	RSUD Baru	SUNGAI KAMBUT	03.18.00000.0167.0	9328	18 Juli 2024
267	SDN 12 IX KOTO	Lubuk karak	03.18.00000.1387.0	3460	22 November 2024
268	SDN 04 ASAM JUJUHAN	SINAMAR ASAM JUJUHAN	03.18.00000.1386.0	3515	15 November 2024
269	BPP PULAU PUNJUNG	EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	03.18.00000.0181.0	8087	5 Desember 2024
270	SDN 10 SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	03.18.00000.0180.0	3365	5 Desember 2024
271	Fasum Jr Sungai Manggis	Ranah Palabi	03.18.00000.0178.0	1484	5 Desember 2024
272	BPP TIUMANG	TIUMANG	03.18.00000.0179.0	4820	5 Desember 2024
273	BPP KOTO SALAK	KOTO SALAK	03.18.00000.1384.0	3734	15 November 2024
274	BPP IX KOTO	SILAGO	03.18.00000.1385.0	8321	15 November 2024
275	Makam Koto Sakti	KURNIA SELATAN	03.18.000001307.0	13119	3 Januari 2025
276	Rumah Dinas SDN 13 Sitiung	Sungai Duo	03.18.000001282.0	666	3 Januari 2025
277	Rmah Dinas Bupati	SUNGAI KAMBUT	03.18.000001298.0	3500	3 Januari 2025
278	Masjid Agung Dharmasraya I	Gunung Medan	03.18.000000088.0	49620	8 Desember 2023
279	BPP KOTO BESAR	KOTO RANAH	03.18.000000855.0	9266	22 Januari 2025
280	SKB PULAU PUNJUNG	GUNUNG SELASIH	03.18.000003314.0	10195	14 Juli 2025
281	Simpang Lintas- Pinang Gadang	SIALANG GAUNG	03.18.000001575.0	3731	29 April 2025
282	Simpang Lintas Abai - Koto Salak	KOTO BARU	03.18.000001590.0	11124	29 April 2025
283	Jalan Sitiung - Pulai	SITIUNG	03.18.000001147.0	22710	29 April 2025
284	Smpg 4 G. Medan - Sitiung Lama	SITIUNG	03.18.000001580.0	7303	29 April 2025
285	Simpang Lintas Aur Jaya	KOTO PADANG	03.18.000001592.0	10276	29 April 2025
286	Puskesmas Padang Laweh	MUARO SOPAN	03.18.000004544.0	7168	25 September 2025
287	BPP Koto Besar 2	KOTO RANAH	03.18.000002196.0	1712	12 September 2025
288	SDN 05 Koto Baru	KOTO BARU	03.18.000002371.0	2842	12 September 2025
289	Rumah Dinas Bupati II	Sungai Kambut	03.18.000002697.0	4545	25 September 2025
290	Makam Koto Bakti II	KURNIA SELATAN	03.18.000002194.0	3795	12 September 2025
291	BLK Dharmasraya	Sungai Kambut	03.18.000004188.0	20000	14 Agustus 2025
292	Siguntur-Sikabau	Siguntur	03.18.000001614.0	13866	11 September 2025
293	Simpang BKR B-B Sitiung I	Sungai Duo	03.18.000001588.0	4203	11 September 2025
294	Sungai Rumbai-PT.PSET	SUNGAI RUMBAI	03.18.000001370.0	20197	22 Agustus 2025

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
295	Lingkar Pasar Sungai Rumbai	SUNGAI RUMBAI	03.18.000001582.0	1115	22 Agustus 2025
296	Smpg Mulya Bakti-Cahaya Murni	KURNIA SELATAN	03.18.000001593.0	8211	22 Agustus 2025
297	Blok A Lubuk Aur	Nagari Sitiung	03.18.000001579.0	10573	11 September 2025
298	Ampang Kuranji-Rimbo Kepung	AMPANG KURANJI	03.18.000001718.0	3653	11 September 2025
299	Jl. Lingkar Barat- Pdg Bintungan	SIALANG GAUNG	03.18.000001576.0	17014	11 September 2025
300	Taratak-Pelabuhan batu	Nagari Siguntur	03.18.000001581.0	4133	11 September 2025
301	Jl. Lingkar Timur-Pdg Bintungan	SIALANG GAUNG	03.18.000001591.0	4385	11 September 2025
302	Jl. Inspeksi Baranang Siang	KOTO BARU	03.18.000001719.0	9439	11 September 2025
303	Simpang Blok A-Blok A Sitiung I	SITIUNG	03.18.000001148.0	2608	11 September 2025
304	Jl.Permukiman Sitiung V Aur Jaya	KOTO PADANG	03.18.000001617.0	38746	11 September 2025
305	Jalan Lingkar Cahaya Murni-149	KURNIA SELATAN	03.18.000001583.0	34110	11 September 2025
306	Simp Lintas - Mega Permai	Nagari Koto Baru	03.18.000001621.0	14452	11 September 2025
307	Ampang Kuranji- Aur Jaya	Nagari Koto Padang	03.18.000001616.0	5994	22 Agustus 2025
308	Simp 3 Wono Tiung-Koto Salak	Nagari Koto Baru	03.18.000001720.0	17543	11 September 2025
309	Jl. Lingkar ampang Kuranji	AMPANG KURANJI	03.18.000001622.0	6231	11 September 2025
310	Simp Kt Agung- Simp Blok C St. I	Sungai Duo	03.18.000001584.0	4704	11 September 2025
311	Siguntur-Koto Tuo	Siguntur	03.18.000001596.0	21376	11 September 2025
312	Siguntur-Koto Tuo	Siguntur	03.18.000001596.0	21376	11 September 2025
313	Simp Blok A St. 3-Blok A St. 3	Kurnia Koto salak	03.18.000001578.0	10750	11 September 2025
314	Koto Padang- Padang Bintungan	SIALANG GAUNG	03.18.000001627.0	6242	11 September 2025
315	Jln BKN 2 Blok B-Siriung I	Sungai Duo	03.18.000001613.0	508	11 September 2025
316	Simp SMKN 1 S.R - pasar S.R	SUNGAI RUMBAI	03.18.000001247.0	13393	22 Agustus 2025
317	SDN 14 Koto Baru	KOTO PADANG	03.18.000002195.0	5105	12 September 2025
318	Kantor Camat-Pasar S.Rumbai	SUNGAI RUMBAI	03.18.000001585.0	1161	15 September 2025
319	Simp Ragusa-Nunang Kt. G. M	Gunung Medan	03.18.000001615.0	2415	15 September 2025
320	Fasum Jorong Bukit Jaya	RANAH PALABI	03.18.000002043.0	7646	25 September2025
321	BPP Asam Jujuhan	SUNGAI LIMAU	172	6293	30 November 2012
322	Pembangunan BUOG	KOTO PADANG	03.18.000005984.0	5800	30 Januari 2026
323	Ruas jalan Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai	Kurnia Koto salak Sungai Rumbai	03.18.000001126.0	16520	19 April 2025
324	Ruas Jalan Nagari Ampang Kuranji Kec Koto Baru	Nagari Ampang Kuranji Kec Koto Baru	03.18.000001623.0	4273	19 April 2025
325	Ruas Jalan Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	03.18.000001586.0	7164	19 April 2025
326	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001625.0	18557	19 April 2025
327	Ruas Jalan Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	03.18.000001577.0	30172	19 April 2025
328	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001619.0	11622	19 April 2025

No	Peruntukan Pada Sertifikat	Lokasi	No	Luas (M2)	Tanggal Sertifikat
329	Ruas Jalan Nagari Sitiung kec. Sitiung	Nagari Sitiung kec. Sitiung	03.18.000001127.0	1835	19 April 2025
330	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001620.0	8767	19 April 2025
331	Ruas Jalan Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	03.18.000001367.0	2605	19 April 2025
332	Ruas Jalan Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	03.18.000001369.0	4709	19 April 2025
333	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001574.0	7118	19 April 2025
334	Ruas Jalan Nagari Sitiung kec. Sitiung	Nagari Sitiung kec. Sitiung	03.18.000001146.0	6810	19 April 2025
335	Ruas Jalan Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	Nagari Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	03.18.000001594.0	15977	19 Maret 2025
336	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001587.0	1484	19 Maret 2025
337	Ruas Jalan Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	03.18.000001624.0	14412	19 Maret 2025
338	Ruas Jalan Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	03.18.000001618.0	12851	19 April 2025
339	Ruas Jalan Nagari Sitiung kec. Sitiung	Nagari Sitiung kec. Sitiung	03.18.000001595.0	6960	19 April 2025
340	Ruas Jalan Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	Nagari Sungai Rumbai Timur kec. Sungai Rumbai	03.18.000001241.0	688	19 April 2025

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Akumulasi Penyusutan 2024 (Audited)

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN						
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan
1	Sekretariat DPRD	-	279.432.301,00	1.692.833.956,00	-	-	6.433.055.410,00	1.929.053.224,00	-
2	Sekretariat Daerah	-	29.656.575,00	12.127.019.786,00	13.460.000,00	-	12.649.834.890,00	1.989.046.653,00	107.718.333,00
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	252.599.552,00	-	-	123.066.773,00	6.650.000,00	-
4	Kec. Sitiung	-	-	225.572.650,00	-	-	92.365.067,00	26.973.333,00	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	274.591.207,00	-	-	139.670.136,00	8.400.000,00	-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	253.339.910,00	-	-	123.454.500,00	13.979.250,00	-
7	Kec. Sembilan Koto	-	-	254.820.660,00	-	-	93.907.618,00	9.636.000,00	-
8	Kec. Timpeh	-	-	194.478.125,00	-	-	81.207.000,00	13.236.850,00	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	228.496.703,00	-	-	67.370.417,00	16.000.000,00	-
10	Kec Tiumang	-	-	222.562.425,00	-	-	105.670.000,00	18.100.000,00	-
11	Kec Koto Besar	-	-	273.535.150,00	-	-	84.039.959,00	4.442.500,00	-
12	Kec Koto Salak	-	-	167.555.639,00	-	-	150.410.750,00	25.363.500,00	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	4.226.191,00	222.702.750,00	-	-	88.873.308,00	12.950.000,00	-
14	Dinas PUPR	-	17.301.710.467,00	5.722.469.888,00	328.056.053,00	104.734.886,00	1.872.579.050,00	1.823.828.927,00	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	757.484.505,00	-	34.210.000,00	2.495.772.715,00	28.010.583,00	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	2.359.878.072,00	476.202.835,00	-	823.584.094,00	66.058.333,00	-
17	Dinas Kesehatan	-	160.482.415,00	12.114.977.179,00	8.812.917,00	-	17.221.062.079,00	5.104.597.026,00	81.916.122.019,14
18	Dinas Pendidikan	-	61.497.771,00	1.784.321.439,00	384.261.476,00	1.149.815.007,00	14.682.725.042,00	4.576.588.351,00	90.792.513,00
19	Dinas BUDPARPORA	-	1.214.287,00	565.749.072,00	3.230.000,00	-	405.357.333,00	69.606.956,00	-
20	Dinas TRANSNAKER	-	-	467.150.000,00	168.241.142,00	-	145.703.334,00	3.000.000,00	-
21	DINSOSP3APPKB	-	-	2.644.000.192,00	-	-	400.186.934,00	229.125.500,00	-
22	DISDUKCAPIL	-	-	1.398.728.209,00	8.745.000,00	-	322.034.502,00	246.407.350,00	-
23	Dinas PMD	-	-	1.141.880.786,00	1.260.000,00	-	178.314.751,00	15.800.000,00	-
24	Dinas Pertanian	-	-	2.769.579.840,00	584.231.101,00	290.924.942,00	1.990.060.666,00	375.862.489,00	111.189.750,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	-	4.409.608.927,00	940.380.925,00	15.270.000,00	137.536.250,00	625.930.272,50	66.315.400,00	41.805.000,00
26	Dinas KUMPERDAG	-	848.499.503,00	1.305.507.043,00	3.597.435.248,40	-	255.535.667,00	922.019.479,00	2.649.185,00
27	BKD	-	-	1.226.575.226,00	40.885.000,00	-	1.550.461.689,00	374.478.436,00	-
28	DPMPTSP	-	-	693.020.978,00	14.465.000,00	-	335.546.159,00	199.503.600,00	991.667,00
29	Inspektorat Kabupaten	-	13.410.000,00	576.217.952,00	-	32.343.750,00	470.583.532,00	59.821.400,00	-
30	BAPPPEDA	-	1.255.104,00	530.427.190,00	10.100.000,00	-	383.833.704,00	61.355.909,00	-
31	DLH	-	282.584.467,00	1.698.011.945,00	144.872.350,00	193.786.313,00	684.699.871,00	74.486.297,00	-
32	Badan KESBANGPOL	-	-	268.200.000,00	-	-	84.004.667,00	6.750.000,00	-
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	5.780.283.810,00	-	-	537.988.785,00	23.413.500,00	-
34	BPBD	-	58.527.500,00	1.810.348.733,00	15.479.166,00	-	111.379.467,00	44.527.667,00	-
35	BKPSDM	-	-	414.600.667,00	-	-	176.360.197,00	1.500.000,00	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1.015.100.000,00	1.774.167,00	-	928.793.943,00	36.312.224,00	2.850.000,00
37	Dinas KOMINFO	-	-	616.897.266,00	6.435.000,00	-	1.832.511.234,00	705.819.364,00	-
	Jumlah	-	23.452.105.508,00	64.991.899.430,00	5.823.216.455,40	1.943.351.148,00	68.747.935.515,50	19.189.020.101,00	82.274.118.467,14

ASET TETAP											
DAN MESIN								PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN		
Alat Laboratorium	Alat Persenjataan	Komputer	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Alat Keselamatan Kerja	Peralatan Proses/Produksi	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga		Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara
-	-	319.524.245,00	-	-	-	-	-	10.653.899.136,00	8.860.351.916,00	-	-
30.025.000,00	-	2.144.738.729,00	13.669.167,00	-	-	-	-	29.105.169.133,00	7.984.100.214,00	7.242.505,00	-
-	-	57.913.167,00	-	-	-	-	-	440.229.492,00	358.842.909,00	-	-
-	-	54.229.168,00	-	-	-	-	-	399.140.218,00	176.844.970,00	-	-
-	-	99.383.031,00	-	-	-	-	-	522.044.374,00	345.452.556,00	-	-
-	-	48.037.500,00	-	9.900.000,00	-	-	-	448.711.160,00	522.134.822,00	-	-
1.364.483,00	-	45.798.983,00	-	5.000.000,00	-	-	-	410.527.744,00	-	-	-
-	-	37.663.445,00	-	-	-	-	-	326.585.420,00	484.078.048,00	-	-
-	-	45.704.167,00	-	-	-	-	-	357.571.287,00	297.312.437,00	-	-
-	-	22.350.001,00	-	-	-	-	-	368.682.426,00	417.382.909,00	-	-
-	-	56.083.334,00	-	6.400.000,00	-	-	-	424.500.943,00	568.300.499,00	-	-
640.000,00	-	65.133.333,00	-	-	-	-	-	409.103.222,00	412.181.988,00	-	-
-	-	27.573.125,00	-	-	-	-	-	356.325.374,00	660.569.511,00	-	-
541.435.657,00	-	876.925.753,00	-	-	-	-	-	28.571.740.681,00	9.596.952.328,00	16.867.127,00	492.558.793,00
-	-	262.951.458,00	-	-	-	-	-	3.578.429.261,00	3.795.382.625,00	-	-
688.527.500,00	-	283.275.384,00	-	-	-	749.918.760,00	-	5.447.444.978,00	769.354.449,00	-	-
9.219.708.577,00	94.100.000,00	5.420.222.649,00	-	-	10.937.500,00	-	-	131.271.022.361,14	49.731.666.946,00	6.582.643,00	-
7.093.982.854,00	54.569.014,00	33.106.663.024,00	-	263.608.084,00	6.353.959,00	-	543.485.738,00	63.798.664.272,00	60.480.290.301,00	749.035.156,00	-
140.000,00	-	240.020.225,00	-	-	-	-	-	1.285.317.873,00	19.802.362.974,00	-	-
4.593.750,00	-	272.806.751,00	-	-	-	-	-	1.061.494.977,00	1.313.391.923,00	-	-
2.000.000,00	-	674.056.833,00	-	673.758.340,00	-	-	-	4.623.127.799,00	558.666.504,00	-	-
2.190.000,00	-	1.027.659.588,00	-	-	-	-	-	3.005.764.649,00	687.122.426,00	-	-
-	-	181.260.332,00	-	-	-	-	-	1.518.515.869,00	-	-	-
370.842.998,00	5.075.000,00	1.105.927.288,00	-	69.350.000,00	-	-	-	7.673.044.074,00	3.955.988.588,00	-	-
47.310.000,00	-	135.948.538,00	-	-	-	-	-	6.420.105.312,50	2.904.983.670,00	-	-
3.229.077.788,00	-	150.298.622,00	-	-	-	-	-	10.311.022.535,40	7.178.891.372,00	-	-
4.041.667,00	-	1.864.457.324,00	-	-	-	-	-	5.060.899.342,00	984.942.847,00	-	-
1.413.333,00	-	322.682.757,00	-	-	-	-	-	1.567.623.494,00	212.223.603,00	-	-
14.900.000,00	-	232.641.670,00	-	-	-	-	-	1.399.918.304,00	285.344.625,00	-	-
-	-	360.719.848,00	-	-	-	-	-	1.347.691.755,00	-	-	-
1.673.198.013,00	29.285.244,00	169.084.757,00	-	-	-	-	-	4.950.009.257,00	1.348.796.791,00	3.041.667,00	-
-	1.350.000,00	62.808.854,00	-	-	-	-	-	423.113.521,00	-	-	-
-	30.000.000,00	131.095.750,00	-	-	-	-	-	6.502.781.845,00	-	-	-
-	129.166.667,00	82.141.626,00	-	194.968.000,00	-	-	-	2.446.538.826,00	-	-	-
-	-	436.020.486,00	-	-	-	-	-	1.028.481.350,00	233.717.150,00	-	-
5.943.874,00	-	478.876.328,00	-	11.966.251,00	-	-	-	2.481.616.787,00	472.771.566,00	-	-
-	-	971.319.763,00	-	-	-	-	-	4.132.982.627,00	-	-	-
22.931.335.494,00	343.545.925,00	51.873.997.836,00	13.669.167,00	1.234.950.675,00	17.291.459,00	749.918.760,00	543.485.738,00	344.129.841.679,04	185.400.403.467,00	782.769.098,00	492.558.793,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah
		Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	Aset Tetap Dalam Renovasi			
-	8.860.351.916,00	-	-	1.476.920.547,00	628.074.378,00	2.104.994.925,00	-	-	-	-	21.619.245.977,00
642.115.212,00	8.633.457.931,00	-	7.064.833,00	49.462.513,00	1.161.507.810,00	1.218.035.156,00	-	-	-	-	38.956.662.220,00
-	358.842.909,00	-	-	2.326.042,00	-	2.326.042,00	-	-	-	-	801.398.443,00
-	176.844.970,00	-	-	-	2.918.542,00	2.918.542,00	-	-	-	-	578.903.730,00
10.680.004,00	356.132.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.176.934,00
3.551.655,00	525.686.477,00	-	-	5.593.031,00	329.539,00	5.922.570,00	-	-	-	-	980.320.207,00
11.113.458,00	11.113.458,00	-	-	5.142.446,00	-	5.142.446,00	-	-	-	-	426.783.648,00
9.047.000,00	493.125.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.710.468,00
39.358.410,00	336.670.847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694.242.134,00
7.704.866,00	425.087.775,00	-	-	-	246.458,00	246.458,00	-	-	-	-	794.016.659,00
-	568.300.499,00	-	-	6.938.333,00	-	6.938.333,00	-	-	-	-	999.739.775,00
-	412.181.988,00	-	-	359.375,00	-	359.375,00	-	-	-	-	821.644.585,00
-	660.569.511,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.016.894.885,00
211.523.110,00	10.317.901.358,00	901.529.922.392,09	43.593.181.398,00	7.804.338.521,00	6.084.824.738,00	959.012.267.049,09	48.840.000,00	-	48.840.000,00	-	997.950.749.088,09
20.890.317,00	3.816.272.942,00	18.199.815.609,00	130.403.672,00	-	11.682.491,00	18.341.901.772,00	-	-	-	-	25.736.603.975,00
-	769.354.449,00	-	177.175.150,00	1.216.055.612,00	368.159.229,00	1.761.389.991,00	-	-	-	-	7.978.189.418,00
440.925.636,00	50.179.175.225,00	1.012.206.934,00	314.261.719,00	1.066.229.231,00	32.898.075,00	2.425.595.959,00	-	-	-	-	183.875.793.545,14
1.694.834.613,00	62.924.160.070,00	201.198.383,00	275.154.700,00	28.405.735,00	228.794.064,00	733.552.882,00	-	-	-	-	127.456.377.224,00
92.501.707,00	19.894.864.681,00	-	26.199.473,00	174.029,00	-	26.373.502,00	68.250.000,00	-	68.250.000,00	-	21.274.806.056,00
-	1.313.391.923,00	227.078.459,00	3.816.667,00	3.094.167,00	-	233.989.293,00	-	-	-	-	2.608.876.193,00
41.690.557,00	600.357.061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.223.484.860,00
-	687.122.426,00	-	-	-	13.858.138,00	13.858.138,00	-	-	-	-	3.706.745.213,00
-	-	-	-	9.346.458,00	-	9.346.458,00	-	-	-	-	1.527.862.327,00
396.958.527,00	4.352.947.115,00	242.064.691,00	186.985.265,00	42.861.292,00	67.926.497,00	539.837.745,00	-	101.350.000,00	101.350.000,00	-	12.667.178.934,00
39.330.208,00	2.944.313.878,00	242.137.400,00	1.276.778.290,00	34.773.013,00	73.185.248,00	1.626.873.951,00	-	-	-	-	10.991.293.141,50
353.796.554,00	7.532.687.926,00	2.913.986.579,00	530.501.882,00	312.587.037,00	488.514.482,00	4.245.589.980,00	-	-	-	-	22.089.300.441,40
-	984.942.847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.045.842.189,00
-	212.223.603,00	-	-	2.140.126,00	5.235.716,00	7.375.842,00	-	-	-	-	1.787.222.939,00
-	285.344.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.685.262.929,00
-	-	-	-	-	12.214.194,00	12.214.194,00	-	-	-	-	1.359.905.949,00
77.134.015,00	1.428.972.473,00	-	-	23.889,00	30.512.006,00	30.535.895,00	-	-	-	-	6.409.517.625,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423.113.521,00
-	-	-	3.611.440,00	-	952.058,00	4.563.498,00	-	-	-	-	6.507.345.343,00
-	-	-	408.005.220,00	-	-	408.005.220,00	-	-	-	-	2.854.544.046,00
41.596.847,00	275.313.997,00	-	996.392,00	-	817.708,00	1.814.100,00	-	-	-	-	1.305.609.447,00
-	472.771.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.954.388.353,00
-	-	-	-	6.465.560,00	45.427.738,00	51.893.298,00	-	-	-	-	4.184.875.925,00
4.134.752.696,00	190.810.484.054,00	924.568.410.447,09	46.934.136.101,00	12.073.236.957,00	9.258.079.109,00	992.833.862.614,09	117.090.000,00	101.350.000,00	218.440.000,00	-	1.527.992.628.347,13

ASET LAINNYA					ASET LAINNYA
Aset Lain-Lain				Aset Tidak Berwujud	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainn	Aset yang dipinjampakaikan	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	JUMLAH ASET LAIN-LAIN		
533.431.421,00	-	-	533.431.421,00	-	533.431.421,00
3.805.200.302,00	3.411.074.034,00	-	7.216.274.336,00	88.664.583,00	7.304.938.919,00
224.254.000,00	294.525.000,00	-	518.779.000,00	-	518.779.000,00
91.829.520,00	201.870.000,00	-	293.699.520,00	-	293.699.520,00
92.067.099,00	216.973.000,00	-	309.040.099,00	-	309.040.099,00
195.923.311,00	303.525.000,00	-	499.448.311,00	-	499.448.311,00
92.805.000,00	164.445.000,00	-	257.250.000,00	-	257.250.000,00
98.620.000,00	114.435.000,00	-	213.055.000,00	-	213.055.000,00
56.371.750,00	168.585.000,00	-	224.956.750,00	-	224.956.750,00
177.608.000,00	212.708.000,00	-	390.316.000,00	-	390.316.000,00
137.121.334,00	347.835.000,00	-	484.956.334,00	-	484.956.334,00
239.691.475,00	343.440.000,00	-	583.131.475,00	-	583.131.475,00
97.695.067,00	292.395.000,00	-	390.090.067,00	-	390.090.067,00
9.993.763.239,00	-	101.659.032.118,00	111.652.795.357,00	-	111.652.795.357,00
40.000.637,00	-	11.688.015,00	51.688.652,00	-	51.688.652,00
1.959.233.846,00	160.500.000,00	13.082.928,00	2.132.816.774,00	160.497.708,00	2.293.314.482,00
20.264.875.177,05	63.750.000,00	-	20.328.625.177,05	319.288.508,00	20.647.913.685,05
11.391.397.789,56	-	-	11.391.397.789,56	700.800.298,00	12.092.198.087,56
272.353.520,00	-	-	272.353.520,00	-	272.353.520,00
317.402.858,00	-	-	317.402.858,00	-	317.402.858,00
1.478.819.661,00	-	-	1.478.819.661,00	-	1.478.819.661,00
577.166.814,00	-	-	577.166.814,00	80.125.259,00	657.292.073,00
465.239.255,00	-	-	465.239.255,00	40.823.125,00	506.062.380,00
2.342.379.292,00	-	10.570.276.114,00	12.912.655.406,00	-	12.912.655.406,00
1.150.778.283,00	-	-	1.150.778.283,00	-	1.150.778.283,00
151.415.915,00	-	-	151.415.915,00	-	151.415.915,00
1.725.529.827,00	-	-	1.725.529.827,00	1.227.432.984,00	2.952.962.811,00
331.757.182,00	-	-	331.757.182,00	-	331.757.182,00
170.777.000,00	-	-	170.777.000,00	-	170.777.000,00
706.772.252,00	-	-	706.772.252,00	-	706.772.252,00
1.957.116.728,00	713.167.134,00		2.670.283.862,00		2.670.283.862,00
154.349.000,00	-	-	154.349.000,00	-	154.349.000,00
310.212.098,00	-	-	310.212.098,00	2.000.000,00	312.212.098,00
1.160.286.349,00	-	-	1.160.286.349,00	-	1.160.286.349,00
395.575.808,00	-	-	395.575.808,00	102.916.667,00	498.492.475,00
136.402.038,00	-	-	136.402.038,00	1.871.750,00	138.273.788,00
300.459.000,00	-	-	300.459.000,00	149.093.801,00	449.552.801,00
63.596.681.847,61	7.009.227.168,00	112.254.079.175,00	182.859.988.190,62	2.873.514.683,00	185.733.502.873,62

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Akumulasi Penyusutan 2025

Lampiran : 27

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN								
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Laboratorium	Alat Persenjataan
1	Sekretariat DPRD	-	283.610.872,00	1.124.645.662,00	-	-	6.704.438.954,00	1.985.415.325,00	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	-	31.799.430,00	10.848.305.033,00	13.460.000,00	-	13.281.629.548,00	2.166.270.803,00	109.318.333,00	30.118.908,00	-
3	Kec. Pulau Punjung	-	-	252.599.552,00	-	-	127.116.773,00	6.650.000,00	-	-	-
4	Kec. Sitiung	-	-	260.740.131,00	-	-	100.665.067,00	28.473.333,00	-	-	-
5	Kec. Koto Baru	-	-	315.129.509,00	-	-	139.670.136,00	8.400.000,00	-	-	-
6	Kec. Sungai Rumbai	-	-	288.507.391,00	-	-	123.454.500,00	13.979.250,00	-	-	-
7	Kec. Sembilan Koto	-	-	225.770.660,00	-	-	93.907.618,00	9.636.000,00	-	1.612.570,00	-
8	Kec. Timpeh	-	-	194.478.125,00	-	-	81.207.000,00	13.236.850,00	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	-	-	237.022.803,00	-	-	69.445.417,00	16.000.000,00	-	-	-
10	Kec Tiumang	-	-	222.562.425,00	-	-	105.670.000,00	18.100.000,00	-	-	-
11	Kec Koto Besar	-	-	323.702.631,00	-	-	88.227.459,00	5.112.500,00	-	-	-
12	Kec Koto Salak	-	-	208.022.381,00	-	-	150.410.750,00	25.363.500,00	-	760.000,00	-
13	Kec. Asam Jujuhan	-	4.940.476,00	222.702.750,00	-	-	89.273.308,00	12.950.000,00	-	-	-
14	Dinas PUPR	-	12.117.182.206,00	5.645.098.112,00	348.777.082,00	106.885.800,00	2.696.627.789,00	2.037.675.217,00	-	578.436.340,00	-
15	Dinas PERKIMTAN	-	-	771.449.980,00	-	34.210.000,00	2.812.743.870,00	27.671.833,00	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	-	-	2.539.247.119,00	569.032.017,00	-	802.786.300,00	51.865.833,00	-	688.527.500,00	-
17	Dinas Kesehatan	-	253.382.069,00	13.995.914.979,00	9.930.417,00	-	18.213.933.110,00	6.157.517.973,00	94.698.143.203,14	10.142.981.394,00	131.495.833,00
18	Dinas Pendidikan	-	73.117.321,00	2.042.491.163,00	433.300.577,00	1.418.001.215,00	17.560.648.171,85	4.746.602.006,00	99.364.179,00	7.728.957.834,00	135.093.089,00
19	Dinas BUDPARPORA	-	1.428.572,00	571.674.838,00	3.230.000,00	-	420.798.425,00	71.766.956,00	-	1.820.000,00	-
20	Dinas TRANSTAKER	-	-	171.000.000,00	168.241.142,00	-	158.750.601,00	3.000.000,00	-	5.718.750,00	-
21	DINSOSP3APPKB	-	242.857,00	2.912.490.576,00	-	-	423.323.802,00	244.982.000,00	-	2.000.000,00	-
22	DISDUKCAPIL	-	-	1.537.908.085,00	8.745.000,00	-	346.076.502,00	278.966.883,00	-	2.635.000,00	-
23	Dinas PMD	-	-	1.217.575.072,00	1.260.000,00	-	197.689.751,00	15.800.000,00	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	-	2.867.951.278,00	593.882.353,00	640.134.485,00	2.038.207.133,00	392.092.257,00	111.189.750,00	376.869.108,00	5.775.000,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	-	4.410.150.208,00	940.380.925,00	15.270.000,00	140.311.250,00	627.463.312,50	66.315.400,00	41.805.000,00	47.310.000,00	-
26	Dinas KUMPERDAG	-	1.011.621.334,00	1.366.906.269,00	4.132.144.341,40	-	254.025.833,00	979.869.029,00	2.649.185,00	3.770.623.336,00	-
27	BKD	-	-	1.154.618.798,00	40.885.000,00	-	1.592.158.385,00	416.326.098,00	-	4.541.667,00	-
28	DPMPTSP	-	-	824.626.936,00	14.465.000,00	-	373.363.926,00	214.096.000,00	1.341.667,00	1.573.333,00	-
29	Inspektorat Kabupaten	-	13.410.000,00	552.962.659,00	-	33.750.000,00	521.079.674,00	59.821.400,00	-	14.900.000,00	-
30	BAPPPEDA	-	1.812.928,00	569.227.189,00	-	-	316.399.251,00	38.180.909,00	-	-	-
31	DLH	-	635.834.173,00	1.759.504.300,00	148.223.500,00	148.635.656,00	648.503.734,00	50.208.083,00	-	1.673.740.876,00	47.576.617,00
32	Badan KESBANGPOL	-	-	268.200.000,00	-	-	90.002.317,00	6.750.000,00	-	-	1.350.000,00
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	5.780.283.810,00	-	-	544.288.877,00	24.373.500,00	-	1.867.445,00	30.000.000,00
34	BPBD	-	58.527.500,00	1.884.204.753,00	17.248.566,00	-	140.715.392,00	51.027.667,00	-	-	150.000.000,00
35	BKPSDM	-	-	414.600.667,00	-	-	168.229.470,00	-	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	1.015.100.000,00	2.479.167,00	-	1.150.621.757,00	50.412.224,00	4.750.000,00	9.541.374,00	-
37	Dinas KOMINFO	-	-	327.070.714,00	6.435.000,00	-	1.851.828.670,00	797.677.919,00	-	-	-
	Jumlah	-	18.897.059.946,00	65.854.677.275,00	6.527.009.162,40	2.521.928.406,00	75.105.382.583,35	21.092.586.748,00	95.068.561.317,14	25.084.535.435,00	501.290.539,00

ASET TETAP											
Komputer	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Alat Keselamatan Kerja	Alat Peraga	Peralatan Proses/Produksi	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN			
								Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara	Tugu Titik Kontrol/Pasti
354.958.307,00	-	-	-	-	-	-	10.453.069.120,00	9.690.558.044,00	-	-	-
2.201.049.180,00	17.159.167,00	-	-	-	-	-	28.699.110.402,00	8.989.062.771,00	8.039.845,00	-	708.597.294,00
64.388.167,00	-	-	-	-	-	-	450.754.492,00	378.619.195,00	-	-	-
69.066.668,00	-	-	-	-	-	-	458.945.199,00	187.017.707,00	-	-	-
107.233.031,00	-	-	-	-	-	-	570.432.676,00	374.265.441,00	-	-	11.739.178,00
51.787.500,00	-	9.900.000,00	-	-	-	-	487.628.641,00	553.046.587,00	-	-	3.991.035,00
54.868.483,00	-	5.000.000,00	-	-	-	-	390.795.331,00	-	-	-	15.177.348,00
47.282.476,00	-	-	-	-	-	-	336.204.451,00	540.442.836,00	-	-	10.043.000,00
51.604.167,00	-	-	-	-	-	-	374.072.387,00	321.418.851,00	-	-	43.691.446,00
30.600.001,00	-	-	-	-	-	-	376.932.426,00	465.189.120,00	-	-	8.593.889,00
56.033.334,00	-	6.400.000,00	-	-	-	-	479.475.924,00	612.704.699,00	-	-	-
71.970.833,00	-	-	-	-	-	-	456.527.464,00	451.738.620,00	-	-	-
33.610.625,00	-	-	-	-	-	-	363.477.159,00	717.721.862,00	-	-	-
1.024.322.255,00	-	-	-	-	-	-	24.555.004.801,00	11.734.284.312,00	20.029.447,00	564.935.435,00	106.766.125,00
248.308.958,00	-	-	-	-	-	-	3.894.384.641,00	4.713.789.400,00	-	-	24.104.212,00
298.651.246,00	-	-	-	-	793.648.086,00	-	5.743.758.101,00	1.984.931.151,00	-	-	-
5.611.611.161,00	-	-	-	21.875.000,00	-	-	149.236.785.139,14	51.571.904.821,00	7.837.063,00	-	493.967.609,00
38.808.220.908,11	-	323.443.306,00	116.667,00	10.601.459,00	-	559.669.764,00	73.939.627.659,96	67.574.501.856,00	872.165.366,00	-	1.964.736.223,00
290.820.146,00	-	-	-	-	-	-	1.361.538.937,00	22.342.315.789,00	-	-	110.237.492,00
256.111.751,00	-	-	-	-	-	-	762.822.244,00	1.381.172.494,00	-	-	-
734.015.583,00	-	776.950.000,00	-	-	-	-	5.094.004.818,00	639.571.899,00	-	-	47.909.721,00
1.162.131.205,00	-	-	-	-	-	-	3.336.462.675,00	793.265.940,00	-	-	-
195.105.676,00	-	-	-	-	-	-	1.627.430.499,00	420.745.802,00	-	-	-
1.163.416.817,00	-	69.350.000,00	-	-	-	-	8.258.868.181,00	4.134.338.809,00	-	-	407.651.446,00
154.737.600,00	-	-	-	-	-	-	6.443.743.695,50	3.087.331.956,00	-	-	42.837.188,00
171.754.264,00	-	-	-	-	-	-	11.689.593.591,40	8.135.624.771,00	-	-	410.802.384,00
2.043.966.823,00	-	-	-	-	-	-	5.252.496.771,00	1.098.853.741,00	-	-	-
371.173.315,00	-	-	-	-	-	-	1.800.640.177,00	233.171.165,00	-	-	-
304.692.745,00	-	-	-	-	-	-	1.500.616.478,00	320.208.475,00	-	-	-
306.513.599,00	-	-	-	-	-	-	1.232.133.876,00	-	-	-	-
170.335.476,00	-	-	-	-	-	-	5.282.562.415,00	1.496.624.902,00	3.541.667,00	-	86.359.524,00
101.250.208,00	-	-	-	-	-	-	467.552.525,00	314.465.442,00	-	-	-
133.364.500,00	-	3.439.585,00	-	-	-	-	6.517.617.717,00	259.973.111,00	-	-	-
107.091.459,00	-	244.351.000,00	-	-	-	-	2.653.166.337,00	999.543.562,00	-	-	-
314.382.613,00	-	-	-	-	-	-	897.212.750,00	248.891.134,00	-	-	45.989.984,00
524.514.984,00	-	13.630.000,00	-	-	-	-	2.771.049.506,00	1.019.514.270,00	-	-	-
1.049.324.825,00	-	-	-	-	-	-	4.032.337.128,00	394.152.450,00	-	-	-
58.740.270.889,11	17.159.167,00	1.452.463.891,00	116.667,00	32.476.459,00	793.648.086,00	559.669.764,00	372.248.836.335,00	208.180.962.985,00	911.613.388,00	564.935.435,00	4.543.195.098,00

GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA		ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah
	Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	Aset Tetap Dalam Renovasi			
9.690.558.044,00	-	-	1.614.804.152,00	686.970.442,00	2.301.774.594,00	-	-	-	-	22.445.401.758,00
9.705.699.910,00	-	7.938.833,00	56.783.765,00	1.271.930.871,00	1.336.653.469,00	-	-	-	-	39.741.463.781,00
378.619.195,00	-	-	2.518.542,00	-	2.518.542,00	-	-	-	-	831.892.229,00
187.017.707,00	-	-	-	3.146.042,00	3.146.042,00	-	-	-	-	649.108.948,00
386.004.619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.437.295,00
557.037.622,00	-	-	5.995.765,00	354.727,00	6.350.492,00	-	-	-	-	1.051.016.755,00
15.177.348,00	-	-	5.561.910,00	-	5.561.910,00	-	-	-	-	411.534.589,00
550.485.836,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886.690.287,00
365.110.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.182.684,00
473.783.009,00	-	-	-	263.958,00	263.958,00	-	-	-	-	850.979.393,00
612.704.699,00	-	-	7.398.333,00	-	7.398.333,00	-	-	-	-	1.099.578.956,00
451.738.620,00	-	-	396.875,00	-	396.875,00	-	-	-	-	908.662.959,00
717.721.862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081.199.021,00
12.426.015.319,00	1.043.782.230.848,68	49.010.732.396,00	10.353.989.985,00	8.073.806.772,00	1.111.220.760.001,68	48.840.000,00	-	48.840.000,00	-	1.148.250.620.121,68
4.737.893.612,00	19.265.371.740,00	156.056.853,00	-	13.980.686,00	19.435.409.279,00	-	-	-	-	28.067.687.532,00
1.984.931.151,00	-	178.249.594,00	1.355.919.076,00	430.736.010,00	1.964.904.680,00	-	-	-	-	9.693.593.932,00
52.073.709.493,00	1.237.911.179,00	380.812.075,00	1.273.259.875,00	54.951.415,00	2.946.934.544,00	-	-	-	-	204.257.429.176,14
70.411.403.445,00	226.893.646,00	318.018.100,00	31.821.483,00	253.300.769,00	830.033.998,00	-	-	-	-	145.181.065.102,96
22.452.553.281,00	-	31.335.107,00	257.563,00	-	31.592.670,00	68.250.000,00	-	68.250.000,00	-	23.913.934.888,00
1.381.172.494,00	247.732.289,00	4.016.667,00	3.489.167,00	-	255.238.123,00	-	-	-	-	2.399.232.861,00
687.481.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.781.486.438,00
793.265.940,00	-	-	-	15.347.386,00	15.347.386,00	-	-	-	-	4.145.076.001,00
420.745.802,00	-	-	10.006.208,00	-	10.006.208,00	-	-	-	-	2.058.182.509,00
4.541.990.255,00	8.912.025.074,00	1.259.153.971,00	46.548.704,00	74.262.357,00	10.291.990.106,00	-	101.350.000,00	101.350.000,00	-	23.194.198.542,00
3.130.169.144,00	242.137.400,00	1.405.259.364,00	37.300.895,00	78.064.462,00	1.762.762.121,00	-	-	-	-	11.336.674.960,50
8.546.427.155,00	3.549.765.470,00	646.247.747,00	380.411.481,00	595.099.460,00	5.171.524.158,00	-	-	-	-	25.407.544.904,40
1.098.853.741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.351.350.512,00
233.171.165,00	-	-	2.288.626,00	5.705.116,00	7.993.742,00	-	-	-	-	2.041.805.084,00
320.208.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.820.824.953,00
-	-	-	-	13.425.519,00	13.425.519,00	-	-	-	-	1.245.559.395,00
1.586.526.093,00	-	-	310.555,00	33.568.351,00	33.878.906,00	-	-	-	-	6.902.967.414,00
314.465.442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782.017.967,00
259.973.111,00	-	3.887.474,00	-	1.037.958,00	4.925.432,00	-	-	-	-	6.782.516.260,00
999.543.562,00	-	652.808.352,00	-	-	652.808.352,00	-	-	-	-	4.305.518.251,00
294.881.118,00	-	1.086.292,00	-	880.208,00	1.966.500,00	-	-	-	-	1.194.060.368,00
1.019.514.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.790.563.776,00
394.152.450,00	-	-	7.308.894,00	52.727.758,00	60.036.652,00	-	-	-	-	4.486.526.230,00
214.200.706.906,00	1.077.464.067.646,68	54.055.602.825,00	15.196.371.854,00	11.659.560.267,00	1.158.375.602.592,68	117.090.000,00	101.350.000,00	218.440.000,00	-	1.745.043.585.833,68

ASET LAINNYA					ASET LAINNYA
Aset Lain-Lain				Aset Tidak Berwujud	
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Aset yang dipinjampakaikan	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	JUMLAH ASET LAIN-LAIN		
520.629.189,00	-	-	520.629.189,00	-	520.629.189,00
5.219.502.370,00	4.332.716.557,00	-	9.552.218.927,00	103.239.583,00	9.655.458.510,00
222.209.000,00	294.525.000,00	-	516.734.000,00	-	516.734.000,00
84.856.833,00	201.870.000,00	-	286.726.833,00	-	286.726.833,00
83.938.041,00	216.973.000,00	-	300.911.041,00	-	300.911.041,00
188.007.902,00	303.525.000,00	-	491.532.902,00	-	491.532.902,00
126.683.000,00	164.445.000,00	-	291.128.000,00	-	291.128.000,00
98.005.417,00	114.435.000,00	-	212.440.417,00	-	212.440.417,00
56.371.750,00	168.585.000,00	-	224.956.750,00	-	224.956.750,00
176.371.332,00	212.708.000,00	-	389.079.332,00	-	389.079.332,00
155.271.334,00	317.835.000,00	-	473.106.334,00	-	473.106.334,00
180.568.437,00	343.440.000,00	-	524.008.437,00	-	524.008.437,00
95.278.400,00	292.395.000,00	-	387.673.400,00	-	387.673.400,00
16.638.197.095,00	-	3.114.107,00	16.641.311.202,00	-	16.641.311.202,00
76.260.706,00	-	-	76.260.706,00	-	76.260.706,00
1.267.664.363,00	160.500.000,00	-	1.428.164.363,00	188.335.858,00	1.616.500.221,00
21.202.617.916,25	106.250.000,00	-	21.308.867.916,25	341.621.908,00	21.650.489.824,25
9.591.271.635,56	-	-	9.591.271.635,56	770.779.005,00	10.362.050.640,56
266.249.480,00	-	-	266.249.480,00	-	266.249.480,00
304.837.208,00	-	-	304.837.208,00	-	304.837.208,00
1.180.668.320,00	-	-	1.180.668.320,00	-	1.180.668.320,00
562.908.175,00	-	-	562.908.175,00	94.393.216,00	657.301.391,00
449.637.587,00	-	-	449.637.587,00	46.090.625,00	495.728.212,00
2.942.140.450,00	-	-	2.942.140.450,00	-	2.942.140.450,00
897.257.096,00	-	-	897.257.096,00	-	897.257.096,00
169.572.562,00	-	-	169.572.562,00	-	169.572.562,00
1.693.520.596,00	-	-	1.693.520.596,00	1.329.562.584,00	3.023.083.180,00
322.988.606,00	-	-	322.988.606,00	-	322.988.606,00
270.046.047,00	-	-	270.046.047,00	-	270.046.047,00
871.743.063,00	-	-	871.743.063,00	-	871.743.063,00
1.992.099.896,00	411.266.000,00		2.403.365.896,00		2.403.365.896,00
160.106.813,00	-	-	160.106.813,00	-	160.106.813,00
264.942.819,00	-	-	264.942.819,00	2.750.000,00	267.692.819,00
1.105.941.075,00	-	-	1.105.941.075,00	-	1.105.941.075,00
588.870.574,00	-	-	588.870.574,00	113.416.667,00	702.287.241,00
177.635.229,00	-	-	177.635.229,00	9.358.750,00	186.993.979,00
415.132.000,00	-	-	415.132.000,00	169.422.238,00	584.554.238,00
70.620.002.316,81	7.641.468.557,00	3.114.107,00	78.264.584.980,81	3.168.970.434,00	81.433.555.414,81

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Nilai Buku 2025

Lampiran : 28

NO.	OPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN							
			Alat Besar	Alat Angkutan	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Pertanian	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Alat Laboratorium
1	Sekretariat DPRD	4.134.014.572,00	8.008.928,00	1.984.321.429,00	-	-	350.011.835,00	107.315.798,00	-	-
2	Sekretariat Daerah	402.743.162.850,00	1.428.570,00	2.686.158.447,00	-	-	1.744.392.747,00	233.749.376,00	2.666.667,00	4.413.706,00
3	Kec. Pulau Punjung	987.500.000,00	-	-	-	-	10.462.500,00	-	-	-
4	Kec. Sitiung	1.000.000.000,00	-	29.306.234,00	-	-	13.583.333,00	4.116.667,00	-	-
5	Kec. Koto Baru	1.488.000.000,00	-	41.387.435,00	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Sungai Rumbai	1.000.000.000,00	-	29.306.234,00	-	-	-	-	-	-
7	Kec. Sembilan Koto	17.875.000,00	-	1.575.000,00	-	-	-	-	-	868.305,00
8	Kec. Timpeh	374.152.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Padang Laweh	20.020.000,00	-	31.197.157,00	-	-	5.014.583,00	-	-	-
10	Kec Tiumang	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kec Koto Besar	461.087.771,00	-	29.306.234,00	-	-	8.730.207,00	1.837.500,00	-	-
12	Kec Koto Salak	25.000.000,00	-	130.540.494,00	-	-	-	-	-	440.000,00
13	Kec. Asam Jujuhan	71.500.000,00	59.524,00	-	-	-	366.667,00	-	-	-
14	Dinas PUPR	162.688.092.953,00	926.297.596,00	19.170.833,00	82.797.484,00	-	1.230.086.103,00	541.926.190,00	-	160.454.293,00
15	Dinas PERKIMTAN	6.507.885.160,00	-	3.942.856,00	-	-	252.656.400,00	9.791.667,00	-	-
16	Dinas Perhubungan	5.953.500.000,00	-	505.452.381,00	2.691.483,00	-	28.877.082,00	3.159.167,00	-	-
17	Dinas Kesehatan	14.658.694.960,00	471.510.818,00	7.288.426.408,00	1.784.583,00	-	2.377.897.635,00	2.719.122.090,00	23.912.901.782,76	5.133.945.889,16
18	Dinas Pendidikan	24.816.997.724,00	58.649.618,00	125.453.025,00	42.386.709,00	469.492.934,00	5.636.524.119,00	342.527.574,00	925.750,00	2.556.996.914,00
19	Dinas BUDPARPORA	1.115.335.010,00	71.428,00	448.500,00	-	-	73.861.075,00	1.935.000,00	-	14.980.000,00
20	Dinas TRANSSNAKER	2.121.000.000,00	-	-	-	-	20.681.899,00	-	-	3.281.250,00
21	DINSOSP3APPKB	-	3.157.143,00	716.596.224,00	-	-	53.127.989,65	67.518.000,00	-	-
22	DISDUKCAPIL	200.000.000,00	-	91.773.727,00	-	-	79.611.198,00	49.057.117,00	-	1.815.000,00
23	Dinas PMD	-	-	201.851.428,00	-	-	23.243.749,00	-	-	-
24	Dinas Pertanian	11.539.094.583,00	-	60.961.922,00	6.819.583,00	-	30.313.752,00	6.829.743,00	-	9.054.917,00
25	Dinas Pangan dan Perikanan	1.281.870.882,00	2.792.360,00	-	-	8.093.750,00	38.099.392,00	-	-	-
26	Dinas KUMPERDAG	1.301.340.000,00	587.791.723,00	-	1.878.188.483,60	-	28.907.750,00	168.727.854,00	-	609.912.936,20
27	BKD	-	-	121.034.106,00	-	-	115.100.481,00	97.761.637,00	-	458.333,00
28	DPMPTSP	-	-	18.737.427,00	-	-	22.164.740,00	5.762.000,00	408.333,00	26.667,00
29	Inspektorat Kabupaten	-	-	906.814.291,00	-	-	60.299.062,00	-	-	-
30	BAPPPEDA	-	2.091.837,00	123.415.477,00	-	-	27.390.386,00	-	-	-
31	DLH	4.089.200.000,00	515.542.027,00	365.395.845,00	12.620.000,00	975.000,00	51.932.753,00	237.045.849,00	-	47.589.289,00
32	Badan KESBANGPOL	-	-	-	-	-	34.095.183,00	-	-	-
33	Dinas SATPOL PP dan DAMKAR	-	-	-	-	-	15.978.409,00	1.080.000,00	-	334.272.055,00
34	BPBD	-	-	87.084.197,00	13.329.434,00	-	7.179.833,00	19.608.333,00	-	-
35	BKPSDM	-	-	-	-	-	12.150.000,00	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	940.833,00	-	450.432.303,00	41.584.166,00	4.750.000,00	24.240.626,00
37	Dinas KOMINFO	-	-	609.286,00	-	-	15.804.999,00	234.145.081,00	-	-
	Jumlah	648.670.324.008,00	2.577.401.572,00	15.600.266.597,00	2.041.558.592,60	478.561.684,00	12.818.978.164,65	4.894.600.809,00	23.921.652.532,76	8.902.750.180,36

ASET TETAP											
								PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN		
Alat Persenjataan	Komputer	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	Alat Keselamatan Kerja	Alat Peraga	Peralatan Proses/Produksi	Rambu - Rambu	Peralatan Olah Raga		Bangunan Gedung	Monumen	Bangunan Menara
-	79.849.136,00	-	-	-	-	-	-	2.529.507.126,00	31.606.733.486,00	-	-
-	331.061.100,00	17.740.833,00	-	-	-	-	-	5.021.611.446,00	34.878.588.627,06	31.827.155,00	-
-	13.020.833,00	-	-	-	-	-	-	23.483.333,00	593.380.525,00	-	-
-	23.783.332,00	-	-	-	-	-	-	70.789.566,00	319.900.393,00	-	-
-	7.908.333,00	-	-	-	-	-	-	49.295.768,00	941.063.809,00	-	-
-	9.687.500,00	-	-	-	-	-	-	38.993.734,00	816.364.591,00	-	-
-	16.449.167,00	-	-	-	-	-	-	18.892.472,00	-	-	-
-	15.423.149,00	-	-	-	-	-	-	15.423.149,00	2.146.367.960,00	-	-
-	10.695.833,00	-	-	-	-	-	-	46.907.573,00	883.901.817,00	-	-
-	19.249.999,00	-	-	-	-	-	-	19.249.999,00	1.908.264.589,00	-	-
-	7.666.666,00	-	-	-	-	-	-	47.540.607,00	1.574.790.051,00	-	-
-	17.729.167,00	-	-	-	-	-	-	148.709.661,00	1.521.080.479,00	-	-
-	5.534.375,00	-	-	-	-	-	-	5.960.566,00	2.122.786.638,00	-	-
-	213.483.019,00	-	-	-	-	-	-	3.174.215.518,00	102.615.408.150,00	138.086.523,00	2.330.130.280,00
-	12.203.542,00	-	-	-	-	-	-	278.594.465,00	40.614.968.090,00	-	-
-	115.215.104,00	-	-	-	-	182.825.226,00	-	838.220.443,00	3.279.188.811,00	-	-
81.454.167,00	1.265.335.913,00	-	-	-	65.625.000,00	-	-	43.318.004.285,92	224.281.969.614,58	54.883.907,00	-
227.158.551,00	7.977.705.626,04	-	193.687.836,00	3.383.333,00	23.378.541,00	-	85.490.878,00	17.743.761.408,04	301.422.791.947,57	5.284.345.062,00	-
-	80.820.373,00	-	-	-	-	-	-	172.116.376,00	80.565.956.538,85	-	-
-	33.156.249,00	-	-	-	-	-	-	57.119.398,00	2.192.684.602,00	-	-
-	42.725.417,00	-	-	-	-	-	-	883.124.773,65	4.552.153.357,78	-	-
-	94.950.211,00	-	-	-	-	-	-	317.207.253,00	604.676.762,00	-	-
-	18.385.824,00	-	-	-	-	-	-	243.481.001,00	175.295.343,00	-	-
1.225.000,00	23.039.253,00	-	-	-	-	-	-	138.244.170,00	10.591.410.967,30	-	-
-	51.606.250,00	-	-	-	-	-	-	100.591.752,00	5.695.995.691,00	-	-
-	62.959.991,00	-	-	-	-	-	-	3.336.488.737,80	39.900.970.888,74	-	-
-	361.147.207,00	-	-	-	-	-	-	695.501.764,00	4.545.237.759,00	-	-
-	52.413.085,00	-	-	-	-	-	-	99.512.252,00	733.454.835,00	-	-
-	93.609.055,00	-	-	-	-	-	-	1.060.722.408,00	1.391.648.664,00	-	-
-	55.027.083,00	-	-	-	-	-	-	207.924.783,00	-	-	-
20.591.878,00	50.673.251,00	-	-	-	-	-	-	1.302.365.892,00	5.834.372.259,39	21.458.333,00	-
-	19.144.792,00	-	-	-	-	-	-	53.239.975,00	104.740.465,00	-	-
-	-	-	88.410.414,00	-	-	-	-	439.740.878,00	147.185.480,00	-	-
-	46.174.541,00	-	-	-	-	-	-	173.376.338,00	279.190.207,00	-	-
-	49.444.791,00	-	-	-	-	-	-	61.594.791,00	469.129.000,00	-	-
-	102.160.416,00	-	-	-	-	-	-	624.108.344,00	11.986.712.063,00	-	-
-	76.384.875,00	-	-	-	-	-	-	326.944.241,00	1.687.117.717,00	-	-
330.429.596,00	11.455.824.458,04	17.740.833,00	282.098.250,00	3.383.333,00	89.003.541,00	182.825.226,00	85.490.878,00	83.682.566.247,41	922.985.482.178,27	5.530.600.980,00	2.330.130.280,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA				
		Jalan Dan Jembatan	Bangunan Air	Instalasi	Jaringan		Bahan Perpustakaan	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Hewan	Biota Perairan	Tanaman
-	31.606.733.486,00	-	-	2.011.985.364,00	1.662.480.108,00	3.674.465.472,00	43.091.000,00	-	-	-	-
2.594.067.832,00	37.504.483.614,06	-	35.761.167,00	162.853.775,00	3.116.186.529,00	3.314.801.471,00	-	-	-	42.000.000,00	-
-	593.380.525,00	-	-	5.181.458,00	-	5.181.458,00	-	-	-	-	-
-	319.900.393,00	-	-	-	5.953.958,00	5.953.958,00	-	-	-	-	-
41.219.514,00	982.283.323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.977.965,00	834.342.556,00	-	-	6.480.235,00	652.773,00	7.133.008,00	1.425.000,00	-	-	-	-
174.408.652,00	174.408.652,00	-	-	11.216.666,00	-	11.216.666,00	-	-	-	-	1.500.000,00
39.757.000,00	2.186.124.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172.960.359,00	1.056.862.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.857.261,00	1.944.121.850,00	-	-	-	436.042,00	436.042,00	-	-	-	-	-
-	1.574.790.051,00	-	-	11.001.667,00	-	11.001.667,00	-	-	-	-	-
-	1.521.080.479,00	-	-	1.103.125,00	-	1.103.125,00	-	-	-	-	-
-	2.122.786.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651.214.686,00	105.734.839.639,00	241.219.168.478,64	150.470.443.309,66	21.347.173.409,00	26.949.753.807,00	439.986.539.004,30	684.493.000,00	-	-	-	-
136.590.538,00	40.751.558.628,00	2.621.018.206,00	127.286.159,00	-	77.947.114,00	2.826.251.479,00	-	-	-	-	-
-	3.279.188.811,00	-	47.006.925,00	4.231.544.078,00	2.072.335.352,00	6.350.886.355,00	-	-	-	-	-
2.548.919.037,90	226.885.772.559,48	722.360.450,37	1.299.642.919,00	6.160.388.316,00	615.986.625,00	8.798.378.310,37	53.564.720,00	-	-	-	-
11.934.923.118,19	318.642.060.127,76	40.549.154,00	153.804.400,00	84.218.441,00	728.412.395,00	1.006.984.390,00	47.425.151.392,00	2.602.784.878,00	-	-	-
776.551.758,00	81.342.508.296,85	-	125.933.893,00	2.248.437,00	-	128.182.330,00	-	-	-	-	-
-	2.192.684.602,00	192.159.211,00	5.983.333,00	8.360.833,00	-	206.503.377,00	-	-	-	-	-
263.048.470,00	4.815.201.827,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	604.676.762,00	-	-	-	36.756.114,00	36.756.114,00	1.774.000,00	-	-	-	-
-	175.295.343,00	-	-	16.383.792,00	-	16.383.792,00	-	-	-	-	-
1.692.755.420,00	12.284.166.387,30	212.794.763,05	2.372.739.721,00	77.043.136,00	163.338.643,00	2.825.916.263,05	-	-	307.400.000,00	-	53.427.000,00
132.511.812,00	5.828.507.503,00	-	2.646.547.497,59	59.601.105,00	115.770.738,00	2.821.919.340,59	1.489.000,00	-	-	53.400.000,00	10.625.000,00
2.439.489.091,93	42.340.459.980,67	3.222.553.390,00	511.210.904,00	1.654.321.841,00	3.668.299.638,93	9.056.385.773,93	-	-	-	-	-
-	4.545.237.759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	733.454.835,00	-	-	2.653.874,00	3.682.884,00	6.336.758,00	6.019.850,00	-	-	-	-
-	1.391.648.664,00	-	-	-	-	-	6.131.710,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	35.027.481,00	35.027.481,00	1.827.500,00	-	-	-	-
339.542.190,00	6.195.372.782,39	-	-	8.289.445,00	88.685.449,00	96.974.894,00	56.123.400,00	-	-	-	-
-	104.740.465,00	-	-	-	-	-	36.500,00	-	-	-	-
-	147.185.480,00	-	4.393.526,00	-	2.398.042,00	6.791.568,00	-	-	-	-	-
-	279.190.207,00	-	11.587.348.242,00	-	-	11.587.348.242,00	-	-	-	-	-
173.666.887,00	642.795.887,00	-	3.408.708,00	-	1.619.792,00	5.028.500,00	-	-	-	-	-
-	11.986.712.063,00	-	-	-	-	-	1.113.055.428,00	-	-	-	-
-	1.687.117.717,00	-	-	17.991.106,00	79.195.042,00	97.186.148,00	256.265.625,00	-	-	-	-
24.165.461.592,02	955.011.675.030,29	248.230.603.653,06	169.391.510.704,25	35.880.040.103,00	39.424.918.526,93	492.927.072.987,24	49.650.448.125,00	2.602.784.878,00	307.400.000,00	95.400.000,00	65.552.000,00

				ASET LAINNYA					
	ASET TETAP LAINNYA	KDP	Jumlah	Aset Lain-Lain				Aset Tidak Berwujud	ASET LAINNYA
Aset Tetap Dalam Renovasi				Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainn	Aset yang dipinjampakaikan	Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	JUMLAH ASET LAIN-LAIN		
-	43.091.000,00	-	41.987.811.656,00	68.639.232,00	-	-	68.639.232,00	-	68.639.232,00
59.800.000,00	101.800.000,00	-	448.685.859.381,06	582.479.512,00	976.270.771,00	-	1.558.750.283,00	42.510.417,00	1.601.260.700,00
-	-	-	1.609.545.316,00	2.045.000,00	-	-	2.045.000,00	-	2.045.000,00
-	-	-	1.396.643.917,00	6.972.687,00	-	-	6.972.687,00	-	6.972.687,00
-	-	-	2.519.579.091,00	29.565.759,00	-	-	29.565.759,00	-	29.565.759,00
-	1.425.000,00	-	1.881.894.298,00	8.815.098,00	-	-	8.815.098,00	-	8.815.098,00
102.550.000,00	104.050.000,00	-	326.442.790,00	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00	-	2.350.000,00
-	-	-	2.575.700.652,00	4.446.533,00	-	-	4.446.533,00	-	4.446.533,00
-	-	-	1.123.789.749,00	983.000,00	-	-	983.000,00	-	983.000,00
-	-	-	2.038.807.891,00	1.236.668,00	-	-	1.236.668,00	-	1.236.668,00
-	-	-	2.094.420.096,00	3.382.000,00	-	-	3.382.000,00	-	3.382.000,00
-	-	-	1.695.893.265,00	279.578.563,00	-	-	279.578.563,00	-	279.578.563,00
-	-	-	2.200.247.204,00	2.687.500,00	-	-	2.687.500,00	-	2.687.500,00
-	684.493.000,00	2.728.043.582,00	714.996.223.696,30	9.928.371.227,83	-	1.865.349.893,00	11.793.721.120,83	-	11.793.721.120,83
-	-	199.620.000,00	50.563.909.732,00	45.692.144,00	-	-	45.692.144,00	-	45.692.144,00
-	-	-	16.421.795.609,00	815.270.811,00	-	206.300.000,00	1.021.570.811,00	203.458.142,00	1.225.028.953,00
-	53.564.720,00	3.009.045.011,00	296.723.459.846,77	5.712.439.824,35	191.250.000,00	-	5.903.689.824,35	26.362.092,00	5.930.051.916,35
-	50.027.936.270,00	89.383.589,00	412.327.123.508,80	9.434.505.817,28	-	-	9.434.505.817,28	154.603.387,00	9.589.109.204,28
-	-	-	82.758.142.012,85	530.027.641,00	-	-	530.027.641,00	117.746.541,00	647.774.182,00
-	-	-	4.577.307.377,00	88.429.650,00	-	-	88.429.650,00	-	88.429.650,00
-	-	-	5.698.326.601,43	319.459.912,00	-	-	319.459.912,00	-	319.459.912,00
-	1.774.000,00	-	1.160.414.129,00	18.743.639,00	-	-	18.743.639,00	48.286.353,00	67.029.992,00
288.520.000,00	288.520.000,00	-	723.680.136,00	21.871.668,00	-	-	21.871.668,00	6.584.375,00	28.456.043,00
149.130.000,00	509.957.000,00	-	27.297.378.403,35	2.306.716.036,00	-	-	2.306.716.036,00	-	2.306.716.036,00
-	65.514.000,00	-	10.098.403.477,59	355.805.704,00	-	-	355.805.704,00	-	355.805.704,00
-	-	-	56.034.674.492,40	387.507.371,00	-	-	387.507.371,00	-	387.507.371,00
-	-	-	5.240.739.523,00	32.929.731,00	-	-	32.929.731,00	625.016.816,00	657.946.547,00
-	6.019.850,00	-	845.323.695,00	14.988.044,00	-	-	14.988.044,00	-	14.988.044,00
-	6.131.710,00	-	2.458.502.782,00	290.088.443,00	-	-	290.088.443,00	-	290.088.443,00
-	1.827.500,00	-	244.779.764,00	69.859.565,00	-	-	69.859.565,00	-	69.859.565,00
-	56.123.400,00	-	11.740.036.968,39	225.948.130,00	-	-	225.948.130,00	-	225.948.130,00
-	36.500,00	-	158.016.940,00	7.959.887,00	-	-	7.959.887,00	-	7.959.887,00
-	-	-	593.717.926,00	45.826.279,00	-	-	45.826.279,00	4.750.000,00	50.576.279,00
-	-	-	12.039.914.787,00	58.646.525,00	-	-	58.646.525,00	-	58.646.525,00
-	-	-	709.419.178,00	3.322.083,00	-	-	3.322.083,00	28.583.333,00	31.905.416,00
-	1.113.055.428,00	-	13.723.875.835,00	13.668.351,00	-	-	13.668.351,00	65.511.250,00	79.179.601,00
-	256.265.625,00	-	2.367.513.731,00	5.115.000,00	-	-	5.115.000,00	316.397.137,00	321.512.137,00
600.000.000,00	53.321.585.003,00	6.026.092.182,00	2.239.639.315.457,94	31.726.375.035,46	1.167.520.771,00	2.071.649.893,00	34.965.545.699,46	1.639.809.843,00	36.605.355.542,46

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN ASET LAINNYA 2025

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1. Sekretariat DPRD											547.160.000,00	-
1	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000029	Mitstubishi Pajero Sport	2019	MK2KRWPNUKJ006142	4N15UDT4148	BA 1009 V		Pembelian	547.160.000,00	
2. Sekretariat Daerah											1.101.902.000,00	-
1	02.02.01.01.001	Sedan	000002	HONDA ACCORD VTIL AT	2016	MRHCR2640GP610428	K24W31601041	BA 1547 V		Pembelian	636.000.000,00	
2	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000056	Toyota Fortuner	2011	MHFYR59G7E0100100	2KDU669749	BA 2 V		Pembelian	465.902.000,00	
Jumlah Total											1.649.062.000,00	

-

REKAPITULASI BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
PIUTANG		81.437.826.006,53	583.229.399,00	15.547.115,00	44.825.284.823,38	33.915.251.007,66	71.101.854.474,81				23.028.096.746,72	20.240.059.431,31	2.788.037.315,40
Piutang Pajak		25.474.630.116,00	309.137.069,00	9.452.115,00	4.577.830.933,00	6.637.690.936,00	27.834.175.073,00				17.317.662.827,76	15.864.849.434,96	1.452.813.392,80
- PBB-P2	BKD	24.014.340.394,00	309.137.069,00	9.452.115,00	3.314.830.211,00	5.317.967.018,00	26.317.162.155,00				17.219.201.658,23	15.760.314.641,34	1.458.887.016,89
Tahun 1996 s.d 2013		-					-	> 5 tahun	macet	100,00%	-	-	-
Tahun 2014		2.787.194.071,00			27.200,00		2.787.166.871,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.787.166.871,00	2.787.194.071,00	27.200,00
Tahun 2015		2.297.578.736,00			141.443,00		2.297.437.293,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.297.437.293,00	2.297.578.736,00	141.443,00
Tahun 2016		2.165.401.946,00	37.936.342,00	-	15.667.733,00		2.187.670.555,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.187.670.555,00	2.165.401.946,00	22.268.609,00
Tahun 2017		1.955.210.022,00	6.519.721,00	-	13.893.014,00		1.947.836.729,00	> 5 tahun	macet	100,00%	1.947.836.729,00	1.955.210.022,00	7.373.293,00
Tahun 2018		2.229.454.596,00	50.536.754,00	-	14.973.789,00		2.265.017.561,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.265.017.561,00	2.229.454.596,00	35.562.965,00
Tahun 2019		1.994.473.506,00	125.931.109,00	-	15.462.910,00		2.104.941.705,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.104.941.705,00	997.236.753,00	1.107.704.952,00
Tahun 2020		2.172.631.698,00	-	849.848,00	21.127.533,00		2.150.654.317,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	1.075.327.158,50	1.086.315.849,00	10.988.690,50
Tahun 2021		1.981.623.505,00	34.238.210,00	-	38.607.994,00		1.977.253.721,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	988.626.860,50	990.811.752,50	2.184.892,00
Tahun 2022		2.059.573.139,00	41.863.128,00	-	51.858.206,00		2.049.578.061,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	512.394.515,25	1.029.786.569,50	517.392.054,25
Tahun 2023		2.099.666.847,00	12.111.805,00	-	65.495.694,00		2.046.282.958,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	511.570.739,50	209.966.684,70	301.604.054,80
Tahun 2024		2.271.532.328,00	-	1.905.705,00	152.503.935,00		2.117.122.688,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	529.280.672,00	11.357.661,64	517.923.010,36
Tahun 2025				6.696.562,00	2.925.070.760,00	5.317.967.018,00	2.386.199.696,00	< 1 tahun	lancar	0,50%	11.930.998,48		11.930.998,48
- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	BKD	1.250.349.347,00			1.250.349.347,00	1.313.490.012,00	1.313.490.012,00					6.251.746,74	- 6.251.746,74
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron		13.509.375,00	-	-	12.651.375,00	6.233.906,00	7.091.906,00				245.669,53	67.546,88	178.122,65
Tahun 2024	BKD	13.509.375,00			12.651.375,00		858.000,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	214.500,00	67.546,88	146.953,12
Tahun 2025, <1 tahun						6.233.906,00	6.233.906,00	< 1 tahun	lancar	0,50%	31.169,53		31.169,53
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	BKD	196.431.000,00					196.431.000,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	98.215.500,00	98.215.500,00	-
Piutang Retribusi		6.774.178.699,00	274.092.330,00	-	5.724.894.718,00	7.362.977.566,00	8.692.733.877,00		-	-	1.984.631.072,37	1.305.862.079,55	678.768.992,82
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dae		4.594.644.649,00	-	-	4.588.216.749,00	5.839.586.462,00	5.846.014.362,00				432.522.340,64	95.147.312,61	337.375.028,02
Tahun 2019	RSUD Sungai Dareh	5.784.900,00					5.784.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	5.784.900,00	5.784.900,00	-
Tahun 2024													
Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024		52.719.648,00			52.719.648,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	26.359.824,00	- 26.359.824,00
Klaim Pending obat kronis bulan September 2024		88.151.452,00			88.151.452,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	8.815.145,20	- 8.815.145,20
Klaim obat kronis bulan November 2024		182.261.788,00			182.261.788,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	18.226.178,80	- 18.226.178,80
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024		13.415.687,00			12.965.387,00		450.300,00	> 12 bulan	macet	100,00%	450.300,00	6.707.843,50	- 6.257.543,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024		13.411.275,00			13.218.575,00		192.700,00	> 12 bulan	macet	100,00%	192.700,00	6.705.637,50	- 6.512.937,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024		102.225,00			102.225,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	10.222,50	- 10.222,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024		445.900,00			445.900,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	44.590,00	- 44.590,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024		12.228.971,00			12.228.971,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	1.222.897,10	- 1.222.897,10
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024		65.437.328,00			65.437.328,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	327.186,64	- 327.186,64
Klaim Pelayanan Ambulance Tk Lanjutan bulan November 2024		1.468.000,00			1.468.000,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	146.800,00	- 146.800,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024		6.151.175,00			6.151.175,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	30.755,87	- 30.755,87
Klaim JKN bulan Desember 2024		4.153.066.300,00			4.153.066.300,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	20.765.331,50	- 20.765.331,50
Tahun 2025													
Klaim BPJTKerjaan bulan Desember 2025						39.582.832,00	39.582.832,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	197.914,16		197.914,16
Klaim JKN bulan Desember 2025						4.667.087.100,00	4.667.087.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	23.335.435,50		23.335.435,50
Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025						6.205.200,00	6.205.200,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	31.026,00		31.026,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025						23.624.145,00	23.624.145,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	118.120,73		118.120,73
Klaim JKN Kantong Darah bulan November 2025						4.320.000,00	4.320.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.080.000,00		1.080.000,00
Klaim BPJTKerjaan bulan November 2025						4.236.613,00	4.236.613,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.059.153,25		1.059.153,25
Klaim Jasaraharja bulan November 2025						60.764.126,00	60.764.126,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	15.191.031,50		15.191.031,50
Klaim Obat Kronis Nov 2025						263.942.221,00	263.942.221,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	65.985.555,25		65.985.555,25
Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025						97.991.980,00	97.991.980,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	24.497.995,00		24.497.995,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Oktober 2025						27.701.913,00	27.701.913,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	6.925.478,25		6.925.478,25
Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025						14.501.814,00	14.501.814,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.625.453,50		3.625.453,50
Klaim Jasaraharja bulan September 2025						41.380.610,00	41.380.610,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	10.345.152,50		10.345.152,50
Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025						81.687.316,00	81.687.316,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	20.421.829,00		20.421.829,00
Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025						6.951.717,00	6.951.717,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	3.475.858,50		3.475.858,50
Klaim JKN Pending bulan Agust 2025						439.887.700,00	439.887.700,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	219.943.850,00		219.943.850,00
Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025						23.117.460,00	23.117.460,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	11.558.730,00		11.558.730,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Juli 2025						114.920,00	114.920,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	57.460,00		57.460,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025					
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12					
Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025	RSUD Sungai Rumbai	403.487.539,00	197.757.330,00	-	601.244.869,00	8.096.700,00	8.096.700,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	4.048.350,00		4.048.350,00					
Klaim BPJTKerjaan bulan Juni 2025						12.946.181,00	12.946.181,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	6.473.090,50	6.473.090,50						
Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025						4.329.032,00	4.329.032,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	2.164.516,00	2.164.516,00						
Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025						11.116.882,00	11.116.882,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	5.558.441,00	5.558.441,00						
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah																	28.728.923,80	
Tahun 2024						403.487.539,00	197.757.330,00	601.244.869,00	-	-						15.394.147,94	-	15.394.147,94
Klaim Pending Oktober 2025										39.798.600,00	39.798.600,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	9.949.650,00			9.949.650,00
Klaim Pending 2 September 2025										17.438.800,00	17.438.800,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	4.359.700,00			4.359.700,00
Klaim Reguler Desember 2025										380.369.100,00	380.369.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.901.845,50			1.901.845,50
Klaim Pending November 2025										4.038.700,00	4.038.700,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.009.675,00			1.009.675,00
Klaim Obat Desember 2025										49.911.616,00	49.911.616,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	249.558,08			249.558,08
Klaim Ambulance Desember 2025										22.944.000,00	22.944.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	114.720,00			114.720,00
Klaim BPJS TK Pending November 2025										1.105.258,00	1.105.258,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	276.314,50			276.314,50
Klaim BPJS TK Desember 2025										4.860.281,00	4.860.281,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	24.301,41			24.301,41
Klaim Jasa Raharja Agustus 2025										2.367.324,00	2.367.324,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	1.183.662,00			1.183.662,00
Klaim Jasa Raharja November 2025										1.629.639,00	1.629.639,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	407.409,75			407.409,75
Klaim Radiologi Parsial 2025 Pelayanan Desember										260.000,00	260.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.300,00			1.300,00
Klaim Pending 2 Oktober 2025										471.800,00	471.800,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	117.950,00			117.950,00
Pelkes BPJS pending Desember 2025										29.860.100,00	29.860.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	149.300,50			149.300,50
Pelkes BPJS pending November 2 2025										72.133.200,00	72.133.200,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	18.033.300,00			18.033.300,00
Pelkes BPJS pending Desember 2 2025										12.697.700,00	12.697.700,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	63.488,50			63.488,50
Obat BPJS pending November 2025										25.123.586,00	25.123.586,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	6.280.896,50			6.280.896,50
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	PUSKESMAS :	433.262.000,00	68.127.000,00	-	497.764.000,00	546.138.200,00	549.763.200,00				88.234.495,00	34.891.065,00	53.343.430,00					
Tahun 2018	Sialang	2.125.000,00	9.462.000,00	45.975.000,00	141.885.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	2.125.000,00	2.125.000,00	-					
Tahun 2019	Sialang	1.500.000,00				1.500.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00	-						
Tahun 2024	Sungai Limau	27.050.000,00				-				-	2.705.000,00	-	2.705.000,00					
	Sitiung I	91.155.000,00				-				-	5.512.150,00	-	5.512.150,00					
	Tiumang	2.860.000,00				-				-	286.000,00	-	286.000,00					
	Silago	46.725.000,00				-				-	2.512.770,00	-	2.512.770,00					
	Sialang	2.952.000,00				-				-	295.200,00	-	295.200,00					
	Sitiung II	2.800.000,00				-				-	280.000,00	-	280.000,00					
	Padang Laweh	41.511.000,00				-				-	2.919.235,00	-	2.919.235,00					
	Koto Besar	-				-				-	-	-	-					
	Koto Baru	95.910.000,00				-				-	-	-	9.591.000,00	-	9.591.000,00			
	Sungai Rumbai	41.664.000,00				-				-	-	-	3.250.885,00	-	3.250.885,00			
	Gunung Medan	-				-				-	-	-	-	-	-			
	Sungai Dareh	5.808.000,00				-				-	-	-	378.640,00	-	378.640,00			
	Timpeh	28.020.000,00				-				-	-	-	1.255.400,00	-	1.255.400,00			
	Beringin Sakti	43.182.000,00				-				-	-	-	2.279.785,00	-	2.279.785,00			
Tahun 2025:																		
September - November 2025	Sungai Limau					30.919.000,00	30.919.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	7.729.750,00		7.729.750,00					
	Sitiung I					5.541.000,00	5.541.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.385.250,00		1.385.250,00					
	Tiumang					13.419.000,00	13.419.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.354.750,00		3.354.750,00					
	Silago					28.728.000,00	28.728.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	7.182.000,00		7.182.000,00					
	Sialang					8.492.000,00	8.492.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	2.123.000,00		2.123.000,00					
	Sitiung II					5.048.000,00	5.048.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.262.000,00		1.262.000,00					
	Padang Laweh					15.527.000,00	15.527.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.881.750,00		3.881.750,00					
	Koto Besar					20.771.200,00	20.771.200,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	5.192.800,00		5.192.800,00					
	Koto Baru					71.105.000,00	71.105.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	17.776.250,00		17.776.250,00					
	Sungai Rumbai					17.428.000,00	17.428.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	4.357.000,00		4.357.000,00					
	Gunung Medan					7.783.000,00	7.783.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.945.750,00		1.945.750,00					
	Sungai Dareh					12.493.000,00	12.493.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.123.250,00		3.123.250,00					
	Timpeh					42.328.000,00	42.328.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	10.582.000,00		10.582.000,00					
	Beringin Sakti					54.617.000,00	54.617.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	13.654.250,00		13.654.250,00					
Desember 2025	Sungai Limau					17.153.000,00	17.153.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	85.765,00		85.765,00					
	Sitiung I					39.890.000,00	39.890.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	199.450,00		199.450,00					
	Tiumang					-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-					
	Silago					29.840.000,00	29.840.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	149.200,00		149.200,00					
	Sialang					1.460.000,00	1.460.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	7.300,00		7.300,00					

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
	Sitiung II					4.799.000,00	4.799.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	23.995,00		23.995,00
	Padang Laweh					13.269.000,00	13.269.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	66.345,00		66.345,00
	Koto Besar					6.577.000,00	6.577.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	32.885,00		32.885,00
	Koto Baru					-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-
	Sungai Rumbai					30.974.000,00	30.974.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	154.870,00		154.870,00
	Gunung Medan					7.396.000,00	7.396.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	36.980,00		36.980,00
	Sungai Dareh					-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-
	Timpeh					34.075.000,00	34.075.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	170.375,00		170.375,00
	Beringin Sakti					26.506.000,00	26.506.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	132.530,00		132.530,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis September - November 2025	LABKESDA	-	-	-	-	6.380.000,00	6.380.000,00				1.595.000,00	-	1.595.000,00
						6.380.000,00	6.380.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.595.000,00		1.595.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Desember 2025	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	411.000,00	411.000,00				2.055,00	-	2.055,00
		-				411.000,00	411.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	2.055,00		2.055,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	169.624.261,00	-	-	-	-	169.624.261,00				169.624.261,00	169.624.261,00	-
Tahun 2015		21.296.361,00					21.296.361,00	> 12 bulan	macet	100,00%	21.296.361,00	21.296.361,00	-
Tahun 2017		6.050.000,00					6.050.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	6.050.000,00	6.050.000,00	-
Tahun 2019		-					-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	-	-
Tahun 2020		41.900.000,00					41.900.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	41.900.000,00	41.900.000,00	-
Tahun 2021		37.402.900,00					37.402.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	37.402.900,00	37.402.900,00	-
Tahun 2022		44.000.000,00					44.000.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	44.000.000,00	44.000.000,00	-
Tahun 2023		18.975.000,00					18.975.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	18.975.000,00	18.975.000,00	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Rumah Dinas)	DINAS PENDIDIKAN	47.841.000,00	-	-	-	27.564.000,00	75.405.000,00				56.962.260,00	47.841.000,00	9.121.260,00
Tahun 2017		7.927.000,00					7.927.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	7.927.000,00	7.927.000,00	-
Tahun 2018		26.131.000,00					26.131.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	26.131.000,00	26.131.000,00	-
Tahun 2019		13.783.000,00					13.783.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	13.783.000,00	13.783.000,00	-
Januari - Agustus 2025						13.725.000,00	13.725.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	6.862.500,00		6.862.500,00
September - November 2025						8.937.000,00	8.937.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	2.234.250,00		2.234.250,00
Desember 2025						4.902.000,00	4.902.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	24.510,00		24.510,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Rusunawa)	DINAS PERKIMTAN	13.112.000,00	-	-	7.403.600,00	11.250.000,00	16.958.400,00				8.549.650,00	3.237.500,00	5.312.150,00
Tahun 2023							-	> 12 bulan	macet	100,00%	-		-
Tahun 2023		1.612.000,00			903.600,00		708.400,00	> 12 bulan	macet	100,00%	708.400,00	1.612.000,00	903.600,00
Tahun 2024		11.500.000,00			6.500.000,00		5.000.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	5.000.000,00	1.625.500,00	3.374.500,00
Januari - Agustus 2025						3.300.000,00	3.300.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	1.650.000,00		1.650.000,00
September - November 2025						4.700.000,00	4.700.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	1.175.000,00		1.175.000,00
Desember 2025						3.250.000,00	3.250.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	16.250,00		16.250,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.618.000,00	8.208.000,00	-	9.326.000,00	53.342.000,00	60.842.000,00				15.092.680,00	2.591.390,00	12.501.290,00
Tahun 2022		900.000,00					900.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	900.000,00	900.000,00	-
Tahun 2023		1.600.000,00					1.600.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	1.600.000,00	1.600.000,00	-
Tahun 2024		6.118.000,00			6.118.000,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	91.390,00	91.390,00
Januari - Agustus 2025			8.208.000,00		3.208.000,00	14.210.000,00	19.210.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	9.605.000,00		9.605.000,00
September - November 2025						11.396.000,00	11.396.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	2.849.000,00		2.849.000,00
Desember 2025						27.736.000,00	27.736.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	138.680,00		138.680,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO Tahun 2023 Tahun 2024 Januari - Agustus 2025 September - November 2025 Desember 2025	Dinas KUMPERDAG	6.380.000,00 3.340.000,00 3.040.000,00	-	-	-	1.800.000,00	8.180.000,00 3.340.000,00 3.040.000,00 - 1.200.000,00 600.000,00	> 12 bulan > 12 bulan 3 - 12 bulan 1 - 3 bulan 0 s.d 1 bulan	macet macet diragukan kurang lancar lancar	100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 0,50%	6.683.000,00 3.340.000,00 3.040.000,00 - 300.000,00 3.000,00	4.588.000,00 3.340.000,00 1.248.000,00	2.095.000,00 - 1.792.000,00 - 300.000,00 3.000,00
Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Januari - Agustus 2025 September - November 2025 Desember 2025	DINAS PUPR	1.097.209.250,00 13.130.300,00 2.667.800,00 22.578.050,00 10.933.900,00 3.523.500,00 32.487.600,00 35.428.500,00 78.859.900,00 109.537.400,00 124.926.600,00 155.444.500,00 240.546.900,00 267.144.300,00	-	-	20.939.500,00	217.876.200,00	1.294.145.950,00 13.130.300,00 2.667.800,00 22.578.050,00 10.933.900,00 3.523.500,00 32.487.600,00 35.428.500,00 78.859.900,00 109.537.400,00 124.926.600,00 155.444.500,00 238.333.000,00 248.418.700,00 135.853.200,00 67.901.200,00 14.121.800,00	> 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan > 12 bulan 3 - 12 bulan 1 - 3 bulan 0 s.d 1 bulan	macet macet macet macet macet macet macet macet macet macet macet macet macet macet diragukan kurang lancar lancar	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 0,50%	1.161.242.259,00 13.130.300,00 2.667.800,00 22.578.050,00 10.933.900,00 3.523.500,00 32.487.600,00 35.428.500,00 78.859.900,00 109.537.400,00 124.926.600,00 155.444.500,00 238.333.000,00 248.418.700,00 67.926.600,00 16.975.300,00 70.609,00	932.547.403,00 13.130.300,00 2.667.800,00 22.578.050,00 10.933.900,00 3.523.500,00 32.487.600,00 35.428.500,00 78.859.900,00 109.537.400,00 124.926.600,00 155.444.500,00 240.546.900,00 102.482.453,00	228.694.856,00 - - - - - - - - - - - - - 2.213.900,00 145.936.247,00 67.926.600,00 16.975.300,00 70.609,00
Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2024 Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 21 Maret 2025) Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2025 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 24 Februari 2026 Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2025 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 12 Maret 2026	BKD BKD BKD BKD	5.529.319.459,00 14.972.830,00 5.514.346.629,00	-	-	5.529.319.459,00 14.972.830,00 5.514.346.629,00	5.058.604.307,00	5.058.604.307,00 - 16.636.220,00 5.041.968.087,00	 0 s.d 1 bulan 0 s.d 1 bulan	 lancar lancar	 0,50% 0,50%	- - -	27.646.597,30 74.864,15 27.571.733,15	- - -
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Lain-Lain PAD atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 Tahun 2024 Januari - Agustus 2025 September - November 2025 Desember 2025 Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2023 Tahun 2024 Januari - Agustus 2025	DINAS PERKIMTAN DINAS PERKIMTAN	6.818.492.334,53 146.000,00 146.000,00 471.500,00 160.000,00 311.500,00	- - -	6.095.000,00 - -	746.686.315,38 114.800,00 114.800,00 176.000,00 90.000,00 86.000,00	1.070.590.416,66 99.600,00 19.200,00 48.000,00 32.400,00 400.000,00 251.500,00	7.136.301.435,81 130.800,00 - 31.200,00 19.200,00 48.000,00 32.400,00 695.500,00 70.000,00 225.500,00 251.500,00	> 12 bulan > 12 bulan 3 - 12 bulan 1 - 3 bulan 0 s.d 1 bulan > 12 bulan > 12 bulan 3 - 12 bulan	macet macet diragukan kurang lancar lancar macet macet diragukan	100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 0,50% 100,00% 100,00% 50,00%	3.725.797.213,34 52.962,00 - 31.200,00 9.600,00 12.000,00 162,00 450.412,50 70.000,00 225.500,00 125.750,00	3.041.699.022,11 13.288,00 13.288,00 258.305,00 160.000,00 98.305,00	684.098.191,23 39.674,00 17.912,00 9.600,00 12.000,00 162,00 192.107,50 - 127.195,00 125.750,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
September - November 2025 Desember 2025						116.000,00 32.500,00	116.000,00 32.500,00	1 - 3 bulan 0 s.d 1 bulan	kurang lancar lancar	25,00% 0,50%	29.000,00 162,50		29.000,00 162,50
Piutang Dana Bergulir	BKD	554.897.679,00					554.897.679,00	> 12 bulan	macet	100,00%	554.897.679,00	554.897.679,00	-
Piutang TGR	BKD	6.257.847.164,53	-	6.095.000,00	745.395.515,38	1.070.090.816,66	6.576.447.465,81	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	3.166.266.168,84	2.481.399.759,11	684.866.409,73
Tahun 2024		6.257.847.164,52743		6.095.000,00	163.134.954,99		6.088.617.209,54				3.044.308.604,77	2.481.399.759,11	562.908.845,66
Tahun 2025							-						-
Tahun 2025 SKP2KS telah jatuh tempo (lebih 90 hari)					582.260.560,39	1.070.090.816,66	487.830.256,27	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	121.957.564,07		121.957.564,07
Tahun 2025 SKP2KS belum jatuh tempo (kurang dari 90 hari)							-	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	-		-
Piutang kelebihan pembayaran dana Parpol	BKD	5.129.991,00			1.000.000,00		4.129.991,00	> 12 bulan	macet	100,00%	4.129.991,00	5.129.991,00	- 1.000.000,00
Piutang Transfer pemerintah pusat	BKD	15.091.731.000,00	-	-	6.497.079.000,00	-	8.594.652.000,00				-	-	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan		1.920.212.000,00			826.662.000,00		1.093.550.000,00						
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		3.223.000,00			1.388.000,00		1.835.000,00						
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		4.603.000,00			1.982.000,00		2.621.000,00						
DBH SDA Minyak Bumi		1.325.304.000,00			570.551.000,00		754.753.000,00						
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty		11.826.791.000,00			5.091.503.000,00		6.735.288.000,00						
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		11.598.000,00			4.993.000,00		6.605.000,00						
Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya		21.749.014.918,00	-	-	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	13.784.261.132,00				-	-	-
DBH Pajak Provinsi	BKD	21.749.014.918,00	-	-	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	13.784.261.132,00				-	-	-
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3.801.253.820,00			3.801.253.820,00		-						
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		1.528.623.806,00			1.528.623.806,00		-						
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		16.321.017.625,00			16.321.017.625,00	13.770.526.155,00	13.770.526.155,00						
Pendaaptan Pajak Air Permukaan (PAP)		98.119.667,00			98.119.667,00	13.734.977,00	13.734.977,00						
Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		459.480,00	-	-	459.480,00	1.126.650,00	1.126.650,00				5.633,25	2.297,40	3.335,85
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	PUSKESMAS	459.480,00	-	-	459.480,00	1.126.650,00	1.126.650,00				5.633,25	2.297,40	3.335,85
Tahun 2024							-						-
September - November 2025	Sungai Limau	13.802,00			13.802,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	69,01	69,01
	Sitiung I	35.545,00			35.545,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	177,73	177,73
	Tiumang	21.333,00			21.333,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	106,67	106,67
	Silago	15.220,00			15.220,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	76,10	76,10
	Sialang	13.748,00			13.748,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	68,74	68,74
	Sitiung II	39.138,00			39.138,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	195,69	195,69
	Padang Laweh	72.450,00			72.450,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	362,25	362,25
	Koto Besar	44.012,00			44.012,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	220,06	220,06
	Koto Baru	65.741,00			65.741,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	328,71	328,71
	Sungai Rumbai	62.577,00			62.577,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	312,89	312,89
	Gunung Medan	29.671,00			29.671,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	148,36	148,36
	Sungai Dareh	5.704,00			5.704,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	28,52	28,52
	Timpeh	18.942,00			18.942,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	94,71	94,71
	Beringin Sakti	21.597,00			21.597,00		-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	107,99	107,99
Tahun 2025:													
September - November 2025	Sungai Limau					6.912,00	6.912,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	34,56		34,56
	Sitiung I					130.020,00	130.020,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	650,10		650,10
	Tiumang					19.251,00	19.251,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	96,26		96,26
	Silago					77.800,00	77.800,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	389,00		389,00
	Sialang					87.458,00	87.458,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	437,29		437,29
	Sitiung II					68.079,00	68.079,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	340,40		340,40
	Padang Laweh					36.548,00	36.548,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	182,74		182,74
	Koto Besar					103.907,00	103.907,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	519,54		519,54
	Koto Baru					95.415,00	95.415,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	477,08		477,08

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan an	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
	Sungai Rumbai					48.923,00	48.923,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	244,62		244,62
	Gunung Medan					44.744,00	44.744,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	223,72		223,72
	Sungai Dareh					281.766,00	281.766,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.408,83		1.408,83
	Timpeh					79.121,00	79.121,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	395,61		395,61
	Beringin Sakti					46.706,00	46.706,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	233,53		233,53

REKAPITULASI BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
PIUTANG		81.437.826.006,53	583.229.399,00	15.547.115,00	44.825.284.823,38	33.915.251.007,66	71.101.854.474,81				23.028.096.746,72	20.240.059.431,31	2.788.037.315,40
Piutang Pajak		25.474.630.116,00	309.137.069,00	9.452.115,00	4.577.830.933,00	6.637.690.936,00	27.834.175.073,00				17.317.662.827,76	15.864.849.434,96	1.452.813.392,80
- PBB-P2	BKD	24.014.340.394,00	309.137.069,00	9.452.115,00	3.314.830.211,00	5.317.967.018,00	26.317.162.155,00				17.219.201.658,23	15.760.314.641,34	1.458.887.016,89
Tahun 1996 s.d 2013		-	-	-	-	-	-	> 5 tahun	macet	100,00%	-	-	-
Tahun 2014		2.787.194.071,00	-	-	27.200,00	-	2.787.166.871,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.787.166.871,00	2.787.194.071,00	27.200,00
Tahun 2015		2.297.578.736,00	-	-	141.443,00	-	2.297.437.293,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.297.437.293,00	2.297.578.736,00	141.443,00
Tahun 2016		2.165.401.946,00	37.936.342,00	-	15.667.733,00	-	2.187.670.555,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.187.670.555,00	2.165.401.946,00	22.268.609,00
Tahun 2017		1.955.210.022,00	6.519.721,00	-	13.893.014,00	-	1.947.836.729,00	> 5 tahun	macet	100,00%	1.947.836.729,00	1.955.210.022,00	7.373.293,00
Tahun 2018		2.229.454.596,00	50.536.754,00	-	14.973.789,00	-	2.265.017.561,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.265.017.561,00	2.229.454.596,00	35.562.965,00
Tahun 2019		1.994.473.506,00	125.931.109,00	-	15.462.910,00	-	2.104.941.705,00	> 5 tahun	macet	100,00%	2.104.941.705,00	1.997.236.753,00	1.107.704.952,00
Tahun 2020		2.172.631.698,00	-	849.848,00	21.127.533,00	-	2.150.654.317,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	1.075.327.158,50	1.086.315.849,00	10.988.680,50
Tahun 2021		1.981.623.505,00	34.238.210,00	-	38.607.994,00	-	1.977.253.721,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	988.626.860,50	990.811.752,50	2.184.892,00
Tahun 2022		2.059.573.139,00	41.863.128,00	-	51.858.206,00	-	2.049.578.061,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	512.394.515,25	1.029.786.569,50	517.392.054,25
Tahun 2023		2.099.666.847,00	12.111.805,00	-	65.495.694,00	-	2.046.282.958,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	511.570.739,50	209.966.684,70	301.604.054,80
Tahun 2024		2.271.532.328,00	-	1.905.705,00	152.503.935,00	-	2.117.122.688,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	529.280.672,00	11.357.661,64	517.923.010,36
Tahun 2025		-	-	6.696.562,00	2.925.070.760,00	-	2.386.199.696,00	< 1 tahun	lancar	0,50%	11.930.998,48	-	11.930.998,48
- PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	BKD	1.250.349.347,00	-	-	1.250.349.347,00	1.313.490.012,00	1.313.490.012,00					6.251.746,74	6.251.746,74
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	BKD	13.509.375,00	-	-	12.651.375,00	6.233.906,00	7.091.906,00				245.669,53	67.546,88	178.122,65
Tahun 2024	BKD	13.509.375,00	-	-	12.651.375,00	6.233.906,00	7.091.906,00	1 s.d 3 tahun	kurang lancar	25,00%	214.500,00	67.546,88	146.953,12
Tahun 2025, <1 tahun		-	-	-	-	-	6.233.906,00	< 1 tahun	lancar	0,50%	31.169,53	-	31.169,53
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	BKD	196.431.000,00	-	-	-	-	196.431.000,00	3 s.d 5 tahun	diragukan	50,00%	98.215.500,00	98.215.500,00	-
Piutang Retribusi		6.774.178.699,00	274.092.330,00	-	5.724.894.718,00	7.362.977.566,00	8.692.733.877,00				1.984.631.072,37	1.305.862.079,55	678.768.992,82
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum D		4.594.644.649,00	-	-	4.588.216.749,00	5.839.586.462,00	5.846.014.362,00				432.522.340,64	95.147.312,61	337.375.028,02
Tahun 2019	RSUD Sungai Dareh	5.784.900,00	-	-	-	-	5.784.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	5.784.900,00	5.784.900,00	-
Tahun 2024		-	-	-	-	-	-				-	-	-
Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024		52.719.648,00	-	-	52.719.648,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	26.359.824,00	26.359.824,00
Klaim Pending obat kronis bulan September 2024		88.151.452,00	-	-	88.151.452,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	8.815.145,20	8.815.145,20
Klaim obat kronis bulan November 2024		182.261.788,00	-	-	182.261.788,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	18.226.178,80	18.226.178,80
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024		13.415.687,00	-	-	12.965.387,00	-	450.300,00	> 12 bulan	macet	100,00%	450.300,00	6.707.843,50	6.257.543,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024		13.411.275,00	-	-	13.218.575,00	-	192.700,00	> 12 bulan	macet	100,00%	192.700,00	6.705.637,50	6.512.937,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024		102.225,00	-	-	102.225,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	10.222,50	10.222,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024		445.900,00	-	-	445.900,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	44.590,00	44.590,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024		12.228.971,00	-	-	12.228.971,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	1.222.897,10	1.222.897,10
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024		65.437.328,00	-	-	65.437.328,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	327.186,64	327.186,64
Klaim Pelayanan Ambulance Tk Lanjutan bulan November 2024		1.468.000,00	-	-	1.468.000,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	146.800,00	146.800,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024		6.151.175,00	-	-	6.151.175,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	30.755,87	30.755,87
Klaim JKN bulan Desember 2024		4.153.066.300,00	-	-	4.153.066.300,00	-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	20.765.331,50	20.765.331,50
Tahun 2025		-	-	-	-	-	-				-	-	-
Klaim BPJT Kerjaan bulan Desember 2025		-	-	-	-	39.582.832,00	39.582.832,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	197.914,16	-	197.914,16
Klaim JKN bulan Desember 2025		-	-	-	-	4.667.087.100,00	4.667.087.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	23.335.435,50	-	23.335.435,50
Klaim PT TKA an Sawir bulan Desember 2025		-	-	-	-	6.205.200,00	6.205.200,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	31.026,00	-	31.026,00
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2025		-	-	-	-	23.624.145,00	23.624.145,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	118.120,73	-	118.120,73
Klaim JKN Kantong Darah bulan November 2025		-	-	-	-	4.320.000,00	4.320.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.080.000,00	-	1.080.000,00
Klaim BPJT Kerjaan bulan November 2025		-	-	-	-	4.236.613,00	4.236.613,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.059.153,25	-	1.059.153,25
Klaim Jasaraharja bulan November 2025		-	-	-	-	60.764.126,00	60.764.126,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	15.191.031,50	-	15.191.031,50
Klaim Obat Kronis Nov 2025		-	-	-	-	263.942.221,00	263.942.221,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	65.985.555,25	-	65.985.555,25
Klaim Pending Obat Kronis Oktober 2025		-	-	-	-	97.991.980,00	97.991.980,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	24.497.995,00	-	24.497.995,00
Klaim BPJT Kerjaan bulan Oktober 2025		-	-	-	-	27.701.913,00	27.701.913,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	6.925.478,25	-	6.925.478,25
Klaim Jasaraharja bulan Oktober 2025		-	-	-	-	14.501.814,00	14.501.814,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.625.453,50	-	3.625.453,50
Klaim Jasaraharja bulan September 2025		-	-	-	-	41.380.610,00	41.380.610,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	10.345.152,50	-	10.345.152,50
Klaim Pending Obat Kronis bulan sept 2025		-	-	-	-	81.687.316,00	81.687.316,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	20.421.829,00	-	20.421.829,00
Klaim Pending Obat Kronis bulan Agust 2025		-	-	-	-	6.951.717,00	6.951.717,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	3.475.858,50	-	3.475.858,50
Klaim JKN Pending bulan Agust 2025		-	-	-	-	439.887.700,00	439.887.700,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	219.943.850,00	-	219.943.850,00
Klaim Jasaraharja bulan Agustus 2025		-	-	-	-	23.117.460,00	23.117.460,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	11.558.730,00	-	11.558.730,00
Klaim BPJT Kerjaan bulan Juli 2025		-	-	-	-	114.920,00	114.920,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	57.460,00	-	57.460,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
Klaim JKN Susulan bulan Juli 2025						8.096.700,00	8.096.700,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	4.048.350,00		4.048.350,00
Klaim BPJTKerjaan bulan Juni 2025						12.946.181,00	12.946.181,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	6.473.090,50		6.473.090,50
Klaim Jasaraharja bulan Juni 2025						4.329.032,00	4.329.032,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	2.164.516,00		2.164.516,00
Klaim Jasaraharja bulan Mei 2025						11.116.882,00	11.116.882,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	5.558.441,00		5.558.441,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Sungai Rumbai	403.487.539,00	197.757.330,00	-	601.244.869,00	665.009.704,00	665.009.704,00				44.123.071,74	15.394.147,94	28.728.923,80
Tahun 2024		403.487.539,00	197.757.330,00		601.244.869,00		-				-	15.394.147,94	-
Klaim Pending Oktober 2025						39.798.600,00	39.798.600,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	9.949.650,00		9.949.650,00
Klaim Pending 2 September 2025						17.438.800,00	17.438.800,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	4.359.700,00		4.359.700,00
Klaim Reguler Desember 2025						380.369.100,00	380.369.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.901.845,50		1.901.845,50
Klaim Pending November 2025						4.038.700,00	4.038.700,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.009.675,00		1.009.675,00
Klaim Obat Desember 2025						49.911.616,00	49.911.616,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	249.558,08		249.558,08
Klaim Ambulance Desember 2025						22.944.000,00	22.944.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	114.720,00		114.720,00
Klaim BPJS TK Pending November 2025						1.105.258,00	1.105.258,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	276.314,50		276.314,50
Klaim BPJS TK Desember 2025						4.860.281,00	4.860.281,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	24.301,41		24.301,41
Klaim Jasa Raharja Agustus 2025						2.367.324,00	2.367.324,00	3 - 12 bulan	Diragukan	50,00%	1.183.662,00		1.183.662,00
Klaim Jasa Raharja November 2025						1.629.639,00	1.629.639,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	407.409,75		407.409,75
Klaim Radiologi Parsial 2025 Pelayanan Desember						260.000,00	260.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.300,00		1.300,00
Klaim Pending 2 Oktober 2025						471.800,00	471.800,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	117.950,00		117.950,00
Pelkes BPJS pending Desember 2025						29.860.100,00	29.860.100,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	149.300,50		149.300,50
Pelkes BPJS pending November 2 2025						72.133.200,00	72.133.200,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	18.033.300,00		18.033.300,00
Pelkes BPJS pending Desember 2 2025						12.697.700,00	12.697.700,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	63.488,50		63.488,50
Obat BPJS pending November 2025						25.123.586,00	25.123.586,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	6.280.896,50		6.280.896,50
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	PUSKESMAS :	433.262.000,00	68.127.000,00	-	497.764.000,00	546.138.200,00	549.763.200,00				88.234.495,00	34.891.065,00	53.343.430,00
Tahun 2018	Sialang	2.125.000,00					2.125.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	2.125.000,00	2.125.000,00	-
Tahun 2019	Sialang	1.500.000,00					1.500.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	1.500.000,00	1.500.000,00	-
Tahun 2024	Sungai Limau	27.050.000,00	9.462.000,00		36.512.000,00	-	-				-	2.705.000,00	-
	Sitiung I	91.155.000,00			91.155.000,00	-	-				-	5.512.150,00	-
	Tiumang	2.860.000,00			2.860.000,00	-	-				-	286.000,00	-
	Silago	46.725.000,00			46.725.000,00	-	-				-	2.512.770,00	-
	Sialang	2.952.000,00			2.952.000,00	-	-				-	295.200,00	-
	Sitiung II	2.800.000,00			2.800.000,00	-	-				-	280.000,00	-
	Padang Laweh	41.511.000,00			41.511.000,00	-	-				-	2.919.235,00	-
	Koto Besar	-			-	-	-				-	-	-
	Koto Baru	95.910.000,00	45.975.000,00		141.885.000,00	-	-				-	9.591.000,00	-
	Sungai Rumbai	41.664.000,00	4.635.000,00		46.299.000,00	-	-				-	3.250.885,00	-
	Gunung Medan	-	8.055.000,00		8.055.000,00	-	-				-	-	-
	Sungai Dareh	5.808.000,00			5.808.000,00	-	-				-	378.640,00	-
	Timpeh	28.020.000,00			28.020.000,00	-	-				-	1.255.400,00	-
	Beringin Sakti	43.182.000,00			43.182.000,00	-	-				-	2.279.785,00	-
Tahun 2025:													
September - November 2025	Sungai Limau					30.919.000,00	30.919.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	7.729.750,00		7.729.750,00
	Sitiung I					5.541.000,00	5.541.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.385.250,00		1.385.250,00
	Tiumang					13.419.000,00	13.419.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.354.750,00		3.354.750,00
	Silago					28.728.000,00	28.728.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	7.182.000,00		7.182.000,00
	Sialang					8.492.000,00	8.492.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	2.123.000,00		2.123.000,00
	Sitiung II					5.048.000,00	5.048.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.262.000,00		1.262.000,00
	Padang Laweh					15.527.000,00	15.527.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.881.750,00		3.881.750,00
	Koto Besar					20.771.200,00	20.771.200,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	5.192.800,00		5.192.800,00
	Koto Baru					71.105.000,00	71.105.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	17.776.250,00		17.776.250,00
	Sungai Rumbai					17.428.000,00	17.428.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	4.357.000,00		4.357.000,00
	Gunung Medan					7.783.000,00	7.783.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.945.750,00		1.945.750,00
	Sungai Dareh					12.493.000,00	12.493.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	3.123.250,00		3.123.250,00
	Timpeh					42.328.000,00	42.328.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	10.582.000,00		10.582.000,00
	Beringin Sakti					54.617.000,00	54.617.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	13.654.250,00		13.654.250,00
Desember 2025	Sungai Limau					17.153.000,00	17.153.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	85.765,00		85.765,00
	Sitiung I					39.890.000,00	39.890.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	199.450,00		199.450,00
	Tiumang					-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-
	Silago					29.840.000,00	29.840.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	149.200,00		149.200,00
	Sialang					1.460.000,00	1.460.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	7.300,00		7.300,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
	Sitiung II					4.799.000,00	4.799.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	23.995,00		23.995,00
	Padang Laweh	13.269.000,00				13.269.000,00	13.269.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	66.345,00		66.345,00
	Koto Besar	6.577.000,00				6.577.000,00	6.577.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	32.885,00		32.885,00
	Koto Baru	-				-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-
	Sungai Rumbai	30.974.000,00				30.974.000,00	30.974.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	154.870,00		154.870,00
	Gunung Medan	7.396.000,00				7.396.000,00	7.396.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	36.980,00		36.980,00
	Sungai Dareh	-				-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-		-
	Timpeh	34.075.000,00				34.075.000,00	34.075.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	170.375,00		170.375,00
	Beringin Sakti	26.506.000,00				26.506.000,00	26.506.000,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	132.530,00		132.530,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis		-	-	-	-	6.380.000,00	6.380.000,00				1.595.000,00	-	1.595.000,00
September - November 2025	LABKESDA					6.380.000,00	6.380.000,00	1 - 3 bulan	Kurang Lancar	25,00%	1.595.000,00		1.595.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	411.000,00	411.000,00				2.055,00	-	2.055,00
Desember 2025		-				411.000,00	411.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	2.055,00		2.055,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	169.624.261,00	-	-	-	-	169.624.261,00				169.624.261,00	169.624.261,00	-
Tahun 2015		21.296.361,00					21.296.361,00	> 12 bulan	macet	100,00%	21.296.361,00	21.296.361,00	-
Tahun 2017		6.050.000,00					6.050.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	6.050.000,00	6.050.000,00	-
Tahun 2019		-				-	-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	-	-
Tahun 2020		41.900.000,00					41.900.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	41.900.000,00	41.900.000,00	-
Tahun 2021		37.402.900,00					37.402.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	37.402.900,00	37.402.900,00	-
Tahun 2022		44.000.000,00					44.000.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	44.000.000,00	44.000.000,00	-
Tahun 2023		18.975.000,00					18.975.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	18.975.000,00	18.975.000,00	-
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Rumah Dinas)	DINAS PENDIDIKAN	47.841.000,00	-	-	-	27.564.000,00	75.405.000,00				56.962.260,00	47.841.000,00	9.121.260,00
Tahun 2017		7.927.000,00					7.927.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	7.927.000,00	7.927.000,00	-
Tahun 2018		26.131.000,00					26.131.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	26.131.000,00	26.131.000,00	-
Tahun 2019		13.783.000,00					13.783.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	13.783.000,00	13.783.000,00	-
Januari - Agustus 2025						13.725.000,00	13.725.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	6.862.500,00		6.862.500,00
September - November 2025						8.937.000,00	8.937.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	2.234.250,00		2.234.250,00
Desember 2025						4.902.000,00	4.902.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	24.510,00		24.510,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Rusunawa)	DINAS PERKIMTAN	13.112.000,00	-	-	7.403.600,00	11.250.000,00	16.958.400,00				8.549.650,00	3.237.500,00	5.312.150,00
Tahun 2023							-	> 12 bulan	macet	100,00%	-		-
Tahun 2023		1.612.000,00			903.600,00		708.400,00	> 12 bulan	macet	100,00%	708.400,00	1.612.000,00	903.600,00
Tahun 2024		11.500.000,00			6.500.000,00		5.000.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	5.000.000,00	1.625.500,00	3.374.500,00
Januari - Agustus 2025						3.300.000,00	3.300.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	1.650.000,00		1.650.000,00
September - November 2025						4.700.000,00	4.700.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	1.175.000,00		1.175.000,00
Desember 2025						3.250.000,00	3.250.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	16.250,00		16.250,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.618.000,00	8.208.000,00	-	9.326.000,00	53.342.000,00	60.842.000,00				15.092.680,00	2.591.390,00	12.501.290,00
Tahun 2022		900.000,00					900.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	900.000,00	900.000,00	-
Tahun 2023		1.600.000,00					1.600.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	1.600.000,00	1.600.000,00	-
Tahun 2024		6.118.000,00			6.118.000,00		-	> 12 bulan	macet	100,00%	-	91.390,00	91.390,00
Januari - Agustus 2025			8.208.000,00		3.208.000,00	14.210.000,00	19.210.000,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	9.605.000,00		9.605.000,00
September - November 2025						11.396.000,00	11.396.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	2.849.000,00		2.849.000,00
Desember 2025						27.736.000,00	27.736.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	138.680,00		138.680,00

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025	
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12	
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	Dinas KUMPERDAG	6.380.000,00	-	-	-	1.800.000,00	8.180.000,00				6.683.000,00	4.588.000,00	2.095.000,00	
Tahun 2023		3.340.000,00					3.340.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	3.340.000,00	3.340.000,00	-	
Tahun 2024		3.040.000,00					3.040.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	3.040.000,00	1.248.000,00	1.792.000,00	
Januari - Agustus 2025							-	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	-		-	
September - November 2025						1.200.000,00	1.200.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	300.000,00		300.000,00	
Desember 2025						600.000,00	600.000,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	3.000,00		3.000,00	
Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah)	DINAS PUPR	1.097.209.250,00	-	-	20.939.500,00	217.876.200,00	1.294.145.950,00				1.161.242.259,00	932.547.403,00	228.694.856,00	
Tahun 2012		13.130.300,00					13.130.300,00	> 12 bulan	macet	100,00%	13.130.300,00	13.130.300,00	-	
Tahun 2013		2.667.800,00					2.667.800,00	> 12 bulan	macet	100,00%	2.667.800,00	2.667.800,00	-	
Tahun 2014		22.578.050,00					22.578.050,00	> 12 bulan	macet	100,00%	22.578.050,00	22.578.050,00	-	
Tahun 2015		10.933.900,00					10.933.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	10.933.900,00	10.933.900,00	-	
Tahun 2016		3.523.500,00					3.523.500,00	> 12 bulan	macet	100,00%	3.523.500,00	3.523.500,00	-	
Tahun 2017		32.487.600,00					32.487.600,00	> 12 bulan	macet	100,00%	32.487.600,00	32.487.600,00	-	
Tahun 2018		35.428.500,00					35.428.500,00	> 12 bulan	macet	100,00%	35.428.500,00	35.428.500,00	-	
Tahun 2019		78.859.900,00					78.859.900,00	> 12 bulan	macet	100,00%	78.859.900,00	78.859.900,00	-	
Tahun 2020		109.537.400,00					109.537.400,00	> 12 bulan	macet	100,00%	109.537.400,00	109.537.400,00	-	
Tahun 2021		124.926.600,00					124.926.600,00	> 12 bulan	macet	100,00%	124.926.600,00	124.926.600,00	-	
Tahun 2022		155.444.500,00					155.444.500,00	> 12 bulan	macet	100,00%	155.444.500,00	155.444.500,00	-	
Tahun 2023		240.546.900,00			2.213.900,00		238.333.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	238.333.000,00	240.546.900,00	-	
Tahun 2024		267.144.300,00			18.725.600,00		248.418.700,00	> 12 bulan	macet	100,00%	248.418.700,00	102.482.453,00	145.936.247,00	
Januari - Agustus 2025						135.853.200,00	135.853.200,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	67.926.600,00		67.926.600,00	
September - November 2025						67.901.200,00	67.901.200,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	16.975.300,00		16.975.300,00	
Desember 2025						14.121.800,00	14.121.800,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	70.609,00		70.609,00	
Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	BKD	5.529.319.459,00	-	-	5.529.319.459,00	5.058.604.307,00	5.058.604.307,00				-	27.646.597,30	-	27.646.597,30
Penerimaan atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2024	BKD	14.972.830,00			14.972.830,00		-	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	-	74.864,15	-	74.864,15
Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 21 Maret 2025)	BKD	5.514.346.629,00			5.514.346.629,00		-	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	-	27.571.733,15	-	27.571.733,15
Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2025 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 24 Februari 2026	BKD					16.636.220,00	16.636.220,00						-	
Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2025 yang uangnya sudah masuk ke Kas daerah tanggal 12 Maret 2026	BKD					5.041.968.087,00	5.041.968.087,00						-	
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	DINAS PERKIMTAN	6.818.492.334,53	-	6.095.000,00	746.686.315,38	1.070.590.416,66	7.136.301.435,81				3.725.797.213,34	3.041.699.022,11	684.098.191,23	
Potongan, atau Bentuk Lain		146.000,00	-	-	114.800,00	99.600,00	130.800,00				52.962,00	13.288,00	39.674,00	
Tahun 2023							-	> 12 bulan	macet	100,00%	-		-	
Tahun 2024		146.000,00			114.800,00		31.200,00	> 12 bulan	macet	100,00%	31.200,00	13.288,00	17.912,00	
Januari - Agustus 2025						19.200,00	19.200,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	9.600,00		9.600,00	
September - November 2025						48.000,00	48.000,00	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	12.000,00		12.000,00	
Desember 2025						32.400,00	32.400,00	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	162,00		162,00	
Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	DINAS PERKIMTAN	471.500,00	-	-	176.000,00	400.000,00	695.500,00				450.412,50	258.305,00	192.107,50	
Tahun 2023		160.000,00			90.000,00		70.000,00	> 12 bulan	macet	100,00%	70.000,00	160.000,00	-	90.000,00
Tahun 2024		311.500,00			86.000,00		225.500,00	> 12 bulan	macet	100,00%	225.500,00	98.305,00	127.195,00	
Januari - Agustus 2025						251.500,00	251.500,00	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	125.750,00		125.750,00	

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
September - November 2025 Desember 2025						116.000,00 32.500,00	116.000,00 32.500,00	1 - 3 bulan 0 s.d 1 bulan	kurang lancar lancar	25,00% 0,50%	29.000,00 162,50		29.000,00 162,50
Piutang Dana Bergulir	BKD	554.897.679,00					554.897.679,00	> 12 bulan	macet	100,00%	554.897.679,00	554.897.679,00	-
Piutang TGR	BKD	6.257.847.164,53	-	6.095.000,00	745.395.515,38	1.070.090.816,66	6.576.447.465,81	3 - 12 bulan	diragukan	50,00%	3.166.266.168,84	2.481.399.759,11	684.866.409,73
Tahun 2024		6.257.847.164,52743		6.095.000,00	163.134.954,99		6.088.617.209,54				3.044.308.604,77	2.481.399.759,11	562.908.845,66
Tahun 2025							-				-		-
Tahun 2025 SKP2KS telah jatuh tempo (lebih 90 hari)					582.260.560,39	1.070.090.816,66	487.830.256,27	1 - 3 bulan	kurang lancar	25,00%	121.957.564,07		121.957.564,07
Tahun 2025 SKP2KS belum jatuh tempo (kurang dari 90 hari)							-	0 s.d 1 bulan	lancar	0,50%	-		-
Piutang kelebihan pembayaran dana Parpol	BKD	5.129.991,00			1.000.000,00		4.129.991,00	> 12 bulan	macet	100,00%	4.129.991,00	5.129.991,00	- 1.000.000,00
Piutang Transfer pemerintah pusat	BKD	15.091.731.000,00	-	-	6.497.079.000,00	-	8.594.652.000,00				-	-	-
DBH Pajak Bumi dan Bangunan		1.920.212.000,00			826.662.000,00		1.093.550.000,00						
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		3.223.000,00			1.388.000,00		1.835.000,00						
DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)		4.603.000,00			1.982.000,00		2.621.000,00						
DBH SDA Minyak Bumi		1.325.304.000,00			570.551.000,00		754.753.000,00						
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty		11.826.791.000,00			5.091.503.000,00		6.735.288.000,00						
DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		11.598.000,00			4.993.000,00		6.605.000,00						
Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya		21.749.014.918,00	-	-	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	13.784.261.132,00				-	-	-
DBH Pajak Provinsi	BKD	21.749.014.918,00	-	-	21.749.014.918,00	13.784.261.132,00	13.784.261.132,00				-	-	-
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		3.801.253.820,00			3.801.253.820,00		-						
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		1.528.623.806,00			1.528.623.806,00		-						
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		16.321.017.625,00			16.321.017.625,00	13.770.526.155,00	13.770.526.155,00						
Pendaaptan Pajak Air Permukaan (PAP)		98.119.667,00			98.119.667,00	13.734.977,00	13.734.977,00						
Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		459.480,00	-	-	459.480,00	1.126.650,00	1.126.650,00				5.633,25	2.297,40	3.335,85
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	PUSKESMAS	459.480,00	-	-	459.480,00	1.126.650,00	1.126.650,00				5.633,25	2.297,40	3.335,85
Tahun 2024							-						-
September - November 2025	Sungai Limau	13.802,00			13.802,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	69,01	69,01
	Sitiung I	35.545,00			35.545,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	177,73	177,73
	Tiumang	21.333,00			21.333,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	106,67	106,67
	Silago	15.220,00			15.220,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	76,10	76,10
	Sialang	13.748,00			13.748,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	68,74	68,74
	Sitiung II	39.138,00			39.138,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	195,69	195,69
	Padang Laweh	72.450,00			72.450,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	362,25	362,25
	Koto Besar	44.012,00			44.012,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	220,06	220,06
	Koto Baru	65.741,00			65.741,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	328,71	328,71
	Sungai Rumbai	62.577,00			62.577,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	312,89	312,89
	Gunung Medan	29.671,00			29.671,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	148,36	148,36
	Sungai Dareh	5.704,00			5.704,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	28,52	28,52
	Timpeh	18.942,00			18.942,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	94,71	94,71
	Beringin Sakti	21.597,00			21.597,00	-	-	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	-	107,99	107,99
Tahun 2025:													
September - November 2025	Sungai Limau					6.912,00	6.912,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	34,56		34,56
	Sitiung I					130.020,00	130.020,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	650,10		650,10
	Tiumang					19.251,00	19.251,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	96,26		96,26
	Silago					77.800,00	77.800,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	389,00		389,00
	Sialang					87.458,00	87.458,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	437,29		437,29
	Sitiung II					68.079,00	68.079,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	340,40		340,40
	Padang Laweh					36.548,00	36.548,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	182,74		182,74
	Koto Besar					103.907,00	103.907,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	519,54		519,54
	Koto Baru					95.415,00	95.415,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	477,08		477,08

Uraian	SKPD	Jumlah Piutang Per 31 Desember 2024	Koreksi penambahan pencatatan Piutang	Koreksi pengurangan pencatatan Piutang	Penerimaan 2025	Piutang baru 2025	Nilai Piutang per 31 Desember 2025	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Penyisihan Piutang 2025	Penyisihan Piutang 2024	TOTAL Beban Penyisihan Piutang 2025
1	2	3	4	4	5	6	7=3+4-5+6	8	9	10	11=7*10	12	13=11-12
	Sungai Rumbai					48.923,00	48.923,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	244,62		244,62
	Gunung Medan					44.744,00	44.744,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	223,72		223,72
	Sungai Dareh					281.766,00	281.766,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	1.408,83		1.408,83
	Timpeh					79.121,00	79.121,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	395,61		395,61
	Beringin Sakti					46.706,00	46.706,00	0 s.d 1 bulan	Lancar	0,50%	233,53		233,53

